SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
b. bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025, maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana pembangunan daerah pada tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025, meliputi:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
h. Dinas Lingkungan Hidup;
i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
o. Dinas Tenaga Kerja;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
r. Dinas Perhubungan;
s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
t. Satuan Polisi Pamong Praja;
u. Dinas Perumahan dan Permukiman;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
x. Badan Pendapatan Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
dd. Kecamatan Bogor Tengah;
ee. Kecamatan Bogor Selatan;
ff. Kecamatan Bogor Barat;
gg. Kecamatan Bogor Utara;
hh. Kecamatan Bogor Timur;
ii. Kecamatan Tanah Sareal.

3. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Juli 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026, mengusung tema “Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”, yang dijabarkan ke dalam

tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan.

RENJA Perubahan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung tema Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 didasari oleh permasalahan dan tantangan terkait sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur dan implementasi Reformasi Birokrasi. Dari beberapa permasalahan tersebut maka ditetapkanlah isu strategis Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 yaitu Pembangunan Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Akuntabilitas, pelayanan publik, dan Inovasi sebagai langkah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada tanggal 20 Februari 2025 dilantik Wali Kota Bogor periode 2025-2030, dengan Visi “Bogor Beres, Bogor Lancar” untuk menjadi arah Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2025-2029.

Pada awal Januari 2025 terbit Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan untuk merealokasi APBD 2025 ke 7 (tujuh) prioritas terkait Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan Cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Adapun lingkup perubahan meliputi: penambangan/pengurangan sub kegiatan; perubahan target kinerja baik IKU RPD/RPJMD, IKU Renstra, IKK outcome atau output; Perubahan Struktur Anggaran Belanja dan Kegiatan; Penyesuaian output pada sub kegiatan yang terkait dengan DAK, Dana Insentif Fisikal, DBHCHT, dan sebagainya; Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru yang medukung sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan penyusunan rancangan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025.

1.2. MAKSUD PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA 2025

Penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, sesuai dengan hal-hal yang melatarbelakangi adanya Perubahan RENJA 2025, agar pelaksanaan APBD 2025 efisien dan efektif. Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2025 disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Tujuan disusunnya Perubahan RENJA Tahun 2025 adalah untuk:

1. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan berdasarkan urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dasar Pertimbangan dilakukan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2025 meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2024 dan capaian kinerja pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama;
2. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian target sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024, dengan mempertimbangkan hasil dari refocusing APBD Tahun 2024;
3. Terdapat arah kebijakan pada tingkat pusat dan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Tahun 2024;
5. Penambahan/pengurangan/pergeseran rincian sub kegiatan karena adanya efisiensi dan penuntasan prioritas pembangunan;
6. Perubahan Pagu Program/kegiatan/subkegiatan seiring dengan penambahan/pengurangan/ pergeseran sub kegiatan.

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
40. Peraturan Dareah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
48. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
50. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
51. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
52. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor;
53. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026;
54. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
55. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomjor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kota Bogor Tahun 2025;
56. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-BKAD/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.100-Bkad/2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 53. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.12.1/Kep.134-Bkad/2025 Tentang Pengalihan Dan Penggunaan

Anggaran Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja , dasar hukum dan sistematika dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 DAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan perubahan sasaran prioritas pembangunan daerah, penyesuaian target indicator kinerja utama daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 serta perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 DAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Tahun 2024 merupakan tahapan jangka jangka menengah ke 5 yaitu pada periode RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024, dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Bogor kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa perumusan rancangan perubahan RENJA mencakup evaluasi pelaksanaan RENJA kabupaten/kota sampai dengan triwulan II. Evaluasi tersebut merupakan feedback bagi penyusunan dokumen perencanaan yang memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan hasil evaluasi RENJA Tahun 2025 Triwulan I.

2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 ditetapkan indikator sasaran pembangunan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ingin dicapai. Target dan sasaran dalam RENSTRA Tahun 2019-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Dalam dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025- 2026 juga telah ditetapkan target sasaran pembangunan/ IKU yang ingin dicapai. Namun, karena dokumen perubahan ini disusun pada triwulan II tahun 2025, IKU yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tersebut belum dapat dilihat realisasinya

pada triwulan I. Data yang disajikan dalam tabel di bawah ini adalah capaian IKU Kota Bogor Tahun 2024 yang masih mengacu pada dokumen RPJMD. Beberapa dari indikator IKU dalam RPJMD tersebut masih digunakan pada dokumen RPD.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Evaluasi
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	Poin	76.9	78.03	Tercapai
2	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	97.5	98.00	Tercapai
3	Indeks Kematangan Organisasi	Poin	48.7	50	Tercapai
4	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Poin	95.3	91,44	Tidak tercapai
5	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Poin	4.6	4.65	Tercapai
6	Persentase tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis	%	100%	100%	Tercapai
7	Nilai EKPPD	Poin	3.450	NA	NA
8	Persentase kelurahan berkinerja baik	%	91	91	Tercapai
9	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah	Poin	83.2	84.90	Tercapai
10	Persentase Kebijakan bidang pengelolaan bina mental spritual yg diimplementasikan	%	100	100	Tercapai
11	Persentase Kebijakan bidang kesejahteraan sosial yg diimplementasikan	%	91.67	100	Tercapai
12	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplemantasikan	%	100	100	Tercapai
13	Persentase sengketa tanah yg selesai sesuai SOP	%	87	100	Tercapai

Sumber : Setda Kota Bogor, diolah 2025

Bila dilihat pada tabel diatas, walaupun masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai targetnya, dan 1 (satu) indikator yang belum ada nilainya, namun hampir seluruhnya memiliki tingkat capaian 100 persen bahkan ada yang melebihi 100 persen. Dengan demikian, bila menggunakan standar

predikat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaiannya masuk predikat Tinggi. (78 persen ≤ 90 persen).

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 yang tidak tercapai

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keterangan Tidak Tercapai
1	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Tidak tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, ketatalaksanaan dan inovasi di perangkat daerah yang dijadikan sample penilaian oleh Lembaga Ombusman RI.
2	Nilai EKPPD	Nilai dari Kementerian Dalam Negeri RI baru diumumkan pada bulan April 2025

2.2. CAPAIAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIAMPU OLEH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi. Target capaian indikator kinerja kunci menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. IKK Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diampu oleh Sekretariat Daerah ada 1 (satu) indikator sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2024 yang diampu oleh Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Evaluasi	Bagian
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,55	3,64	Tercapai	Organisasi
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
A	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
1	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	PEKERJAAN UMUM					
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,0350	1,54	Tercapai	Kesejahteraan Rakyat
B	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**					
1	**PERTANAHAN**					
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100%	100%	Tercapai	Pemerintahan

2.3. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Berkenaan dengan penyusunan Rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah di bulan April, maka realisasi renja tahun berjalan adalah realisasi sampai dengan Triwulan I, sebagaimana Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**	**100**	**Persen**	**66,180,100**	**40**	**12,844,800**	**40.00%**	**19.41%**	Bagian Pemerintahan
	2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan aduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan**	**100**	**Persen**	**66,180,100**	**40**	**12,844,800**	**40.00%**	**19.41%**	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	66,180,100	**-**	**12,844,800**	**0.00%**	19.41%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**0.00%**	**19.41%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
2	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan yang ber-predikat Swasembada**	**4.4**	**Persen**	**212,782,103**	**0.00**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**Bagian Pemerintahan**
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan**	**100**	**Persen**	**212,782,103**	**0.00**	-	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun	68	Dokumen	73,710,000	**0.00**	-	0.00%	0.00%	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	139,072,103	**0.00**	-	0.00%	0.00%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**0.00%**	**0.00%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
3	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian Kerjasama**	**80**	**Persen**	**1,178,481,000**	**0**	**253,341,998**	**0.00%**	**21.50%**	**Bagian Pemerintahan**
			Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	**90**	**Persen**		**0**	**-**	**0.00%**		
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan**	**100**	**Persen**	**752,599,700**	**0**	**147,583,198**	**0.00%**	**19.61%**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti	**100**	**Persen**		**100**	-	100.00%		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	176,260,000	0	8,416,200	0.00%	4.77%	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	134,400,500	0	11,409,460	0.00%	8.49%	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	441,939,200	3	127,757,538	100.00%	28.91%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**33.33%**	**14.06%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**80**	**Persen**	**425,881,300**	**0**	**105,758,800**	**0.00%**	**24.83%**	
			Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	**80**	**Persen**		**0**	-	0.00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	123	Dokumen	235,303,500	50	92,927,700	40.65%	39.49%	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	Dokumen	134,043,000	0	11,507,900	0.00%	8.59%	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Dokumen	56,534,800	0	1,323,200	0.00%	2.34%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**13.55%**	**16.81%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
Rata-rata Capaian kinerja Program (%)									**23.44%**	**15.43%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
4	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100**	**Persen**	**2,133,529,600**	**52.4**	**672,564,002**	**52.40%**	**31.52%**	**Bagian Hukum dan HAM**
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	**100**	**Persen**		**15**		**15.00%**		
			Persentase penangan perkara (TUN dan Perdata) yang dapat diselesaikan	**100**	**Persen**		**26.67**		**26.67%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100**	**Persen**	**2,133,529,600**	**33.7**	**672,564,002**	**33.70%**	**31.52%**	
			Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan	**100**	**Persen**		**26.67**		**26.67%**		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500	Dokumen	512,215,400	262	299,660,920	52.40%	58.50%	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30	Kasus	1,437,859,400	8.00	311,005,282	26.67%	21.63%	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	100	Dokumen	183,454,800	15.00	61,897,800	15.00%	33.74%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**31.36%**	**37.96%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
5	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**87**	**Persen**	**32,434,592,757**	**16.66**	**7,367,002,424**	**19.15%**	**22.71%**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)	**1000**	**Orang**		**0.00**	**-**	**0.00%**		
			Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)	**3000**	**Orang**		**0.00**	**-**	**0.00%**		
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	**87**	**Persen**		**46.80**	**-**	**53.79%**		
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan**	**6**	**Dokumen**	**32,434,592,757**	**1.00**	**7,367,002,424**	16.67%	**22.71%**	
			Jumlah kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang diimplementasikan	**3**	**Dokumen**		**1.00**	**-**	33.33%		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Dokumen	16,862,131,845	1.00	7,143,526,424	33.33%	42.36%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	Dokumen	265,559,515	0.00	6,692,600	0.00%	2.52%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	Dokumen	15,306,901,397	**0**	216,783,400	0.00%	1,42%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**11.11%**	**15.43%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
6	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.3**	**Poin**	**92,622,000**	**0.00**	**37,016,200**	**0.00%**	**39.96%**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26**	**Poin**		**0.00**		**0.00%**		
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**11.7**	**Poin**		**0.00**		**0.00%**		
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**18.8**	**Poin**		**0.00**		**0.00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah	**100**	**Persen**		**0.00**	-	**0.00%**		
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100**	**Persen**	**92,622,000**	**50.00**	**37,016,200**	**50.00%**	**39.96%**	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	**100**	**Persen**		**42.86**		**42.86%**		
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	35,002,900	2.00	6,351,000	50.00%	18.14%	
	4.01.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	57,619,100	3.00	30,665,200	42.86%	53.22%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**46.43%**	**35.68%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
7	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah**	**100**	**Persen**	**156,339,100**	**19.22**	**6,884,048**	**19.22%**	**4.40%**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai perencanaan	**65**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.03.2.02	**Pengendalian Administrasi Pembangunan**	**Persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat waktu**	**100**	**Persen**	**156,339,100**	**25.00**	**6,884,048**	25.00%	**4.40%**	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	35,959,800	1.00	5,984,048	25.00%	16.64%	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	120,379,300	3.00	900,000	25.00%	0.75%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**25.00%**	**8.69%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
8	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan**	**73**	**Persen**	**321,836,700**	**0.00**	**30,498,600**	**0.00%**	**9.48%**	**Bagian Perekonomian**
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	**18**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	**67.5**	**Nilai**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	**75.9**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah kebijakan pembinaan UMKM yang diimplementasikan**	**6**	**Dokumen**	**321,836,700**	**0.00**	**30,498,600**	**0.00%**	**9.48%**	
			Jumlah kebijakan dan rekomendasi pengelolaan BUMD	**5**	**Dokumen**		**0.00**		0.00%		
			Jumlah Kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi daerah	**4**	**Dokumen**		**0.00**		0.00%		
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	Dokumen	194,289,000	0.00	16,209,000	0.00%	8.34%	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	74,805,700	0.00	11,127,100	0.00%	14.87%	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6	Dokumen	52,742,000	1.00	3,162,500	16.67%	6.00%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**5.56%**	**9.74%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
9	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25**	**75**	**Persen**	**819,002,668**	**8.50**	**109,304,230**	**11.33%**	**13.35%**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3.45**	**Poin**	**819,002,668**	**3.96**	**109,304,230**	**114.78%**	**13.35%**	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	440,056,980	3.00	52,630,400	25.00%	11.96%	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Dokumen	235,831,488	3.00	34,213,830	25.00%	14.51%	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	310	Orang	143,114,200	139	22,460,000	44.84%	15.69%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**31.61%**	**14.05%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
10	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai pelaporan kinerja PD minimal 12,2**	**50**	**Persen**	**391,239,200**	**0.00**	**96,718,030**	**0.00%**	**24.72%**	**Bagian Organisasi**
			Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi	**80.6**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif	**83.3**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35	**88.9**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase LKIP PD yang memenuhi 7 informasi sesuai Permenpan 53 tahun 2014**	**70**	**Persen**	**391,239,200**	**0.00**	**96,718,030**	**0.00%**	**24.72%**	
			Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	**43.7**	**Poin**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab dan ABK sesuai ketentuan	**27.8**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase Peningkatan Nilai SKM Perangkat Daerah	**1**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	14	Dokumen	96,749,500	0.00	32,979,300	0.00%	34.09%	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	Laporan	188,065,900	0.00	30,347,500	0.00%	16.14%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	Dokumen	106,423,800	1.00	33,391,230	25.00%	31.38%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**8.33%**	**27.20%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
11	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**Persen**	**84,973,828,108**	**0.00**	**20,034,994,841**	**0.00%**	**23.58%**	**Bagian Umum**
			Persentase pengelolaan BMD yang dikelola dengan ketentuan	**94**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	**100**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	**95**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94**	**Persen**		**0.00**		**0.00%**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87.1**	**Nilai**		**0.00**		**0.00%**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88.8**	**NIlai**		**0.00**		**0.00%**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**88.4**	**Nilai**		**0.00**		**0.00%**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88.4**	**Nilai**		**0.00**		**0.00%**		
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100**	**Persen**	**48,612,485,521**	**0.00**	**10,656,231,249**	0.00%	**21.92%**	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195	Org/Bulan	48,448,874,521	195.00	10,631,291,249	100.00%	21.94%	
	4.01.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	Laporan	163,611,000	3.00	24,940,000	21.43%	15.24%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**60.71%**	**18.59%**	
								Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Kepegawaan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**549,731,300**	**100.00**	**67,795,000**	**100.00%**	**12.33%**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	549,731,300	1.00	67,795,000	16.67%	12.33%	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**5,519,903,900**	**100.00**	**1,444,231,905**	**100.00%**	**26.16%**	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	179,980,900	1.00	60,300,000	100.00%	33.50%	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	1,418,694,900	1.00	337,334,500	100.00%	23.78%	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	2,636,602,000	3.00	673,458,000	33.33%	25.54%	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	247,085,100	1.00	151,410,800	50.00%	61.28%	
	4.01.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1,037,541,000	1.00	221,728,605	25.00%	21.37%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**61.67%**	**33.09%**	
Predikat kinerja									**Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**Persen**	**4,903,798,800**	**100.00**	**2,114,703,720**	**100.00%**	**43.12%**	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12	Paket	1,757,826,000	2.00	1,247,000,000	16.67%	70.94%	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9	Paket	328,842,000	9.00	327,456,720	100.00%	99.58%	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Paket	1,160,878,800	0.00	0	0.00%	0.00%	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Paket	1,656,252,000	11.00	540,247,000	44.00%	32.62%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**40.17%**	**50.78%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Rendah**	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**8,559,782,081**	**100.00**	**2,346,994,456**	**100.00%**	**27.42%**	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	84,039,300	0.00	0	0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2,519,411,947	1.00	539,144,258	100.00%	21.40%	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	987,382,730	1.00	389,766,000	100.00%	39.47%	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	4,968,948,104	3.00	1,418,084,198	25.00%	28.54%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**56.25%**	**22.35%**	
								Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**	
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100**	**Persen**	**7,886,910,162**	**100.00**	**759,243,499**	**100.00%**	**9.63%**	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	1,137,242,045	11.00	236,281,849	100.00%	20.78%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	1,292,440,909	34.00	55,121,150	100.00%	4.26%	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	199,983,024	45.00	82,253,000	45.00%	41.13%	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1800	Unit	1,270,399,384	310.00	219,124,000	17.22%	17.25%	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	3,537,562,400	0.00	166,463,500	0.00%	4.71%	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	449,282,400	0.00	0	0.00%	0.00%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**43.70%**	**14.69%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah'**	**100**	**Persen**	**4,052,194,944**	**100.00**	**780,209,483**	**100.00%**	**19.25%**	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	1,248,654,643	2.00	12,814,020	100.00%	1.03%	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	29	Paket	600,791,100	4.00	199,684,000	13.79%	33.24%	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Orang	46,484,800	0.00	0	0.00%	0.00%	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	2,156,264,401	2.00	567,711,463	100.00%	26.33%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**53.45%**	**15.15%**	
Predikat kinerja									**Rendah**	**Sangat Rendah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**	**100**	**Persen**	**4,889,021,400**	**100.00**	**1,865,585,529**	**100.00%**	**38.16%**	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	16	Paket	2,134,945,600	4.00	839,898,029	25.00%	39.34%	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16	Paket	1,553,442,600	4.00	724,466,000	25.00%	46.64%	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	16	Paket	1,200,633,200	4.00	301,221,500	25.00%	25.09%	
								Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**25.00%**	**37.02%**	
								Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
								Rata-rata Capaian kinerja Program (%)	**87.50%**	**24.75%**	
								Predikat kinerja	**Tinggi**	**Sangat Rendah**	
12	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100**	**Persen**	**1,541,249,900**	**100.00**	**420,666,804**	**100.00%**	**27.29%**	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja TW I		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = 6/5 x 100%		8
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pemenuhan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	**100**	**Persen**	**1,541,249,900**	**100.00**	**420,666,804**	**100.00%**	**27.29%**	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	582,575,000	3.00	70,863,906	25.00%	12.16%	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	550,017,400	3.00	120,200,425	25.00%	21.85%	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	408,657,500	3.00	229,602,473	25.00%	56.18%	
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)									**25.00%**	**30.07%**	
Predikat kinerja									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 16,80% dan capaian keuangan sebesar 20,95% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp480.809.264.394. Capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 11,23% dan capaian keuangan sebesar 12,68% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 29.041.835.977,00 dari pagu anggaran Rp. 124.321.683.236,00. Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2025, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaaan program dan kegiatan/sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik
3. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan subkegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansiinstansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan

B. Faktor Penghambat

1. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
2. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu
3. Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan
4. Pada triwulan I, baru sebagian kecil kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan sebagian yang lain baru pada tahap persiapan, atau tahap awal pengerjaan.

C. Tindak Lanjut

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah triwulan I tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
2. Meningkatkan koordinasi antara tim kerja dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih matang.
3. Melakukan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa di awal tahun.
4. Pengembangan inovasi dalam melaksanakan pelayanan sehingga pelaksanaan lebih optimal.

Berdasarkan hasil tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berjalan, belum ada target indikator yang tercapai karena anggaran baru berjalan 2 (dua) bulan.

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 500.14.2.1/Kep.141-Bag.Adbang/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di Lingkungan Sekretariat Daerah, ada 24 (dua puluh empat) indikator yang harus dicapai dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan pengukuran kinerja yang dilakukan sampai dengan TW 1 Tahun 2025.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan TW 1 Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi sd. TW 1	Evaluasi
1	Persentase rekomendasi sektor UMKM yang diimplementasikan	%	80	0	Tidak tercapai
2	Persentase BUMD Sehat	%	50	0	Tidak tercapai
3	Tingkat Inflasi kelompok makanan minuman dan tembakau yang diintervensi TPID	Nilai	5-7	0	Tidak tercapai
4	Persentase realisasi capaian kinerja bansos penduduk miskin ekstrim	%	2,58%	0	Tidak tercapai
5	Persentase Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Yang Diimplementasikan	%	80	0	Tidak tercapai
6	Nilai rata-rata aspek pelaporan kinerja perangkat daerah	Nilai	12	0	Tidak tercapai
7	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	51	0	Tidak tercapai
8	Indeks Komposit Kelembagaan	Nilai	87.25	0	Tidak tercapai
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	3.6	0	Tidak tercapai
10	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	98	7,2%	Tidak tercapai
11	Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	29	17,01	Tidak tercapai
12	Tingkat kematangan UKPBJ	Nilai	40	40	Tidak tercapai
13	Persentase pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ	%	8.46	30,78%	Tidak tercapai
14	Nilai Aspek harmonisasi produk hukum daerah	Nilai	21.3	0	Tidak tercapai
15	Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah	Nilai	25	0	Tidak tercapai
16	Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah	Nilai	10.5	0	Tidak tercapai
17	Nilai Aspek penataan data base perundang-undangan Daerah	Nilai	15	0	Tidak tercapai
18	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.48	0	Tidak tercapai
19	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	75	0	Tidak tercapai
20	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83.16	0	Tidak tercapai

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi sd. TW 1	Evaluasi
21	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	Inovasi /Tahun	1	0	Tidak tercapai
22	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	91	0	Tidak tercapai
23	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	95	0	Tidak tercapai
24	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88.75	0	Tidak tercapai

Sumber : Setda Kota Bogor, diolah 2025

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan TW 1 sebagian besar tidak tercapai, karena sebagian besar penilaian dilakukan pada TW 3 dan TW 4. Data yang tersedia datanya adalah data yang penilaiannya dilakukan setiap bulan yaitu Persentase Capaian Kinerja Pembangunan daerah, Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tingkat Kematangan UKPBJ dan Persentase pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ.

2.6. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2025-2026, telaahan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan telaah terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kota Bogor, yaitu:

a. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Masih perlunya pemerataan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang menjadikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Salah satunya diakibatkan Kota Bogor yang masih memiliki ketimpangan layanan pendidikan dari tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak. Sarana prasarana pendidikan di Kota Bogor. Pemerataan pendidikan juga menyebabkan kualitas dan daya saing tidak meningkat. Pendidikan merupakan modal dasar dalam menambah wawasan dan kualitas diri. Sehingga, ketika masyarakat terjun dalam dunia kerja, dari kualitasnya mampu memenuhi kualifikasi dunia kerja dan memiliki produktivitas yang tinggi. Maka dari itu, dari pemerataan pendidikan untuk masyarakat dapat

mengembangkan kualitas diri sehingga akan mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor.

b. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi

Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu isu strategis di Kota Bogor. Pembangunan ekonomi menjadi isu penting pastinya untuk seluruh wilayah. Akan tetapi, di Kota Bogor sendiri isu pengembangan dan pembangunan ekonomi memang perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari evaluasi RPJPD, yang kaitannya dengan capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal periode perencanaan 2005, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor adalah 6,12. Sedangkan pada kondisi di tahun 2022 memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan awal periode perencanaan tersebut yaitu 5,65. Hal ini membuktikan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,47. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang kurang optimal akan menyebabkan berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka kemiskinan, Kota Bogor telah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2019-2022, pada tahun 2019 terendah yaitu 5,77 persen. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,68 persen dan sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,24 persen, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,10 persen

c. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut. Sedangkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kota Bogor terkait dengan pengelolaan pemerintahan

adalah terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini yang akan membawa dampak terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian didasarkan juga pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, yang didalam keputusan tersebut berfokus pada peningkatan investasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang berarti pengelolaan yang baik sangat perlu untuk diupayakan lagi agar menjadi lebih baik sesuai dengan kondisi dan amanat yang ada.

Isu lainnya yang mempengaruhi struktur Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah munculnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dengan mengurangi belanja yang tidak prioritas dan fokus pada program-program yang lebih efektif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal Perubahan RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Review tehadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Bogor

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**81,060,100**	**66,180,100**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**66,180,100**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**	**100%**	**81,060,100**	**66,180,100**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**	**100%**	**66,180,100**	
2.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan aduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan**	**100%**	**81,060,100**	**66,180,100**	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penanganan aduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan**	**100%**	**66,180,100**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.10.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	81,060,100	66,180,100	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,180,100	Penyesuaian APBD
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Bagian Pemerintahan)**				**271,328,103**	**212,782,103**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Bagian Pemerintahan)**				**212,782,103**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Kelurahan yang ber-predikat Swasembada**	**4,4%**	**271,328,103**	**212,782,103**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Kelurahan yang ber-predikat Swasembada**	**4,4%**	**212,782,103**	
2.13.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan**	**100%**	**271,328,103**	**212,782,103**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan**	**100%**	**212,782,103**	
2.13.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	68	93,610,000	73,710,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	68	73,710,000	Penyesuaian APBD
2.13.04.2.01.0018	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	177,718,103	139,072,103	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	139,072,103	Penyesuaian APBD
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**1,178,481,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1,178,481,000**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**90%**	**1,437,253,000**	**1,178,481,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**90%**	**1,178,481,000**	
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama	**80%**					**Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama**	**80%**		
4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan	100%			**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan	100%		
			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti	100%	**953,041,700**	**752,599,700**			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti	100%	**752,599,700**	
4.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	195,336,000	176,260,000	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	176,260,000	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	154,287,500	134,400,500	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	134,400,500	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	603,418,200	441,939,200	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	441,939,200	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**80%**	**484,211,300**	**425,881,300**	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**80%**	**425,881,300**	
			Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	**80%**					**Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**	**80%**		
4.01.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	85 Dokumen	284,853,500	235,303,500	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	85 Dokumen	235,303,500	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	142,823,000	134,043,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	134,043,000	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	56,534,800	56,534,800	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	56,534,800	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PEMERINTAHAN					**1,789,641,203**	**1,457,443,203**	**TOTAL BAGIAN PEMERINTAHAN**				**1,457,443,203**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**2,549,581,300**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**2,549,581,300**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**2,425,119,800**	**2,549,581,300**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**2,549,581,300**	
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu						**Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu**			
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu	**100%**					**Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu**	**100%**		
4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100%**	**2,425,119,800**	**2,549,581,300**	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**	**100%**	**2,549,581,300**	
			Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan	**100%**					**Persentase terfasilitasinya perkara hukum sesuai permohonan**	**100%**		
4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen	624,306,800	636,469,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen	636,469,000	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	1,574,383,400	1,619,721,500	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	1,619,721,500	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	226,429,600	293,390,800	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	293,390,800	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					**2,425,119,800**	**2,549,581,300**	**TOTAL BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**				**2,549,581,300**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**33,531,211,271**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**33,531,211,271**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**87%**	**29,332,610,704**	**33,531,211,271**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**87%**	**33,531,211,271**	
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)	**1000 Orang**					**Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)**	**1000 Orang**		
			Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)	**3000 Orang**					**Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan Sosial (berdasar data DTKS)**	**3000 Orang**		
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	**87%**					**Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan**	**87%**		
4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan**		**Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan**	**6 Dokumen**	**29,332,610,704**	**33,531,211,271**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan**		**Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan**	**6 Dokumen**	**33,531,211,271**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kesejahteraan Rakyat		**Jumlah kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di implementasikan**	**3 Dokumen**			**Kesejahteraan Rakyat**		**Jumlah kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di implementasikan**	**3 Dokumen**		
4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	17,560,205,245	17,958,750,359	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	17,958,750,359	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	449,067,862	265,559,515	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	265,559,515	Penyesuaian APBD
4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	3 Dokumen	11,323,337,597	15,306,901,397	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	3 Dokumen	15,306,901,397	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas						Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
	TOTAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**29,332,610,704**	**33,531,211,271**	**TOTAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**33,531,211,271**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**306,404,600**	**248,961,100**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**248,961,100**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**306,404,600**	**248,961,100**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**248,961,100**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.25**	**105,229,500**	**92,622,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.25**	**92,622,000**	
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**25.88**					**Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**25.88**		
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**11.48**					**Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**11.48**		
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**18.55**					**Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**18.55**		
			Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di	**100%**					**Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di**	**100%**		

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Lingkungan Perangkat Daerah						**Lingkungan Perangkat Daerah**			
4.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**105,229,500**	**92,622,000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**92,622,000**	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	**100%**					**Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun**	**100%**		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	47,610,400	35,002,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35,002,900	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	57,619,100	57,619,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	57,619,100	Penyesuaian APBD
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah**	**100%**	**201,175,100**	**156,339,100**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah**	**100%**	**156,339,100**	
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan	**65%**					**Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan**	**65%**		
4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat waktu**	**100%**	**201,175,100**	**156,339,100**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat waktu**	**100%**	**156,339,100**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.03.2.02.0002	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	65,900,800	35,959,800	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	35,959,800	Penyesuaian APBD
4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	135,274,300	120,379,300	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	120,379,300	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**306,404,600**	**248,961,100**	**TOTAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				**248,961,100**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**422,231,700**	**321,836,700**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**321,836,700**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan**	**73%**	**422,231,700**	**321,836,700**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan**	**73%**	**321,836,700**	
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	**18,01%**					**Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit**	**18,01%**		
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD	**67,5**					**Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD**	**67,5**		
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	**75,86%**					**Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah**	**75,86%**		
4.01.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Jumlah kebijakan pembinaan UMKM yang diimplementasikan**	**6 Dokumen**	**422,231,700**	**321,836,700**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Jumlah kebijakan pembinaan UMKM yang diimplementasikan**	**6 Dokumen**	**321,836,700**	
			Jumlah kebijakan dan rekomendasi pengelolaan BUMD	**5 Dokumen**					**Jumlah kebijakan dan rekomendasi pengelolaan BUMD**	**5 Dokumen**		

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah Kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi daerah	**4 Dokumen**					**Jumlah Kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi daerah**	**4 Dokumen**		
4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	226,429,000	194,289,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	194,289,000	Penyesuaian APBD
4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Dokumen	111,363,700	74,805,700	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Dokumen	74,805,700	Penyesuaian APBD
4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 Dokumen	84,439,000	52,742,000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6 Dokumen	52,742,000	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PEREKONOMIAN					**422,231,700**	**321,836,700**	**TOTAL BAGIAN PEREKONOMIAN**				**321,836,700**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**SEKRETARIAT DAERAH**					
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25**	**75%**	**983,019,589**	**819,002,668**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25**	**75%**	**819,002,668**	
4.01.03.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3,45 Poin**	**983,019,589**	**819,002,668**	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**	**3,45 Poin**	**819,002,668**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	536,628,480	440,056,980	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	440,056,980	Penyesuaian APBD
4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	252,889,298	235,831,488	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	235,831,488	Penyesuaian APBD
4.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	260 Orang	193,501,811	143,114,200	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	260 Orang	143,114,200	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					**983,019,589**	**819,002,668**	**TOTAL BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**				**819,002,668**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**602,711,900**	**391,239,200**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**391,239,200**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai pelaporan kinerja PD minimal 12,2**	**50%**	**602,711,900**	**391,239,200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai pelaporan kinerja PD minimal 12,2**	**50%**	**391,239,200**	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi	**80,55%**					**Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi**	**80,55%**		
			persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif	**83,33%**					**persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif**	**83,33%**		

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35	**88,89%**					**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35**	**88,89%**		
4.01.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**Persentase LKIP PD yang memenuhi 7 informasi sesuai Permenpan 53 tahun 2014**	**70%**	**602,711,900**	**391,239,200**	**Kegiatan Penataan Organisasi**		**Persentase LKIP PD yang memenuhi 7 informasi sesuai Permenpan 53 tahun 2014**	**70%**	**391,239,200**	
			Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	**43,7**					**Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur**	**43,7**		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab dan ABK sesuai ketentuan	**27,78**					**Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab dan ABK sesuai ketentuan**	**27,78**		
			Persentase Peningkatan Nilai SKM Perangkat Daerah	**1%**					**Persentase Peningkatan Nilai SKM Perangkat Daerah**	**1%**		
4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	14 Dokumen	133,610,300.00	96,749,500	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	14 Dokumen	96,749,500	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	317,841,300	188,065,900	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	188,065,900	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	151,260,300	106,423,800	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	106,423,800	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN ORGANISASI					**602,711,900**	**391,239,200**	**TOTAL BAGIAN ORGANISASI**				**391,239,200**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**86,716,213,608**	**97,990,659,931**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**97,990,659,931**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100%**	**86,716,213,608**	**97,990,659,931**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100%**	**97,990,659,931**	
			Persentase pengelolaan BMD yang dikelola dengan ketentuan	**94%**					**Persentase pengelolaan BMD yang dikelola dengan ketentuan**	**94%**		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	**100%**					**Persentase Kepatuhan Anggaran**	**100%**		
			Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	**≥ 95%**					**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**≥ 95%**		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94%**					**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**94%**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan**	**88,38**		
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**		

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**		**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100%**	**48,616,985,521**	**49,303,651,481**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**		**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100%**	**49,303,651,481**	
4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 orang	48,448,874,521	49,140,040,481	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 orang	49,140,040,481	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	168,111,000	163,611,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	163,611,000	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Kepegawaan Perangkat Daerah**	**100%**	**549,731,300**	**549,731,300**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Kepegawaan Perangkat Daerah**	**100%**	**549,731,300**	
4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	549,731,300	549,731,300	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	549,731,300	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**6,223,319,000**	**7,521,031,200**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**7,521,031,200**	
4.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	179,980,900	249,973,400	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	249,973,400	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	1,569,955,300	503,693,700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Kota Bogor, Boteng,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	503,693,700	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Perlengkapan Kantor		Kantor Yang Disediakan				Perlengkapan Kantor	Pabaton	Kantor Yang Disediakan			
4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2,159,662,000	4,175,157,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,175,157,000	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	347,090,800	397,085,100	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	397,085,100	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,966,630,000	2,195,122,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2,195,122,000	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**4,903,798,800**	**9,391,102,500**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**9,391,102,500**	
4.01.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	1,757,826,000	4,222,442,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	4,222,442,000	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9 Unit	328,842,000	328,842,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9 Unit	328,842,000	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89 Unit	1,160,878,800	1,762,731,100	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89 Unit	1,762,731,100	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	1,656,252,000	3,077,087,400	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	3,077,087,400	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.07	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**8,564,550,481**	**9,113,600,441**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**9,113,600,441**	
4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	88,807,700	84,039,300	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	84,039,300	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,519,411,947	2,519,411,947	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,519,411,947	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	987,382,730	1,241,201,090	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,241,201,090	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,968,948,104	5,268,948,104	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,268,948,104	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100%**	**7,886,910,162**	**10,375,353,006**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**	**100%**	**10,375,353,006**	
4.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1,137,242,045	1,286,289,945	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	1,286,289,945	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	1,292,440,909	1,441,893,409	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	1,441,893,409	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Mebel yang Dipelihara	415 Unit	199,983,024	299,834,950	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Mebel yang Dipelihara	415 Unit	299,834,950	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1521 Unit	1,270,399,384	1,486,346,102	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1521 Unit	1,486,346,102	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3,537,562,400	5,411,706,200	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5,411,706,200	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	449,282,400	449,282,400	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	449,282,400	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**4,052,194,944**	**4,395,944,103**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**4,395,944,103**	
4.01.01.2.11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,248,654,643	1,248,654,643	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,248,654,643	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	29 Paket	600,791,100	600,791,100	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	29 Paket	600,791,100	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	46,484,800	46,484,800	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	46,484,800	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2,156,264,401	2,500,013,560	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2,500,013,560	Penyesuaian APBD

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.01.01.2.12	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**	**100%**	**5,918,723,400**	**7,340,245,900**	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**	**100%**	**7,340,245,900**	
4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	14 Paket	2,649,709,600	3,517,525,100	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	14 Paket	3,517,525,100	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	13 Paket	2,068,380,600	2,395,822,100	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	13 Paket	2,395,822,100	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,200,633,200	1,426,898,700	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	1,426,898,700	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN UMUM					**86,716,213,608**	**97,990,659,931**	**TOTAL BAGIAN UMUM**				**97,990,659,931**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**SEKRETARIAT DAERAH**					
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2,062,470,400**	**2,301,446,400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2,301,446,400**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Persentase pemenuhan pelayanan keprotokolan dan	**100%**	**2,062,470,400**	**2,301,446,400**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Persentase pemenuhan pelayanan keprotokolan dan	**100%**	**2,301,446,400**	

Kode	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Awal (APBD)	Pagu Indikatif Perubahan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			komunikasi pimpinan						komunikasi pimpinan			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	702,290,000	757,943,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	757,943,000	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	796,518,000	834,365,900	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	834,365,900	Penyesuaian APBD
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	563,662,400	709,137,500	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	709,137,500	Penyesuaian APBD
TOTAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					**2,062,470,400**	**2,301,446,400**	**TOTAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**				**2,301,446,400**	
TOTAL SEKRETARIAT DAERAH					**124,640,423,504**	**139,611,381,773**	**TOTAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**				**2,301,446,400**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kota Bogor

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bogor ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025 dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kota Bogor

Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026		**Sasaran Renstra Setda Kota Bogor 2025-2026**	
1.4	Terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	1.4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1.4	Terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	1.4	Meningkatnya Kualitas Bina Mental Spiritual Masyarakat
2.3.	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	2.3.	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan ekonomi daerah
2.3.	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak Perekonomian daerah dan pengendalian pasar	2.3.	Optimalisasi Kinerja BUMD
2.1	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	2.1	Terkendalinya Inflasi Daerah

Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026		Sasaran Renstra Setda Kota Bogor 2025-2026	
4.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	4.1	Meningkatnya kualitas kematangan organisasi, pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi dan pelayanan publik
4.2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	4.2	Optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Mengacu kepada RPD Kota Bogor Tahun 2015-2016, ada 6 program di Sekretariat Daerah yang merupakan Program Prioritas berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Program Prioritas lingkup Setda Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026

No.	Prioritas Pembangunan/Program Prioritas	Perangkat Daerah
A	**Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)**	
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
B	**Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2)**	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian
C	**Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4)**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Adminstrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM
4.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bagian Pemerintahan
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bagian Pemerintahan
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran program Sekretariat Daerah berdasarkan urusan/fungsi penunjang Tahun 2025-2026 dapat dijelaskan pada Tabel xx.xx Penjabaran program tersebut mengacu kepada tema pembangunan RPD Kota Bogor dengan memperhatikan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran pada RPD Kota Bogor. Penjabaran program disusun sebagaimana hasil Pemetaan terhadap kodefikasi dan nomenklatur Program yang diamanatkan dalam PMDN 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Daerah dan telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, memiliki 5 (lima) tujuan :

TUJUAN 1 :" Terwujudnya perumusan kebijakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan :*** Persentase rekomendasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan (Persentase), Persentase Kontribusi Laba BUMD Kota Bogor terhadap PAD (Persentase) dan Inflasi Daerah (Nilai).

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu :

Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

a. Persentase Rekomendasi Sektor UMKM yang Diimplementasikan (Persentase)
b. Persentase BUMD yang Sehat (Persentase)
c. Tingkat Inflasi Kelompok Makanan dan Minuman dan Tembakau Yang Diintervensi TPID (Nilai)

TUJUAN 2 :" Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", dengan ***Indikator Kinerja Tujuan :*** Persentase Realisasi Capaian Kinerja Bantuan Sosial Untuk Penduduk Miskin (%) dan Indeks Toleransi (Nilai).

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Indikator Kinerja Sasaran:

a. Persentase Realiasi Capaian Kinerja Bansos Penduduk Miskin Ekstrim (Persentase);
b. Persentase Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual Yang Diimplementasikan (Persentase).

TUJUAN 3 :" Terwujudnya Penataan Organisasi, Penataan Perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan*** sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota
b. Indeks Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 4 (empat) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Kematangan Organisasi, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Pelayanan Publik rakyat, dengan Indikator Kinerja Sasaran:
   a. Nilai rata-rata aspek pelaporan kinerja perangkat daerah (Nilai);
   b. Indeks Kematangan Organisasi (Nilai);
   c. Indeks Komposit Kelembagaan (Nilai);
   d. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota (Nilai).
2. Optimalisasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran: Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persentase)
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
   a. Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai);
   b. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai);
   c. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Persentase).
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pemanfaatan Produk Hukum Daerah Serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
   a. Nilai Aspek Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Nilai);
   b. Nilai Aspek Kompetensi Sumber Daya Manusia Perancang Produk Hukum Daerah;
   c. Nilai Aspek Deregulasi Produk Hukum Daerah;
   d. Nilai Aspek Penataan Data Base Perundang-undangan Daerah.

TUJUAN 4 :" Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Berkualitas" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan : Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*** Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai);
b. Persentase Kelurahan Berkinerja Baik (Persentase).

TUJUAN 5 : "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Effektif, Efisien dan Akuntabel serta Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Berkualitas" dengan ***Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut:***

5.1. Predikat SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

a. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah (Nilai);

b. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 100) (Inovasi).

c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

d. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

5.2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Setda

Untuk mencapai tujuan sebagai mana di tetapkan di atas maka ada 1 (satu) Sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran:

Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup Perangkat Daerah (Nilai);

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan realokasi rencana kerja dalam perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025, serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah Triwulan I RENJA Sekretariat Daerah Bogor tahun 2025, terjadi perubahan pagu indikatif dalam rencana kerja Perangkat Daerah dalam mendukung capaian pembangunan daerah. Perubahan pagu juga disebabkan adanya kebutuhan untuk mendukung Visi Misi Walikota Bogor Tahun 2025-2026.

Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Perubahan Kota Bogor Tahun 2025 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bogor. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor;

3. Sekretariat Daerah terdiri 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan.

   Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**										
	2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yg difasilitasi sesuai SOP**		**100 %**	**100 %**	**200,000,000**	**81,060,100**	**66,180,100**		**100%**	**225,000,000**
	2.10.04.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan aduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan**		**100 %**	**100 %**	**200,000,000**	**81,060,100**	**66,180,100**		**100%**	**225,000,000**
1	2.10.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	81,060,100	66,180,100	APBDP	1 Dokumen	225,000,000
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Bagian Pemerintahan)**										
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan yang ber-predikat Swasembada**		**4,4 %**	**4,4 %**	**393,390,750**	**271,328,103**	**212,782,103**			**450,000,000**
	2.13.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan**		**100 %**	**100 %**	**393,390,750**	**271,328,103**	**212,782,103**			**450,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
2	2.13.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	Kota Bogor	68 Kelurahan	68 Kelurahan	105,000,000	93,610,000	73,710,000	APBDP	68 Kelurahan	150,000,000
3	2.13.04.2.01.0018	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Bogor	1 Dokumen	1 Dokumen	288,390,750	177,718,103	139,072,103	APBDP	1 Dokumen	300,000,000
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**90 %**	**90 %**	**1,913,831,500**	**1,437,253,000**	**1,178,481,000**			**1,500,000,000**
			Persentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai perjanjian kerjasama		**80 %**	**80 %**						
	4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai ketentuan		**100 %**	**100 %**	**1,313,836,000**	**953,041,700**	**752,599,700**		**100%**	**1,500,000,000**
			Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti		**100 %**	**100 %**					**100%**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
4	4.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	255,000,000	195,336,000	176,260,000	APBDP	3 Dokumen	300,000,000
5	4.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	254,336,000	154,287,500	134,400,500	APBDP	3 Dokumen	300,000,000
6	4.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	804,500,000	603,418,200	441,939,200	APBDP	3 Dokumen	900,000,000
	4.01.02.2.04	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama**		**80 %**	**80 %**	**599,995,500**	**484,211,300**	**425,881,300**			**700,000,000**
			Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama		**80 %**	**80 %**						
7	4.01.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	85 Dokumen	85 Dokumen	378,000,000	284,853,500	235,303,500	APBDP	90 Dokumen	400,000,000
8	4.01.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	1 Dokumen	1 Dokumen	162,000,000	142,823,000	134,043,000	APBDP	3 Dokumen	200,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
9	4.01.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	1 Dokumen	1 Dokumen	59,995,500	56,534,800	56,534,800	APBDP	3 Dokumen	100,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN							**2,507,222,250**	**1,789,641,203**	**1,457,443,203**			**2,175,000,000**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sinkron dan harmonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan**		**100 %**	**100 %**	**2,415,304,600**	**2,425,119,800**	**2,549,581,300**		**100%**	**2,715,331,800**
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu		**100 %**	**100 %**					**100%**	
			Persentase Produk hukum daerah yang dipublikasikan tepat waktu		**100 %**	**100 %**					**100%**	
	4.01.02.2.03	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan Pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum**		**100 %**	**100 %**	**2,415,304,600**	**2,425,119,800**	**2,549,581,300**		**100%**	**2,715,331,800**
			Persentase terfasilitasinya		**100 %**	**100 %**					**100%**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			perkara hukum sesuai permohonan										
10	4.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	400	Dokumen	500 Dokumen	771,068,600	624,306,800	636,469,000	APBDP		871,090,700
11	4.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	30	Kasus	30 Kasus	1,348,778,400	1,574,383,400	1,619,721,500	APBDP		1,448,783,300
12	4.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	100	Dokumen	100 Dokumen	295,457,600	226,429,600	293,390,800	APBDP		395,457,800
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA								**2,415,304,600**	**2,425,119,800**	**2,549,581,300**			**2,715,331,800**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang ditindaklanjuti**		**87**	**%**	**87 %**	**29,250,030,551**	**29,332,610,704**	**33,531,211,271**			**19,316,225,770**
			Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim yang mendapat bantuan sosial (berdasarkan data P3KE desil 1)		**1000**	**Orang**	**1000 Orang**						
			Jumlah Penduduk Miskin yang mendapat Bantuan		**3000**	**Orang**	**3000 Orang**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Sosial (berdasar data DTKS)									
			Persentase realisasi capaian kinerja pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan		**87**	**87**						
13	4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan**		**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**29,250,030,551**	**29,332,610,704**	**33,531,211,271**		**6**	**19,316,225,770**
			Jumlah kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di implementasikan		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**					**3**	
14	4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	17,012,377,819	17,560,205,245	17,958,750,359	APBDP	3	19,316,225,770
15	4.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	618,876,135	449,067,862	265,559,515	APBDP	3	599.209.493

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
	4.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	3 Dokumen	3 Dokumen	11,618,776,597	11,323,337,597	15,306,901,397	APBDP	3	15.537.523.240
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**29,250,030,551**	**29,332,610,704**	**33,531,211,271**	**-**	**-**	**19,316,225,770**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**27.25 Poin**	**27.25 Poin**	**169,980,200**	**105,229,500**	**92,622,000**			**185,000,000**
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**25.88 Poin**	**25.88 Poin**						
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**11.48 Poin**	**11.48 Poin**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**18.55**	**Poin**	**18.55** **Poin**						
			Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah		**100**	**%**	**100** **%**						
	4.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**		**100**	**%**	**100** **%**	**169,980,200**	**105,229,500**	**92,622,000**			**185,000,000**
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		**100**	**%**	**100** **%**						
16	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	5	Dokumen	5 Dokumen	79,991,000	47,610,400	35,002,900	APBDP		90,000,000
17	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	7	Dokumen	7 Dokumen	89,989,200	57,619,100	57,619,100	APBDP		95,000,000
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah**		**100**	**%**	**100** **%**	**309,999,900**	**201,175,100**	**156,339,100**			**285,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan		**65 %**	**65 %**						
	4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi keuangan dan progres fisik secara tepat waktu**		**100 %**	**100 %**	**309,999,900**	**201,175,100**	**156,339,100**			**285,000,000**
18	4.01.03.2.02.0002	Sub Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	4 Dokumen	4 Dokumen	234,999,900	65,900,800	35,959,800	APBDP		275,000,000
19	4.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	135,274,300	120,379,300	APBDP		10,000,000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**479,980,100**	**306,404,600**	**248,961,100**	**-**	**-**	**470,000,000**
V	**4**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi hasil kajian sektor UMKM yang ditindaklanjuti dengan kebijakan**		**73 %**	**73 %**	**463,499,700**	**422,231,700**	**321,836,700**			**700,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit		**18,01 %**	**18,01 %**						
			Rata Rata Nilai capaian kinerja BUMD		**67,5 Poin**	**67,5 Poin**						
			Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah		**75,86 %**	**75,86 %**						
	4.01.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah kebijakan pembinaan UMKM yang diimplementasikan**		**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**463,499,700**	**422,231,700**	**321,836,700**		**6**	**700,000,000**
			Jumlah kebijakan dan rekomendasi pengelolaan BUMD		**5 Dokumen**	**5 Dokumen**					**5**	
			Jumlah Kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi daerah		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**					**4**	
20	4.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	**5** Dokumen	**5** Dokumen	233,999,800	226,429,000	194,289,000	APBDP	**5**	300,000,000
21	4.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	4 Dokumen	4 Dokumen	125,999,900	111,363,700	74,805,700	APBDP	4	250,000,000
22	4.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bogor, Boteng, Pabaton	6 Dokumen	6 Dokumen	103,500,000	84,439,000	52,742,000	APBDP	6	150,000,000
BAGIAN PEREKONOMIAN							**463,499,700**	**422,231,700**	**321,836,700**	**-**	**-**	**700,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum		Sesudah		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**												
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai pemanfaatan sistem informasi PBJ > 25**		**75**	**%**	**75**	**%**	**1,036,044,846**	**983,019,589**	**819,002,668**		**40 poin**	**1,036,044,846**
	4.01.03.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ**		**3,45**	**poin**	**3,45**	**poin**	***1,036,044,846***	***983,019,589***	***819,002,668***			***1,036,044,846***
23	4.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	12	Dokumen	12	Dokumen	736,044,846	536,628,480	440,056,980	APBD	12 Dokumen	736,044,846
24	4.01.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		12	Dokumen	12	Dokumen	160,000,000	252,889,298	235,831,488	APBD	12 Dokumen	160,000,000
25	4.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		290	Orang	290	Orang	140,000,000	193,501,811	143,114,200	APBD	276 Orang	140,000,000
BAGIAN PEREKONOMIAN									**1,036,044,846**	**983,019,589**	**819,002,668**	**-**		**1,036,044,846**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**												
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai pelaporan kinerja PD minimal 12,2**		**50**	**%**	**50**	**%**	**924,607,800**	**602,711,900**	**391,239,200**			**1,500,000,000**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kematangan sangat tinggi		**80,55 %**	**80,55 %**						
			persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kelembagaan minimal sangat efektif		**83,33 %**	**83,33 %**						
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM ≥ 3,35		**88,89 %**	**88,89 %**						
	4.01.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase LKIP PD yang memenuhi 7 informasi sesuai Permenpan 53 tahun 2014**		**70 %**	**70 %**	***924,607,800***	***602,711,900***	***391,239,200***		***69.40%***	***1,500,000,000***
			Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur		**43,7 *Poin***	**43,7 *Poin***					***12,25 poin***	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen anjab dan ABK sesuai ketentuan		**27,78 %**	**27,78 %**					***10%***	
			Persentase Peningkatan Nilai SKM Perangkat Daerah		**1 %**	**1 %**					***44%***	
26	4.01.01.2.13.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	14 Dokumen	14 Dokumen	308,207,800	133,610,300.00	96,749,500	APBDP	14	500,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
27	4.01.01.2.13.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	4 Laporan	308,192,300	317,841,300	188,065,900	APBDP	4	500,000,000
28	4.01.01.2.13.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		6 Dokumen	6 Dokumen	308,207,700	151,260,300	106,423,800	APBDP	6	500,000,000
BAGIAN ORGANISASI							**924,607,800**	**602,711,900**	**391,239,200**	**-**	**-**	**1,500,000,000**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100 %**	**100 %**	**92,942,479,594**	**86,716,213,608**	**97,990,659,931**			**72,356,693,325**
			Persentase pengelolaan BMD yang dikelola dengan ketentuan		**94 %**	**94 %**						
			Persentase Kepatuhan Anggaran		**100 %**	**100 %**						
			Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA		**≥ 95 %**	**≥ 95 %**						
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		**94 %**	**94 %**						
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11 Poin**	**87,11 Poin**						
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75 Poin**	**88,75 Poin**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		**88,38 Poin**	**88,38 Poin**						
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38 Poin**	**88,38 Poin**						
	4.01.01.2.02	***Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah***	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**		***100 %***	***%***	***45,131,289,178***	***48,616,985,521***	***49,303,651,481***		***100%***	***44,959,578,178***
29	4.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	185 Orang	Orang	44,959,578,178	48,448,874,521	49,140,040,481	APBDP	185 orang	44,959,578,178
30	4.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	2 Laporan	171,711,000	168,111,000	163,611,000	APBDP		159,819,000
	4.01.01.2.05	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Persentase Pelayanan Kepegawaan Perangkat Daerah**		***100 %***	***%***	***499,980,500***	***549,731,300***	***549,731,300***			***500,000,000***
31	4.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	6 Paket	6 Paket	499,980,500	549,731,300	549,731,300	APBDP		500,000,000
	4.01.01.2.06	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah***		***100 %***	***100 %***	***5,702,751,100***	***6,223,319,000***	***7,521,031,200***		***100%***	***815,000,000***

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
32	4.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	1 Paket	1 Paket	179,980,900	179,980,900	249,973,400	APBDP		195,000,000
33	4.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Paket	3 Paket	749,945,700	1,569,955,300	503,693,700	APBDP		190,000,000
34	4.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15 Paket	15 Paket	2,299,162,000	2,159,662,000	4,175,157,000	APBDP		-
35	4.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5 Paket	424,248,500	347,090,800	397,085,100	APBDP	3 Paket	-
36	4.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	4 Laporan	2,049,414,000	1,966,630,000	2,195,122,000	APBDP	4 Laporan	430,000,000
	4.01.01.2.07	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	***100 %***	***100 %***	***6,573,177,600***	***4,903,798,800***	***9,391,102,500***		***100%***	***7,448,181,000***
37	4.01.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		5 Unit	6 Unit	3,606,288,000	1,757,826,000	4,222,442,000	APBDP		4,568,000,000
38	4.01.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		9 Unit	9 Unit	328,842,000	328,842,000	328,842,000	APBDP		690,000,000
39	4.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		89 Unit	222 Unit	1,160,878,800	1,160,878,800	1,762,731,100	APBDP		1,000,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
40	4.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		128 Unit	214 Unit	1,477,168,800	1,656,252,000	3,077,087,400	APBDP		1,190,181,000
	4.01.01.2.07	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**		***100 %***	***100 %***	***17,438,267,591***	***8,564,550,481***	***9,113,600,441***		***100%***	***7,938,973,304***
41	4.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2 Laporan	2 Laporan	90,000,000	88,807,700	84,039,300	APBDP	1 laporan	90,000,000
42	4.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	2,519,412,197	2,519,411,947	2,519,411,947	APBDP	1 laporan	2,520,000,000
43	4.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 Laporan	9 Laporan	9,499,882,090	987,382,730	1,241,201,090	APBDP		-
44	4.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	5,328,973,304	4,968,948,104	5,268,948,104	APBDP	12 Laporan	5,328,973,304
XV	**4.01.01.2.09**	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Persentase BMD lingkup Setda berkondisi baik**		***100 %***	***100 %***	***8,085,737,924***	***7,886,910,162***	***10,375,353,006***			***5,470,000,000***

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
45	4.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	21 unit	22 unit	1,323,739,391	1,137,242,045	1,286,289,945	APBDP		-
46	4.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 unit	22 unit	1,292,722,376	1,292,440,909	1,441,893,409	APBDP		-
47	4.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		415 Unit	415 Unit	199,983,024	199,983,024	299,834,950	APBDP	1 Paket	200,000,000
48	4.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1521 unit	1521 unit	1,349,934,533	1,270,399,384	1,486,346,102	APBDP		1,350,000,000
49	4.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	6 Unit	3,469,994,800	3,537,562,400	5,411,706,200	APBDP	2 Paket	3,470,000,000
50	4.01.01.2.09.0010	Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	6 Unit	449,363,800	449,282,400	449,282,400	APBDP		450,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
	4.01.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		***100 %***	***100 %***	***3,911,071,601***	***4,052,194,944***	***4,395,944,103***			***3,484,919,043***
51	4.01.01.2.11.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1,248,654,643	1,248,654,643	1,248,654,643	APBDP		1,248,654,643
52	4.01.01.2.11.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	600,791,100	600,791,100	600,791,100	APBDP	9 Paket	-
53	4.01.01.2.11.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang	8 Orang	92,969,600	46,484,800	46,484,800	APBDP		80,000,000
54	4.01.01.2.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	1,968,656,258	2,156,264,401	2,500,013,560	APBDP		2,156,264,400
	4.01.01.2.12	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan sekretariat daerah**		***100 %***	***100 %***	***5,600,204,100***	***5,918,723,400***	***7,340,245,900***			***1,740,041,800***
55	4.01.01.2.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah,	14 Paket	14 Paket	2,499,760,200	2,649,709,600	3,517,525,100	APBDP		1,017,764,900

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
56	4.01.01.2.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Pabaton	13 Paket	13 Paket	1,899,807,000	2,068,380,600	2,395,822,100	APBDP		496,015,100
57	4.01.01.2.12.0003	Sub Kegiatn Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		10 Paket	11 Paket	1,200,636,900	1,200,633,200	1,426,898,700	APBDP		226,261,800
BAGIAN UMUM							**92,942,479,594**	**86,716,213,608**	**97,990,659,931**			**72,356,693,325**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**		**100 %**	**100 %**	**1,391,376,100**	**2,062,470,400**	**2,301,446,400**		**100%**	**1,530,597,370**
	4.01.01.2.14	***Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	Persentase pemenuhan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan		***100 %***	***100 %***	***1,391,376,100***	***2,062,470,400***	***2,301,446,400***		***100%***	***1,530,597,370***
58	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	12 Laporan	12 Laporan	507,020,000	702,290,000	757,943,000	APBDP	12 Laporan	557,766,225
59	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	12 Laporan	684,665,800	796,518,000	834,365,900	APBDP	12 Laporan	753,171,650

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintagan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
60	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan	12 Laporan	199,690,300	563,662,400	709,137,500	APBDP	12 Laporan	219,659,495
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**1,391,376,100**	**2,062,470,400**	**2,301,446,400**			**1,530,597,370**
SEKRETARIAT DAERAH							**131,410,545,541**	**124,640,423,504**	**139,611,381,773**			**101,799,893,111**

BAB IV
PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Bogor. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Sekretariat Daerah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasilkan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Lampiran b. Sekretariat DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (RENJA - P PD), adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD- P), sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah. Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bogor mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Perubahan RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD- P);
b. Perubahan RENJA PD merupakan acuan PD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) PD Tahun 2025;
c. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Perubahan tahun berkenaan;
b. Program dalam Perubahan RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
c. Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA PD harus selaras

dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;

d. Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA PD harus selaras dengan program dan kegiatan RENSTRA Tahun 2025-2026;

e. Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD), maka dalam pelaksanaannya setiap PD harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (RENSTRA-PD). RENSTRA-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran RENSTRA-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan PD yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Setelah RENJA PD dibuat disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tim Anggaran membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD- P).

1.2 Landasan Hukum :

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Brkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,
    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2025;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yaitu :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI SEKRETARIAT DEWAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SEKRETARIAT DPRD

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH BAB V PENUTUP

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan Triwulan I 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bogor sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Sekretariat DPRD Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
Sampai Dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DPRD				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27.01		
		IK 2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27.53		
		IK 3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12.48		
		IK 4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	22.51		
		IK 5 : Perentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di lingkungan perangkat daerah	100		
		IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95		
		IK 6 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100		
		IK 8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	100		
		IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	100		
		IK 10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	95		
		IK 7 : Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	94		
		IK 11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	87.11		
		IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	88.75		
		IK 13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	88.38		
		IK 14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100	25	0.25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3	25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	2	28.5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA 2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	25	0.25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	16	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	3	25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0,5	50
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0,5	25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3	25
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bogor yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	100	25	0.25
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	3	25
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64	15	23.4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	25	0.25
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0,25	25
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	3	25
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	33.3
	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	5	16.6
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	25	0.25
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	25	0.25
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3	25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	3	25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	25	0.25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	6	23
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	2	33.3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0.5	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0.5	50
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD	100	25	0.25
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	50
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	1	16.6
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	50	2	4
	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD	100	25	0.25
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	3	25
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	3	25
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	1	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang difasilitasi sesuai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan	100	25	0.25
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Raperda Yang Disetujui	100	25	0.25
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	0,5	50
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	1	0,5	50
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	1	25
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	25	0.25
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	0	0
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	0	0
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LaporanRealisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	0	0
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	25	0.25
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	0,5	50
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	3	25
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	0,5	50
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang tercapai	100	25	0.25
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	2	33.3
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	3	25
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	5	25
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	48	8	16.6
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	3	25
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	3	25
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Dokumen Aspirasi Masyarakat	100	25	0.25
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	0	0
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150	50	33.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dokumen kode etik DPRD serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik DPRD	100	25	0.25
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	0	0
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	0.25	25
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	100	25	0.25
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	3	25
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	1	33.3
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	3	25

Sumber: Data Olahan Setwan, 2025

Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kota Bogor sampai dengan triwulan I (tahun berjalan) sebesar Rp 31.905.783.547 atau 20.18% dari anggaran sebesar Rp 158.160.180.925 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di atas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a) Jumlah SDM dan tingkat pendidikan sudah memadai dengan komposisi pendidikan tingkat Sarjana 60% (aparatur yang memadai);
   b) Aset sarana dan prasarana yang memadai;
   c) Anggaran yang memadai;
   d) Peran serta dukungan masyarakat.
2. Faktor Penghambat :
   a) Kompetensi sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak sehat;
   b) Perkembangan teknologi di bidang media elektronik;
   c) Adanya pemberitaan pada media masa yang kurang menyenangkan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bogor

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra berjalan		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun berjalan		Catatan Analisis
		2024	s.d Tw 1 2025	2024	s.d Tw 1 2025	
1	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	NA	86.7		-	
2	Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	NA	100		25	
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	NA	100		25	
4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	NA	≥ 1		-	
5	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	NA	88.75		83.99	
6	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100	100		25	

Sumber: Data Olahan Setwan Kota Bogor, 2025

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan Perubahan RENJA tahun 2025 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bogor

Isu-isu yang penting terkait dengan penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat dirangkum sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

FAKTOR INTERNAL PERANGKAT DAERAH		FAKTOR EKSTERNAL PERANGKAT DAERAH	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**TANTANGAN**
eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan	kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan	dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat
dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan	tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik ke depan	makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan
kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan	

dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi			

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun karena menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD. Dimana Renstra PD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dan RKPD. Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan produk hukum daerah, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap penegakkan peraturan daerah maupun kebijakan daerah yang lain. Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bogor pada tahun 2025 secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kota Bogor.

Adapun program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD Kota Bogor. Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja PD sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya digunakan oleh Kepala Bappeda dalan penyusunan rancangan RKPD Kota Bogor. Rancangan akhir RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Penyusunan RKPD dan Renja PD (sampai dengan rancangan akhir) mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja PD.
2. Penyusunan Awal Rancangan RKPD dan Rancangan Awal Renja PD.
3. Musrenbang Desa/Kelurahan.
4. Musrenbang Kecamatan.
5. Forum PD Kab/Kota.
6. Musrenbang Kab/Kota.
7. Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD.

Usulan program dan kegiatan yang diterima selanjutnya akan di sesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD untuk selanjutnya akan dicantumkan sebagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan oleh Sekretariat DPRD Kota Bogor. Selain itu usulan Program dan Kegiatan Masyarakat juga diperoleh melalui mekanisme Aspirasi Masyarakat yang disampaikan melalui forum Reses Anggota DPRD Kota Bogor.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota**	**IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.01**	**27.01**	**85.647.881.619**	**95.037.739.708**	
			IK 2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	IK 2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27.53	27.53			
			IK 3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	IK 3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12.48	12.48			
			IK 4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	IK 4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	22.51	22.51			
			IK 5 : Perentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di lingkungan perangkat daerah	IK 5 : Perentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di lingkungan perangkat daerah	100	100			

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95	95			
			IK 6 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	IK 6 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100			
			IK 8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	IK 8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100			
			IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	100	100			
			IK 10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	IK 10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	95	95			
			IK 7 : Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	IK 7 : Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	94	94			
			IK 11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	IK 11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	87.11	87.11			
			IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	88.75	88.75			
			IK 13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	IK 13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	88.38	88.38			

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			IK 14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	IK 14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88.38	88.38			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100	100	81.223.400	81.223.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	57.160.400	57.160.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	13.455.000	13.455.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	10.608.000	10.608.000	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA 2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA 2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	11.969.751.760	12.474.550.749	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	11.630.702.960	12.150.621.949	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	16	35.000.000	35.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	118.528.000	118.528.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	7.061.700	7.061.700	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	20.000.000	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12	12	153.453.600	138.333.600	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	5.005.500	5.005.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bogor yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Prosentase Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bogor yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	100	100	684.648.000	693.288.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	12	6.084.000	6.084.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64	64	678.564.000	687.204.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	2.980.954.000	2.928.954.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	1	229.718.000	229.718.000	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.022.548.000	770.548.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	178.911.700	178.911.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	309.949.800	309.949.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	299.931.000	299.931.000	
	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	30	279.235.000	279.235.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	600.000.000	800.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	1	48.860.500	48.860.500	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	1	11.800.000	11.800.000	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	100	1.063.556.200	5.979.534.600	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1		219.228.000	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	272.693.400	1.403.335.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	790.862.800	4.356.971.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	10.550.767.774	10.250.757.274	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	7.715.000	7.715.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	3.004.724.100	2.704.713.600	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	260.568.466	260.568.466	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Listrik yang Disediakan					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	7.277.760.208	7.277.760.208	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	4.375.268.685	5.644.543.885	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	26	1.247.333.283	1.247.333.283	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	979.753.802	979.753.802	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	768.214.000	768.214.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1.379.967.600	2.649.242.800	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD	100	100	49.340.250.000	51.928.250.000	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	48.404.000.000	50.992.000.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	6	761.250.000	761.250.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	50	50	175.000.000	175.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD	100	100	4.601.461.800	5.056.637.800	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	12	1.281.200.000	1.281.200.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	2.893.001.400	3.249.001.400	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	4	427.260.400	526.436.400	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Persentase Rencana Kerja DPRD yang difasilitasi sesuai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan**	**Persentase Rencana Kerja DPRD yang difasilitasi sesuai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan**	**100**	**100**	**72.458.299.306**	**67.384.520.218**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Raperda Yang Disetujui	Persentase Dokumen Raperda Yang Disetujui	100	100	7.807.532.400	10.657.238.400	
	Penyusunan dan Pembahasan Program	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	1	1	550.744.400	252.618.400	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah	dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan	1	1	5.411.772.000	4.856.324.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	4	1.845.016.000	1.249.201.000	
		Sosialiasai Perda yang dilaksanakan DPRD bersama Pemerintah Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		20000		4.299.095.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	100	1.667.120.000	1.141.016.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	2	559.627.000	559.627.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	2	2	549.731.000	549.731.000	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KUA dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS					
	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LaporanRealisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LaporanRealisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	557.762.000	31.658.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	100	100	7.064.235.000	7.064.235.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	538.631.000	538.631.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	12	6.000.000.000	6.000.000.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah	1	1	525.604.000	525.604.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	Persentase Layanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	100	100	7.751.414.806	7.941.104.718	
	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	3.620.683.700	2.570.373.700	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	12	3.086.983.106	3.966.983.018	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	20	45.000.000	45.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	48	48	528.558.000	528.558.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	12	440.190.000	800.190.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	12	30.000.000	30.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Dokumen Aspirasi Masyarakat	Persentase Dokumen Aspirasi Masyarakat	100	100	4.094.556.000	4.094.556.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	40.556.000	40.556.000	
	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150	150	4.054.000.000	4.054.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dokumen kode etik DPRD serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik DPRD	Persentase dokumen kode etik DPRD serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik DPRD	100	100	1.704.999.100	1.704.999.100	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	219.625.100	219.625.100	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu		Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	1.485.374.000	1.485.374.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	100	100	42.368.442.000	37.416.405.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	12	33.050.176.800	28.963.095.800	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	3	30.000.000	30.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	12	9.288.265.200	8.423.309.200	

Sumber: Data Olahan Setwan Kota Bogor, 2025

BAB IV

PENUTUP

Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bogor tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD Kota Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Perubahan RENJA Sekretariat DPRD tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat DPRD sebagai tindaklanjut dari penyempurnaan RENSTRA Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada RPD Pemerintah Kota Bogor. Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD merupakan implementasi dari pernyataan arah kebijakan Wali Kota.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, jika dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Semoga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam mewujudkan Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu **"*Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah*".**

Lampiran c. Inspektorat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah berakhir pada tahun 2024 serta pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Bogor perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

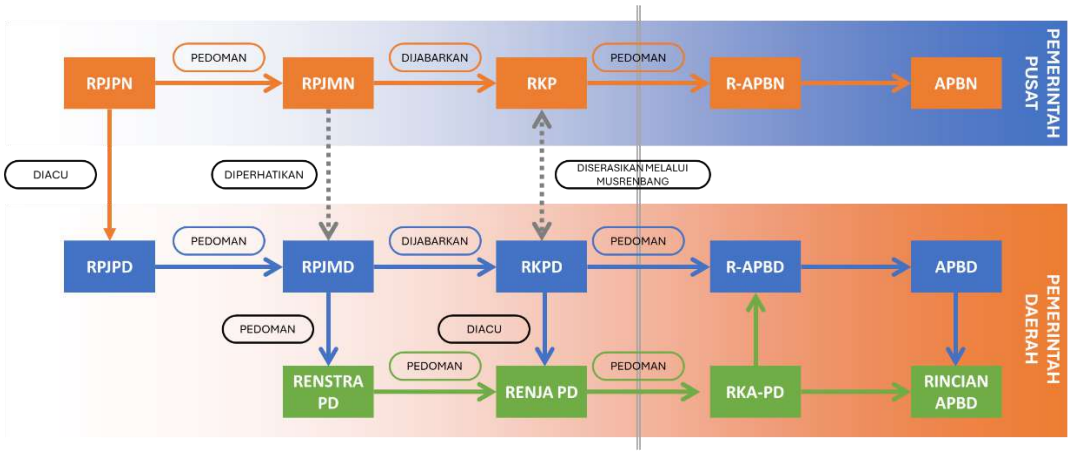

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat in-line dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Bogor disusun berdasarkan kebijakan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 dan RPD Kota Bogor tahun 2025-2026. Berikut Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah

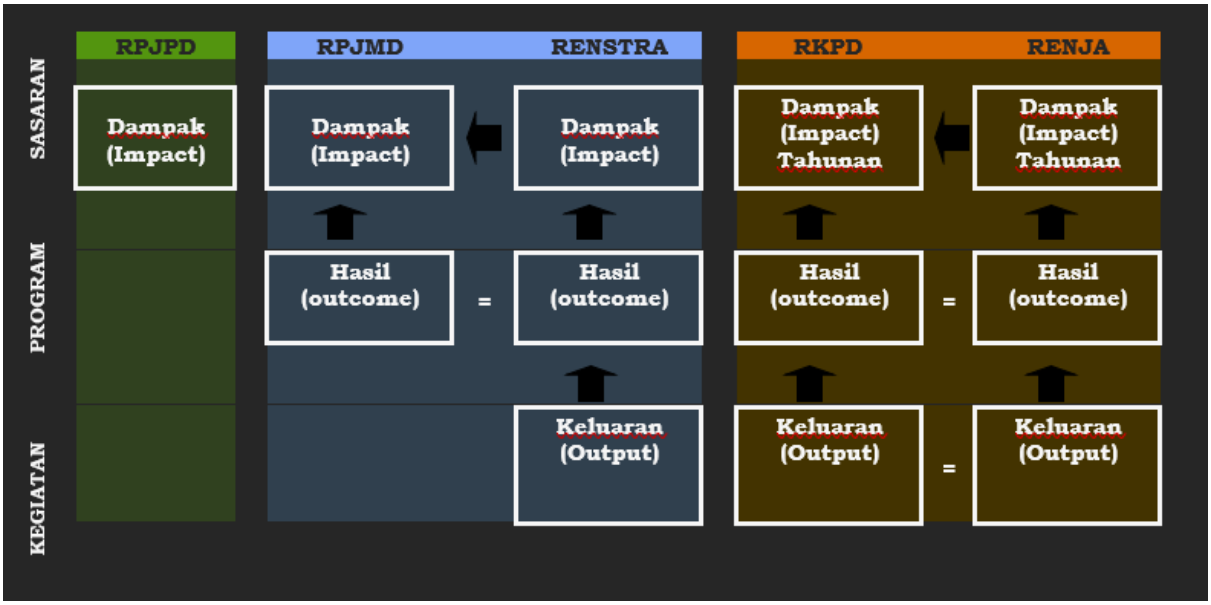

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
42. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
51. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangungan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6)
52. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Belanja Negara dan Daerah yang mengamanatkan pelaksanaan efisiensi anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan efisiensi belanja APBD dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penyesuaian Renja diperlukan untuk mengarahkan pengawasan pada program dan kegiatan yang berpotensi signifikan terhadap penghematan belanja daerah, pengendalian risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Selain itu, perubahan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan arahan pimpinan daerah agar pengawasan difokuskan pada penguatan akuntabilitas serta dukungan terhadap realisasi program prioritas kepala daerah, sehingga sasaran strategis dalam RPD dan RPJMD tetap dapat tercapai.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwukan II**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

2.3 Review terhadap Rencana Kerja Tahun 2025

BAB III **Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025**

BAB IV **Penutup**

BAB II
EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang rumusan sasaran yang akan dicapai dan program/kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah merupakan alat (tools) untuk mengukur sejauh mana capaian indikator baik itu program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi kepala perangkat daerah dalam mengeluarkan kebijakan apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas dalam menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah. Total anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2025 sebesar Rp 26.602.770.936,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 13.691.690.130,00 atau mencapai 51,47 persen dari total anggaran.

2.2. EVALUASI KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Evaluasi kinerja sasaran merupakan penilaian atau peninjauan target kinerja organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang akan menghasilkan sebuah kebijakan atau strategi organisasi. Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II masih terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum ada capaian dikarenakan masih dalam tahapan proses baik oleh Tingkat daerah maupun pusat. Berikut dapat disampaikan hasil evaluasi kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dibawah ini

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kota Bogor Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025	%
1	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja	1.1	Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5	2	40
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	87,74	91	-	-
		2.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	88,99	89		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	17,44	18,1	-	-
		3.2	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Evaluasi BPKP	Nilai	0,875	0,878	-	-
		3.3	Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai	1	1	-	-
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	4.1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	AA		
		4.2	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah	Persen	100	100		
		4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,41	3,56	3,615	101,54
		4.4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1		

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan semester I dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

   Pada tahun 2024 terdapat 4 unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM. Target tahun 2025 ditetapkan sebanyak 5 unit kerja, dan hingga Semester I telah tercapai 2 unit kerja yang diusulkan. Kondisi ini menunjukkan adanya progres awal yang baik serta komitmen berkelanjutan dari Inspektorat Daerah untuk mendorong peningkatan integritas melalui pengusulan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal.

   Capaian tahun 2024 sebesar 87,74%, dengan target tahun 2025 sebesar 91%. Hingga Semester I 2025, realisasi masih menunggu pemutakhiran data dari BPK. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi landasan optimisme pencapaian target pada akhir tahun.
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

   Tahun 2024 tercatat sebesar 88,99%, mendekati target tahun 2025 yaitu 89%. Pada Semester I 2025 realisasi belum diperbarui karena masih menunggu pemutakhiran dari Inspektorat Provinsi. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, peluang pencapaian target tahun 2025 tetap terbuka lebar melalui penguatan mekanisme koordinasi serta monitoring tindak lanjut rekomendasi.
4. Nilai SAKIP Tingkat Kota – Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

   Realisasi tahun 2024 sebesar 17,44, dengan target 2025 ditetapkan 18,1. Hingga Semester I 2025, penilaian belum dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi KemenPANRB. Dengan capaian yang cukup mendekati target, terdapat ruang perbaikan yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP pada tahun berjalan.
5. Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP – Hasil Evaluasi BPKP.

Capaian tahun 2024 tercatat sebesar 0,875, dengan target 2025 sebesar 0,878. Pada Semester I 2025, proses masih dalam tahap entry data aplikasi BPKP sehingga hasil belum tersedia. Meskipun demikian, tren capaian tahun sebelumnya menunjukkan konsistensi yang perlu terus dijaga agar target tahunan dapat terpenuhi.

6. Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP.

   Realisasi tahun 2024 sebesar 1, telah memenuhi target tahun 2025 yang juga ditetapkan sebesar 1. Hingga Semester I 2025, data penilaian masih dalam proses entry oleh BPKP. Dengan capaian sebelumnya yang sudah optimal, indikator ini diproyeksikan dapat dipertahankan sesuai target tahunan.

7. Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

   Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 memperoleh predikat AA, dan target 2025 tetap ditetapkan pada predikat yang sama. Hingga Semester I 2025, penilaian masih menunggu hasil evaluasi, namun capaian tahun sebelumnya memberikan keyakinan bahwa predikat tersebut dapat dipertahankan.

8. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah.

   Capaian tahun 2024 mencapai 100%, sesuai dengan target 2025 sebesar 100%. Hingga Semester I 2025 capaian masih dalam tahap pemantauan, namun tren capaian sebelumnya mengindikasikan adanya komitmen penuh dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

   Realisasi tahun 2024 tercatat 3,41, dengan target tahun 2025 sebesar 3,56. Hingga Semester I 2025 telah tercapai nilai 3,615 yang melampaui target tahunan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan nyata kualitas pelayanan publik dan respon positif dari Perangkat Daerah terhadap kinerja Inspektorat.

10. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100.

    Pada tahun 2024 belum terdapat capaian (N/A). Sementara itu, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 1 inovasi, dan hingga Semester I telah berjalan proses pengembangan aplikasi pengawasan SIMAPAN (Sistem

Manajemen Pengawasan). Inovasi ini diproyeksikan mampu mendukung efektivitas pengawasan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif meskipun sebagian besar indikator masih menunggu hasil evaluasi resmi dari instansi terkait. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari mekanisme penilaian yang terpusat pada kementerian/lembaga, seperti BPKP, KemenPANRB, Setda, maupun KPK. Kendati demikian, capaian tahun sebelumnya yang relatif tinggi memberikan landasan yang kokoh dan keyakinan kuat bahwa target tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Beberapa indikator menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, seperti capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah melampaui target tahunan pada Semester I 2025. Hal ini menandakan bahwa upaya perbaikan layanan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah telah dirasakan manfaatnya oleh perangkat daerah. Selain itu, inisiatif pengembangan inovasi SIMAPAN (Sistem Manajemen Pengawasan) juga menjadi wujud nyata komitmen untuk menghadirkan sistem pengawasan yang lebih modern, transparan, dan berdaya guna.

Sedangkan untuk indikator lain seperti tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta nilai maturitas SPIP menunjukkan tren capaian yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa meskipun masih menunggu validasi penilaian dari lembaga berwenang, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah berjalan pada jalur yang tepat.

Dengan mempertimbangkan capaian, progres, dan inisiatif perbaikan yang telah dilakukan, Inspektorat Daerah Kota Bogor meyakini bahwa target kinerja tahun 2025 dapat direalisasikan sesuai harapan. Pencapaian ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pengawasan, tetapi juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Daerah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen utama penilaian kinerja. IKU ini menjadi tolok ukur sejauh mana tujuan strategis dapat diwujudkan secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Namun demikian, pencapaian IKU tidak berdiri sendiri, melainkan sangat ditunjang oleh ketercapaian kinerja pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan demikian, keterpaduan antara capaian IKU dan realisasi program/kegiatan menjadi gambaran menyeluruh atas efektivitas peran Inspektorat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sampai dengan semester 1 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	28,16	25.217.252.636,00		6.143.931.434,00		7.360.873.696,00		13.504.805.130,00	
	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	27,78								
	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Nilai	13,03								
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Nilai	21,70								
	perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	100,00								
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100,00								

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Persentase Kepatuhan Anggaran	**Persen**	**100,00**								
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	**Persen**	**> = 95**								
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persen**	**94,00**								
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	**Nilai**	**87,11**								
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**Nilai**	**88,75**								
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	**Nilai**	**88,38**								
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**Nilai**	**88,38**								
	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	**Persen**	**94**								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	223.830.600,00	9,68	4.403.000,00	13,17	4.695.500,00	22,86	9.098.500,00	22,86
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	6.055.000,00	2	773.000,00	2	1.065.500,00	4	1.838.500,00	30,36
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	217.775.600,00	0	3.630.000,00	0	3.630.000,00	0	7.260.000,00	3,33
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**16,85**
					Predikat Kinerja						**SR**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	Persen	100	20.999.135.702,00	25,09	5.269.084.933,00	31,01	6.513.700.098,00	56,10	11.782.785.031,00	56,10
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	624	20.954.391.702,00	157	5.258.344.933,00	194	6.502.960.098,00	350,24	11.761.305.031,00	56,13

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	44.744.000,00	0,5	10.740.000,00	0,5	10.740.000,00	0,96	21.480.000,00	48,01
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**52,07**
					Predikat Kinerja						**R**
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	983.302.900,00	2,55	25.120.000,00	104 1,46	261.615.000,00	29,16	286.735.000,00	29,16
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	983.302.900,00	1,5	25.120.000,00	16,0	261.615.000,00	17,50	286.735.000,00	29,16
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**29,16**
					Predikat Kinerja						**SR**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	1.059.232.400,00	10,39	58.511.862,00	16,86	164.401.293,00	27,25	222.913.155,00	27,25
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	123.983.600,00	4,6	9.589.315,00	12,7	26.211.000,00	17,33	35.800.315,00	28,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	69.787.200,00	4,9	7.191.998,00	5,2	7.549.998,00	10,14	14.741.996,00	21,12
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	632	42.363.600,00	67,70	4.538.000,00	107,04	7.175.200,00	174,74	11.713.200,00	27,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	823.098.000,00	0,32	37.192.549,00	1,05	123.465.095,00	1,37	160.657.644,00	19,52
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**24,29**
					Predikat Kinerja						**SR**
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	100	417.620.800,00	98,90	412.876.300,00	1,04	3.980.000,00	99,93	416.856.300,00	99,93
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	219.727.500,00	0,99	217.150.000,00	0,01	1.890.000,00	1,00	219.040.000,00	99,69
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	197.893.300,00	8,90	195.726.300,00	0,10	2.090.000,00	9,00	197.816.300,00	99,96

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**99,82**
					Predikat Kinerja						**ST**
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	656.937.635,00	22,45	167.408.909,00	18,12	128.024.952,00	40,57	295.433.861,00	40,57
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	178.521.551,00	1,90	28.220.663,00	1,81	26.985.850,00	3,71	55.206.513,00	30,92
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	478.416.084,00	3,49	139.188.246,00	2,53	101.039.102,00	6,03	240.227.348,00	50,21
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**40,57**
					Predikat Kinerja						**SR**
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	877.192.599,00	38,51	206.526.430,00	9,87	284.456.853,00	48,38	490.983.283,00	48,38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	247.113.127,00	1,51	53.281.355,00	1,31	46.350.228,00	2,82	99.631.583,00	40,32
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	246.257.242,00	9,47	116.564.500,00	0,33	4.057.500,00	9,80	120.622.000,00	48,98
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	383.822.230,00	0,19	36.680.575,00	1,22	234.049.125,00	1,41	270.729.700,00	70,54
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**53,28**
					Predikat Kinerja						**R**
					Rata Rata Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)						**46,32**
					Predikat Kinerja						**SR**
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"**	**Persen**	**70,63**	**648.957.700,00**		**99.132.000,00**		**72.165.000,00**		**171.297.000,00**	
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Persen**	**90,2**								
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	**Persen**	**90**								

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	601.112.100,00	1,96	99.132.000,00	1,54	72.165.000,00	3,49	171.297.000,00	3,49
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	167.240.000,00	0,00		0,45	25.035.000,00	0,45	25.035.000,00	14,97
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	36	17.878.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	102.772.700,00	0,79	80.752.000,00	0,00		0,79	80.752.000,00	78,57
Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	195.021.600,00	0,09	18.380.000,00	0,24	47.130.000,00	0,34	65.510.000,00	33,59
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	118.199.800,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**25,43**
					Predikat Kinerja						**SR**
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	Persen	100	47.845.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	30.192.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	17.653.600,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**0,00**
					Predikat Kinerja						**SR**
					Rata Rata Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan (%)						**1,75**
					Predikat Kinerja						**SR**
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"**	**Persen**	**10**	**736.560.600,00**		**4.005.000,00**		**11.583.000,00**		**15.588.000,00**	
	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	**Persen**	**90**								

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2025
					TRIWULAN I		TRIWULAN II				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	NIlai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional	**Persen**	**87**								
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	736.560.600,00	0,26	4.005.000,00	2,27	11.583.000,00	2,53	15.588.000,00	7,03
Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	186.123.600,00	0,00		0,81	4.188.000,00	0,81	4.188.000,00	2,25
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	6	208.008.000,00	0,12	4.005.000,00	0,21	7.395.000,00	0,33	11.400.000,00	5,48
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	253.751.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	88.678.000,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00
					Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						**1,93**
					Predikat Kinerja						**SR**
					Rata Rata Capaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (%)						**7,03**
					Predikat Kinerja						**SR**
				26.602.770.936,00		**6.247.068.434,00**		**7.444.621.696,00**		**13.691.690.130,00**	
					Rata Rata Capaian Kinerja Program (%)						**33,48**
					Predikat Kinerja						**SR**

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II pada indikator program dan indikator kegiatan yang tertuang dalam tabel 2.2, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat diukur capaiannya dikarenakan masih dalam tahapan proses. Berikut penjelasan hasil evaluasi pada indikator program dan indikator kegiatan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berikut hasil evaluasi Indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

   Nilai SAKIP di lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor menunjukkan bahwa pada tahun 2024 berhasil mencapai skor 90,75, yang termasuk kategori sangat baik. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang semakin terintegrasi. Sementara itu, untuk tahun 2025 masih belum terdapat hasil nilai karena masih dalam proses evaluasi. Dengan demikian, capaian tahun 2024 menjadi landasan penting bagi Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk terus menjaga konsistensi serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya

b. Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko Di Lingkungan Perangkat Daerah

   Persentase pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko yang telah disusun oleh perangkat daerah untuk mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Indikator ini tercapai 100%, sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah melaksanakan rencana tindak pengendalian risiko secara optimal, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan mitigasi risiko yang memadai.

c. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Secara Tepat Waktu

   Mengukur kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal yang ditentukan (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan. Target penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu sebesar 100% berhasil dipenuhi. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

d. Persentase Kepatuhan Anggaran

Persentase pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan anggaran tahun 2025 mencapai 100% sesuai target. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan, dan mendukung prinsip akuntabilitas fiskal.

e. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA

Indikator ini adalah perbandingan antara jumlah anggaran yang terealisasi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Target realisasi anggaran minimal 95% berhasil dipenuhi. Hal ini mencerminkan perencanaan yang realistis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif.

f. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator mengukur keterbukaan dan kemudahan akses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah oleh masyarakat. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tercapai sesuai target sebesar 94%. Pencapaian ini memperkuat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota Bogor

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah kepada publik. Nilai SKM tahun 2025 sebesar 90,38 yang menunjukkan bahwa pelayanan Inspektorat Daerah dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis kebutuhan pengguna.

h. Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah

Mengukur tingkat kepatuhan dan kelengkapan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan. Target pengelolaan BMD sebesar 94% telah tercapai. Capaian ini menggambarkan adanya kepatuhan yang baik dalam pengelolaan aset daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara efisien dan efektif. Program ini juga bertujuan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, proses, maupun kewenangan. Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung oleh berikut hasil evaluasi indikator pada program Penyelenggaraan Pengawasan :

a. Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"

   Mengukur persentase perangkat daerah yang memiliki skor minimal dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Target 70,63% berhasil dicapai, menunjukkan peningkatan kepatuhan perangkat daerah dalam implementasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

   Mengukur persentase tindak lanjut rekomendasi BPK oleh perangkat daerah sesuai ketentuan waktu yang berlaku. Realisasi sampai dengan hingga Semester I 2025, realisasi masih menunggu pemutakhiran data dari BPK. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal telah dilaksanakan dengan baik dan menjadi landasan optimisme pencapaian target pada akhir tahun.

c. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP

   Mengukur persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 realisasi belum diperbarui karena masih menunggu pemutakhiran dari Inspektorat Provinsi. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, peluang pencapaian target tahun 2025 tetap terbuka lebar melalui penguatan mekanisme koordinasi serta monitoring tindak lanjut rekomendasi.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi merupakan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi. Program Perumusan Kebijakan. Berikut hasil evaluasi pada indikator program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

a. Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai di atas "75"

   Mengukur persentase unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan nilai minimal 75. Pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor kepada Unit Kerja yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas diberikan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Tujuan dari pembangunan Zona Integritas adalah untuk mengubah budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Target 2025 belum tercapai karena belum ada penilaian dari instansi berwenang. Perlu penguatan strategi dan pendampingan agar capaian meningkat di periode mendatang.

b. Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3

   Indikator ini mengukur persentase perangkat daerah yang telah mencapai level 3 SPIP, yaitu kondisi pengendalian internal terdokumentasi dan konsisten dijalankan. Realisasi belum ada karena beluma ada penilaian dari BPKP. Upaya akan difokuskan pada pemenuhan dokumen dan konsistensi implementasi SPIP agar dapat memenuhi target di tahun berikutnya.

c. Nilai Capaian MCP KPK di atas rata-rata Nasional
   Mengukur tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan II belum ada realisasi dikarenakan belum ada penilaian dari KPK. Pada tahun sebelumnya, capaian MCP Inspektorat Daerah Kota Bogor berada pada angka 91, melampaui rata-rata nasional,

yang menunjukkan implementasi program pencegahan korupsi berjalan baik. Namun, untuk tahun 2025, belum tersedia penilaian dari KPK sehingga capaian belum dapat ditentukan. Meskipun demikian, upaya pemenuhan indikator MCP terus dilakukan melalui pendampingan perangkat daerah, penguatan SPIP, dan optimalisasi implementasi Zona Integritas untuk menjaga keberlanjutan capaian di atas standar nasional.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana kerja perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja disertai pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sesuai dengan hasil entry dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KOTA BOGOR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**25.957.551.341,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.957.551.341,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**25.957.551.341,00**							**0,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah*** ***Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan*** ***Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah*** ***Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA*** ***Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah*** ***Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah*** ***Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah***	**100 %** **>=95 %** **94 %** **89,25 Nilai** **100 %** **89,39 Nilai** **89,39 Nilai** **27,81 Nilai** **21,73 Nilai** **28,19 Nilai** **13,05 Nilai** **87,87 Nilai** **94 %** **100 %**			**100 %** **88,38 Nilai** **13,03 Nilai** **>=95 %** **21,7 Nilai** **27,78 Nilai** **28,16 Nilai**	**24.486.824.741,00**						**100 %** **>=95 %** **94 %** **89,25 Nilai** **100 %** **89,39 Nilai** **89,39 Nilai** **27,81 Nilai** **21,73 Nilai** **28,19 Nilai** **13,05 Nilai** **87,87 Nilai** **94 %** **100 %**	**0,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah*	100 % 100 %			100 %	272.724.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	100 % 100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			13 Dokumen	47.369.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	225.355.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi*	100 % 100 %			100 %	19.880.400.003,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan			55 Orang/bulan	19.835.656.003,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	55 Orang/bulan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			2 Laporan	44.744.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %			100 %	884.752.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			60 Orang	884.752.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	60 Orang	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*	100 %			100 %	1.292.218.400,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT

Acti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			60 Paket	159.277.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	60 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			48 Paket	76.322.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	48 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	632 Paket			632 Paket	44.008.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	632 Paket	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan			7 Laporan	912.544.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	7 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	100.066.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD*	90 %			90 %	417.620.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	90 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	- Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	219.727.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit			8 Unit	197.893.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	9 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %			100 %	656.954.435,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	178.521.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	478.432.884,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik*	100 %			100 %	1.082.154.303,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	270.380.561,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	7 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			89 Unit	66.462.542,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	20 Unit	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	745.311.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal "20"*** ***Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK*** ***Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP***	**92 Persentase** **75.4 Persentase** **90.2 Persentase**			**70.63 Persentase** **90.2 Persentase** **90 Persentase**	**625.673.800,00**						**92 Persentase** **75.4 Persentase** **90.2 Persentase**	**0,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP* *Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* *Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"*	100 % 36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah 100 % 70,63 Persen	544.961.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 % 36 Perangkat Daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan			9 Laporan	151.654.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	3 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36 Laporan			36 Laporan	35.596.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	36 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan			1 Laporan	118.881.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan			1 Kesepakatan	197.723.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Kesepakatan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen			4 Dokumen	41.106.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	4 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan*	100 %			100 %	80.712.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 %	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan			1 Laporan	53.195.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan			100 Laporan	27.517.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	100 Laporan	0,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Nilai Capaian MCP KPK diatas rata-rata nasional Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPIP pada level 3 Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"***	**15 Persentase 90 Persentase 88 Persentase**			**87 Persentase 90 Persentase 10 Persentase**	**845.052.800,00**						**15 Persentase 90 Persentase 88 Persentase**	**0,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas*	10 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	845.052.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	10 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah			36 perangkat daerah	333.959.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	36 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 perangkat daerah			6 perangkat daerah	290.672.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	6 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan			2 Kegiatan	165.005.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	2 Kegiatan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah			1 perangkat daerah	55.416.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-	1 perangkat daerah	0,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H							**25.957.551.341,00**							**0,00**	

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II serta setelah dilakukan Analisa atas pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kota Bogor melakukan penyesuaian pada beberapa sub kegiatan, hal tersebut perlu dilakukan pergeseran anggaran dan rencana penambahan anggaran untuk mendukung aktifitas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berikut hasil Analisa yang dilakukan terhadap beberapa sub kegiatan :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut disebabkan adanya kenaikan pajak sesuai dengan Kebijakan KPP bahwa perhitungan Tunjangan Pajak sebagai penghasilank Bruto yang mana sebelumnya tidak masuk kedalam komponen Penghasilan yang sebelumnya pada anggaran murni belum teranggarkan serta untuk memfasilitasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
2. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD diajukan penambahan anggaran untuk mengakomodir honorarium Bendahara Pengeluaran sesuai arahan BKAD
3. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan ruang penyimpanan arsip dikarenakan kondisi ruang arsip yang berlubang dan kurang memadai sebagai bentuk pengamanan arsip dan aset Pemerintah Kota Bogor.
4. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut diajukan pengadaan laptop dan OPS untuk meningkatkan efisiensi kerja, mendukung kolaborasi tim secara digital, mempermudah monitoring dan pelaporan, serta sejalan dengan kebijakan SPBE guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diajukan untuk penambahan anggaran, hal tersebut dikarenakan adanya hutang yang harus dibayarkan untuk JKK dan JKM setelah Rekonsiliasi dengan BPJS.

Selain dengan rencana penambahan anggaran tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor di tahun 2025 sampai dengan triwulan II melakukan realokasi anggaran yang terdapat dibeberapa sub kegiatan seperti :

1. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp13.130.000,-
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp72.000,-
3. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Biaya Tiket Pesawat dan Biaya Penginapan sebesar Rp7.562.000,-
4. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilakukan pengurangan anggaran untuk Belanja tagihan listrik sebesar Rp7.171.535,-
5. Pada Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan pengurangan anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp3.450.000,-
6. Pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dilakukan pengurangan anggaran untuk belanja ATK dan honorarium narasumber sebesar Rp13.304.800,-
7. Pada Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal dilakukan pengurangan anggaran untuk Honorarium narasumber sebesar Rp39.000.000,-

Berikut disampaikan Perubahan Anggaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Anggaran Perubahan Rencana Kerja

Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	28,16	25.217.252.636,00	24.731.067.636,00	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	28,16	26.884.788.333	2.153.720.697,00
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	27,78			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	27,78		-
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Nilai	13,03			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Nilai	13,03		-
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Nilai	21,70			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Nilai	21,70		-
			perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	100,00			perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	100,00		-
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100,00			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100,00		-
			Persentase Kepatuhan Anggaran	Persen	100,00			Persentase Kepatuhan Anggaran	Persen	100,00		-
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Persen	> = 95			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Persen	> = 95		-

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persen**	**94,00**			**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persen**	**94,00**		-
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	**Nilai**	**87,11**			**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana**	**Nilai**	**87,11**		-
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**Nilai**	**88,75**			**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM**	**Nilai**	**88,75**		-
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	**Nilai**	**88,38**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**	**Nilai**	**88,38**		-
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**Nilai**	**88,38**			**Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**Nilai**	**88,38**		-
			Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	**Persen**	**94**			**Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah**	**Persen**	**94**		-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	223.830.600,00	197.960.600,00	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100	**197.960.600**	-
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	6.055.000,00	6.055.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	6.055.000,00	-
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	217.775.600,00	191.905.600	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	191.905.600	-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat	Persen	100	20.999.135.702,00	20.999.135.702,00	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat	Persen	100	22.662.536.733	1.481.214.247,00

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
			Waktu dan Sesuai Regulasi					Waktu dan Sesuai Regulasi				
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	20.954.391.702,00	20.954.391.702,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	22,612,632,733	1.663401.031
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	44.744.000,00	44.744.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	49.904.000	5.160.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	983.302.900,00	826.572.900,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	720.3029.00	106.270.000,00
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	983.302.900,00	826.572.900	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	720.3029.00	106.270.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	1.059.232.400,00	755.647.400,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	**768.364.400**	**12.717.000,00**

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	123.983.600,00	123.983.600,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	123.983.600,00	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	69.787.200,00	69.787.200,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	69.787.200,00	-
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	632	42.363.600,00	42.363.600,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	632	48.174.600,00	5.811.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	823.098.000,00	519.513.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	534.110.000	14.597.000,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	100	417.620.800,00	417.620.800,00	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	100	**726.178.900**	**308.558.100,00**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	219.727.500,00	219.727.500,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	219.727.500,00	-
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	197.893.300,00	197.893.300,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	506.451.400,00	308.558.100,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	656.937.635,00	656.937.635,00	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**657.593.885**	**656.250,00**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	178.521.551,00	178.521.551,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	171.350.016,00	7.171.535

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	478.416.084,00	478.416.084,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	444.848.206,00	- 33.567.878,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	877.192.599,00	877.192.599,00	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100	1.214.637.699	337.445.100,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	247.113.127,00	247.113.127,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	247.113.127,00	-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	246.257.242,00	246.257.242,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	397.910.342,00	151.653.100,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	383.822.230,00	383.822.230,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	569.614.230	185.792.000,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"**	**Persen**	**70,63**	**648.957.700,00**	**392.636.700,00**	**Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"**	**Persen**	**70,63**	**411.936.700**	**19.300.000,00**
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	**Persen**	**90,2**			**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**	**Persen**	**90,2**		**-**

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	**Persen**	**90**			**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP**	**Persen**	**90**		-
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	601.112.100,00	369.217.100,00	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	**337.562.300**	**- 31.654.800,00**
		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	167.240.000,00	58.118.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	54.918.000	- 3.200.000,00
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	36	17.878.000,00	-	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	36	-	-
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	102.772.700,00	102.772.700,00	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	102.772.700,00	-
		Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	195.021.600,00	195.021.600,00	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	179.871.600,00	15.150.000
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	118.199.800,00	13.304.800	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	0	13.304.800
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	Persen	100	47.845.600,00	23.419.600,00	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	Persen	100	**23.419.600**	-
		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	30.192.000,00	8.518.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	8.518.000	-

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	17.653.600,00	14.901.600	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	14.901.600	-
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"**	**Persen**	**10**	**736.560.600,00**	**511.852.600,00**	**Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"**	**Persen**	**10**	**508.014.600**	**- 3.838.000,00**
			Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	**Persen**	**90**			**Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3**	**Persen**	**90**		**-**
			NIlai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional	**Persen**	**87**			**NIlai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional**	**Persen**	**87**		**-**
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	736.560.600,00	511.852.600,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	**508.014.600**	**- 3.838.000,00**
		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	186.123.600,00	127.381.600	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	127.381.600	-
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	6	208.008.000,00	44.128.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	6	40.290.000	- 3.838.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	253.751.000,00	253.751.000,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	253.751.000,00	-

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
				VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	88.678.000,00	86.592.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	1	86.592.000	-
						26.602.770.936	25.635.556.936				27.779.416.954,00	1.176.646.018,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan serta menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Lampiran d. Dinas Pendidikan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Bogor mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang seccara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA Perubahan dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tentang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenan.
2. Berpedoman Kepada Perubahan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam fokum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

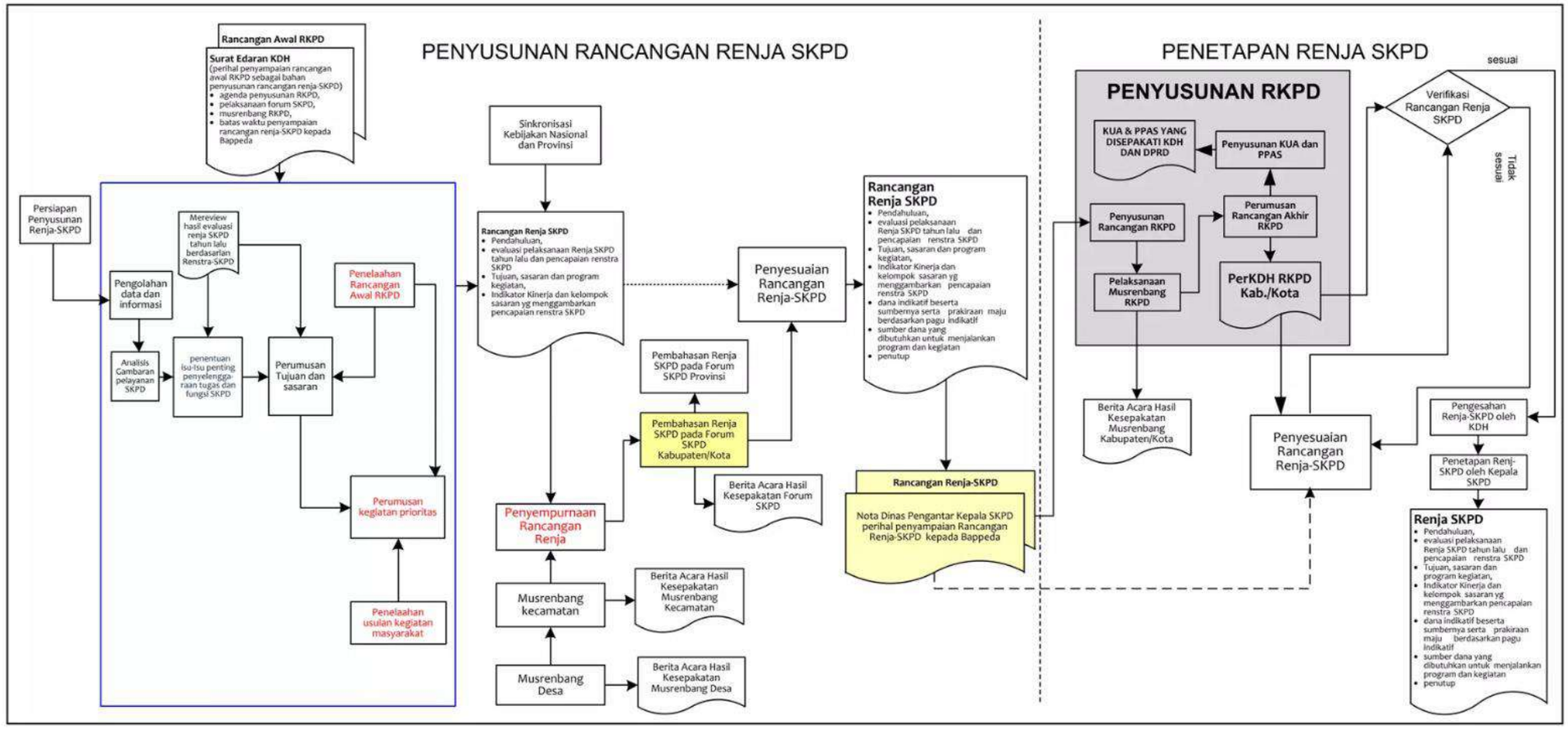

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Dinas PENDIDIKAN Kota Bogor, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas PENDIDIKAN Kota Bogor Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 17).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Bogor disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Bogor melaksanakan 2 (dua) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar **Rp. 786.346.571.565,00**,- terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan.

Tabel 2.1

Pagu Anggaran Program Dinas Pendidikan

Tahun 2025 (Realisasai Juni 2025)

NO	PROGRA/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**462.091.426.663,00**	**178.208.918.893,00**	**38,57**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**324.255.144.902,00**	**39.863.705.109,00**	**12,29**

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2025 didasarkan pada sasaran – sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Sasaran Strategi

NO	Sasaran	Indikator	Terget	Realisasi	%
1	Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas untuk jenjang pendidikan fomral dan non formal	1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,78		
		2. Harapan Lama Sekolah	13,53		

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Pendidikan	Nilai Sakip di lingkup perangkat daerah	85		

Tabel 2.3

Pengukuran Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Sasaran Strategi

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Terget 2025	Realisasi s.d TW 2	%
1	Tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas untuk jenjang pendidikan fomral dan non formal	1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,78		
		2. Harapan Lama Sekolah	13,53		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas Pendidikan	Nilai Sakip di lingkup perangkat daerah	85	80,21	94,4
	Program Pengelolaan Pendidikan				
		Indeks SPM (Pendidikan)	67,62	79,81	118,0
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Angka Partisipasi Sekolah	98,9		0,0
		Literasi	81,6	82,75	101,5
		Numerasi	72,5	79,45	109,5
		Iklim Keamanan Sekolah	72,0	74,29	103,2
		Iklim Kebhinekaan	70,0	72,23	103,2
		Iklim Inklusivitas	57,0	58,85	103,2
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		Angka Partisipasi Sekolah	89,78		0,0
		Literasi	83	84,95	102,3
		Numerasi	62,9	81,01	128,8
		Iklm Keamanan Sekolah	64,41	71,95	111,7
		Iklim Kebhinekaan	75,93	71,25	93,8
		Iklim Inklusivitas	58,26	59,02	101,3
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B	75,17	71,75	95,5
		APS 5-6	62	74,95	120,9
		Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	63,64	61,21	96,2
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan				

		Angka Partisipasi Sekolah	28,3	69,48	245,5
		Literasi Paket A	62,02	67,84	109,4
		Literasi Paket B	59,44	56,28	94,7
		Literasi Paket C	30,35	43,65	143,8
		Numerasi Paket A	52,93	63,59	120,1
		Numerasi Paket B	40,81	53,29	130,6
		Numerasi Paket C	28,14	50,89	180,8
		Iklm Keamanan Sekolah Paket A	64,96	70,44	108,4
		Iklm Keamanan Sekolah Paket B	64,38	64,46	100,1
		Iklm Keamanan Sekolah Paket C	65,13	68,15	104,6
		Iklim Kebhinekaan Paket A	64,82	64,09	98,9
		Iklim Kebhinekaan Paket B	59,85	67,09	112,1
		Iklim Kebhinekaan Paket C	61,4	64,84	105,6
		Iklim Inklusivitas Paket A	49,84	55,46	111,3
		Iklim Inklusivitas Paket B	54,26	56,39	103,9
		Iklim Inklusivitas Paket C	54,68	56,4	103,1

2.2 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas PENDIDIKAN Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun2025\ (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
															I		II		III		IV														
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2					3	4	5		6		7			8			9	10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
						DINAS PENDIDIKAN																	-		#REF!	51,63	38,07	-		#REF!	37,4	82,5		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	-		#REF!	51,63	38,07	-		#REF!	37,4	82,5		

	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									574.353.439.683		100.972.933.485		158.539.678.180	-	-	-	-		259.512.611.665	51,63	38,07	-	259.512.611.665	37,4	82,5		
	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NA	353.876.366.783			435.925.866.945		87.992.896.531		126.237.350.829	-	-	-	-		214.230.247.360	72,01	49,51	72	568.106.614.143	60,8	92,8		
							Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	94	Persentase																									
							Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangk	10,98	Nilai																									

							at daerah																									
							Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	17,8	Nilai																							
							Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	25,8	Nilai																							
							Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	25,98	Nilai																							
							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana	81,11	Nilai																							

							prasarana																									
							Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)	88,38	Nilai																								
							Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	Nilai																								
							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75	Nilai																								

							Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	94	Persentase																							
							Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	95	Persentase																							
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				NA	15.000.000			85.404.000		57.470.000		-	-	-	-	-	1	57.470.000	100,0	67,29	1			100,0	96,6		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	75.000.000	NA	15.000.000	1	Dokumen	85.404.000	1 Dokumen	57.470.000	1 Dokumen	-					1 Dokumen	57.470.000	100,0	67,29	1	Dokumen	72.470.000	100,0	96,6		
																								Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100,00	67,29	1,00	-	-	100,00	96,63		

																									Predikat Kinerja		Sangat Tinggi					Sangat Tinggi			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA				NA	343.134.689.535		424.971.827.172	4.167	-	86.275.828.233	4.167	-	124.579.996.749	-	-	-	-	4.167	-	210.855.824.982	49,37	49,37	4.167	-	553.990.514.517	98,1	72,7		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4327	orang/bulan	434.000.000.000	NA	216.444.685.012	416	orang/bulan	424.895.253.972	416	orang/bulan	86.257.018.233	416	orang/bulan	124.561.186.749					416	orang/bulan	210.818.204.982	49,6	49,62	416	orang/bulan	427.262.889.994	96,3	98,4		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	80.000.000			1	1 laporan	76.573.200	1	1 laporan	18.810.000	1	1 laporan	18.810.000					1	1 laporan	37.620.000	49,1	49,13	1	1 laporan	37.620.000	100,0	47,0		

																								Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		49,4	49,4	4.167	0,0	55399051 4517,0	98,1	72,7		
																								Predikat Kinerja		Sangat tinggi					Sangat tinggi			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				NA	6.039.853.848		5.188.846.788	7	917.813.289	4	660.090.518	-	-	-	-	7	1.577.903.807	90,5	54,4	90		108825109 3,6	70,8	87,1		
						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	192.500.000			1 1 paket	135.660.900	1 paket	133.102.320		-					1 paket	133.102.320	100,0	98,11	1 1 paket		133.102.320	50,0	69,1		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengk	Jumlah Paket Peralatan dan Perleng	1	paket	275.000.000	NA	140.787.400	1 paket	192.112.700	1 paket	109.933.440		-					1 paket	109.933.440	100,0	57,22	1 paket		250.720.840	100,0	91,2		

						apan Kantor	kapan Kantor yang Disediakan																										
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	paket	-	NA	148.607.100	1 paket	192.112.700	1 paket	214.392.828		-					1 paket	214.392.828	100,0	111,60	1 paket	362.999.928				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	385.000.000	NA	115.695.000	1 paket	476.990.000	1 paket	43.350.000	1 paket	139.575.000					1 paket	182.925.000	100,0	38,35	1 paket	298.620.000	50,0	77,6		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	165.000.000	NA	48.626.400	1 paket	125.778.800	1 paket	14.490.000	1 paket	12.720.000					1 paket	27.210.000	100,0	21,63	1 paket	75.836.400	25,0	46,0		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	2.970.000.000	NA	3.124.613.348	1 Laporan	2.520.126.388	1 Laporan	73.059.701	1 Laporan	128.043.518					1 Laporan	201.103.219	100,0	7,98	1 Laporan	3.325.716.567	100,0	112,0		

						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	2.500.000.000	NA	2.461.524.600	3 Dokumen	1.546.065.300	1 Dokumen	329.485.000	1 Dokumen	379.752.000					1 Dokumen	709.237.000	33,3	45,87	1 Dokumen		3.170.761.600	100,0	126,8		
																							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		90,5	54,4	90,5	0,0	108825109 3,6	70,8	87,1		
																							Predikat Kinerja		Sangat tinggi					Tinggi			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD				NA	1.205.426.200		1.893.049.200	-	-	14	268.800.264	-	-	-	-	14	268.800.264	25,7	22,6	-		1.474.226.464	0,0	89,0		

						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	-			3	Unit	1.086.409.000	Unit	-		Unit	-					-	Unit	-	0,0	-		Unit	-	0,0	0,0		
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	605.000.000			8	Unit	415.697.800	Unit	-	2	Unit	69.000.264					2	Unit	69.000.264	25,0	16,60		Unit	69.000.264	0,0	11,4		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44	Unit	550.000.000	NA	1.205.426.200	23	Unit	390.942.400	Unit	-	12	Unit	199.800.000					12	Unit	199.800.000	52,2	51,11		Unit	1.405.226.200	0,0	255,5		
																									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		90,5	54,4	90,5	0,0	108825109 3,6	70,8	87,1		
																										Predikat Kinerja	Sangat tinggi					Tinggi			

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				NA	1.900.399.781		2.581.497.814	2		671.618.304	2		661.851.598	-	-	-	-	2		1.333.469.902	100,0	49,1	2		3.233.869.683	25,0	117,2		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	440.000.000	NA	303.147.505	1 Laporan	531.953.502	1 Laporan	118.008.160	1 Laporan	120.723.208					1 Laporan	238.731.368	100,0	44,88	1 Laporan	541.878.873	25,0	123,2		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	2.420.000.000	NA	1.597.252.276	1 Laporan	2.049.544.312	1 Laporan	553.610.144	1 Laporan	541.128.390					1 Laporan	1.094.738.534	100,0	53,41	1 Laporan	2.691.990.810	25,0	111,2		
																									Rata-rata capaian kinerja		Sangat ti				Rendah			

																							kegiatan (%)		ngi							
																							Predikat Kinerja									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik				NA	1.580.997.419		1.205.241.971	2		70.166.705	2		66.611.700	-	-	-	-	4		136.778.405	20,2	27,3	2		1.717.775.824	10,2	90,4		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	200.000.000	NA	146.075.654	13 Unit	200.423.779	1 Unit		32.667.905	1 Unit		28.821.700					2 Unit		61.489.605	15,4	30,68	1 Unit		207.565.259	20,0	103,8		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	240	Unit	495.000.000	NA	305.740.000	8 Unit	314.048.192	1 Unit		37.498.800	1 Unit		37.790.000					2 Unit		75.288.800	25,0	23,97	1 Unit		381.028.800	0,4	77,0		

							Dipelihara																									
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.100.000.000	NA	1.129.181.765	3	Unit	690.770.000	Unit	-	Unit						Unit	-	0,0	-	Unit	1.129.181.765	0,0	102,7		
																								Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		20,2	27,3	2,0	0,0	171775758 24,0	10,2	90,4		
																								Predikat Kinerja		Rendah					Rendah			
																								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		77,3	53,5	634,6	0,0	56810661 4143,0	60,8	92,8		
																								Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang				Sedang			

						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Siswa Miskin yang mendapat beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya (SD, SMP, dan PKBM)	2,80 Persen			NA	302.553.861.279		138.427.572.738	1.970	12.980.036.954	1.878	32.302.327.351	-	-	-	-	3.846	45.282.364.305	31,2	26,6	1,4		31074071594,4	13,9	72,2		
							Indeks SPM (Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal yang telah diberikan daerah kepada warga negara daerahnya) Pendidikan	77,19 Indeks																									

						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					NA	194.224.550.736		52.265.516.172	51	4.998.503.126	49	11.673.541.703	-	-	-	-	98	16.672.044.829	27,3	27,7	5,7		559626313 87,5	14,9	117,9		
							Angka Partisipasi Sekolah	98,95	Persen																							
							Literasi	82,25	Skor																							
							Numerasi	73,24	Skor																							
							Iklm Keamanan Sekolah	69,05	Skor																							
							Iklim Kebhinekaan	79,91	Skor																							
							Iklim Inklusivitas	58,32	Skor																							
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang	13.552.000.000	NA	741.785.200	1 Ruang	1.066.059.000	1 Ruang	1.260.000	1 Ruang	99.730.170					1 Ruang	100.990.170	100,0	9,47	1 Ruang	842.775.370	50,0	6,2		

						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	Ruang	1.210.000.000	NA	1.052.700.601	2	Ruang	1.028.881.700	1	Ruang	800.000			-					1	Ruang	800.000	50,0	0,08	1	Ruang	1.053.500.601	33,3	87,1		
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17	Unit	6.085.370.000	NA	1.802.169.259	6	Unit	1.321.486.000	1	Unit	1.512.000			-					1	Unit	1.512.000	16,7	0,11	1	Unit	1.803.681.259	5,9	29,6		
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	Paket	8.271.477.720	NA	1.809.994.000	6	Paket	1.500.000.000	1	Paket	1.000.000	1	Paket	1.942.193.720					2	Paket	1.943.193.720	33,3	129,55	1	Paket	3.753.187.720	100,0	45,4		
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15	Unit	2.251.684.765			37	Unit	1.686.527.269		Unit			Unit	1.976.600					-	Unit	1.976.600	0,0	0,12		Unit	1.976.600	0,0	0,1		
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	438	Peserta Didik	284.974.000	NA	177.199.400	438	Peserta Didik	420.041.100		Peserta Didik			Peserta Didik	37.452.000					-	Peserta Didik	37.452.000	0,0	8,92		Peserta Didik	214.651.400	0,0	75,3		

							Akademik dan Non Akademik																										
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	85	Orang	3.250.000.000	NA	3.415.236.565	72	Orang	2.754.913.024	22	Orang	607.304.607	22	Orang	481.847.776					44	Orang	1.089.152.383	61,1	39,53	22	Orang	4.504.388.948	25,9	138,6		
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	280	Orang	679.300.000	NA	1.009.833.410	150	Orang	1.082.707.200		Orang			Orang	21.600.000					-	Orang	21.600.000	0,0	1,99		Orang	1.031.433.410	0,0	151,8		

							dan Kualifikasi																										
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	285	Satuan Pendidikan	950.000.000	NA	370.654.000	281	Satuan Pendidikan	167.500.000		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan	-					-	Satuan Pendidikan	-	0,0	-		Satuan Pendidikan	370.654.000	0,0	39,0		
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	534	Orang	990.893.000	NA	1.033.975.346	530	Orang	17.211.228.056	22	Orang	3.706.088.764	22	Orang	3.156.960.104					44	Orang	6.863.048.868	8,3	39,88	22	Orang	7.897.024.214	4,1	797,0		
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	0	Dokumen	-	0		1	Dokumen	280.526.400	1	Dokumen	86.200.000	1	Dokumen	-					1	Dokumen	86.200.000	100,0	30,73	1	Dokumen	86.200.000	0,0	0,0		

						Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan																																		
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	39	Ruang	13.552.000.000	NA	5.563.780.491	6	Ruang	1.843.354.900	1	Ruang	190.063.218	1	Ruang	77.003.180					2	Ruang	267.066.398	33,3	14,49	1	Ruang	5.830.846.889	2,6	43,0		
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	285	Satuan Pendidikan	495.000.000	NA	854.703.800	281	Satuan Pendidikan	450.000.000		Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan	122.544.400					-	Satuan Pendidikan	122.544.400	0,0	27,23		Satuan Pendidikan	977.248.200	0,0	197,4		
						Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	98	Ruang	34.134.277.018	NA	29.056.994.700	33	Ruang	17.906.791.523	1	Ruang	404.274.537	1	Ruang	2.209.733.753					2	Ruang	2.614.008.290	6,1	14,60	1	Ruang	31.671.002.990	1,0	92,8		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	15267	Peserta Didik	36.727.000.000	NA	20.382.876.212	13879	Peserta Didik	3.545.500.000		Peserta Didik			Peserta Didik	3.522.500.000					-	Peserta Didik	3.522.500.000	0,0	99,35		Peserta Didik	23.905.376.212	0,0	65,1		

							Peserta Didik																								
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		27,3	27,7			14,9	117,9		
																							Predikat Kinerja		rendah				rendah	tinggi		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					NA	74.810.895.299		71.739.373.874	807	4.474.589.420	767	20.035.715.164	-	-	-	-	1.574	24.510.304.584	35,3	26,9		99.321.199.883	12,8	89,2		
							Angka Partisipasi Sekolah	99,25	Persen																							
							Literasi	93	Skor																						
							Numerasi	72,9	Skor																						
							Iklm Keamanan Sekolah	74,41	Skor																						
							Iklim Kebhinekaan	85,93	Skor																						

							Iklim Inklusivitas	68,26	Skor																								
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0	Unit	-			2	Unit	36.744.241.000	1	Unit	26.342.000	1	Unit	13.167.763.826					2	Unit	13.194.105.826	100,0	35,91	1	Unit	13.194.105.826	0,0	0,0		
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	Unit	-			4	Unit	1.022.842.000	1	Unit	328.000	1	Unit	1.220.500					2	Unit	1.548.500	50,0	0,15	1	Unit	1.548.500	0,0	0,0		
						Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	30	Ruang	10.648.001.062	NA	379.531.498	27	Ruang	5.770.113.000	1	Ruang	800.000	1	Ruang	252.036.780					2	Ruang	252.836.780	7,4	4,38	1	Ruang	632.368.278	3,3	5,9		
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	Paket	1.664.220.030	NA	2.476.501.000	3	Paket	3.247.292.400	1	Paket		1	Paket	1.000.000					2	Paket	1.000.000	66,7	0,03	1	Paket	2.477.501.000	100,0	148,9		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menenga	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama	2560	Peserta Didik	15.291.250.000	NA	30.292.453.119	2560	Peserta Didik	6.765.450.000	650	Peserta Didik	1.710.300.000	650	Peserta Didik	4.141.500.000					1.300	Peserta Didik	5.851.800.000	5,1	86,50	650	Peserta Didik	36.144.253.119	2,5	236,4		

						h Pertama	yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik																																		
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3130	Peserta Didik	2.023.500.000	NA	665.156.800	2880	Peserta Didik	700.874.790	80	Peserta Didik	41.801.200	80	Peserta Didik	71.103.100					160	Peserta Didik	112.904.300	5,6	16,11	80	Peserta Didik	778.061.100	2,6	38,5		
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	65	Orang	2.500.000.000	NA	2.798.983.867	56	Orang	2.000.334.344	18	Orang	388.565.220	18	Orang	305.027.034					36	Orang	693.592.254	64,3	34,67	18	Orang	3.492.576.121	27,7	139,7		
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	450	Orang	750.000.000	NA	371.276.000	400	Orang	332.500.000	27	Orang	108.500.000									27	Orang	108.500.000	6,8	32,63	27	Orang	479.776.000	6,0	64,0		

						Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																												
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	131	Satuan Pendidikan	675.000.000	NA	575.270.000	126	Satuan Pendidikan	275.000.000	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	95.482.200					-	Satuan Pendidikan	95.482.200	0,0	34,72	Satuan Pendidikan	670.752.200	0,0	99,4		
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	128	Orang	1.825.000.000	NA	314.800.700	378	Orang	14.405.952.340	15	Orang	2.090.315.000	15	Orang	2.000.581.724					30	Orang	4.090.896.724	7,9	28,40	15	Orang	4.405.697.424	11,7	241,4		

							Sekolah Menengah Pertama																									
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	Dokumen	-			1 Dokumen	184.774.000	1 Dokumen	60.395.000		-					1 Dokumen	60.395.000	100,0	32,69	1 Dokumen	60.395.000	0,0	0,0		
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4200	Satuan Pendidikan	865.000.000	NA	781.744.000	126 Satuan Pendidikan	290.000.000	12 Satuan Pendidikan	47.243.000		-					12 Satuan Pendidikan	47.243.000	9,5	16,29	12 Satuan Pendidikan	828.987.000	0,0	95,8		
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		35,3	26,9	0,0	0,0	99321199883,0	12,8	89,2		
																							Predikat Kinerja		sangat rendah					sangat rendah	tinggi		

						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					NA	15.278.808.415		9.205.239.692	565	1.876.727.608	563	397.957.684	-	-	-	-	1.128	2.274.685.292	25,2	21,7		17.553.493.707	9,3	40,7		
							APS 5-6	75,47	Skor																								
							Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	62,3	Skor																								
							Proporsi Jumlah Stuan PAUD Terakreditasi B	63,94	Skor																								
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	unit	450.000.000			2 unit	275.000.000	1 2 Unit								1 2 Unit	-	50,0	-	1 2 Unit	-	50,0	0,0		
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil	400	Peserta Didik	900.000.000	NA	255.362.815	980 Peserta Didik	205.347.500	15 Peserta Didik	17.559.600	15 Peserta Didik	104.489.800					30 Peserta Didik	122.049.400	0,3	59,44	15 Peserta Didik	377.412.215	3,8	41,9		

							Peserta Didik																											
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1710	Orang	5.950.000.000	NA	4.666.400.000	1450	Orang	5.338.526.000	450	Orang	1.344.186.800	450	Orang	8.080.000					900	Orang	1.352.266.800	62,1	25,33	450	Orang	6.018.666.800	26,3	1012		
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	735	Orang	1.600.000.000	NA	511.064.000	640	Orang	1.014.916.000	70	Orang	71.350.000	70	Orang	122.339.200					140	Orang	193.689.200	21,9	19,08	70	Orang	704.753.200	9,5	44,0		
						Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang Dilaksa	600	Satuan Pen	820.000.000	NA	585.805.800	373	Satuan Pen	137.566.400		Satuan Pen			Satuan Pen	28.038.800					-	Satuan Pen	28.038.800	0,0	20,38		Satuan Pen	613.844.600	0,0	74,9		

						Manajemen PAUD	nakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		didikan					didikan			didikan			didikan							didikan					didikan										
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	750	Orang	775.000.000	NA	738.084.800	320	Orang	919.628.192	28	Orang	259.321.208	28	Orang	99.497.484					56	Orang	358.818.692	17,5	39,02	28	Orang	1.096.903.492	3,7	141,5		
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	Dokumen	-			1	Dokumen	858.660.000	1	Dokumen	184.310.000			-					1	Dokumen	184.310.000	100,0	21,46	1	Dokumen	184.310.000	0,0	0,0		
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	0	Komunitas	-			25	Komunitas	99.368.000		Komunitas			Komunitas	2.265.200					-	Komunitas	2.265.200	0,0	2,28		Komunitas	2.265.200	0,0	0,0		

						Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi																										
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	Orang	-			370	Orang	260.100.000	Orang		Orang	7.478.400					-	Orang	7.478.400	0,0	2,88		Orang	7.478.400	0,0	0,0		
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	575	Satuan Pendidikan	866.250.000			300	Satuan Pendidikan	96.127.600	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	25.768.800					-	Satuan Pendidikan	25.768.800	0,0	26,81		Satuan Pendidikan	25.768.800	0,0	3,0		
																								Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		25,2	21,7	0,0	0,0	17553493707,0	9,3	40,7		

																							Predikat Kinerja		sangat rendah				sangat rendah	sangat rendah		
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								5.217.443.000	547	1.630.216.800	499	195.112.800	-	-	-	-	1.046	1.825.329.600	37,3	30,3		1.825.329.600	18,6	41,3		
							Angka Partisipasi Sekolah	28,5	Persen																						
							Literasi	62,22	Skor																						
							Numerasi	53,13	Skor																						
							Iklm Keamanan Sekolah	65,16	Skor																						
							Iklim Kebhinekaan	65,02	Skor																						
							Iklim Inklusivitas	50,04	Skor																						

						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1530	Peserta Didik	3.253.000.000	NA	1.784.550.000	1364	Peserta Didik	2.238.219.000	364	Peserta Didik	632.000.000	364		-					728	Peserta Didik	632.000.000	53,4	28,24	364	Peserta Didik	2.416.550.000	23,8	74,3		
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	315	Orang	1.500.000.000	NA	866.740.000	241	Orang	1.444.636.000	100	Orang	355.938.000	100	Orang	127.120.000					200	Orang	483.058.000	83,0	33,44	100	Orang	1.349.798.000	31,7	90,0		
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonform	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat	410	Orang	530.000.000	NA	205.478.800	140	Orang	214.282.000	15	Orang	3.000.000	15	Orang	2.472.400					30	Orang	5.472.400	21,4	2,55	15	Orang	210.951.200	3,7	39,8		

						al/Keset araan	/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																																		
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	49	Satuan Pendidikan	1.835.000.000	NA	705.707.200	46	Satuan Pendidikan	666.856.400	2	Satuan Pendidikan	510.000.000	2	Satuan Pendidikan	33.788.800					4	Satuan Pendidikan	543.788.800	8,7	81,55	2	Satuan Pendidikan	1.249.496.000	4,1	68,1		
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke	45	Orang	200.000.000	NA	105.908.800	90	Orang	92.000.000	47	Orang	42.908.800			-					47	Orang	42.908.800	52,2	46,64	47	Orang	148.817.600	104,4	74,4		

							setaraan																												
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	Dokumen	-			1	Dokumen	215.050.000	1	Dokumen	57.840.000			-					1	Dokumen	57.840.000	100,0	26,90	1	Dokumen	57.840.000	0,0	0,0		
						Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0	Komunitas	-			25	Komunitas	99.368.000		Komunitas			Komunitas	2.476.000					-	Komunitas	2.476.000	0,0	2,49		Komunitas	2.476.000	0,0	0,0		
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	0	Orang	-			215	Orang	158.194.000	18	Orang	28.530.000	18	Orang	3.826.800					36	Orang	32.356.800	16,7	20,45	18	Orang	32.356.800	0,0	0,0		

						Pendidikan	Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan																										
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7640	Peserta Didik	285.000.000	NA	44.939.600	7000	Peserta Didik	88.837.600	Peserta Didik		Peserta Didik	25.428.800					-	Peserta Didik	25.428.800	0,0			Peserta Didik	70.368.400	0,0	24,7		
																								Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		37,3	30,3	-	0	1.825.329.600	18,6	41,3		
																								Predikat Kinerja		sangat rendah					sangat rendah			
																								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		31,2	26,6	1,4		3107407159 4,4	13,9	72,2		
																								Predikat Kinerja		sangat rendah					sangat rendah			

Rata-rata capaian kinerja Program (%)	31,2	26,6	1,4		31074071594,4	13,9	72,2		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	51,63	38,07	-	-	259.512.611.665	37,4	82,5		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	sedang	rendah				sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):									

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel dibawah.

2.1. Program dan Kegiatan

Sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas PENDIDIKAN Kota Bogor pada Tahun 2025 melaksanakan 1 urusan, 3 Program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas PENDIDIKAN Kota Bogor

Jumlah Pagu Anggaran : **Rp. 688.666.513.348,00,-**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							574.432.917.383,00	601.185.186.712,00	792.046.658.398,00	217.613.741.015,00							688.666.513.348,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							574.432.917.383,00	601.185.186.712,00	792.046.658.398,00	217.613.741.015,00							688.666.513.348,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							574.432.917.383,00	601.185.186.712,00	792.046.658.398,00	217.613.741.015,00							688.666.513.348,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Speelifikasi Jenis Pelayanan) Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA				100 10,88 17,8 25,8 25,96 81,11 88,38 88,38 88,75 94 95 Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 10,88 17,8 25,8 25,96 81,11 88,38 88,38 88,75 94 95 Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	436.005.344.645,00	463.344.267.910,00	468.102.526.548,00	-69.691.059,00							435.935.653.586,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah* *Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu*				100 persen	100 persen	85.404.000,00	57.540.000,00	57.540.000,00	-27.864.000,00			-	- -	Dinas Pendidikan		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.404.000,00	57.540.000,00	57.540.000,00	-27.864.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				93 persen	93 persen	424.971.827.172,00	454.404.052.842,00	459.796.996.727,00	34.827.171.555,00			-	- -	DINAS PENDIDIKAN		425.092.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4166 Orang /bulan	4166 Orang /bulan	424.895.253.972,00	454.327.746.442,00	459.722.692.327,00	34.827.438.355,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	- -			425.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	76.573.200,00	76.306.400,00	76.306.400,00	-266.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	5.268.324.488,00	4.142.477.036,00	3.356.237.236,00	-1.912.087.252,00			-	- -	Dinas Pendidikan		4.748.055.081,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	135.660.900,00	135.660.900,00	135.660.900,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			149.226.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	192.112.700,00	422.591.300,00	404.483.300,00	212.370.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			152.653.194,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	271.590.400,00	214.394.900,00	214.394.900,00	-57.195.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			298.749.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	476.990.000,00	438.140.000,00	421.385.000,00	-55.605.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			481.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125.778.800,00	91.489.700,00	38.460.000,00	-87.318.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.332.430,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.520.126.388,00	1.420.134.936,00	890.159.936,00	-1.629.966.452,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.772.139.027,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.546.065.300,00	1.420.065.300,00	1.251.693.200,00	-294.372.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			793.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100 persen	100 persen	1.893.049.200,00	879.716.200,00	1.173.465.700,00	-719.583.500,00			-	- -	Dinas Pendidikan		1.404.584.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	1.086.409.000,00	73.076.000,00	616.154.000,00	-470.255.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			517.280.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	415.697.800,00	415.697.800,00	354.220.600,00	-61.477.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			457.267.580,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	23 Unit	390.942.400,00	390.942.400,00	203.091.100,00	-187.851.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			430.036.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	2.581.497.814,00	3.096.722.306,00	3.096.722.306,00	515.224.492,00			-	- -	Dinas Pendidikan		2.998.047.617,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	531.953.502,00	647.003.602,00	647.003.602,00	115.050.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			743.548.674,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.049.544.312,00	2.449.718.704,00	2.449.718.704,00	400.174.392,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.254.498.743,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik*				100 persen	100 persen	1.205.241.971,00	763.759.526,00	619.562.579,00	-585.679.392,00			-	- -	Dinas Pendidikan		1.602.966.168,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	200.423.779,00	183.303.779,00	183.303.779,00	-17.120.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			497.666.157,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	314.048.192,00	156.685.747,00	155.798.800,00	-158.249.392,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			345.453.011,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	690.770.000,00	423.770.000,00	280.450.000,00	-410.310.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			759.847.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Siswa Miskin yang mendapat beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya (SD, SMP, dan PKBM) Indeks SPM (Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal yang telah diberikan daerah kepada warga negara daerahnya) Pendidikan**				**2,85 67,2 persen Indeks**	**2,85 67,2 persen Indeks**	**138.427.572.738,00**	**137.840.918.802,00**	**323.944.131.850,00**	**114.303.287.024,00**							**252.730.859.762,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa) Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan) Iklim Keamanan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan)*				57 Skor 70 Skor 72,54 SKOR 72 Skor 81,55 skor 98,85 persen	57 Skor 70 Skor 72,54 SKOR 72 Skor 81,55 skor 98,85 persen	52.265.516.172,00	54.577.368.612,00	160.290.477.722,00	108.024.961.550,00			-	-	Dinas Pendidikan		189.346.066.918,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	1.066.059.000,00	322.791.200,00	682.241.000,00	-383.818.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			726.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	1.028.881.700,00	446.241.700,00	445.581.200,00	-583.300.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	1.321.486.000,00	1.319.632.400,00	1.223.216.400,00	-98.269.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			6.085.270.895,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	1.500.000.000,00	2.599.458.592,00	2.599.458.592,00	1.099.458.592,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			5.531.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				34 Unit	52 Unit	1.686.527.269,00	5.387.663.792,00	8.684.331.292,00	6.997.804.023,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			3.461.684.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				436 Peserta Didik	438 Peserta Didik	420.041.100,00	414.035.200,00	414.035.200,00	-6.005.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				94 Orang	72 Orang	2.754.913.024,00	2.655.412.360,00	2.087.675.020,00	-667.238.004,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.154.534.240,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	1.082.707.200,00	615.126.800,00	302.876.400,00	-779.830.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				281 Satuan Pendidikan	281 Satuan Pendidikan	167.500.000,00	94.243.200,00	14.803.200,00	-152.696.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	266 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	102.377.000.000,00	102.377.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				530 Orang	530 Orang	17.211.228.056,00	16.798.729.156,00	15.749.018.006,00	-1.462.210.050,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			19.900.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	280.526.400,00	172.800.000,00	93.200.000,00	-187.326.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			308.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				21 Ruang	6 Ruang	1.843.354.900,00	3.776.112.528,00	4.376.082.528,00	2.532.727.628,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.552.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				281 Satuan Pendidikan	281 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	278.316.800,00	254.436.800,00	-195.563.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				89 Ruang	35 Ruang	17.906.791.523,00	16.152.304.864,00	17.242.022.084,00	-664.769.439,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			34.134.277.018,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				13879 Peserta Didik	13879 Peserta Didik	3.545.500.000,00	3.544.500.000,00	3.544.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			78.631.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Sekolah 13-15* *Iklim Inklusivitas (Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa)* *Iklim Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan)* *Iklim Keamanan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik)* *Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi))* *Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan)*				58.26 Skor 62.9 Skor 64.41 Skor 75.93 Skor 83 Skor 89.78 Persen	58.26 Skor 62.9 Skor 64.41 Skor 75.93 Skor 83 Skor 89.78 Persen	71.739.373.874,00	70.777.207.296,00	124.809.627.800,00	53.070.253.926,00			-	- -	Dinas Pendidikan		46.525.056.844,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	36.744.241.000,00	36.738.681.600,00	36.734.512.800,00	-9.728.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	1.022.842.000,00	1.020.960.000,00	1.978.824.000,00	955.982.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				27 Ruang	27 Ruang	5.770.113.000,00	5.738.223.000,00	5.962.592.000,00	192.479.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	3.247.292.400,00	1.523.000.408,00	1.523.000.408,00	-1.724.291.992,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				25650 Peserta Didik	25650 Peserta Didik	6.765.450.000,00	6.765.450.000,00	7.157.627.000,00	392.177.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.103.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2880 Peserta Didik	2880 Peserta Didik	700.874.790,00	641.094.790,00	591.918.752,00	-108.956.038,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.023.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				56 Orang	56 Orang	2.000.334.344,00	1.698.341.960,00	1.336.136.600,00	-664.197.744,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.334.344,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	400 Orang	332.500.000,00	195.421.200,00	120.043.200,00	-212.456.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	275.000.000,00	165.497.200,00	136.759.500,00	-138.240.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			302.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	113 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	52.990.300.000,00	52.990.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				378 Orang	378 Orang	14.405.952.340,00	14.248.236.340,00	14.204.909.540,00	-201.042.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	184.774.000,00	121.060.000,00	67.330.000,00	-117.444.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	290.000.000,00	1.921.240.800,00	1.789.074.000,00	1.499.074.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	0,00	216.600.000,00	216.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*APS 5-6 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Proporsi Jumlah Stuan PAUD Terakreditasi B*				62 Skor 63.64 Skor 75.17 Skor	62 Skor 63.64 Skor 75.17 Skor	9.205.239.692,00	8.082.922.892,00	17.224.828.292,00	8.019.588.600,00			-	- -	Dinas Pendidikan		10.389.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	275.000.000,00	280.740.000,00	280.740.000,00	5.740.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				9500 Peserta Didik	9800 Peserta Didik	205.347.500,00	123.207.500,00	123.207.500,00	-82.140.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1500 Orang	1450 Orang	5.338.526.000,00	5.297.206.800,00	5.295.313.200,00	-43.212.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			5.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				675 Orang	640 Orang	1.014.916.000,00	808.911.800,00	595.289.200,00	-419.626.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				373 Satuan Pendidikan	373 Satuan Pendidikan	137.566.400,00	91.701.400,00	91.701.400,00	-45.865.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	326 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	9.834.560.000,00	9.834.560.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				320 Orang	320 Orang	919.628.192,00	745.667.792,00	721.775.792,00	-197.852.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	858.660.000,00	478.600.000,00	198.340.000,00	-660.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			414.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				25 Komunitas	25 Komunitas	99.368.000,00	55.176.000,00	7.865.200,00	-91.502.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				400 Orang	370 Orang	260.100.000,00	147.154.000,00	21.478.400,00	-238.621.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	96.127.600,00	54.557.600,00	54.557.600,00	-41.570.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWSIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (ASH Indikatifitas Kondisi yang dibadakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan bertalent istimewa jenjang paket A) (ASH Indikatifitas (Kondisi yang dibadakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan bertalent istimewa jenjang paket B) (ASH Indikatifitas (Kondisi yang dibadakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan bertalent istimewa jenjang paket C) (ASH Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta kontribusi kebangsaan jenjang paket A) (ASH Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta kontribusi kebangsaan jenjang paket B) (ASH Kebhinekaan (Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta kontribusi kebangsaan jenjang paket C) (ASH Kesehatan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), sehat fisik adanya perlindungan dan hukumnya fisik jenjang paket A) (ASH Kesehatan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), sehat fisik adanya perlindungan dan hukumnya fisik jenjang paket B) (ASH Kesehatan Sekolah (Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), sehat fisik adanya perlindungan dan hukumnya fisik jenjang paket C) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam membaca, menulis, menghitung, menggunakan, menafsirkan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam membaca, menulis, menghitung, menggunakan, menafsirkan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) jenjang Paket A) Literasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam membaca, menulis, menghitung, menggunakan, menafsirkan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) jenjang Paket B) Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Jenjang paket A) Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Jenjang paket B) Numerasi (Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Jenjang paket C)				28,14 Skor 28,3 Persen 30,35 Skor 40,01 Skor 49,04 Skor 52,92 Skor 54,26 Skor 54,96 Skor 59,44 Skor 59,95 Skor 61,4 Skor 62,03 Skor 64,36 Skor 64,92 Skor 64,96 Skor 65,13 Skor	28,14 Skor 28,3 Persen 30,35 Skor 40,01 Skor 49,04 Skor 52,92 Skor 54,26 Skor 54,96 Skor 59,44 Skor 59,95 Skor 61,4 Skor 62,03 Skor 64,36 Skor 64,92 Skor 64,96 Skor 65,13 Skor	5.217.440.000,00	4.403.400.000,00	21.619.196.036,00	16.401.755.036,00			-	Penguatan kualitas pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Dinas Pendidikan		6.470.815.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Mendapat Biaya Personil Peserta Didik				2364 Peserta Didik	2364 Peserta Didik	2.238.219.000,00	1.794.113.800,00	2.004.382.800,00	-233.836.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantargebang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial Penguatan kualitas pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Bogor serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026. Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025-2026.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 diarahkan pada 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan didukung dengan 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 mengikuti sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode RPJMD berakhir Tahun 2024;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119); dan
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 126); dan
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan kesehatan di Kota Bogor. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026.
2. Menetapkan Strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan serta program dan kegiatan Tahun 2025.

3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan menciptakan efisiensi, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam alokasi sumberdaya pada pembangunan kesehatan di Kota Bogor.
4. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2025 Dinas Kesehatan Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Penanganan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 melalui 5 program, 19 kegiatan, dan 68 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 242.263.688.865 dan serapan anggaran sebesar 96,47% (Rp. 233.711.057.804) yang bersumber dari APBD maupun diluar APBD. Penjabaran program-program dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan untuk mendukung misi 1 dan 2 Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan kota bogor yang sehat dan mewujudkan kota bogor yang cerdas adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tabel 2. 1 Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

INDIKATOR	2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60,00	59,89	99,8
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,9	6,70	231,0
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,1	7,08	228,4
Persentase Balita berstatus gizi normal	86,60	86,54	99,9
Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90,00	74	82,2
Prevalensi Hipertensi	7,90	9,66	122,3
Case Fatality Rate Covid-19	0,10	0,09	90,0
Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,13	0,18	138,5
Akses sanitasi terhadap air bersih	99,60	99,61	100,0
Akses jamban sehat	84,00	89,64	106,7
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	96,20	99,70	103,6

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diintervensi oleh 4 (empat) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   1) Pembangunan Puskesmas

      Capaian realisasi pada tahun 2023 kurang dari target yaitu hanya 2 dari 3 gedung Puskesmas yang selesai dibangun yaitu Puskesmas Kayu Manis dan Puskesmas Lawanggintung. 1 Puskesmas yang tidak dapat dibangun yaitu Puskesmas Gang Aut dikarenakan terkendalanya status pada sertifikat tanah yang akan di bangun.

   2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

      Tahun 2023 dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan pada 20 puskesmas 1 puskesmas tidak dapat dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi dikarenakan terkendala status kepemilikan bangunan yang saat ini di ambil alih oleh Kelurahan. Sementara upaya yang sudah dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah dengan koordinasi dengan PUPR, dan penanggung jawab program memonitoring kegiatan agar berjalan tepat waktu.

   3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Labkesda Kota Bogor.

   4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah tersedianya 5 unit Genset untuk Puskesmas dan mobil Ambulance.

   5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

      Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar tersedianya 213 unit pemenuhan alat kesehatan di antaranya alat kesehatan untuk PSC, Puskesmas Gang Aut, Puskesmas Mulyaharja, Puskesmas Pondok Rumput, Labkesda dan TCM untuk TBC.

   6) Pengadaan Obat, Vaksin

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah Pengadaan Obat dan Vaksin yaitu untuk menjamin ketersediaan obat obatan dan vaksin sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas yang meliputi pelayanan reguler dan pelayanan obat utuk program kesehatan seperti : Program penyakit Tuberclosis, Program penyakit HIV Aids, Program

Jiwa, Program Kesehatan ibu dan anak, Program Gizi, Program Imunisasi dan lainnya.

Pemenuhan ketersediaan obat di Puskesmas telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan obat yaitu perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penerimaan, penyimpanan serta pendistribusian obat dan vaksin untuk 25 Puskesmas sehingga menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Vaksin yang efisien, efektif dan rasional.

7) Pengadaan Bahan Habis Pakai

Tujuan dari sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai program PTM dan Keswa, yang digunakan dalam upaya percepatan pencapaian indikator SPM dengan menggunakan BHP dalam kegiatan deteksi dini PTM dan kesehatan jiwa

Pengadaan yang dilaksanakan oleh subkor PTM Keswa pada sub kegiatan ini yaitu: 1) DBHCHT : Pengadaan Cholsterol, Pengadaan Test strip uji narkoba dan media sampel container (media tampung urine); 2) APBD BHP : Pengadaan Kolesterol dan Baju Fiksasi ; 3) DAK Non Fisik : BMHP Gula Darah, Pengadaan BMHP IVA Test, Pengadaan BMHP Profil Lipid dan Pengadaan BMHP Benzidine Test

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah untuk meningkatkan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Rapat Koordinasi dan Diseminasi Program Kesehatan Keluarga; 2) Penguatan dan Monev Pelaksanaan E-Kohort KIA dan MPDN; 3) Penguatan Pelayanan Antenatal Care; 4) Orientasi Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK); 5) Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Update; 6) Orientasi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital); 7) Pertemuan Pembentukan Komitmen Standarisasi Tata Kelola Klinis; 8) Workshop Pengenalan Tools Klinis; 9) Workshop Alat Pantau Kinerja Jejaring Rujukan; 10) Kunjungan EMAS RS (K1); 11) Kegiatan Pendampingan Klinis Pertama (P1); 12) Kegiatan Pendampingan Klinis Kedua (P2); 13) Orientasi Juknis Pelayanan Posyandu Remaja; 14) Germast Fest di Sekolah; 15) Pemeriksaan HB dan Belanja Cetak.

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah untuk meningkatkan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu : 1) Pembukaan dan Pembentukan Komitmen Standarisasi Tata Kelola Klinis Program EMAS RS dan Puskesmas pada RS Graha Medika, RS Vania, dan RS Mulia) dan 2 Puskesmas (Puskesmas Semplak dan Puskesmas Mulyaharja; 2) Kunjungan EMAS Pertama K1-RS pada RS Graha Medika, RS Vania, dan RS Mulia); 3) Kunjungan EMAS Pertama K1-Puskesmas pada dan 2 Puskesmas (Puskesmas Semplak dan Puskesmas Mulyaharja; 4) Workshop Pengenalan Tools Klinis; 5) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P1) RS; 6) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P2) RS; 7) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P3) RS; 8) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P1) Puskesmas pada puskesmas Semplak dan Mulyaharja; 9) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P2) Puskesmas pada puskesmas Semplak dan Mulyaharja ; 10) Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P3) Puskesmas Pada puskesmas Semplak dan Mulyaharja; 11) Workshop Pengenalan & Implementasi APKJR (Alat Pantau Kinerja Jejaring Rujukan) dan 12) Closing Pendampingan Maklumat Pelayanan RS dan Puskesmas pada RS Graha Medika, RS Mulia, RS Vania, Puskesmas Semplak dan Mulyaharja.

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu : 1) Pertemuan Pengkajian Audit Maternal Perinatal pada RS dan Puskesmas yang terdapat kasus kematian ibu dan bayi baru lahir.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan balita yaitu Workshop Konvensi Hak Anak dan Penguatan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan pada balita sesuai standar.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada

sub kegiatan ini yaitu : Rapat Koordinasi Tim pelaksana penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tujuan dari Sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada usia produktif. Berfokus pada upaya promosi kesehatan serta deteksi dini kesehatan minimal satu tahun sekali dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Penyediaan media KIE (Standding banner, Buku Juknis GIF, Buku Juknis IVA / Paliatif, Buku Juknis Keswa, Buku Juknis PTM, Buku Juknis PTM, Buku Juknis UBM, leaflet GIF, Leaflet IVA/ Paliatif, leaflet Keswa, leaflet PTM, leaflet UBM); 2) Penyediaan Blanko Form FR PTM; 3) Pemantapan Tatalaksana Program Indera; 4) Peningkatan kapasitas Bidan Pelaksana IVA; 5) Peningkatan Self Esteem Bagi Petugas Program PTM Puskesmas; 6) Refreshing Pencacatan dan Pelaporan : Pamong Walagri melalui aplikasi Pamong Walagri; 7) Sosialisasi Pencegahan PTM dan Deteksi Dini PTM Bagi Masyarakat Umum Dan Khusus; 8) Sosialisasi Percepatan Pencapaian SPM; 9) Workshop IVA; 10) Workshop Pandu PTM; 11) Workshop Program Indera.

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu : 1) Workshop Caregiver PJP Lansia bagi petugas puskesmas.

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada penderita hipertensi sesuai standar, mulai dari pencegahan, deteksi, pengobatan, sehingga menjaga kualitas hidup yang lebih baik melalui gerakan germas dan mengurangi risiko komplikasi penyakit lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Monitoring dan evaluasi Aplikasi Surveilance PTM; 2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis; 3) Peningkatan Self esteem bagi petugas Program PTM puskesmas; 4) Workshop Penyakit Degeneratif; 5) Workshop UBM; 6) Honor Petugas Entri Data Surveilance PTM Faskes (Non ASN).

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah untuk memberikan layanan yang

komprehensif kepada penderita diabetes militus sesuai standar, mulai dari pencegahan, deteksi, pengobatan, sehingga menjaga kualitas hidup yang lebih baik melalui gerakan germas dan mengurangi risiko komplikasi penyakit lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Monev Program PTM; 2) Pertemuan Integrasi Program dalam Akselerasi Pencapaian SPM; 3) Pertemuan Refreshing CARTA PTM; 4) Rakor Paliatif; 5) Refreshing Pencatatan dan Pelaporan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Melalui Sistem Informasi PTM; 6) Upaya Pencegahan dan pengendalian DM Tipe 2.

10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ODGJ dengan menyediakan pelayanan sesuai standar, melakukan kegiatan promotif dalam upaya mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa berat. Juga membentuk koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas dalam penanganan Kesehatan Jiwa Komunitas; 2) Peningkatan Self Efficacy Bagi Petugas Program Keswa Puskesmas; 3) Pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam penanganan kasus gangguan jiwa; 4) Workshop Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit Tuberkulosis sehingga dapat menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 1) Pertemuan Virtual Penguatan SITB, dengan tujuan memberikan penjelasan kepada pengelola data dan pemangku kebijakan di Fasyankes terkait pencatatan dan pelaporan data TB pada SITB. 2) Pertemuan Virtual Monitoring dan Evaluasi TB, dengan tujuan mengevaluasi kegiatan program TB pada Triwulan 1 di Kota Bogor dan meningkatkan layanan TB di Puskesmas se-Kota Bogor.

12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

yaitu : 1) Penguatan SIHA Virtual dengan tujuan agar peserta mampu menerapkan aplikasi SIHA 1.7 pada layanan di Kota Bogor, baik dari segi pencatatan maupun pelaporan. 2) Refresh Layanan HIV Virtual dengan tujuan meningkatkan pelayanan program HIV/AIDS dan IMS di 25 Puskesmas, 9 Rumah Sakit, dan Lapas.

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tersedianya pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan khusus saat terjadi bencana dan keadaaan darurat lainnya sehingga dapat melakukan kesiapsiagaan pertolongan pertama.

14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Pengadaan Makanan Tambahan (APBD) dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjaga status gizi kelompok rawan melalui pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga dapat memberikan pelayanan gizi secara optimal. 2) Sosialisasi Bulan Penimbangan Balita (BOK Stunting), dengan tujuan untuk meningkatkan peran lintas sektor agar kegiatan Bulan Penimbangan Balita terlaksana dengan maksimal. 3) Validasi Hasil Pengukuran (BOK Stunting), dengan tujuan agar diperolehnya data antropometri balita stunting yang valid di kelurahan lokus hasil Bulan Penimbangan Balita. 4) Pelatihan surveilans gizi untuk kader (e-PPGBM), dengan tujuan agar meningkatkan kapasitas Kader dalam kegiatan Surveilans Gizi. 5) Evaluasi hasil pengukuran, dengan tujuan untuk menggali faktor pencetus dan faktor keberhasilan penanganan stunting. 6) Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran. 7) Pertemuan koordinasi surveilans gizi untuk petugas. 8) Sosialisasi ruang laktasi di fasilitas umum. 9) Rapat koordinasi lintas program dalam pemantauan tumbuh kembang balita cegah stunting, dengan tujuan terkoordinasinya pemantauan tumbuh kembang termasuk pencegahan dan penanganan stunting untuk lintas program. 10) Orientasi pemberian tablet tambah darah remaja putri bagi lintas sektor. 11) Peningkatan Kapasitas Petugas terkait penyehatan air dan sanitasi. 12) Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar STBM tingkat Kecamatan. 13) Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar STBM tingkat Kota. 14) Pendampingan keberlanjutan SBS/pendampingan Intervensi kesehatan lingkungan. dan 15) Pengadaan Antropometri Kit.

15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tujuan dari sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga adalah untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, serta memanfaatkan olahraga atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat Kesehatan pekerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas Deteksi FR PTM (Mobil Curhat); 2) Peningkatan Kapasitas Petugas Program Kesehatan Kerja; 3) Peningkatan Kapasitas Petugas Program Kesehatan Olah raga; 4) Sosialisasi Aplikasi SIPGAR bagi OPD; 5) Sosialisasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP); 6) Honorarium Instruktur Senam; 7) Pembuatan Video Materi Sosialisasi K3; 8) Cetak leaftlet Kartu Menuju Bugar (KMB); 9) Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas melalui Kebugaran Jasmani pada Program Kesor (DAK Non Fisik/BOK); 10) Rapat Program Kesehatan Kerja bagi Perusahaan dan Pekerja bersama Disnaker dan BPJS- TK (DAK Non Fisik/BOK); 11) Supervisi Program Kesehatan Kerja bagi Perusahaan dan Pekerja bersama Disnaker dan BPJS-TK (DAK Non Fisik/BOK); 12) Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia pada Program Kesehatan Kerja bagi Kader POS UKK (DAK Non Fisik/BOK); 13) Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia pada Program Aktivitas Fisik (Kesehatan Olahraga) pada Kelompok Olahraga (DAK Non Fisik/BOK).

16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, udara, air, dan tanah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Belanja cetak Buku juknis pedoman, modul program Kesehatan lingkungan; 2) Penggandaan format inspeksi Kesehatan lingkungan SAB kegiatan pengawasan, format penggandaan untuk pendampingan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan disarana TFU,TPM,Fasyankes dan air minum di wilayah kerja puskesmas (bagi Natural leader/kader STBM), form untuk pendampingan pembinaan teknis penyelenggaraan Kesehatan lingkungan disarana tempat fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan,sarana air minum,dan fasyankes (Bintek bagi pada petugas sanitarian puskesmas), format untuk pelaksanaan pembinaan teknis

penyelenggaraan Kesehatan lingkungan disarana tempat fasilitas umum tempat pengelolaaan pangan sarana air minum untuk pembinaan pasar sehat, pembinaan teknis penyelenggaraan Kesehatan lingkungan disarana fasilitas tempat umum untuk pembinaan sertifikat laik sehat pada TFU; 3) Monev pelaporan program Kesehatan lingkungan berbasis aplikasi; 4) Orientasi pelayanan Kesehatan lingkungan bagi sanitarian puskesmas; 5) Orientasi sanitasi total berbasis Masyarakat (STBM) bagi petugas sanitarian puskesmas; 6) Refresing aplikasi penggunaan sanitarian kit bagi petugas puskesmas; 7) pengawasan kualitas air minum (PKAM); 8) pemeriksaan air minum jaringan perpipaan; 9) pemeriksaan air limbah IPAL Puskesmas; 10) Pengangkutan dan pemusnahan limbah medis.

17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan adalah a) Tersedianya Rangka Backdrop Portable; b)Tersedianya Standing Acrylic Display; c) Tersedianya backdrop wall Portable; d) Tersedianya Spanduk BillBoard Bahan Stiker Vinyl; e) Tersedianya Spanduk/Banner; f) Tersedianya Leaflet; g) Tersedianya Poster; h) Terlaksananya Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi (DAK BOK 2023) dengan tujuan Mempromosikan asupan makanan sehat melalui sarapan makanan gizi seimbang, Mempromosikan aktifitas fisik melalui olahraga bersama dan meningkatkan konsumsi Tablet Tambah Darah remaja di sekolah dan i) Terlaksananya Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra atau Kelompok Masyarakat (DAK BOK 2023).

18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tercapainya penguatan kegiatan dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas dan terselenggaranya wadah untuk mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas Kota Bogor.

19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah Melindungi masyarakat dari penularan penyakit agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan dengan dilakukannya beberapa kegiatan sebagai berikut : a) Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans pada 25 Puskesmas

dan 22 RS se Kota Bogor; b) Penguatan Program Surveilans untuk petugas Surveilan pada 25 Puskesmas dan 22 RS se Kota Bogor; c) Penguatan Respon dan Kewaspadaan Dini Penyakit PD3I; d) Pertemuan Surveilans Berbasis RS; dan e) Refreshing Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) untuk petugas surveilan Puskesmas dan RS se kota Bogor.

20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terkena masalah kesehatan jiwa, agar dapat menjalani kehidupan yang bermakna, berfungsi dengan baik, dan meraih pemulihan yang optimal sesuai dengan kapasitasnya. Salah satu indikator pencapaiannya adalah dengan melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Pertemuan monev Program Kesehatan Jiwa; 2) Tata Laksana Gangguan Mental Emosional; 3) Rapat Koordinasi TPKJM (Tim Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat); 4) Orientasi skrining masalah kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan puskesmas; 5) Koordinasi LP/LS Upaya Kesehatan Jiwa Sekolah Terintegrasi dengan UKS; 6) Pendampingan Skrining Bagi Puskesmas.

21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Tujuan dari sub kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA adalah untuk untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan NAPZA; mendorong pencegahan masalah kesehatan jiwa dan NAPZA; serta menyediakan layanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan dukungan berupa deteksi dini kesehatan jiwa dan NAPZA; serta rehabilitasi bagi pasien NAPZA. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Workshop ASSIST.

22) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya monitoring dan evaluasi pada pengelolaan upaya kesehatan khusus meliputi pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan gigi dan

mulut, rekam medis, laboratorium, radiografer, program PIS-PK, quickwins, dan Puskesmas Rawat Inap.

23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Tujuan dari sub kegiatan pelayanan kesehatan menular dan tidak menular adalah memfokuskan pada kegiatan promotif, preventif dan kuratif; serta manajemen penyakit menular dan tidak menular. Kegiatan lainnya adalah untuk meningkatkan penanganan terintergrasi dan terkoordinasi antara fasyankes dalam pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh subkor PTM keswa pada sub kegiatan ini yaitu: 1) Kegiatan Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dan PTM : Paguyuban Salapan; 2) Kegiatan Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dan PTM : Paguyuban Salapan (Perkantoran/lembaga pendidikan); 3) Kegiatan Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dan PTM : Paguyuban Salapan (RS/Klinik); 4) Kegiatan Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dan PTM : Paguyuban Salapan (RS/Klinik); 5) Pertemuan pembinaan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dan PTM Prioritas (puskesmas /korwil); 6) Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan Konseling Upaya Berhenti Merokok di FKTP.

24) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di fasilitas kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat meliputi : 1) Penyediaan Jasa Konsultasi Administrasi Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin. 2) Penyediaan Jasa Konsultasi Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Dikaper Kota Bogor. 3) Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor. 5) Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC); 6) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan; 7) Rekonsiliasi Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin. 8) Rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor. 9) Dialog Stakeholders Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 11) Verifikasi data Jaminan Kesehatan Kota Bogor oleh Kader Kesehatan. 12) Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

PBPU dan BU Kelas 3 (PD Pemda dan Bankeu Prov Jabar tahun 2022/2023). 13) Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Bantuan Iuran 2023).

25) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Tujuan dari penyelenggaraan kota sehat yaitu agar tercapainya kondisi kota untuk hidup bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya program-program dari berbagai sektor yang berdampak kepada meningkatnya sarana produktivitas serta ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok kerja kecamatan dan kelurahan sehat dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kota sehat yang dilaksanakan masyarakat, pemerintah, dan unsur non pemerintah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Pertemuan Verifikasi Kelurahan Open Defecation Free (ODF); 2) Kegiatan Pembinaan Forum Kota Sehat; 3) Pengadaan Sticker Kartu Rumah Kelurahan Open Defecation Free; 4) Rapat Koordinasi Percepatan Kelurahan Open defecation Free (ODF); 5) Cetak spanduk pencanangan kelurahan Open Defecation Free (ODF); dan 6) Pemuktahiran Data Sanitasi.

26) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar tersedianya honorarium kegiatan Imunisasi Covid-19 sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Bogor.

27) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah Melaksanakan pembinaan mutu dan akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Bogor. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota yaitu : 1) Workshop sosialisasi standar akreditasi klinik dengan tujuan agar Meningkatkan mutu dan kinerja dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat ditujukan untuk 35 klinik di Kota Bogor; 2) Workshop sosialisasi standar akreditasi Puskesmas dengan tujuan agar Meningkatkan mutu dan kinerja dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat ditujukan untuk 25 Puskesmas di Kota Bogor; 3) Workshop Tata Kelola mutu Puskesmas; 4) Survey Re – Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi

Klinik dengan tujuan memperoleh peningkatan status akreditasi Puskesmas dan terlaksananya proses survey re akreditasi Puskesmas tahun 2023 kepada 23 Puskesmas di Kota Bogor.

28) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah Melindungi masyarakat dari penularan penyakit agar tidak terjadi kesakitan , kematian dan kecacatan dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yaitu : 1) Fogging Fokus untuk hasil PE Positif yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan DBD; 2) Pengadaan cetak kartu Kusta untuk membantu dalam pencatatan dan pelaporan; 3) Pertemuan Monitoring Kusta; 4) Kegiatan Pertemuan Monev HPISP, dengan tujuan terlaksananya monitoring dan evaluasi Program HPISP di Puskesmas Kota Bogor serta menyusun rencana tindak lanjut pada tahun 2024; 5) Kegiatan Pertemuan Monev Malaria; 6) Pertemuan Penguatan Manajemen POKJA DBD Tingkat Kecamatan; 7) Pertemuan Penguatan Program Filariasis dan Cacingan; 8) Pertemuan Penguatan Program P2 DBD; 9) Pertemuan Penguatan Program P2 ISPA; 10) Pertemuan Penguatan Tenaga Fogger Fogging Fokus; 11) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium dalam Pemeriksa Mikroskopis Malaria; 12) Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pengendalian Zoonosis dengan Pendekatan One Health 13) Pertemuan Monitoring Evaluasi Imunisasi semester 1 dan 2; 14) Pertemuan Sosialisasi Survey Darah Massal di Kelompok Khusus POLRI dan TNI; 15) Pertemuan Sosialisasi Vaksin; 16) Pertemuan Tatalaksana ISPA pada Balita; 17) Pertemuan Tatalaksana ISPA pada Balita; 18) Pertemuan Workshop Pengolahan dan Penyajian Data Kasus Penyakit Menular; 19) adanya Call center Vaksin Covid-19 serta pembelian kuota internet untuk call center tersebut; 20) Pelaksanaan Imunisasi Covid-19- Puskesmas dan sentra vaksinasi; 21) Pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 sebesar 2.253 kg. Pengelolaan limbah medis secara baik agar tidak menyebabkan penularan penyakit, cedera atau kecacatan, pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan limbah. Selain itu mencegah adanya kasus pembuangan limbah medis dilingkungan yang dapat menimbulkan permasalahan hokum.

29) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Workshop Gawat Darurat Medis dengan tujuan

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam menyikapi peristiwa gawat darurat sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya saat terjadinya kegawatdaruratan medis. 2) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pilar Keselamatan dengan tujuan terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi dan kerjasama Lintas Sektor secara terpadu serta meningkatkan pengetahuan tentang penanganan korban akibat krisis kesehatan sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan. 3) Sosialisasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat di Faskes.

30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi lanjut PIS-PK yang berintegrasi dengan program kesehatan di Puskesmas serta tercapainya penguatan kegiatan dan pelaporan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terlaksananya penyusunan profil kesehatan Kota Bogor Tahun 2022, pengadaan Buku Saku Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022, dan sosialisasi Aplikasi Platform Satu Sehat Indonesia.

2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar sistem informasi puskesmas (SIMPUS) di Kota Bogor dapat terkelola dengan baik serta terlaksananya penyebarluasan informasi baik melalui media online, radio, cetak, dan online nasional. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan yaitu : 1) Publikasi Media Online sebanyak 132 kali tayang; 2) Publikasi Media Radio sebanyak 33 kali tayang; 3) Publikasi Media Radio, cetak, dan online nasional sebanyak 22 kali tayang; 4) Pelaksanaan Konferensi Pers yang diikuti oleh 40 orang wartawan dari media cetak maupun online; dan 5) Pengembangan SIMPUS bridging dengan Aplikasi SATUSEHAT Indonesia, Pengembangan untuk bagian farmasi dan antrian online BPJS.

3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar Pemeliharaan jaringan LAN Dinkes, pembayaran internet untuk 2 Puskesmas di Kota Bogor (lawanggintung, pondok rumput) dan call center PSC 119, Pengadaan server untuk aplikasi pamong walagri dan pembelian alat Tanda tangan digital untuk 25 puskesmas, pemeliharaan aplikasi simantan, PBI, e-sir, dikaper, pamong walagri dan PTM dan sewa server SIMPUS BRIN untuk tahun 2022.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terbina dan terkendalinya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di Kota Bogor, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di seluruh fasilitas Kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yaitu : 1) Pertemuan Evaluasi Pelaporan Data Rumah Sakit di RS Online; 2) Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan RS di Masa Pandemi Covid-19; dan 3) Pertemuan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, dan Pengawasan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kota Bogor.

2) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan yaitu 1) Bimbingan Teknis pelayanan kesehatan rujukan online. 2) Monitoring dan Evaluasi Rujukan Lintas Batas. 3) Monitoring dan Evaluasi Tata Laksana Pasien Covid. 4) Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan di Fasilitas Kesehatan. 5) Rapat Koordinasi Stakeholder Rujukan. 6) Workshop Persiapan RS Darurat Pusat Isolasi Covid-19.

2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tabel 2. 2 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023

INDIKATOR	2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	95	99%	104%
Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	100	100%	100%
Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	90	102%	114%

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan diintervensi oleh 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi Registrasi Praktik Mandiri

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk Sosialisasi Registrasi Praktik Mandiri, peserta terdiri dari Dokter Praktik Mandiri dan Bidan Praktik Mandiri dengan materi terkait Arah Kebijakan Penyelenggaraan Registrasi tempat praktik mandiri dan aplikasi registrasi praktik mandiri.

2) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan melalui Pertemuan Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kesehatan dengan peserta terdiri dari tenaga Kesehatan Puskesmas dengan STR SIP yang akan kadaluwarsa dana tau sudah kadaluwarsa

2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumberdaya manusia dalam melaksanakan pelayanan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun kantor dinas

kesehatan. Sasaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu sebanyak 317 orang. Adapun pemenuhan sumberdaya manusia telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember.

2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Tabel 2. 3 Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Tahun 2023

INDIKATOR	2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	86%	100%	116%
Persentase Penggunaan Obat Rasional	82%	82%	100%
Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	94%	100%	106%

Pelaksanaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman diintervensi oleh 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

   1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah agar pangan olahan yang diproduksi oleh IRTP memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang akan beredar di masyarakat melalui peningkatan efektifitas pengawasan pre-market pangan industri rumah tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa bimbingan teknis keamanan pangan dan pemeriksaan sarana IRTP.

2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

   1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas sanitarian dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan pada tempat pengelolaan makanan, meningkatkan pengetahuan bagi pemilik, penanggung jawab, dan karyawan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) seperti Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum, dan meningkatnya para pengusaha untuk memiliki Laik Higiene Sanitasi Pangan atau legalitas dalam perizinan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah penanggung jawab program petugas sanitarian puskesmas sebanyak 55 orang, penanggung jawab pengelola tempat pengelolaan makanan sebanyak 50 Jasa Boga, Para Pelaku Usaha Rumah Makan/Restoran (100 Rumah Makan/Restoran), dan Pelaku Usaha Depot Air Minum sebanyak 50 Depot Air Minum.

3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

   1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terstikernya sentra makanan dan makanan jajanan yang terbina dan diberikan stiker untuk pembinaan.

4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

   1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan post-market sesuai dengan pedoman dan meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa pengawasan sarana produksi IRTP, *sampling* dan pengujian produk pangan industri rumah tangga, pengawasan iklan produk pangan olahan serta desk CAPA iklan pangan olahan, serta monitoring dan tindak lanjut pengawasan sarana IRTP, label dan iklan pangan.

2.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel 2. 4 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2023

INDIKATOR	2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	10,29	10,29	100%
Predikat Kota Sehat	Swastisaba	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat	0

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diintervensi oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

      Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi: 1) Rapat koordinasi penguatan wilayah dalam mendukung program kesehatan Germas (BOK); 2) Pertemuan Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas Terkait Program-Program Inovasi Kesehatan dan Germas; 3) Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Jejaring Kerja dan Mitra Potensial Mendukung Germas; 4) Pertemuan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan/Ormas dalam Mendukung

Implementasi Germas dan Program Kesehatan Lainnya; 5) Pembinaan UKBM dalam Upaya Mendukung Germas; 6) Intervensi Promosi Kesehatan dalam Upaya Mendukung Germas di Berbagai Tatanan; 7) Kampanye Germas melalui Penguatan dan Pengembangan Kampung Germas; 8) Pertemuan Penguatan UKBM Lainnya; 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GERMAS di Tk. Kota; 10) Kampanye Massif Perubahan Perilaku Masyarakat di Berbagai Tatanan; 11) Monev pelaksanaan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui program ngariung sehat; 12) Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan melalui kegiatan Mobil Curhat; 13) Sosialisasi dan Penguatan Peran Pemegang Kebijakan dalam Pengembangan Kelurahan/RW Siaga Aktif; 14) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Germas di Tk. Kota; 15) Penguatan Kelompok Germas Masyarakat dengan Saka Bakti Husada; 16) Pendampingan penerapan Germas di semua tatanan dengan OPD Pembina; 17) Optimalisasi Peran Saka Bakti Husada Kota Bogor; 18) Pembinaan dan Pendampingan Implementasi RW Siaga Strata Pratama; 19) Pembinaan dan Pendampingan Saka Bakti Husada; 20) Pengadaan format - format dalam implementasi, pengawasan dan penegakan KTR; 21) Pertemuan Penguatan Tim Pembina KTR dan OPD Lainnya; 22) Pengadaan Penanda Kawasan Tanpa Rokok di 9 Kawasan; 23) Monitoring dan evaluasi penerapan KTR di angkutan kota; 24) Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Puskesmas dalam implementasi germas dan program kesehatan lainnya; 25) Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam mendukung Pelaksanaan Germas; 26) Monitoring dan Evaluasi penerapan KTR di 8 kawasan; 27) Rapat teknis Persiapan kegiatan HTTS tingkat Kota Bogor; 28) Rapat teknis Persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan KTR tingkat Kota Bogor; 29) Pengadaan Media Spanduk; 30) Pendampingan Penerapan Germas di OPD pembina dengan institusi binaannya; 31) Sidak Terpadu Tim Pembina KTR Kota dan Kecamatan; 32) Pertemuan Penguatan Jejaring Kemitraan Potensial dalam Program PHBS, Germas, dan Program Kesehatan Lainnya; 33) Pertemuan Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Jasmani melalui Aplikasi SIPGAR; 34) Pelaksanaan Germas Melalui Penguatan Penerapan Perda KTR di 9 kawasan; 35) Orientasi

Promosi Kesehatan dalam upaya pencegahan stunting dan edukasi gizi seimbang; 36) Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Karyawan.

2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

      Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Penyediaan Sarana Posyandu di Lokasi Lomba; 2) Kampanye PHBS, Germas, dan Program Kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor; 3) Penyediaan Poster Aneka Tema Kesehatan; 4) Penyediaan Form Monev Germas; 5) Penguatan Implementasi Germas di Puskesmas; 6) Rapat Teknis Persiapan Monev Germas; 7) Penguatan Implementasi Germas di Lingkungan Pemerintah / OPD; 8) Penyediaan Media Leaflet; dan 9) Penyediaan Spanduk.

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

   Rincian kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

   a. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Kader Kelurahan Siaga Aktif

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi pada kinerja Kader Kelurahan Siaga sehingga diharapkan dapat memotivasi peningkatan strata Kelurahan Siaga Aktif di Kota Bogor dengan sasaran kegiatan sebanyak 476 Orang Kader Kelurahan Siaga per bulan.

   b. Penyediaan jasa tenaga kesehatan kader Posbindu

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja kader Posbindu sehingga diharapkan dapat memotivasi peningkatan strata Posbindu dengan sasaran kegiatan sebanyak 2.918 orang Kader Posbindu per bulan.

   c. Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Kader Posyandu

      Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada kader Posyandu sehingga dapat meningkatkan strata Posyandu berupa meningkatnya persentase Posyandu aktif,

dengan sasaran kegiatan sebanyak 5.375 orang perbulan di 979 Posyandu.

d. Penyediaan BOP RW Siaga Covid-19

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan peran aktif RW siaga terutama dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19, termasuk pengawasan kegiatan warga di lingkup RW dengan sasaran kegiatan sebanyak 3.876 RW Siaga Covid-19 selama 5 bulan.

2.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 5 Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023

INDIKATOR	2023		CAPAIAN (%)
	TARGET	REALISASI	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	AA	100%
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,52	3,75	107%

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, diintervensi oleh 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Perencanaan terdiri dari Evaluasi Capaian RPJMD, IKU, IKK, dan Laporan Monev RKPD; dan 2) Penyediaan Dokumen Perencanaan terdiri dari RPJMD Perubahan, Renstra Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, P-RKA, dan DPPA Tahun 2023.

   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data capaian penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub kegiatan ini meliputi : 1) Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM Bidang Kesehatan; 2) Monitoring

dan Evaluasi Capaian IKM; dan 3) Penyediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja terdiri dari LKPJ, LPPD, dan LKIP Tahun 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertujuan untuk memenuhi gaji dan tunjangan (TPP) PNS tahun 2023 sebanyak 14 bulan (Gaji 12 bulan ditambah Gaji ke 13 dan 14). Sasaran dari sub kegiatan ini adalah PNS aktif pada Dinas Kesehatan sebanyak 84 orang dan PNS aktif pada 26 UPTD sebanyak 747 orang, dengan total sasaran sejumlah 831 orang. Adapun jenis tunjangan yang diberikan kepada PNS aktif di Dinas Kesehatan dan UPTD Labkesda yaitu TPP beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja, sedangkan untuk PNS aktif pada 25 UPTD Puskesmas yaitu TPP Kondisi kerja.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rincian kegiatan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja Hibah Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan baik dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat dalam rangka menunjang pencapaian program kesehatan Pemerintah Kota Bogor.

b. Penguatan Tim Keuangan Dinas Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Tim Keuangan Dinkes dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.

c. Penguatan Penerapan Pola PPK BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda

Tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan e-BLUD, rekonsiliasi laporan keuangan BLUD, Bimbingan Teknis Penerapan PPK BLUD, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan

Pelaporan Anggaran, Pendampingan Penatausahaan Keuangan dari BKAD dan KPP Pratama, dan Pendampingan Penerapan QRIS BJB di UPTD.

d. Rapat koordinasi dengan Lintas Sektor

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam penyusunan regulasi penerapan PPK BLUD di UPTD Puskesmas dan Labkesda Kota Bogor.

e. Fotokopi dan Penjilidan Laporan Kegiatan serta Laporan Keuangan

Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen dan laporan dalam bentuk hard copy.

f. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor

Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedianya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bogor.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan kota Bogor dan 9 puskesmas.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik di lingkup dinas kesehatan maupun pada 9 puskesmas serta dalam mendukung pelaksanan vaksinasi covid 19. Terkait hal tersebut, maka pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya Belanja pengadaan kertas untuk akselerasi vaksinasi;
b. Terlaksananya Belanja ATK untuk kebutuhan opersional kantor Dinas Kesehatan dan 9 puskesmas;
c. Terlaksananya Belanja ATK kegiatan vaksinasi covid 19;
d. Terlaksananya Belanja fotocopi berkas vaksinasi covid 19;

e. Terlaksananya Belanja pulsa modem untuk kegiatan vaksinasi covid 19.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam penyediaan peralatan rumah tangga baik di lingkup dinas Kesehatan dan 9 puskesmas .Terkait hal tersebut, maka pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bertujuan memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Selain itu juga memenuhi kebutuhan makanan dan minuman pelaksanaan vaksinasi Covid 19 (pada bulan Januari – Juni 2023).

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam perjalanan dinas baik luar dan dalam kota bogor sehingga meningkatkan kinerja pegawai. Terkait hal tersebut maka pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya Perjalanan dinas luar kota yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan
b. Terlaksananya PD luar kota untuk menghadiri pertemuan/ undangan,
c. Terlaksananya PD luar kota pengiriman sampel pemeriksaaan
d. Terlaksananya PD luar kota untuk merujuk pasien;
e. Terlaksananya PD luar kota untuk pengambilan BHP/ vaksin, dll

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah agar terpenuhinya operasional kantor yang berkaitan dengan

ketersediaan listrik, air, wifi, dan telepon. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya penyedian listrik dan tambah daya di kantor dinas kesehatan; 9 puskesmas
b. Terlaksananya penyedian air PDAM dikantor dinas kesehatan; 9 puskesmas
c. Tersedianya penyediaan telpom di kantor dinas kesehatan; 2 puskesmas
d. Tersedianya fasilitas zoom meeting dikantor dinas kesehatan;
e. Tersedianya pulsa untuk modem internet dalam mendukung pelaksanaan kegiatan; 5 puskesmas

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah terpenuhinya operasional kantor di dinas kesehatan terkait jasa pendukung dalam membantu pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan sehingga kondisi kantor Dinas kesehatan menjadi aman, nyaman dan bersih yang dilakukan oleh pihak ke-3/ outsourching. Selain itu juga diperlukan jasa tenaga yang berperan dalam melaksanakan kegiatan-kegitan di bidang keuangan maupun umum, sehingga tugas dan fungsi sub bagian tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya penyedian jasa keamanan selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) orang melalui pihak ke-3;
b. Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan / OB selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) orang melalui pihak ke-3;
c. Terlaksananya penyediaan jasa driver/ sopir selama 1 tahun sebanyak6 (enam) orang melalui pihak ke-3;
d. Tersedianya tenaga pramusaji selama 1 tahun sebanyak 2 (dua) orang melalui pihak ke-3;
e. Tersedianya tenaga administrasi perkantoran selama 1 tahun sebanyak 8 (delapan) orang
f. Tersedianya tenaga IT selama 1 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang melalui swakelola

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 100%.

1) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

   Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan aset dan perlengkapan/ sarana prasarana kantor yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat menunjang dalam meningkatkan kinerja pegawai serta pemenuhan insfrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a. Terlaksananya pemeliharaan APAR di kantor Dinas Kesehatan;
   b. Terlaksananya pemeliharaan genset dikantor Dinas Kesehatan;
   c. Terlaksananya pemeliharaan Pengharum Ruangan di kantor Dinas Kesehatan;
   d. Terlaksananya pemeliharaan AC di kantor Dinas Kesehatan;
   e. Terlaksananya pemeliharaan computer/notebook dikantor Dinas Kesehatan;
   f. Terlaksananya pemeliharaan airpufier dan hepafilter pada Dinas Kesehatan.

2) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Tujuan dilaksanakan sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung kantor/ bangunan lainnya serta pemenuhan insfrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran.

   Berdasarkan hal tersebut maka pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a. Terlaksananya pemeliharaan halaman/ taman kantor dinas Kesehatan selama tahun 2023;
   b. Terlaksanakannya Rehab Ruang Pelayanan Publik selama tahun 2023;
   c. Terlaksananya rehabilitasi Rehab Area dalam dan luar gedung B dengan diadakannya pengecatan ruangan luar dan dalam Gedung B

d. Terlaksananya rehabilitasi perbaikan-perbaikan washtafel, Perbaikan dinding, Perbaikan keramik rusak, perbaikan instalasi air Kamar mandi, perbaikan atap bocor diarea Gedung A dan Gedung B.
e. Terlaksananya rehabilitasi perbaikan dinding ruang Sub Bagian Keuangan pada Gedung A sekretariat pada bulan November 2023;
f. Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 100%.

1) Pengadaan Mebel

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Mebel serta pemenuhan insfrastruktur didalam kegiatan operasional perkantoran. Khususnya kegiatan pengadaan mebel Puskesmas yang anggarannya di Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya Pengadaan Belanja Modal Kursi pada Puskesmas Sempur selama tahun 2023;
b. Terlaksanakannya Pengadaan Belanja Modal Lemari Arsip pada Puskesmas Sempur selama tahun 2023;
c. Terlaksanakannya Pengadaan Belanja Modal Kursi Besi, Lemari dan Meja Kerja pada Puskesmas Mulyaharja selama tahun 2023;
d. Terlaksanakannya Pengadaan Belanja Modal Kursi Putar pada Puskesmas Belong, Puskesmas Mulyaharja dan Pondok Rumput selama tahun 2023;
e. Terlaksanakannya Pengadaan Belanja Modal Lemari Arsip pada Puskesmas Belong dan Puskesmas Tegal Gundil selama tahun 2023;

2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tujuan dilaksanakannya sub kegiatan ini adalah melakukan pengadaan aset dan perlengkapan/ sarana prasarana kantor yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya pengadaan Exhaust Fan di Puskesmas Pondok Rumput;

b. Terlaksananya pengadaan AC di kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Mulyaharja dan Puskesmas Pondok Rumput;
c. Terlaksananya pengadaan CCTV di kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas Pondok Rumput;
d. Terlaksananya pengadaan Lemari Arsip di Puskesmas Pondok Rumput;
e. Terlaksananya pengadaan Sound System di Puskesmas Sempur;
f. Terlaksananya pengadaan Printer di Puskesmas;
g. Terlaksananya pengadaan LCD Monitor di Puskesmas;
h. Terlaksananya pengadaan Personal Computer di Puskesmas
i. Terlaksananya pengadaan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Bogor

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5	65,00	60	59,89	99,8	55	69,51	126,38
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,7	3,00	2,9	6,7	231	2,8	6,49	231,75
		Angka Kematian Balita Per 1.000 kelahiran hidup	2,9	3,89	3,1	7,08	228,4	3,0	7,41	247,14
		Prevalensi Hipertensi	8,4	7,25	7,9	9,66	122,3	8,4	2,27	27,02
		Prevalensi Diabetes Melitus	2,05	NA	NA	NA	NA	100	33	33,00
		Prevalensi ODGJ	0,14	0,16	0,13	0,18	138,5	0,14	0,08	57,14
		Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	71,32	90	74	82,2	90	43	47,78
		Insiden rate HIV	0,18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1	85,86	86,6	86,54	99,9	87	86,49	99,41
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	96,11	96,2	99,7	104	96,3	100,28	104,13
		Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673	NA	NA	NA	NA	0,72	0,67	93,06
		Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	92	NA	NA	NA	NA	88	91	103,41
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Predikat STBM	Paripurna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.01	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	73,19	73,1708	85	76	89	86	79	91,86
		Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	23	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0	NA	3	2	66,7	1	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 (UPTD PSC)	NA	NA	NA	NA	0	0	NA
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	3	21	20	95,24	4	0	0,00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	NA	NA	NA	NA	3	0	0,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	37	120	242	213	88	169	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	NA	NA	NA	NA	140	0	0,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8695	30336	NA	NA	NA	24606	1452	5,90
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	275	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	97,36	100	99	99	100	28,23	28,23
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	95,88	100	97	97	100	26,59	26,59
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99,69	100	101	101	100	27,79	27,79

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	94,42	100	96	96	100	24,92	24,92
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	24,8	24,80
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	31	31,00
		Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6	3,25	9,8	2,6	26,53	9,7	2,57	26,49
		Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)	2,3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)	4,13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	104,26	100	108	108,00	100	9,75	9,75
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	103,63	100	122	122,00	100	26,97	26,97
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	103,69	100	122	122,00	100	33,02	33,02
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	131,43	100	139,86	139,86	100	59	59,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	110,65	100	113	113,00	26	0	0,00
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	109,07	100	118	118,00	100	21	21,00
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	68	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	96	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase puskesmas dengan kinerja baik	90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	1.119.394	51	55	64	116,36	57	88	154,39

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772	96,11	96,2	99,7	103,64	96,3	100,28	104,13
		Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100	109,47	NA	NA	NA	100	99	99,00
		Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.400	18799	19309	19225	99,56	19309	4.597	23,81
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18518	17672	18432	17991	97,61	18.432	4.301	23,33
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17893	17576	17630	18022	102,22	17.630	4316	24,48
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85207	80091	84824	81232	95,77	84.824	19.721	23,25

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149682	170996	152023	499551	328,60	152.023	37.708	24,80
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	737.301	787616	737301	793570	107,63	755.429	71.895	9,52
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72485	72485	103.954	220499	212,11	103.954	220499	212,11
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.484	63579	67183	82165	122,30	71.575	19.276	26,93
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.445	17.432	17.023	21297	125,11	17.402	5.761	33,11
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	1578	1777	1.465	2049	139,86	1.578	931	59,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38688	22060	19.912	77.597	389,70	40.454	10.664	26,36
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	26469	24.267	28522	117,53	24.267	5.013	20,66
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	1	1	0	0,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	2	8	8	100,00	4	1	25,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60.000	7.313	31664	4568	14,43	39580	556	1,40
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35	39	25	53	212,00	30	30	100,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	15	15	15	100,00	15	3	20,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	NA	NA	NA	NA	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	93	51	55	64	116,36	57	88	154,39
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	4	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7960	22060	19.912	77.597	389,70	19888	1.900	9,55

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2237	26469	24.267	28522	117,53	555	79	14,23
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1939	NA	NA	NA	NA	47	0	0,00
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi yang terpelihara	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan SPM RS	75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang di terbitkan	72	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25	47	60	63	105,00	165	88	53,33
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah rumah sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	180	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	6	6	6	100,00	6	1	16,67
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	96	83,12	90	102	113,33	95	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	96	83,12	90	102	113,33	95	0	0,00
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP	90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150	355	150	120	80,00	1	0	0,00
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan	96	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	35	26	26	26	100,00	1	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12900	79	225	317	140,89	150	71	47,33
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	600	355	280	280	100,00	1	0	0,00
1.02.03.2.03	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	100	100	100	100	100,00	100	0	0,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	290	299	87	87	100,00	289	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	40	92,81	94	100	106	96	30	31,25
		Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	60	100	86	100	116,28	90	0	0,00
		Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	70	98,36	62	50	80,65	63	3	4,76
1.02.04.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat	60	NA	60	80	133,33	80	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	NA	NA	NA	NA	120	0	0,00
1.02.04.2.02	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10	220	2	6	300,00	2	0	0,00
1.02.04.2.03	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat	225	92,81	93	100	107,53	93	30%	0,32

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	225	220	1	0	0,00	175	52	29,71
1.02.04.2.04	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM	84	98,36	62	50	80,65	63	3	4,76

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.04.2.05	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi	500	63,33	56	114	203,57	58	38	65,52
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.04.2.06	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat	94,5	10	10	10	100,00	NA	NA	NA
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	33	40	40	40	100,00	45	22	48,89
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	72,2	69,12	60	74	123,33	NA	NA	NA
		Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri	11,5	10,29	10,29	10,29	100,00	11	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	15,38	40	29	72,50	50	0	0,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	14	56	56	100,00	56	1	1,79
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	70,5	69,12	60	74	123,33	70	0	0,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	4	4	4	100,00	8	1	12,50

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	42	41,87	5,9	12,2	206,78	6	0	0,00
		Persentase Posyandu Aktif	87	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	5	5	5	100,00	5	1	20,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	27,01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	26,55	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah	12,48	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup perangkat daerah	21,97	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase kepatuhan anggaran	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	NA	NA	NA	NA	6	2	33,33
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	66,67%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100,00	6	2	33,33
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6	6	100,00	6	4	66,67
1.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	94	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1338	813	923	854	92,52	1030	852	82,72

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	16	16	16	100,00	16	4	25,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	6	6	6	100,00	1	1	100,00
1.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100,00	1	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	3	4	4	100,00	1	0	0,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1	1	1	100,00	1	0	0,00
1.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	NA	100	78	78,00	100	100	100,00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	NA	132	87	65,91	122	10	8,20
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	NA	103	96	93,20	78	0	0,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	NA	3	3	100,00	164	0	0,00
1.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	4	4	4	100,00	1	0	0,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	5	4	4	100,00	1	0	0,00
1.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	20	24	30	125,00	44	12	27,27
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	480	670	1042	612	58,73	1015	85	8,37
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	3	3	3	100,00	8	0	0,00

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.01.2.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	100	NA	26	26	100,00	NA	NA	NA
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27	NA	26	26	100,00	NA	NA	NA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bogor disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota No 475 Tahun 2008, dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yangmelemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2023 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

a. APBD Kota Bogor sebesar Rp 616.480.300,- (enam ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah); dan
b. APBN sebesar Rp 111.959.800,- (seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD	146.959.700,-
		APBN	111.959.800,-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD	35.010.000,-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD	34.999.800,-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD	34.999.900,-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	APBD	30.000.000,-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD	85.219.200,-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	APBD	29.999.900,-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD	79.300.800,-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	APBD	13.840.000,-
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	APBD	10.480.000,-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	APBD	50.000.000,-
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	APBD	65.671.000,-
Total		**APBD**	**616.480.300,-**
		APBN	**111.959.800,-**

Sumber: Laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi terkait penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Terlambatnya pelaporan SPM selalu menjadi masalah utama, karena terlambatnya pengumpulan data dari level terbawah atau Puskesmas, sehingga berimbas pada pelaporan di tingkat Dinas Kesehatan.
b. Pengisian aplikasi yang ditutup pada tanggal 5 setiap triwulan berjalan menyulitkan untuk urusan kesehatan, karena laporan dari Puskesmas, klinik dan RS masuk ke Program kegiatan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
c. Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan berdasarkan data di lapangan sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
d. Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik. Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya.
e. Perhitungan pencapaian mutu layanan dihitung berdasarkan pengadaan yang dilakukan oleh program terkait, bila pengadaan tidak dilaksanakan atau tidak ada di Kabupaten/Kota maka capaian dianggap nol.
f. Perencanaan dan Penganggaran SPM sejalan dengan penganggaran kegiatan, tidak dikhususkan ke dalam anggaran SPM. Namun Kegiatan yang dijalankan sudah sejalan dengan indikator yang ada dalam SPM.
g. Beberapa indikator mutu layanan tidak mencapai target karena tidak tersedianya barang yang tercantum dalam mutu layanan.

Solusi yang dapat diberikan pada permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Menyamakan persepsi mengenai data sasaran pada awal tahun, sehingga tidak terjadi perubahan target sasaran di tengah tahun berjalan. sesuai dengan pendataan di lapangan.
b. Melakukan bimbingan teknis pada puskesmas terkait pelaporan data layanan kesehatan
c. Peningkatan SDM yang terlatih di bidangnya
d. Memperkuat serta menyamakan persepsi mengenai DO dan Data dasar Jumlah penduduk untuk Prevalensi Program;

e. Melakukan advokasi ke biro pemerintah Provinsi melalui Bagian Adminintrasi Pemerintahan untuk mempertimbangkan dibukanya aplikasi lebih dari tanggal 5
f. Mengusulkan ke program terkait mengenai

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bogor

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Angka usia harapan hidup		√	73.69	73,96	73.93	74.15	73,61	73.82	74.13	74,45	75.52	
2	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs		√	4.75	10.2	10.10	9.80	10,66	5.33	3.25	2,59	2.58	
3	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)		√	4.31	4.42	4.09	3.98	3,74	4.77	4.82	4,16	3.98	
4	cakupan desa siaga aktif		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		√	55	70	65	60	74,50	96.7	73.26	59,89	55	
6	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		√	2.90	3.10	3.00	2.90	3.15	3.47	3.72	6,7	2.80	
7	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup		√	3.35	3.30	3.20	3.10	3.36	3.58	3.89	7,08	3.00	
8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk		√	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.20	0.02	0,02	0.02	
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		√	0.80	0.84	0.88	0.92	1.33	1.35	1.53	2,97	0.96	
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga		√	97.00	98.00	99.00	100.00	93.10	94.90	96.10	97,5	100.00	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan												
11	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)		√	85	86	90	95	87	89.7	92	99,26	100	
12	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk		√	0.66	0.67	0.70	0.71	0.67	0.67	0.71	0,673	0.72	
13	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		√	99.00	90	92	100	63.20	72.1	98.53	92.65%	100	
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		√	97.00	97.50	98.00	98.50	7.90	91.5	96.55	94,1	99.00	
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		√	0	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	≥ 3/100.000 penduduk usia < 15 tahun	7 Kasus Negatif	1 kasus	2.77	25,51 / 100.000	≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	
17	Cakupan pneumonia balita yang ditangani		√	100	60	70	80	24,25	100	78.77	98,31	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		√	100	70	80	100	58,88	100	107.12	112,10	100	
19	Prevalensi Hipertensi		√	9.30	6.50	7.20	7.90	6.40	6.62	7.46	9,66	8.40	
20	Prevalensi Diabetes Militus		√	2.35	2	2	2.05	2.08	2	2.05	2,50	2.05	
21	Persentase kesembuhan TB Paru		√	86	81.22	84.5	86.5	60.84	44.24	84.38	74,28	87.5	
22	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)		√	65.00	62.50	62.00	61.50	19.78	50	135.07	128,17	60.00	
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Angka bebas jentik nyamuk DBD		√	95.30	95.40	95.60	95.70	50.03	92	94.49	94,38	96.00	
25	Persentase penemuan penderita diare pada balita		√	100	100	100	100	21	18	93.13	52,27	100	
26	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		√	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,42	<0,5	0.46	0,47	<0,5	
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		√	100	100	100	100	100	96.11	102.46	109,9	100	
29	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)		√	80	85	90	95	72	85	92	96	100	
30	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)		√	24	31	38	100	97,83	91.53	109.47	94	100	
31	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)		√	96	92	93	96.2	91,1	90.46	96.11	99,7	99,8	
32	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		√	8 (2 pusk)	16 (4 pusk)	100.00	100	8	8	104.08	116%	100	
33	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	√	√	100	100	100	100	93,61	96.70	97.36	99,3	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
34	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	√	√	100	100	100	100	93,14	94.90	95.88	97,5	100	
35	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	√	√	100	100	100	100	96,63	99.70	99.69	101,5	100	
36	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	√	√	100	100	100	100	78,84	94.10	94.42	95,7	100	
37	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani		√	75	76	77	80.5	74.30	80.59	80.4	85,8	85.85	
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
39	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		√	100	100	100	100	84	93.8	100	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		√	100	100	100	100	100	100	131.3	165,4	100	
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
42	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
43	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk		√	0.19	0.19	0.19	0.29	0.19	0.280	0.29	0,29	0.29	
44	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi		√	90	95	100	100	85.71	82	95.45	100	100	
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	100	51.00	46.6	100	100	100	
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	100	18.78	65	104.26	100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Proyeksi	Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	100	60.20	100	100	100	100	
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	100	68.80	101.9	103.63	100	100	
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√	√	100	100	100	100	88.50	104.5	103.69	100	100	
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√	√	100	100	100	100	88.40	76.3	131.43	100	100	
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√	√	100	100	100	100	104.10	50.6	110.65	100	100	
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√	√	100	100	100	100	95.70	92.7	109.07	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangungan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : (a) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; (d) pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang kesehatan.

Adapun berdasarkan hasil identifikasi yang menjadi isu strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut

1. Pembangunan manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pemerataan akses dan mutu kesehatan melalui pendekatan transformasi kesehatan; dan
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan optimalisasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2. 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bogor

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	DINAS KESEHATAN				**619.756.627.468**	**259.757.480.996**	**DINAS KESEHATAN**				**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**619.756.627.468**	**259.757.480.996**	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
	URUSAN BIDANG KESEHATAN				**619.756.627.468**	**259.757.480.996**	**URUSAN BIDANG KESEHATAN**				**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Bogor**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**138.164.130.502**	**136.085.401.033**	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**135.596.080.993**	**-162.481.529**	
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95,00					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95,00			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di	100					Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			lingkungan perangkat daerah						lingkungan perangkat daerah				
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	**Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah**	**66,67**	**258.800.000**	**195.080.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Bogor	**Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah**	**66,67**	**203.080.000**	**63.720.000**	
			Persentase Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	**100**					**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**	**100**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	139.360.000	139.360.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	139.360.000	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	119.440.000	55.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	63.720.000	-55.720.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**129.864.379.817**	**129.810.532.217**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Bogor	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**128.066.124.437**	**53.847.600**	
		Kota Bogor	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**94,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**94,00**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1338	128.380.739.417	128.380.739.417	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1338	126.683.531.637	-1.697.207.780	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	1.369.248.400	1.316.224.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	1.269.024.800	-100.223.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3	114.392.000	113.568.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3	113.568.000	-824.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**3.225.782.500**	**2.188.699.110**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Bogor	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**1.666.151.935**	**-1.125.605.565**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	39.777.000	39.777.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	39.777.000	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	473.871.900	444.851.910	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	193.250.735	-280.621.165	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	66.330.600	66.330.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	66.330.600	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2.011.268.000	1.637.739.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1.166.283.600	-844.984.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	634.535.000	288.475.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1	200.510.000	-434.025.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**1.162.543.700**	**781.986.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Bogor	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**1.774.462.200**	**611.918.500**	
	Pengadaan Mebel	Kota Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	80.443.600	45.346.000	Pengadaan Mebel	Kota Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	116.922.800	36.479.200	Meja rapat aula
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	899.576.500	700.222.700	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	38	882.755.700	-16.820.800	Mesin antrian puskesmas, hanpone PSC dan Televisi Puskesmas, AC, Kamera
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	182.523.600	36.417.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	774.783.700	592.260.100	DBHCHT dan Penambahan intalasi Listrik gedung B lantai 2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.119.399.506**	**2.119.399.506**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bogor	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**2.119.399.506**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	736.550.234	736.550.234	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	736.550.234	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1.382.849.272	1.382.849.272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1.382.849.272	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**1.533.224.979**	**989.703.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bogor	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**1.766.862.915**	**233.637.936**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	348.545.361	348.545.361	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	570.493.600	221.948.239	Biaya Operasional Mobil 2 Unit dan Stikerisasi Brending Ambulance 26 unit

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	480	357.908.958	157.017.679	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	480	165.668.655	-192.240.303	Pelayanan Publik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	826.770.660	484.140.660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1.030.700.660	203.930.000	Pelayanan Publik
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**105.056.996.904**	**104.192.624.904**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**122.391.717.843**	**18.199.092.939**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Prevalensi Diabetes Melitus	**2,05**					**Prevalensi Diabetes Melitus**	**2,05**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	**93,1**					**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**	**93,1**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	**0,673**					**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**	**0,673**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**100**					**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**	**100**			
			Predikat STBM	**Paripurna**					**Predikat STBM**	**Paripurna**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**73,2**	**30.767.787.725**	**30.767.238.725**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**73,2**	**40.957.326.525**	**10.190.087.800**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	**25**					**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**25**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	**24**					**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**	**24**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	**25**					**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**25**			
	Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	0	0	Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	0	0	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	7.350.205.100	7.350.205.100	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	7.733.243.100	383.038.000	Pembuatan IPAL PSC Gesit 119
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	3	1.009.342.200	1.009.342.200	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	3	1.005.529.800	-3.812.400	DED Puskesmas Pondok Rumput

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas						dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	230.106.600	230.106.600	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	228.406.600	-1.700.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	27.890.700	27.890.700	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	3.330.390.700	3.302.500.000	Mengakomodir Misi Walikota : Bogor Sehat, DBHCHT
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	274.324.000	273.775.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	273.775.000	-549.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10	21.752.076.025	21.752.076.025	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10	28.262.639.825	6.510.563.800	Mengakomodir Misi Walikota : Bogor Sehat Puskesmas 24 jam, DBHCHT, DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Bogor	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8695	123.843.100	123.843.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kota Bogor	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8695	123.341.500	-501.600	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**100**	**72.502.196.781**	**72.086.953.181**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bogor	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**100**	**79.986.314.920**	**7.484.118.139**	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	**100**					**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**	**100**			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	**68**					**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM**	**68**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						**pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	19.400	46.210.000	38.335.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	19.400	34.435.000	-11.775.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.518	32.184.000	32.184.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.518	32.184.000	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.893	236.185.600	176.270.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.893	36.181.200	-200.004.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.207	75.500.000	23.760.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.207	23.760.000	-51.740.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149.682	69.361.400	30.104.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149.682	30.104.000	-39.257.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	737.301	155.993.600	155.993.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	737.301	126.948.800	-29.044.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.485	61.969.300	57.244.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.485	58.644.300	-3.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.484	59.718.200	36.478.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.484	19.678.400	-40.039.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.445	12.264.800	12.264.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.445	11.364.800	-900.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.578	25.186.200	25.186.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.578	25.186.200	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38.688	78.275.000	78.275.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38.688	76.475.000	-1.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.267	43.079.500	43.079.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24.267	43.079.500	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	15.624.800	15.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	10.800.000	-4.824.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	712.439.279	712.439.279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	704.388.100	-8.051.179	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	136.228.200	136.065.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	136.065.800	-162.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	231.248.200	227.261.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	237.236.000	5.987.800	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	47.695.200	8.700.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	354.881.000	307.185.800	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	5.818.000	5.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	5.400.000	-418.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	21.456.000	21.456.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	21.456.000	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60.000	11.596.700	11.596.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60.000	11.596.700	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	9.799.600	9.799.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	9.799.600	0	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	69.144.530.802	69.144.530.802	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2	76.033.008.120	6.888.477.318	Penambahan Iuran PBI dan Hutang Jamkesda Tahun 2024
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Bogor	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	3	0	0	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Bogor	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	3	321.875.000	321.875.000	DAK NF
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	170.978.400	119.978.400	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	117.278.400	-53.700.000	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12	2.000.000	2.000.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	12	2.000.000	0	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	87.791.000	87.791.000	DAK NF
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	101	102.127.200	67.400.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	101	67.400.000	-34.727.200	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	187.731.100	89.503.900	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	86.803.900	-100.927.200	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan	1	751.130.100	751.130.100	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan	1	934.630.100	183.500.000	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				P3K-Dokter NON ASN, Perawat dan Supir
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.119	27.449.600	26.800.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.119	21.400.000	-6.049.600	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Bogor	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.282	18.300.000	18.300.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Bogor	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.282	18.300.000	0	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Bogor	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.939	5.400.000	5.400.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Bogor	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.939	5.400.000	0	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	276.048.000	276.048.000	DAK NF
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kota Bogor	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	4.716.000	4.716.000	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kota Bogor	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	4.716.000	0	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Kota Bogor**	**Jumlah aplikasi yang terpelihara**	**10**	**1.727.539.998**	**1.280.716.198**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Kota Bogor**	**Jumlah aplikasi yang terpelihara**	**10**	**1.390.359.598**	**446.823.800**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	1.727.539.998	1.280.716.198	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	1.390.359.598	-337.180.400	Server Simpus 2 unit
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang di terbitkan**	**75**	**59.472.400**	**57.716.800**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang di terbitkan**	**75**	**57.716.800**	**1.755.600**	
		Kota Bogor	Persentase Laporan SPM RS	80,00				Kota Bogor	Persentase Laporan SPM RS	80,00		0	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25	54.855.600	53.100.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25	53.100.000	-1.755.600	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan	2	4.616.800	4.616.800	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan	2	4.616.800	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pelayanan Kesehatan Rujukan		dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				Pelayanan Kesehatan Rujukan		dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan**	**96,5**	**2.209.689.280**	**2.135.418.080**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan**	**96,5**	**2.884.315.080**	**74.271.200**	
		Kota Bogor	**Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan**	96				Kota Bogor	**Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan**	96		0	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	**Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP**	**91**	**3.067.200**	**1.800.000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Kota Bogor	**Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP**	**91**	**1.800.000**	1.267.200	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	160	3.067.200	1.800.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	160	1.800.000	-1.267.200	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan**	**96,5**	**1.928.122.080**	**1.855.118.080**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan**	**96,5**	**1.944.605.080**	**73.004.000**	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	72.777.200	21.600.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	21.600.000	-51.177.200	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12.900	1.760.618.080	1.760.618.080	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12.900	1.760.618.080	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	600	94.726.800	72.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	600	162.387.000	67.660.200	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	**Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi**	**100**	**278.500.000**	**278.500.000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bogor	**Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi**	**100**	**937.910.000**	**0**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	295	278.500.000	278.500.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	295	937.910.000	659.410.000	DAK NF dan Penambahan untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kota Bogor**	**Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi**	**70**	**208.129.800**	**207.906.600**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kota Bogor**	**Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi**	**70**	**770.205.600**	**223.200**	
			Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	**65**					**Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan**	**65**			
			Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	**75**					**Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian**	**75**			
			Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	**45**					**Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan**	**45**			
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	**Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat**	**62**	**8.605.300**	**8.605.300**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Kota Bogor	**Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat**	**62**	**6.805.300**	0	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	8.605.300	8.605.300	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	6.805.300	-1.800.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan	Kota Bogor	**Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat**	**6**	**6.211.600**	**6.211.600**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan**	Kota Bogor	**Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat**	**6**	**6.211.600**	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		**produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu**				**Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**		**produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu**				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12	6.211.600	6.211.600	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	12	6.211.600	0	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	**Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat**	**235**	**41.016.800**	**41.016.800**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Kota Bogor	**Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat**	**235**	**455.227.800**	0	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235	41.016.800	41.016.800	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	235	455.227.800	414.211.000	DAK NF
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Kota Bogor**	**Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM**	**90**	**95.902.500**	**95.778.500**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kota Bogor**	**Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM**	**90**	**95.778.500**	**124.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	1	95.902.500	95.778.500	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	1	95.778.500	-124.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Kota Bogor**	**Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi**	**550**	**46.995.200**	**46.896.000**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Kota Bogor**	**Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi**	**550**	**46.896.000**	**99.200**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	46.995.200	46.896.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	46.896.000	-99.200	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Kota Bogor**	**Persentase pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat**	**95,0**	**9.398.400**	**9.398.400**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Kota Bogor**	**Persentase pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat**	**95,0**	**159.286.400**	**0**	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	9.398.400	9.398.400	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	159.286.400	149.888.000	DAK NF
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**17.245.274.179**	**17.136.130.379**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**17.168.004.012**	**109.143.800**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**32**	**83.589.867**	**62.814.067**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**32**	**43.197.700**	**20.775.800**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	83.589.867	62.814.067	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	43.197.700	-40.392.167	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga bertarget PHBS tingkat kota**	**71,00**	**308.898.300**	**271.630.300**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga bertarget PHBS tingkat kota**	**71,00**	**285.780.300**	**37.268.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	308.898.300	271.630.300	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	285.780.300	-23.118.000	Penambahan anggaran untuk Uang pengganti transportasi untuk Anggota Tim Monev KTR pada kegiatan Monitoring dan evaluasi penerapan KTR di angkutan kota dengan rincian: 150 OH X Rp. 105.000 = Rp. 15.750.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**16.852.786.012**	**16.801.686.012**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**16.839.026.012**	-13.760.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			**Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**					**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	16.852.786.012	16.801.686.012	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	16.839.026.012	-13.760.000	DAK NF
	PUSKESMAS BOGOR SELATAN				**2.891.638.409**	**0**	**PUSKESMAS BOGOR SELATAN**				**3.372.781.884**	**481.143.475**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.891.638.409**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.372.781.884**	**481.143.475**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.891.638.409**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.372.781.884**	**481.143.475**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.891.638.409**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.957.619.984**	**65.981.575**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di**	**12,48**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			lingkup Perangkat Daerah						**lingkup Perangkat Daerah**				
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.891.638.409**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.957.619.984**	**65.981.575**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.891.638.409	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.957.619.984	**65.981.575**	Silpa 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**411.449.900**	**411.449.900**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	411.449.900	411.449.900	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Konseling dan Call Center 24 Jam						Konseling dan Call Center 24 Jam				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3622	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3622	17.300.000	17.300.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.118	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.118	7.150.000	7.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	142.730.000	142.730.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	8.950.000	8.950.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38	4.000.000	4.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	52.020.000	52.020.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	86.914.900	86.914.900	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	3.945.000	3.945.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	20.500.000	20.500.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**72,40**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**12**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**					**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**					**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	PUSKESMAS CIPAKU				3.370.629.892	0	PUSKESMAS CIPAKU				4.857.870.290	1.487.240.398	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.370.629.892	0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.857.870.290	1.487.240.398	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.370.629.892	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.857.870.290	1.487.240.398	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.370.629.892	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.946.882.590	576.252.698	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.370.629.892**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.946.882.590**	**576.252.698**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.370.629.892	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.946.882.590	576.252.698	Penambahan pendapatan dan Proyeksi Silpa 2024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**0**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**-**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**907.275.700**	**907.275.700**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah**	**92**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			yang memenuhi standar						yang memenuhi standar				
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan	100	907.275.700	907.275.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		penyeledikan epidemiologi < 24 jam				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		penyeledikan epidemiologi < 24 jam				
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			
			Persentase warga negara usia 60 tahun	100					Persentase warga negara usia 60 tahun	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		34.650.000	34.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6895	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15.150.000	15.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	844	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		7.500.000	7.500.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		262.050.000	262.050.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		15.350.000	15.350.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	72	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		92.760.000	92.760.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		345.994.700	345.994.700	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		5.465.000	5.465.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		6.000.000	6.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		41.400.000	41.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		52.600.000	52.600.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		756.000	756.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**72,40**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**12**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	PUSKESMAS BONDONGAN				2.534.913.800	0	PUSKESMAS BONDONGAN				3.175.825.943	46.288.543	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.534.913.800	0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.175.825.943	46.288.543	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.534.913.800	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.175.825.943	46.288.543	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.534.913.800	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.581.202.343	46.288.543	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.534.913.800**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.581.202.343**	**46.288.543**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.534.913.800	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.581.202.343	46.288.543	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**590.911.600**	**590.911.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	590.911.600	590.911.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	801	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	801	26.400.000	26.400.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7432	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7432	28.950.000	28.950.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	79	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.000	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.000	17.000.000	17.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	163.781.000	163.781.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	18.750.000	18.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	79	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	79	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	73.650.000	73.650.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	146.115.600	146.115.600	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	6.225.000	6.225.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	34.800.000	34.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	43.500.000	43.500.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**72,40**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**12**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG				**2.196.408.786**	**0**	**PUSKESMAS LAWANG GINTUNG**				**2.837.839.476**	**110.734.890**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.196.408.786**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.837.839.476**	**110.734.890**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.196.408.786	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.837.839.476	110.734.890	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.132.679.486	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.243.414.376	110.734.890	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**28.106.800**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**28.106.800**	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	28.106.800	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	28.106.800	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**50.850.600**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**50.850.600**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7	50.850.600	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7	50.850.600	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.053.722.086**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.164.456.976**	**110.734.890**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.053.722.086	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.164.456.976	110.734.890	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**63.729.300**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**63.729.300**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100					Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	23	63.729.300	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	23	63.729.300	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25					Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	25					Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	25			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	73,19					Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	73,19			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	23.496.000	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	23.496.000	0	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	40.233.300	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	40.233.300	0	
3	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**526.983.800**	**526.983.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	526.983.800	526.983.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan TBC sesuai standar						**pelayanan TBC sesuai standar**				
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585	33.550.000	33.550.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5428	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5428	19.750.000	19.750.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	532	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	532	6.700.000	6.700.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	160.059.000	160.059.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	11.850.000	11.850.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	57	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	57	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	67.310.000	67.310.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	126.759.800	126.759.800	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	4.800.000	4.800.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	36.200.000	36.200.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**72,40**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**12**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS BOGOR TIMUR				**4.268.633.607**	**0**	**PUSKESMAS BOGOR TIMUR**				**5.120.140.674**	**851.507.067**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.268.633.607**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.120.140.674**	**851.507.067**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**4.268.633.607**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**5.120.140.674**	**851.507.067**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di**	**100**	**4.268.633.607**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di**	**100**	**4.288.299.774**	**19.666.167**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		lingkungan perangkat daerah				DAERAH KABUPATEN/KOTA		lingkungan perangkat daerah				
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**4.268.633.607**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**4.288.299.774**	**19.666.167**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	4.268.633.607	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	4.288.299.774	19.666.167	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**0**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**-**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**828.128.900**	**828.128.900**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	828.128.900	828.128.900	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	585	28.050.000	28.050.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5428	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5428	41.300.000	41.300.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	532	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	532	16.200.000	16.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	244.720.000	244.720.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	17.150.000	17.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	57	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	57	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	75.440.000	75.440.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	297.003.900	297.003.900	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1	6.225.000	6.225.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Fasilitas Kesehatan Lainnya						Fasilitas Kesehatan Lainnya				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	40.900.000	40.900.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS PULO ARMYN				**2.608.469.842**	**0**	**PUSKESMAS PULO ARMYN**				**3.349.639.856**	**741.170.014**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.608.469.842	0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.349.639.856	741.170.014	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.608.469.842	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.349.639.856	741.170.014	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.608.469.842	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.702.543.056	94.073.214	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.608.469.842**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.702.543.056**	**94.073.214**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.608.469.842	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.702.543.056	94.073.214	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**643.384.800**	**643.384.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	643.384.800	643.384.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678	27.500.000	27.500.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6291	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6291	23.300.000	23.300.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	66	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	871	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	871	9.000.000	9.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	235.374.000	235.374.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	14.950.000	14.950.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	66	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	66	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	85.780.000	85.780.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	142.195.800	142.195.800	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.845.000	5.845.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	4.800.000	4.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	28.200.000	28.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	38.300.000	38.300.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS BOGOR TENGAH				**2.542.869.479**	**0**	**PUSKESMAS BOGOR TENGAH**				**3.016.786.073**	**473.916.594**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.542.869.479**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.016.786.073**	**473.916.594**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.542.869.479	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.016.786.073	473.916.594	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.520.782.279	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.572.526.873	51.744.594	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**19.785.500**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**19.785.500**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	19.785.500	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	19.785.500	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**76.717.378**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**76.717.378**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	76.717.378	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	76.717.378	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**25.531.579**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**25.531.579**	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	37	25.531.579	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	37	25.531.579	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.398.747.822**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.450.492.416**	**51.744.594**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.398.747.822	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.450.492.416	51.744.594	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**22.087.200**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**440.547.200**	**418.460.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Prevalensi Diabetes Melitus	**2,05**					**Prevalensi Diabetes Melitus**	**2,05**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	**93,1**					**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**	**93,1**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	**0,673**					**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**	**0,673**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**100**					**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**	**100**			
			Predikat STBM	**Paripurna**					**Predikat STBM**	**Paripurna**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**22.087.200**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**22.087.200**	**0**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				22.087.200		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				22.087.200		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**100**	**0**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**100**	**418.460.000**	**418.460.000**	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	**100**					**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**	**100**			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	**68**					**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM**	**68**			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	**93**					**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**	**93**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	**1.122.772**					**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**	**1.122.772**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	**4,13**					**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**	**4,13**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	162	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	162	11.550.000	11.550.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1495	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1495	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715	3.600.000	3.600.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	64.322.000	64.322.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	5.550.000	5.550.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	16	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	47.060.000	47.060.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	219.613.000	219.613.000	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	7.800.000	7.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	13.300.000	13.300.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS SEMPUR				**2.145.613.570**	**0**	**PUSKESMAS SEMPUR**				**2.736.686.725**	**591.073.155**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.145.613.570**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.736.686.725**	**591.073.155**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.145.613.570**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.736.686.725**	**591.073.155**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.099.882.770**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.137.247.325**	**37.364.555**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**104.050.000**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**104.050.000**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	104.050.000	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	104.050.000	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.995.832.770**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.033.197.325**	**37.364.555**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.995.832.770	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.033.197.325	37.364.555	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**45.730.800**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**45.730.800**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Prevalensi Diabetes Melitus	**2,05**					**Prevalensi Diabetes Melitus**	**2,05**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	**100**					**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	**100**					**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**	**100**			
			Predikat STBM	**Paripurna**					**Predikat STBM**	**Paripurna**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	**93,1**					**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**	**93,1**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	**0,673**					**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**	**0,673**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**23**	**45.730.800**	**0**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**23**	**45.730.800**	**0**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	**25**					**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**25**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	**25**					**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**	**25**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	**73,19**					**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**73,19**			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15	25.216.000	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15	25.216.000	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	20.514.800	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	20.514.800	0	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**549.996.600**	**549.996.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	549.996.600	549.996.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			pelayanan kesehatan sesuai standar						**pelayanan kesehatan sesuai standar**				
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4778	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4778	21.600.000	21.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	819	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	819	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	207.804.000	207.804.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Kesehatan Kerja dan Olahraga						Kesehatan Kerja dan Olahraga				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	9.850.000	9.850.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	63.250.000	63.250.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	118.427.600	118.427.600	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	24.000.000	24.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	31.800.000	31.800.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Integrasi Layanan Primer (ILP)**				**Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Integrasi Layanan Primer (ILP)**				
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS GANG AUT				**1.048.554.216**	**0**	**PUSKESMAS GANG AUT**				**1.614.539.215**	**565.984.999**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.048.554.216**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.614.539.215**	**565.984.999**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1.048.554.216**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.614.539.215**	**565.984.999**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**1.048.554.216**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**1.225.118.115**	**176.563.899**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**63.338.600**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**63.338.600**	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kota Bogor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	63.338.600	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kota Bogor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	63.338.600	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**86.621.900**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Bogor	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**86.621.900**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**Kota Bogor**	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	86.621.900	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**Kota Bogor**	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15	86.621.900	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**898.593.716**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Kota Bogor	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.075.157.615**	**176.563.899**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	898.593.716	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.075.157.615	176.563.899	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**385.709.100**	**385.709.100**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	385.709.100	385.709.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	13.200.000	13.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	18.800.000	18.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	4.600.000	4.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	143.461.000	143.461.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	6.750.000	6.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	46.800.000	46.800.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	80.673.100	80.673.100	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.085.000	5.085.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	20.800.000	20.800.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS BELONG				**780.197.555**	**0**	**PUSKESMAS BELONG**				**1.145.052.235**	**364.854.680**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**780.197.555**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.145.052.235**	**364.854.680**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**780.197.555**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.145.052.235**	**364.854.680**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**725.658.555**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**844.887.735**	**119.229.180**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**44.142.500**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**44.142.500**	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.098.500	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.098.500	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	34.310.400	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	34.310.400	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.231.600	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.231.600	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2.502.000	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2.502.000	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**33.397.500**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**33.397.500**	**0**	
	Pengadaan Mebel	Kota Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	16.569.700	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	16.569.700	0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	16.827.800	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	16.827.800	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**9.190.848**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**9.190.848**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	9.190.848	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	9.190.848	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**8.730.000**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**8.730.000**	**0**	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	13	8.730.000	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	13	8.730.000	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**630.197.707**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**749.426.887**	**119.229.180**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	630.197.707	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	749.426.887	119.229.180	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**54.539.000**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**54.539.000**	**0**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100					Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**23**	**54.539.000**	**0**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**23**	**54.539.000**	**0**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	**25**					**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**25**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	**25**					**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**	**25**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	**73,19**					**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**73,19**			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	4.318.900	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	4.318.900	0	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	50.220.100	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	50.220.100	0	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**241.913.500**	**241.913.500**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	241.913.500	241.913.500	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						**HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	297	6.600.000	6.600.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	5.400.000	5.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	4.500.000	4.500.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	85.556.000	85.556.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	3.950.000	3.950.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	29.700.000	29.700.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	53.802.500	53.802.500	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	2.765.000	2.765.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	9.000.000	9.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	11.300.000	11.300.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS MERDEKA				**2.204.845.217**	**0**	**PUSKESMAS MERDEKA**				**2.789.295.746**	**721.146.237**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.204.845.217**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.789.295.746**	**721.146.237**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.204.845.217	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.789.295.746	721.146.237	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.204.845.217	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.273.615.746	205.466.237	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**12.583.200**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**12.583.200**	**12.583.200**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12.583.200	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12.583.200	12.583.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**56.212.800**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**56.212.800**	**56.212.800**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	56.212.800	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	56.212.800	56.212.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**67.899.708**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**67.899.708**	**67.899.708**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	67.899.708	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	67.899.708	67.899.708	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.068.149.509**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.136.920.038**	**68.770.529**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.068.149.509	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.136.920.038	68.770.529	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**511.968.000**	**511.968.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang	100	511.968.000	511.968.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam				dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam				
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			
			Persentase warga negara usia 60 tahun	100					Persentase warga negara usia 60 tahun	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	18.150.000	18.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	24.000.000	24.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	7.200.000	7.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	191.117.000	191.117.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	10.150.000	10.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	62.050.000	62.050.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	113.736.000	113.736.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	21.000.000	21.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	28.500.000	28.500.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**90,00**					**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**25**					**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS SEMPLAK				**3.601.298.720**	**0**	**PUSKESMAS SEMPLAK**				**3.848.468.646**	**247.169.926**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				**3.601.298.720**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**				**3.848.468.646**	**247.169.926**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.601.298.720	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.848.468.646	247.169.926	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.601.298.720	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.231.655.346	- 369.643.374	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.601.298.720**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**3.231.655.346**	**- 369.643.374**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.601.298.720	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.231.655.346	-369.643.374	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**613.101.300**	**613.101.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	613.101.300	613.101.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan kesehatan sesuai standar						pelayanan kesehatan sesuai standar				
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			kesehatan sesuai standar						**kesehatan sesuai standar**				
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579	39.600.000	39.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5382	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5382	20.200.000	20.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56	6.000.000	6.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	584	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	584	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	262.861.000	262.861.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	12.550.000	12.550.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	56	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	56	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	61.110.000	61.110.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	118.315.300	118.315.300	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	20.400.000	20.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	28.200.000	28.200.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS PANCASAN				**2.552.646.371**	**0**	**PUSKESMAS PANCASAN**				**3.079.645.424**	**526.999.053**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.552.646.371**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.079.645.424**	**526.999.053**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.552.646.371**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.079.645.424**	**526.999.053**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.552.646.371**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.602.821.624**	**50.175.253**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.552.646.371**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**2.602.821.624**	**50.175.253**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.552.646.371	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.602.821.624	50.175.253	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**473.111.800**	**473.111.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	473.111.800	473.111.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan kesehatan bayi baru lahir						pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	19.800.000	19.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	13.300.000	13.300.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	7.200.000	7.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	202.725.000	202.725.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	11.350.000	11.350.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	49.460.000	49.460.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	94.031.800	94.031.800	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.705.000	4.705.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	17.400.000	17.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	22.600.000	22.600.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			**Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS PASIR MULYA				**3.610.686.725**	**0**	**PUSKESMAS PASIR MULYA**				**4.437.303.592**	**826.616.867**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.610.686.725**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.437.303.592**	**826.616.867**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**3.610.686.725**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4.437.303.592**	**826.616.867**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.610.686.725**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**3.610.686.725**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.610.686.725**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.610.686.725	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.690.312.292	79.625.567	SILP 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**743.279.300**	**743.279.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			
			Prevalensi Diabetes Melitus	**2,05**					**Prevalensi Diabetes Melitus**	**2,05**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	743.279.300	743.279.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta	75,00			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik						**aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**				
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	21.450.000	21.450.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	26.650.000	26.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	242.613.000	242.613.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	15.550.000	15.550.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	61.700.000	61.700.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	277.291.300	277.291.300	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 jam
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.085.000	5.085.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	21.000.000	21.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	29.400.000	29.400.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS GANG KELOR				**2.034.197.969**	**0**	**PUSKESMAS GANG KELOR**				**3.981.717.030**	**1.947.519.061**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.034.197.969**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.981.717.030**	**1.947.519.061**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.034.197.969**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.981.717.030**	**1.947.519.061**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.034.197.969**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.038.061.530**	**1.003.863.561**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.034.197.969**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.038.061.530**	**1.003.863.561**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.034.197.969	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.038.061.530	1.003.863.561	SILPA 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**939.943.500**	**939.943.500**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	939.943.500	939.943.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			skrining kesehatan sesuai standar						**skrining kesehatan sesuai standar**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	832	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	832	29.700.000	29.700.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7712	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7712	24.150.000	24.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	519.380.000	519.380.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	15.850.000	15.850.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	75.180.000	75.180.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	162.753.500	162.753.500	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.990.000	4.990.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	28.200.000	28.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	37.200.000	37.200.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS SINDANG BARANG				**3.084.759.600**	**0**	**PUSKESMAS SINDANG BARANG**				**4.844.066.814**	**1.759.307.214**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.084.759.600	0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.844.066.814	1.759.307.214	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.084.759.600	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.844.066.814	1.759.307.214	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.084.759.600	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.505.777.814	421.018.214	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.084.759.600**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.505.777.814**	**421.018.214**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.084.759.600	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.505.777.814	421.018.214	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**1.334.577.000**	**1.334.577.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi**	**94**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			melalui pendekatan keluarga						melalui pendekatan keluarga				
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	1.334.577.000	1.334.577.000	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			kesehatan sesuai standar						**kesehatan sesuai standar**				
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.021	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.021	57.750.000	57.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9489	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9489	37.450.000	37.450.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	6.000.000	6.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	18.000.000	18.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	711.236.000	711.236.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	21.750.000	21.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1213	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1213	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	104.450.000	104.450.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	241.760.000	241.760.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	8.125.000	8.125.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	40.800.000	40.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	55.900.000	55.900.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	756.000	756.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS BOGOR UTARA				**3.883.666.122**	**0**	**PUSKESMAS BOGOR UTARA**				**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.883.666.122**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**3.883.666.122**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.883.666.122**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.896.182.856**	**12.516.734**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**0**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**0**	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.883.666.122**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.896.182.856**	**12.516.734**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.883.666.122	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.896.182.856	12.516.734	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**985.935.300**	**985.935.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	985.935.300	985.935.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang	4,13			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			dan Berat Badan Kurang (Underweight)						dan Berat Badan Kurang (Underweight)				
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.112	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.112	34.650.000	34.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10325	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10325	34.300.000	34.300.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.111	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.111	10.800.000	10.800.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	379.125.000	379.125.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	15.450.000	15.450.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	110	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	86.640.000	86.640.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	314.329.300	314.329.300	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	6.985.000	6.985.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	41.100.000	41.100.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	756.000	756.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL				**2.324.423.045**	**0**	**PUSKESMAS TEGAL GUNDIL**				**3.010.063.654**	**685.640.609**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.324.423.045**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.010.063.654**	**685.640.609**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.324.423.045**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.010.063.654**	**685.640.609**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.324.423.045**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.359.480.054**	**35.057.009**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**39.984.000**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**39.984.000**	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	15.995.100	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	15.995.100	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	23.988.900	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	23.988.900	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**49.561.300**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**49.561.300**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	49.561.300	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6	49.561.300	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**49.999.195**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**49.999.195**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	49.999.195	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	49.999.195	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.184.878.550**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.219.935.559**	**35.057.009**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.184.878.550	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.219.935.559	35.057.009	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**646.871.600**	**646.871.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	646.871.600	646.871.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan TBC sesuai standar						**pelayanan TBC sesuai standar**				
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	812	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	812	24.750.000	24.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7531	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7531	29.950.000	29.950.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	888	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	888	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	291.214.000	291.214.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	12.650.000	12.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	52.620.000	52.620.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	127.209.600	127.209.600	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	8.505.000	8.505.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.433.000	2.433.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	25.800.000	25.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	32.800.000	32.800.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS WARUNG JAMBU				**2.560.797.140**	**0**	**PUSKESMAS WARUNG JAMBU**				**3.272.775.466**	**711.978.326**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.560.797.140**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.272.775.466**	**711.978.326**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.560.797.140**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.272.775.466**	**711.978.326**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.560.797.140	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	2.584.418.666	23.621.526	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.560.797.140**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.584.418.666**	**23.621.526**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.560.797.140	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.584.418.666	23.621.526	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**684.644.800**	**684.644.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	684.644.800	684.644.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			pelayanan kesehatan sesuai standar						**pelayanan kesehatan sesuai standar**				
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	996	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	996	54.450.000	54.450.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9247	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9247	23.100.000	23.100.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	97	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.043	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.043	10.800.000	10.800.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	246.823.000	246.823.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	12.350.000	12.350.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	97	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	71.500.000	71.500.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	151.016.800	151.016.800	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	33.000.000	33.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	41.400.000	41.400.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS TANAH SAREAL				**3.249.679.899**	**0**	**PUSKESMAS TANAH SAREAL**				**3.399.514.112**	**149.834.213**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.249.679.899**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.399.514.112**	**149.834.213**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**3.249.679.899**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.399.514.112**	**149.834.213**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.249.679.899**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.995.700.912**	**-253.978.987**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100					Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	0	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.249.679.899**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.995.700.912**	**-253.978.987**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.249.679.899	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.995.700.912	-253.978.987	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**400.101.200**	**400.101.200**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	400.101.200	400.101.200	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144	6.600.000	6.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1337	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1337	18.250.000	18.250.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	261	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	261	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	61.506.000	61.506.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	4.750.000	4.750.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	32.850.000	32.850.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	224.593.200	224.593.200	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	2.812.000	2.812.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	9.800.000	9.800.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT				**1.233.043.686**	**0**	**PUSKESMAS PONDOK RUMPUT**				**1.749.521.026**	**516.477.340**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1.233.043.686**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.749.521.026**	**516.477.340**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1.233.043.686**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.749.521.026**	**516.477.340**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**1.206.177.686**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**1.428.096.626**	**221.918.940**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di**	**12,48**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			lingkup Perangkat Daerah						**lingkup Perangkat Daerah**				
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**45.047.700**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**45.047.700**	**0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	45.047.700	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	45.047.700	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**26.170.800**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**26.170.800**	**0**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	26.170.800	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	26.170.800	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**13.010.248**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**13.010.248**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	13.010.248	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	13.010.248	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**31.655.188**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**31.655.188**	**0**	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	32	31.655.188	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	32	31.655.188	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.090.293.750**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.312.212.690**	**221.918.940**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.090.293.750	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.312.212.690	221.918.940	SILPA 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**26.866.000**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**26.866.000**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Prevalensi Diabetes Melitus	**2,05**					**Prevalensi Diabetes Melitus**	**2,05**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	**100**					**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**	**100**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100					Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	23	26.866.000	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	23	26.866.000	0	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25					Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	25			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	25					Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	25			
			Persentase kelengkapan sarana,	73,19					Persentase kelengkapan sarana,	73,19			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah						**prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**				
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	26.866.000	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	26.866.000	0	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**290.846.400**	**290.846.400**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			
			Prevalensi ODGJ	**0,14**					**Prevalensi ODGJ**	**0,14**			
			Prevalensi Hipertensi	**8,4**					**Prevalensi Hipertensi**	**8,4**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	**54,5**					**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**	**54,5**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	290.846.400	290.846.400	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	11.000.000	11.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	13.000.000	13.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	104.492.000	104.492.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	5.350.000	5.350.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	36.180.000	36.180.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	58.559.400	58.559.400	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	10.200.000	10.200.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	14.800.000	14.800.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS KEDUNG BADAK				**2.166.514.090**	**0**	**PUSKESMAS KEDUNG BADAK**				**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.166.514.090**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.166.514.090**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.166.514.090**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.983.410.188**	**816.896.098**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**	**27,01**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.166.514.090**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.983.410.188**	**816.896.098**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.166.514.090	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.983.410.188	816.896.098	SILPA 2024 dan Penambahan Pendaptan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat**	**100**	**709.735.000**	**709.735.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		esensial dan bahan habis pakai (BHP)				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		esensial dan bahan habis pakai (BHP)				
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	709.735.000	709.735.000	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	33.000.000	33.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	28.400.000	28.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	284.950.000	284.950.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	12.150.000	12.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	74.290.000	74.290.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	157.740.000	157.740.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	7.365.000	7.365.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	38.700.000	38.700.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Daya Masyarakat (UKBM)						Daya Masyarakat (UKBM)				
	PUSKESMAS KAYU MANIS				**3.054.247.356**	**0**	**PUSKESMAS KAYU MANIS**				**3.836.364.095**	**782.116.739**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.054.247.356**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.836.364.095**	**782.116.739**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**3.054.247.356**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.836.364.095**	**782.116.739**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.054.247.356**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**3.065.210.495**	**10.963.139**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	**87,11**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**	**87,11**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**					**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**					**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**					**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di	**27,01**					**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di**	**27,01**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			lingkup Perangkat Daera						**lingkup Perangkat Daera**				
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.054.247.356**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.065.210.495**	**10.963.139**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.054.247.356	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.065.210.495	10.963.139	SILPA 2024
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**767.441.600**	**767.441.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	767.441.600	767.441.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**100**					**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**	**100**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	297	39.600.000	39.600.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2756	40.650.000	40.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	547	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	322.224.000	322.224.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	14.850.000	14.850.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	76.960.000	76.960.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	151.732.600	151.732.600	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.085.000	5.085.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	29.400.000	29.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	41.400.000	41.400.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS MEKARWANGI				**3.201.452.462**	**0**	**PUSKESMAS MEKARWANGI**				**4.412.814.466**	**1.211.362.004**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**3.201.452.462**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.412.814.466**	**1.211.362.004**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.201.452.462	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.412.814.466	1.211.362.004	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.201.452.462	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	3.809.188.366	607.735.904	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**3.201.452.462**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**3.809.188.366**	**607.735.904**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	3.201.452.462	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.809.188.366	607.735.904	Silpa 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**599.914.100**	**599.914.100**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	**2,9**					**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**	**2,9**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	**2,7**					**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**			
			Insiden Rate HIV	**0,18**					**Insiden Rate HIV**	**0,18**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	**55**					**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**	**55**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	**94**					**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**	**94**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	**87,1**					**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**	**87,1**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	599.914.100	599.914.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA VOLUME**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025**	**PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET KINERJA**	**PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025**	**SELISIH**	**KETERANGAN**
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	**100**					**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	**75,00**					**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**	**75,00**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	**56**					**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**	**56**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**100**					**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**	**100**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	841	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	841	50.600.000	50.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7810	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7810	32.400.000	32.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83	6.000.000	6.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.028	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.028	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	192.130.000	192.130.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	13.150.000	13.150.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	83	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	83	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	66.720.000	66.720.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	133.253.100	133.253.100	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	4.705.000	4.705.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	25.800.000	25.800.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	35.400.000	35.400.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	756.000	756.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF
	PUSKESMAS MULYAHARJA				**2.093.032.811**	**0**	**PUSKESMAS MULYAHARJA**				**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2.093.032.811**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2.093.032.811**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.093.032.811**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100**	**2.588.249.791**	**495.216.980**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**77.223.000**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**77.223.000**	**0**	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	77.223.000	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	77.223.000	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**55.077.000**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**55.077.000**	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	55.077.000	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	55.077.000	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**17.700.000**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**17.700.000**	**0**	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	26	17.700.000	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	26	17.700.000	0	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.943.032.811**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**2.438.249.791**	**495.216.980**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.943.032.811	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2.438.249.791	495.216.980	Silpa 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kota Bogor	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**632.715.100**	**632.715.100**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	100	632.715.100	632.715.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772					Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1.122.772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3					Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)	2,3			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Konseling dan Call Center 24 Jam						Konseling dan Call Center 24 Jam				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**100**					**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	613	21.450.000	21.450.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5696	20.250.000	20.250.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.103	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.103	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	310.102.000	310.102.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	0	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	13.650.000	13.650.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60	4.000.000	4.000.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	62.040.000	62.040.000	DAK NF
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	112.118.100	112.118.100	DAK NF
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	17.400.000	17.400.000	DAK NF
	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	0	0	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	24.700.000	24.700.000	DAK NF
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	0	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Bogor	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	540.000	540.000	DAK NF
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**12**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**				**Kota Bogor**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**72,40**			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**0**	**0**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**43,00**	**3.712.000**	**3.712.000**	
		Kota Bogor	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**				**Kota Bogor**	**Persentase Posyandu Aktif**	**90,00**			
		Kota Bogor	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**				**Kota Bogor**	**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**25**			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	0	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	3.712.000	3.712.000	DAK NF

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				1.583.262.434	0	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				1.679.905.129	96.642.695	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.583.262.434	0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.679.905.129	96.642.695	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.583.262.434	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.679.905.129	96.642.695	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	1.583.262.434	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bogor	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	1.679.905.129	96.642.695	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera	27,01			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	**94**					**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**	**94**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**					**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**			
			Persentase kepatuhan anggaran	**100**					**Persentase kepatuhan anggaran**	**100**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**					**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**					**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	**95**					**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**	**95**			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Kota Bogor**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**100**	**1.583.262.434**	**0**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**1.679.905.129**	**96.642.695**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.583.262.434	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.679.905.129	96.642.695	SILPA 2024
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				**290.000.000.000**	**0**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**				**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**290.000.000.000**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**290.000.000.000**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**0**	**0**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Kota Bogor**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**100**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92					Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	92			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	2,7			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**73,2**	**0**	**0**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**73,2**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	**25**					**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**25**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	**24**					**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**	**24**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	**25**					**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**	**25**			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32	0	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32	15.000.000.000	15.000.000.000	DAK FISIK
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	0	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	0	0	Penambahan
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**290.000.000.000**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**300.561.576.094**	**10.561.576.094**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**90**					**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**	**90**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100					Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	290.000.000.000	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	300.561.576.094	10.561.576.094	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1122772					Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1122772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)	2,30					Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)	2,30			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			
			Persentase warga negara usia 60 tahun	100					Persentase warga negara usia 60 tahun	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**				
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	290.000.000.000	0	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	300.561.576.094	10.561.576.094	SILPA 2024
	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119				**45.924.000**	**0**	**UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119**				**45.924.000**	**0**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**45.924.000**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**45.924.000**	**0**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**45.924.000**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**45.924.000**	**0**	
1	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**0**	**0**	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bogor**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**0**	**0**	
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	21,97			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95,00					Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95,00			
			Persentase kepatuhan anggaran	100					Persentase kepatuhan anggaran	100			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100					Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	88,38			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11					Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	87,11			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38					Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94					Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**0**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bogor	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**-**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	-	0	Biaya Operasional Mobil Ambulance PSC
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**45.924.000**	**0**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**2,7**	**45.924.000**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar	**92**					**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**	**92**			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90			
			Insiden Rate HIV	0,18					Insiden Rate HIV	0,18			
			Prevalensi Diabetes Melitus	2,05					Prevalensi Diabetes Melitus	2,05			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9					Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup	2,9			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100					Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	100			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,1			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55					Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	55			
			Prevalensi ODGJ	0,14					Prevalensi ODGJ	0,14			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100					Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100			
			Predikat STBM	Paripurna					Predikat STBM	Paripurna			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1					Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,1			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,673			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94					Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga	94			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5					Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	54,5			
			Prevalensi Hipertensi	8,4					Prevalensi Hipertensi	8,4			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	45.924.000	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Kota Bogor	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	45.924.000	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa	100					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa	100			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68					Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	68			
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	93					Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	93			
			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1122772					Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional	1122772			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)	4,13					Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)	4,13			
			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)	2,30					Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)	2,30			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6					Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	9,6			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100					Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100					Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100					Persentase pemenuhan media promosi kesehatan	100			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00					Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	75,00			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56					Persentase puskesmas dengan kinerja baik	56			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100					Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100			
			Persentase warga negara usia 60 tahun	100					Persentase warga negara usia 60 tahun	100			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA VOLUME	PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**				
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	45.924.000	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	45.924.000	0	
					619.756.627.468	**259.757.480.996**					**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang di tujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Usulan Musrembang 2025

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
1	Usulan Ditolak Kelurahan	KOMARUDIN	Jl Siliwangi Rt 02 Rw 01 Kel. Batutulis Kec. Bogor Selatan	Kurangnya Fasilitas posyandu	Kurangnya Fasilitas posyandu (Meja Posyandu Kursi Posyandu)	Tersedianya Fasilitas posyandu (Meja Posyandu Kursi Posyandu)	10	fasilitas umum	10	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
2	Usulan Ditolak Kelurahan	Suharman	Kutajaya Rt 03 Rw 11 Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan	banyaknya alat2 posyandu yang sudah usang	Dengan banyaknya alat-alat posyandu di rw 11yang sudah usang membuat tidak nyaman	Dengan di perbaharui nya alat-alat di posyandu dapat membuat kenyamanan bagi balita,ibu hamil dan para petugasnya	100	fasilitas umum	15	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
3	Usulan Ditolak Kelurahan	UUS ketua RW	Kp.Ciburial Rt 02 Rw 10 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara	Kurangnya perlengkapan kegiatan posyandu	Terpenuhi sarana prasarana penunjang kegiatan posyandu	Maksimal dalam pelayanan kegiatan posyandu	50	fasilitas umum	50	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
4	Usulan Ditolak Kelurahan	UUS ketua RW	Kp.Ciburial Rt 05 Rw 10 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara	Kurangnya penunjang kegiatan posyandu	Terpenuhinya sarana prasarana kegiatan posyandu	Maksimal dalam kegiatan posyandu	50	fasilitas umum	50	orang	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
5	Usulan Ditolak Kelurahan	HASAN BASSRI	Kp Batakal Rt 01 Rw 10 Kel. Batutulis Kec. Bogor Selatan	Kurangnya Fasilitas Kesehatan	Tandu , Kursi Lipat, Tenda Kerucut dan Tabung Oksigen	Tersedianya alat kesehatan	10	tidak membutuhkan lahan	5	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
6	Usulan Ditolak Kelurahan	YUSUP ISKANDAR	Balekambang RT 02 RW 04 KEL. BATUTULIS KEC. BOGOR SELATAN	Kurangnya Fasilitas Posyandu	Kanopi, lemari , tandu, perbaikan kamar mandi umum dan kursi roda	Tersedianya failitas posyandu	10	tidak membutuhkan lahan	10	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
7	Usulan Ditolak Kelurahan	NANA SUKARNA	Jalan Neglasari Ii Rt 04 Rw 01 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara	Tidak adanya bangunan posyandu.	Bangunan yang ada kurang memadai.	Dengan adanya bantuan ini Posyandu diwiyalah kami menjadi lebih layak.	500	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
8	Usulan Ditolak Kelurahan	BINTANG JHS RW02	Belakang Rumah Jl. Sempur Kaler No.46, RT.03/RW.02, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129	Ruangan dalam Posyandu Teratai RW02 dipenuhi kotoran codot atau lalai	Membuat plafon untuk menutup ruangan	Membuat ruangan menjadi bersih serta ber-estetika yang disebabkan oleh masuk atau turunnya kotoran dan	50	milik pemerintah	30	m2	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
						debu ke dalam ruangan					
9	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua rw12	Kp.Pasir RT 01 RW 12 Kel.Cimahpar, Kec.Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesia	Kurangnya alat posbindu Timbangan, tensi, lingkar perut, peralatan cek gula, kolesterol,asam urat. Tandu Roda, Tempat Tidur untuk pemeriksaan	Kurangnya alat kesehatan.	Kurangnya alat kesehatan posbindu, timbangan, tensi darah,alat cek gula darah, kolesterol, asam urat.	100	fasilitas umum	4	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
10	Usulan Ditolak Kelurahan	KETUA PPK RW 08	Posyandu Syakura Rt 04 Rw 08 Kel Tanah Baru Kec. Bogor Utara	TINGKAT AKURASI DARI ALAT YANG DIPERGUNAKAN SUDAH KURANG MEMADAI	Dengan semakin banyaknya antusias warga yang mau melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu syakura rw 08.	Seluruh balita dan lansia yang terdapat di rw 08	100	fasilitas umum	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
11	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	ASRULI ROHMAN	Gg. Mesjid Rt 01 Rw 02 Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal	Kurangan nya Sarana	Pengajuan sarana posyandu	Lebih banyak Sarana untuk posyandu	100	tidak membutuhkan lahan	5	unit	
12	Usulan Ditolak Kelurahan	Samsu	Sindang Resmi Rt 03 Rw 17 KEL. BONDONGAN KEC. BOGOR SELATAN	Kurang lengkapnya alat kesehatan Di posyandu	Alat yang d butuhkan.. Tempat tidur.cek gula darah.tandu .gorden.alat tensi darah	Adanya alat cek kesehatan untuk lansia	100	fasilitas umum	100	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
13	Usulan Ditolak Kelurahan	Muhamad pandi	Kp Rancamaya Rt 02 Rw 07 KEL. RANCAMAYA KEC. BOGOR SELATAN	Belum punya nya pelengkapan sarana prasarana posyandu seperti bed pemeriksaan ibu hamil dan meja ,kursi	Mengajukan bed pemeriksaan ibu hamil dan meja ,kursi	Nyaman nya kegiatan pemeriksaan kesehatan di posyandu	85	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
14	Usulan Ditolak Kelurahan	Muhamad pandi	Kp Rancamaya Rt 02 Rw 07 KEL. RANCAMAYA KEC. BOGOR SELATAN	Belum punya nya pelengkapan sarana prasarana posyandu	Mengajukan bed pemeriksaan ibu hamil dan meja ,kursi	Nyaman nya kegiatan pemeriksaan kesehatan di posyandu	85	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				seperti bed pemeriksaan ibu hamil dan meja ,kursi							
15	Usulan Ditolak Kelurahan	Syaref effendie	Jerokuta Kaum Rt 01 Rw 16 Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan	Perlunya alat alat kesehatan (Kit Kader)	Pengadaan alat alat kesehatan (Kit Kader) seperti alat pengukur tekanan darah digital, Termometer, pita lila, metline dan alat timbang badan digital	Kesehatan masyarakat jadi terkontrol	50	tidak membutuhkan lahan	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
16	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Agus Arifin	Jl. Kapten Yusuf Gg. Madrasah Rt 04 Rw 01 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan	Belum adanya alat kesehatan bagi warga	Penyediaan alat kesehatan, alat ukur tekanan darah digital, termometer	Meningkatkan pelayanan kesehatan	50	tidak membutuhkan lahan	50	orang	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
17	Usulan Ditolak Kelurahan	ISWANDI	Sukajadi Rt 04 Rw 10 Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan	Kurangnya peralatan di posyandu	Kurang nya peralatan posyandu yg menagakiba t kan pelayanan tidak optiml	Dengan ada nya penambahan peralatan posyandu dapat membuat lbih optimal dalam pelayanan nya	100	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
18	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	AGUS SETIAWAN RT	Jl. Katulampa Raya No.6-26, Rt.01/Rw.14, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	Pemeliharaa n fasilitas kesehatan	Pembangun an posyandu	Kesehatan masyarakat	100	milik pemerin tah	1	unit	
19	Usulan Ditolak Kelurahan	SOLIHIN	Kp. Ciburial Rt 03 Rw 04 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara	Bangunan posyandu yang mulai rusak dan peralatan yang kurang lengkap	Atap posyandu yang kurang layak, ketika hujan jadi kena air hujan. Kanopi nya kurang. Serta peralatan pendukung yang kurang memadai	Posyandu jadi lebih nyaman dan juga masyarakat senang	1000	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
20	Usulan Ditolak Kelurahan	RT 03	Rancamaya Rt 03 Rw 03 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan	kurangnya sarana yang memadai	Peralatanya minta yang lebih baik	Supaya pelayanan di pos yandu maksimal	200	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
21	Usulan Ditolak Kelurahan	Saepudin ketua RW.	Kp.Lebak Lpti Rt 02 Rw 08 KEL. CIPARIGI KEC. BOGOR UTARA	Kurangnya sarana prasarana posyandu	Terpenuhi kelengkapan sarana prasarana posyandu	Pelayanan posyandu lebih maksimal	30	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
22	Usulan Ditolak Kelurahan	setiawan alde	Jl. Pahlawan Rt 01 Rw 07 Kel. Bondongan Kec. Bogor Selatan	kurangnya sarana, prasarana, perlengkapan penunjang untuk posyandu	Memohon diberikan bantuan sarana, prasarana dan perlengkapan penunjang untuk posyandu	Melancarkan jalannya aktifitas di posyandu	1	milik pemerintah	25	m2	Tidak masuk kedalam prioritas
23	Usulan Ditolak PD	POSYANDU	Jl Sempur No 33 Rt 03 Rw 01 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah	- Tidak ada sarana pendukung seperti Meja, Kursi, lemari	- Meja 77 Unit - Kursi 110 Unit - Lemari 11 unit	Prasarana pelayanan posyandu menjadi lebih baik	300	milik pemerintah	198	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
24	Usulan Ditolak Kelurahan	LAODE MOHAMAD SAFRIEL	Lolongok Gg Tengah Rt 02 Rw 03 Kel Empang Kec Bogor Selatan	BELUM TERSEDINNYA TABUNG OKSIGEN	Tabung OKSIGEN SEWAKTU WAKTU SECARA MENDADAK BISA DAPAT DI GUNAKAN OLEH WARGA YANG SEDANG SAKIT DAN MENDAPAT	Akan membantu warga yang sedang sakit dan membutuhkan tabung oksigen secara mendadak	20	tidak membutuhkan lahan	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					PERAWATAN DIRUMAH						
25	Usulan Ditolak Kelurahan	Nurfianti	Pangkalan Raya Rt 06 Rw 02 Kel Cibuluh Kec Bogor Utara	Belum tersedi meja pelayanan di posyandu	Meja pelayanan di posyandu	Membantu kader posyandu dalam melaksanakan tugasnya	650	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
26	Usulan Ditolak Kelurahan	YAYAN SOPIAN.SH	Jl. Pembangunan Rt 01 Rw 05 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara	BELUM LENGKAP PERALATAN POSYANDU	Tidak maksimalnya pelayanan posyandu	Menciptakan pelayanan yang maksimal di posyandu	500	tidak membutuhkan lahan	500	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
27	Usulan Ditolak Kelurahan	Merpati lB RT 01/02	Babakan Rt 01 Rw 02 Kel Ciluar Kec Bogor Utara	Sering terjadi kebocoran atap	Perbaikan Posyandu diwilayah tersebut	Dapat mengurangi dampak kebocoran	60	fasilitas umum	36	m3	Tidak masuk kedalam prioritas
28	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	JAMAL	Kp. Bulak Utara Rt 03 Rw 05 Kel Kencana Kec Tanah Sareal	Kurang nya sarana posyandu	Pengadaan sarana posyandu	Ada nya sarana posyandu	100	fasilitas umum	10	unit	
29	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW	Jl. Perintis Kemerdekaan Rt 01 Rw 04 Kel Kebon Kelapa Kec Bogor Tengah	Kurangnya Alat Kesehatan	Alat Kesehatan dan Logistik Lainnya (Meja & Kursi)	Lengkapanya Alat Kesehatan dan Logistik Lainnya	359	tidak membutuhkan lahan	2	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
30	Proses Verifikasi LPM	RW 09	Gang Rolika Rt 03 Rw 09 Kel Semplak Ke Bogor Barat	Kelengkapan posyandu	Tempat tidur untuk periksa dan	Bernanfaat untuk pelayanan posyandu saat	100	fasilitas umum	24	m	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					meja tulis 3, pager	pemeriksaan bagi warga					
31	Usulan Ditolak PD	Ahmad Supena	Jl. Padasuka No. 05 Rt. 001 Rw. 012 Kel Gudang Kec Bogor Tengah	banyaknya alat Sara Prasana Posyandu yang rusak	Penyediaan alat Kesehatan Posyandu	Demi kelancaran kegiatan Posyandu dan dapat di pergunakan Semaksimal mungkin	60	fasilitas umum	12	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes,
32	Usulan Ditolak Kelurahan	LAODE MOHAMAD SAFRIEL	Gang Tengah Rt 02 Rw 03 Kel Empang Kec Bogor Selatan	BELUM TERSEDIANNYA ALAT UKUR TEKANAN DARAH	Kami mengusulkan pengadaan alat ukur tekanan darah	Sangat membantu warga utk mentensi darah saat kegiatan posyandu ,atau pun warga yang membutuhkan untuk tensi darah	1	tidak membutuhkan lahan	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
33	Usulan Ditolak Kelurahan	ASEP SOLIHIN (KETUA RT	Jl. Raden Khanafiah No.71, Rt.02/Rw.15,	PERALATAN POSYANDU SUDAH	Pengadaan kit postandu	Agar semakin nyaman dan semakin	400	fasilitas umum	10	paket	Tidak masuk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
		02 RW 015 CIMAHPAR)	Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesia	TIDAK LAYAK		terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat					kedalam prioritas
34	Usulan Ditolak Kelurahan	Jenal	Jl Mandala Rt 02 Rw 02 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara	Kurang nyaman untuk pelayanan posyandu	Agar kader posyandu bisa melayani masyarakat	Bila posyandu rapih pelayanan nyaman	3000	fasilitas umum	40	m3	Tidak masuk kedalam prioritas
35	Usulan Ditolak PD	Ahmad	Jl. Desa Sukaresmi No.14, Rt.03/Rw.05, Sukaresmi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16165, Indonesia	Bangunan yang ada sudah banyak yg russk	Renovasi bangunan Paud/posyandu	Untuk kenyamanan dan keamanan	450	fasilitas umum	72	m2	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
36	Usulan Ditolak Kelurahan	Komarudin	Mulyasari Rt 02 Rw 13 Kel Harjasari Kec Bogor Selatan	Belum lengkapnya perlengkapan alat kesehatan Posyandu	Penyediaan alat kesehatan posyandu (kit kader)	Warga yang datang ke pelayanan kesehatan yang datang Posyandu bisa di tangani semantara	100	tidak membutuhkan lahan	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
37	Usulan Ditolak Kelurahan	UCI SANUSI	Antawis Rt 001 Rw 10 Kelurahan Genteng Bogor Selatan	TIDAK ADA TIMBANGAN BAYI	Tidak ada timbangan untuk bayi	Membantu kegiatan kader posyandu	100	fasilitas umum	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
38	Usulan Ditolak Kelurahan	wawan mulyana	Cimanggu Kecil Rt 03 Rw 07 Kel Ciwaringin Kec Bogor Tengah	KEKURANGAN SARANA PENDUKUNG POS YANDU (KENANGA)	Kekurangan sarana pendukung pos yandu (kenanga) alat timbang untuk bayi (2 unit) dan alat timbang untuk lansia (2unit)	Lebih lancar dalam melaksanakan kegiatan pos yandu,penimbangan dll	150	fasilitas umum	4	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
39	Usulan Ditolak Kelurahan	KETUA RW11	Kp Sawah Rt02 Rw11 Kelurahan Cimahpar Kec Bogor Utara	Pembangunan yang ada kurang maksimal	Rehab gedungposyandu	Untuk Kenyamanan pelayanan kesehatan balita	200	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
40	Usulan Ditolak Kelurahan	JENAL	Kp Mandala Rt 02 Rw 02 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara	tidak memiliki toilet	Pengguna posyandu kesusahan untuk BAK & BAB saat ada kesusahan	Sering numpang di masjid	300	fasilitas umum	30	m2	Tidak masuk kedalam prioritas
41	Usulan Ditolak Kelurahan	Nandan supriatna	Jalan Layungsari 2 Rt 07 Rw 18 Kel Empang Kec Bogor Selatan	Posyandu terlalu kecil	Pembangunan posyandu baru	Pelayanan menjandi efektif	100	milik pemerintah	18	m3	Tidak masuk kedalam prioritas
42	Usulan Ditolak Kelurahan	Nenah	Jl. Batutulis Rw 04 Rt 03 Rw 04 Kel Bondongan Kec Bogor Selatan	Kurang memadai alat kesehatan di posyandu	Tidak ada tensi, alat cek gula darah, timbangan lansia, alat ukur tinggi badan bayi, kursi, meja posyandu, papan tabel posyandu	Adanya pelayanan kesehatan yang optimal	100	fasilitas umum	1	orang	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
43	Usulan Ditolak Kelurahan	Abdul Wahab	Kp.Bojong Gg H Rotai Rt 02 Rw 02 Kel Pamoyan Kec Bogor Selatan	Kader Wijaya Kusumah klo bikin laporan tidak mempunyai laptop & Meja..kursi...lemari tidak punya d karena banyak yg rusak...	Laptop,Meja,kursi,Lemari	Jd kader bs membuat laporan dengan mudah & berkas kas tersusun dengan rapih & meja kursi bermanfaat buat smua..	1000	fasilitas umum	10	UNIT	Tidak masuk kedalam prioritas
44	Usulan Ditolak Kelurahan	Edi Suryadi	Kampung Pancagalih Rt 3 Rw 3 Kec Loji Kec Bogor Barat	Perlengkapan Posyandu masih kurang dan ada yg rusak	Penambahan perlengkapan posyandu seperti timbangan bayi, kursi, meja, tempat pemeriksaan ibu hamil	Peningkatan kualitas penyuluhan dan pelaksanaan posyandu mekar galih	100	fasilitas umum	10	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
45	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Edi Suryadi	Kampung Pancagalih Rt 3 Rw 3 Kel Loji Kec Bogor Barat	Perlengkapan Posyandu masih	Penambahan perlengkapan posyandu	Peningkatan kualitas penyuluhan dan	100	fasilitas umum	10	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				kurang dan ada yg rusak	seperti timbangan bayi, kursi, meja, tempat pemeriksaan ibu hamil	pelaksanaan posyandu mekar galih					
46	Usulan Ditolak Kelurahan	Cecep Bachri	Indahsari Rt 03 Rw 01 Kel Harjasari Kec Bogor Selatan	peralatan kesehatan posyandu Lengkeng I sudah tidak layak	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu Alat Meja kursi, Pemasangan Listrik	Memberi kenyamanan masyarakat di posyandu lebih nyaman	100	fasilitas umum	50	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
47	Usulan Ditolak Kelurahan	Cecep Bachri	Indahsari Rt 03 Rw 01 Kel Harjasari Kec Bogor Selatan	peralatan di Posbindu Lengkeng I alat kesehatan sdah tidak layak	Penyediaan Alat Kesehatan Posbindu berupa Alat Tensi, Alat Cek Gla Darah, Alat Cek Kolesterol, Asam urat	Memberi Pelayanan Kesehatan bagi warga lansia pengecekan kesehatan	150	fasilitas umum	2	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
48	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 15	Jl Lolongok GG Surya Rt 04 Rw 15	Tidak mempunyai	Tidak mempunyai gedung	Dampak dari tidak ada gedung	500	milik pemerintah	126	m3	Tidak masuk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Kel Empang Kec Bogor Selatan	gedung posyandu	posyandu karena tidak ada lahan	posyandu, melakukan posyandu atau posbindu jadi berpindah pindah tempat karena tidak ada lahan					kedalam prioritas
49	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 08	Rancamaya Rw 08 Rw 08 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Kurang lengkap peralatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer , Pita Lila dan Metline, kasur pemeriksaan , meja dan kursi	Peralatan posyandu menjadi lengkap	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
50	Proses Penentuan	RW 09	Rancamaya Rw 09 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Kurang lengkap	Penyediaan Alat Kesehatan	Menjadi lengkap	100	fasilitas umum	1	paket	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
	Prioritas Kecamatan			peralatan posyandu	Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline, kasur pemeriksaan, meja dan kursi	peralatan posyandu					
51	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 04	Rancamaya Rw 04 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Kurang lengkap peralatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline,	Menjadi lengkap peralatan posyandu	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					kasur pemeriksaan, meja dan kursi, alat ukur gula, korestrol						
52	Usulan Ditolak Kelurahan	ANDRIANA	Sindangbarang Pilar I RT001/RW006 Kel Sindang Barang Kec Bogor Barat	Kurangnya Alat-alat di Posyandu Anyelir B	Membutuhkan Bangku, Meja dan Kasur Periksa	Kelengkapan alat-alat di posyandu	90	milik pemerintah	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
53	Usulan Ditolak Kelurahan	ANDRIANA	Sindangbarang Rt005/Rw006 Kel Sindagbarang Kec Bogor Barat	Kurangnya fasilitas di Posyandu	Membutuhkan kursi, meja, kasur periksa	Kelengkapan fasilitas	200	milik pemerintah	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
54	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Ketua RW.12	Kebon Manggis Rt 02 Rw 12 Kel Paledang Kec Bogor Tengah	Kondisi bangunan posyandu yang sudah tidak layak pakai	Perbaikan bangunan posyandu	Tersedianya bangunan posyandu yang representatif	60	fasilitas umum	1	unit	
55	Usulan Ditolak PD	Doddy Hidayat Rivai	Jl. Mawar Gg. Letnan Umar, Rt.03/Rw.05, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Posyandu "PESAT" RW 05 alat kesehatannya tidak lengkap dan ada yang rusak	Pengadaaan alat kesehatan : 1 bh Stetoskop 1 bh Alat Ukur Tekanan	Melengkapi fasilitas alat kesehatan Posyandu	624	milik pemerintah	1	paket	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023,

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					Darah 1 bh Timbangan bayi 1 bh Timbangan dewasa 1 bh Pita Lila 1 bh Medline 5 set Alat ukur colesterol 5 set Alat ukur gula darah						2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
56	Proses Verifikasi LPM	Pramuji	Semplak Rt02 RW 08 Kl Semplak Kec Bogor Barat	Kurang adanya alat Seni pada anak² sdn neglasari pdhl anak² PD senang olah raga pencak silat	Mohon di berikan seperangkat alat Seni kendang pencak Satu set lengkap..agar lestari budaya lokal	Ikut melestarikan budaya seni ,budaya asli lokal	200	tidak membutuhkan lahan	1	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
57	Usulan Ditolak Kelurahan	Asep Sofyan Effendi	Jln. Menteng Gg. Ahmad Rt 003 Rw 13 Kel Menteng Kec Bogor Barat	Alat kesehatan posyandu masih kurang, karena sebagian ada yang sudah rusak7	Pengadaan : 1 bh. Timbangan bayi 1 bh. Timbangan dewasa 1 bh stetoskop 1 bh alat ukur tensi	Memperlancar kegiatan kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya	360	milik pemerintah	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
58	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW 01	Jl. Sindang Barang Pengkolan Gg. Pala Ii Rt.02/Rw.01, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Alat alat kesehatan yang berada di posyandu sudah pada rusak	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) dll	Pelayanan posyandu bisa lebih maksimal	900	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
59	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	MAD JAJI	Jl. Perintis Warung Jambu Rt 04 Rw 06 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara	Kurangnya peralatan di posyandu melati	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah	Memaksimalkan pelayanan masyarakat serta memudahkan kader posyandu melati	300	fasilitas umum	5	paket	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					Digital, Termometer.						
60	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Ketua Rw 08	Bantarjati Lebak Rt 02 Rw 08 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara	fasilitas alkes yang terbatas	Mengajukan 1 unit alat pengukur tensi darah digital, 1 unit alat pengukur kolestrol gula darah asam urat digital, i unit timnangan balita digital , 1 unit alat pengukur tinggi balita, i unit timbangan duduk digital,	Akurasi data balita dan lansia di wilayah	200	fasilitas umum	5	unit	
61	Usulan Ditolak Kelurahan	Wahidin	Kp.Balubur Rt 04 Rw 05 Kek Muarasari Kec Bogor Selatan	Kurang adanya sarana prasarana untuk POSBINDU	Memohon untuk bantuan alat (kit kader) Posbindu	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	1	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
62	Usulan Ditolak Kelurahan	Moch Yana Konfiana	Sirnagalih Rt 01 Rw 07 Kel Loji Kec Bogor Barat	kurangnya alat alat prasarana penunjang dalam kegiatan Posyandu	Pengajuan alat alat kesehatan untuk kegiatan Posyandu seperti ; lat Ukur , Tekanan darah Digital , Thermometer , Pita Lila , Metline , Timbangan Gantung dll	Pengontrolan kesehatan dan tumbuh kembang Balita terkontrol secara optimal	60	tidak membutuhkan lahan	0	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
63	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW. 002	Jl. Manunggal Jaya Rt.02/Rw.02, Kb. Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, Indonesia	Kurangnya alat sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu	Kurangnya alat sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu	Memberikan kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat RW. 002	75	fasilitas umum	4	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
64	Usulan Ditolak PD	SISWIRANTI	Lolongok Rt. 01 Rw. 05 Kel Empang Kec Bogor Selatan	Belum ada sarana untuk posyandu seperti tempat tidur	Permohonan penyediaan alat kesehatan tempat tidur	Mempermudah untuk pelayanan masyarakat di posyandu	100	tidak membutuhkan lahan	2	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				dan kursi roda	dan kursi roda						tahun 2023 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
65	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 10	Rancamaya 10 Rt 01 Rw 10 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Kurang lengkap peralatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu	Menjadi lengkap pada saat posyandu	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					(Kit Kader) yang terdiri dari, Kasur pemeriksaan, Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline						
66	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 05	Rancamaya Rw 05 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Belum lengkap peralatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu seperti kasur permeriksan, peralatan kesehatan	Saat posyandu menjadi lengkap	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
67	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 01	Rancamaya 01 Rw 01 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	kurang lengkap peralatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu seperti kasur pemeriksaan, dan alat kesehatan	Saat posyandu menjadi nyaman	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
68	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 02	Rancamaya 02 Kel Rancamaya Kec Bogor Selatan	Kurang lengkap alat kesehatan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu, kasur pemeriksaan, alat kesehatan	Menjadi lengkap saat posyandu	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
69	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Sihardame Pantjar	Jl. Merawan Rt 04 Rw 05 Kel Sukadamai Kec Tanah Sareal	Tidak memiliki peralatan pemeriksaan kesehatan tsb	Pengadaan alat starter kit Posbindu PTM	Hasil pemeriksaan akan menjadi lebih baik	150	fasilitas umum	3	unit	
70	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 02 Ciluar	Kp. Babakan Keluraha Ciluar Rt 02 Rw 02 Kel Ciluar Kec Bogor Utara	Alat Kesehatan Posyandu Merpati 1B	Permohonan alat Kesehartan	Tersedianya alat Kesehatan	50	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
71	Usulan Ditolak Kelurahan	Endang sukatma	Kp.Balubursari Rt 02 Rw 01 Kel Muarasari Kec Bogor Selatan	Tangga posyandu tidak berfungsi dengan baik.	Pembangunan tangga posyandu	Jadi bisa di pergunakan menuju ruangan atas	1	fasilitas umum	4	m	Tidak masuk kedalam prioritas
72	Usulan Ditolak Kelurahan	KETUA RW 02	Crhg+Fq4, Kp. Belentuk, Rt.01/Rw.02, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota	GEDUNG POSYANDU YANG KURANG LAYAK	Rehab posyandu mawar 02	Agar memberikan pelayanan kesehatan untuk balita	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesia								
73	Usulan Ditolak Kelurahan	AHMAD SUNADI	Perumahan Curug Permai Jl. Dirgantara Curug, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor , Jawa Barat	Perlunya perbaikan pada bangunan pos yandu dan alat kesehatan	Penyedian alat kesehatan dan perbaikan pada bangunan pos yandu	Pelayanan ke masyarkat menajdi lebih baik dan nyaman	500	fasilitas umum	40	m2	Tidak masuk kedalam prioritas
74	Usulan Ditolak Kelurahan	Dede Dachlan zainal	Jln Raya Tajur Rt 02 - Rw 07 Muarasari Kec Bogor Selatan	Setiap kegiatan Posyandu dan Posbindu kurang efektip dan efisien karena belum memiliki gedung sendiri dan setiap kegiatannya selama ini tempatnya selalu menggunaka	Dibutuhkan nya pembangun an gedung Posyandu dan Posbindu ANGGREK agar kegiatannya bisa lebih efektip dan efisien	Setelah di bangunnya gedung Posyandu dan Posbindu maka setiap kegiatannya tidak akan lagi menggunakan rumah warga	1	fasilitas umum	30	m3	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				n rumah warga							
75	Proses Verifikasi LPM	Hoerudin	Kp.Bojong Gg.Makmur Rt02/RW.08, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	Kondisi Posyandu rusak	Pemeliharaan posyandu	Posyandu Lebih tertata	50	fasilitas umum	150	unit	
76	Usulan Ditolak Kelurahan	AMMAR	Jl. Krupuk No.11a, RT.04/RW.02, Kp. Parung Jambu, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	tidak terdapatnya posyandu diwilayah rw 02, otomatis pelaksanaannya berpindah tempat dan data berceceran	Pembangunan posyandu diwilayah rw 02, diatas solokan cikobak di rt 05, karna diwilayah rw 02 tidak terdapat lahan lagi, dan harga lahan begitu mahal	Warga akan mendatangi posyandu untuk pengecekan kesehatan baik anak anak dan lansia	300	fasilitas umum	50	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
77	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	AMMAR	Jl. Sedane Gg Krupuk No.27, RT.05/RW.02, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota	Posyandu kekurangan alat alat kesehatan dalam	Penyediaan alat kesehatan yang sederhana	Posyandu akan berjalan dengan lancar	50	tidak membutuhkan lahan	50	paket	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	menjalankan tugasnya	untuk kegiatan posyandu						
78	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Puskesmas Pondok Rumput	Jl. Pondok Rumput Rt 04 Rw 11 Kel Kebonpedes Kec Tanah Sareal	Perbaikan Gizi terhadap Balita di Posyandu	Timbangan Bayi atau Dacin Inovatif	Agar dapat melayani para Balita diposyandu dengan maksimal	4400	milik pemerintah	17	unit	
79	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Agus Priyatna	Cqcc+3pf, Gg. Kelor. Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Pergantian atau Pengadaan Fasilitas Pos Yandu (Meja & Kursi)	Dibutuhkan Meja & Kursi baru untuk sarana Pos Yandu dengan rincian meja 120x50x70 (4 unit) x 200.000 = 800.000 kursi 50x30x50 (4 unit) x 250.000 = 1.000.000 Total 1.800.000	Kenyamanan warga yang akan melakukan kegiatan kesehatan dan lainnya di Pos Yandu	250	fasilitas umum	220	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
80	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Puskesmas Pondok Rumput	Jl.Pondok Rumput Rt 04 Rw 11 Kel Kebonpedes Kec Tanah Sareal	Stunting Di wilayah Masih ada	Pengadaan mood model/alat peraga penyuluhan	Dapat menurunkan angka stunting	400	milik pemerintah	17	unit	
81	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Randi RW 20	Jl. Medika No 1 Bma Cilendek Bogor, Rt.01/Rw.20, Menteng, Bogor Barat, Bogor City, West Java 16111, Indonesia	timbangan bayi/balita, termometer, tempat tidur, meja, kursi	Ibu ibu posyandu membutuhkan timbangan bayi, termometer, temoat tidur dan kursi	Petugas posyandu jadi kurang maksimal untuk melakukan aktivitas dikarenakan kurang memadainya alat yang ada.	50	milik pemerintah	5	unit	
82	Usulan Ditolak Kelurahan	Dyan Yogo Hasto Rinukti	Jl. Mandala Gg. Mesjid Rt 01 Rw 09 Kel Ciparigi Kec Bogor Utara	Posyandu belum memiliki sarana pendukung operasional, berupa meja dan kursi serta tempat penyimpanan arsip dan peralatan	3 unit meja + kursi, 1 unit lemari arsip, 1 unit lemari peralatan	Mendukung kelancaran serta meningkatkan pelayanan posyandu	75	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
83	Proses Verifikasi LPM	Uun Kurniawati	Jl. Menteng No. 2 Rt 03 Rw 12 Kel Menteng Kec Bogor Barat	alat yang tersedia kondisinya sudah rusak / tidak dapat digunakan lagi	Alat ukur tekanan darah digital, termometer, pita lila & metline	Untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat	200	tidak membutuhkan lahan	4	unit	
84	Usulan Ditolak Kelurahan	Imam MPB / Ka RW10	Jl Palem Raya Taman Yasmin-V Rt 02 Rw 10 Kel Curugmekar Kec Bogor Barat	belum punya laptop untuk input data aplikasi asimili data balita dll	Perlu laptop untuk pendataan input data aplikasi asimili data balita dll	Tertib data dan administrasi posyandu	10	fasilitas umum	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
85	Usulan Ditolak Kelurahan	YOYON SYAHRONI	Sindangbarang Rt002/Rw001 Kel Sindangbarang Kec Bogor Barat	KURANGNYA ALAT2 POSYANDU	Usulan penyediaan meja, kursi, kasur periksa, timbangan, tensi	Kelengkapan alat2 posyandu	200	milik pemerintah	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
86	Usulan Ditolak Kelurahan	YOYON SYAHRONI	Sindangbarang Rt005/Rw001 Kel Sindangbarang Kec Bogor Barat	KURANG PERLENGKAPAN ALAT2 POSYANDU	Penyediaan kursi, meja, kasur periksa, timbangan, tensi	Kelengkapan alat2 posyandu	75	milik pemerintah	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
87	Usulan Ditolak Kelurahan	Moch Yana Konfiana	Sirnagalih Rt 01 Rw 07 Kel Loji Kec Bogor Barat	Tidak adanya atau tersedia nya tempat untuk penyimpanan alat alat kesehatan dan file file laporan kegiatan	Pengadaan Lemari ,filling cabinet , rak rak penyimpanan dll	Tertata rapi alat alat kesehatan dan file file tidak berserakan	10	fasilitas umum	3	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
88	Usulan Ditolak Kelurahan	WAWAN	Kp. Bubulak Rt 01 Rw 07 Kel Bubulak Kec Bogor Barat	Belum tersedianya alat kesehatan Posyandu (kit kader)	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digilal, Termometer, Pita Linda dan Metline	Akan Sangat Membatu Terhadap Pengecekan kesehatan balita dan Ibu Hamil	30	tidak membutuhkan lahan	2	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
89	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Ketua RW.01	Jl. Paledang Rt 01 Rw 01 Kel Paledang Kec Bogor Tengah	Belum tersedia gedung Posyandu	Pembangunan gedung posyandu	Tersedianya gedung Posyandu	80	fasilitas umum	1	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
90	Usulan Ditolak Kelurahan	RW. 06	Cq5r+Qcm, Jl. Moh. A. Salmun, Rt.03/Rw.06, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	dibutuhkannya tandu untuk membawa orang sakit	Supaya lebih mempermudah membawa orang sakit	Biar lebih cepat dan efisien dalam penanganannya	230	fasilitas umum	1	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
91	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 06	Babakan Lebak Rt 01 Rw 06 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Kader sudah sering rusak	Pengajuan alat kit kader	Posyandu berjalan dengan lancar	150	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
92	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	KETUA RW	Semplak Rt 04 Rw 01 Kel Semplak Kec Bogor Barat	Kurangnya Alat Kesehatan untuk posyandu	Penyediaan Alat kesehatan Posyandu (KIT)	Terciptanya kenyamanan dan Peningkatan layanan kesehatan	10	fasilitas umum	10	paket	
93	Proses Verifikasi LPM	Firdaus	Komplek Rsmm Rt 01 Rw 01 Kel Menteng Kec Bogor Barat	kurangnya alat peraga dan penunjang kegiatan posyandu karna alat yang sudah ada tidak layak pakai	Pengadaan sarana posyandu : 1. 2 buah lemari 2. 3 buah meja 3. 3 buah kursi 4. 1 buah alat timbang	Memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas kegiatan pelayanan kesehatan khususnya posyandu.	100	fasilitas umum	1	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				dan sangat minim.	digital 5. 5 set ape 6. 1 buah white board alat posyandu yang ada sudah tidak layak pakai karna sudah berusia belasan tahun. Diharapkan ada pengadaan baru.						
94	Usulan Ditolak Kelurahan	EKO KETUA RW 13	Jl. Murbei Raya Rt 003 Rw 13 Kel Tegalgundil Kec Bogor Utara	BELUM LENGKAPNYA DAN RUSAKNYA ALKES DAN MEBELEIR POSYANDU DAN POSBINDU	20 meja dan kursi lemari penyimpanan alkes timbangan digital alat tensi	Memudahkan pelayanan kader ke peserta baik balita dan lansia arsip tersimpan rapi	250	fasilitas umum	10	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
95	Usulan Ditolak Kelurahan	EKO KETUA RW 13	Jl. Murbei Raya Rt 003 Rw 13 Kel	Beberapa mebeleir dan	20 meja kursi lemari	Memudahkan pelayanan kader kepada	250	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Tegalgundil Kec Bogor Utara	alkes sudah rusak	timbangan digital , posbindu	para balita dan lansia					kedalam prioritas
96	Usulan Ditolak Kelurahan	Rw 01 Tanah Sareal	Jl. Ahmad Yani, Gg. Karet Rt.06 Rw.01 Tanah Sareal Kec Tanah Sareal	Tidak ada kelengkapan untuk posyandu	Bantuan pengadaan alat-alat posyandu	Agar dalam pelayanan lebih maksimal	50	fasilitas umum	30	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
97	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Djunaedi Widya Permana	Jl. Jabaru 1 Rt 03 Rw 05 Kel Pasir Kuda Kec Bogor Barat	Belum terpasang kanopi dan pasang jendela baru	Bangunan sudah rapuh banyak yang rusak	Memberikan kenyamanan kepada warga pada saat ada kegiatan	1000	fasilitas umum	1	m3	
98	Usulan Ditolak LPM	Ketua RW.07	Posyandu Apel Jl.Palayu 6 Rt 04 Rw 07 Kel Tegalgundil Kec Bogor Utara	Perlu perbaikan gedung posyandu	Perbaikan gedung posyandu apel	Adanya fasilitas posyandu	350	milik pemerintah	30	m2	Kamus salah di Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) sementara uraian Perbaikan Gedung Posyandu Apel
99	Proses Penentuan	Aep permana	Margabakti Rt 01 Rw 01 Kel	Posyandu sudah	Semoga org yg ke	Semoga terrealisasi manfaatnya	100	fasilitas umum	10	m2	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
	Prioritas Kecamatan		Kertamaya Kec Bogor Selatan	kurang layak	posyandu jadi nyaman						
100	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 04	Posyandu 4a Dan 4b Cibogor Kel 01 Rw 04 Kel Cibogor Kec Bogor Tengah	tidak ada tempat tidur periksa ibu hamil dan balita, tidak ada lemari untuk arsip dan data, kekurangan meja dan kursi untuk pelayanan	Agar difasilitasi tempat tidur periksa ibu hamil dan bayi/balita serta lemari data,meja dan kursi utk pelayanan Posyandu 4A Posyandu 4b, Posyandu Remaja dan posbindu	Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu 4A dan 4b, posyandu Remaja, Posbindu	300	tidak membutuhkan lahan	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
101	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Aditya Bagus Kuswadi	Mutiara Bogor Raya Blok F9 Rt 05 Rw 16 Kel Katulampa Kec Bogor Timur	Stock alat kesehatan posyandu yang terbatas.	Mengajukan alat kesehatan posyandu.	Membantu memaksimalkan peran posyandu dalam meningkatkan kesehatan warga.	250	tidak membutuhkan lahan	20	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
102	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW.14	Jl. Drupada-1 Rt 01 Rw 14 Kel Tegalgundil Kec Bogor Utara	Tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil dan bayi/ balita, kakinya sudah patah. Kondisi saat ini disambung menggunakan kayu biasa, sehingga rawan patah lagi ketika sedang digunakan.	Pengadaan tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil dan bayi/ balita.	Punya ranjang pemeriksaan yang aman, nyaman dan higienis.	60	tidak membutuhkan lahan	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
103	Usulan Ditolak Kelurahan	Haris Ismail	Kp. Babakan Baru Rt 02 Rw 08 Kel Cipaku Kec Bogor Selayan	Kurangnya ketersediaan peralatan penunjang kegiatan posyandu	Pengadaan alat-alat periksa dan penunjang pelayanan posyandu	Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat	50	milik pemerintah	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
104	Usulan Ditolak Kelurahan	Agung kurniawan	Cipaku Skip Rt 04 Rw 06 Kel Cipaku Kec Bogor Selayan	kurangnya peralatan posyandu	Pengajuan kursi.dan meja	Agar para kader bisa lebih fleksibel dalam	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
						melayani ibu ibu hamil dan balita					kedalam prioritas
105	Usulan Ditolak Kelurahan	Toto Mardianto	Jl. Nuri No.67, Rt.02/Rw.05, Curugmekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	Kurang memahami pengembangan ussaha kecil dan permodalan	Perlu pelatihan mengenai UMKM dan cara mendapatkan izin PIRT, BPOM dan Logo Halal serta permodalan	Dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil dan ekonomi dilingkungan RW 05 dan sekitarnya	15	fasilitas umum	15	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
106	Usulan Ditolak Kelurahan	Holid, SH	Cijahe Krt 03 Rw 02 Kel Curugmekar Kec Bogor Barat	Kurangnya alat kesehatan	Penyediaan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Apabila ada warga yang sakit bisa jadi pertolongan pertama	400	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
107	Usulan Ditolak Kelurahan	Holid, SH	Cijahe Rw 02 Kel Curugmekar Kec Bogor Barat	Pencegahan demam berdarah dan kesehatan masyarakat	Wilayah padat penduduk dan peemasalahan kesehatan terutama pencegahan DBD	Peninhkatan kesehatan masyarakat	800	tidak membutuhkan lahan	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
108	Usulan Ditolak Kelurahan	ROMLI A. RACHMAN	Muara Sari Rt Rt 03 Rw 12 Kel. Pasirkuda Kec. Bogor Barat	Kurangnya makanan tambahan untuk balita	Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita	Agar balita menjadi sehat dan kuat	100	fasilitas umum	1000	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
109	Usulan Ditolak Kelurahan	rw03	Jl Griya Duta Abesin Rt 01 Rw 03 Kel Cibogor Kec Bogor Tengah	Membutuhkan alat kesehatan kit	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline ,alat cek gula darah,tempat tidur	Mempermudah cek kesehatan diposyandu	200	milik pemerintah	5	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
110	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	TOMMY IRWANTO, SH, MM	Cluster Charnwood Bcc Rt 01 Rw 15 Kel Kencana Kec Tanah Sareal	Kurang nya sarana Posyandu	Pengadaan sarana posyandu	Adanya sarana posyandu	100	fasilitas umum	5	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
111	Usulan Ditolak Kelurahan	Makmur	Rt.03/Rw.01, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Belum memiliki Posyandu	Pengajuan pembangunan posyandu	Terciptanya kesehatan bagi para Balita	200	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
112	Usulan Ditolak Kelurahan	HENDRA GUNAWAN, SH	Kp. Babakan Rt 01 Rw 09 Kel Bubulak Kec Bogor Barat	Alat - Alat sudah Rusak/tidak ada	Penyediaan Alat Kesehatan dan Meja Posyandu Sudah Rusak	Kekurangan peralatan / meja rusak	100	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
113	Usulan Ditolak PD	Rw. 04 Panaragan Aspol	Jl. Panaragan Aspol Rt 01 Rw 04 Kel Panaragan Kec Bogor Tengah	Gedung Posyandu yang sudah tidak layak	Perbaikan gedung posyandu	Tersedianya gedung posyandu yang layak	100	fasilitas umum	1	unit	Perbaikan dan Pembangunan Gedung Posyandu Bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
114	Usulan Ditolak Kelurahan	M Ali	Fqcf+9vm, Rt.03/Rw.08, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Indonesia	Hibah Alat Kesehatan Posyandu	Pengadaan timbangan digital bayi,meja dan kursi, lemari plastik,	Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu	74	tidak membutuhkan lahan	10	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					tempat tidur, alat ukur bayi						
115	Usulan Ditolak Kelurahan	Rochmat	Jl. Kenanga Raya No.5, Rt.02/Rw.07, Perum. Bukit, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Indonesia	Hibah alat kesehatan posyandu Cempaka A	Pengadaan timbangan digital bayi,meja dan kursi,lemari plastik,tempat tidur,alat ukur bayi	Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu	55	tidak membutuhkan lahan	10	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
116	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	RW 09	Bantarjati Atas Rt 03 Rw 09 Kel Bantarjati Kec Bogor Utara	Keterbatasan sarana dan prasarana posyandu dan renovasi posyandu	Mengajukan renovasi posyandu sarana prasarana posyandu	Kegiatan posyandu menjadi lebih baik	100	fasilitas umum	30	unit	
117	Proses Verifikasi LPM	Makmurudin	Kukupu Rt 04 Rw 05 Kel Cibadak Kec Tanah Sareal	pengadaan timbangan digital dan alat ukur bayi untuk 2 posyandu	Timbangan digital. Alat ukur bayi	Kader lebih mudah dalam pelaksanaan kegiatan	100	tidak membutuhkan lahan	2	unit	
118	Usulan Ditolak PD	TAVIP HARJANTO	Perumahan Taman Tirta Cimanggu Rt 02 Rw 13 Kel	POSYANDU BELUM MEMILIKI ALAT	POSYANDU sangat membutuhkan Alat	Dengan lengkapnya alat kesehatan posyandu maka	1000	milik pemerintah	1	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediak

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Mekarwangi Kec Tanah Sareal	FASILITAS ALAT KESEHATAN POSYANDU	Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline	pelayanan pemeriksaan kesehatan warga baik usia produktif maupun lansia dapat terlaksana dengan baik.					an di tahun 2023 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
119	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Deddy Erfandi	Rw 11, Cipaku Indah I Btn, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan	Peningkatan kesehatan warga diperlukan, sehingga fasilitas umum seperti	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan warga secara optimall dan efisien	250	fasilitas umum	1	paket	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				Posyandu perlu ditingkatkan .. Gedung serbaguna perlu direhab agar pemanfaatannya lebih maksimal.	Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline						
120	Usulan Ditolak PD	Asep Sopyan	Jl. Pelita 1 Rt 02 Rw 01 Kel Cipaku Kec Bogor Selatan	Tidak ada gedung posyandu	Tidak ada gedung fasilitas untuk kegitan posyandu dan poswindu dikarnakan gedung yang lama terkena dampak pengalihan lahan double track oleh PT.KAI.	Pengalihan gedung yang tidak semestinya, gedung keagamaan dialaihkan menjadi gedung posyandu sementara	200	fasilitas umum	100	m3	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes,

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
121	Usulan Ditolak Kelurahan	Musa Darusman	Margabhakti Rt 03 Rw.02 Kel Kertamaya Kec Bogor Selatan	tidak tersediannya alat kesehatan	Pengadaan pasilitas posyandu	Teciptanya warga yang tejaga dan sehat	520	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
122	Usulan Ditolak Kelurahan	Ena Sutisna	Bojongkaler Rt 01 Rw 04 Kel Bojongkerta Kec Bogor Selatan	Belum adanya gedung posyandu	Pembangunan gedung posyandu	Kegiatan Posyandu upaya meningkatkan kesehatan khususnya balli Balita dan ibu Hamil	6	tidak membutuhkan lahan	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
123	Usulan Ditolak Kelurahan	Mamang suminta	Babakan Sirna Rt 01 Rw 10 Pamoyanan Bogor Selatan	Posyandu kurang alat kesehatan	Alat kit kesehatan posyandu ,meja kursi.	Masyarakat mudah mendapatkan layanan	1000	fasilitas umum	20	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
						kesehatan di posyandu					
124	Usulan Ditolak Kelurahan	EMAN SULAEMAN	Jl Desa Curug Rt 02 Rw 01 Kec. Bogor Barat Kota Bogor	Kurangnya fasilitas alat kesehatan	Membutuhkan 2 timbangan bayi dan 2 tensi meter	Agar menjaga kesehatan masyarakat setempat	200	fasilitas umum	4	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
125	Usulan Ditolak PD	Supadma B Eneb	Lemah Duhur Rt 01 Rw 01 Kel Mulyaharja Kec Bogor Selatan	Kekurangan Alat alat perlengkapan posyandu	Melengkapi Kekurangan kursi	Alat di posyandu menjadi lengkap, sehingga memudahkan masyarakat untuk menunggu	1500	fasilitas umum	50	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusukan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											dari Dinas Kesehatan
126	Usulan Ditolak Kelurahan	Supadma B Eneb	Lemah Duhur Rt 01 Rw 01 Kel Mulyaharha Kec Bogor Selatan	Kekurangan sound system	Tidak adanya sound system susah nya komunikasi untuk memanggil Pasien	Memudahkan petugas untuk memanggil pasien	1500	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
127	Usulan Ditolak Kelurahan	Supadma B Eneb	Lemah Duhur Rt 01 Rw 01 Kel Mulyaharha Kec Bogor Selatan	tidak adanya laptop untuk menginput data secara online	Kurangnya laptop untuk penginputan data pasien secara online	Mempermudah petugas untuk penginputan data pasien secara online dan praktis	1497	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
128	Usulan Ditolak Kelurahan	Supadma B Eneb	Lemah Duhur Rt 01 Rw 01 Kel Mulyaharha Kec Bogor Selatan	tidak ada ranjang pasien	Tidak ada ranjang untuk memeriksa pasien di posyandu	Memudahkan petugas untuk memeriksa pasien	1500	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
129	Usulan Ditolak Kelurahan	Supadma B Eneb	Lemah Duhur Rt 01 Rw 01 Kel	tidak adanya dispenser air	Tidak ada dispenser untuk	Memudahkan pasien untuk	1500	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Mulyaharha Kec Bogor Selatan		kebutuhan minum pasien dan petugas di posyandu	minum air gratis					kedalam prioritas
130	Usulan Ditolak Kelurahan	Pak agus / pa puloh	Kp Salabenda Got Rt 02 Rw 09 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	tidak mempunyai peralatan kesehatan yang cukup dan terukur	Kami posyandu membutuhkan alat kesehatan yang di butuhkan untuk kebutuhan posyandu	Dapat bermanfaat bagi masyarakat saat cek up kesehatan	100	tidak membutuhkan lahan	7	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
131	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW.02	Cilibende Rt 04 Rw 02 Kel Babakan Kec Bogor Tengah	Gedung yang ada perlu perbaikan	Revitalisasi bangnan posyandu	Memberikan kenyamana gedung bagi masyarakat	200	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
132	Usulan Ditolak LPM	H. Jendro Supraptono, S.E	Jl. Kenari Blok Bg No.2, Rt.6/Rw.04, Kedunghalang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158, Indonesia	kondisi posyandu RW 4 sudah banyak yang bocor yang mengakibatkan alat-alat posyandu dan berkas-berkas	Perbaikan posyandu RW 4	Alat-alat posyandu dan juga berkas-berkas menjadi aman dan tidak rusak	100	fasilitas umum	1200	m2	Kamusnya penyediaan alat posyandu permohonan perbaikan posyandu

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				menjadi rusak							
133	Usulan Ditolak Kelurahan	IWAN RIDWAN	Kp.Semplak Rt 003 Rw 008,Kel.Bubulak,Kec.Bogor Barat	kurangnya tempat tidur untuk pemeriksaan dan kurangnya alat oksigen untuk pernapasan darurat	Minta tempat tidur untuk pemeriksaan dan kurangnya alat oksigen untuk pernapasan darurat	Akan memberikan suasana yg nyaman dan bersih bagi yg melakukan pemeriksaan anak di posyandu	350	fasilitas umum	3	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
134	Usulan Ditolak Kelurahan	UJANG SUTIARNA	Jl. Pabuaran Landeh, Rt.01/Rw.05, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16136, Indonesia	Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan di Posyandu	1. KURSI, MEJA, LEMARI 2. SOFA pendaftaran Posyandu 3. Alat kesehatan lainnya	Kesehatan dan kesadaran Masyarakat Meningkat dengan adanya fasilitas yag memadai	300	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
135	Usulan Ditolak Kelurahan	RT 04/RW 02	Perumahan Sari Agung Rt 04 Rw 02 Kel Curug Kec Bogor Barat	Peningkatan fasilitas alat kesehatan	Adanya peningkatan alat kesehatan yang layak untuk masyarakat	Agar memenuhi fasilitas alat kesehatan	123	tidak membutuhkan lahan	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
136	Usulan Ditolak Kelurahan	Agus sugiono	Babakan Pasirmas RT.003 RW.008 Kel.Pasir Kuda Kec.Bogor Barat Kota Bogor	Kurangnya pmt balita	Peningkatan pmt balita	Bayi sehat kuat dan bebas stunting	100	fasilitas umum	100	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
137	Usulan Ditolak PD	RW 14	Perumahan Griya Indah Bogor Rt 03 Rw 14 Kel Kedungbadak Kec Tanah Sareal	Belum punya peralatan untuk POSBINDU RW 14	Pengaadaan Peralatan posbindun RW 14 Alat tensi ,Alat Test Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat	Masyarat RW 14 di kontrol kondisi kesahatan	100	tidak membutuhkan lahan	1	m3	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
138	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 006 TANAH SAREAL	Jl.Pemuda Kebon Anggrek Rt.001 Rw.006 Kel Tanah Sareal Kec Tanah Sareal	KURANGNYA PERALATAN POSYANDU	Membutuhkan alat ukur tinggi , alat tensi , dan timbangan untuk bayi	Kinerja kader posyandu menjadi lebih baik	63	fasilitas umum	10	Paket	Tidak masuk kedalam prioritas
139	Usulan Ditolak Kelurahan	Jusmarwan	Babakan Sukamantri Rt 01/Rw 07, Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	Kekurangan sarana input data Kegiatan Pos Bindu	Pengadaan Perangkat Komp[uter/ Laptop untuk Posyandu serta perbaikan bangunan fisiknya	Pelayanan Pos Bindu, Pos Yandu dan Pos Remaja dapat berjalan dengan baik	250	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
140	Usulan Ditolak Kelurahan	BAMBANG SUNARSO	Ciwaringin Kaum Gg. Mesjid Rt 04 Rw 05 Kel Ciwaringin Kec Bogor Tengah	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA POSYANDU SEPERTI MEJA KURSI DAN ALAT-ALAT PENDUKUNG POSYANDU	PERMOHONAN PERLENGKAPAN SARANA PRASARANA POSYANDU MEJA 6 UNIT LEMARI 3 UNIT KURSI 50 UNIT	Terpenuhinya fasilitas posyandu yang memadai	70	fasilitas umum	61	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					PAPAN MADING UKURAN 2mx3m 2 UNIT						
141	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Usman wahidin	Kebon Jukut Rt 02 Rw 10 Kel Babakanpasar Kec Bogor Tengah	kurang alat pembantu untuk kegiatan posyandu	Timbangan, alat ukur tinggi badan, alat peraga, kursi, meja, terpal,	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	100	fasilitas umum	2	paket	
142	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	RW 02 Ciluar	Babakan Rt 02 Rw 02 Kel Ciluar Kec Bogor Utara	Alat Kesehatan Posyandu Sudah Rusak	Permohonan alat kesehatan posyandu	Terlayani Kesehatan di Wilayah Tersebut	22	tidak membutuhkan lahan	2	unit	
143	Usulan Ditolak PD	dedi supriadi	Kp. Pada Beunghar Rt 02 Rw 09 Kel Babakanpasar Kec Bogor Tenagh	kurang nya prasarana dan alat penunjang untuk kegitan di 2 posyandu, posyandu kenari dan posyandu cendrawasih	Pengadaan alat kesehatan dan penyediaan kursi, meja, dan lain lain.	Tercptanya posyandu yang berintegritas dan inovatif	150	fasilitas umum	10	paket	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											an dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
144	Usulan Ditolak Kelurahan	YUSUF SANUSI	Jl. Bhayangkara No.1 Rt 05 Rw 06 Kel Kedungbadak Kec Tanah Sareal	Kurang maximalnya kinerja kader posyandu	Mengajukan penambahan peralatan pengecekan kesehatan Posyandu Merpati RW.06	Meningkatnya kinerja kader Posyandu dan semakin meningkat pula skala penanganannya	100	fasilitas umum	50	orang	Tidak masuk kedalam prioritas
145	Usulan Ditolak PD	Ujang Sutisna	Tamansari Persada Blok D4 No. 25 Rt 3 Rw 15 Kel	Kurangnya sarana dan prasarana di	Pengadaan sarana prasarana umum yang	Meningkatnya kualitas fasilitas sarana	100	milik pemerintah	1	unit	1. Untuk Antropometri KIT

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Cibadak Kec Tanah Sareal	dalam posyandu	dapat menunjang kegitaan posyandu	prasarana di posyandu					sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
146	Usulan Ditolak Kelurahan	Dadan cahyana	Kp Rangga Mekar Rt 02 Rw 12 Kel Ranggamekar Kec Bogor Selatan	Posyandu interior belum ada plafon ,	Bangunan posyandu sudah berdiri	Bila sudah terpasang plafon bisa lebih rapih ,	180	fasilitas umum	25	m2	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				sehingga rawan kotor dan banyak debu	18thn sehingga kondisinya kurang bagus, tapi sudah rehab swadaya masyarakat ,, cuma untuk plafon masih belum ada karena kehabisan dana ,, kebutuhan untuk pasang plafon	nyaman bagi petugas dan pengguna posyandu ,, bisa lebih semangat untuk datang ke posyandu					
147	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 08	Babakan Lio Rt 01 Rw 08 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu banyak yang rusak	Pengajuan kit paosyandu	Posyandu berjalan dengan lancar karena KIT memadai	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
148	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 10 Dadi Gunawan	Babakan Lio Rt 02 Rw 10 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu banyak yang rusak/tidak berfungsi	Pengajuan kit posyandu	Posyandu berjalan dengan lancar	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
149	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 11	Babakan Lio Rt 01 Rw 11 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu Sering Rusak	Pengajuan kit posyandu	Posyandu berjalan dengan lancar	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
150	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 01	Batuhulung Rt 02 Rw 01 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu sering rusak/tidak berfungsi	Pengajuan KIT Posyandu	Posyandu berjalan dengan lancar	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
151	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 07	Babakan Lio Rt 01 Rw 07 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu sering rusak	Pengajuan kit posyandu	Posyandu menjadi lancar	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
152	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 09 Supendi	Babakan Lio Rt 02 Rw 09 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu sering rusak	Pengadaan kit posyandu	Posyandu berjalan dengan lancar	120	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
153	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 12 Edi Marjuki	Sawah Baru Rt 01 Rw 12 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT Posyandu banyak yang rusak	Pengajuan kit posyandu	Posyandu berjalan dengan lancar	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
154	Usulan Ditolak Kelurahan	RW 02 Yayat Supriatna	Batuhulung Rt 02 Rw 02 Kel Balumbangjaya Kec Bogor Barat	KIT posyandu sering rusak	Pengadaan KIT Posyandu	Posyandu berkjaan dengan lancar	80	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
155	Usulan Ditolak Kelurahan	Atieq Zainal Muttaqien	Kp Ciranjang Rt 01 Rw 03 Kel Pamoyan Kec Bogor Selatan	kurangnya sarana prasarana posyandu	Alkes posyandu sudah usang perlu	Alat kesehatan terbarui sehingga pengecekan	125	fasilitas umum	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					pergantian alat baru	kesehatan tidak terhambat					
156	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Nurwidiantara	Jl. Raya Ciapus (Kp. Cikaret) No.8, Rt.03/Rw.07, Cikaret, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	kurangnya perlengkapan pendukung pelayanan posyandu untuk masyarakat	Kurangnya fasilitas pendukung untuk pelayanan yang berkualitas	Posyandu menjadi lebih layak dan nyaman untuk berbagai pelayanan.	300	fasilitas umum	2	paket	
157	Usulan Ditolak Kelurahan	Siti Nurjanah	Bakom Urug Rt 02 Rw 06 Kel Bojongkerta Kec Bogor Selatan	Belum adanya bangunan untuk pelayanan kesehatan anak dan ibu hamil (Posyandu)	Pembangunan posyandu	Terjaminnya pelayanan kesehatan Balita di Ibu Hamil	2	tidak membutuhkan lahan	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
158	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Rw 14 pasir jaya	Jl. Muara Kidul, RT.01/Rw 14, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	Terbatasnya Alat Kesehatan Posyandu	Penyediaan alat kesehatan posyandu (kit kader)	Kegiatan kesehatan masyarakat berjalan lancar dan keamanan terjamin	100	fasilitas umum	15	paket	
159	Proses Verifikasi LPM	Makmurudin	Kukupu Rw 05 Kel Cibadak Kec Tanah Sareal	kurangnya sarana dan prasarana di	Pengadaan sarana dan prasarana umum yang	Meningkatnya kualitas dan prasarana di posyandu	100	milik pemerintah	2	unit	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				dalam posyandu	dapat menunjang kegiatan posyandu						
160	Usulan Ditolak Kelurahan	Tri Sumarni	Situbereum Rt 01 Rw 01 Kel Bojongkerta Kec Bogor Selatan	Belum mempunyai alat kesehatan untuk Posyandu	Belum mempunyai alat kesehatan untuk Posyandu	Meningkatkan kesehatan masyarakat	5	tidak membutuhkan lahan	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
161	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Muhamad Ali	Jl.Kosasih RT 04 Rw 07 Kel Cikaret Kec Bogor Selatan	kurangnya perlengkapan pendukung pelayanan posyandu untuk masyarakat	Kurangnya fasilitas pendukung untuk pelayanan yang berkualitas	Posyandu menjadi lebih layak dan nyaman untuk berbagai pelayanan.	250	tidak membutuhkan lahan	3	paket	
162	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Kikin	Kp. Nagrog Rt 01 Rw 09 Kel Pamoyan Kec Bogor Selatan	Belum adanya sarana dan praasarana di Posyandu	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu	Memiliki sarana dan prasarana posyandu	400	fasilitas umum	20	unit	
163	Usulan Ditolak Kelurahan	Denny Haryanto	Bogor Park Residence Rt 03 Rw 13 Kel Pamoyan Kec Bogor Selatan	Belum adanya prasarana di posyandu	Permohonaan prasarana posyandu	Memiliki prasarana posyandu	400	tidak membutuhkan lahan	20	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
164	Usulan Ditolak PD	RW 02	Tanah Baru Rt 04 Rw 02 Kel Tanah Baru Kec Bogor Utara	kurangnya prasarana perlengkapan posyandu	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline	Terpenuhinya penyediaan alat kesehatan	30	tidak membutuhkan lahan	11	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
165	Usulan Ditolak Kelurahan	RW. 009	Jl. Sumur Wangi, Rt.01/Rw.09, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor,	Hibah alat kesehatan posyandu	Pengadaan tempat tidur hamil dan Starter Kit	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat diposyandu	170	milik pemerintah	3	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Jawa Barat 16169, Indonesia								
166	Usulan Ditolak PD	Mamat	Jl. Sumur Wangi, Rt.03/Rw.10, Kayu Manis, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16169, Indonesia	Hibah Alat Kesehatan Posyandu	Pengadaan timbangan digital bayi,meja dan kursi,lemari plastik, tempat tidur,alat ukur bayi/dewasa	Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu	79	fasilitas umum	10	unit	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusukan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
167	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	H. Ismet Oyo	Kp. Gandok Rt 01 Rw 05 Kel Pakuan Kec Bogor Selatan	Belum lengkapnya alat Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu	Pengadaan bantuan Alat alat Kesehatan	Penegecekan kesehatan di masyarakat akan lebih maksiman dan optimal	56	fasilitas umum	56	orang	
168	Usulan Ditolak Kelurahan	Endi hadi	Bojong Menteng Rt 05 Rw 06 Kel Pasirkuda Kec Bogor Barat	Kurangnya pemberian makanan tambahan balita	Peningkatan bmt balita	Bayi sehat, kuat dan cerdas	50	tidak membutuhkan lahan	50	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
169	Usulan Ditolak Kelurahan	LUKI IRAWAN	Babakan Sirna Rt 02 Rw 02 Kel Tegallega Kec Bogor Tengah	kurangnya alat kesehatan untuk posyandu melati 1	Penyediaan alat kesehatan posyandu	Pemenuhan alat kesehatan posyandu yang lengkap	20	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
170	Usulan Ditolak Kelurahan	LUKI IRAWAN	Babakan Sirna Rt 02 Rw 02 Kel Tegallega Kec Bogor Tengah	kurangnya alat kesehatan untuk posyandu melati 1	Penyediaan alat kesehatan posyandu	Pemenuhan alat kesehatan posyandu yang lengkap	20	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
171	Usulan Ditolak Kelurahan	LUKI IRAWAN	Babakan Sirna Rt 05 Rw 02 Kel Tegallega Kec Bogor Tengah	Kurangnya peralatan penunjang kesehatan untuk posyandu Melati 2	Penyediaan alat kesehatan	Tersedianya alat kesehatan untuk posyandu yang lengkap	20	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
172	Usulan Ditolak Kelurahan	Wawan Sumantri	Jalan Cipinanggading Rw 04 Kel Ranggamekar Kec Bogor Selatan	Dikarenakan sarana prasaran di 2 Posyandu Rw 4 kurang memadai khususnya meja dan kursi	Dikarenakan sarana prasaran di 2 Posyandu Rw 4 kurang memadai khususnya meja dan kursi	Dampak usulan ini dapat meningkatkan kinerja para kader di ke 2 posyandu	700	fasilitas umum	15	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
173	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	DADANG RUKMANA	Jl. Ariasurialaga Cibalagung Rt 04 Rw 03 Kel Pasirkuda Kec Bogor Barat	Bocor dan Kumuh tempatnya	Perbaikan dinding dan Cor Atap	Membuat nyaman dan aman bagi pengguna	250	fasilitas umum	100	m2	
174	Usulan Ditolak Kelurahan	H MUMU	Sindangbarang Rt002/Rw009 Kel Sindangbarang Kec Bogor Barat	ALAT ALAT KURANG DI POSYANDU	Penyediaan alat-alat posyandu kasur periksa, kursi, meja, dll	Kelengkapan alat alat	200	milik pemerintah	5	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
175	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	IDA FIRDAYANTI (Ketua RW 02 Kel Cilendek Barat)	Posyandu Plamboyan 2 Gg. Nasedin Rt.02/Rw.02, Cilendek Barat, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Prasarana Posyandu yang belum memadai	Meja + kursi timbangan balita duduk timbangan balita berdiri bop kader	Meningkatkan dan memonitor kesehatan warga khususnya warga RW. 02	50	fasilitas umum	2	unit	
176	Usulan Ditolak Kelurahan	ENENG SUTIARSIH	Gg Makam Rt 04 Rw 05 Kel Cilendek Barat Kec Bogor Barat	belum terpenuhiny a kegiatan untuk sarana prasarana posyandu	Alat tinggi badan, panjang badan dan alat kesehatan lainnya untuk kegiatan posyandu	Terpenuhinya kegiatan untuk sarana prasarana posyandu	100	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
177	Usulan Ditolak Kelurahan	KETUA RW.017	Jl. Kp. Pahlawan No.23, Rt.01/Rw.17, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	FASILITAS POSYANDU KURANG MEMADAHI	Meja, kursi, timbangan balita digital untuk kebutuhan posyandu, papan ukur leng boot	Kualitas kesehatan akan semakin baik	300	fasilitas umum	2	unit	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
178	Usulan Ditolak Kelurahan	RW.03	Gg. Cendana Rt.03/Rw.03, Cilendek Barat., Kec. Bogor Barat., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Kondisi fisik bangunan yang sudah mulai lapuk dan rusak	Perbaikan fisik bangunan	Kenyamanan aktifitas program kesehatan untuk pengguna fasilitas kesehatan	500	fasilitas umum	50	m3	Tidak masuk kedalam prioritas
179	Usulan Ditolak Kelurahan	Ruslan Supriadi	Kp Mekar Jaya Rt 01 Rw 09 Kel Ranggamekar Kec Bogor Selatan	Sudah Rusaknya Alat-Alat Perlengkapan Posyandu	Membutuhkan alat-alat posyandu	Membuat Kenyaman Bagi Warga yang datang ke Posyandu	50	fasilitas umum	50	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
180	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW	Gg. Barjo Rw 02 Kel Kebon Kalapa Kec Bogor Tengah	Minimnya Peralatan Posyandu,	Minimnya peralatan posyandu,	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	232	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
181	Usulan Ditolak PD	Endang Sutisna	Kampung Wangun Atas Rt 02 Rw 02 Kel Sindangsari Kec Bogor Timur	Kebutuhan alat kesehatan	Pengadaan alat kesehatan	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul	100	tidak membutuhkan lahan	1	paket	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023,

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											2. Kader Kit Sudah Diusukan dalam program SOPHI Kemenkes,
182	Usulan Ditolak Kelurahan	Rahmat hidayat	Gg.H.Burhan Rt 03 Rw 03 Kel Margajaya Kec Bogor Barat	Belum adanya kelengkapan posyandu	Permohonan kelengkapan posyandu	Untuk meningkatkan kualitas kesehatan	50	fasilitas umum	6	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
183	Usulan Ditolak PD	Mamay Mayasaroh	Jalan Pabaton No.51 Rt 04 Rw 03 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kesehatan di Posyandu Merpati	Penyediaan alat kesehatan posyandu	Warga Masyarakat khususnya ibu dan anak akan nyaman dan terlayani dengan baik jika peralatan kesehatan di posyandu lengkap.	50	milik pemerintah	100	m2	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenk

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
											es, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
184	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Lin Herlina	Posyandu Nirwana Jl. Abesin Gg. Mualim No.6 Rt 01 Rw 04 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah	Kurangnya Kelengkapan Alat kesehatan di Posyandu Nirwana	Alat kesehatan posyandu	Terciptanya Pelayanan Prima Pada masyarakat Khusunya Ibu dan Anak	100	fasilitas umum	100	m2	
185	Usulan Ditolak Kelurahan	HUSIN RUSDI	Jabaru Rt 03 Rw 10 Kel. Pasirkuda Kec. Bogor Barat	Kurangnya makanan tambahan untuk balita	Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita	Agar balita menjadi sehat dan kuat	100	milik pemerintah	50	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
186	Usulan Ditolak PD	Muhammad Imam Hanafi	Pakuan Regency Cluster Tajuragung Blok C7 No 5 Rt 05 Rw 07 Kel	kurangnya alat penunjang	Kurangnya alat penunjang posyandu	Menjadikan posyandu dapat maksimal melayani	200	fasilitas umum	1	paket	1. Untuk Antropometri KIT sudah

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
			Margajaya Kec Bogor Barat	untuk posyandu							disediakan di tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusukan dalam program SOPHI Kemenkes, 3. Sedangkan untuk kebutuhan Mebelair bukan merupakan Tusi dari Dinas Kesehatan
187	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Nur Rachmawati	Posyandu Tunas Harapan 5A Jl. Kantin 9 Rt 01 Rw 05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah	Kurangnya Prasarana Kesehatan di Posyandu Tunas Harapan 5A	Penyediaan alat kesehatan posyandu	Akan Terciptanya pelayanan Prima di Posyandu Tunas harapan 5A Khusunya bagi ibu dan anak	100	fasilitas umum	100	m2	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
188	Usulan Ditolak Kelurahan	Suningsih	Kp Mekar Wangi Rt 03 Rw 13 Kel Ranggamekar Kec Bogor Selatan	Di wilayah saya masalah alat"posyandu.karena sangat di butuhkan,seperti meja,kursi sudah pada rusak	Di wilayah saya alat" posyandu karena sudah pada rusak,seperti kursi,meja	Setiap kegiatan posyandu di wilayah saya.para kader tidak nyaman.karena meja kursi sampe pinjem ke warga setempat	20	fasilitas umum	20	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
189	Usulan Ditolak Kelurahan	Ratna	Posyandu Tunas Harapan 5 B Jln Abesin No.62 Rt 03 Rw 05 Kel Pabaton Kec Bogor Tengah	Kurangnya lengkapnya Alat Kesehatan di Posyandu Tunas HArapan 5B	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu Tunas Harapan 5B	Terciptanya Pelayanan Prima Posyandu ,Khususnya Ibu dan Anak	50	fasilitas umum	100	m2	Tidak masuk kedalam prioritas
190	Usulan Ditolak Kelurahan	Darma Satyawan	Jl.Linggabuana Rt 03 Rw 07 Kel Margajaya Kec Bogor Barat	Belum lengkapnya kebutuhan posyandu	Permohonan kelengkapan posyandu dan pos bindu parency	Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	40	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
191	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW	Panaragan Bakbis Rw 05 Kel Kebon Kalapa Kec Bogor Tengah	Alat Kesehatan Posyandu yang terdiri dari Alat	Alat Kesehatan Posyandu yang terdiri dari Alat	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas,	254	fasilitas umum	254	paket	Tidak masuk kedalam prioritas

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline	Ukur Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline	produktif dan inovatif					
192	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	EDDY MOELYADI HASANUDIN	Kp. Semplak Rt 05 Rw 04 Kel Bubulak Kec Bogor Barat	Kerusakan plapon, kusen dan genteng	Terkendala, kalau hujan bocor dan nampak depan sudah rusak atapnya	Warga jadi nyaman dan tenang karna sudah tidak bocor	350	fasilitas umum	30	m3	
193	Usulan Ditolak Kelurahan	Ketua RW	Kebon Kopi Rt 02 Rw 06 Kel Kebon Kalapa Kec Bogor Tengah	Alat Ukur Tekanan Darah dan Termometer	Alat Ukur Tekanan Darah dan Termometer	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	357	fasilitas umum	2	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
194	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	Ketua RW	Kebon Kopi Rw 09 Kel Kebon Kalapa Kec Bogor Tengah	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu (Kit Kader) yang terdiri dari Alat Ukur	Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif	868	fasilitas umum	2	paket	

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
				Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline	Tekanan Darah Digital, Termometer, Pita Lila dan Metline						
195	Usulan Ditolak Kelurahan	Mimi Maryawati	Dramaga Caringin Rt 01 Rw 06 Kel Margajaya Kec Bogor Barat	Belum lengkapnya alat untuk kebutuhan posyandu	Permohonan perlengkapan kebutuhan posyandu	Untuk Kelancaran kegiatan aktivitas posyandu	45	fasilitas umum	1	paket	Tidak masuk kedalam prioritas
196	Usulan Ditolak Kelurahan	Haryawan	Jl. Pemuda Caringin Rt.02 Rw.05 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor 16116	Tidak tersedianya alat kesehatan masyarakat	Pengadaan alat kesehatan	Mempermudah kerja kader posyandu di wilayah	200	fasilitas umum	1	unit	Tidak masuk kedalam prioritas
197	Proses Penentuan Prioritas Kecamatan	bambang riyantoko_Ketua RW012	Jl Bambu Apus II No. 7 Taman Yasmin Sektor VII Rt 01 Rw 12 Kel Cilendek Timur Kec Bogor Barat	tidak adanya sarana perlatan penunjang untuk Posyandu	Peralatan untuk pengadaan set posyandu	Bermanfaat bagi rumah tangga dan keluarga	100	fasilitas umum	1	paket	
198	Usulan Ditolak PD	Prayitno	Kantor Sekretariat Rw. 09 Taman Yasmin Rt. 03 Rw. 09 Kel Cilendek Timur Kec Bogor Barat	Belum terfasilitasinya sarana pelayanan Posbindu Lansia	Peralatan Kesehatan Pelayanan Posbindu Lansia di	Terfasilitasinya pelayanan Posbindu Lansia di wilayah RW. 09	100	fasilitas umum	1	paket	1. Untuk Antropometri KIT sudah disediakan di

NO	STATUS USULAN	NAMA PENGUSUL	ALAMAT	PERMASALAHAN USULAN	URAIAN USULAN	DAMPAK USULAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	KETERSEDIAAN LAHAN	VOL.	SATUAN	ALASAN DITOLAK
					wilayah RW. 09						tahun 2023, 2. Kader Kit Sudah Diusulkan dalam program SOPHI Kemenkes,
199	Proses Penentuan Prioritas Kelurahan	Pokja Posyandu Kelurahan Cilendek Timur	Kantor Kelurahan Cilendek Timur Jl. Gg. Mesjid Rt. 01 Rw. 10 Rt 01 Rw 10 Kel Cilendek Kec Bogor Barat	Kurang dan sudah tidak layaknya peralatan meubelair Pelayanan Posyandu (Kursi dan Meja), serta peralatan kesehatan Pelayanan Posyandu	Meubelair dan peralatan kesehatan Posyandu	Terfasilitasinya Pelayanan Posyandu yang baik diwilayah Kel. Cilendek Timur	12	tidak membutuhkan lahan	12	paket	

Tabel 2. 11 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	Kamus	Nama Pengusul	Nama Partai	Dapil	Bidang	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Alamat	Sub Kegiatan	Hasil Diskusi 10 Maret 2023
1	Penyediaan Alat Kesehatan	Endah Purwanti, S.Pi	Partai Keadilan Sejahtera	Bogor Utara	Sosial Budaya	15	paket	Dinas Kesehatan	Jalan KS. Tubun No. 234, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, RT.01/RW.04, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
2	Penyediaan Alat Kesehatan	Devie Prihartini Sultani, SE	Partai NasDem	Bogor Barat	Sosial Budaya	12	item	Dinas Kesehatan	Jl. Menteng No.57, RT.01/RW.02, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

3	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	20000000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Cemplang lama No.17, RT.01/RW.13, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
4	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	25000000	Rp	Dinas Kesehatan	16113, Jl. Kelurahan No.1, RT.03/RW.03, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
5	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	25000000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Loji Kp. No.24, RT.01/RW.13, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

6	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	pulo empang kebon manggis rt.01 rw.12, RT.01/RW.12, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
7	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Blok Masjid No.8, RT.02/RW.10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
8	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Polisi No.1, RT.04/RW.08, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16122, Indonesia		
9	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QWV+49F, Gg. Sukmaraharja, RT.05/RW.05, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
10	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	kp kebon manggis, RT.03/RW.04, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
11	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.50, RT.04/RW.01, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
12	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Blk. Sukalaya Jl. Paledang No.50, RT.01/RW.07, Kp. Parung Jambu, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
13	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Blok Beton No.13, RT.5/RW.09, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

14	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ir. H. Juanda No.58, RT.01/RW.11, Kp. Parung Jambu, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
15	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QWV+CP8, Jl. Kb. Manggis, RT.02/RW.12, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
16	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ledeng Blok Swadaya 2 No.6, RT.02/RW.10, Kb. Klp., Kecamatan Bogor	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
17	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Gg. Harapan Baru 1 No.54, RT.05/RW.05, Mulyaharja, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16135, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
18	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250000000	Rp	Dinas Kesehatan	16113, Jl. Kelurahan No.1, RT.03/RW.03, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
19	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.38, RT.01/RW.06, Panaragan, Kecamatan Bogor	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
20	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin Gg. Tanjung No.41, RT.04/RW.05, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
21	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Sancang Dalam Blok Madrasah No.16, RT.2/RW.07, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
22	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QVW+Q5R, RT.01/RW.13, Paledang, Kecamatan	Pengadaan Alat Kesehatan	Diakomodir

									Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
23	Penyediaan Alat Kesehatan	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Timteng	Sosial Budaya	20	pcs	Dinas Kesehatan	Jl. Roda, RT.02/RW.06, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
24	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Pahlawan 3 No.5, RT.02/RW.08, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
25	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Empang Blok Wahir No.49, RT.02/RW.11, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
26	Penyediaan Alat Kesehatan	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Timteng	Sosial Budaya	4	Unit	Dinas Kesehatan	Ciburial Indah No. 96 RT. 03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
27	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Suryakencana No.156, RT.01/RW.10, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
28	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang No.4, RT.02/RW.02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
29	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250 000 00	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Loji Kp. No.213, RT.01/RW.13, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
30	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250 000 00	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Cilendek No.35, RT.03/RW.06, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
31	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	10.000.000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

32	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250 000 00		Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
33	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Paledang Kp.lebak sari, Rt.03/03 No.20, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
34	Perbaikan Puskesmas	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Timteng	Sosial Budaya	192	m2	Dinas Kesehatan	9R7Q+G7Q, RT.02/RW.09, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Diakomodir

35	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250 000 00	paket	Dinas Kesehatan	Jl. H.T. Sobari No.3-8, RT.07/RW.01, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
36	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	RT.01/RW.09, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
37	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	9QVW+FRJ, Jalan, RT.03/RW.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
38	Penyediaan Alat	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Kebon Pala No. 10A RT 004/011,	Pengadaan Alat Kesehatan	Diakomodir

	Kesehatan								RT.01/RW.09, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
39	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Kp. Gudang No.11, RT.03/RW.06, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
40	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.115-117, RT.02/RW.04, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
41	Penyediaan Alat	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	RT.01/RW.02, Gudang, Kecamatan	Pengadaan Alat Kesehatan	Diakomodir

	Kesehatan								Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
42	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Lawang Seketeng No.7, RT.01/RW.07, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
43	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Semboja No.05, RT.02/RW.08, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
44	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Aut No.13, RT.4/RW.3, Gudang, Kecamatan	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang	Diakomodir

									Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
45	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.28, RT.02/RW.05, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
46	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	RT.03/RW.12, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
47	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Padasuka No.6, RT.01/RW.11, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16123, Indonesia		
48	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Lawang Saketeng No.88, RT.01/RW.08, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
49	Penyediaan Alat Kesehatan	Eka Wardhana, S.IP	Partai Golongan Karya	Timteng	Sosial Budaya	1	Paket	Dinas Kesehatan	RT.04/RW.03, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
50	Penyediaan Alat Kesehatan	Rizal Utami, S.H,M.H	Partai Persatuan Pembangunan	Timteng	Sosial Budaya	50	Tabung	Dinas Kesehatan	Jl. Roda I No.59, RT.03/RW.08, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16126, Indonesia		
51	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Sekolah No.2, RT.01/RW.01, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
52	Penyediaan Alat Kesehatan	Achmad Rifki Alaydrus, SH	Partai Amanat Nasional	Bogor Barat	Sosial Budaya	250000000	Rp	Dinas Kesehatan	Jl. Cijahe RT.03/RW.13, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
53	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perumahan Bogor Baru No.1, RT.01/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16129, Indonesia		
54	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	1	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar No.4, RT.01/RW.02, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
55	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Danau Limboto Dalam No.36, RT.01/RW.04, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
56	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Danau Sampang No.47, RT.01/RW.03, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16129, Indonesia		
57	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar Blok Maxindo No.37, RT.01/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
58	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Malabar No.3, RT.01/RW.09, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
59	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Rumah Sakit I No.1, RT.01/RW.08, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16129, Indonesia		
60	Penyediaan Alat Kesehatan	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	Partai Keadilan Sejahtera	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	unit	Dinas Kesehatan	Jalan Cipete Raya, RW.06, Mulyaharja, Bogor Selatan	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
61	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Mantarena No.12, RT.03/RW.03, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
62	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.30, RT.03/RW.04, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16125, Indonesia		
63	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Kidul No.2, RT.04/RW.02, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
64	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Kpknl Bogor, Jl. Veteran, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
65	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Veteran Blok Kepatihan No.35, RT.01/RW.01, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia		
66	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Panaragan Penggilingan No.1, RT.03/RW.07, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
67	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cimanggu Kecil No.12A, RT.01/RW.07, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
68	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin II No.3, RT.04/RW.03, Ciwaringin, Kecamatan Bogor	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
69	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	CQ7Q+FH8, RT.02/RW.04, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
70	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.96, RT.02/RW.02, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
71	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin No.1, RT.03/RW.08, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16124, Indonesia		
72	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Cimanggu Kecil No.4, RT.01/RW.11, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
73	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Re. Martadinata No.35, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
74	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Tentara Pelajar Blok Pasama No.6, RT.02/RW.12, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

									Barat 16124, Indonesia		
75	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ciwaringin Gg. Tanjung No.6, RT.01/RW.10, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
76	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Gg. Kepatihan No.7, RT.05/RW.01, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
77	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Ledeng Blok Mekar Sari No.13, RT.01/RW.07, Kb. Klp., Kecamatan Bogor	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
78	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	RT.01/RW.05, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
79	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan Kebon Jahe No.13, RT.03/RW.03, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
80	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan No.69, RT.01/RW.04, Kb. Klp., Kecamatan Bogor	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
81	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	Paket	Dinas Kesehatan	Gg. Amil No.18, RT.02/RW.06, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
82	Penyediaan Alat Kesehatan	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Partai Keadilan Sejahtera	Timteng	Sosial Budaya	2	paket	Dinas Kesehatan	Jl. Veteran No.15, RT.03/RW.02, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
83	Penyediaan Alat Kesehatan	Pepen Firdaus, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya	Timteng	Sosial Budaya	2	Unit	Dinas Kesehatan	Ciburial Indah RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor,	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas	Diakomodir

									Jawa Barat 16143, Indonesia	Pelayanan Kesehatan	
84	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Cikaret Blok A No.8, RT.04/RW.01, Cikaret, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
85	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Batu Tulis No.34, RT.03/RW.14, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir
86	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Jl. Sedane No.24, RT.01/RW.14, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

87	Penyediaan Alat Kesehatan	Said Muhamad Mohan	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bogor Selatan	Sosial Budaya	1	PAKET	Dinas Kesehatan	Gg. Aster No.5, RT.01/RW.14, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Diakomodir

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pokok pikiran DPRD 2025 telah diakomodir seluruhnya pada DAK Fisik

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Konsep pembangunan Kota Bogor 2019-2024 sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Visi Kota Bogor pada tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"**. Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup **Kota Bogor** yang mana meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. **Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kota Bogor lima tahun kedepan ditekankan kepada kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / masyarakat miskin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang terkait bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
   a. Tujuan
      Meningkatknya Kualitas dan akses kesehatan
      Indikator : 1) Indeks Kesehatan
   b. Sasaran
      Terwujudnya Kota Sehat dan Keluarga sehat
      Indikator : 1) Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Target : 75,85); 2) Indeks Keluarga Sehat (Target : 0,475)
   c. Strategi
      Mengoptimalkan akses dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu

2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
   a. Tujuan
      Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.
      Indikator : 1) Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah
   b. Sasaran
      Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
      Indikator : 1) Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah (Target : 93,35)
   c. Strategi
      Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada kebijakan Permendagri 18 Tahun 2017, Permendagri 18 Tahun 2020, dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh Pusat maupun Daerah. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dengan kebijakan yang ditetapkan adalah :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Program
1	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Terwujudnya Kota Sehat dan Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada saat rancangan awal RKPD Tahun 2025 terdapat 5 Program, 23 Kegiatan, dan 79 Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Akan tetapi, di Bulan Juni 2023 terdapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan pemutakhirkan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilakukan pemutakhirkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Yang Telah Dilakukan Pemutakhirkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengembangan Rumah Sakit
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
			Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025 Kota Bogor

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025						PERUBAHAN 2025						
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU ANGGARAN APBD 2025 (EFISIENSI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KET
					VOLUME	SATUAN					VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14
	1.	**DINAS KESEHATAN**					**619.756.627.468**	**259.757.480.996**					**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**619.756.627.468**	**259.757.480.996**					**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
	1.02	**URUSAN BIDANG KESEHATAN**					**619.756.627.468**	**259.757.480.996**					**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	
	1.02.01	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**138.164.130.502**	**136.085.401.033**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**135.596.080.993**	**-162.481.529**	
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95,00	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95,00	Persen			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100	Persen			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan		88,38	Nilai			

			Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan						Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan						
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		27,01	Nilai			
	10.201.201	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah**	Kota Bogor	**66,67**	**Persen**	**258.800.000**	**195.080.000**	**Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah**	Kota Bogor	**66,67**	**Persen**	**203.080.000**	**63.720.000**	
			Persentase Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**		**100**	**Persen**			
	102.012.010.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	6	Dokumen	139.360.000	139.360.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	6	Dokumen	139.360.000	0	
	102.012.010.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6	Laporan	119.440.000	55.720.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6	Laporan	63.720.000	-55.720.000	
	10.201.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**129.864.379.817**	**129.810.532.217**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**128.066.124.437**	**53.847.600**	
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	**Kota Bogor**	**94,00**	**Persen**			**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**Kota Bogor**	**94,00**	**Persen**			
	102.012.020.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	1338	Orang/bulan	128.380.739.417	128.380.739.417	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	1338	Orang/bulan	126.683.531.637	-1.697.207.780	
	102.012.020.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	16	Dokumen	1.369.248.400	1.316.224.800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	16	Dokumen	1.269.024.800	-100.223.600	
	102.012.020.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kota Bogor	3	Laporan	114.392.000	113.568.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kota Bogor	3	Laporan	113.568.000	-824.000	

		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.225.782.500**	**2.188.699.110**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**1.666.151.935**	**-1.125.605.565**	
	102.012.060.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	39.777.000	39.777.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	39.777.000	0	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	473.871.900	444.851.910	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	193.250.735	-280.621.165	
	102.012.060.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	66.330.600	66.330.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	66.330.600	0	
	102.012.060.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	2.011.268.000	1.637.739.600	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	1.166.283.600	-844.984.400	
	102.012.060.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1	Laporan	634.535.000	288.475.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1	Laporan	200.510.000	-434.025.000	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.162.543.700**	**781.986.500**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**1.774.462.200**	**611.918.500**	
	102.012.070.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor	4	Unit	80.443.600	45.346.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor	4	Unit	116.922.800	36.479.200	Meja rapat aula
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6	Unit	899.576.500	700.222.700	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	38	Unit	882.755.700	-16.820.800	Mesin antrian puskesmas, hanpone PSC dan Televisi Puskesmas, AC, Kamera
	1.020.120.700.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	72	Unit	182.523.600	36.417.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	72	Unit	774.783.700	592.260.100	DBHCHT dan Penambahan intalasi Listrik gedung B lantai 2
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.119.399.506**	**2.119.399.506**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**2.119.399.506**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	3	Laporan	736.550.234	736.550.234	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	3	Laporan	736.550.234	0	
	102.012.080.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	7	Laporan	1.382.849.272	1.382.849.272	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	7	Laporan	1.382.849.272	0	

	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.533.224.979**	**989.703.700**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**1.766.862.915**	**233.637.936**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	17	Unit	348.545.361	348.545.361	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	19	Unit	570.493.600	221.948.239	Biaya Operasional Mobil 2 Unit dan Stikerisasi Brending Ambulance 26 unit
	102.012.090.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	480	Unit	357.908.958	157.017.679	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	480	Unit	165.668.655	-192.240.303	Pelayanan Publik
	102.012.090.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	4	Unit	826.770.660	484.140.660	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	4	Unit	1.030.700.660	203.930.000	Pelayanan Publik
2	**1.02.02**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**105.056.996.904**	**104.192.624.904**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**122.391.717.843**	**18.199.092.939**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			

			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**73,2**	**Persen**	**30.767.787.725**	**30.767.238.725**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**73,2**	**Persen**	**40.957.326.525**	**10.190.087.800**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**		**25**	**Puskesmas**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		**24**	**Unit**			**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**		**24**	**Unit**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		**25**	**Puskesmas**			**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**		**25**	**Puskesmas**			
	102.022.010.002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kota Bogor	1	Unit	0	0	
	102.022.010.007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Bogor	1	Unit	7.350.205.100	7.350.205.100	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Bogor	2	Unit	7.733.243.100	383.038.000	Pembuatan IPAL PSC Gesit 119
	102.022.010.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Bogor	3	Unit	1.009.342.200	1.009.342.200	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Bogor	3	Unit	1.005.529.800	-3.812.400	DED Puskesmas Pondok Rumput
	102.022.010.011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Bogor	1	Unit	230.106.600	230.106.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Bogor	1	Unit	228.406.600	-1.700.000	
	102.022.010.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	1	Unit	27.890.700	27.890.700	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	1	Unit	3.330.390.700	3.302.500.000	Mengakomodir Misi Walikota : Bogor Sehat, DBHCHT
	102.022.010.020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Kota Bogor	100	Unit	274.324.000	273.775.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Kota Bogor	100	Unit	273.775.000	-549.000	

		Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar						Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar						
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Bogor	10	Paket	21.752.076.025	21.752.076.025	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Bogor	10	Paket	28.262.639.825	6.510.563.800	Mengakomodir Misi Walikota : Bogor Sehat Puskesmas 24 jam, DBHCHT, DAK NF
	102.022.010.024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kota Bogor	8695	Keluarga	123.843.100	123.843.100	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kota Bogor	8695	Keluarga	123.341.500	-501.600	
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**72.502.196.781**	**72.086.953.181**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**79.986.314.920**	**7.484.118.139**	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		**100**	**Persen**			**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**		**100**	**Persen**			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		**68**	**Kelurahan**			**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM**		**68**	**Kelurahan**			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			

			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			

	102.022.020.001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	19.400	Orang	46.210.000	38.335.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	19.400	Orang	34.435.000	-11.775.000	
	102.022.020.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	18.518	Orang	32.184.000	32.184.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	18.518	Orang	32.184.000	0	
	102.022.020.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17.893	Orang	236.185.600	176.270.800	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17.893	Orang	36.181.200	-200.004.400	
	102.022.020.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	85.207	Orang	75.500.000	23.760.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	85.207	Orang	23.760.000	-51.740.000	
	102.022.020.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	149.682	Orang	69.361.400	30.104.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	149.682	Orang	30.104.000	-39.257.400	
	102.022.020.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	737.301	Orang	155.993.600	155.993.600	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	737.301	Orang	126.948.800	-29.044.800	
	102.022.020.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	72.485	Orang	61.969.300	57.244.300	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	72.485	Orang	58.644.300	-3.325.000	DAK NF
	102.022.020.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	71.484	Orang	59.718.200	36.478.400	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	71.484	Orang	19.678.400	-40.039.800	
	102.022.020.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17.445	Orang	12.264.800	12.264.800	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17.445	Orang	11.364.800	-900.000	
	102.022.020.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	1.578	Orang	25.186.200	25.186.200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	1.578	Orang	25.186.200	0	
	102.022.020.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	38.688	Orang	78.275.000	78.275.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	38.688	Orang	76.475.000	-1.800.000	
	102.022.020.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	24.267	Orang	43.079.500	43.079.500	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	24.267	Orang	43.079.500	0	
	102.022.020.014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.624.800	15.300.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Kota Bogor	1	Dokumen	10.800.000	-4.824.800	

		Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						
	102.022.020.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	712.439.279	712.439.279	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	704.388.100	-8.051.179	
	102.022.020.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	2	Dokumen	136.228.200	136.065.800	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	2	Dokumen	136.065.800	-162.400	
	102.022.020.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	3	Dokumen	231.248.200	227.261.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	3	Dokumen	237.236.000	5.987.800	
	102.022.020.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	2	Dokumen	47.695.200	8.700.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	2	Dokumen	354.881.000	307.185.800	DAK NF
	102.022.020.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.818.000	5.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.400.000	-418.000	
	102.022.020.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	21.456.000	21.456.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	21.456.000	0	
	102.022.020.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	60.000	Orang	11.596.700	11.596.700	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	60.000	Orang	11.596.700	0	
	102.022.020.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	40	Orang	9.799.600	9.799.600	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	40	Orang	9.799.600	0	
	102.022.020.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	2	Dokumen	69.144.530.802	69.144.530.802	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	2	Dokumen	76.033.008.120	6.888.477.318	Penambahan Iuran PBI dan Hutang Jamkesda Tahun 2024
	1.02.02.2.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kota Bogor	3	Paket	0	0	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kota Bogor	3	Dokumen	321.875.000	321.875.000	DAK NF
	102.022.020.029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	1	Dokumen	170.978.400	119.978.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	1	Dokumen	117.278.400	-53.700.000	
	102.022.020.030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar	Kota Bogor	12	Unit	2.000.000	2.000.000	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar	Kota Bogor	12	Unit	2.000.000	0	

			Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas						Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas						
	1.02.02.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	87.791.000	87.791.000	DAK NF
	102.022.020.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	101	Unit	102.127.200	67.400.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	101	Unit	67.400.000	-34.727.200	
	102.022.020.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	1	Dokumen	187.731.100	89.503.900	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	1	Dokumen	86.803.900	-100.927.200	
	102.022.020.038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	1	Unit	751.130.100	751.130.100	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	1	Unit	934.630.100	183.500.000	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan P3K-Dokter NON ASN, Perawat dan Supir
	102.022.020.040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	8.119	Orang	27.449.600	26.800.000	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	8.119	Orang	21.400.000	-6.049.600	
	102.022.020.041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	2.282	Orang	18.300.000	18.300.000	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	2.282	Orang	18.300.000	0	
	102.022.020.042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Bogor	1.939	Orang	5.400.000	5.400.000	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Bogor	1.939	Orang	5.400.000	0	
	1.02.02.2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	276.048.000	276.048.000	DAK NF
	102.022.020.049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	4.716.000	4.716.000	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	4.716.000	0	
	10.202.203	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah aplikasi yang terpelihara**	**Kota Bogor**	**10**	**Buah**	**1.727.539.998**	**1.280.716.198**	**Jumlah aplikasi yang terpelihara**	**Kota Bogor**	**10**	**Buah**	**1.390.359.598**	**446.823.800**	
	102.022.030.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	3	Dokumen	1.727.539.998	1.280.716.198	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	3	Dokumen	1.390.359.598	-337.180.400	Server Simpus 2 unit
	10.202.204	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan**	**Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang di terbitkan**	**Kota Bogor**	**75**	**Unit**	**59.472.400**	**57.716.800**	**Jumlah rekomendasi perizinan fasyankes yang di terbitkan**	**Kota Bogor**	**75**	**Unit**	**57.716.800**	**1.755.600**	

		Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan SPM RS	Kota Bogor	80,00	Persen			Persentase Laporan SPM RS	Kota Bogor	80,00	Persen		0	
	102.022.040.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Bogor	25	Unit	54.855.600	53.100.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Bogor	25	Unit	53.100.000	-1.755.600	
	102.022.040.004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	2	Dokumen	4.616.800	4.616.800	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	2	Dokumen	4.616.800	0	
3	**1.02.03**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan**	**Kota Bogor**	**96,5**	**Persen**	**2.209.689.280**	**2.135.418.080**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan**	**Kota Bogor**	**96,5**	**Persen**	**2.884.315.080**	**74.271.200**	
			Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	Kota Bogor	96	Persen			**Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan**	Kota Bogor	96	Persen		0	
	10.203.201	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP**	Kota Bogor	**91**	**Persen**	**3.067.200**	**1.800.000**	**Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP**	Kota Bogor	**91**	**Persen**	**1.800.000**	1.267.200	
	102.032.010.002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	160	Dokumen	3.067.200	1.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	160	Dokumen	1.800.000	-1.267.200	
	10.203.202	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan**	**Kota Bogor**	**96,5**	**Persen**	**1.928.122.080**	**1.855.118.080**	**Persentase pemenuhan SDM Kesehatan**	**Kota Bogor**	**96,5**	**Persen**	**1.944.605.080**	**73.004.000**	
	102.032.020.001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	40	Dokumen	72.777.200	21.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	40	Dokumen	21.600.000	-51.177.200	
	102.032.020.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Bogor	12.900	Orang	1.760.618.080	1.760.618.080	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Bogor	12.900	Orang	1.760.618.080	0	
	102.032.020.003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	600	Dokumen	94.726.800	72.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	600	Dokumen	162.387.000	67.660.200	DAK NF
	10.203.203	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**278.500.000**	**278.500.000**	**Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**937.910.000**	**0**	

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
	102.032.030.001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Bogor	295	Orang	278.500.000	278.500.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Bogor	295	Orang	937.910.000	659.410.000	DAK NF dan Penambahan untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai
4	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi**	**Kota Bogor**	**70**	**Persen**	**208.129.800**	**207.906.600**	**Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi**	**Kota Bogor**	**70**	**Persen**	**770.205.600**	**223.200**	
			Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan		**65**	**Persen**			**Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan**		**65**	**Persen**			
			Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian		**75**	**Persen**			**Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian**		**75**	**Persen**			
			Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan		**45**	**Persen**			**Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan**		**45**	**Persen**			
	10.204.201	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat**	Kota Bogor	**62**	**Sarana**	**8.605.300**	**8.605.300**	**Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat**	Kota Bogor	**62**	**Sarana**	**6.805.300**	0	
	102.042.010.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	60	Dokumen	8.605.300	8.605.300	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	60	Dokumen	6.805.300	-1.800.000	
	10.204.202	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu**	Kota Bogor	**6**	**Sarana**	**6.211.600**	**6.211.600**	**Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu**	Kota Bogor	**6**	**Sarana**	**6.211.600**	0	
	102.042.020.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	12	Dokumen	6.211.600	6.211.600	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	12	Dokumen	6.211.600	0	

	10.204.203	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat**	Kota Bogor	**235**	**Sarana**	**41.016.800**	**41.016.800**	**Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat**	Kota Bogor	**235**	**Sarana**	**455.227.800**	0	
	102.042.030.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	235	Dokumen	41.016.800	41.016.800	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	235	Dokumen	455.227.800	414.211.000	DAK NF
	10.204.204	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM**	**Kota Bogor**	**90**	**Sarana**	**95.902.500**	**95.778.500**	**Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM**	**Kota Bogor**	**90**	**Sarana**	**95.778.500**	**124.000**	
	102.042.040.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	1	Dokumen	95.902.500	95.778.500	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	1	Dokumen	95.778.500	-124.000	
	10.204.205	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi**	**Kota Bogor**	**550**	**Sarana**	**46.995.200**	**46.896.000**	**Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi**	**Kota Bogor**	**550**	**Sarana**	**46.896.000**	**99.200**	
	102.042.050.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	1	Dokumen	46.995.200	46.896.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	1	Dokumen	46.896.000	-99.200	
	10.204.206	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil**	**Persentase pangan olahan industri rumah**	**Kota Bogor**	**95,0**	**Persen**	**9.398.400**	**9.398.400**	**Persentase pangan olahan industri rumah**	**Kota Bogor**	**95,0**	**Persen**	**159.286.400**	**0**	

		Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat**						**tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat**						
	102.042.060.001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	40	Unit	9.398.400	9.398.400	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	40	Unit	159.286.400	149.888.000	DAK NF
5	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**17.245.274.179**	**17.136.130.379**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**17.168.004.012**	**109.143.800**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.201	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**Kota Bogor**	**32**	**Persen**	**83.589.867**	**62.814.067**	**Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**Kota Bogor**	**32**	**Persen**	**43.197.700**	**20.775.800**	
	102.052.010.001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	83.589.867	62.814.067	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	43.197.700	-40.392.167	
	10.205.202	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga bertarget PHBS tingkat kota**	**Kota Bogor**	**71,00**	**Persen**	**308.898.300**	**271.630.300**	**Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga bertarget PHBS tingkat kota**	**Kota Bogor**	**71,00**	**Persen**	**285.780.300**	**37.268.000**	
	102.052.020.001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	3	Dokumen	308.898.300	271.630.300	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	3	Dokumen	285.780.300	-23.118.000	Penambahan anggaran untuk Uang pengganti transportasi untuk Anggota Tim Monev KTR pada kegiatan Monitoring dan evaluasi penerapan KTR di angkutan kota dengan rincian: 150 OH X Rp. 105.000 = Rp. 15.750.000

	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**16.852.786.012**	**16.801.686.012**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**16.839.026.012**	-13.760.000	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**		**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**		**25**	**Persen**			
	102.052.030.001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	2	Dokumen	16.852.786.012	16.801.686.012	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	2	Dokumen	16.839.026.012	-13.760.000	DAK NF
		PUSKESMAS BOGOR SELATAN					**2.891.638.409**	**0**					**3.372.781.884**	**481.143.475**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.891.638.409**	**0**					**3.372.781.884**	**481.143.475**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.891.638.409**	**0**					**3.372.781.884**	**481.143.475**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.891.638.409**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.957.619.984**	**65.981.575**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.891.638.409**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.957.619.984**	**65.981.575**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.891.638.409	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.957.619.984	**65.981.575**	Silpa 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**411.449.900**	**411.449.900**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			

			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	411.449.900	411.449.900	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			

			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun**		**100**	**Persen**			

			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	390	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	390	Orang	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	3622	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	3622	Orang	17.300.000	17.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	38	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	38	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.118	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.118	Orang	7.150.000	7.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	142.730.000	142.730.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	8.950.000	8.950.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	38	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	38	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	52.020.000	52.020.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	86.914.900	86.914.900	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	3.945.000	3.945.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	20.500.000	20.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**		**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**		**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS CIPAKU					**3.370.629.892**	**0**					**4.857.870.290**	**1.487.240.398**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.370.629.892**	**0**					**4.857.870.290**	**1.487.240.398**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.370.629.892**	**0**					**4.857.870.290**	**1.487.240.398**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.370.629.892**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.946.882.590**	**576.252.698**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			

			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.370.629.892**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.946.882.590**	**576.252.698**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.370.629.892	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.946.882.590	576.252.698	Penambahan pendapatan dan Proyeksi Silpa 2024
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**-**	**-**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam

2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	907.275.700	907.275.700	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	907.275.700	907.275.700	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			

			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			

			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	743	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor		Orang	34.650.000	34.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	6895	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor		Orang	15.150.000	15.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	72	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor		Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	844	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor		Orang	7.500.000	7.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor		Dokumen	262.050.000	262.050.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor		Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor		Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor		Dokumen	15.350.000	15.350.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	72	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor		Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor		Dokumen	92.760.000	92.760.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor		Dokumen	345.994.700	345.994.700	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor		Dokumen	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor		Dokumen	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor		Dokumen	41.400.000	41.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor		Dokumen	52.600.000	52.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor		Dokumen	756.000	756.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		PUSKESMAS BONDONGAN					2.534.913.800	0					3.175.825.943	46.288.543	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.534.913.800	0					3.175.825.943	46.288.543	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.534.913.800	0					3.175.825.943	46.288.543	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	2.534.913.800	0	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	2.581.202.343	46.288.543	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			

			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.534.913.800**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.581.202.343**	**46.288.543**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.534.913.800	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.581.202.343	46.288.543	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**0**		**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**590.911.600**	**590.911.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			

			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	590.911.600	590.911.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko		100	Persen			Persentase orang dengan risiko		100	Persen			

			terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						**terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**						
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	801	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	801	Orang	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7432	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7432	Orang	28.950.000	28.950.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	79	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	79	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.000	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.000	Orang	17.000.000	17.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	163.781.000	163.781.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	18.750.000	18.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	79	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	79	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	73.650.000	73.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	146.115.600	146.115.600	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	6.225.000	6.225.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	34.800.000	34.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	43.500.000	43.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS LAWANG GINTUNG					**2.196.408.786**	**0**					**2.837.839.476**	**110.734.890**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.196.408.786**	**0**					**2.837.839.476**	**110.734.890**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.196.408.786**	**0**					**2.837.839.476**	**110.734.890**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.132.679.486**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.243.414.376**	**110.734.890**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			

			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**28.106.800**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**28.106.800**	**0**	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	28.106.800	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	28.106.800	0	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**50.850.600**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**50.850.600**	**0**	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	7	Unit	50.850.600	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	7	Unit	50.850.600	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.053.722.086**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.164.456.976**	**110.734.890**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.053.722.086	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.164.456.976	110.734.890	
2	**1.02.01**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**63.729.300**	**0**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**63.729.300**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Angka**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Angka**			

			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		**100**	**Persen**			**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
	10.202.201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**23**	**Unit**	**63.729.300**	**0**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**23**	**Unit**	**63.729.300**	**0**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		25	Puskesmas			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		25	Puskesmas			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		25	Puskesmas			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		25	Puskesmas			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		73,19	Persen			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		73,19	Persen			
	102.022.010.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Bogor	1	Unit	23.496.000	0	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Bogor	1	Unit	23.496.000	0	
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	Kota Bogor	3	Paket	40.233.300	0	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	Kota Bogor	3	Paket	40.233.300	0	

		Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						
3	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**526.983.800**	**526.983.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**526.983.800**	**526.983.800**	

			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		**100**	**Persen**			**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**		**100**	**Persen**			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		**68**	**Kelurahan**			**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM**		**68**	**Kelurahan**			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			

			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	585	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	585	Orang	33.550.000	33.550.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5428	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5428	Orang	19.750.000	19.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	57	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	57	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	532	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	532	Orang	6.700.000	6.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	160.059.000	160.059.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	11.850.000	11.850.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	57	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	57	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	67.310.000	67.310.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	126.759.800	126.759.800	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	4.800.000	4.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	36.200.000	36.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
4	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)						Daya Masyarakat (UKBM)						
		PUSKESMAS BOGOR TIMUR					**4.268.633.607**	**0**					**5.120.140.674**	**851.507.067**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.268.633.607**	**0**					**5.120.140.674**	**851.507.067**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**4.268.633.607**	**0**					**5.120.140.674**	**851.507.067**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**4.268.633.607**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**4.288.299.774**	**19.666.167**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola**		**94**	**Persen**			

			sesuai dengan ketentuan						**sesuai dengan ketentuan**						
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**4.268.633.607**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**4.288.299.774**	**19.666.167**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	4.268.633.607	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	4.288.299.774	19.666.167	
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**-**	**-**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**828.128.900**	**828.128.900**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			

			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	828.128.900	828.128.900	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			

			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun**		**100**	**Persen**			

			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	585	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	585	Orang	28.050.000	28.050.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5428	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5428	Orang	41.300.000	41.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	57	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	57	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	532	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	532	Orang	16.200.000	16.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	244.720.000	244.720.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	17.150.000	17.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	57	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	57	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	75.440.000	75.440.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	297.003.900	297.003.900	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	6.225.000	6.225.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	40.900.000	40.900.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS PULO ARMYN					**2.608.469.842**	**0**					**3.349.639.856**	**741.170.014**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.608.469.842**	**0**					**3.349.639.856**	**741.170.014**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.608.469.842**	**0**					**3.349.639.856**	**741.170.014**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.608.469.842**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.702.543.056**	**94.073.214**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			

			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.608.469.842**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**		**100**	**Persen**	**2.702.543.056**	**94.073.214**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.608.469.842	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	2.702.543.056	94.073.214	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**643.384.800**	**643.384.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			

			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	643.384.800	643.384.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan sesuai standar						pelayanan kesehatan sesuai standar						
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		100	Persen			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		100	Persen			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan		100	Persen			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan sesuai standar						**pelayanan kesehatan sesuai standar**						
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	678	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	678	Orang	27.500.000	27.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	6291	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	6291	Orang	23.300.000	23.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	66	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	66	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	871	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	871	Orang	9.000.000	9.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	235.374.000	235.374.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	14.950.000	14.950.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	66	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	66	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	85.780.000	85.780.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	142.195.800	142.195.800	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.845.000	5.845.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	4.800.000	4.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	28.200.000	28.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	38.300.000	38.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS BOGOR TENGAH					**2.542.869.479**	**0**					**3.016.786.073**	**473.916.594**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.542.869.479**	**0**					**3.016.786.073**	**473.916.594**	
	102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.542.869.479**	**0**					**3.016.786.073**	**473.916.594**	

1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	2.520.782.279	0	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	2.572.526.873	51.744.594	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			
	10.201.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100	Persen	19.785.500	0	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100	Persen	19.785.500	0	

	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5	Unit	19.785.500	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5	Unit	19.785.500	0	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**76.717.378**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**76.717.378**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	76.717.378	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	76.717.378	0	
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**25.531.579**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**25.531.579**	**0**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	102.012.090.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	37	Unit	25.531.579	0	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	37	Unit	25.531.579	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.398.747.822**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.450.492.416**	**51.744.594**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.398.747.822	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.450.492.416	51.744.594	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**22.087.200**		**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**440.547.200**	**418.460.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			

			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**22.087.200**						**22.087.200**	**0**	
	1.02.02.201.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					22.087.200						22.087.200		
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**		**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**418.460.000**	**418.460.000**	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		**100**	**Persen**			**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar**		**100**	**Persen**			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		**68**	**Kelurahan**			**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM**		**68**	**Kelurahan**			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			

			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			

			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	162	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	162	Orang	11.550.000	11.550.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1495	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1495	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	16	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	16	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	715	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	715	Orang	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	64.322.000	64.322.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	5.550.000	5.550.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	16	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	16	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	47.060.000	47.060.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	219.613.000	219.613.000	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam

	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	7.800.000	7.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	13.300.000	13.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS SEMPUR					**2.145.613.570**	**0**					**2.736.686.725**	**591.073.155**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.145.613.570**	**0**					**2.736.686.725**	**591.073.155**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.145.613.570**	**0**					**2.736.686.725**	**591.073.155**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.099.882.770**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.137.247.325**	**37.364.555**	

			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**104.050.000**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**104.050.000**	**0**	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	15	Unit	104.050.000	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	15	Unit	104.050.000	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.995.832.770**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.033.197.325**	**37.364.555**	

	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	1.995.832.770	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.033.197.325	37.364.555	
2	**1.02.01**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**45.730.800**	**0**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**45.730.800**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Angka**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Angka**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		**100**	**Persen**			**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
	10.202.201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**23**	**Unit**	**45.730.800**	**0**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**23**	**Unit**	**45.730.800**	**0**	

			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**		**25**	**Puskesmas**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**		**25**	**Puskesmas**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		**73,19**	**Persen**			**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**		**73,19**	**Persen**			
	102.022.010.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		15	Unit	25.216.000	0	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		15	Unit	25.216.000	0	
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		2	Paket	20.514.800	0	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		2	Paket	20.514.800	0	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**549.996.600**	**549.996.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			

			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	549.996.600	549.996.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			

			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun**		**100**	**Persen**			

			ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						**ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**						
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	515	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	515	Orang	26.400.000	26.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	4778	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	4778	Orang	21.600.000	21.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	50	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	50	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	819	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	819	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	207.804.000	207.804.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	9.850.000	9.850.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	50	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	50	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	63.250.000	63.250.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	118.427.600	118.427.600	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	24.000.000	24.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	31.800.000	31.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS GANG AUT					**1.048.554.216**	**0**					**1.614.539.215**	**565.984.999**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.048.554.216**	**0**					**1.614.539.215**	**565.984.999**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.048.554.216**	**0**					**1.614.539.215**	**565.984.999**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.048.554.216**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.225.118.115**	**176.563.899**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**63.338.600**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**63.338.600**	**0**	
	102.012.060.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kota Bogor**	2	Paket	63.338.600	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kota Bogor**	2	Paket	63.338.600	0	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**86.621.900**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**86.621.900**	**0**	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	**Kota Bogor**	15	Unit	86.621.900	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	**Kota Bogor**	15	Unit	86.621.900	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**898.593.716**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**1.075.157.615**	**176.563.899**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**Kota Bogor**	1	Unit Kerja	898.593.716	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	**Kota Bogor**	1	Unit Kerja	1.075.157.615	176.563.899	

2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	385.709.100	385.709.100	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	385.709.100	385.709.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			

			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			

			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	13.200.000	13.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	18.800.000	18.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	4.600.000	4.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	143.461.000	143.461.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	6.750.000	6.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	46.800.000	46.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	80.673.100	80.673.100	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.085.000	5.085.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	20.800.000	20.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		PUSKESMAS BELONG					780.197.555	0					1.145.052.235	364.854.680	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					780.197.555	0					1.145.052.235	364.854.680	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					780.197.555	0					1.145.052.235	364.854.680	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	725.658.555	0	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	844.887.735	119.229.180	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			

			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**44.142.500**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**44.142.500**	**0**	
	102.012.060.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	2.098.500	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	2.098.500	0	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	Paket	34.310.400	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	Paket	34.310.400	0	
	102.012.060.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	5.231.600	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	5.231.600	0	
	102.012.060.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	2.502.000	0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	2.502.000	0	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**33.397.500**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**		**100**	**Persen**	**33.397.500**	**0**	
	102.012.070.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor	1	Unit	16.569.700	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Unit	16.569.700	0	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	3	Unit	16.827.800	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		3	Unit	16.827.800	0	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**9.190.848**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100**	**Persen**	**9.190.848**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	9.190.848	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	9.190.848	0	
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**8.730.000**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**		**100**	**Persen**	**8.730.000**	**0**	
	102.012.090.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	13	Unit	8.730.000	0	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		13	Unit	8.730.000	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**630.197.707**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**		**100**	**Persen**	**749.426.887**	**119.229.180**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	630.197.707	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	749.426.887	119.229.180	

2	1.02.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kota Bogor	2,7	Angka	54.539.000	0	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kota Bogor	2,7	Angka	54.539.000	0	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Angka			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Angka			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		100	Persen			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		100	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
	10.202.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	23	Unit	54.539.000	0	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	23	Unit	54.539.000	0	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan		25	Puskesmas			Jumlah puskesmas yang melaksanakan		25	Puskesmas			

			Integrasi Layanan Primer (ILP)						**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**		**25**	**Puskesmas**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		**73,19**	**Persen**			**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**		**73,19**	**Persen**			
	102.022.010.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	2	Unit	4.318.900	0	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2	Unit	4.318.900	0	
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Bogor	5	Paket	50.220.100	0	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		5	Paket	50.220.100	0	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**241.913.500**	**241.913.500**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			

			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	241.913.500	241.913.500	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan ibu hamil						**pelayanan kesehatan ibu hamil**							
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**				
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**				
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	6.600.000	6.600.000	DAK NF	

			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	5.400.000	5.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	4.500.000	4.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	85.556.000	85.556.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	3.950.000	3.950.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	29.700.000	29.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	53.802.500	53.802.500	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	2.765.000	2.765.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	9.000.000	9.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	11.300.000	11.300.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS MERDEKA					**2.204.845.217**	**0**					**2.789.295.746**	**721.146.237**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.204.845.217**	**0**					**2.789.295.746**	**721.146.237**	
	102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.204.845.217**	**0**					**2.789.295.746**	**721.146.237**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.204.845.217**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.273.615.746**	**205.466.237**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**12.583.200**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**12.583.200**	**12.583.200**	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	12.583.200	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	Paket	12.583.200	12.583.200	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**56.212.800**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**56.212.800**	**56.212.800**	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6	Unit	56.212.800	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6	Unit	56.212.800	56.212.800	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**67.899.708**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**67.899.708**	**67.899.708**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	67.899.708	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	67.899.708	67.899.708	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.068.149.509**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.136.920.038**	**68.770.529**	

	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.068.149.509	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.136.920.038	68.770.529	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**511.968.000**	**511.968.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**511.968.000**	**511.968.000**	

			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	18.150.000	18.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	24.000.000	24.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	7.200.000	7.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	191.117.000	191.117.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	10.150.000	10.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	62.050.000	62.050.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	113.736.000	113.736.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	21.000.000	21.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	28.500.000	28.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif		**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**		**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri		**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**		**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)						Daya Masyarakat (UKBM)						
		PUSKESMAS SEMPLAK					**3.601.298.720**	**0**					**3.848.468.646**	**247.169.926**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.601.298.720**	**0**					**3.848.468.646**	**247.169.926**	
	102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.601.298.720**	**0**					**3.848.468.646**	**247.169.926**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.601.298.720**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.231.655.346**	**- 369.643.374**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola**		**94**	**Persen**			

			sesuai dengan ketentuan						**sesuai dengan ketentuan**						
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.601.298.720**	**0**					**3.231.655.346**	**- 369.643.374**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.601.298.720	0					3.231.655.346	-369.643.374	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**613.101.300**	**613.101.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			

			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	613.101.300	613.101.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	579	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	579	Orang	39.600.000	39.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5382	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5382	Orang	20.200.000	20.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	56	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	56	Orang	6.000.000	6.000.000	DAK NF

			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	584	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	584	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	262.861.000	262.861.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	12.550.000	12.550.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	56	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	56	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	61.110.000	61.110.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	118.315.300	118.315.300	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	20.400.000	20.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	28.200.000	28.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS PANCASAN					**2.552.646.371**	**0**					**3.079.645.424**	**526.999.053**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.552.646.371**	**0**					**3.079.645.424**	**526.999.053**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.552.646.371**	**0**					**3.079.645.424**	**526.999.053**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.552.646.371**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.602.821.624**	**50.175.253**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			

			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.552.646.371**	**0**					**2.602.821.624**	**50.175.253**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.552.646.371	0					2.602.821.624	50.175.253	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**473.111.800**	**473.111.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			

			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	473.111.800	473.111.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan ibu hamil						**pelayanan kesehatan ibu hamil**							
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**				
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**				
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**				
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	19.800.000	19.800.000	DAK NF	

			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	13.300.000	13.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	7.200.000	7.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	202.725.000	202.725.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	11.350.000	11.350.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	49.460.000	49.460.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	94.031.800	94.031.800	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.705.000	4.705.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	17.400.000	17.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	22.600.000	22.600.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS PASIR MULYA					**3.610.686.725**	**0**					**4.437.303.592**	**826.616.867**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.610.686.725**	**0**					**4.437.303.592**	**826.616.867**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.610.686.725**	**0**					**4.437.303.592**	**826.616.867**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.610.686.725**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.610.686.725**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.610.686.725**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.690.312.292**	**79.625.567**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.610.686.725	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.690.312.292	79.625.567	SILP 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**743.279.300**	**743.279.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah**		**92**	**Persen**			

			yang memenuhi standar						yang memenuhi standar						
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	743.279.300	743.279.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			

			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			

			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	21.450.000	21.450.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	26.650.000	26.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	242.613.000	242.613.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.550.000	15.550.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF

		Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	61.700.000	61.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	277.291.300	277.291.300	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 jam
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.085.000	5.085.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	21.000.000	21.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	29.400.000	29.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS GANG KELOR					**2.034.197.969**	**0**					**3.981.717.030**	**1.947.519.061**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.034.197.969**	**0**					**3.981.717.030**	**1.947.519.061**	

	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.034.197.969	0					3.981.717.030	1.947.519.061	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	2.034.197.969	0	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	3.038.061.530	1.003.863.561	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			
	10.201.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	Kota Bogor	100	Persen	2.034.197.969	0	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	Kota Bogor	100	Persen	3.038.061.530	1.003.863.561	

	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	2.034.197.969	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	3.038.061.530	1.003.863.561	SILPA 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**939.943.500**	**939.943.500**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**939.943.500**	**939.943.500**	

			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	832	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	832	Orang	29.700.000	29.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7712	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7712	Orang	24.150.000	24.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	82	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	82	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	791	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	791	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	519.380.000	519.380.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.850.000	15.850.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	82	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	82	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	75.180.000	75.180.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	162.753.500	162.753.500	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.990.000	4.990.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	28.200.000	28.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	37.200.000	37.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)						Daya Masyarakat (UKBM)						
		PUSKESMAS SINDANG BARANG					**3.084.759.600**	**0**					**4.844.066.814**	**1.759.307.214**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.084.759.600**	**0**					**4.844.066.814**	**1.759.307.214**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.084.759.600**	**0**					**4.844.066.814**	**1.759.307.214**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.084.759.600**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.505.777.814**	**421.018.214**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola**		**94**	**Persen**			

			sesuai dengan ketentuan						**sesuai dengan ketentuan**						
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.084.759.600**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.505.777.814**	**421.018.214**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.084.759.600	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.505.777.814	421.018.214	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**1.334.577.000**	**1.334.577.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			

			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	1.334.577.000	1.334.577.000	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.021	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.021	Orang	57.750.000	57.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	9489	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	9489	Orang	37.450.000	37.450.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	100	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	100	Orang	6.000.000	6.000.000	DAK NF

			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	18.000.000	18.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	711.236.000	711.236.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	21.750.000	21.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	1213	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	1213	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	104.450.000	104.450.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	241.760.000	241.760.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	8.125.000	8.125.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	40.800.000	40.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	55.900.000	55.900.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	756.000	756.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS BOGOR UTARA					**3.883.666.122**	**0**					**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.883.666.122**	**0**					**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.883.666.122**	**0**					**4.885.830.156**	**1.002.164.034**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.883.666.122**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.896.182.856**	**12.516.734**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			

			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.883.666.122**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.896.182.856**	**12.516.734**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.883.666.122	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.896.182.856	12.516.734	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**985.935.300**	**985.935.300**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi**		**94**	**Persen**			

			melalui pendekatan keluarga						melalui pendekatan keluarga						
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	985.935.300	985.935.300	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			

			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			

			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.112	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.112	Orang	34.650.000	34.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	10325	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	10325	Orang	34.300.000	34.300.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	110	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	110	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.111	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.111	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	379.125.000	379.125.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	15.450.000	15.450.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	110	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	110	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	86.640.000	86.640.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	314.329.300	314.329.300	DAK NF dan Operasional Puskesmas 24 Jam
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Kota Bogor	1	Dokumen	6.985.000	6.985.000	DAK NF

			Fasilitas Kesehatan Lainnya						Fasilitas Kesehatan Lainnya						
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	41.100.000	41.100.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	756.000	756.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS TEGAL GUNDIL					**2.324.423.045**	**0**					**3.010.063.654**	**685.640.609**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.324.423.045**	**0**					**3.010.063.654**	**685.640.609**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.324.423.045**	**0**					**3.010.063.654**	**685.640.609**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.324.423.045**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.359.480.054**	**35.057.009**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			

			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**39.984.000**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**39.984.000**	**0**	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3	Paket	15.995.100	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3	Paket	15.995.100	0	
	102.012.060.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	2	Paket	23.988.900	0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	2	Paket	23.988.900	0	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**49.561.300**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**49.561.300**	**0**	

			pemerintahan sesuai RKBMD						**pemerintahan sesuai RKBMD**						
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6	Unit	49.561.300	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	6	Unit	49.561.300	0	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**49.999.195**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**49.999.195**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	49.999.195	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	49.999.195	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.184.878.550**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.219.935.559**	**35.057.009**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.184.878.550	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.219.935.559	35.057.009	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**646.871.600**	**646.871.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			

			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	646.871.600	646.871.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			

			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	812	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	812	Orang	24.750.000	24.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	7531	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	7531	Orang	29.950.000	29.950.000	DAK NF

			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	80	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	80	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	888	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	888	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	291.214.000	291.214.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	12.650.000	12.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	80	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	80	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	52.620.000	52.620.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	127.209.600	127.209.600	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	8.505.000	8.505.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.433.000	2.433.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	25.800.000	25.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	32.800.000	32.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	

		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS WARUNG JAMBU					**2.560.797.140**	**0**					**3.272.775.466**	**711.978.326**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.560.797.140**	**0**					**3.272.775.466**	**711.978.326**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.560.797.140**	**0**					**3.272.775.466**	**711.978.326**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.560.797.140**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.584.418.666**	**23.621.526**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di**		**26,55**	**Nilai**			

			lingkup Perangkat Daerah						**lingkup Perangkat Daerah**						
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.560.797.140**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.584.418.666**	**23.621.526**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.560.797.140	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.584.418.666	23.621.526	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**684.644.800**	**684.644.800**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			

			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	684.644.800	684.644.800	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan bayi baru lahir						**pelayanan kesehatan bayi baru lahir**							
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**				
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**				
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**				
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**				
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**				
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**				
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**				

			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	996	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	996	Orang	54.450.000	54.450.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	9247	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	9247	Orang	23.100.000	23.100.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	97	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	97	Orang	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.043	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.043	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	246.823.000	246.823.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	12.350.000	12.350.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	97	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	97	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	71.500.000	71.500.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	151.016.800	151.016.800	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	33.000.000	33.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	41.400.000	41.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS TANAH SAREAL					**3.249.679.899**	**0**					**3.399.514.112**	**149.834.213**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.249.679.899**	**0**					**3.399.514.112**	**149.834.213**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.249.679.899**	**0**					**3.399.514.112**	**149.834.213**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.249.679.899**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.995.700.912**	**-253.978.987**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			

			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	1	Unit	-	-	Operasional Puskesmas 24 Jam
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.249.679.899**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.995.700.912**	**-253.978.987**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	3.249.679.899	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Unit Kerja	2.995.700.912	-253.978.987	SILPA 2024

2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	100	Persen	400.101.200	400.101.200	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		92	Persen			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	400.101.200	400.101.200	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			

			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		**93**	**Unit**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi**		**93**	**Unit**			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		**1.122.772**	**Orang**			**Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional**		**1.122.772**	**Orang**			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		**4,13**	**Persen**			**Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)**		**4,13**	**Persen**			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			

			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	144	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	144	Orang	6.600.000	6.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1337	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	1337	Orang	18.250.000	18.250.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	14	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	14	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	261	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	261	Orang	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	61.506.000	61.506.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	4.750.000	4.750.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	14	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	14	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	32.850.000	32.850.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	224.593.200	224.593.200	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	2.812.000	2.812.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	9.800.000	9.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		PUSKESMAS PONDOK RUMPUT					1.233.043.686	0					1.749.521.026	516.477.340	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.233.043.686	0					1.749.521.026	516.477.340	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.233.043.686	0					1.749.521.026	516.477.340	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	1.206.177.686	0	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Kota Bogor	100	Persen	1.428.096.626	221.918.940	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			

			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**45.047.700**	**0**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**45.047.700**	**0**	
	102.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	7	Paket	45.047.700	0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	7	Paket	45.047.700	0	
	10.201.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**26.170.800**	**0**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**26.170.800**	**0**	
	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	4	Unit	26.170.800	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	4	Unit	26.170.800	0	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**13.010.248**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**13.010.248**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	13.010.248	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	13.010.248	0	
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**31.655.188**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**31.655.188**	**0**	
	102.012.090.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	32	Unit	31.655.188	0	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	32	Unit	31.655.188	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.090.293.750**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.312.212.690**	**221.918.940**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	1.090.293.750	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	1.312.212.690	221.918.940	SILPA 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**1.02.01**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**26.866.000**	**0**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**26.866.000**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			

			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Angka**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Angka**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		**100**	**Persen**			**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
	10.202.201	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**23**	**Unit**	**26.866.000**	**0**	**Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**23**	**Unit**	**26.866.000**	**0**	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**		**25**	**Puskesmas**			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		**25**	**Puskesmas**			**Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga**		**25**	**Puskesmas**			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		**73,19**	**Persen**			**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah**		**73,19**	**Persen**			
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,		3	Paket	26.866.000	0	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,		3	Paket	26.866.000	0	

		Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**290.846.400**	**290.846.400**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
	10.202.202	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**290.846.400**	**290.846.400**	

			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	11.000.000	11.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	13.000.000	13.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	104.492.000	104.492.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	5.350.000	5.350.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	36.180.000	36.180.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	58.559.400	58.559.400	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.325.000	4.325.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	1.200.000	1.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	10.200.000	10.200.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	14.800.000	14.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)						Daya Masyarakat (UKBM)						
		PUSKESMAS KEDUNG BADAK					**2.166.514.090**	**0**					**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.166.514.090**	**0**					**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.166.514.090**	**0**					**3.696.857.188**	**1.530.343.098**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.166.514.090**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.983.410.188**	**816.896.098**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola**		**94**	**Persen**			

			sesuai dengan ketentuan						**sesuai dengan ketentuan**						
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.166.514.090**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.983.410.188**	**816.896.098**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.166.514.090	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.983.410.188	816.896.098	SILPA 2024 dan Penambahan Pendaptan
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**709.735.000**	**709.735.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			

			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	709.735.000	709.735.000	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	297	Orang	33.000.000	33.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	28.400.000	28.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kota Bogor	29	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF

			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	284.950.000	284.950.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	12.150.000	12.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	74.290.000	74.290.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	157.740.000	157.740.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	7.365.000	7.365.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	30.600.000	30.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	38.700.000	38.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	

		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						**Integrasi Layanan Primer (ILP)**						
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS KAYU MANIS					**3.054.247.356**	**0**					**3.836.364.095**	**782.116.739**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.054.247.356**	**0**					**3.836.364.095**	**782.116.739**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.054.247.356**	**0**					**3.836.364.095**	**782.116.739**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.054.247.356**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.065.210.495**	**10.963.139**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			

			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.054.247.356**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.065.210.495**	**10.963.139**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.054.247.356	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.065.210.495	10.963.139	SILPA 2024
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**767.441.600**	**767.441.600**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			

			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	767.441.600	767.441.600	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan kesehatan ibu hamil						**pelayanan kesehatan ibu hamil**						
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	Kota Bogor	297	Orang	39.600.000	39.600.000	DAK NF

			Kesehatan Sesuai Standar						Kesehatan Sesuai Standar						
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	2756	Orang	40.650.000	40.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	29	Orang	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	547	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	322.224.000	322.224.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	14.850.000	14.850.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	29	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	76.960.000	76.960.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	151.732.600	151.732.600	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.085.000	5.085.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	29.400.000	29.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	41.400.000	41.400.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS MEKARWANGI					**3.201.452.462**	**0**					**4.412.814.466**	**1.211.362.004**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**3.201.452.462**	**0**					**4.412.814.466**	**1.211.362.004**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**3.201.452.462**	**0**					**4.412.814.466**	**1.211.362.004**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.201.452.462**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.809.188.366**	**607.735.904**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**3.201.452.462**	**0**					**3.809.188.366**	**607.735.904**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	3.201.452.462	0					3.809.188.366	607.735.904	Silpa 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**599.914.100**	**599.914.100**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			

			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	599.914.100	599.914.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			

			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		**2,3**	**Persen**			**Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)**		**2,3**	**Persen**			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		**9,6**	**Persen**			**Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)**		**9,6**	**Persen**			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100**	**Persen**			**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		**100**	**Persen**			**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**		**100**	**Persen**			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		**100**	**Persen**			**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**		**100**	**Persen**			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan**		**75,00**	**Persen**			

			SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik						**SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**						
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	841	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	841	Orang	50.600.000	50.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7810	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	7810	Orang	32.400.000	32.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	83	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	83	Orang	6.000.000	6.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.028	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.028	Orang	10.800.000	10.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	192.130.000	192.130.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	13.150.000	13.150.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	83	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	83	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	66.720.000	66.720.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	133.253.100	133.253.100	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	4.705.000	4.705.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	3.600.000	3.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	25.800.000	25.800.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	35.400.000	35.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	756.000	756.000	DAK NF
3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		PUSKESMAS MULYAHARJA					**2.093.032.811**	**0**					**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**2.093.032.811**	**0**					**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
	102	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**2.093.032.811**	**0**					**3.224.676.891**	**1.131.644.080**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.093.032.811**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.588.249.791**	**495.216.980**	

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	lingkungan perangkat daerah						lingkungan perangkat daerah						
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		27,01	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95	Persen			
	10.201.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100	Persen	77.223.000	0	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100	Persen	77.223.000	0	

	102.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5	Unit	77.223.000	0	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5	Unit	77.223.000	0	
	10.201.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**55.077.000**	**0**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**55.077.000**	**0**	
	102.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	55.077.000	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	1	Laporan	55.077.000	0	
	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**17.700.000**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**17.700.000**	**0**	
	102.012.090.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	26	Unit	17.700.000	0	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	26	Unit	17.700.000	0	
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.943.032.811**	**0**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**2.438.249.791**	**495.216.980**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	1.943.032.811	0	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	2.438.249.791	495.216.980	Silpa 2024 dan Penambahan Pendapatan
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	Kota Bogor	**100**	**Persen**	**632.715.100**	**632.715.100**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Persen**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Persen**			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		**2,7**	**Angka**			**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**		**2,7**	**Angka**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Prevalensi Hipertensi		**8,4**	**Persen**			**Prevalensi Hipertensi**		**8,4**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			

			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	0	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang diilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	632.715.100	632.715.100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			Jumlah Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1.122.772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan Gizi Kurang (Wasting)		2,3	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			

			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		**100**	**Persen**			**Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam**		**100**	**Persen**			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	613	Orang	0	0	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	613	Orang	21.450.000	21.450.000	DAK NF

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5696	Orang	0	0	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	5696	Orang	20.250.000	20.250.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	60	Orang	0	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	60	Orang	3.000.000	3.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.103	Orang	0	0	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	1.103	Orang	15.000.000	15.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	Dokumen	310.102.000	310.102.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	Dokumen	19.600.000	19.600.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	Dokumen	13.650.000	13.650.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	60	Orang	0	0	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	60	Orang	4.000.000	4.000.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bogor	1	Dokumen	62.040.000	62.040.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bogor	1	Dokumen	112.118.100	112.118.100	DAK NF
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	5.465.000	5.465.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kota Bogor	1	Dokumen	2.400.000	2.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kota Bogor	1	Dokumen	17.400.000	17.400.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Bogor	1	Dokumen	24.700.000	24.700.000	DAK NF
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Bogor	1	Dokumen	540.000	540.000	DAK NF

3	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase Kelurahan siaga aktif mandiri**	**Kota Bogor**	**12**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Kota Bogor**	**72,40**	**Persen**			
	10.205.203	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**0**	**0**	**Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)**	**Kota Bogor**	**43,00**	**Persen**	**3.712.000**	**3.712.000**	
			Persentase Posyandu Aktif	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			**Persentase Posyandu Aktif**	**Kota Bogor**	**90,00**	**Persen**			
			Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			**Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri**	**Kota Bogor**	**25**	**Persen**			
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	0	0	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	1	Dokumen	3.712.000	3.712.000	DAK NF
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					**1.583.262.434**	**0**					**1.679.905.129**	**96.642.695**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.583.262.434**	**0**					**1.679.905.129**	**96.642.695**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**1.583.262.434**	**0**					**1.679.905.129**	**96.642.695**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.583.262.434**	**0**	**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.679.905.129**	**96.642.695**	
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		**88,75**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**		**88,75**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**		**88,38**	**Nilai**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		**87,11**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana**		**87,11**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**12,48**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**		**21,97**	**Nilai**			

			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**		**26,55**	**Nilai**			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera		**27,01**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daera**		**27,01**	**Nilai**			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		**94**	**Persen**			**Transparansi pengelolaan keuangan daerah**		**94**	**Persen**			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**	**Nilai**			**Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**		**88,38**	**Nilai**			
			Persentase kepatuhan anggaran		**100**	**Persen**			**Persentase kepatuhan anggaran**		**100**	**Persen**			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**	**Persen**			**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**		**94**	**Persen**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persen**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persen**			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		**95**	**Persen**			**Persentase realisasi anggaran terhadap DPA**		**95**	**Persen**			
	10.201.210	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase UPTD yang menerapkan BLUD**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**1.583.262.434**	**0**					**1.679.905.129**	**96.642.695**	
	102.012.100.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	Unit Kerja	1.583.262.434	0					1.679.905.129	96.642.695	SILPA 2024
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					**290.000.000.000**	**0**					**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**290.000.000.000**	**0**					**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**290.000.000.000**	**0**					**315.561.576.094**	**25.561.576.094**	
1	**1.02.02**	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			

			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		2,9	Persen			
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		2,7	Angka			
			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			Insiden Rate HIV		0,18	Angka			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		55	Persen			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		94	Persen			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		87,1	Persen			
			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			Prevalensi ODGJ		0,14	Persen			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		100	Persen			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	Persen			
			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			Prevalensi Diabetes Melitus		2,05	Persen			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		93,1	Persen			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		0,673	Rasio			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		100	Persen			
			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			Predikat STBM		Paripurna	Predikat			
	10.202.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	73,2	Persen	0	0	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat essensial dan bahan habis pakai (BHP)	Kota Bogor	73,2	Persen	15.000.000.000	15.000.000.000	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		25	Puskesmas			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)		25	Puskesmas			
			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		24	Unit			Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga		24	Unit			
			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		25	Puskesmas			Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah		25	Puskesmas			

	102.022.010.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	32	Unit	0	0	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	32	Unit	15.000.000.000	15.000.000.000	DAK FISIK
	102.022.010.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Bogor	1	Paket	0	0	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Bogor	1	Paket	0	0	Penambahan
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**290.000.000.000**	**0**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**300.561.576.094**	**10.561.576.094**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Angka**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Angka**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		**100**	**Persen**			**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			

			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		54,5	Rasio			
			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	290.000.000.000	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	Persen	300.561.576.094	10.561.576.094	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1122772	Orang			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1122772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)		2,30	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)		2,30	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			

			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	102.022.020.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Bogor	2	Dokumen	290.000.000.000	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Bogor	2	Dokumen	300.561.576.094	10.561.576.094	SILPA 2024
		UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119					**45.924.000**	**0**					**45.924.000**	**0**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**					**45.924.000**	**0**					**45.924.000**	**0**	

		DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**45.924.000**	**0**					**45.924.000**	**0**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**Kota Bogor**	**100**	**Persen**	**0**	**0**	
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		12,48	Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah		21,97	Nilai			
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95,00	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA		95,00	Persen			
			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran		100	Persen			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen			
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		26,55	Nilai			
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100	Persen			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100	Persen			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan		88,38	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM		88,75	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana		87,11	Nilai			
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah		94	Persen			
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		27,01	Nilai			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah		27,01	Nilai			

	10.201.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	Kota Bogor	**100**	**Laporan**	**0**	**0**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	Kota Bogor	**100**	**Laporan**	**-**	**-**	
	102.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	17	Unit	0	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	19	Unit	-	0	Biaya Operasional Mobil Ambulance PSC
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**45.924.000**	**0**	**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup**	**Kota Bogor**	**2,7**	**Angka**	**45.924.000**	**0**	
			Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar		**92**	**Persen**			**Persentase Fasilitas kesehatan Pemerintah yang memenuhi standar**		**92**	**Persen**			
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		**90**	**Persen**			**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**		**90**	**Persen**			
			Insiden Rate HIV		**0,18**	**Angka**			**Insiden Rate HIV**		**0,18**	**Angka**			
			Prevalensi Diabetes Melitus		**2,05**	**Persen**			**Prevalensi Diabetes Melitus**		**2,05**	**Persen**			
			Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup		**2,9**	**Angka**			**Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup**		**2,9**	**Angka**			
			Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		**100**	**Persen**			**Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana**		**100**	**Persen**			
			Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)		**100**	**Persen**			**Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)**		**100**	**Persen**			
			Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		**87,1**	**Persen**			**Persentase Balita Berstatus Gizi Normal**		**87,1**	**Persen**			
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		**55**	**Persen**			**Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi**		**55**	**Persen**			
			Prevalensi ODGJ		**0,14**	**Persen**			**Prevalensi ODGJ**		**0,14**	**Persen**			
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional		**100**	**Persen**			**Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional**		**100**	**Persen**			
			Predikat STBM		**Paripurna**	**Predikat**			**Predikat STBM**		**Paripurna**	**Predikat**			
			Capaian SPM RSUD Kota Bogor		**93,1**	**Persen**			**Capaian SPM RSUD Kota Bogor**		**93,1**	**Persen**			
			Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		**0,673**	**Rasio**			**Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk**		**0,673**	**Rasio**			
			Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga		**94**	**Persen**			**Persentase keluarga yang di intervensi melalui pendekatan keluarga**		**94**	**Persen**			
			Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup		**54,5**	**Rasio**			**Rasio Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup**		**54,5**	**Rasio**			

			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			Prevalensi Hipertensi		8,4	Persen			
	10.202.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	45.924.000	0	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	Persen	45.924.000	0	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa		100	Persen			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standa		100	Persen			
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM		68	Kelurahan			
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		93	Unit			
			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1122772	Orang			Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional		1122772	Orang			
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	Persen			
			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight)		4,13	Persen			
			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)		2,30	Persen			Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting)		2,30	Persen			
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)		9,6	Persen			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	Persen			
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	Persen			
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	Persen			
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam		100	Persen			
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	Persen			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan		100	Persen			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan		100	Persen			

			pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						**pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**						
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase pemenuhan media promosi kesehatan		**100**	**Persen**			**Persentase pemenuhan media promosi kesehatan**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
			Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik		**75,00**	**Persen**			**Persentase Puskesmas dan RS Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik**		**75,00**	**Persen**			
			Persentase puskesmas dengan kinerja baik		**56**	**Persen**			**Persentase puskesmas dengan kinerja baik**		**56**	**Persen**			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		**100**	**Persen**			**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**		**100**	**Persen**			
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		**100**	**Persen**			**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**100**	**Persen**			
	102.022.020.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	45.924.000	0	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bogor	1	Dokumen	45.924.000	0	
	J U M L A H						**619.756.627.468**	**259.757.480.996**					**681.793.805.428**	**63.342.701.015**	

BAB 5
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempedomani dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah di tetapkan guna mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PerubahanDinas Kesehatan Kota Bogor. Kinerja Dinas Kesehatan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi serta strategi Dinas Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2025 telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrembang

B. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dlaam artian kualitas produk perencaaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan tetap harus dikedepankan

C. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan dating dengan

memanfaatkan potensu dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan kota Bogor secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab unuk :
   a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran tahun 2025.

Lampiran f. Dinas Sosial

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kota Bogor mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Kewenangan dan tugas fungsi Dinas Sosial harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar Visi dan Misi Kota Bogor dan Dinas dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumber daya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib sosial di Kota Bogor yang berpedoman kepada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peruabhan Tahun 2025.

2. Renja Dinas Sosial Kota Bogor merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib Sosial. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berjalan.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025 tidak terlepas dari tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 360 dan pasal 361 ayat 3.
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor, Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Walikota Bogor No. 104 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.
18. Peraturan Walikota Bogor No. 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)Tahun 2022.
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Kota Bogor adalah :

Maksud :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kota Bogor yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bogor dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan :

a. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Bogor.
b. Merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan, Pembangunan Dinas Sosial Kota Bogor selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN berisi :

1.1 Latar belakang, berisikan penjelasan tentang renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perubahan SKPD, serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD .

1.3 Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

a. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
b. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/kegiatan ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
c. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial.
d. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja peruabhan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 berisi :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Peruabhan 2024 Tahun lalu dan capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah, menguraikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perubahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu serta realisasi Renstra Perubahan SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk

SKPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**,** menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, menguraikan tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan capaian program nasional (SPM), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisi :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat Kajian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD, memuat Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dijadikan dasar atas rumusan tujuan dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, menjelaskan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2024 dan prakiraan maju (Tahun n+1).

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS SOSIAL SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Sosial sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial pada Tahun 2025 memiliki 6 program, 15 kegiatan, dan 46 sub kegiatan. Adapun capaian realisasi keuangan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebesar Rp.19.685.991.584,-

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2025, evaluasi yang dapat dipaparkan diantaranya: Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Sosial Kota Bogor dalam pelaksanaan Renja 2025 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain:

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) 2024	
							I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)					
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)
1	2	3	4			7	8		9		12		13 = 12/6*100	
		DINAS SOSIAL KOTA BOGOR				19.685.991.584	27,78	5.468.366.079	19,18	#########	144,27	##########	1.634	16.860.584.524
	7	NON URUSAN				14.027.947.484	21,98	3.083.811.964	23,30	#########	144	6.253.251.629	1.634	11.951.309.546

	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah IK 2 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja IK 3 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja IK 4 : Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal IK 5. Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah IK 6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu IK 7. Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan IK 8. Persentase Kepatuhan Anggaran IK 9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA IK 10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**27,01 '26,55 '12,48 '21,97 100 100 '94 100 95 94**	**% % % % % % % % % %**	**14.027.947.484**	**21,98**	**3.083.811.964**	**23,30**	**#########**	**144**	**6.253.251.629**	**1.634**	**11.951.309.546**
1	**5-1.06.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah**	**A A**	**Nilai Nilai**	**20.379.300**	**15,99**	**3.258.200**	**-**	**-**	**54,39**	**3.258.200**	**118,62**	**52.979.800**
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan	15	Dokumen Laporan	5.184.100	22,85	1.184.800	-	0	23	1.184.800	175,80	43.098.850,00
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Dokumen	5.883.000	25,17	1.481.000	-	-	25	1.481.000	157,34	3.799.800,00

	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	Laporan	9.312.200	6,36	592.400	-	-	6	592.400	22,72	6.081.150,00
										Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**18,13**	**15,99**	**71,17**	**10.595.960,00**
										Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**S**	**ST**
2	**5-1.06.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA 2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**%**	**9.466.314.469**	**24,21**	**2.291.403.103**	**29,22**	**#########**	**53,4238**	**##########**	**267,24**	**9.392.074.668**
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/Bulan	9.411.658.469	24,20	2.278.083.103	29,24	2.752.088.703,00	53	5.030.171.806	121,47	9.360.618.668,00
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	54.656.000	24,37	13.320.000	25,19	13.768.400	50	27.088.400	413,01	31.456.000,00
											52,14	**53,42**	**160,34**	**##########**
										Predikat Kinerja	**R**	**R**	**ST**	**ST**
3	**5-1.06.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**			**639.635.300**	**14,30**	**91.479.298**	**22,16**	**141.727.795**	**36,4594**	**229.299.693**	**1.054**	**593.225.706**
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	21.584.700	18,10	3.907.400	-	0		3.907.400	-	21.610.707,00
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	370.580.000	14,30	24.865.000	25,47	94375000	40	119.240.000	331,41	317.255.000,00
	1.06.01.2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	51.287.600	37,31	19.133.800	4,19	2150400	41	21.284.200	345,83	41.146.400,00

	0005													
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	196.183.000	22,21	43.573.098	23,04	45202395	45	88.775.493	377,09	234.824.306,00
										Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**43,38**	**32,18**	**210,87**	**59.516.282,60**
										Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**
4	**5-1.06.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**1.746.111.000**	**7,42**	**129.591.600**	**0,45**	**7.857.400**		**137.449.000**	**-**	**236.249.600**
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12	Unit	27.530.800	-	0	27,44	7553800	-	7.553.800	-	79.661.700,00
	1.06.01.2.09.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	331.639.300	39,08	129.591.600	0,09	303600	-	129.895.200	-	156.587.900,00
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	1.386.940.900	-	0	-	0	-	-	-	
										Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**-**	**7,87**	-	**47.249.920,00**
										Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**
5	**5-1.06.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**1.396.619.268**	**20,19**	**281.954.000**	**18,06**	**252.164.266**		**438.514.317**	**67**	**987.935.773**
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	221.338.400	22,04	48.783.088	21,15	46.820.861		95.603.949	-	113.082.700,00
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	338.426.900	0,29	974.600	7,79	26379301	8	27.353.901	67,36	212.778.879,00

	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	836.853.968	27,75	232.196.312	21,39	178.964.104		411.160.416	-	775.156.894,00
											Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	**8,08**	**31,40**	67,36	############
											Predikat Kinerja			**S**	**ST**
6	**5-1.06.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**758.888.147**	**37,70**	**286.125.763**	**13,35**	**101.344.450**		**387.470.213**	**126,72**	############
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	313.283.879	14,62	45.802.000	19,52	61163450	34	106.965.450	341,43	249.889.830,00
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	Unit	118.999.370	34,05	40.521.681	20,15	23975000	54	64.496.681	38,71	103.449.650,00
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	326.604.898	61,18	199.802.082	4,96	16206000		216.008.082	-	335.504.519,00
											Rata-rata capaian Kinerja Program (%)		**126,72**	**67,67**
												Predikat kinerja	**ST**	**S**
2	**1.06.04**	**REHABILITASI SOSIAL**	**1. Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas2. Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar3. Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos4. Jumlah Lansia yang berdaya5. Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.**	**100100100100100**	**%%%%Orang**									

8	**1.06.04.2.01**	**Rehabililitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.**	**Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.**	**100**	**%**	**2.668.680.000**	**61,08**	**1.630.038.000**	**5,20**	**138.736.000**		**1.768.774.000**	**-**	**877.661.600**
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Menerima Permakanan yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	N/A	Orang	-		-	-	-		-	-	-
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	360	Orang	32.215.000	-	-	-	-		-	-	49.514.800,00
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	2.042.024.200	79,38	1.620.938.000	0,66	13.500.000,00		1.634.438.000	-	641.242.800,00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	35.586.300	-	-	-	-		-	-	98.400.000,00
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	360	Orang	508.454.500	-	-	22,21	112.936.000,00		112.936.000	-	81.304.000,00
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	50.400.000	18,06	9.100.000	24,40	12.300.000,00		21.400.000	-	7.200.000,00
												Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**-**	**61,23**
												Predikat kinerja	**SR**	**R**
2	**1.06.04**	**REHABILITASI SOSIAL**	**Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.**	**2**	**%**	**3.233.797.500**	**53,67**	**1.735.638.000**	**7,56**	**244.336.000**		**1.979.974.000**	**0**	**1.268.232.850**

7	**1.06.04.2.02**	**Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.**	**100**	**%**	**565.117.500**	**18,69**	**105.600.000**	**18,69**	**105.600.000**		**211.200.000**	**-**	**390.571.250**
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	Orang	14.400.000	25,00	3.600.000	25,00	3.600.000,00		7.200.000	-	31.200.000,00
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	223.875.000	22,78	51.000.000	22,78	51.000.000,00		102.000.000	-	234.000.000,00
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	360	Orang	36.450.000	-	-	-	-		-	-	28.225.000,00
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Orang	24.432.500	-	-	-	-		-	-	6.356.250,00
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550	Orang	216.000.000	23,61	51.000.000	23,61	51.000.000,00		102.000.000	-	52.800.000,00
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150	Orang	49.960.000	-	-	-	-		-	-	37.990.000,00
												Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**-**	**34,14**
												Predikat kinerja	**SR**	**SR**
3	**8.01.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1. Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi 2. Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan 3. Persentase PPKS**	**85,50 18 90,00**	**% % %**	**1.093.592.200**		**119.076.600**	**17,96**	**196.414.600**	**0**	**315.491.200**	**0**	**2.221.015.020**

			yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial											
9	**1.06.5.2.02**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID**	**100**	**%**	**937.124.200**	**11,75**	**110.076.600**	**15,94**	**149.410.600**		**259.487.200**	**-**	**2.153.943.020**
	1.06.5.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	6.000	Orang	370.285.000	14,79	54.750.000,00	14,79	54.750.000,00		109.500.000	-	797.396.300,00
	1.06.5.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29.700	Keluarga	464.960.600	11,90	55.326.600,00	20,36	94.660.600,00		149.987.200	-	387.417.200,00
	1.06.5.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Orang	101.878.600	-	-	-	-		-	-	969.129.520,00
10	**1.06.5.2.01**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah Anak Terlantar yang tertangani**	**25**	**%**	**156.468.000**	**5,75**	**9.000.000**	**30,04**	**47.004.000**		**56.004.000**	**-**	**67.072.000**
	1.06.5.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	95	Orang	51.200.000	5,86	3.000.000,00	3,91	2.000.000,00		5.000.000	-	20.163.800,00
	1.06.5.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	44.000.000	6,82	3.000.000,00	4,55	2.000.000,00		5.000.000	-	21.826.200,00
	1.06.5.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	61.268.000	4,90	3.000.000,00	70,19	43.004.000,00		46.004.000	-	25.082.000,00
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)													**-**	**27,69**
Predikat kinerja													**SR**	**SR**

												Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**-**	**28,85**
												Predikat kinerja	**SR**	**SR**
4	**1.06.02**	**PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1. Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif 2. Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif**	**10085**	**% %**	**326.958.400**		**47.416.800**		**34.817.000**	**0**	**82.233.800**	**0**	**264.981.800**
11	**1.06.02.2.02**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dunia Usaha/ Penyelenggara UGB dan PUB budaya Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan singkronisasi penerbitan izin Dunia Usaha /Penyelenggara UGB dan PUG**	**121**	**Lembaga**	**3.600.000**	**-**	**0**		**0**		**0**	**-**	**1.194.000**
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	5	Dokumen	3.600.000	-	-		-		-	-	1.194.000,00
12	**1.06.02.2.03**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif Presentase jumlah LKS aktif**	**100**	**%**	**323.358.400**	**14,66**	**47.416.800**		**34.817.000**		**82.233.800**	**-**	**263.787.800**
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	80	Orang	31.348.600	15,70	4.921.800,00		15.204.600,00		20.126.400	-	178.557.000,00
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesajahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	135	Lembaga	249.295.400	13,54	33.745.000,00		4.230.000,00		37.975.000	-	67.349.600,00
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Sertifikat	42.714.400	20,48	8.750.000,00		15.382.400,00		24.132.400	-	17.881.200,00
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**-**	**25,15**
												Predikat kinerja	**SR**	**SR**
												Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**-**	**25,15**

													Predikat kinerja	SR	SR
5	**1.06.06**	**PENANGANAN BENCANA**	**Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**954.275.500**	**49,96**	**476.748.615**		**25.226.800**		**947.389.015**	**0**	**1.106.483.700**
13	**1.06.06.2.01**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**694.118.200**	**37,32**	**259.048.615**		**20.220.000**		**724.682.215**	**-**	**690.954.700**
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.	500	Orang	576.780.200	44,55	256.948.615,00		16.020.000,00		272.968.615	-	571.887.200,00
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	80.089.600	-	-		-		-	-	77.856.500,00
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kab/Kota	2	Unit	7.183.500	-	-		-		-	-	2.282.000,00
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	9.064.900	-	-		-		-	-	23.284.000,00
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kab/Kota	30	Orang	21.000.000	10,00	2.100.000,00		4.200.000,00		6.300.000	-	15.645.000,00
14	**1.06.06.2.02**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA**	**100**	**%**	**260.157.300**	**83,68**	**217.700.000**		**5.006.800**	**-**	**222.706.800**	**-**	**415.529.000**

	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	260.157.300	83,68	217.700.000,00		5.006.800,00		222.706.800	-	415.529.000,00
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	-	**104,40**
												Predikat kinerja	**SR**	**ST**
												Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#####**	**47,33**
												Predikat kinerja	**#####**	**SR**
6	**1.06.07**	**PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**%**	**49.420.500**		**5.674.100**		**5.326.500**		**11.000.600**	**-**	**48.561.608**
15	**1.06.07.2.01**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**1.061**	**Makam**	**49.420.500**	**11,48**	**5.674.100**		**5.326.500**		**11.000.600**	**-**	**48.561.608**
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-		-				-	-	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.061	Makam	49.420.500	11,48	5.674.100		5.326.500		11.000.600	-	48.561.608,00
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)	**SR**	**83,41**
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)	**ST**	**T**

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN JANUARI S/D JUNI 2025

1. Jumlah Program : 6 Program					
2. Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan					
3. Jumlah Sub Kegiatan : 45 Sub Kegiatan					
4. Total Anggaran Tahun 2024 :				**19.685.991.584**	
5. Realisasi Anggaran TRW. I s/d IV				**9.243.437.993**	
6. Sisa Anggaran				**10.442.553.591**	
7. Persentase Realisasi TRW. I s/d IV				**46,95**	
NO	**PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN**		**ANGGARAN 2024**		
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
	Belanja Pegawai		**9.411.658.469,00**		
	Belanja Langsung		**8.836.803.315,00**		
NO	**NAMA KEGIATAN**	**ANGGARAN PERUBAHAN + BANKEU (PERGESERAN II)**	**REALISASI SEMESTER II**	**SISA ANGGARAN**	**CAPAIAN %**
		1	**2**	**3=(1-2)**	**4**
DINAS SOSIAL		**19.685.991.584**	**9.243.437.993**	**10.442.553.591**	**46,95**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**19.685.991.584**	**9.243.437.993**	**10.442.553.591**	**46,95**
	DINAS SOSIAL	**19.685.991.584**	**9.243.437.993**	**10.442.553.591**	**46,95**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**14.027.947.484**	**6.352.762.978**	**7.675.184.506**	**45,29**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.379.300**	**3.258.200**	**17.121.100**	**15,99**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.184.100	1.184.800	3.999.300	22,85
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.883.000	1.481.000	4.402.000	25,17
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.200	592.400	8.719.800	6,36
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.466.314.469**	**5.057.260.206**	**4.409.054.263**	**53,42**
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.411.658.469	5.030.171.806	4.381.486.663	53,45
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.656.000	27.088.400	27.567.600	49,56
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**639.635.300**	**233.207.093**	**406.428.207**	**36,46**
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.584.700	3.907.400	17.677.300	18,10
	7. PenyediaanBahan Logistik Kantor	370.580.000	119.240.000	251.340.000	32,18
	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.287.600	21.284.200	30.003.400	41,50
	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.183.000	88.775.493	107.407.507	45,25

1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.746.111.000**	**137.449.000**	**1.608.662.000**	**7,87**
	10. Pengadaan Kendaraan Operasional	1.386.940.900	-	1.386.940.900	-
	10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.639.300	129.895.200	201.744.100	39,17
	11. Pengadaan Mebel	27.530.800	7.553.800	19.977.000	27,44
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.396.619.268**	**534.118.266**	**862.501.002**	**38,24**
	12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.338.400	95.603.949	125.734.451	43,19
	13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.426.900	27.353.901	311.072.999	8,08
	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.853.968	411.160.416	425.693.552	49,13
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**758.888.147**	**387.470.213**	**371.417.934**	**51,06**
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	313.283.879	106.965.450	206.318.429	34,14
	16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.999.370	64.496.681	54.502.689	54,20
	17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.604.898	216.008.082	110.596.816	66,14
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**326.958.400**	**82.233.800**	**244.724.600**	**25,15**
2.7	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.600.000**	**-**	**3.600.000**	**-**
	18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.600.000	-	3.600.000	-
2.8	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**323.358.400**	**82.233.800**	**241.124.600**	**25,43**
	19. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.348.600	20.126.400	11.222.200	64,20
	20. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	249.295.400	37.975.000	211.320.400	15,23
	21. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	42.714.400	24.132.400	18.582.000	56,50
III	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3.233.797.500**	**1.979.974.000**	**1.253.823.500**	**61,23**
3.9	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.668.680.000**	**1.768.774.000**	**899.906.000**	**66,28**
	22. Penyediaan Sandang	32.215.000	-	32.215.000	-
	23. Penyediaan Alat Bantu	2.042.024.200			

			1.634.438.000	407.586.200	80,04
	24. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.586.300	-	35.586.300	-
	25. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	508.454.500	112.936.000	395.518.500	22,21
	26. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000	21.400.000	29.000.000	42,46
3.10	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**565.117.500**	**211.200.000**	**353.917.500**	**37,37**
	27. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.400.000	7.200.000	7.200.000	50,00
	28. Pemberian Layanan Kedaruratan	223.875.000	102.000.000	121.875.000	45,56
	29. Penyediaan Sandang	36.450.000	-	36.450.000	-
	30. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	24.432.500	-	24.432.500	-
	31. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	216.000.000	102.000.000	114.000.000	47,22
	32. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49.960.000	-	49.960.000	-
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.093.592.200**	**315.491.200**	**778.101.000**	**28,85**
4.11	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**156.468.000**	**56.004.000**	**100.464.000**	**35,79**
	33. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	51.200.000	5.000.000	46.200.000	9,77
	34. Rujukan Anak-Anak Terlantar	44.000.000	5.000.000	39.000.000	11,36
	35. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	61.268.000	46.004.000	15.264.000	75,09
4.12	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**937.124.200**	**259.487.200**	**677.637.000**	**27,69**
	36. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	370.285.000	109.500.000	260.785.000	29,57
	37. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	464.960.600	149.987.200	314.973.400	32,26
	38. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	101.878.600	-	101.878.600	-
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**954.275.500**	**501.975.415**	**452.300.085**	**52,60**
5.13	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**694.118.200**	**279.268.615**	**414.849.585**	**40,23**
	39. Penyediaan Makanan	576.780.200	272.968.615	303.811.585	47,33
	40. penyediaan Sandang	80.089.600	-	80.089.600	-
	41. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.183.500	-	7.183.500	-
	42. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.064.900	-	9.064.900	-

	43. Pelayanan Dukungan Psikososial	21.000.000	6.300.000	14.700.000	30,00
5.14	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**260.157.300**	**222.706.800**	**37.450.500**	**85,60**
	44. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	260.157.300	222.706.800	37.450.500	85,60
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**49.420.500**	**11.000.600**	**38.419.900**	**22,26**
6.15	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**49.420.500**	**11.000.600**	**38.419.900**	**22,26**
	45. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	49.420.500	11.000.600	38.419.900	22,26

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didalamnya terdapat :

1. 6 (enam) Program pokok
2. 15 (lima belas) kegiatan pendukung.

Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan rincian capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	%	26,99	27,01	-
	IK 2 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	%	26,19	26,55	-
	IK 3 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	%	11,74	12,48	-
	IK 4 : Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	%	20,76	21,97	-
	IK 5. Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100	-
	IK 6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat	%	100	100	-
	IK 7. Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94	94	-
	IK 8. Persentase Kepatuhan Anggaran	%	94	100	-
	IK 9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	95	95	-
	IK 10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94	94	-
	IK11. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87,00	87,11	-
	IK 12. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88,25	88,75	-
	IK 13. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	88,50	88,60	-
	IK14. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	87,75	88,38	-

Dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. **14.027.947.484** dengan realisasi sebesar **6.352.762.978** atau sebesar **45,29** % yang diintervensi oleh 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan memberikan arahan serta acuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Bogor. Pada tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.379.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.258.200 atau sebesar 15.99 %, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan di TW1-TW2 :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pada Dinas Sosial dengan output : Cetak Buku SKM
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bertujuan untuk menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja pada Dinas Sosial dengan output : Cetak LKIP
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah bertujuan untuk menyusun dokumen evaluasi kinerja Dinas Sosial dengan output : SPM.

2.1.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan rutin pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan organisasi.

Pada tahun 2025 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.446.314.469,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.057.260.206,- atau sebesar 53.42%,- Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Sosial selama satu tahun anggaran secara efektif dan efisien, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu, pemenuhan gaji dan tunjangan ASN.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bertujuan untuk mengakomodir pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan Dinas Sosial Kota Bogor sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam rangka

menunjang tatakelola keuangan, output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini yaitu, tersusunnya laporan keuangan tahun 2025.

2.1.1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum merupakan serangkaian kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang didalamnya terdapat aktifitas mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.

Pada tahun 2025 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 639.635.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 233.207.093,- atau sebesar 36.46%, Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Sosial berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor mencakup pengadaan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), kertas, dan kebutuhan lain yang mendukung aktivitas administrasi perkantoran. Kegiatan ini memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kerja pegawai agar produktif dan efisien.
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah kegiatan penyediaan kebutuhan barang cetakan seperti formulir, brosur, map, amplop, spanduk, serta penggandaan dokumen dan penjilidan yang digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi kantor.
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah kegiatan penting yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan koordinasi dan komunikasi antar SKPD berjalan lancar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

2.1.1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan pembelian/perolehan Barang atas beban APBD berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2025 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.746.111.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.449.00,-, atau sebesar 7.87 %, Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah merupakan proses yang terstruktur mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi, penerimaan barang, penetapan status penggunaan, hingga pengelolaan dan pemanfaatan barang. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan barang yang memadai untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk mendukung terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan kantor seperti personal komputer, laptop, printer, AC dan lainnya.
b. Pengadaan Mebel
   Sub Kegiatan pengadaan mebel, untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas kantor agar pegawai dapat bekerja. sejalan dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah, termasuk penyediaan mebel, secara tepat dan efisien untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kota Bogor.

2.1.1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Jasa Penunjang seperti penyediaan jasa sumber daya air, listrik, komunikasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, SDM pelayanan dan lainnya dalam pelaksanaan operasional kantor.

Pada tahun 2025 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.396.619.268,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 534.118.266,- atau sebesar 38.24%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dimana setiap tahun harus dianggarkan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan tersedianya berbagai peralatan dan perlengkapan penunjang aktivitas administrasi kantor agar tugas-tugas harian berjalan lancar dan efektif.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor seperti petugas kebersihan/pramu bakti, satpam, pengemudi dan tenaga administrasi sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada masing masing jabatan lingkup Dinas Sosial.

2.1.1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola barang milik daerah. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kualitas barang milik daerah agar selalu dalam kondisi optimal dan siap pakai. Pada tahun 2025 Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 758.888.147,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.470.213,- atau sebesar 51.06%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk memelihara/menjaga agar Kendaraan Dinas dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemeliharaan kendaraan dinas yang dilakukan berupa pemberian biaya BBM, servis berkala, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk pemeliharaan/perawatan secara rutin peralatan dan mesin kantor sangat penting untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dengan adanya peralatan dan mesin kantor banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, dengan hasil yang memuaskan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

setiap tahun, bertujuan untuk pemeliharaan/perawatan gedung kantor sehingga gedung kantor Dinas Sosial supaya selalu dalam keadaan terawat/terpelihara dengan baik, bersih, dan nyaman.

2.1.2. Program Perlindungan dan Jaminan sosial

Pada tahun 2025 program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
Program 3.2.3 : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	IK 1 : Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	Persen	87%	88,50%	
	IK 2 : Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	Persen	19,57%	18%	
	IK 3 : Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	87,00%	90,00%	

Dalam pelaksanaan Program **Perlindungan dan Jaminan sosial** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.093.592.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.491.200,- atau sebesar 28.85% yang diintervensi yang didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok dengan 6 (enam) sub kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Dalam pelaksanaan **Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.156.468.000,- dengan realisasi sebesar Rp.56.004.000,- atau sebesar 35.79% yang diintervensi yang didalamnya memiliki 3 (tiga) sub kegiatan.

a. Penjangkauan Anak-anak Terlantar

   Sub Penjangkauan Anak-anak Terlantar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Penjangkauan Anak-Anak Terlantar adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial yang memadai. Tujuannya adalah menjamin hak anak-anak tersebut agar terpenuhi secara layak sehingga mereka dapat reintegrasi sosial ke masyarakat secara mandiri dan bermartabat, seperti halnya melakukan penjangkauan aktif anak-anak terlantar jalanan

b. Rujukan Anak-Anak Terlantar

   Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah mekanisme atau proses

di mana anak-anak terlantar yang telah menerima pelayanan dasar rehabilitasi sosial diarahkan atau dibawa ke lembaga atau pihak lain yang berwenang dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan pengasuhan, perlindungan, pembinaan, atau rehabilitasi lebih lanjut yang tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara layanan awal, seperti halnya Keluarga inti atau keluarga angkat, jika memungkinkan ddiadakan reunifikasi keluarga

c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
   Sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Memastikan pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar berjalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan peraturan yang berlaku, serta anak-anak mendapatkan pembinaan yang memadai seperti halnya melakukan kunjungan rutin ke lembaga atau tempat pemeliharaan anak terlantar dan memantau pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lainnya.

2.1.2.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 937.124.200,- dengan realisasi sebesar Rp.259.487.200,- atau sebesar 27.69 %. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan :

a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatam Pendataan Fakir Miskin dengan cakupan daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi bernama SOLID (Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu). Sistem ini berbasis internet dan bertujuan untuk memperoleh data fakir miskin dan orang tidak mampu yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Seperti halnya ; pendataan warga kurang mampu untuk mendapatkan jaminan sosial (PBI)
b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
   Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Bimbingan dan Pelatihan (Bimtek atau Bimpek) Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan para pelaksana maupun penerima manfaat PKH agar program tersebut dapat berjalan efektif seperti halnya ; meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan PKH dalam pendataan untuk penyaluran bantuan dan meningkatkan

kemampuan seperti pendataan, verifikasi.

c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.

Dalam hal ini Dinas Sosial memberikan bantuan sosial berupa sarana usaha yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, seperti gerobak usaha, gerobak dorong, gerobak motor, meja porteble (jualan) kursi dagang dan keluarga kurang mampu yang sudah memiliki usaha.

2.1.3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
Program 3.2.2 : REHABILITASI SOSIAL	IK 1 : Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Persen	2%	2%	
	IK 1 : Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Persen	100%	100%	
	IK 2 : Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar	Persen	100%	100%	
	IK 3 : Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	Persen	100%	100%	
	IK 4 : Jumlah Lansia yang berdaya	Orang	100	100	
	IK 5: Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Persen	100%	100%	

Dalam pelaksanaan **Program Rehabilitasi Sosial** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 3.233.797.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.979.974.000,- atau sebesar 61.23%. Program Rehabilitasi Sosial didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1.3.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial memiliki 5 (lima) sub kegiatan :

a. Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan Penyediaan sandang, bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar kelompok yang rentan tersebut di luar panti sosial. Penyediaan Sandang yang ada di dalam komponen SPM bahwa Bidang Sosial mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar wajib yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada warga, termasuk bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Penyediaan sandang merupakan salah satu sub kegiatan penting dalam rangka memberikan rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan di luar panti sosial, yang dikelola oleh dinas sosial dengan berbagai pendekatan layanan sosial dan bantuan langsung. Adapun Dinas Sosial Kota Bogor telah memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diwilayah Kota Bogor, dengan output sebagai berikut : Baju anak Laki Laki 50 Buah, Baju Anak Perempuan 50 Buah, Sabun Mandi 50 Botol, Baju dewasa laki laki lengan pendek 50 Buah, Baju dewasa laki laki lengan Panjang 50 Buah, Celana panjang 50 Buah, Celana Pendek 50 Buah.

b. Penyediaan Alat Bantu

Sub kegiatan penyediaan alat bantu, dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka di luar panti sosial. sub kegiatan ini, Dinas Sosial Kota Bogor memenuhi kebutuhan dasar berupa alat bantu kemandirian/sejenis, bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan masyarakat, dengan rincian output sebagai berikut : Kursi roda dewasa 95 Unit, Kruk ketiak 12 Unit, Tongkat kaki empat, 11 Unit, Kursi roda cerebral Palsy 62 Unit.

c. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

Sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dam sosial dengan bimbingan mental berfokus pada penguatan motivasi, psikososial, dan pemberian dukungan emosional agar penerima manfaat mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. upaya tersebut merupakan bagian tindaklanjut dari penanganan atas pengaduan-pengaduan masyarakat dan atau hasil patroli penjangkauan, dan dilakukan oleh Satgas PPKS Dinas Sosial Kota Bogor (pembiayaan operasional bersumber dari APBD Kota Bogor). Dalam pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, disiapkan juga tidak lagi memberikan stimulan terhadap klien namun lebih berfokus penanganan dan pemberian edukasi bimbingan teksni bagi PPKS di Kota Bogor dalam penanganannya.

d. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat.

Sub kegiatan ini, dalam pelaksanaannya dilakukan kegiatan HLUN (Hari Lanjut Usia Nasional) yang dilaksanakan pada hari

Sabtu, 07 September 2024 bertempat di Hotel Grand Savero dan HDI (Hari Disabilitas Internasional) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 November 2024 di Hotel Salak The Herritage, serta pemberian paket sembako untuk penyandang disabilitas dengan pengadaaan sebagai berikut : Beras 10 kg 100 Dus, Gula Pasir 100 Kg, Sarden 425 gr 200 buah, Minyak Goreng ukuran 1 Liter 100 buah, Tepung Terigu 110 Kg. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pun, diwujudkan melalui bantuan paket kebutuhan dasar sebanyak 100, yang diserahkan langsung kepada penerima manfaat.

e. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Dalam Sub Kegiatan Pelayanan Penelusuran Keluarga Tim Dinas Sosial melakukan penelusuran melalui data, wawancara, dan investigasi sosial untuk menemukan keluarga klien yang terpisah. Pelayanan penelusuran keluarga, merupakan salah satu indikator kinerja dalam proses penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan tujuan akhir adalah proses reunifikasi keluarga. Selama tahun 2024, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga dan berhasil direunifikasi, sejumlah orang, meliputi : Penyandang Disabilitas Terlantar 700 orang,Anak Terlantar - orang, Lanjut Usia Terlantar: 500 orang, Gelandangan dan Pengemis: 500 orang

2.1.3.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial terdapat 6 (enam) sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Padatahun 2025, terekapitulasi jumlah PPKS yang ditangani dan masuk kedalam rekon layanan data dan pengaduan sebanyak 250 orang, selain itu dalam sub kegiatan pemberian layanan data dan pengaduan terkait juga dengan pelayanan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bogor, yang pada tahun ini mendapatkan anggaran tambahan guna peningkatan sarana penunjang aktifitas pelayanan sosial kepada Klien PPKS. Selain itu, banyaknya masyarakat yang meminta bantuan Dinas Sosial untuk memberikan informasi atau bantuan mengenai keluarganya yang hilang bahkan yang terazia oleh Dinas Sosial Kota Bogor maupun diluar Kota Bogor. Pada akhir tahun berjalan, rekon pemberian layanan data dan pengaduan, bagi klien yang datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Bogor (Bidang Rehabilitasi Sosial), sudah mulai menggunakan mesin finger print, dengan harapan perekaman data dari klien yang ditangani

dapat lebih optimal.

b. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.

Rekapitulasi jumlah PPKS yang ditangani dan masuk kedalam rekon Pemberian layanan Kedaruratan sebanyak 2400 orang, selain itu dalam sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan terkait juga dengan pelayanan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bogor, yang pada tahun ini mendapatkan anggaran tambahan guna peningkatan sarana penunjang aktifitas pelayanan sosial kepada Klien PPKS. Pada akhir tahun berjalan, rekon pemberian layanan data dan pengaduan, bagi klien yang datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Bogor (Bidang Rehabilitasi Sosial), sudah mulai menggunakan mesin finger print, dengan harapan perekaman data dari klien yang ditangani dapat lebih optimal.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Pada sub kegiatan ini, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Sosial Kota Bogor memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diwilayah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut :Popok Sekali Pakai Dewasa, 130 paxTipe Perekat Ukuran L dan Tipe Celana Ukuran XL.

d. Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

Pada sub kegiatan ini, Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Sosial Kota Bogor memenuhi kebutuhan dasar berupa perbekalan kesehatan di luar panti, bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi klien dari rumah singgah Dinas Sosial Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut : Sarung Tangan Latex 50 Box, Sabun Cuci Tangan 50 Box

e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sub kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang diberikan kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, upaya tersebut merupakan bagian tindaklanjut dari penanganan atas pengaduan-pengaduan masyarakat dan atau hasil patroli penjangkauan, dan dilakukan oleh Satgas PPKS Dinas Sosial Kota Bogor (pembiayaan operasional bersumber dari APBD Kota Bogor)

f. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dilaksanakan pada tahun 2024. Pengadaan paket sembako berupa : Beras 10 kg 100 Buah, Mie Instan 100 Dus, Minyak Goreng 200 Liter dan sangat diperlukan dalam rangka penguatan serta pemetaan kebutuhan klien berbasis keluarga, karena pada kondisi tertentu, pemulihan

keberfungsian seorang klien tergantung juga kepada dukungan keluarga dan lingkungan.

2.1.4 Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
Program 3.2.5: PENANGANAN BENCANA	IK 1 : Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	

Dalam pelaksanaan **Program Penanganan Bencana** tahun 2024, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 954.275.500,- dengan realisasi sebesar Rp.501.975.415,- atau sebesar 52.60%. Program Perlindungan Sosial didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1.4.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota mempunyai 4 (empat) sub kegiatan :

a. Penyediaan Makanan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Memfasilitasi kebutuhan dasar bagi korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengant tujuan menyediakan barang (bahan baku) yang baik untuk di berikan kepada korban bencana yang membutuhkan bantuan. Diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana alam/sosial yang terjadi di Wilayah Kota Bogor.

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Anggaran sebesar Rp 576.780.200 yang telah di realisasikan sebanyak 47.33% dengan rincian pembelanjaan Anggaran yang digunakan untuk penyediaan Barang dan Jasa.

Belanja Natura dan Pakan Natura untuk Pengadaan Natura yang diperuntukkan bagi korban Bencana Alam/Sosial. Pembelanjaan Natura bahan baku atau bahan pokok berupa Beras, Mie Instan, Minyak Goreng, Kecap, Saos Sambal, Sarden, Tepung Terigu, Teh Celup, dan Susu Bayi, untuk honor Satagas kirim barang yaitu Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta sisa anggaran dipergunakan belanja lainnya untuk kebutuhan kegiatan operasional

di lingkup Bidang Perlindungan Sosial (Perlinsos).

b. Penyediaan Sandang

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Memfasilitasi kebutuhan Sandang berupa pakaian layak bagi korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dalam masa tanggap darurat bencana alam/sosial.

Anggaran Belanja Barang Pakai habis untuk Penyediaan Sandang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.089.600 dan realisasi Rp. 80.089.600 dalam realisasi sudah mencapai 0 % untuk pembelanjaan Barang untuk diserahkan ke Masyarakat Korban Bencana berupa Pakaian Seragam SD untuk Anak Laki-laki, Pakaian Seragam SD untuk Anak Perempuan, Pakaian Seragam SMP untuk Anak Laki-laki, Pakaian Seragam SMP untuk Anak Perempuan, Pakaian Seragam SMA untuk Anak Laki-laki, Pakaian Seragam SMA untuk Anak Perempuan, Sepatu Sekolah Anak, Tas Sekolah Anak, Buku Tulis dan Kaos.

c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Memfasilitasi kebutuhan pendukung dalam bagi korban bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dalam masa tanggap darurat bencana alam/sosial.

Realisasi Anggaran Belanja Penyediaan Barang 0%, sebesar Rp. 7.183.500 yang telah dibelanjakan Rp. 7.183.500 untuk Barang Kebutuhan pendukung tempat penampungan pengungsi bagi warga korban bencana di Kota Bogor yaitu Kasur Lipat.

d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi Korban Bencana seperti Bayi, Balita, Anak-anak, Wanita, Ibu hamil/Menyusui, Lansia, dan penyandang Disabilitas pada masa tanggap darurat bencana di Kota Bogor dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 9.064.900 belum terserap (0%)

e. Pelayanan Dukungan Psikososial

Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah untuk pemulihan pasca-bencana bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat bencana di Kabupaten/Kota.

Pada penanganan bencana, Dinas Sosial turun ke lokasi bencana dan rawan bencana bersama-sama dengan Taruna Siaga Bencana, menjadi sahabat tagana dan ikut membantu melakukan kegiatan terkait penanganan korban bencana. Pada pasca bencana, mendukung Tagana dalam memberikan Dukungan Psikososial, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 point D; setiap orang

berhak serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk Dukungan Psikososial. Layanan psikososial ditujukan kepada korban bencana yang mengalami trauma dan depresi.

Realisasi Anggaran Kegiatan Pelayanan Jasa baru 30% dengan nominal sebesar Rp.21.000.000, untuk pengeluaran uang pengganti transport masyarakat, yang diberikan kepada petugas Pelayanan Dukungan Psikososial yaitu Anggota Tagana Kota Bogor.

Pada penanganan bencana, Taruna Siaga Bencana turun ke lokasi bencana dan rawan bencana melaksanakan Layanan dukungan psikososial (LDP) pasca bencana bertujuan untuk membantu korban bencana mengatasi dampak psikologis dan sosial yang dialaminya. Layanan ini dapat membantu korban bencana untuk kembali berfungsi optimal dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah.

2.1.4.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Tagana mempunyai tugas pokok prabencana, pada saat kejadian dan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang Anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 260.157.300 dan terealisasi sebesar Rp 222.706.800 dengan persentase 85.60 %. Untuk dapat Melaksanakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah koordinasi dan sosialisasi dengan dinas terkait dan aparat wilayah serta tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang tepat guna dan berdaya guna.

2.1.5. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
Program 3.2.4 : PEMBERDAYAAN SOSIAL	IK 1 :Prosentase lembaga kesejahteraan	Persen	100%	100%	
	IK 2 :Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	Persen	84%	85%	

Dalam pelaksanaan **Program Pemberdayaan Sosial** tahun 2024, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 326.958.400,- dengan realisasi sebesar Rp.82.233.800,- atau sebesar 25.15%. Program **Pemberdayaan Sosial** didalamnya memiliki 2 (dua) kegiatan pokok Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1.5.1 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. Indikator Target yang ingin dicapai Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang. Target Indikator Target lainnya partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif, target tahun 2024. Dengan anggaran 3.600.000 realisasi masih 0%

2.1.5.2 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan **sub kegiatan ini pada** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 323.358.400,- dengan realisasi sebesar Rp.82.233.800,- atau sebesar 25.43%.

2.1.6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki capaian kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.27.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
4	5	6	7	8	9
Program 3.2.6 : PENGELOLAAN TAMAN	IK 1. Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	

Dalam pelaksanaan **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** tahun 2025, memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 49.420.500,- dengan realisasi sebesar Rp.11.000.600,- atau sebesar 22.26%. Program **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** didalamnya memiliki 1 (satu) kegiatan pokok Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

2.1.6.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kegiatan pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 49.420.500,- dengan realisasi sebesar Rp.11.000.600,- atau sebesar 22.26%. adalah pemeliharaan makam sebanyak 1.081 makam serta pemeliharaan tanaman makam sehingga menambah kenyamanan keluarga penziarah di Taman Makam Pahlawan Dreded.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator IKU Dinas Sosial 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025/Indikatif	
				Target	Realisasi
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	IK 1 : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	84,36	84,40	
	IK 2 : Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	90%	95	
	IK3 : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	92	93	
	IK4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1	1	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	IK 1: SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	88,61	88,75	
Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	IK 1. Persentase PPKS yang Tertangani	1. Persen	1. 100%	1. 100%	
	IK 2. Presentase PSKS yang Aktif dalam Pengelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2. Persen	2. 48,19	2. 49%	
	IK 3. Persentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi	3. Persen	3. 100%	3. 100%	
Optimalisasi perlindungan sosial disabilitas dan lansia terlantar	IK 1. Persentase peningkatan Disabilitas yang Tertangani	Persen	1. 25%	1. 5%	
	IK 2. Persentase peningkatanLansia Terlantar yang Tertangani		2. 25%	2. 5%	
Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar	IK 1 : Persentase Peningkatan Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial	Persen	25%	25%	
Sasaran : Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	IK 1 : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	6%	7%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bogor

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Permasalahan yang biasa timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial adalah :

1. Identitas penduduk PMKS/PSKS yang tidak jelas;
2. Masih banyak penduduk PMKS/PSKS yang berpindah-pindah tempat tinggal;
3. Kerahasiaan data kesehatan khususnya data pengidap HIV/AIDS yang dapat menyulitkan pendataan;
4. Penyerahan hasil pendataan PMKS/PSKS yang tidak tepat waktu;
5. Dalam penanganan Orang Terlantar di perjalanan masih ada kelayan yang tidak mengerti prosedur perihal perlu adanya surat keterangan dari kepolisian sebagai dasar pembuatan surat pengantar untuk dirujuk ke UPTD Terminal Baranangsiang bagi antar kota dalam Provinsi Jawa Barat dan ke Dinas Sosial

Provinsi DKI Jakarta bagi antar kota luar Provinsi Jawa Barat;

6. Dalam penanganan korban bencana alam masih ada laporan dari wilayah yang tidak akurat datanya. Selain itu ada juga kejadian yang dilaporkan tetapi bukan disebabkan bencana alam, atau jenis bencana tidak terkait langsung dengan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bogor yang melaksanakan tanggap darurat pendistribusian natura. Hal ini banyak menimbulkan kesalahpahaman antara Dinas dengan Wilayah;
7. Kesulitan penampungan/penyimpanan hasil razia terutama untuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
8. Kesulitan metode yang diguanakan dalam memberikan pembinaan kepada PMKS dikarenakan kualitas SDM di bidang sosial sangat kurang;
9. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
10. Penitipan anak jalanan, gelandangan dan pengemis melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak sangat terbatas jumlahnya;
11. PMKS yang diikutsertakan dalam pembinaan sering menolak untuk disertakan baik dari dirinya sendiri maupun keluarganya;
12. Fenomena PMKS yang ada di jalanan cenderung tidak pernah berkurang dan cenderung selalu bertambah;
13. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Tugas Pokok WKSBM, adanya pemikiran masyarakat bahwa WKSBM akan menjadi lembaga yang tumpang tindih dengan tugas organisasi yang telah ada di Kelurahan;
14. Adanya kendala di lapangan dalam pelayanan terhadap masyarakat dari pihak terkait, contohnya pelayanan rumah sakit.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan-kelurahan se-Kota Bogor;
2. Melaksanakan pengecekan sampai ke wilayah RT/RW;
3. Koordinasi dengan lintas sektoral melalui instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota Bogor);
4. Melakukan monitoring pendataan dengan sistem jemput bola ke wilayah;
5. Melakukan koordinasi dengan Bina Mitra Kepolisian setempat untuk menindaklanjuti bila ada kelayan yang tidak mengerti prosedur perihal perlu adanya surat keterangan dari kepolisian sebagai dasar pembuatan surat pengantar untuk dirujuk;
6. Terkadang bagi kelayan yang sudah tua/anak-anak yang terlantar, difasilitasi dengan mengantar ke tempat asalnya;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani kebencanaan terkait pemberian bantuan dan melakukan sosialisasi mengenai kondisi Daerah Rawan Bencana;

8. Mengadakan pembinaan dan pelatihan peningkatan SDM kepada TAGANA yang membantu penanggulangan bencana alam;
9. Perekrutan SDM yang berlatar belakang ilmu sosial dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada dengan mengirimkan PNS mengikuti Diklat;
10. Mengusulkan permohonan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Penggunaan skala prioritas dengan mengutamakan warga asli Kota Bogor yang dititipkan;
12. Studi kasus koordinasi dengan Dinas Sosial Kota/Kabupaten lain dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
13. Memberikan pemahaman/pengertian kepada PMKS dan keluarganya dan terus melaksanakan kegiatan razia dan program pengentasan PMKS;
14. WKSBM merupakan kegiatan yang sinergis antara organisasi-organisasi masyarakat yang mana masing-masing organisasi berjalan sesuai dengan tupoksi organisasinya dan WKSBM sebagai wadah dari semua aspirasi maupun permasalahan yang ada di masyarakat;
15. Pihak pemerintah akan mengadakan sosialisasi dengan pihak rumah sakit dalam pelayanan masalah sosial.

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat)* dengan sudut pandang Dinas Sosial Kota Bogor.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas, Sosial Kota Bogor. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Sosial Kota Bogor yang meliputi Kekuatan *(Strength)* dan Kelemahan *(Weakness).*

1. Kekuatan *(Strength)*
   a. Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor 53 Tahun 2021.
   b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
   c. Memiliki koordinasi yang baik dengan pihak luar yang terkait.
   d. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
2. Kelemahan *(Weakness)*
   a. Pelaksanaan program yang belum optimal
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana
   c. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik
   d. Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kota Bogor. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Sosial Kota Bogor yang meliputi Peluang *(Opportunity)* dan Ancaman *(Threat).*

1. Peluang *(Opportunity)*
   a. Tersedianya lembaga-lembaga masyarakat di bidang usaha kesejahteraan sosial dalam mengangani masalah sosial
2. Ancaman (*Threat*)
   a. Semakin bertambahnya angka kemiskinan
   b. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terbatas

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat diperoleh dari hasil musrembang di tingkat Kecamatan, usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Kota Bogor. Dinas Sosial Kota Bogor membuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas dinas, sehingga pada tahun berikutnya aspirasi masyarakat dapat terealisasikan. Pada Rencana Kerja tahun 2025 usulan dari Masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan yang masih sedang dalam proses

Program strategis pertama Dinas Sosial Kota Bogor, yaitu :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Penanganan Anak terlantar :
   Rujukan Anak Terlantar/Penjangkauan anak terlantar memberikan pelayanan terhadap penanganan anak terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal jaminan kesehatan perlindungan menuju kemandirian dan Adopsi Anak Terlantar melaksanakan fasilitasi pola kejelasan hukum asuh dan pemenuhan menuju kemandirian dalam penanganan tangung jawab orang tua asuh.

Percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan di Kota Bogor utamanya dilakukan dengan mentransformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bogor dengan menjalankan Program penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan dengan fokus pada penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah kecamatan kota Bogor, khususnya pada desil 1 (satu) dengan jumlah mencapai 13.755 orang

Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Bogor

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

(i) penurunan beban pengeluaran masyarakat;
(ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta
(iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Selanjutnya ketiga strategi utama tersebut, diperinci ke dalam program-program action plan. Berikut program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial :

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat, Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
   1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. (Pemerintah Pusat)
   2) Pendataan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah.
   3) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
b. Peningkatan pendapatan masyarakat
   Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan

masyarakat, diantaranya melalui:

1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program penempatan akses pekerjaan, bantuan individu/kelompok (KUBE),
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan/Bimtek.
3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses bantuan modal usaha.
4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan melaui Bantuan Siswa Miskin (BSM) , layanan dan infrastruktur kesehatan melaui jaminan kesehatan PBI APBD, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemberian kesempatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan dasar kemandirian bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis, Lansia terlantar yang Ditangani sebanyak 148 orang.

b. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah memberikan pelayanan fasilitas terhadap keterlantara sebelum melaksanakan reunifikasi keluarga diberikan kebutuhan pelayanan dasar serta bimbingan teknis spritual bagi PPKS yang berada atau ditangani dirumah singgah.

Terlayaninya PPKS dan Orang Terlantar di rumah Singgah sebnayak 226 orang dalam 1 (satu Tahun).

c. Langkah kongkrit kegiatan rehabilitasi sosial :

1. Pembuatan Perwali Disabilitas
2. Untuk tahun 2025 APBD kota Bogor Menyiapkan ; Tongkat kaki, Kruk Ketia, Kursi Roda Cerebral Palsy, Kursi Roda Dewasa
3. Kursi Roda Dewasa yang di ajukan melalui Musrembang

4. Kursi Roda Dewasa yang di ajukan berdasarkan Pokir Dewan

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial melaksanakan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota. Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang adalah sebanyak 5 dokumen.

4. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program pemeliharaan Taman makam pahlawan melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nassional Kabupaten/Kota dengan melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana makam dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Terdapat 1 lokasi makam dengan jumlah 1069 makam.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

   Persentase penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu.

2) Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH); Tersedianya rekomendasi penerima hibah/bansos.

6. Program Penangan Bencana

Program penanganan bencana melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran				Ket.
		RKA SKPD MURNI	PENETAPAN PERGESERAN 2	P RKA SKPD	NAIK/(TURUN) P RKA-Penetapan Pergeseran 2	
	DINAS SOSIAL	**18.248.461.784**	**19.685.991.584**	**20.248.623.373**	**562.631.789**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**13.326.387.784**	**14.027.947.484**	**14.201.123.073**	**173.175.589**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20.379.300**	**20.379.300**	**20.379.300**	**-**	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.184.100	5.184.100	5.184.100	0	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.883.000	5.883.000	5.883.000	0	
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.200	9.312.200	9.312.200	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9.466.314.469**	**9.466.314.469**	**9.770.595.784**	**304.281.315**	
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.411.658.469	9.411.658.469	9.715.939.784	304.281.315	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.656.000	54.656.000	54.656.000	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**845.520.300**	**639.635.300**	**752.328.100**	**112.692.800**	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.584.700	21.584.700	21.584.700	0	
	7. PenyediaanBahan Logistik Kantor	370.580.000	370.580.000	483.272.800	112.692.800	
	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.287.600	51.287.600	51.287.600	0	
	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.068.000	196.183.000	196.183.000	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**816.815.500**	**1.746.111.000**	**1.752.307.000**	**6.196.000**	

	10. Pengadaan Kendaraan Operasional	639.161.600	1.386.940.900	1.386.940.900	0	Bankeu
	11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.100.100	331.639.300	331.639.300	0	Bankeu
	12. Pengadaan Mebel	7.553.800	27.530.800	33.726.800	6.196.000	Bankeu
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.418.470.068**	**1.396.619.268**	**1.144.619.268**	**(252.000.000)**	
	13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.338.400	221.338.400	221.338.400	0	
	14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.277.700	338.426.900	86.426.900	-252.000.000	
	15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.853.968	836.853.968	836.853.968	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**758.888.147**	**758.888.147**	**760.893.621**	**2.005.474**	
	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	313.283.879	313.283.879	315.289.353	2.005.474	
	17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.999.370	118.999.370	118.999.370	0	
	18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.604.898	326.604.898	326.604.898	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**366.678.400**	**326.958.400**	**326.958.400**	**-**	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**-**	
	19. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**363.078.400**	**323.358.400**	**323.358.400**	**-**	
	20. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	57.828.600	31.348.600	31.348.600	0	

	21. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49.295.400	249.295.400	249.295.400	0	
	22. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.954.400	42.714.400	42.714.400	0	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**2.462.475.400**	**3.233.797.500**	**3.590.253.700**	**356.456.200**	Bankeu
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**1.897.357.900**	**2.668.680.000**	**2.955.136.200**	**286.456.200**	
	23. Penyediaan Sandang	32.215.000	32.215.000	61.868.000	29.653.000	
	24. Penyediaan Alat Bantu	1.664.046.600	2.042.024.200	2.151.255.200	109.231.000	
	25. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.986.300	35.586.300	35.586.300	0	
	26. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	114.710.000	508.454.500	656.026.700	147.572.200	
	27. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.400.000	50.400.000	50.400.000	0	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**565.117.500**	**565.117.500**	**635.117.500**	**70.000.000**	
	28. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	
	29. Pemberian Layanan Kedaruratan	223.875.000	223.875.000	293.875.000	70.000.000	
	30. Penyediaan Sandang	36.450.000	36.450.000	36.450.000	0	
	31. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	24.432.500	24.432.500	24.432.500	0	
	32. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	216.000.000	216.000.000	216.000.000	0	

	33. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	49.960.000	49.960.000	49.960.000	0	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**1.013.774.200**	**1.093.592.200**	**1.126.592.200**	**33.000.000**	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**156.468.000**	**156.468.000**	**156.468.000**	-	
	34. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	51.200.000	51.200.000	51.200.000	0	
	35. Rujukan Anak-Anak Terlantar	44.000.000	44.000.000	44.000.000	0	
	36. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	61.268.000	61.268.000	61.268.000	0	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**857.306.200**	**937.124.200**	**970.124.200**	**33.000.000**	
	37. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	440.840.000	370.285.000	403.285.000	33.000.000	
	38. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	391.968.600	464.960.600	464.960.600	0	
	39. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.497.600	101.878.600	101.878.600	0	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**1.029.725.500**	**954.275.500**	**954.275.500**	-	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**694.118.200**	**694.118.200**	**694.118.200**	-	
	40. Penyediaan Makanan	576.780.200	576.780.200	576.780.200	0	
	41. penyediaan Sandang	80.089.600	80.089.600	80.089.600	0	
	42. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.183.500	7.183.500	7.183.500	0	
	43. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.064.900	9.064.900	9.064.900	0	
	44. Pelayanan Dukungan Psikososial	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**335.607.300**	**260.157.300**	**260.157.300**	-	
	45. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	335.607.300	260.157.300	260.157.300	0	

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**49.420.500**	**49.420.500**	**49.420.500**	**-**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**49.420.500**	**49.420.500**	**49.420.500**	**-**	
	46. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	49.420.500	49.420.500	49.420.500	0	
	JUMLAH	**18.248.461.784**	**19.685.991.584**	**20.248.623.373**	**562.631.789**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Bogor serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026. Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**16.609.640.070,00**	**18.248.461.784,00**	**20.948.228.775,00**	**4.338.588.705,00**							**1.239.697.740,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.609.640.070,00**	**18.248.461.784,00**	**20.948.228.775,00**	**4.338.588.705,00**							**1.239.697.740,00**	

	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**16.609.640.070,00**	**18.248.461.784,00**	**20.948.228.775,00**	**4.338.588.705,00**							**1.239.697.740,00**	
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Transparansi Pengelolaan**				**100 12,48 21,97 26,55 27,01 87,11 88,38 88,6 88,75 94 95 Persentase Nilai Persentase Persentase**	**100 12,48 88,38 88,6 88,75 21,97 26,55 27,01 87,11 94 95 Persent ase Nilai Persentas e Persentas e**	**12.577.647.570,00**	**13.326.387.784,00**	**15.045.110.875,00**	**-12.571.176.270,00**							**6.471.300,00**	

			Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA																	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu*				A Nilai	A Nilai	14.712.700,00	20.379.300,00	20.379.300,00	5.666.600,00			-	- -	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		6.471.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	15 Dokumen	3.999.500,00	5.184.100,00	5.184.100,00	1.184.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				16 Laporan	15 Laporan	4.632.200,00	5.883.000,00	5.883.000,00	1.250.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.471.300,00	DINAS SOSIAL

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										n							
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28 Laporan	28 Laporan	6.081.000,00	9.312.200,00	9.312.200,00	3.231.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Presentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				100 % Persen	100% Persen	9.060.896.557,00	9.466.314.469,00	9.894.270.560,00	833.374.003,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	9.005.896.557,00	9.411.658.469,00	9.839.614.560,00	833.718.003,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

													Kel/ Desa	A ALO KASI UMU M (DAU)						
	1.06.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD				12 Lapo ran	12 Lapora n	55.000.000,0 0	54.656.000,0 0	54.656.00 0,00	- 344.000, 00	Kota Bogo r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	- -			0,00	DI NA S SO SI AL
	1.06.0 1.2.06	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*				100 % Pers en	100% Persen	837.689.300, 00	845.520.300, 00	728.860.3 00,00	- 108.829. 000,00			-	- -	-		0,00	DI NA S SO SI AL
	1.06.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Pake t	12 Paket	21.584.700,0 0	21.584.700,0 0	21.584.70 0,00	0,00	Kota Bogo r, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	- -			0,00	DI NA S SO SI AL

	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.580.000,00	370.580.000,00	459.805.000,00	95.225.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.128.600,00	51.287.600,00	51.287.600,00	7.159.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	407.396.000,00	402.068.000,00	196.183.000,00	-211.213.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100 % Persen	100% Persen	817.386.200,00	816.815.500,00	2.210.096.100,00	1.392.709.900,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	11 Unit	639.329.900,00	639.161.600,00	1.850.926.000,00	1.211.596.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	7.613.800,00	7.553.800,00	27.530.800,00	19.917.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	25 Unit	170.442.500,00	170.100.100,00	331.639.300,00	161.196.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

														DAERAH PROVINSI						
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 % Persen	100% Persen	1.159.268.568,00	1.166.470.068,00	1.432.616.468,00	273.347.900,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	221.338.400,00	221.338.400,00	221.338.400,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.076.200,00	108.277.700,00	374.424.100,00	273.347.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	836.853.968,00	836.853.968,00	836.853.968,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*				100 % Persen	100% Persen	687.694.245,00	1.010.888.147,00	758.888.147,00	71.193.902,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	9 Unit	343.763.879,00	565.283.879,00	313.283.879,00	-30.480.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	127.693.366,00	118.999.370,00	118.999.370,00	-8.693.996,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	216.237.000,00	326.604.898,00	326.604.898,00	110.367.898,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif**				**100 85 Persentase Persentase**	**100 85 Persentase Persentase**	**442.843.300,00**	**366.678.400,00**	**326.958.400,00**	**-321.686.000,00**							**121.157.300,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dunia Usaha/ Penyelenggara UGB dan PUB*				121 Lembaga	121 Lembaga	3.818.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-218.000,00			-	- -	-		3.960.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				2 Dokumen	2 Dokumen	3.818.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-218.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.960.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase jumlah LKS aktif*				30% Persen	30% Persen	439.025.300,00	363.078.400,00	323.358.400,00	-115.666.900,00			-	- -	-		117.197.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	101.896.100,00	57.828.600,00	31.348.600,00	-70.547.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.355.460,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				135 Lembaga	135 Lembaga	274.269.600,00	249.295.400,00	249.295.400,00	-24.974.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

													Kel/ Desa							
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	62.859.600,00	55.954.400,00	42.714.400,00	-20.145.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.841.840,00	DINAS SOSIAL
3,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas**				**100 % 2% Persen Persen**	**100% Persen**	**1.497.178.900,00**	**2.462.475.400,00**	**3.445.871.300,00**	**-385.109.760,00**							**1.112.069.140,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	*Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.*				100 % Persen	100% Persen	921.812.400,00	1.897.357.900,00	2.880.753.800,00	1.958.941.400,00			-	- -	-		1.112.069.140,00	DINAS SOSIAL

		Sosial																		
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	32.215.000,00	32.215.000,00	32.215.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.436.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				201 Orang	431 Orang	725.927.300,00	1.664.046.600,00	2.151.598.000,00	1.425.670.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			950.451.590,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	33 Orang	56.770.100,00	35.986.300,00	35.586.300,00	-21.183.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

													ua Kel/ Desa							
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	400 Orang	56.500.000,00	114.710.000,00	610.954.500,00	554.454.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			126.181.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				504 Orang	504 Orang	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Jumlah PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Prosentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				100 % Persen	100% Persen	575.366.500,00	565.117.500,00	565.117.500,00	-10.249.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				144 Orang	144 Orang	16.774.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-2.374.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				2160 Orang	2160 Orang	231.750.000,00	223.875.000,00	223.875.000,00	-7.875.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				135 Orang	135 Orang	36.450.000,00	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				355 Orang	355 Orang	24.432.500,00	24.432.500,00	24.432.500,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				2160 Orang	2160 Orang	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		

			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	49.960.000,00	49.960.000,00	49.960.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
4,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan social**				**18% 88,50% 90% Persen Persen Persen**	**88,50% 18% 90% Persen Persen Persen**	**923.174.200,00**	**1.013.774.200,00**	**1.126.592.200,00**	**-923.174.200,00**							**0,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak Terlantar yang tertangani Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID*				100% Persen 95 Orang	100% Persen 95 Orang	156.468.000,00	156.468.000,00	156.468.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		

			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	51.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	61.268.000,00	61.268.000,00	61.268.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID*				100 % Persen	100% Persen	766.706.200,00	857.306.200,00	970.124.200,00	203.418.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				6000 Orang	6000 Orang	488.316.000,00	440.840.000,00	403.285.000,00	-85.031.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				29700 Keluarga	29700 Keluarga	248.344.000,00	391.968.600,00	464.960.600,00	216.616.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	300 Orang	30.046.200,00	24.497.600,00	101.878.600,00	71.832.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL

5,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**1.118.649.300,00**	**1.029.725.500,00**	**954.275.500,00**	**-1.118.649.300,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota*				100 % Persen	100% Persen	694.842.000,00	694.118.200,00	694.118.200,00	-723.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	577.504.000,00	576.780.200,00	576.780.200,00	-723.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	80.089.600,00	80.089.600,00	80.089.600,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	7.183.500,00	7.183.500,00	7.183.500,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	38 Orang	9.064.900,00	9.064.900,00	9.064.900,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		

			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA*				75 Orang	75 Orang	423.807.300,00	335.607.300,00	260.157.300,00	-163.650.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	423.807.300,00	335.607.300,00	260.157.300,00	-163.650.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
6,	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase taman makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**50.146.800,00**	**49.420.500,00**	**49.420.500,00**	**-50.146.800,00**							**0,00**	

	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				1087 Makam 1 Dokumen	1087 Makam	50.146.800,00	49.420.500,00	49.420.500,00	-726.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1087 Makam	1087 Makam	50.146.800,00	49.420.500,00	49.420.500,00	-726.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**16.609.640.070,00**	**18.248.461.784,00**	**20.948.228.775,00**	**495.474.104.450,90**							**1.239.697.740,00**	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah. Renja Perubahan memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Penilaian sebagaimana dimaksud, digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (sampai dengan Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 17);
35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 19);
36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 20).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) DKPP Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan perencanaan tahunan perangkat daerah dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik dari aspek kebijakan nasional/daerah, hasil evaluasi, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun ketersediaan anggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja DKPP Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk: (1) menjamin kesesuaian rencana kerja dengan kondisi aktual; (2) mengakomodasi perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan; (3) menyesuaikan dengan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran; (4) menyesuaikan dengan perubahan pagu anggaran; serta (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

1.3. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja DKPP Kota Bogor Tahun 2025 mengikuti sistematika penyusunan Renja DKPP Kota Bogor Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I tahun berjalan (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada laporan kinerja Semester I Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPD Kota Bogor 2025-2026. Dukungan terhadap misi Kota Bogor diuraikan melalui tujuan dan sasaran dinas dengan indikator tujuan dan sasaran yang mewakili pada setiap misi. Uraian dari tujuan dan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Untuk Tahun 2025, target kinerja pada tujuan dan sasaran kinerja dinas telah disesuaikan karena beberapa target indikator kinerja sudah terlampaui pada Tahun 2024. Penyesuaian target tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Penyesuaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka Penyusunan Renja Perubahan 2025.

Tabel 1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKPP Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA AKHIR TAHUN
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas serta pemerataan akses pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (nilai)		89,34
	Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan dengan harga terjangkau	Indeks Pemanfaatan Pangan (nilai)	85,90
	Sasaran 2: Meningkatnya akses pangan masyarakat	Indeks Keterjangkauan Pangan (nilai)	93,55

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA AKHIR TAHUN
Tujuan 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Predikat SAKIP DKPP (poin)		A
	Indeks Kepuasan Masyarakat DKPP (nilai)		3,56
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DKPP	Nilai SAKIP di lingkup DKPP (poin)	89,80
		Jumlah Inovasi DKPP yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) (Inovasi/tahun/ PD)	≥1
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda (%)	91
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan (%)	95
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup DKPP	Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup DKPP (poin)	89,11
Tujuan 3: Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) (%)		2,99
	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian/Kehutanan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	292,71

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2025

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian. Masing-masing urusan tersebut mengampu beberapa program dan kegiatan.

2.1.1. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN

Urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilaksanakan melalui 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.437.478.600,00. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sampai dengan Semester I Tahun 2025, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 729.835.220,00. Sedangkan realisasi fisik mencapai 16,45%.

Target kinerja urusan pangan pada Tahun Anggaran 2025 juga mengalami penyesuaian dengan pencapaian kinerja Tahun 2024. Penyesuaian tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPDP 2025. Masing-masing indikator program berikut target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Capaian Program Urusan Bidang Pangan
sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	2.400	-	-
		Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	63	-	-
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	83,7	-	-
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	15,08	-	-
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi (%)	95,3	-	-

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mempunyai 3 indikator kinerja, antara lain: Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein dan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Dari seluruh indikator program tersebut, belum dapat diketahui capaian targetnya, karena perhitungan dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diimplementasikan dalam 3 (tiga) kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**

   Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan, antara lain:

   a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

      Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun, dilaksanakan dengan indikator output: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun. Aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target indikator output tersebut, adalah Kajian Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kota Bogor. Sampai dengan Semester I Tahun 2025, aktivitas ini belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaannya adalah di Triwulan III dan IV.

   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

Dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dilaksanakan beberapa aktivitas, sebagai berikut:

- Sosialisasi B2SA;
- Lomba Cipta Menu (LCM) B2SA Tk. Kota dan Provinsi;
- Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan B2SA dalam rangka mengikuti LCM B2SA Tk. Provinsi

Sampai dengan Semester I Tahun 2025, aktivitas ini belum terlaksana karena jadwal pelaksanaannya masih menunggu arahan dari pusat.

2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Dalam kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan, antara lain:

a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Bogor adalah memberi gambaran ketersediaan baik produksi, impor maupun stok, dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk wilayah Kota Bogor.

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Kota Bogor dengan menggunakan data sekunder, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perikanan, dan Bidang Ketahanan Pangan). Jangka waktu pelaksanaan adalah 2 (dua) bulan, yaitu: bulan Agustus dan September 2025.

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini, antara lain:

- Gelar Pangan Murah (GPM); bertujuan untuk menyediakan bahan pangan yang murah dan berkualitas untuk masyarakat, mempermudah akses pangan bagi masyarakat, mempengaruhi harga pasar agar tidak terlalu fluktuatif, dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilakukan di setiap GPM, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dimana terjadi gejolak harga seperti menjelang Idul Fitri dilakukan di Kelurahan Genteng, Menteng, dan 5 (lima) hari berturut-turut di Balaikota Bogor dan menjelang Idul Adha di Alun-Alun Kota Bogor, Lapangan Sempur, serta Balai Besar Pasca Panen Cimanggu. Di luar acara menjelang HBKN, DKPP telah melaksanakan GPM sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan dalam 6 Kecamatan Kota Bogor, di antaranya adalah Kelurahan Cipaku, Kebon Pedes, Ciparigi, Margajaya, Cibuluh, Sindangrasa, Paledang, Menteng, Sindangbarang, Pasirjaya, Kebon Kalapa, Bantarjati, Genteng dan Sempur. Adapun produk yang ditawarkan diantaranya minyak goreng, beras, gula pasir, daging ayam, bawang merah, telur, cabai

merah, cabai rawit, terigu, daging sapi dan bahan pangan lainnya. Total Omzet penjualan GPM adalah sejumlah Rp 430.935.200,00. Dalam pelaksanaan GPM ini, DKPP bekerjasama dengan beberapa Vendor, yaitu: BULOG, PT. Bagus Multikarya Nusantara, Superindo, PT. Prima Freshmart, PT. Berdikari, PT. Anagata Anugrah Asia dan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI).

- Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada bulan Maret 2025. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Rapat Koordinasi HBKN adalah untuk melihat kesiapan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis menjelang perayaan hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri.

c. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah dan memicu kenaikan laju inflasi. Di Kota Bogor, harga komoditas bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi harga, antara lain: beras, jagung, kedelai tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, bawang, cabe, telur, dan daging. Untuk itu dilakukan pemantauan secara berkala agar harga pangan stabil, karena stabilnya harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Sampai dengan Semester I Tahun 2025, pelaksanaan pemantauan harga pangan di tingkat

grosir dan pengecer dilakukan setiap hari selama 6 (enam) bulan. Komoditas pangan yang dipantau harganya sebanyak 13 komoditi, antara lain: beras premium, beras medium, kedelai biji kering (impor), bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir curah/lokal, minyak goreng kemasan sederhana, dan tepung terigu curah.

Hasil yang didapat selama pemantauan harga pangan tersebut adalah harga pangan di Kota Bogor stabil

3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdapat satu sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pada Tahun 2025, target pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Bogor adalah sebanyak 8.211 kg dalam bentuk beras, yang mana pengadaannya sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Beras cadangan pangan ini kemudian disalurkan kepada 410 (empat ratus sepuluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data P3KE di Kelurahan Muarasari dan Kelurahan Cibuluh dan masing-masing menerima 10 (sepuluh) kilogram beras.

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Program Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai 1 indikator kinerja, yaitu: Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Pada Tahun 2025, target PoU Kota Bogor adalah 4,77 %. Sampai dengan Semester I Tahun 2025, target ini belum dapat diketahui capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun.

Program Penanganan Kerawanan Pangan diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

   Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan pangan di suatu wilayah. Peta ini penting karena menjadi indikator kinerja pembangunan pangan di daerah.

   Penyusunan peta FSVA menghasilkan laporan analisis yang mencakup: sebaran daerah rentan dan tahan pangan, faktor penyebab kerentanan pangan, rekomendasi kebijakan dan program untuk pengentasan daerah rentan pangan.

   Penyusunan peta FSVA Kota Bogor sampai dengan akhir Semester I TA 2025 masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan, dimana penyusunannya mengacu kepada Panduan Penyusunan Peta FSVA yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang bersifat pemantauan terhadap situasi pangan dan gizi wilayah, seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional. Pemantauan ini merupakan bagian dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang berfungsi sebagai instrument/alat *early warning system* (sistem peringatan/deteksi dini), sehingga situasi pangan dan gizi wilayah tetap terkendali.

Untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sangat dibutuhkan peran aktif semua OPD terkait (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappeda, Dinas Kesehatan, DisKUKMdagin, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol-PP, BPBD, 6 Kecamatan se-Kota

Bogor dan BPS) yang memiliki akses dalam pembinaan di masyarakat dari mulai pembinaan dan pengawasan ibu hamil/proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran sampai dengan proses pertumbuhan tingkat anak-anak, remaja dan dewasa yang sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi yang bersangkutan. Setiap OPD sesuai tusi berperan aktif dalam penyediaan data untuk penghitungan analisis kewaspadaan pangan dan gizi, mengingat kondisi pangan dan gizi dimulai dari insan berada di dalam kandungan (*stunting*).

Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota terdapat aktivitas untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.

Lokasi kegiatan berada di wilayah Kota Bogor. Sampai dengan Semester I Tahun 2025, telah terlaksana:

- Rapat Koordinasi SKPG tanggal 17 April 2025;
- Sosialisasi Keselamatan Pangan tanggal 13 Februari 2025
- Sosialisasi Keselamatan Pangan tanggal 28 Mei 2025

Hasil analisis SKPG dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Akses Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan. Untuk Kota Bogor, aspek ketersediaan pangan tidak diperhitungkan. Berdasarkan hasil kajian, untuk wilayah-wilayah non tanaman pangan seperti wilayah perkebunan, nelayan, peternakan dan perkotaan,

harga beras merupakan indikator yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan atau kerawanan pangan dan gizi karena pola konsumsi pangan wilayah ini cenderung pola tunggal beras (WFP,2016), sehingga berdasarkan hal tersebut pada analisis SKPG untuk wilayah perkotaan hanya menggunakan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Aspek akses pangan dilihat dari harga 6 komoditas pangan di tingkat konsumen yang meliputi harga beras, jagung, minyak goreng, gula pasir, daging ayam dan telur ayam. Harga 6 komoditas pangan tersebut dijadikan indikator untuk melihat situasi pangan dan gizi dari segi akses pangan pada setiap kecamatan di Kota Bogor. Perhitungan dari segi aspek akses pangan dilihat dari harga pangan bulan berjalan dengan harga pangan 3 bulan sebelumnya. Situasi waspada dapat terjadi karena adanya fluktuasi harga pada bulan berjalan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya.

Aspek akses pangan setiap bulan pada tingkat kecamatan di Kota Bogor Tahun 2025 akan divisualisasikan melalui peta SKPG.

b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan intervensi bantuan pangan menggunakan dana APBD Kota

Bogor. Intervensi bantuan pangan dari dana APBD murni, diberikan kepada 3 Kelurahan Prioritas 3 (agak rentan pangan) berdasarkan hasil kajian Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kota Bogor Tahun 2024, yaitu: Kelurahan Genteng, Panaragan, dan Balumbang Jaya, masing-masing 100 paket berisi 5 kg beras dan 1 kg telur.

Intervensi bantuan pangan dari pengalihan efisensi anggaran, diberikan selain berdasarkan hasil kajian prioritas 3 dan 4, juga berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Jumlah paket bantuan yang diberikan sampai dengan bulan Juni 2025 adalah 1.349 paket, yang dibagikan kepada 10 kelurahan dengan jumlah penerima manfaat bervariasi dari masing-masing kelurahan. Paket bantuan yang diberikan terdiri dari: beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kg, dan telur 2 kg.

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Program Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai 1 indikator kinerja, yaitu: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi. Pada Tahun 2025, target indikator tersebut adalah 95,5%. Sampai dengan Semester I Tahun 2025, capaian target tersebut belum dapat diketahui karena akan diperhitungkan pada akhir tahun.

Program Pengawasan Keamanan Pangan diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota hanya melaksanakan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, yang di dalamnya terdapat uji mutu pangan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar cemaran atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya yang terkandung dalam makanan. Pelaksanaan kegiatan dimulai Bulan Februari sampai dengan Desember 2025.

Sampel pangan yang diuji terdiri dari pangan segar asal tumbuhan, Sebanyak 9 jenis, yang diperoleh dari pedagang di Pasar Bogor, Pasar Sukasari, Pasar Padasuka, Pasar Kebon Kembang dan Pasar Merdeka. Parameter yang diujikan, antara lain: formalin, pewarna sintetis, pestisida, Pb dan *E. coli*.

2.1.2. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

Penanganan Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.716.499.700,00. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025 tercapai realisasi keuangan sebesar Rp 337.937.439,00 atau 7,17%.

Capaian kinerja pada masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (%)	32,68	-	-
		Persentase pemenuhan sarana peternakan (%)	48,72	-	-
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor (%)	63,1	-	-
		Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan yang dilayani RPH (%)	1,54	-	-
		Persentase peningkatan retribusi RPH (%)	1,54		
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	47,62	-	-
		Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)	83,25	-	-
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)(%)	18,42	-	-
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Capaian Bina Kelompok Tani (%)	93,41	-	-
		Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)	1,81		

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu: persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura dan persentase pemenuhan sarana peternakan. Indikator-

indikator ini masing-masing mengakomodir bidang pertanian dan peternakan. Indikator yang digunakan untuk bidang pertanian adalah persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura dengan target 32,68%. Target ini merupakan angka rata-rata, yang dipenuhi dari persentase pemenuhan sarana pertanian meliputi: benih padi inbrida, benih jagung manis, benih kacang tanah, bibit talas, bibit umbi jalar, bibit umbi kayu, benih cabe, benih kangkung, benih bayam, benih pokcoy, benih sawi, bibit jahe, bibit kelor, bibit sereh wangi, bibit tanaman hias daun, bibit buah alpukat, bibit buah durian, mini green house vegetable pon, hidroponik, AB Mix, tenda lipat pasar tani, pestisida, meja lipat, rak besi, pupuk, jaring burung (26 item). Angka rata-rata tersebut dapat diketahui pada saat perhitungan di akhir tahun anggaran.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengampu 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Sarana Pertanian yang termasuk dalam sub kegiatan ini antara lain adalah Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

- Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya berada dalam pengawasan negara dengan harga yang sudah disubsidi oleh Pemerintah dengan sasarannya adalah petani yang sudah membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pupuk

yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN, yaitu: PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Sasaran penyaluran pupuk bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.

Pada Tahun 2025, Kota Bogor mendapat alokasi pupuk bersubsidi sekitar 99,35% dari RDKK yang diajukan oleh para petani. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Bulan Agustus 2025 masih rendah, karena terkendala oleh tata cara penebusan, dimana seharusnya penebusan sudah harus menggunakan kartu tani, namun di Kota Bogor masih secara manual. Rincian penyaluran pupuk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi s.d. Semester I Tahun Anggaran 2025

No.	JENIS PUPUK	RDKK (kg)	ALOKASI (kg)	PERSENTASE (%)	PENYALURAN s.d. JUNI 2025 (kg)
1.	Urea	77.700	79.700	102,57	8.445
2.	SP36	0	0	0	0
3.	ZA	0	0	0	0
4.	NPK	44.700	41.900	93,74	4.004
5.	Organik	0	0	0	0
	Jumlah	**122.400**	**121.600**	**99,35**	**12.449**

- Kartu Tani

Kartu tani adalah sebuah alat transaksi berupa kartu debit multifungsi yang memuat informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan sarana produksi pertanian (Saprotan), informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan untuk transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman dan yang lebih utama sebagai data penerima subsidi dan bantuan pemerintah. Kartu tani dapat digunakan juga untuk memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Sasaran kartu tani adalah petani yang sudah membuat RDKK dan tergabung dalam kelompok tani. Petani yang belum tergabung dalam kelompok dihimbau untuk masuk dalam kelompok yang terdekat dengan domisili/tempat tinggal.

Manfaat kartu tani antara lain: memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi dan informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah; menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran; ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi; kemudahan akses pembiayaan (KUR); menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif); biaya simpanan lebih ringan; mendapatkan program Prona (BPN).

Kartu tani yang sudah diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri sebanyak 600 kartu akan tetapi yang sudah terdistribusi berjumlah 560 kartu, sisa kartu sebesar 40 adalah *reject* karena yang

bersangkutan sudah meninggal atau pindah rumah. Dalam setiap kartu tertera kode kios masing-masing wilayah, sehingga tidak bisa membeli di sembarang tempat.

Pada Tahun 2025, dari tiga kios yang sudah ditunjuk secara resmi, hanya satu kios masih aktif, yaitu Kios Tani Mandiri di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Upaya untuk menambah jumlah kios pengecer agar lebih memudahkan petani di luar Kecamatan Bogor Barat menebus pupuk telah dilakukan, akan tetapi belum membuahkan hasil. Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025, penebusan pupuk oleh petani ada yang sudah menggunakan kartu tani, namun ada pula yang masih menggunakan cara manual.

- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian untuk mengatasi kerugian petani. Premi asuransi yang dibayarkan adalah sebesar Rp.180.000,-/Ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,- /Ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/Ha/MT.

Pada Tahun 2025 Kota Bogor mendapat target seluas 170 Ha, dan tetapi hanya 81 Ha dari hasil verifikasi dan validasi yang dicover AUTP, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali. Rencananya AUTP akan direalisasikan pada bulan September.

Terkait dengan sarana pertanian tersebut di atas, telah dilaksanakan pemberian bantuan kepada

Petani melalui Kelompok Tani berupa pupuk non subsidi, benih sayuran dan bibit tanaman buah, sayuran dan tanaman obat yang diberikan kepada Kelompok Tani, Komunitas Masyarakat, maupun instansi pemerintahan sebanyak 3.390 Kg untuk pupuk dan 152 bibit tanaman buah.

Hasil yang dicapai dengan pemberian bantuan pupuk dan bibit tanaman adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan, mendukung ketahanan

Kelompok Penerima bantuan dari bulan Februari s.d. Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Jenis Bantuan		Volume
		Pupuk	Bibit	
1.	KWT Pitaloka	Pupuk kandang		20 sak
2.	Kelurahan Baranangsiang	Pupuk kandang		20 sak
			Bibit buah	14 pohon
3.	KTD Harapan Mulya	Pupuk kendang, urea, SP36		20 sak
4.	KWT Mawar Melati, Kel. Katulampa	Pupuk kandang		20 sak
5.	KTD Lemah Duhur, Kel. Mulyaharja	SP36, urea		8 karung
6.	KWT Swaga	Pupuk kandang		20 sak
7.	KWT Sriwijaya, Kel. Pasir Jaya	Pupuk kandang		20 sak
8.	KWT Mekar Saluyu, Kel. Pasir Kuda	Pupuk kandang		20 sak
9.	KWT Caringin, Kel. Margajaya	Pupuk kandang		20 sak
10.	KWT Sekar Mulya,Kel. Pasir Mulya	Pupuk kandang		20 sak
11.	KWT Muliasari	Pupuk kandang		20 sak
12.	Kecamatan Bogor Timur	Urea, Pupuk kandang		21 karung
13.	KWT Ciriwis, Kel. Cipaku	Pupuk kandang		10 sak
14.	KWT Sereh Wangi, Kel. Genteng	Pupuk kandang		10 sak
15.	KTD Mustika Tani	Urea, subur kali		6 karung

No.	Nama Penerima	Jenis Bantuan		Volume	Keterangan
		Pupuk	Bibit		
16.	KWT Bersahaja, Kel. Kebon Pedes	Pupuk kandang		10 sak	
17.	KWT Asri, Kel. Bubulak		Bibit buah	14 pohon	Durian, manga, rambutan, alpukat, jambu air, jambu biji, jeruk
18	Kelurahan Kebon Pedes		Bibit buah	30 pohon	
20.	KWT Abhinaya Satya Lestari		Bibit buah	14 pohon	
21.	Kodim 0606		Bibit buah	5 pohon	Durian, alpukat, rambutan
22.	Polresta Bogor Kota		Bibit buah	15 pohon	Durian
23.	LLI (Lembaga Lansia Indonesia)		Bibit buah	20 pohon	
24.	SMPN 11 BOGOR		Bibit buah	21 pohon	
25.	Paguyuban Cipaku		Bibit buah	5 pohon	Kelapa
26.	Ketua RW 07 Kom Kel Bondongan		Bibit buah	10 pohon	Kelapa
27.	Kelurahan Kedung Waringin		Bibit buah	18 pohon	

b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, antara lain:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (Musrembang dan Pokir)

  Penyediaan peralatan dan perlengkapan pertanian dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat melalui Musrembang dan Pokir. Peralatan dan perlengkapan tersebut terdiri dari: mesin potong rumput 4 tak 1 unit, cangkul 5 unit, gunting stek 5 buah, handsprayer kapasitas 5 liter 2 unit, garpu 5 buah, kored/cengkrong 5 buah, Cabe Merah/Kriting 10 sachet, cabe rawit 30 sachet, caisim 50 sachet, kangkung spesifikasi: kangkung 50 sachet, timun 50 sachet, tomat 50 sachet.

  Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025, penyediaan peralatan dan perlengkapan pertanian masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2025.

- Kampung Durian di Kota Bogor.

  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan pembinaan terhadap Kampung Durian Rancamaya berupa bantuan Pupuk dan Pestisida untuk pemeliharaan tanaman durian. Tahun 2025 ini direncanakan akan diserahkan bantuan pupuk berupa 200 Kg SP36, 200 kg ZA, 250 kg NPK dan 2 liter pupuk cair yang

diperuntukan sebanyak 3500 pohon durian dengan luas lahan 3 Ha. Kebutuhan pupuk untuk kampung durian selama 1 tahun (3 kali pemupukan) adalah pupuk kandang 72.300 Kg, NPK 560 Kg, ZA 560 Kg, Kapur 560 Kg, Kalsium Boron 560 Kg dan Pestisida 1,6 Ltr. Pemberian bantuan pupuk dari DKPP hanya mencukupi 35 % dari kebutuhan atau setara 1 kali pemupukan. Produksi durian dari existing yang (pohon besar/berbuah) yaitu sebanyak 800 pohon menghasilkan 48.000 butir buah (asumsi 1 pohon menghasilkan rata-rata 60 butir buah). Dengan berat rata-rata 4 Kg/butir dan harga per Kg Rp. 150.000, maka nilai produksi adalah 28.800.000.000.

Tujuan diberikannya bantuan pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas durian rancamaya.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025, aktivitas ini masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan akan selesai pada bulan Juli 2025.

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Sub kegiatan ini lebih difokuskan kepada pencapaian target indikator program yang kedua, yaitu: persentase pemenuhan sarana peternakan, dengan target 49,54%. Target ini merupakan angka rata-rata, yang dipenuhi dari persentase pemenuhan kebutuhan pakan ternak (unggas), sarana bibit

unggas dan hasil Inseminasi Buatan (IB) pada sapi.

Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini, antara lain:

- Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)

  Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknik reproduksi buatan yang bisa digunakan pada hewan ternak, umumnya ruminansia besar. Di Kota Bogor penerapan IB dilaksanakan pada sapi perah dan sapi potong. Pelaksanaan IB di Kota Bogor disinkronkan dengan program unggulan Kementerian Pertanian, yaitu SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang mulai dicanangkan pada tahun 2020. SIKOMANDAN juga bertujuan untuk menambah populasi sapi dan kerbau dalam rangka memenuhi produksi daging sapi dan kerbau secara nasional.

- Pengadaan Bibit Ternak (kambing) untuk Pokir

  Tujuan pengadaan Bibit Ternak (kambing) adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dari hasil budidaya ternak. Kambing yang akan dibudidayakan adalah sekitar umur 20 minggu. Kambing ini akan didistribusikan ke lokasi pokir Tahun 2025, yaitu KWT Munjul Ceria, Kel. Kayumanis.

- Pengadaan Bibit Lebah untuk Pokir

  Budidaya lebah madu (*Urban Bee*) di daerah perkotaan masih menjadi salah satu solusi bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pasca pandemi Covid-19. Hasil dari budidaya lebah madu ini berupa madu dan

propolis sangat bernilai ekonomi dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

Pada Tahun 2025, diberikan bantuan untuk budidaya lebah madu kepada 1 (satu) kelompok.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (lebah trigona) untuk Urban Farming

  Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (lebah trigona) dimaksudkan sebagai bantuan kepada kelompok tani penggiat urban farming.

- Updating Data Ternak

  Updating data ternak dimaksudkan untuk memantau jumlah populasi ternak yang ada di Kota Bogor, baik yang dibudidayakan oleh masyarakat maupun yang masuk dan keluar Kota Bogor melalui jalur perdagangan. Ternak yang dipantau adalah sapi pedaging, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam bukan ras dan itik.

  Pemantauan ini berguna juga untuk mengetahui sebaran populasi ternak per Kelurahan, sehingga memudahkan dalam pemantauan kesehatannya.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman

Pada sub kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman, aktivitas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Benih Padi, Sayuran, Bibit Buah, Bibit Tanaman Hias dan Tanaman Obat-obatan (Biofarmaka)

Pengadaan benih padi, sayuran, bibit buah, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan dimaksudkan untuk ketersediaan pembibitan yang ada di lahan kebun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebar kepada masyarakat tani yang wilayahnya mendapat kehormatan mewakili Kota Bogor dalam ajang lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan lomba-lomba di wilayah Kota Bogor. Selain di lokasi lomba, benih dan bibit disalurkan untuk kegiatan yang mendukung Gerakan Bogor Berkebun.

- Peningkatan produksi pertanian dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT)

  Pada tahun 2025 dilaksanakan pada Kelompok Tani Dewasa (KTD) Subur Makmur, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat dengan pemberian bantuan berupa kegiatan Irigasi Perpompaan Bertekanan yang dapat mengairi sawah seluas 20 hektar, diperoleh dari anggaran dekresi Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025 ini, KTD Subur Makmur akan mendapatkan bantuan berupa 1 unit traktor roda dua yang diperuntukkan untuk penambahan luas tambah tanam (LTT).

  Dengan pemberian bantuan ini, indeks pertanaman pada KTD Subur Makmur meningkat dari IP 2 menjadi IP 3 artinya tanam dan panen sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Produktivitas yang dihasilkan sebanyak 6,5 ton/hektar GKP (gabah

kering panen) atau setara 4,2 ton beras per hektar.

Terkait dengan hasil panen padi tersebut, Kota Bogor telah melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam hal penyerapan gabah yang bekerjasama dengan Perum Bulog. Gabah yang diserap dari petani sebanyak 37.153 kg atau 37,153 ton, dengan senilai Rp. 6.500 per kilogram.

Tabel ....

Daftar kelompok tani yang melaksanakan Panen dan Serap Gabah oleh Bulog periode Januari – Juni 2025)

No.	Nama Kelompok	Volume Serapan (Kg) GKP
1.	KTD Subur Makmur, Kel. Pasir Jaya	22.044
2.	KTD Bumi Pakuan	1.902
3.	KTD Lemah Duhur, Kel. Mulyaharja	1.004
4.	KTD Bina Sejahtera, Kel. Bubulak	2.403
5.	KTD Sabaraya, Kel. Balumbang Jaya	3.014
6.	KTD Sirnagalih Mandiri, Kel. Katulampa	2.468
7.	KTD Bangun Tani Hias, Kel. Katulampa	4.318
	Total Serapan	37.153

- Bogor Agro Eduwisata Farm dan Nurseri (BERSERI)

Nursery dalam konteks hidroponik mengacu pada tahap awal pertumbuhan tanaman, di mana bibit ditanam dan dikembangkan sebelum dipindahkan ke sistem hidroponik yang lebih besar. Proses ini penting untuk memastikan bibit tanaman siap dan kuat sebelum dipindahkan ke media hidroponik.

Dengan melakukan nursery hidroponik secara tepat, DKPP dapat memastikan bibit tanaman siap dan kuat sebelum dipindahkan ke sistem hidroponik yang lebih besar, sehingga

meningkatkan peluang keberhasilan budidaya hidroponik dengan kualitas baik sesuai keinginan Pasar Modern/Supermarket.

DKPP akan menggunakan 5 unit Nursery untuk berbagai model hidroponik dan jenis sayuran yang mempunyai nilai ekonomis tinggi (Kailan, Pagoda, Timun Jepang, Kale, Brocolli).

Nursery dalam konteks tanaman adalah tempat atau areal untuk kegiatan pembibitan benih menjadi bibit yang siap ditanam di lapangan. Persemaian ini merupakan tahap awal penting dalam perbanyakan tanaman, membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan luar sebelum ditanam di lapangan.

Tahap persemaian (nursery) merupakan tahap pembibitan tanaman untuk menumbuhkan benih menjadi bibit dan perbanyakan tanaman secara *vegetative*. Persemaian ini menjadi bagian penting dalam perbanyakan tanaman dan menjadi tahap awal penyesuaian tanaman dengan kondisi lingkungan luar.

Saat ini, di Nursery DKPP terdapat 2 unit greenhouse yang sudah berjalan pemeliharaan untuk pembudidayaan tanaman anggur. Jenis anggur yang ditanam sebanyak 9 jenis, yaitu: Jupiter, Angjelika, Gosv, Sangsejerta, Julian, Ninel, Taldun, Tamalei, dan Ceocela.

KTD Rancamaya Tani (Rancatan), kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan melakukan usaha tani budidaya Anggur (jenis ARRA 15 dan

Jupiter), penjualan bibit anggur, serta menerima konsultasi dan edukasi/pelatihan budidaya anggur. Di KTD Rancamaya Tani (Rancatan) sudah ada 10 anggota kelompok yang sudah menanam anggur di pekarangan rumah. Selanjutnya, rencana akan dikembangkan lagi ke anggota yg lainnya. Dengan adanya usaha budidaya anggur di Kota Bogor, keberadaan Nursery anggur bisa menjadi sumber bibit untuk dikembangkan di masyarakat. Selanjutnya diharapkan terjadi peningkatan ekonomi Masyarakat melalui penjualan bibit anggur dalam polibag dan pot serta buah anggur.

Laboratorium Kultur Jaringan

Laboratorium kultur jaringan berfungsi sebagai tempat penelitian dan pengembangan, serta praktikum terkait kultur jaringan tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk memperbanyak tanaman secara in vitro, mengembangkan varietas unggul, melestarikan tanaman langka, dan melakukan penelitian dasar dalam bidang bioteknologi.

Untuk saat ini Laboratorium sedang dipersiapkan untuk kegiatan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan dan aklimatisasi untuk 5 jenis tanaman (3 jenis Anggrek, Nanas Bogor dan Pisang). Kegiatan dan aktivitas Kultur Jaringan dan Aklimitasi ini juga merupakan salah satu Edu Wisata yang akan diberikan.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai 2 (dua) indikator, yaitu: persentase pengelolaan kawasan LP2B dan persentase pemeliharaan prasarana pertanian. Target indikator persentase pengelolaan kawasan LP2B Tahun Anggaran 2025 adalah 10%, sedangkan target indikator persentase pemeliharaan prasarana pertanian adalah 85%. Capaian kinerja kedua indikator tersebut baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mengampu 2 (dua) kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B

Pada tahun 2025, sub kegiatan ini tidak memiliki aktivitas dikarenakan keterbatasan anggaran.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan sarana pelayanan masyarakat yang mengemban 3 fungsi, yaitu:

- **Fungsi teknis;** yaitu sebagai penghasil produk daging yang **ASUH** (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

- **Fungsi ekonomis;** yaitu sebagai unit penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel berikut menggambarkan target, perubahan target serta realisasi retribusi RPH sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Tabel 6.

Rincian Target PAD Awal dan Perubahan Tahun 2025

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET		s.d JUNI 2025		
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	% (target awal)	% (target perubahan)
1	Retribusi pemotongan sapi/kerbau	589.560.000	618.240.000	374.400.000	63,50	60,56
2	Retribusi pemotongan unggas	24.480.000	68.214.000	21.100.000	86,19	30,93
3	Retribusi pemotongan kambing/ domba	35.960.000	13.546.000	21.500.000	59,79	158,72
	JUMLAH	**650.000.000**	**700.000.000**	**417.000.000**	**64,15**	**59,57**

Perubahan target PAD di RPH dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian PAD RPH sampai dengan Semester I Tahun 2025.

Fungsi sosial; yaitu memberikan ketentraman batin kepada masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit zoonosis dan keracunan makanan (*Food Born Disease* dan *Food Born Intoxication*) melalui penyediaan daging yang ASUH, serta menjadi tempat alternatif peningkatan kesejahteraan dan solusi bagi masyarakat sekitar RPH.

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengampu 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

1. **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

      Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya hewan/ternak yang sehat (bebas penyakit zoonosis), mendeteksi penyakit hewan secara dini dan mencegah kasus penyakit hewan menular. Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain:

      - Pelaksanaan *Biosecurity* (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan) dalam upaya Pengendalian Penyakit Flu Burung

        Pelaksanaan desinfeksi kandang dan lingkungan dilaksanakan 2 putaran dalam setahun. Masing-masing putaran dilakukan di 34 kelurahan. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah bakteri patogen agen penyebab penyakit di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan potensi terjadinya penyakit hewan ternak.

      - Pencegahan Penyakit Rabies

        Rabies merupakan penyakit zoonosis yang

dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan yang terkena penyakit rabies seperti anjing, kucing, kera dan beberapa hewan berdarah panas lainnya. Pada manusia rabies merupakan *culdesac* atau *dead end,* yaitu tidak dapat ditularkan ke manusia lain. Sampai dengan sekarang belum pernah ditemukan kasus rabies pada hewan di Kota Bogor. Namun upaya pencegahan rabies tetap harus dilakukan karena secara geografis Kota Bogor terletak berdekatan dengan kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi yang merupakan daerah positif rabies. Beragam upaya pencegahan penyakit rabies telah dilakukan sejak awal tahun sampai dengan Semester I Tahun 2025, yaitu: berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor jika ditemukan kasus Gigitan oleh Hewan Pembawa Rabies (HPR) pada manusia dan vaksinasi rabies pada HPR.

- Tindakan Preventif, Kuratif dan Suportif pada Penyakit Hewan Menular/Tidak Menular

  Penyakit pada hewan dapat dikategorikan menjadi penyakit menular dan tidak menular, serta dapat diklasifikasikan lagi menjadi penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya) dan penyakit non zoonosis. Rata-rata penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dan/atau diobati, tetapi ada pula penyakit yang tidak dapat diobati sehingga harus dilakukan vaksinasi atau peningkatan imunitas seperti pemberian suplemen vitamin untuk mencegah/menurunkan tingkat morbiditas/mortalitas penyakit-penyakit tertentu.

Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner untuk ternak-ternak dan hewan kesayangan di Kota Bogor, antara lain: pemberian vitamin (preventif dan suportif), pengobatan hewan (tindakan kuratif).

- Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan terhadap hewan sakit dan pencegahan terhadap penyakit pada unggas. Pengobatan dilakukan terhadap beberapa kasus penyakit seperti penyakit-penyakit infeksius dan non infeksius, gangguan pencernaan, gangguan reproduksi dengan pemberian vitamin, antibiotik, obat cacing dan antiparasit.

Pelayanan Kesehatan Hewan di Istana Bogor dan Kuntum Nursery. Istana Bogor bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penanganan kesehatan hewan yang ada di Istana Bogor, antara lain: kuda, rusa totol, domba, unggas hias, burung Merak, burung kicau, angsa, itik, ayam, kura-kura, kucing dan kelinci. Pelayanan berupa pengobatan, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium dan memberikan informasi tentang manajemen pemeliharaan hewan/ternak yang baik dan benar. Selain Istana Bogor di Kota Bogor terdapat tempat wisata Agro Edukasi yaitu Kuntum Nursery. Salah satu aktivitasnya adalah wisata ternak/unggas dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan/ternak. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan/ternak yang ada seperti ternak sapi, kuda, kerbau, domba, kambing, unggas, burung, musang, kelinci dan marmut.

- Pemeriksaan Ektoparasit dan Endoparasit

  Endoparasit maupun ektoparasit dapat mempengaruhi tingkat produksi ternak seperti penurunan susu pada ternak perah atau pertambahan bobot tubuh yang lambat pada ternak pedaging. Oleh sebab itu upaya pencegahan (preventif) maupun pengobatan (kuratif) sangat diperlukan dalam mencegah dan mengatasi, baik endo maupun ektoparasit.

  Salah satu jenis penyakit endoparasit yang paling umum pada ruminansia yaitu cacingan. Penyakit ini pada umumnya jarang menimbulkan penyakit yang serius bahkan kematian akan tetapi menyebabkan hambatan pertumbuhan berat badan sehingga secara ekonomis dapat merugikan peternak. Untuk mengetahui ada tidaknya infestasi didalam tubuh ternak tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Adapun yang diperiksa di Puskeswan adalah feses ternak ruminansia.

- Pemberian Rekomendasi Keluar Masuk Hewan

  Dalam rangka pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan, dipandang perlu melakukan penertiban terhadap pemasukan ternak ke Kota

Bogor. Pemeriksaan ini diharapkan dapat terus dilakukan dalam rangka penertiban hewan yang masuk ke Kota Bogor sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga hewan yang masuk tidak membawa bibit penyakit.

2. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

- Bursa Hewan Qurban

  Pada tahun 2025 Bursa Hewan Qurban (BHQ) kembali dilaksanakan setelah tahun sebelumnya sempat vakum karena merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Aktivitas ini bekerjasama dengan Puslitbangnak Bogor. Selain untuk penjualan ternak qurban, BHQ juga merupakan salah satu cara pengawasan dan pencegahan masuknya PMK ke Kota Bogor, mengingat sebagian besar ternak yang dijual di Kota Bogor berasal dari luar Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di Lapak (Ante Mortem)

  Aktivitas ini dilaksanakan pada saat menjelang sampai dengan Hari Raya Idul Adha, dimana banyak hewan ternak, yaitu sapi dan domba/kambing, yang masuk ke Kota Bogor dari berbagai daerah untuk dijual sebagai hewan qurban, selain dari Kota Bogor sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, DKPP bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Polbangtan sebagai petugas pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban. Selain pemeriksaan, dilakukan pula sosialisasi kepada pedagang hewan kurban mengenai hewan yang layak dijual dan kesehatan hewan selama masa penjualan atau selama masa penampungan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan.

Pemeriksaan dilakukan untuk memantau kondisi fisik hewan qurban. Kriteria hasil pemeriksaan meliputi sehat dan tidak sehat dan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat hewan kurban secara syariat. Jika ditemukan hewan yang tidak layak jual, akan diberikan himbauan pada pedagang untuk tidak menjual hewan tersebut. Apabila ada hewan yang berpenyakit, sebaiknya tidak dicampur dengan hewan yang sehat.

3. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Pangan Asal Hewan (PAH) adalah bahan yang mudah terkontaminasi oleh mikroba patogen. Mikroba dalam pangan asal hewan bisa berupa bakteri, virus, parasit dan protozoa. Bahaya mikrobiologi pada bahan pangan dapat berasal dari lingkungan penjualan atau penyajian yang tidak bersih, pekerja yang kotor dan menderita penyakit

infeksi, peralatan atau wadah yang tidak bersih dan kontaminasi silang antara makanan yang telah dimasak dengan bahan mentah.

Terkait dengan hal tersebut, dilakukan beberapa aktivitas, antara lain:

- Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan (PAH) pada Hari Raya Idul Adha 1444H

  Pengawasan kesehatan dan keamanan Pangan Asal Hewan pada Hari Raya Idhul Adha meliputi pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* dilaksanakan bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kota Bogor dan Politeknik Pengembangan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor.

  Dari hasil pemeriksaan *postmortem* terhadap ternak yang telah dipotong masih ditemui ternak yang menderita *Helminthiasis* (kecacingan) terutama cacing hati (*Fasciola sp*), hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca. Berdasarkan hasil pemeriksaan *postmortem* umumnya daging aman, sehat dan layak dikonsumsi.

- Audit Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

  Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan diproduksi di unit usaha asal hewan yang menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan serta dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

  Sampai dengan Tahun 2022, Kota Bogor telah memiliki 12 unit usaha yang bersertifikat NKV.

- Pemberian Surat Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan dan Non Pangan Asal Hewan

  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tusi untuk memberikan rekomendasi pengeluaran dan pemasukan produk hewan dan non pangan asal hewan. Produk asal hewan antara lain: potongan daging, ayam beku, susu UHT, susu bubuk, minuman mengandung susu dan susu fermentasi, produk olahan daging ayam, produk olahan daging sapi, telur, dan sebagainya. Sedangkan produk non pangan asal hewan, antara lain: bulu bebek dan bulu angsa.

b. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengambilan dan pengujian sampel produk peternakan untuk diuji di laboratorium sebagai upaya monitoring dan *surveillance*. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas kesmavet yang telah memiliki sertifikat PPC (Petugas Pengambil Contoh).

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel, yang berasal dari pasar tradisional dan sentra peternakan sapi perah di Kota Bogor. Jenis pengujian adalah pengujian mikroba dengan parameter *E.coli* dan *Salmonella,sp.* Untuk masing-masing parameter, jenis sampel yang diuji terdiri dari: daging sapi, daging ayam, telur ayam dan susu sapi. Uji laboratorium dilakukan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH).

Tingginya tingkat cemaran mikroba pada pangan asal hewan menandakan banyak mikroba yang mengontaminasi produk pangan. Kontaminasi mikroba ini dapat terjadi saat hewan berada di peternakan, sebelum dan sesudah pemotongan, hingga saat transaksi penjual dan konsumen. Pemeliharaan hewan dan manajemen kandang yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya infeksi mikroba. Perlakuan hewan sebelum pemotongan juga berpengaruh terhadap jumlah mikroba yang terdapat dalam daging. Ternak yang baru diangkut dari luar kota hendaknya tidak dipotong sebelum cukup istirahat, karena akan meningkatkan jumlah bakteri dalam daging dibandingkan dengan ternak yang istirahatnya cukup. Pemotongan hewan juga menentukan tingkat cemaran mikroba. Mikroba dapat ditularkan melalui pekerja ataupun alat yang digunakan.

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian hanya mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu: persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Target pada Tahun 2025 adalah sebesar 39,25% (50 Ha dari 127,4 Ha luas baku sawah di Kota Bogor), dimana baru dapat dihitung pada akhir tahun. Program ini mengampu 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan salah satu kelembagaan perlindungan tanaman yang berperan langsung dalam gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di lapangan. BPT dibentuk dengan tujuan untuk membantu petani dalam mengendalikan OPT di daerah sumber serangan dan eksplosi serangan OPT. Dalam pelaksanaannya BPT dapat dibantu oleh Regu Pengendali Hama (RPH) atau petani setempat. Dalam operasional pengendalian, petugas harus bersentuhan langsung dengan bahan pengendalian, baik bahan pengendali alami/hayati maupun bahan pengendali kimia.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT), antara lain: 1) optimalnya gerakan pengendalian OPT secara dini; 2) meningkatnya peran serta masyarakat tani dalam upaya pengendalian OPT; 3) optimalnya penyediaan sarana pengendalian OPT; dan 4) terinventarisasinya stok pestisida dan sarana pengendalian OPT.

Operasional BPT di Kota Bogor dilaksanakan melalui:

- Penyediaan sarana pengendalian OPT

Sarana pengendalian OPT diperlukan sebagai cadangan (*buffer stock*) untuk antisipasi bila terjadi

sumber serangan OPT di lapangan yang melebihi ambang pengendalian. Sarana ini dapat dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mengingat pentingnya sarana tersebut, maka pada tahun 2025 DKPP melaksanakan pengadaan sarana berupa pestisida sebanyak 1 paket.

- Penguatan Regu Pengendali Hama (RPH)

  Regu Pengendali Hama (RPH) adalah kelompok petani yang telah diberikan pelatihan tentang pemanfaatan pestisida secara bijaksana untuk mengendalikan OPT di lapangan. Penguatan RPH merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan RPH. Dalam rangka penguatan RPH, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pertemuan sebanyak 1 kali.

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu: Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan satuan persen (%). Indikator ini mengukur persentase kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pengertian bantuan disini merujuk kepada bantuan dana maupun bantuan berupa pembinaan.

Pada Tahun 2025, target cakupan bina kelompok tani adalah 93,25%. Tingginya target ini merupakan penyesuaian atas hasil evaluasi pada tahun 2023, dimana capaian targetnya 93,08%.. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok tani aktif yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19. Program Penyuluhan Pertanian mengampu 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub

kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa melaksanakan aktivitas yang didanai dari APBD Kota Bogor, yaitu: Pelatihan Bagi Penyuluh Pertanian.

Pembinaan dan Penyuluhan kepada petani dilaksanakan secara rutin oleh Penyuluh dengan melakukan pertemuan setiap bulan di masing – masing kelompok binaan. Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini telah terbentuk 8 kelompok baru dan 2 kelompok restrukturisasi.

Delapan Kelompok Tani baru tersebut, antara lain:

1. KTD Kartini (kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah)
2. KTD Al Barokah (Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat)
3. KTD Al Barokah (kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara)
4. KTD Kabita (Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur)
5. KWT Cialuk (kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur
6. KTD Gemah Ripah loh Jinawi (kelurahan Babakan, kecamatan Bogor Tengah)

7. KTD Mekar Sauyunan (kelurahan Paledang, kecamatan Bogor Tengah)
8. KWT Lamping Asri (kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal)

Kelompok tani baru yang terbentuk memiliki bidang usaha budidaya pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan fasos fasum milik pemerintah Kota Bogor. Dampak pembentukan kelompok tani adalah bertambahnya jumlah masyarakat (anggota kelompok tani) yang dapat mencukupi kebutuhan pangan sehat (sayur, buah dan tanaman obat) di lahan pekarangan/lahan pertanian.

Restrukturisasi kelompok tani dilaksanakan sebagai upaya untuk menyegarkan atau memperbaharui kepengurusan dan kelembagaan kelompok tani, serta meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Kelompok Tani yang direstrukturisasi tersebut adalah:

1. KWT Caringin (kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat)
2. KTD Sirnasari (kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Barat)

Rekstrukturisasi kedua kelompok tersebut dilaksanakan karena adanya penggantian anggota, penggantian struktur pengurus dan penambahan anggota kelompok.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan ini memiliki beberapa aktivitas sebagai berikut: Bimtek Budidaya Jamur (bulan Maret), Bimtek Inovasi Terknologi Pertanian (Hidroponik) (bulan Maret), Bimtek Pasca Panen Hasil pertanian (bulan Juni), Bimtek Peningkatan kapasitas kelembagaan petani (bulan Juni), Workshop pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian (bulan Februari) dan Workshop Teknis Urban Farming.

c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Aktivitas dalam sub kegiatan ini, adalah pembuatan kebun contoh, yang dilaksanakan di lokasi KWT, antara lain: KWT lokasi lomba Hatinya PKK, KWT Munjul Ceria, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal (lomba P2WKSS). Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2025.

Bantuan ini diberikan karena tidak adanya kebun contoh dengan sistem pertanian terpadu di KWT yang mengikuti Lomba Tingkat Provinsi/Nasional, karena pada umumnya pertanian di Kota Bogor dilakukan di lahan sempit. Dengan adanya kebun contoh diharapkan dapat memotivasi petani dan penyuluh pertanian dalam menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga sehingga produksi pertanian meningkat.

2.1.3. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penanganan Urusan Kelautan dan Perikanan

dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 3 (tiga) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan, dengan total alokasi anggaran Rp 9.701.509.606,00. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp 400.459.871,00 atau 4,13%.

Capaian dari masing-masing indikator program sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Capaian Indikator Program Urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan Semester I Tahun 2025

NO.	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi)(%)	1	-	-
		Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias)(%)	1		
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (%)	1	-	-

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Indikator pada program ini adalah persentase peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan di Kota Bogor, meliputi: produksi ikan konsumsi dan produksi ikan hias. Target persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025 adalah sebesar 7,5%. Capaian target tersebut baru dapat dihitung pada akhir tahun anggaran.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yaitu:

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

a. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- Workshop Budidaya Ikan Hias

  Workshop Budidaya Ikan Hias dilaksanakan pada bulan Mei 2025, dengan peserta sebanyak 30 orang. Narasumber berasal dari pembudidaya ikan hias, dan penyuluh perikanan dari Balai Riset Pengembangan Budidaya Air Tawar (BRPBAT).

- Dempond Budidaya Ikan Hias

  Dempond ikan hias yang diberikan kepada masyarakat berupa akuarium dan rak beserta instalasinya dan indukan ikan hias koi beserta pakan ikan.

- Workshop Budidaya Ikan Konsumsi

  Dilaksanakan pada bulan Juli 2025, dengan peserta sebanyak 30 orang. Narasumber Workshop Budidaya Ikan Konsumsi antara lain: pembudidaya ikan konsumsi, dan penyuluh perikanan dari Balai Riset Pengembangan Budidaya Air Tawar (BRPBAT).

- Dempond Budidaya Ikan Konsumsi

  Dempond merupakan tindak lanjut dari Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi sebagai praktek lapangan bagi peserta pelatihan. Dempond budidaya ikan konsumsi diberikan kepada Pokdakan yang telah mengikuti workshop budidaya ikan konsumsi dan bersedia menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Dempond yang diserahkan ke masyarakat berupa kolam

terpal beserta instalasinya, benih ikan lele dan pakan ikan.

- Budidaya Ikan dengan Sistem Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember)

  Budikdamber mengadaptasi teknik budidaya aquaponik yang memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dalam satu wadah berupa ember. Sistem ini dapat diterapkan di wilayah perkotaan yang memiliki lahan sempit. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dapat mendukung ketersediaan pangan berupa ikan dan sayuran. Pengadaan Budikdamber Tahun 2025 disalurkan kepada KWT yang mengikuti lomba Hatinya PKK, KWT Munjul Ceria, Kelurahan Kayumanis (Lomba P2WKSS), dan mengakomodir usulan Pokir DPRD Kota Bogor.

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

   a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

      Output yang dihasilkan dari sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

      - Pengadaan Pakan Ikan

        Penyediaan pakan ikan diperuntukkan untuk kegiatan budidaya ikan di Balai Benih Ikan (BBI), Kelurahan Kencana dan Holding Ground Ikan Hias di Terminal Agribisnis (TA) Rancamaya serta fasilitasi ke masyarakat khususnya kelompok

pembudidaya ikan (Pokdakan) sebagai bentuk stimulan dengan harapan dapat menekan biaya operasional kegiatan budidaya ikan. Pakan ikan yang diperuntukkan untuk BBI dan TA, yaitu: cacing sutera, blood worm, artemia dan pakan pabrikan. Sedangkan pakan ikan yang diberikan kepada masyarakat/Pokdakan, yaitu: cacing sutera dan pakan pabrikan.

- Pengadaan Obat Ikan

  Penyediaan obat ikan meliputi garam ikan, ovaprim dan velvet orange.

- Pengadaan Indukan Ikan

  Salah satu bentuk fasilitasi ke Pokdakan adalah pemberian indukan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Jenis indukan yang diberikan, antara lain: ikan hias corydoras, ikan nila dan ikan lele.

- Uji Sampel Mutu Pakan Ikan

  Pengujian kimiawi terhadap pakan ikan buatan dimaksudkan untuk mengetahui kandungan zat gizi pakan. Kandungan gizi yang diuji meliputi kadar protein, lemak, karbohidrat, abu, serat dan kadar air. Pelet yang baik kadar airnya tidak lebih dari 10%. Selain itu, kandungan abu dan seratnya masing-masing kurang dari 5%. Untuk kadar protein, lemak dan karbohidratnya menyesuaikan jenis dan umur ikan yang akan diberi pakan. Sebagai patokan, pakan buatan yang baik pada umumnya harus mengandung protein lebih dari 25%, lemak tidak lebih dari 8% dan karbohidrat sekitar 12%.

Pengambilan sampel pakan ikan dilakukan di toko-toko pakan dan pakan mandiri yang dibuat oleh kelompok. Pengujian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB dengan parameter yang diujikan yaitu kadar karbohidrat, serat kasar dan protein.

- Pengadaan Peralatan Perikanan

  Penyediaan peralatan pendukung diantaranya sair, mesin hi blow, portable water pump, ph meter, plastik ikan, happa, peralatan listrik dan mesin pompa air.

- Pengadaan Budikdamber

  Pengadaan Budikdamber untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan lomba.

Sarana dan prasarana barang milik daerah (BMD) yang menjadi tanggung jawab DKPP, yaitu:

1. Balai Benih Ikan (BBI)

   Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Kelurahan Kencana difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembenihan ikan konsumsi, khususnya lele, nila dan gurame. Benih ikan yang dihasilkan disalurkan kepada pembudidaya ikan/masyarakat yang membutuhkan bantuan benih dalam rangka mendukung peningkatan produksi ikan di Kota Bogor.

   Sarana Produksi yang tersedia di BBI, yaitu: indukan ikan lele sangkuriang (55 ekor betina dan 10 ekor jantan), indukan ikan gurame (6 ekor betina dan 2 ekor jantan), dan indukan ikan nila

(600 ekor jantan dan 200 ekor betina).

2. Holding Ground di Terminal Agribisnis Rancamaya

Ikan hias yang dibudidayakan di Holding Ground TA Rancamaya yaitu Corydoras albino dan Corydoras sterbay.

3. Depo Pemasaran Ikan Hias di Jalan Binamarga

Depo Pemasaran Ikan Hias (DPIH) di Jalan Binamarga merupakan kios pemasaran ikan hias, tanaman hias air dan perlengkapannya. Saat ini kondisi bangunan depo banyak yang rusak parah sehingga melalui anggaran perubahan tahun 2025 diharapkan dapat membantu rehabilitasi bangunan depo.

b. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengambilan sampel ikan dan lingkungan budidaya dilakukan di kolam pembudidaya ikan yang sumber airnya berasal dari aliran sungai langsung tanpa menggunakan kolam tandon. Pengujian sampel dilaksanakan di Laboratorium Saraswanti Indo Genetech (SIG) di daerah Yasmin Bogor.

Tujuan dari pengujian sampel tersebut adalah untuk mengetahui kadar residu logam berat dan kandungan bakteri *E. coli* pada ikan yang dibudidayakan oleh Pokdakan. Jika positif mengandung logam berat, maka akan dilakukan pembinaan kepada Pokdakan agar tidak menggunakan air langsung dari sungai. Air harus ditampung terlebih dahulu dalam kolam penampungan dikarenakan air sungai umumnya mengandung residu logam dan bakteri. Selain itu juga ditekankan kepada Pokdakan agar wajib

menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis dari mulai proses pembenihan, pembesaran dan pembuatan pakan ikan.

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Indikator pada program ini adalah persentase peningkatan produk olahan hasil perikanan, dengan target 3% pada Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian target tersebut, telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

      Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan beberapa aktivitas, antara lain:

      - Pelatihan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP)

        SSOP dan GMP menjadi landasan dasar dalam menjamin mutu dan keamanan pangan produk perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, DKPP mengadakan Pelatihan SSOP dan GMP, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pengolah perikanan bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip dasar SSOP dan GMP yang dituangkan dalam panduan mutu.

Hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut adalah adanya pemahaman dan kemauan serta kemampuan pengolah untuk menerapkan SSOP dan GMP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai dengan karakteristik produk olahan. Beberapa kendala dalam penerapan SSOP dan GMP adalah keterbatasan prasarana UPI, seperti bangunan yang perlu dilengkapi dan di desain (*layout*) sesuai dengan kebutuhan yang memerlukan biaya cukup tinggi, belum seimbang dengan penghasilan yang didapat dari penjualan produk, sehingga perlu dilakukan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Indikator dalam penerapan SSOP dan GMP, yaitu telah dimilikinya Sertifikat GMP.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya monitoring dan pendampingan penerapan SSOP dan GMP. Monitoring dan pendampingan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melihat kesesuaian ruang produksi dengan panduan mutu unit pengolahan ikan; (2) melihat kondisi sanitasi ruang produksi dibandingkan dengan kartu kendali mutu; (3) melihat kesesuaian hasil produk olahan terhadap standar-standar cara pengolahan ikan yang baik.

- Bimtek SNI Produk Hasil Perikanan

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan bentuk kesesuaian atau rekomendasi produk akhir yang layak diterima konsumen. SNI tidak hanya pada produk non pangan tetapi juga ada SNI

khusus produk olahan hasil perikanan sehingga produk perikanan mempunyai daya saing.

Tujuan dari pelaksanaan Bimtek SNI ini adalah sebagai berikut: (a) pengolah memahami standarisasi dalam SNI; dan (b) pengolah mempunyai minat dan komitmen untuk menerapkan SNI.

Kendala yang dihadapi oleh pengolah produk perikanan terhadap sertifikasi SNI yaitu UPI belum memiliki sertfikat kelayak pengolah (GMP) karena persyaratan utama dalam pengusulan SNI adalah telah memiliki sertifikat kelayakan pengolah.

- Pengawasan Produk Hasil Perikanan

Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung ke pasar tradisional dan pasar modern dengan mengambil beberapa sampel produk ikan yang akan dilakukan uji laboratorium pada laboratorium yang sudah memiliki sertifikasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional.

Uji laboratorium dilakukan di Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), dengan parameter uji formalin. Sampel ikan diambil dari Pasar Bogor dan Pasar Merdeka.

Jika uji sampel ikan tersebut menunjukkan hasil positif, Bidang Perikanan akan melakukan koordinasi dengan pihak PD Pasar Pakuan Jaya selaku Pembina Pedagang Pasar. Adapun langkah-langkah pengendalian yang diusulkan kepada pihak PD pasar Pakuan Jaya adalah sebagai

berikut: (1) melakukan penelusuran asal muasal barang yang disuplai kepada pedagang pasar; (2) melakukan pengecekan rapid tes sewaktu-waktu pada saat produk akan masuk ke pasar; dan (3) memberikan pernyataan secara administrasi kepada para pedagang terkait penggunaan formalin.

- Pendampingan Mutu Produk Perikanan Sesuai dengan SNI

  Tujuan dari kegiatan ini adalah mengupayakan pendampingan terhadap produk yang dihasilkan agar mutu secara laboratorium sesuai dengan persyaratan mutu pada Standar Nasional Indonesia.

- Peningkatan Konsumsi Ikan

  Target konsumsi ikan tingkat Kota Bogor tahun 2025 adalah 31.749.711 kg. Capaian Kinerja tingkat konsumsi ikan ini dihitung secara tahunan.

  Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian konsumsi ikan adalah pelaksanaan promosi Gemarikan, bazar ikan dan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas).

- Safari Gemarikan

  Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah upaya mengkampanyekan makan ikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan. Kegiatan Gemarikan dilaksanakan melalui APBD dan Non APBD, dimana pada Tahun Anggaran 2025

difokuskan kepada upaya penanganan dan pencegahan stunting.

Paket Gemarikan yang diberikan berupa olahan ikan, yaitu: ikan jambrong krispy, abon ikan dan ikan tongkol serta otak-otak bandeng. Diharapkan kegiatan ini mampu menambah wawasan masyarakat tentang gizi ikan dan minat untuk selalu mengkonsumsi ikan.

- Bazar Produk Olahan Hasil Perikanan

  Dalam rangka upaya peningkatan pemasaran produk hasil perikanan, DKPP melakukan kegiatan bazar setiap Hari Selasa pekan kedua bertempat di Instalasi Perikanan Cibalagung. Peserta bazar merupakan binaan DKPP Kota Bogor. Program Bazar ini dimulai sejak Bulan Januari 2025. Dampak dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pendapatan UMKM dan tersalurkannya produk ikan kepada konsumen dengan harga terjangkau dan bermutu baik.

- Pelatihan Produk Olahan Hasil Perikanan

  Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, yaitu: meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan

produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	BIDANG URUSAN : NON URUSAN									
X.XX.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah (poin)**	**A**	**A**	**A**	**A**	**100**			
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah (poin)	**3,4**	**3,52**	**3,55**	**3,53**	**99,44**			
		1. Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup DKPP						**26,53**	**0**	**0**
		2. Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup DKPP						**28,55**	**0**	**0**
		3. Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup DKPP						**11,92**	**0**	**0**
		4. Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup DKPP						**22,8**	**0**	**0**
		5. Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan DKPP						**100**	**0**	**0**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu						100	0	0
		7. Persentase Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan						94	0	0
		8. Persentase Kepatuhan Anggaran						100	0	0
		9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA						95	0	0
		10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah						94	0	0
		11. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana						85,47	0	0
		12. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM						89,53	0	0
		13. Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan						85,75	0	0
		14. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan						95,68	0	0
X.XX.1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup	A	A	A	A	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah (poin)**								
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan (%)						**100**	**72**	**72**
X.XX.1.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	4	2	2	100,00	2	1	50
X.XX.1.2.01.01	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5	12	5	5	100,00	5	4	80
X.XX.1.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**50**	**50**
		Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan (%)						**100**	**50**	**50**
X.XX.1.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bln)	78	75	70	70	100,00	70	69	98,57
X.XX.1.2.02.07	Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	0	0	12	12	100,00	12	6	50
X.XX.1.2.06	**Kegiatan**	**Persentase pemenuhan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**38**	**38,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**kebutuhan operasional perangkat daerah (%)**								
X.XX.1.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	2	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.1.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	2	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.1.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	2	1	1	100,00	1	1	100,00
X.XX.1.2.06.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	2	1	1	100,00	1	0,5	50
X.XX.1.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)	1	2	1	1	100,00	1	1	100
X.XX.1.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,75	75
X.XX.1.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	95	95,00
X.XX.1.2.07.06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	10	10	2	2	100,00	8	5	62,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.1.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**50,00**	**50,00**
X.XX.1.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,50	50,00
X.XX.1.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,50	50,00
X.XX.1.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**46,47**	**46,47**
X.XX.1.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	12	26	23	23	100,00	36	8,00	22,22
X.XX.1.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	76	182	112	112	100,00	101	48,00	47,52
X.XX.1.2.09.11	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3	4	1	1	100,00	8	0,50	6,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09	**BIDANG URUSAN PANGAN**									
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah (%)**	**0**	**0**	**57,14**	**14,29**	**25,00**			
2.09.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah (%)**	**0**	**0**	**57,14**	**14,29**	**25,00**			
2.09.02.2.01.03	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	0	0	1	1,00	100,00			
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan energi (kkal/ kap/hari)**	**2.400**	**2.318**	**2.400**	**2.460,00**	**102,50**	**2.400**	**0**	**0,00**
		Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)	**63**	**76,4**	**63**	**81,87**	**129,95**	**63**	**0**	**0,00**
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	**82,7**	**83,1**	**83,7**	**89,80**	**107,29**	**84,7**	**0**	**0,00**
2.09.03.2.01	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya (kg)**	**276.335.938**	**248.579.285**	**276.335.938**	**0**	**0,00**	**253.575.729**	**0**	**0,00**
2.09.03.2.01.03	Sub kegiatan	Jumlah Koordinasi,	1	2	1	1	100	1	0,50	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan)								
2.09.03.2.01.15	Sub kegiatan Pemantauan Harga Dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (dokumen)	1	2	1	0	0	1	0,50	50,00
2.09.03.2.01.16	Sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (dokumen)	1	2	1	1	100	1	0	0,00
2.09.03.2.02	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)**	**12,50**	**5,19**	**12,5**	**0**	**0**	**7,57**	**7,57**	**100,00**
2.09.03.2.02.03	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	26,572 ton	27,401	1,17	0,00	0,00	8,211	8,21	100,00
2.09.03.2.04	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)**	**2100**	**1905**	**2.150**	**2.086**	**97,02**	**2.150**	**0,00**	**0,00**
		Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	**56**	**57,1**	**57**	**63,4**	**111,23**	**57**	**0,00**	**0,00**
2.09.03.2.04.01	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.04.02	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase jumlah penduduk rawan pangan (%)**	**15,81**	**15,28**	**15,08**	**14,96**	**99,22**			
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)						**4,77**	**0,00**	**0,00**
2.09.04.2.02	**Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Termutahirkannya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (peta)**	**0**	**0**	**1**	**1**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.04.2.02.02	Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (dokumen)	3	2	1	1	100,00	1	0,00	0,00
2.09.04.2.02	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah wilayah rawan pangan yang di intervensi (%)**	**25,00**	**284,31**	**41,67**	**75**	**180,00**			
		Persentase jumlah wilayah rawan pangan yang di intervensi						**25,00**	**25,00**	**100,00**
2.09.04.2.02.02	Sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	0,50	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.04.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	1,00	100,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi (%)**	**95**	**92,96**	**95,3**	**92,39**	**96,95**			
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi						**95,5**	**0**	**0,00**
2.09.05.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang diawasi (produk)**	**40**	**20**	**9**	**9**	**100,00**			
		Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang diawasi						**9**	**9**	**100,00**
2.09.05.2.01.05	Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	1	100,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase peningkatan produksi perikanan (%)**	**6,5**	**-337,74**	**7,5**	**-54,51**	**-726,80**			
		Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi)(%)						**1**	**0,00**	**0,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias)(%)						**1**	**0,00**	**0,00**
3.25.04.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Peningkatan kapasitas kelompok (jumlah kel terintervensi/ total kelompok pembudidaya ikan kecil) (%)**	**24**	**52**	**30**	**40**	**133,33**			
		Persentase Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok (%)						**30**	**0,00**	**0,00**
3.25.04.2.02.04	Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	2	12	2	2	100,00	2	1	50,00
3.25.04.2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Pemanfaatan sarana prasarana pembudidayaan ikan (%)**	**50**	**54**	**75**	**76,43**	**101,91**	**75**	**0,00**	**0,00**
3.25.04.2.04.02	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (unit)	3	5	3	3	100,00	3	1,00	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.04.2.04.04	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	0,50	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan (%)**	**3**	**-1335,67**	**4**	**-39,08**	**-977,00**			
		Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (%)						**4**	**0**	**0,00**
3.25.06.2.02	**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Presentase Usaha Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) (%)**	**4**	**4**	**4**	**4**	**100,00**	**4**	**1**	**25,00**
3.25.06.2.02.01	Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	2	4	2	2	100,00	2	1	50,00
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (%)**	**39,46**	**24,29**	**50,19**	**62,10**	**123,73**	**38,2**	0,00	0,00
		Persentase pemenuhan sarana peternakan (%)	**33,33**	**34,12**	**49,54**	**49,62**	**100,16**	**48,72**	0,00	0,00
3.27.02.2.01	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase kelompok yang menggunakan sarana pertanian dengan baik (%)**	**52,46**	**55**	**52,46**	**52,46**	**100,00**	**58,27**	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,50	50,00
3.27.02.2.01.02	Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0	0,00
3.27.02.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang dikelola (jenis)**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100,00**	**3**	**3**	**100,00**
		Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (jenis)	**12**	**12**	**12**	**12**	**100,00**	**12**	**12**	**100,00**
3.27.02.2.02.02	Sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	0,11	11,32

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.2.02.03	Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1	2	1	1	100,00	1	0,11	10,64
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase pengelolaan kawasan LP2B (%)**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0,00**			
		Persentase pengelolaan kawasan LP2B yang dibina Pemkot Bogor (%)						**63,1**	**0**	**0,00**
		Persentase pemeliharaan prasarana pertanian (%)	**85**	**86**	**90**	**90**	**100,00**			
		Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan yang dilayani RPH (%)						**1,52**	**0**	**0,00**
		Persentase peningkatan retribusi RPH (%)						**1,52**	**0**	**0,00**
3.27.03.2.01	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)**	**59**	**59**	**59**	**0**	**0,00**	**59**	**59,00**	**100,00**
3.27.03.2.01.01	Sub kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (dokumen)	1	2	1	0	0,00	1	0	0,00
3.27.03.2.02	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terpeliharanya Prasarana Pertanian (unit)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100,00**	**1**	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.07	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (unit)	1	1	1	1	100,00	1	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)**	**-2,19**	**-0,93**	**-2,24**	**-3,14**	**143,38**			
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)						**54,55**	0,00	0,00
		Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar (%)	**19**	**17,37**	**17**	**13,89**	**118,29**			
		Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)						**83,5**	0,00	0,00
3.27.04.2.01	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan terperiksa (ekor)**	**2.300**	**5.175**	**2.300**	**2507**	**109,00**			
		Persentase wilayah yang terkendali (%)							0,00	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.04.2.01.08	Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)	1	2	1	1	100,00	1	0,02	1,74
3.27.04.2.02	**Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan yang diterbitkan SKKH (ekor)**	**2.100**	**4.773**	**2.100**	**0**	**0,00**			
3.27.04.2.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	2	1	1	100,00			
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah hewan yang terlayani (ekor)**							**0,00**	**#DIV/0!**
	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner						1	0,00	0,00
3.27.04.2.04	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Peningkatan pengawasan penerapan persyaratan teknis unit usaha produk peternakan (%)**	**66,67**	**76,47**	**66,67**	**79,17**	**118,75**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (surat)							**0,05**	**#DIV/0!**
3.27.04.2.04.02	Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	1	2	1	1,00	100,00	1	0,52	52,22
3.27.04.2.04.04	Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen)								
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (%)**	**39,25**	**39,25**	**39,25**	**39,25**	**100,00**	**39,25**	**39,25**	**100,00**
3.27.05.2.01	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Luas lahan sawah yang terkendali dari serangan OPT (Ha)**	**50**	**50**	**50**	**50**	**100,00**	**50**	**40,74**	**81,49**
3.27.05.2.01.01	Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	50	50	50	50	100,00	50	40,04	80,09
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Bina Kelompok Tani (%)**	**90,21**	**93,08**	**93,25**	**93,28**	**103,41**	**93,25**	**0**	**0,00**
		Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)								**#DIV/0!**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang naik kelas (kelompok)**	**5**	**5**	**5**	**3**	**60,00**	**5**	**0,00**	**0,00**
3.27.07.2.01.01	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	3	6	6	6	100,00	6	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	5	5	5	3	60,00	5	0,05	0,93
3.27.07.2.01.03	Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	3	6	3	3	100,00	3	2,73	90,95
	Sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)						19	19,00	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan SKPD didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar (urusan pangan) dan urusan pilihan (urusan pertanian serta kelautan dan perikanan), tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun NSPK. Oleh sebab itu, analisis kinerja pelayanan SKPD hanya dapat didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020. Secara ringkas indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester I Tahun 2025

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Capaian		S.d. Semester I Tahun 2025		
			2020	2021	Target	Capaian	%
INDIKATOR KINERJA KUNCI							
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,7	75,84	70,56	83,7	-	-
2.	Penguatan cadangan pangan (ton)	8,18	-	-	10	-	-
3.	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	0,66	0,69	0,7	0,651	-	-
5.	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	0,74	0,76	0,78	0,68	-	-
6.	Produksi sektor pertanian (padi)(ton)	5.498	4.186	5.496	3.401,20	-	-

III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
A.	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**						
1.	**PANGAN**						
1.	Ketersediaan pangan utama	231,01	231,2	156,18	151,84	-	-
2.	Ketersediaan energi perkapita	2.592,90	2.375	2.230	2,400	-	-
3.	Ketersediaan protein perkapita	110,3	68	63,6	63	-	-
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	93,96	90,81	93,75	95,3	-	-
C.	**FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**						
1.	**PERTANIAN**						
1.	Produktivitas padi per hektar	7,12	7,18	7,28	7,33	-	-
2.	Cakupan bina kelompok petani	69,35	75,08	76,37	93,25	-	-
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-2,72	19,83	-2,1	-2,24	-	-
4.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	13,14	13,4	11,72	13,91	-	-
2.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.	Produksi Ikan Konsumsi (ton)	5.063,14	5.150,99	5.205,69	5.303,70	-	-
2.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/th)	28.599.839	28.899.474	29.991.190	31.749.711	-	-
3.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	5063,14	5.150,99	5.205,69	5.303,70	-	-

Pada tabel di atas, terlihat bahwa semua capaian kinerja IKK belum dapat diketahui sampai dengan Semester I Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh perhitungan yang menggunakan data akhir tahun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;
2. Kurang optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Rendahnya daya saing beberapa produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Kurangnya kualitas SDM pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan/pendapatan petani di sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi;
7. Terbatasnya aset dan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan;
8. Kurang optimalnya kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan;
9. Terbatasnya kompetensi aparatur;
10. Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA, dengan dominasi konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras dan terigu;
11. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kaidah gizi seimbang B2SA;
12. Rendahnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan berkualitas akibat tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau adanya gejolak harga pangan;
13. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah karena produksi dalam Kota Bogor tidak mencukupi kebutuhan masyarakat;
14. Masih ditemukannya pangan tidak aman dan tidak layak konsumsi;

15. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hygiene dan sanitasi pada bahan pangan asal hewan;
16. Masih adanya bahan pangan asal hewan yang terkena cemaran;
17. Kurangnya pengetahuan sikap dan keterampilan (PSK) petani;
18. Teknik budidaya ikan belum dilaksanakan dengan baik;
19. Sarana prasarana belum memadai;
20. Produk perikanan mudah terkontaminasi bahan berbahaya;
21. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk konsumsi ikan rendah;
22. Frekuensi sosialisasi produk perikanan kurang;
23. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan;
24. Kurangnya tenaga medis/paramedis veteriner;
25. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan hewan;

2.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Barat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian sampai dengan Semester I tahun berjalan;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;
3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi melalui dokumen perencanaan strategis kementerian/lembaga pusat dan dinas provinsi, dilakukan agar terdapat sinkronisasi antara Kementerian terkait, Dinas Provinsi, dan Kota Bogor. Identifikasi Tujuan dalam Renstra K/L dan Provinsi dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut (Tabel 10):

Tabel 10.

Sinkronisasi Tujuan Kementerian/Lembaga, Dinas Provinsi Jawa Barat dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

Renstra KL dan Dinas Provinsi	Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
Renstra Teknokratik Kementerian Pertanian RI **Tujuan:** 1. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Petani 2. Meningkatnya Ketahanan Pangan 3. Meningkatnya daya saing dengan mengembangkan Inovasi IPTEK Pertanian 4. Berkembangnya Sarana Prasarana Pertanian yang Bernilai Ekonomi 5. Mengembangkan Sistem Perkarantinaan Pertanian 6. Mengembangkan Kapasitas SDM dan Pemberdayaan Petani 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian **Sasaran:** 1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi petani 2. Pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 4. Peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 5. Pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian 6. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 7. Pengendalian penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan 8. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional 9. Birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien	**Tujuan:** 1. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, efektif, efisien dan akuntabel (Smart Governance) 3. Menurunkan presentase penduduk rawan pangan 4. Mempertahankan Tingkat Ketersediaan Pangan **Sasaran:** 1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, sehat dan aman sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 2. Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 3. Menurunnya prosentase penduduk rawan pangan 4. Tersedianya pangan yang beragam, dalam jumlah yang cukup, dan terdistribusi merata dengan harga terjangkau **Program:** 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan

10. Pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Penyuluhan Pertanian
Renstra Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI **Tujuan:** 1. Berdaulat di laut untuk mewujudkan *Legal, Reported, Regulated Fishing* (LRRF) 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkeadilan untuk generasi sekarang dan akan datang 3. Meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan **Sasaran:** 1. Masyarakat KP yang Meningkat Kesejahteraannya 2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berdaulat 3. Pengelolaan SDKP secara berkelanjutan dan berdaya saing 4. Tersedianya kebijakan yang berkualitas 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan 6. Tersedianya SDMKP, inovasi teknologi dan riset yang berdaya saing 7. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif 8. ASN KKP yang profesional 9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal 10. Birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 11. Pengelolaan anggaran yang berkualitas	
Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Pemenuhan Ketersediaan Pangan **Sasaran:** 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi 2. Meningkatnya Produksi Peternakan" dan 3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	
Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura **Sasaran:** 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat **Tujuan:** 1. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan **Sasaran:** 1. Meningkatnya Produksi serta nilai tambah dan daya saing produk Kelautan dan Perikanan; 2. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2024

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ditetapkan akan menjawab/memecahkan masalah pokok dan isu strategis yang telah diidentifikasi dan dirumuskan dengan memenuhi kaidah-kaidah SMART-C (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant dan Timebound serta Continously improve).

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan hasil kinerja pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome dari program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor per tahun dan tahapan kinerja untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditargetkan pada akhir tahun perencanaan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor merumuskan tema Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor 2025-2026 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025; dan
3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 37.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
			1	2
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas serta pemerataan akses pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (nilai)		89,34	92,26
	Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan dengan harga terjangkau	Indeks Pemanfaatan Pangan (nilai)	85,90	89,43
	Sasaran 2: Meningkatnya akses pangan masyarakat	Indeks Keterjangkauan Pangan (nilai)	93,55	95,73
Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Predikat SAKIP DKPP (poin)		A	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat DKPP (nilai)		3,56	3,57
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DKPP	Nilai SAKIP di lingkup DKPP (nilai)	89,80	89,95
		Jumlah Inovasi DKPP yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) (Inovasi/tahun/PD)	≥1	≥1
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda (%)	91	92
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan (%)	95	95

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
			1	2
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup DKPP	Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup DKPP (nilai)	89,11	89,30
Tujuan 3: Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) (%)		2,99	2,99
	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB Sektor Pertanian/Kehutanan dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	292,71	301,46

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2024

Pada Tahun 2025-2026, Tujuan I RPD Kota Bogor adalah ”Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, dengan sasaran ”Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”. Tujuan dinas diselaraskan dengan sasaran menjadi “Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas serta pemerataan akses pangan masyarakat”.

Indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dimana nilai IKP dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, dalam artian kebutuhan masyarakat akan pangan yang berkualitas dan bergizi tinggi untuk hidup sehat, aktif dan produktif, terpenuhi. Skor IKP Kota Bogor selama Tahun 2020-2023 termasuk kelompok sangat tahan pangan. Tahun 2025-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mentargetkan Skor IKP pada Tahun 2025 adalah 89,34 dan Tahun 2026 adalah 92,26.

Sasaran yang digunakan selaras dengan tujuan tersebut ada 2 (dua). Yang pertama adalah “Meningkatnya pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan

dengan harga terjangkau", dengan indikator Indeks Pemanfaatan Pangan. Sedangkan sasaran yang kedua adalah "Meningkatnya akses pangan masyarakat", dengan indikator Indeks Keterjangkauan Pangan.

Indeks Pemanfaatan Pangan dan Indeks Ketarjangkauan Pangan merupakan komponen pembentuk Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Pemanfaatan Pangan menggambarkan seberapa besar pangan yang ada di wilayah tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Sedangkan Indeks Keterjangkauan Pangan menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan.

Tujuan II dalam RPD Kota Bogor adalah " Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan", dengan sasaran "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif". Tujuan dinas yang diselaraskan dengan sasaran adalah "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas", dengan indikator Predikat SAKIP DKPP (poin) dan Indeks Kepuasan Masyarakat DKPP (nilai). Tujuan ini mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Tahun 2025-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mentargetkan nilai A pada indikator Predikat SAKIP DKPP serta nilai 3,56 (Tahun 2025) dan 3,57 (Tahun 2026) pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat DKPP.

Tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang

berkualitas" memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu: "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DKPP" serta "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup DKPP". Target yang berusaha dicapai oleh dinas pada Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 36 di atas..

Tujuan III dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah "Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan". Indikator yang digunakan adalah Persentase Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK), dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 dan 2026 masing-masing adalah 2,99%. Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan ketiga tersebut adalah Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan dengan indikator PDRB sektor pertanian/kehutanan dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan. Target PDRB sektor pertanian/kehutanan dan perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 292,71 Milyar, sedangkan Tahun 2026 sebesar Rp 301,46 Milyar.

3.3. Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2019-2024. Dalam Renja Perubahan dimaksud banyak dilakukan penyesuaian target IKU, IKK maupun target program akibat sudah terlampauinya capaian target pada tahun 2024. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPDP 2025.

Dalam Renja Perubahan Tahun 2025 masih akan dilaksanakan 11 (sebelas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan,

dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, sebagaimana yang tercantum dalam Renja DKPP 2025.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp 35.015.601.658,00 (*tiga puluh lima milyar lima belas juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah),* untuk pelaksanaan 11 (sebelas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Anggaran ini berasal dari APBD Kota Bogor. Rincian pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39.

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BOGOR TAHUN 2025

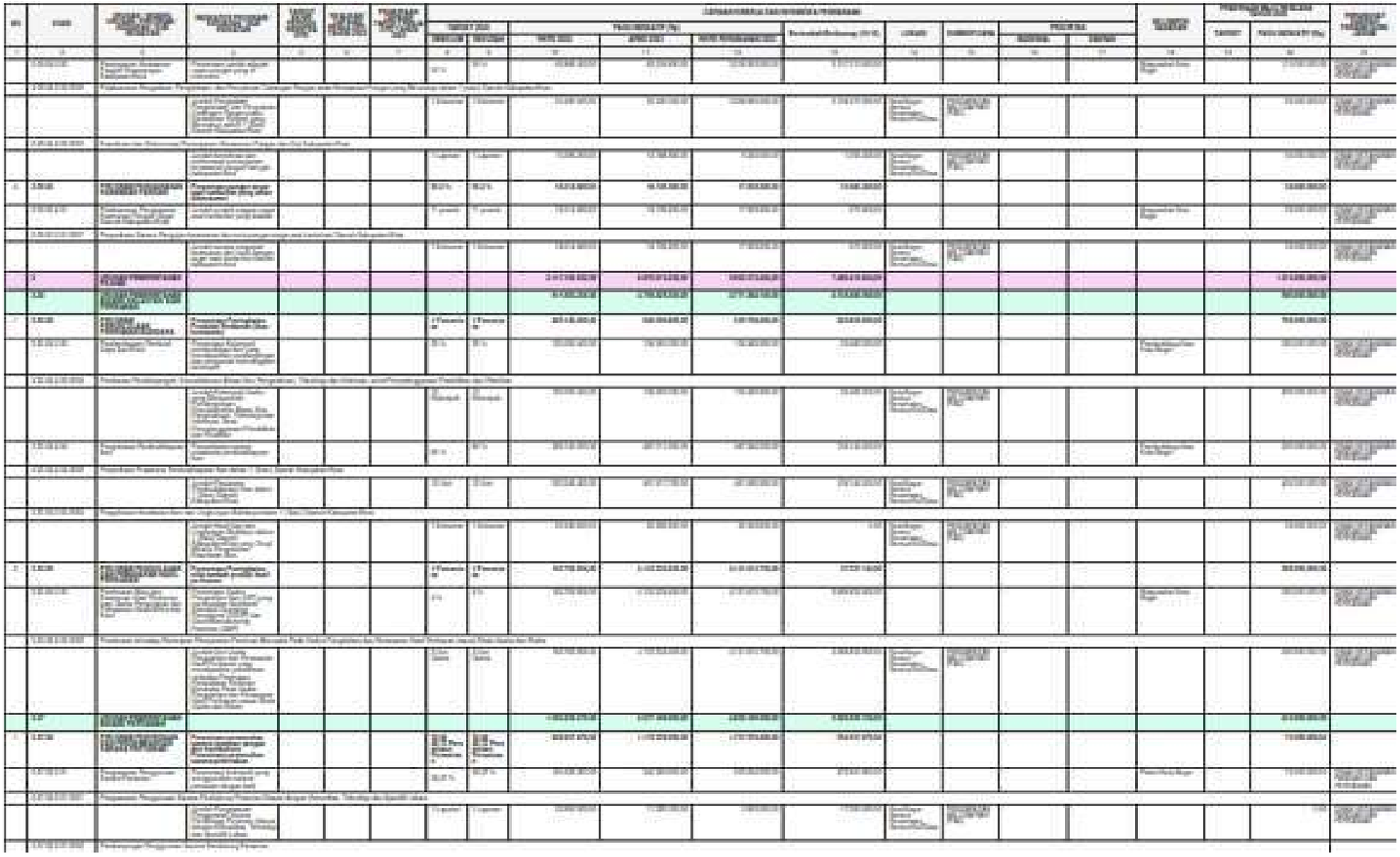

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025 ini, merupakan hasil evaluasi dari Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan akhir Semester I (bulan Juni 2025). Rencana Kerja ini berisi langkah-langkah atau kegiatan pokok sesuai dengan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu triwulanan atau tahunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kota Bogor, maka pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus mencapai tujuan Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan yang sehat dan berkualitas; Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; Terwujudnya pemerataan akses pangan masyarakat; dan Terwujudnya aktifitas perekonomian di sektor pertanian dan perikanan. Disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini tujuan tersebut dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025, maka diharapkan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja dan dievaluasi tingkat capaian Semester I. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Perlu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh instansi teknis di atasnya.
2. Perlu adanya penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga diperlukan apabila ketersediaan anggaran terbatas, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat lebih diutamakan.
3. Perlu memperhatikan azas efesiensi dan efektiftifitas dalam menggunakan anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat Ridho Allah SWT.

Lampiran h. Dinas Lingkungan Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2025 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025 dan perlu disusun juga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja perubahan tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program dan Kegiatan dalam Renja perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 3. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota

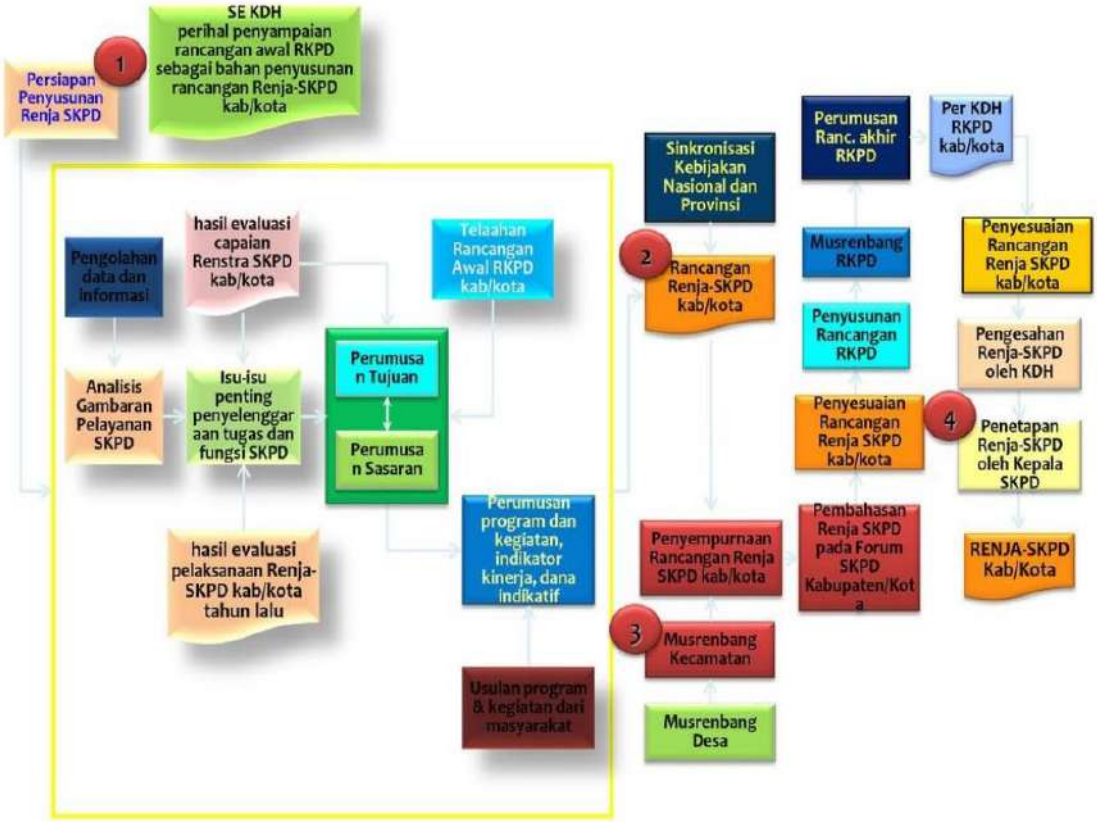

Rancangan Renja Perubahan PD dibahas pada Rapat Pembahasan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan dan pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja Perubahan PD ditetapkan melalui keputusan Walikota. Kemudian Renja perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan Renja.

Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Rebublik Indonesia Nomor 48510

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2025, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja Perubahan ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2025 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja perubahan sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perubahan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2025 dan prakiraan maju (tahun n+1), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 serta Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH sKota Bogor Tahun 2025-2026 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32
	Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51	108.39
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40	100.06
	Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98	101.01

Indeks Kualitas Air tahun 2024 mencapai 50.89 poin dari target 38,17 poin dengan capaian 133.32%. Penghitungan IKA dilakukan dengan pekerjaan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ pada Musim Penghujan dan Musim Kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 8 parameter yang diuji (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021). Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Indeks Kualitas Udara tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86.51 poin atau tercapai 108.39%. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Umumnya, didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Keanekaragaman Hayati

Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 81,40% atau mencapai 100,06%. Program yang mendukung pencapaian Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA yaitu Program Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Persentase reduksi sampah tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 7,98% dari target sebesar 7,90 atau mencapai 101,01%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Program yang mendukung pencapaian Per00
sentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sampah, Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
			Pembangunan	1.060.880.000	534.060.497	50,34

			TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.669.364.600	1.448.427.828	86,76
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.787.899.700	1.619.722.822	90,59
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.679.208.840	9.540.030.017	98,56
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.093.841.42		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.990.000	118.379.300	99,48
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000	118.379.300	99,48
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.534.118.051	35.036.612.859	98,59
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.424.198.051	34.946.272.859	98,65
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.920.000	90.340.000	82,18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.785.809.300	1.671.447.267	93,59
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.126.600	846.657.600	98,54
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.686.800	79.427.850	93,79
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.310.000	322.835.000	89,10
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.015.099	94.374.000	94,35
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.670.801	328.152.817	86,43
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		593.543.600	586.415.000	98,79
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.543.600	586.415.000	98,79
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.316.462.688	41.557.178.277	95,93
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.355.000	343.781.087	97,01
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.962.107.688	41.213.397.190	95,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.744.917.789	23.122.564.084	83,33
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.957.289.789	22.410.440.632	83,13
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.788.000	468.918.807	94,39
			Pemeliharaan/Rehabilitasi	290.840.000	243.204.645	83,62

			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			678.840.000	662.159.300	97,54
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		235.840.000	223.606.300	94,81
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	235.840.000	223.606.300	94,81
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		443.000.000	438.553.000	98,99
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000	438.553.000	98,99
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.040.948.000	1.003.026.950	96,35
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		940.948.000	908.035.800	96,50
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	790.948.000	773.069.100	92,68
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000	134.966.700	89,97
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	94.991.150	94,99
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	94.991.150	94,99
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			150.000.000	146.912.340	97,94
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.912.340	97,94
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000	146.912.340	97,94
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			146.536.400	128.585.907	87,75

	(Limbah B3)					
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		146.536.400	128.585.907	87,75
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	146.536.400	128.585.907	87,75
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			150.000.000	148.664.540	99,10
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	148.664.540	99,10
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	148.664.540	99,10
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			449.851.500	441.529.020	98,14
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		449.851.500	441.529.020	98,14
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500	7.171.500	91,33
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	193.500.000	190.087.720	98,23
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	248.500.000	244.269.800	98,29
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			507.325.000	498.275.500	98,21
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		507.325.000	498.275.500	98,21
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	507.325.000	498.275.500	98,21

			Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			30.000.000	28.700.988	95,66
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		30.000.000	28.700.988	95,66
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	30.000.000	28.700.988	95,66
11	Program Pengelolaan Persampahan			9.061.922.000	8.805.338.321	97,16
		Pengelolaan Sampah		9.061.922.000	8.805.338.321	97,16
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.707.335.000	7.496.465.570	97,26
			Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1.132.084.500	1.121.217.751	99,04
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	222.502.500	187.655.000	84,33
			J U M L A H	**135.506.617.468**	**127.098.030.817**	**93,79**

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Setiap Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	NA	NA	0,01	0,01	0,01	NA	0.01	0,01	0,01	0,01
		Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	NA	NA	0,02	0,02	0,02	NA	0.02	0,02	0,02	0,02
		Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	NA	NA	100	100	100	NA	100	100	100	100
		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	NA	NA	100	100	100	NA	100	100	100	100
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Reduksi sampah (%)	NA	NA	6,80	6.6	7,20	7,61	6,60	7,80	7,81	7,98
		Presentase volume Sampah terangkut (%)	NA	NA	77,00	77,50	78,00	77,20	74,50	81,30	79,03	81.40
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	NA	NA	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	73.75
		Persentase peningkatan retribusi persampahan	NA	NA	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,86	6,96	6,96
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	NA	NA	36,17	37,17	38,17	56,33	49,70	51,39	46,67	50.89
		Tingkat Indeks Udara (%)	NA	NA	79,63	79,72	79,81	80,09	86,00	98,36	95,92	86.51
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	NA	NA	7,11	7,72	7,98	3,92	5,87	7,11	7,72	8.22

4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan olerh Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	NA	34	38	39	37	30	54,55	57,14	58
5	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	NA	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

7	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	NA	NA	50	60	70	30	40	60	65	70
8	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
9	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	NA	NA	30	40	50	11	20	31,49	40,38	52.48
10	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	6.8	7.2	7,94	9,26	10,59	5,29	6,62	16,8	18,98	22.18
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)	30	30	35	36	38	30	33	32.05	35.56	35.56
11	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah daerah	100	100	3,35	3,4	3,5	3,14	3,34	3,34	3,34	3,34
		Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah per urusan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari table 2.1 diatas dapat terlihat capaian realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024.

Faktor-faktor penyebab tercapaianya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :

A. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pada Tahun 2024 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,81% dari target sebesar 7,8 atau mencapai 100,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 98,87%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 171 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor.

b. Pada Tahun 2024 Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dapat terealisasi sebesar 79,03% dari target sebesar 81,30% atau mencapai 97,15%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

B. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Kolaborasi kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan beberapa lembaga/komunitas lingkungan diantaranya adalah:

  a. Kerjasama Pemerintah Kota Bogor (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Harmoni dengan pemberiaan hibah Hibah Bansos untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan membantu mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan hidup dengan kegiatan:

     - Pengadaan Sarana Prasarana
     - Kegiatan Pembekalan
     - Sosialisasi Sampah Rokok

- Sosialisasi Keselamatan Masyarakat
- Pembinaan
- Sarasehan Remaja Peduli Lingkungan

a. Kegiatan Penyuluhan juga dilakukan atas permohonan dari pihak lembaga pendidikan dan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup (Pengelolaan Sampah) diantaranya dibeberapa sekolah di Kota Bogor seperti SD, SMP dan SMA BPK Penabur Bogor, SD Bogor Raya, SD Polisi, SD Rimba 3 dll.

C. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Indeks Kualitas Air tahun 2023 mencapai 46,67 poin dari target 37,17 poin dengan capaian 125,56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 122,27%. Capaian tersebut walaupun sangat baik tapi menurun 4,72 Poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/restoran/rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat mempengaruhi kualitas air situ.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa limbah domestik atau rumah tangga serta kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah tanpa dilakukan pengolahan yang dibuang ke sungai semakin meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkaanya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang

air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

Indeks Kualitas Udara tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86.51 poin atau tercapai 108.39% dari target 79.81 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama:

Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO2 dan SO2. Dalam hal ini, parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Capaian IKU tahun 2024 menurun 9.41 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin

meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat.

Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah

Tahun 2024 pembinaan proklim dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Empang dan Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Ciluar. Dari 4 (empat) lokasi binaan proklim hanya tiga yang di daftarkan ke SRN KLHK karena ketiga lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan.

D. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH).

a. Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang PPLH Bab XII bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi bidang pengelolaan lingkungan dan didalam Perda No 1 Tahun 2014 Tentang PPLH Bab XII bahwa Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan

Izin PPLH. Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

- Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan tahun 2024 ini telah dibuatkan Berita Acara (BA) sebanyak 50 Kegiatan/Usaha.

E. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengadaan bibit tanaman Rambutan, Kemang, Mangga, Sukun, Nangka, Durian, Alpukat, Sengon dan Pala. Bibit tanaman ini didistribusikan kepada Masyarakat, yaitu SDN Bondongan, RW.13 dan RW.08 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Korem 0606 Suryakancana, Danau Bogor Raya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SeKota Bogor.

F. Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

G. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika (Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMPELA B3)

Maksud kegiatan dari Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 di Kota Bogor (SIMPELA B3) untuk memfasilitasi kegiatan usaha di Kota Bogor yang menghasilkan Limbah B3. Sasaran kegiatan berikut adalah memperbarui Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 (SIMPELA B3), sesuai dengan pencatatan dan pelaporan, serta neraca ter-update dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Tersedia Laporan Bulanan dan Neraca Limbah B3.

H. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor)

Maksud kegiatan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor ini adalah menginvetarisasi

dan mengidentifikasi sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 di lingkungan sekolah negeri tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pusat perbelanjaan (*mall*) di wilayah Kota Bogor.

I. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tahun 2024 terdapat sejumlah 6 pengaduan dugaan pencemaran yang masuk dari masyarakat kita tindak lanjuti untuk dilakuan verifikasi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah tidak tenaga pejabat pengawasan lingkunganya mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memerikasa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu, selain itu kurangnya tenaga dibidang pengawasan.

Selain itu permasalahan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan. Namun upaya yang dillakukan secara maksimal dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan berpedoman pada dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengendalian beban pencemaran lingkungan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya

J. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Rukun Tetangga Peduli Lingkungan

Kegiatan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Bogor dilaksanakan melalui program kegiatan Bogorku Bersih yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kota Bogor. Untuk Tahun 2024 kegiatan Bogorku Bersih dimulai sejak bulan Februari sampai bulan

November 2024 yang diikuti oleh 782 peserta dengan perincian peserta :

- 680 RT
- 50 SD
- 21 SMP
- 24 Bank Sampah
- 35 OPD

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada RT terbaik yang memenangkan lomba kebersihan Bogorku Bersih sehingga Kota Bogor bisa bebas dari permasalahan sampah. Puncak kegiatan penganugrahan Bogorku Bersih dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square. Kategori yang dilombakan adalah:

1. Permukiman Teratur
2. Permukiman Swadaya
3. Permukiman Tepi Sungai
4. OPD
5. Bank Sampah
6. Sekolah

K. Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen RPPLH yang merupakan dokumen perencanaan memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (30) tahun. berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/ PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap pengunaan sumber daya alam dan

pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini merupakan kendala atau permasalahan dan pencapaian kinerja:

A. Permasalahan di bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan iklim

Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

- Kualitas air dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalamnya. Perubahan kualitas air dapat dipengaruhi oleh Iklim, Geologi, vegetasi, aktivitas manusia dan waktu;
- Nilai Indeks kualitas Air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu cuaca/kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengujian kualitas air, beban pencemaran yang masuk ke badan sungai, ataupun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai;
- Nilai Indeks Kualitas Air pada anak Sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke, dipengaruhi oleh berbagai pencemaran terhadap sungai tersebut. Selain limbah dari industri, limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar pada sungai anak Ciliwung, Cisadane dan Angke di Kota Bogor. Hasil inventarisasi sumber pencemaran air yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan domestik menyumbang, sisanya kegiatan industry, rumah sakit,pertanian serta peternakan;
- Capaian IKU tahun 2023 menurun 3,04 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya.

B. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya:

- Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memerikasa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu;
- Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan;
- Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH.

  Upaya :
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional pengawas lingkungan hidup;
- Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha;
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

C. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Persampahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumber;

- Menurunya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bank Sampah, sehingga banyak Bank Sampah yang sudah tidak beroperasional lagi;
- Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik;
- Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah.

  Upaya :
- Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan;
- Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah;
- Membuat lomba Bank Sampah dan RW bersih dengan harapan masyarakat terpacu untuk memilah sampah dan membuat Bank Sampah;
    - Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;
    - Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2024, diperoleh faktor – faktor sebagai berikut:

a. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :
    - Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, yang bersumber dari APBD .
    - Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
    - Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

b. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahan kan berlangsunya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
- Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

c. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
2. Adanya dana DAK bidang LH atau Bankeu Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR);

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 2.4. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	-				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01	NA	0,01	0,01	100	0,01	0,01	100
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02	NA	0,02	0,02	100	0,02	0,01	50
						Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100	NA	100	100	100	100	0,01	0
						Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100	NA	100	100	100	100	0,01	0

1	**0 3**	**0 4**	**20 1**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,01**	**0**
1	0 3	0 4	20 1	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300	NA	0,01	0,01	100	3300	0,01	0
1	0 3	0 4	20 1	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10	NA	0,02	0,02	100	10	0,02	0
1	0 3	0 4	20 1	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658	NA	100	100	100	306266	100	0
1	0 3	0 4	20 1	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	150	NA	128	123	96%	145	96	100
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**1 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**1**	**100**	**2**
2	**1 1**	**0 2**	**20 1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**1**	**100**	**2**
2	1 1	0 2	20 1	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	1	100	100	1	1	1
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	1
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	**71,3**	**46,67**	**37,17**	**46,67**	**125,55**	**46,68**	**46,67**	**50.89**
						Indeks kualitas Udara	**55,63**	**95,92**	**79,72**	**95,92**	**120,32**	**95,93**	**95,92**	**86.51**
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	**7,98**	**7,72**	**7,72**	**7,72**	**100**	**7,72**	**7,98**	**1**
2	**1 1**	**0 3**	**20 1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau**	**Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**60**	**NA**	**60**	**80**	**80**	**60**	**60**	**100**

					Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**90**	**NA**	**90**	**100**	**100**	**90**	**90**	**100**
						Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	**90**	**NA**	**90**	**100**	**100**	**90**	**90**	**100**
						Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	**3**	**NA**	**3**	**7**	**233**	**3**	**233**	**100**
2	1 1	0 3	20 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	2	2	100	2	100	1
2	1 1	0 3	20 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1		**100**	1	100	1
2	**1 1**	**0 3**	**20 3**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1**	**NA**	**1**	**1**	**100**	**1**	**100**	**1**
2	1 1	0 3	20 3	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	NA	1	1	100	1	**100**	1
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	0,5	0	0,5	0,516	103,2	0,5	103,2	2
2	**1 1**	**0 4**	**20 1**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi**	0,3	0	0,3	0,3	100	0,3	03	2

2	1 1	0 4	20 1	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**70**	**30**	**50**	**60**	**120**	**70**	**120**	**1**
2	**1 1**	**0 5**	**20 1**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**70**	**30**	**50**	**60**		**70**	**70**	**1**
2	1 1	0 5	20 1	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	1	1	100	1	100	NA
2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**38**	**37**	**34**	**54,55**	**160.44**	**38**	**39**	**1**
2	**1 1**	**0 6**	**20 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**156**	**102**	**134**	**134**	**100**	**149**	**100**	**1**
2	1 1	0 6	20 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	NA	1	1	100	1	1	1
2	1 1	0 6	20 1	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	NA	1	1	1	1	1	1

2	**1 1**	**0 8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha**	**40**	**11**	**30**	**31,49**	**104,97**	**40**	**104,97**	**1**
2	**1 1**	**0 8**	**20 1**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan**	**90**	**NA**	**90**	**94**	**104,4**	**90**	**104,4**	**1**
						Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	**20**	**NA**	**20**	**40**	**200**	**30**	**200**	**1**
2	**1 1**	**0 8**	**20 1**	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	NA	8	40	400	10	400	1
2	**1 1**	**0 8**	**20 1**	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	NA	NA	NA	NA	50	50	1
2	**1 1**	**0 8**	**20 1**	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	**Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat**	**300**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**200**	**200**	**1**
2	**1 1**	**0 9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan**	**10,29**	**5,29**	**7,94**	**16,8**	**211,57**	**9,26**	**211,57**	**1**
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)	38	30	33	33	100	35	35	1
2	**1 1**	**0 9**	**20 1**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**300**	**NA**	**300**	**611**	**203,7**	**300**	**203,7**	**1**

2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	NA	16	8	50	16	50	1
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
2	**11**	**10**	**201**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	100	100	100	100	1	100	1
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	7,20	6,89	6,8	7,8	114,7	6,8	114,7	1
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	77	81,3	105,58	77,5	105,58	1
						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8	48,8	48,8	48,8	100	48,8	48,8	1
						Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1	2,1	2,1	2,86	136,19	2,1	136,19	1
2	**11**	**11**	**201**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Jumlah Sampah yang dikelola di TPS 3R**	**100**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
						Persentase Pengelolaan Sampah an Organik yang dikelola di Bank Sampah	**50**	**NA**	**50**	**50**	**100**	**50**	**100**	**1**
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	100	100	100	50	100	1
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3	NA	2	3	100	2	100	1

2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	530	522	525	536,403	102,17	526	102,17	1
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	8	8	100	8	100	1
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**	**A**	**100**	**A**	**A**		**A**	**A**	
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	**3,5**		**3,4**	**3,507**	**103,15**	**3,5**	**103,15**	
2	**11**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH**	**A**	**100**	**A**	**A**		**A**	**A**	
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0	3	4	133	3	4	1
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	7	8	114	7	8	1
2	**11**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	302	304	304	304	1,000	302	302	1
2	**11**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,000**	**100**	**100**	**3**
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5	100	41
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	100	2	2	100	2	100	101

2	1 1	0 1	20 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	100	4	4	100	4	100	102
2	1 1	0 1	20 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100	1	1	100	1	100	201
2	**1 1**	**0 1**	**20 7**		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3**
2	1 1	0 1	20 7	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	NA	10	10	1,000	10	10	1
2	**1 1**	**0 1**	**20 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100	NA	100	100	1,000	100	100	1
2	1 1	0 1	20 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	1 1	0 1	20 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	1 1	1	20 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	100	100	100	100	135	100	1
2	1 1	1	20 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100	1
2	1 1	1	20 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	NA	6	8	133,3	6	133,3	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.2.3 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan;
b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor;
c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan;
d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor;
e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor;
f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor;
g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor;
h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
i. penyelesaian pengaduan; dan
j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.5 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	**Target Renstra Perangkat Daerah**					**Realisasai Capaian**		**Proyeksi**		Catatan Analisis
			2020 (thn n-2)	**2021 (thn n-1)**	**2022 (thn n)**	**2023 (thn n+1)**	**2025 (thn n+1)**	**2021(thn n-2)**	**2022(thn n-1)**	**2023 (thn n)**	**2025 (thn n+1)**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	NA	0,01	0,01	0,01	
		NA	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	NA	0,02	0,02	0,02	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	49,67	35,17	36,17	37,17	38,17	51,67	56,33	37,17	38,17	
		Indeks Kualitas Udara	85,900	79,532	79,626	79,720	79,814	81,76	80,09	79,720	79,814	
		7,72	3,92	5,87	7,11	7,72	7,98	-	3,92	7,72	7,98	

4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	NA	30	40	50	60	70	120	30	50	60	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	26	30	34	38	39	100	50	38	39	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	20	20	30	40	50	10	20	40	50	
			10	20	30	40	50	11	10	40	50	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	5,29	6,62	7,94	9,26	10,59	3,97	5,29	9,26	10,59	
		NA	31	33	35	36	38	30	31	36	38	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	NA	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	6,89	7,61	7,0	7,2	

		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	74,00	74,50	75,00	75,20	75,50	75,85	81,19	77,50	78	
		NA	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	
		NA	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NA	3,2	3,34	3,34	3,4	3,5	3,2	3,2	3,4	3,5	
		NA	B	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	37,17	46,67	
2	Indeks Kualitas Udara	79,72	95,92	
3	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81	79,03	
4	Persentase Reduksi Sampah	7,8	7,81	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan Perwali nomor 162 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata

Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recyle*) .

2. Masalah Pencemaran Air

a. **Pencemaran Air Tanah**

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. **Pencemaran Air Permukaan**

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO2, H2S dan NH3.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus tranportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukan bahwa peningkatan kandungan NO2 pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris

Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025;
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2025 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 semua kegiatan telah terdefinisikan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklaturnya.

Tabel 2.7. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD PerubahanTahun 2025
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kota Bogor**	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**4,17%**	**14.300.204.342**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kota Bogor**	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**4,17%**	**12.879.879.282**	
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	**2,13%**	**14.300.204.342**			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	**2,13%**	**12.879.879.282**	
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**98,16%**				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**98,16%**		
			Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	**100%**				Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	**100%**		

	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100%**	**12.138312.482**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100%**	**12.138312.482**	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	289.039.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	289.039.000	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.236.448.382	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.236.448.382	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	255.658.900	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	255.658.900	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	12.519.057.700	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	11.098.733.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100%**	**216.214.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100%**	**216.214.000**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**1 Dokumen**	**216.214.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**216.214.000**	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH	1 Dokumen	216.214..000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH	1 Dokumen	216.214..000	

			kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu**	**20%**	**1.138.400.146**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu**	**20%**	**1.138.400.146**	
		Kota Bogor	**Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu**	**8%**			**Kota Bogor**	**Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu**	**8%**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air**	**13,88%**	**1.138.400.146**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air**	**13,88%**	**1.138.400.146**	
		Kota Bogor	**Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien**	**11 Titik**			**Kota Bogor**	**Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien**	**11 Titik**		
		Kota Bogor	**Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor**	**3 Lokasi**			**Kota Bogor**	**Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor**	**3 Lokasi**		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	790.948.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	790.948.000	
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	143.193.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	143.193.900	

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1 Laporan**	**99.554.416**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1 Laporan**	**99.554.416**	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	99.554.416	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	99.554.416	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Bogor**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	**0,5 Ha**	**57.027.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Bogor**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	**0,5 Ha**	**57.027.100**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Pohon yang ditanami**	**500 Pohon**	**57.027.100**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Pohon yang ditanami**	**500 Pohon**	**57.027.100**	
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	57.0.27.100	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	57.0.27.100	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Bogor**	**Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3**	**100%**	**153.354.100**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Bogor**	**Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3**	**100%**	**153.354.100**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Kota Bogor**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**93%**	**153.354.100**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kota Bogor**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**93%**	**153.354.100**	

10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	153.354.100	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	153.354.100	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Bogor**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**56,32%**	**169.869.100**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Bogor**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**56,32%**	**169.869.100**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	**100%**	**169.869.100**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	**100%**	**169.869.100**	
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/ Usaha	169.869.100	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/ Usaha	169.869.100	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/ kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**	**15%**	**1.380.141.868**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga /kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**	**15%**	**1.380.141.868**	

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan**	**35 Pelaku kegiatan/ usaha**	**1.380.141.868**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan**	**35 Pelaku kegiatan/ usaha**	**1.380.141.868**	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	**25 Lembaga**				**Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup**	**25 Lembaga**		
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	92.666.060	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	4.536.960	
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	777.523.808	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	777.523.808	
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	509.952.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunita s/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	509.952.000	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Sekolah Adiwiyata (%)**	**35,60%**	**494.366.900**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Sekolah Adiwiyata (%)**	**35,60%**	**494.366.900**	
			Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	**19%**				**Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan**	**19%**		

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat**	**494.366.900**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bogor**	**Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat**	**494.366.900**	
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	494.366.900	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	494.366.900	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti**	**100%**	**29.878.200**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti**	**100%**	**29.878.200**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**29.878.200**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**29.878.200**	
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	10 Pengaduan	29.878.200	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Pengaduan	29.878.200	

			ditindaklanjuti/ditangani								
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**8%**	**10.145.557.280**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**8%**	**10.145.557.280**	
			Persentase Volume Sampah Tertangani	**79,25%**				**Persentase Volume Sampah Tertangani**	**79,25%**		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	**94,97%**				**Persentase Jalur Wilayah Penyapuan**	**94,97%**		
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	**2,9%**				**Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan**	**2,9%**		
	Pengelolaan Sampah	**Kota Bogor**	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**57,58%**	**10.145.557.280**	**Pengelolaan Sampah**	**Kota Bogor**	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**57,58%**	**10.145.557.280**	
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	**94%**				**Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah**	**94%**		
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	6.270.830.400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	6.270.830.400	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.025.635.800	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.025.635.800	
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	28.849.091.080	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	28.849.091.080	

XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bogor**	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja**	27.01	**106.286.773.479**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	-	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja**	27.01	**105.089.322.049**	
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26.55				**Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja**	26.55		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12.48				**Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja**	12.48		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21.97				**Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal**	21.97		
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100				**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	100		
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100				**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	100		
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94				**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	94		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100				**Persentase Kepatuhan Anggaran**	100		
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95				**Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**	95		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94				**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	94		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11				**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana**	87.11		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75				**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM**	88.75		

			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38				**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan**	88.38		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38				**Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	88.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**124.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**124.000.000**	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	**100%**				**Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun**	**100%**		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	124.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	124.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100%**	**34.215.278.898**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100%**	**34.215.278.898**	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	34.215.278.898	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/ Bulan	33.614.843..784	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.267.098.390**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.267.098.390**	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	711.272.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.272.000	

24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	80.952.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	80.952.800	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	329.670.801	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	329.670.801	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.494.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.494.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**-**	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**44.049.387.039**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**44.049.387.039**	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.955.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.955.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**		
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.022.151.531	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.022.151.531	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.352.398	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.352.398	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	93.798.807	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	93.798.807	
			JUMLAH		**134.440.715.539**	**JUMLAH**				**132.061.596.725**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja perubahan Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja perubahan adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musrembang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2025 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.8. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Bogor Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	RT02 RW 12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	80 m2	
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Ciburial Indah Rw. 04, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur , Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	2 Unit	
		Kukupu RW05 RT01, RT02, RT03, RT04 Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	2 Unit	
		JALAN TUGU WATES RT 04 RW 01 KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	2 Unit	
		Kp.Pabuaran RT.001,002,003,004,005 RW.003 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	10 Unit	
		Kp.Munjul RT.001,002,003,004,005 RW.05 Kel.kayumanis Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	5 Unit	
		R02 RW12 Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 m2	
		Gg. Pangumbahan Rt06/04 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 unit	

		Cikaret Gg. Pangumbahan Rt04/04 Kel. cikaret KEc. Bogor Selatan , Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 unit	
		Cibeureum Rt03/07 Kel, Mulyaharja Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 unit	
		Bantarjati rt.01/rw.10, Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 unit	
		JL KERAMAT / MBAH DALEM RT 2 RW 13 KELURAHAN KEDUNG BADAK , Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	1 unit	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	RT 1 RW 4 Kelurahan Paledang, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	200 orang	
		RT 3 RW 3 Kelurahan Cibogor, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 orang	
		Rt 3 Rw 1 Kelurahan Panaragan, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 orang	
		RT 1 RW 1 Kelurahan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga	50 orang	

		Babakan Pasar, Kota Bogor	masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		
		RT 1 RW 1 Kelurahan Gudang , Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 orang	
		RT 1 RW 1 Kelurahan Ciwaringin, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 orang	
		Jl. Darul Quran No.31, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	800 Peserta	
		RT 01,02,03,04,05,06 / RW 01 Kel. Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	60 orang	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja perubaha ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 akan mengacu pada Kerangka Pembagunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2025 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Barat, Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program - program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025 Tema Pembangunan Jawa Barat tahun 2025 adalah : ”Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masayarakat Jawa Barat”.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

LAMPIRAN uu_23_tahun_2014.pdf - Adobe Reader
File Edit View Window Help
359 / 460 105%
Comment Share

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

13,00 x 8,50 in

LAMPIRAN uu_23_tahun_2014.pdf - Adobe Reader
File Edit View Window Help
360 / 460 105%
Comment Share

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

13,00 x 8,50 in

- 48 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (*landfill gas*) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 2 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025
Tujuan 1 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	**Tujuan 1 :** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	57,84
		Tujuan 2 : Nilai Adipura	Nilai	75
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	71,30
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	55,63
		Sasaran : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha	38,81
	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	**Sasaran :** Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	%	0,3
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	**Sasaran :** Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	%	4,17
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	**Tujuan :** Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A

		Sasaran : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,20
		Sasaran : Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	95
		Sasaran : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	91
		Sasaran : Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	1
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,55
		Sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah:

"Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah"

Yang dimaksud dengan :

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya;
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan;
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (Purchasing Power Parity);
4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan

terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada adalah pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor jasa agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, adalah pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamanan kotanya.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri.
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum, adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga mampu

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV, RPD Kota Bogor 2025-2026 serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut :

Rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadapizin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, (10) Program Perencanaan Lingkungan dan (11) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka disepakati bahwa dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 11 program 17 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Total Kebutuhan dana/Pagu Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebesar Rp. 134.440.715.539,- (Seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah)

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**Kota Bogor**	**4,17%**	**14.300.204.342**	APBD		**4,17%**	**13.879.879.282**
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		**2,13%**				**5,84%**	**13.879.879.282**
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		**98,16%**				**98,16%**	
		Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi		**100%**				**100%**	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**Kota Bogor**	**100%**	**14.300.204.342**	APBD		100%	**13.138312.482**
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	541,76 Ton	289.039.000	APBD		547,18 Ton	289.039.000
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	546,50 Ton/hari	1.236.448.382	APBD		550,05 Ton/hari	1.236.448.382
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	10 Unit	255.658.900	APBD		15 Unit	255.658.900
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	130 Unit	12.519.057.700	APBD		150 Unit	12.098.733.000

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**Kota Bogor**	**100%**	**216.214.400**	APBD		**100%**	**216.214.000**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**Kota Bogor**	**1 Dokumen**	**216.214.400**	APBD		**1 Dokumen**	**216.214.000**
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Bogor	1 Dokumen	216.214.400	APBD		1 Dokumen	216.214..000
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu**	**Kota Bogor**	**20%**	**1.138.400.146**	APBD		**25%**	**1.138.400.146**
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	**Kota Bogor**	**8%**				**8,3%**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air**	**Kota Bogor**	**13,88%**	**1.138.400.146**	APBD		**13,88%**	**1.138.400.146**
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	**Kota Bogor**	**11 Titik**				**11 Titik**	
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	**Kota Bogor**	**3 Lokasi**				**3 Lokasi**	
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bogor	2 Dokumen	790.948.000	APBD		2 Dokumen	790.948.000
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	143.193.900	APBD		1 Dokumen	143.193.900
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**Kota Bogor**	**1 Laporan**	**99.554.416**	APBD		**1 Laporan**	**99.554.416**
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	99.554.416	APBD		1 Kegiatan	99.554.416

IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	**Kota Bogor**	**0,5 Ha**	**57.027.100**	APBD		**0,5 Ha**	**57.027.100**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Pohon yang ditanami**	**Kota Bogor**	**500 Pohon**	**57.027.100**	APBD		**500 Pohon**	**57.027.100**
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	57.027.100	APBD		1 Dokumen	57.0.27.100
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3**	**Kota Bogor**	**100%**	**153.354.100**	APBD		**100%**	**153.354.100**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**Kota Bogor**	**93%**	**153.354.100**	APBD		**93%**	**153.354.100**
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	2 Laporan	153.354.100	APBD		2 Laporan	153.354.100
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Kota Bogor**	**56,32%**	**169.869.100**	APBD		57,45%	**169.869.100**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan**	**Kota Bogor**	**100%**	**169.869.100**	APBD		100%	**169.869.100**
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	36 Badan/ Usaha	169.869.100	APBD		48 Badan/ Usaha	169.869.100
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Kota Bogor**	**15%**	**1.380.141.868**	APBD		**15,3%**	**1.380.141.868**

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan**	**Kota Bogor**	**35 Pelaku kegiatan/ usaha**	**1.380.141.868**	APBD		**40 Pelaku kegiatan/ usaha**	**1.380.141.868**
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		**25 Lembaga**				**30 Lembaga**	
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	92.666.060	APBD		40 Dokumen	4.536.960
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	250 Orang	777.523.808	APBD		300 Orang	777.523.808
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	25 Lembaga	509.952.000	APBD		30 Lembaga	509.952.000
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Sekolah Adiwiyata (%)**	**Kota Bogor**	**35,60%**	**494.366.900**	APBD		**35,70%**	**494.366.900**
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		**19%**				**19,10%**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**Kota Bogor**	**783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat**	**494.366.900**	APBD		**784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat**	**494.366.900**
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	**494.366.900**	APBD		5 Entitas	494.366.900
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti**	**Kota Bogor**	**100%**	**29.878.200**	APBD		**100%**	**29.878.200**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	**Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan**	**Kota Bogor**	**100%**	**29.878.200**	APBD		**100%**	**29.878.200**

		lingkungan hidup yang ditindaklanjuti							
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Bogor	10 Pengaduan	29.878.200	APBD		12 Pengaduan	29.878.200
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**Kota Bogor**	**8%**	**10.541.272.080**	APBD		**8,1%**	**10.145.557.280**
		Persentase Volume Sampah Tertangani		**79,25%**				**79,5%**	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		**94,97%**				**97,5%**	
		Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan		**2,9%**				**3%**	
	Pengelolaan Sampah	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**Kota Bogor**	**57,58%**	**10.541.272.080**	APBD		**58,73%**	**10.145.557.280**
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		**94%**				**95%**	
17	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Bogor	8 unit	2.849.091.080	APBD		9 Unit	6.270.830.400
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	4427,49 ton/tahun	1.025.635.800	APBD		4471,76 Ton/tahun	1.025.635.800
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	6.666.545.200	APBD		9 Unit	28.849.091.080
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja**	**Kota Bogor**	**27,01**	**105.959.987.063**			**27,34**	**109.089.322.049**
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		**26,55**				**26,82**	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		**12,48**				**13,00**	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		**21,97**				**21,98**	

		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		**100**				**100**	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**				**100**	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		**94**				**94**	
		Persentase Kepatuhan Anggaran		**100**				**100**	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA		**95**				**95**	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		**94**				**94**	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		**87,11**				**87,87**	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		**88,75**				**89,25**	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		**88,38**				**89,39**	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		**88,38**				**89,39**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**Kota Bogor**	**100%**	**124.000.000**	APBD		**100%**	**124.000.000**
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		**100%**				**100%**	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	124.000.000	APBD		5 Laporan	124.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**Kota Bogor**	**100%**	**34.215.278.898**	APBD		**100%**	**34.215.278.898**
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	265 Orang/Bulan	34.215.278.898	APBD		265 Orang/Bulan	33.614.843..784
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	109.920.000	APBD		1 Laporan	109.920.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Bogor**	**100%**	**1.267.098.390**	APBD		**100%**	**1.267.098.390**

23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	711.272.000	APBD		1 Paket	459.272.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	80.952.800	APBD		5 Paket	80.952.800
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket		APBD		3 Paket	
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	329.670.801	APBD		2 Paket	329.670.801
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	75.494.000	APBD		1 Laporan	75.494.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**Kota Bogor**	**100%**	**-**	APBD		**100%**	**-**
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5 Unit	-	APBD		5 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bogor**	**100%**	**44.004.387.039**	APBD		**100%**	**46.049.387.039**
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	390.955.000	APBD		12 Laporan	390.955.000
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43.658.432.039	APBD		12 Laporan	45.658.432.039
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**Kota Bogor**	**100%**		APBD		**100%**	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	140 Unit	26.022.151.531	APBD		145 Unit	28.022.151.531
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	78.352.398	APBD		1 Unit	78.352.398
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	93.798.807	APBD		10 Unit	93.798.807
					134.440.715.539				**136.061.596.725**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
   1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

      1.2 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

      1.3 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

      1.4 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
   2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

      Sub Kegiatan :

      a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
   1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dab beracun (Limbah B3)
   1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan :

a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)

   1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

      b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

      c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

a) Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
b) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kota Bogor**	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	**4,17%**	**12.879.879.282**	Bidang Pengelolaan Persampahan
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	**2,13%**	**12.879.879.282**	
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	**98,16%**		
			Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	**100%**		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan**	**100%**	**12.138312.482**	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	289.039.000	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.236.448.382	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	255.658.900	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	11.098.733.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS**	**100%**	**216.214.000**	Bidang Tata Lingkungan
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**	**1 Dokumen**	**216.214.000**	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	216.214..000	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu**	**20%**	**1.138.400.146**	Bidang PPLKPI
		Kota Bogor	**Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu**	**8%**		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air**	**13,88%**	**1.138.400.146**	
		Kota Bogor	**Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien**	**11 Titik**		
		Kota Bogor	**Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor**	**3 Lokasi**		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	2 Dokumen	790.948.000	

	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	143.193.900	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan**	**1 Laporan**	**99.554.416**	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	99.554.416	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Bogor**	**Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)**	**0,5 Ha**	**57.027.100**	Bidang PPLKPI
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Pohon yang ditanami**	**500 Pohon**	**57.027.100**	
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	57.0.27.100	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kota Bogor**	**Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3**	**100%**	**153.354.100**	Bidang PPLKPI
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Kota Bogor**	**Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3**	**93%**	**153.354.100**	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	153.354.100	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Bogor**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh**	**56,32%**	**169.869.100**	Bidang PPLKPI

			Pemerintah Daerah Kab/Kota			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	**100%**	**169.869.100**	
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/ Usaha	169.869.100	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**	**15%**	**1.380.141.868**	Bidang Tata Lingkungan
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan**	**35 Pelaku kegiatan/ usaha**	**1.380.141.868**	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	**25 Lembaga**		
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	4.536.960	
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	777.523.808	
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	509.952.000	

VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Bogor**	**Persentase Sekolah Adiwiyata (%)**	**35,60%**	**494.366.900**	Bidang Tata Lingkungan
			Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	**19%**		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bogor**	**Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**	**783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat**	**494.366.900**	
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	494.366.900	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti**	**100%**	**29.878.200**	Bidang PPHL
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	**Kota Bogor**	**Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	**29.878.200**	
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	29.878.200	
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Bogor**	**Persentase Reduksi Sampah (%)**	**8%**	**10.145.557.280**	Bidang Pengelolaan Persampahan
			Persentase Volume Sampah Tertangani	**79,25%**		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	**94,97%**		

			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	**2,9%**		
	Pengelolaan Sampah	**Kota Bogor**	**Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R**	**57,58%**	**10.145.557.280**	
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	**94%**		
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	6.270.830.400	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.025.635.800	
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	28.849.091.080	
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bogor**	**Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja**	27.01	**105.089.322.049**	Sekretariat
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26.55		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12.48		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21.97		
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100		
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100		

			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100		
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase dokumen perencanaan yang disusun**	**100%**	**124.000.000**	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	**100%**		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	124.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi**	**100%**	**34.215.278.898**	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	33.614.843..784	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.267.098.390**	

23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.272.000	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	80.952.800	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	329.670.801	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.494.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100%**	**-**	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**44.049.387.039**	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.955.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bogor**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100%**		
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.022.151.531	

32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.352.398	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	93.798.807	
			JUMLAH		**132.061.596.725**	

BAB V
P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja Perubahan ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja perubahan ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja Perubahan ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Lampiran i. Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Dinas untuk sisa periode tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Perubahan Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025-2026, menyesuaikan dengan Visi dan Misi Wali Kota Bogor terpilih, Gubernur Provinsi Jawa Barat Terpilih dan Presiden Replubik Indonesia terpilih yang dilantik pada awal tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Semester I Tahun 2025, dan masalah yang dihadapi.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

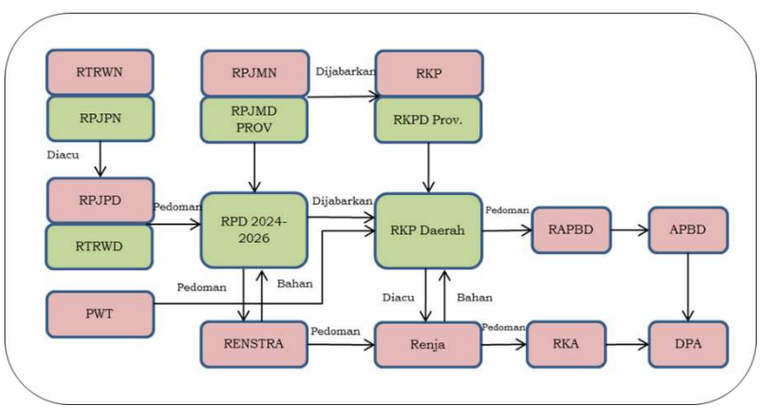

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Perubahan Renja 2025 disusun berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam Misi Bogor Cerdas dan Misi Bogor Sehat.

Selanjutnya Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Diskominfo Kota Bogor tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (13-304/2024));

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (10/222/2024));
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
23. Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 42).
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2024 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada sisa periode Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor tahun 2025 adalah :

1. Mengakomodir perubahan yang terjadi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan organisasi berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
2. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

3. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2025 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.
4. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2025 pada akhir tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Diskominfo Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Diskominfo, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal perubahan dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Bogor.

Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, total pagu anggaran murni pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor berjumlah Rp. 24.774.571.988,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujih puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Diskominfo mengalami pergeseran Anggaran I untuk efisiensi sebesar Rp. 383.898.400,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga Pagu anggaran menjadi Rp. 24.390.673.588,-. (dua puluh empat milyar tiga ratus Sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lime ratus delapan puluh delapan rupiah) Kemudian, Diskominfo mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 285.582.600 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupaih) pada pergeseran anggaran II. Sehingga sampai dengan triwulan II, pagu anggaran Diskominfo sebesar Rp. 24.676.256.188,- (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu serratus delapan puluh delapan repiah).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dinas komunikasi dan Informatilka Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut.:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2.16	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika											
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,57	16.173.630.088	16.094.254.188	16.094.254.188	0,00	8.661.973.053	0,00	53,82	
		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,00				0,00		0,00		
		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	11,65				0,00		0,00		
		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	22,50				0,00		0,00		
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100				0,00		0,00		
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100				0,00		0,00		
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94				0,00		0,00		
		Persentase kepatuhan anggaran	%	100				0,00		0,00		
		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%	95				0,00		0,00		
		Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	94				0,00		0,00		
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai	85,00				0,00		0,00		
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	81,25				0,00		0,00		
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Nilai	82,50				0,00		0,00		
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	95,00				0,00		0,00		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	6.763.900	5.969.700	5.969.700	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95				55,93		58,87		
		Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95				54,95		57,84		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	6.763.900	5.969.700	5.969.700	6	0	66,67	0,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	12.604.028.944	12.603.848.444	12.603.848.444	0	6.734.748.489	0,00	53,43	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	12.537.735.144	12.537.735.144	12.537.735.144	118	6.702.648.489	196,67	53,46	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	66.293.800	66.113.300	66.113.300	6	32.100.000	50,00	48,55	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	526.148.300	447.747.100	447.747.100	0	387.674.517	0,00	86,58	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.117.600	6.117.600	6.117.600	0	3.001.000	0,00	49,06	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	329.803.000	324.590.800	324.590.800	0	283.033.900	0,00	87,20	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.447.700	7.363.700	7.363.700	0	6.030.000	0,00	81,89	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	175.780.000	109.675.000	109.675.000	0	95.609.617	0,00	87,18	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.721.127.032	2.721.127.032	2.721.127.032	0	1.378.785.887	0,00	50,67	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	1.577.842	0,00	17,53	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.712.127.032	2.712.127.032	2.712.127.032	0	1.377.208.045	0,00	50,78	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	315.561.912	315.561.912	315.561.912	0	160.764.160	0,00	50,95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	212.982.886	212.982.886	212.982.886	13	102.124.160	100,00	47,95	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	102.579.026	102.579.026	102.579.026	58	58.640.000	38,67	57,17	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	93	3.570.557.180	3.430.955.380	3.430.955.380	0	2.114.822.599	0,00	61,64	
		Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	80				0		0,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website	%	100	3.570.557.180	3.430.955.380	3.430.955.380	0	2.114.822.599	0,00	61,64	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD	%	94				0		0,00		
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%	93				0		0,00		
		Persentase PPID PD yang aktif	%	90				0		0,00		
		Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV	Tayang	500				250		50,00		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90				0		0,00		
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	310.096.000	205.811.900	205.811.900	0	27.605.700	0,00	13,41	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	2.663.972.480	2.629.087.980	2.629.087.980	16	1.752.579.000	200,00	66,66	
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	429.760.000	429.579.500	429.579.500	1	249.517.099	100,00	58,08	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	4	166.728.700	166.476.000	166.476.000	2	85.120.800	50,00	51,13	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3,50	4.188.539.020	4.112.430.720	4.398.013.320	0,00	2.113.102.832	0,00	48,05	
		Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,70				0,00		0,00		
		Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,00				0,00		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
		Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,88				0,00		0,00		
		Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks	3,46				0,00		0,00		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Domain	%	100	67.152.300	67.152.300	67.152.300	0	33.142.500	0,00	49,35	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	67.152.300	67.152.300	67.152.300	0	33.142.500	0,00	49,35	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4.121.386.720	4.045.278.420	4.330.861.020	0	2.079.960.332	0,00	48,03	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	3				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	3				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3				0		0,00		
		Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3				0		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Level	2				0		0,00		
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4				0		0,00		
		Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3,46				0		0,00		
2.16.03.2.02.001 5	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	4	65.013.700	65.013.700	65.013.700	0	0	0,00	0,00	
2.16.03.2.02.001 6	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	3	568.119.400	568.119.400	853.702.000	1	286.274.500	33,33	50,39	
2.16.03.2.02.002 0	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	15	296.007.700	219.899.400	219.899.400	2	148.571.413	13,33	67,56	
2.16.03.2.02.002 4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	616.748.620	616.748.620	616.748.620	0	612.577.919	0,00	99,32	
2.16.03.2.02.003 0	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	2.575.497.300	2.575.497.300	2.575.497.300	0	1.032.536.500	0,00	40,09	
2.20	Bidang Urusan Statistik									#DIV/0 !		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,75	216.874.500	130.150.900	130.150.900	0,00	91.213.260	0,00	70,08	
		Indeks Kualitas Data	Indeks	2,66				0,00		0,00		
		Indeks Proses Bisnis Statistik	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Kelembagaan	Indeks	2,85				0,00		0,00		
		Indeks Statistik Nasional	Indeks	2,22				0,00		0,00		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Standar Data Statistik	Indeks	3,00	216.874.500	130.150.900	130.150.900	0,00	91.213.260	0,00	70,08	
		Indeks Metadata Statistik	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Interoperabilitas Data	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk	Indeks	2,00				0,00		0,00		
		Indeks Relevansi	Indeks	2,40				0,00		0,00		
		Indeks Akurasi	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu	Indeks	2,50				0,00		0,00		
		Indeks Aksesibilitas	Indeks	3,00				0,00		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Keterangan
				K	Murni (Rp.)	Pergeseran I (Rp)	Pergeseran II (Rp)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5				6		7		8
		Indeks Keterbandingan dan Konsistensi	Indeks	2,50				0,00		0,00		
		Indeks Perencanaan Data	Indeks	2,33				0,00		0,00		
		Indeks Pengumpulan Data	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Pemeriksaan Data	Indeks	4,00				0,00		0,00		
		Indeks Penyebarluasan Data	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Profesionalitas	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel	Indeks	2,50				0,00		0,00		
		Indeks Pengorganisasian Statistik	Indeks	3,00				0,00		0,00		
		Indeks Pemanfaatan Data Statistik	Indeks	2,67				0,00		0,00		
		Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik	Indeks	2,00				0,00		0,00		
		Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan	Indeks	1,99				0,00		0,00		
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	50	57.657.300	56.925.800	56.925.800	100	51.225.800	200,00	89,99	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	54.611.400	38.029.000	38.029.000	0	37.936.460	0,00	99,76	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	%	80	38.940.600	3.954.900	3.954.900	70	0	87,50	0,00	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	65.665.200	31.241.200	31.241.200	0	2.051.000	0,00	6,57	
2.21	Bidang Urusan Persandian											
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	624.971.200	622.882.400	622.882.400	0	579.680.500	0,00	93,06	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	%	79	624.971.200	622.882.400	622.882.400	0	579.680.500	0,00	93,06	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	624.971.200	622.882.400	622.882.400	0	579.680.500	0,00	93,06	
					24.774.571.988	**24.390.673.588**	**24.676.256.188**		**13.560.792.244**		**55,60**	

2.2. EVALUASI KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja Triwulan II Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian sebesar 66,60% (lima puluh lima koma enam puluh persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2025 Kota Bogor

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	TARGET	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
I	**INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**				
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi/ tahun/ PD	1	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,48	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
5	Predikat Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
6	Nilai Domain Kebijakan SPBE	Nilai	4,10	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
7	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,90	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
8	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,64	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
9	Predikat Pembangunan Statistik	Nilai	Baik	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
10	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	TARGET	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
	Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				
	URUSAN STATISTIK				
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
	URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	84,2	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal antara lain:

1. Penyediaan Ruang Server yang Layak;
2. Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana (DRC);
3. Kurangnya SDM TIK yang kompeten;
4. Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
5. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil;
6. Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun;
7. Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral;
8. Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
9. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.
10. Pelaksanaan janji Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang

diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan;
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan Layanan Interoperabilitas;
4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
5. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi;
6. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik;
7. Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data;
8. Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.
9. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
10. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
12. Mengembangkan muatan e-Government.
13. Pengembangan CCTV, Wifi Publik, Pusat Data dan Command Center.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Pada Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan

Informatika dalam rangka memenuhi jani Wali Kota dan Prioritas pembangunan Kota Bogor dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 40,440,956,761,- (empat puluh milyar empat ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Namun berdasarkan hasil review yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka anggaran berkurang menjadi Rp. 33,591,809,771,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupah).

Pagu Sub kegiatan ada yang meningkat ada pula yang menurun disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun yang mengalami pengurangan anggaran adalah pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, sub kegiatan Penyusunan Konten, sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun secara lengkap terlihat pada tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Bogor

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	89.95	16.670.965.685	89.95	17.016.808.637	51.214.425	
			Jumlah Inovasi yang Dibangun/Dikembangkan	Inovasi	1		1			
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	100		100			
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.45		87.45			
2.16.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	5.969.700	9	5.969.700	0	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	5.969.700	9	5.969.700	0	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	13.150.220.981	1	13.166.098.750	15.877.769	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	60	13.084.107.681	60	13.099.985.450	15.877.769	Kekurangan Tunjangan (CPNS 1 Orang. PPPK 1 Orang)
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	66.113.300	12	66.113.300	0	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	467.747.100	1	659.151.900	191.404.800	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.117.600	1	6.117.600	0	

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	324.590.800	5	324.590.800	0	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.363.700	1	7.366.500	2.800	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	129.675.000	1	321.077.000	191.402.000	Penambahan Anggaran Perjalan Dinas yang telah habis terserap di Bulan Juni dan penambahan anggaran Makan Minum rapat penggangti anggaran rapat di hotel
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	372.036.100	1	294.628.527	-77.407.573	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		163.360.400	11	227.910.100	64.549.700	Menyesuaikan Kebutuhan berdasarkan Realisasi tahun lalu
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		208.675.700	31	66.718.427	-141.957.273	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.726.465.992	1	2.570.507.950	-155.958.042	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3.250.000	1	4.800.058	1.550.058	Menyesuaikan Kebutuhan berdasarkan Realisasi tahun lalu
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.723.215.992	1	2.565.707.892	-157.508.100	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	320.561.912	2	320.451.810	-110.102	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	217.982.886	13	217.872.784	-110.102	

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2.16.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	102.579.026	150	102.579.026	0	
2.16.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	10.185.000	1		-10.185.000	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	70	5.117.927.056	70	4.852.190.370	-265.736.686	
			Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	94.09		94.09			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal. media sosial dan website	%	89	5.117.927.056	89	4.852.190.370	-265.736.686	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD	%	60		60			
			Persentase PPID PD yang aktif	%	90		90			
			Jumlah Kemitraan Media Cetak. Online. Radio dan TV	Tayang	920		920			
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90		90			
2.16.02.2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan. Opini. dan Aspirasi Publik	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomen dasi	1	305.811.900	1	305.808.700	-3.200	
2.16.02.2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	3.641.059.656	8	3.950.326.170	309.266.514	Penambahan Anggran untuk : **Janji Politik (Bogor Cerdas)**: Publikasi Judi Online dan Publikasi Kinerja Pemerintah

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kota Bogor	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	529.579.500	1	429.579.500	-100.000.000	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Kota Bogor	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	4	641.476.000	4	166.476.000	-475.000.000	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3.75	17.899.030.720	3.75	10.975.177.464	-6.923.853.256	
			Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	4.1		4.1			
			Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	4		4			
			Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	3.88		3.88			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Domain	%	100	67.152.300	100	66.142.300	-1.010.000	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	67.152.300		66.142.300	-1.010.000	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	4	17.831.878.420	4	10.909.035.164	-6.922.843.256	
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	5		5			

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2		2			
			Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	5		5			
			Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		3			
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3		3			
			Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	3		3			
			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4		4			
			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		3			
			Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4		4			
			Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3.57		3.57			
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Bogor	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	4	65.013.700	4	65.000.800	-12.900	
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	3	7.878.119.400	3	3.872.911.490	-4.005.207.910	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Bogor	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	15	219.899.400	14	219.899.400	0	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	7.093.348.620	35	4.168.626.174	-2.924.722.446	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kota Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	2.575.497.300	35	2.582.597.300	7.100.000	
2.20	Bidang UrusanStatistik Sektoral									
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.73	130.150.900	2.73	124.750.900	-5.400.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2.75	130.150.900	2.75	124.750.900	-5.400.000	
			Domain Kualitas Data	Indeks	2.66		2.66			
			Domain Proses Bisnis Statistik	Indeks	3		3			
			Domain Kelembagaan	Indeks	2.85		2.85			
			Domain Statistik Nasional	Indeks	2.22		2.22			
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Bogor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	50	56.925.800	50	51.525.800	-5.400.000	Pengalihan ke anggaran honorarium ke Mamain Rapat
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Bogor	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan. Monitoring. dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	38.029.000	100	38.029.000	0	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Bogor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	%	80	3.954.900	80	3.954.900	0	

Kode program / kegiatan / sub kegiatan	Bidang urusan/program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Rancangan awal RKPD		Hasil analisis kebutuhan		Selisih	Keterangan
					Target kinerja	Anggaran	Target kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Bogor	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	31.241.200	2	31.241.200	0	
2.21	Bidang Urusan Persandian dan Keamanan Informasi									
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi	%	82.5	622.882.400	82.5	622.882.400	0	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengamanan informasi	Perangkat Daerah	29	622.882.400	29	622.882.400	0	
			Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	79		79			
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	622.882.400	1	622.882.400	0	
						40.440.956.761		**33.591.809.771**	**-7.143.775.517**	

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor memiliki peran pada pencapaian Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 pada tujuan 4 **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan"** dan sasaran berupa **"Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif".**

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Tujuan 1	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas
Sasaran *1*	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah
Tujuan *2*	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
Sasaran *1*	:	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
Sasaran *2*	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
Sasaran *3*	:	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sectoral
Sasaran *4*	:	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja perubahan ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian

target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2025 semula akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan, bertambah pada perubahan renja menjadi 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan penambahan 1 kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta 2 penambahan sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pada Program Penunjang terjadi kenaikan sebesar Rp. 548.550.022,-. Adapun fokus penambahan anggaran untuk Kekurangan Tunjangan PPH 21 PNS. Tunjangan Fungsional PPPK. Tunjangan Beras PPPK. Pembulatan Gaji PNS. Pembulatan gaji PPPK. Penambahan personil (CPNS 1 Orang. PPPK 1 Orang) dan penambahan anggaran untuk Perjalanan dinas luar kota tim Publikasi & Dokumentasi Pimpinan Daerah.

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.281.663.190,-. Adapun fokus penambahan anggaran untuk pemenuhan prioritas Janji Walikota untuk mewujudkan kota sehat yaitu terciptanya Bogor quick Respon dan Bogor cerdas berupa publikasi pencegahan judi online. Selain itu penambahan anggaran juga diperuntukkan untuk Publikasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Publikasi Kaleidoskop Akhir Tahun, Janji Politik (Bogor Cerdas), Publikasi Kebijakan Pemkot Bogor terkait issue besar dan tematik.

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.786.638.444,-. Adapun fokus penambahan anggaran untuk pemenuhan janji politik Bogor Cerdas yang rencana penganggarannya dilaokasikan dalam 5 tahun.berupa :

1. Pembangunan Integrated Command and Control Center. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 direncanakan aktivitas :akan dilaksanakan Pembuatan DED Integrated Command and Control Center, Pengembangan Pusat Komputasi : Pengadaan Server untuk BackUp, Upgrade RAM dan Storage Server Existing serta Pengadaan Perlengkapan Pusat Data Lt. 4.

2. Pembangunan CCTV. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 akan dilaksanakan Pemeliharaan CCTV existing 17 titik; Infrastruktur CCTV (Server CCTV); Pengadaan CCTV 31 titik dari janji Politik 100 titik.
3. Pembangunan Wifi Publik. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 akan dilaksanakan DED Pembangunan Wifi Publik untuk +- 40% dari 250 titik yang direncanakan, Pemasangan Wifi Publik (manage services 15 titik x 3 bulan) serta Relokasi FO Jalak Harupat, Sudirman, Brigjen saptadji, Batu Tulis, Pajajaran, Lawang gintung (total panjang 8676 m)

Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mengalami pengurangan sebesar Rp. 92.123.600,- dari hasil efisiensi pengalihan rapat-rapat di Hotel ke Ruang rapat milik pemerintah daerah Kota Bogor.

Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mengalami pengurangan sebesar Rp. -2.088.800,- dari hasil efisiensi.

Adapun rincian urusan, program dan sub kegiatan tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika											
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	89.95	16.173.630.088	89.95	17.016.808.637	548.550.022			
			Jumlah Inovasi yang Dibangun/Dikembangkan	Inovasi	1		1					
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	100		100					
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.45		87.45					
2.16.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	6.763.900	9	5.969.700	-794.200			
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	6.763.900	9	5.969.700	-794.200	Efisiensi		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	12.604.028.944	1	13.166.098.750	562.069.806			
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	12.537.735.144	60	13.099.985.450	562.250.306	Kekurangan Tunjangan PPH 21 PNS. Tunjangan Fungsional PPPK. Tunjangan Beras PPPK. Pembulatan Gaji PNS. Pembulatan gaji PPPK. Penambahan personil (CPNS 1 Orang. PPPK 1 Orang)		
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	66.293.800	12	66.113.300	-180.500	Efisiensi		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	526.148.300	1	659.151.900	133.003.600			

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.117.600	1	6.117.600	0			
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	329.803.000	5	324.590.800	-5.212.200	Efisiensi		
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.447.700	1	7.366.500	-7.081.200	Efisiensi		
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	175.780.000	1	321.077.000	145.297.000	1. Perjalanan dinas luar kota tim Publikasi & Dokumentasi Pimpinan Daerah (Rp105.699.000) 2. Mamin dan perjalanan dinas biasa (Rp5.616.000)		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	1	294.628.527	294.628.527			
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	11	227.910.100	227.910.100	1. Rehabilitasi Ruang Media Center (Rp97.874.800 untuk Pembelian PC 6 unit dan 1 unit AC) 2. Studio Sipatahunan (Rp130.035.300 untuk Pembelian 1 Switcher, 1 Gimbal dan 2 Camcoder)		
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	31	66.718.427	66.718.427	Rehabilitasi Ruang Media Center (Rp66.718.427 untuk pembelian 6 Buah Meja Kerja, 1 Unit Sofa, 52 m2 Wallpaper, 6 buah Kursi Kantor)		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.721.127.032	1	2.570.507.950	-150.619.082			

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	1	4.800.058	-4.199.942	Rasionalisasi belanja tagihan telepon		
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.712.127.032	1	2.565.707.892	-146.419.140	rasionalisasi honor dan iuran BPJS Tenaga Non ASN yang tidak terserap karena telah diangkat menjadi P3K (Rp146.419.140)		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	315.561.912	2	320.451.810	4.889.898			
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	212.982.886	13	217.872.784	4.889.898	Pembayaran Pajak tahunan terhutang (8 Tahun), Denda dan Biaya Penerbitan ulang STNK yang hilang atas KR4 F1229A (Kijang Kapsul) yang dimutasi dari BAPENDA ke Diskominfo tahun 2022 Rp4.889.898,)		
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	102.579.026	150	102.579.026	0			
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	70	3.570.557.180	70	4.852.190.370	1.281.633.190			
			Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	94.09		94.09					
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal. media sosial dan website	%	89	3.570.557.180	89	4.852.190.370	1.281.633.190			
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD	%	60		60					
			Persentase PPID PD yang aktif	%	90		90					
			Jumlah Kemitraan Media Cetak. Online. Radio dan TV	Tayang	920		920					

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90		90					
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan. Opini. dan Aspirasi Publik	Kota Bogor	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	310.096.000	1	305.808.700	-4.287.300	Penambahan anggaran untuk : Janji Politik "Bogor Sehat" > Bogor Quick Response : sewa infrastruktur layanan pengaduan masyarakat kegawat daruratan (NTPD 112) untuk Bogor Quick Response. Penambahan layer 3 pada layanan kegawatdaruratan Layer 3 adalah layer yang dapat dimanfaatkan petugas sampai level perangkat daerah, layer ini digunakan dengan menanamkan aplikasi kegawatdaruratan ke dalam perangkat android. Rp99.996.800		

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.02.2.01.002 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bogor	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	2.663.972.480	8	3.950.326.170	1.286.353.690	Kegiatan ini dianggarkan untuk 1. Publikasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Publikasi Kaleidoskop Akhir Tahun, Janji Politik (Bogor Cerdas), Publikasi Kebijakan Pemkot Bogor terkait issue besar dan tematik (Rp. 1.171.543.158) 2. Publikasi Pencegahan Judi Online (Rp. 149.695.032)		
2.16.02.2.01.002 2	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kota Bogor	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	429.760.000	1	429.579.500	-180.500	Efisiensi		
2.16.02.2.01.002 3	Penyusunan Konten	Kota Bogor	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	4	166.728.700	4	166.476.000	-252.700	Efisiensi		
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3.75	4.188.539.020	3.75	10.975.177.464	6.786.638.444			
			Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	4.1		4.1					
			Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	4		4					
			Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	3.88		3.88					
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Domain	%	100	67.152.300	100	66.142.300	-1.010.000			
2.16.03.2.01.000 4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	67.152.300		66.142.300	-1.010.000	Rasionalisasi honor PPTK untuk 1 bulan sebesar Rp1.010.000,-		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	4	4.121.386.720	4	10.909.035.164	6.787.648.444			
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan	Level	4		4					

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah									
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	5		5					
			Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2		2					
			Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	5		5					
			Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		3					
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	3		3					
			Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	3		3					
			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	4		4					
			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		3					
			Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4		4					
			Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3.57		3.57					
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Bogor	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	4	65.013.700	4	65.000.800	-12.900	Sisa perubahan pemaketan jasa konsultasi pendampingan SPBE menuju Pemerintah Digital		

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	3	568.119.400	3	3.872.911.490	3.304.792.090	Janji Politik "Bogor Cerdas": 1. DED Integrated Command and Control Center : Rp99.999.500 2. Pengembangan Pusat Komputasi : Pengadaan Server untuk BackUp, Upgrade RAM dan Storage Server Existing : Rp1.842.523.790 3. Pengadaan Perlengkapan Pusat Data Lt. 4 (Batrei/UPS 20 KVA (BT 60 min) : Rp1.244.280.900		
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Bogor	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	15	296.007.700	14	219.899.400	-76.108.300			

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	616.748.620	35	4.168.626.174	3.551.877.554	Janji Politik Bogor Cerdas: 1. Pemeliharaan CCTV existing 17 titik : Rp453.119.000 2. Infrastruktur CCTV (Server CCTV) : Rp256.962.700 3. Pengadaan CCTV 31 titik dari janji Politik 100 titik + jasa perencanaan dan jasa pengawasan : Rp1.809.115.686,50 4. DED Pembangunan Wifi Publik untuk +-40% dari 250 titik yang direncanakan : Rp44.688.228 5. Pemasangan Wifi Publik (manage services 15 titik x 3 bulan) : Rp56.029.500 6. Relokasi FO Jalak Harupat, Sudirman, Brigjen saptadji, Batu Tulis, Pajajaran, Lawang gintung (total panjang 8676 m) : Rp932.044.200		
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kota Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	2.575.497.300	35	2.582.597.300	7.100.000	Perubahan honor PPK dan PPTK		
2.20	Bidang UrusanStatistik Sektoral											
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.73	216.874.500	2.73	124.750.900	-92.123.600			
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2.75	216.874.500	2.75	124.750.900	-92.123.600			
			Domain Kualitas Data	Indeks	2.66		2.66					
			Domain Proses Bisnis Statistik	Indeks	3		3					

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	APBD 2025		Perubahan APBD 2025		SELISIH	CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Domain Kelembagaan	Indeks	2.85		2.85					
			Domain Statistik Nasional	Indeks	2.22		2.22					
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Bogor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	50	57.657.300	50	51.525.800	-6.131.500	Re-alokasi honor narasumber untuk belanja mamin di sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. untuk kegiatan Pembinaan Statistik di bulan September dan November		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Bogor	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan. Monitoring. dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	54.611.400	100	38.029.000	-16.582.400	Efisiensi		
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Bogor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	%	80	38.940.600	80	3.954.900	-34.985.700	Efisiensi		
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Bogor	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	65.665.200	2	31.241.200	-34.424.000	Efisiensi		
2.21	Bidang Urusan Persandian dan Keamanan Informasi											
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi	%	82.5	624.971.200	82.5	622.882.400	-2.088.800			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengamanan informasi	Perangkat Daerah	29	624.971.200	29	622.882.400	-2.088.800			
			Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	79		79					
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	624.971.200	1	622.882.400	-2.088.800	Efisiensi		
						24.774.571.988		**33.591.809.771**	**8.522.609.256**			

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sama dengan Rencana Kerja semula, pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Program yang mendukung tujuan ada 4 (empat) program sedangkan 1 (satu) program sebagai pendukung. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sedangkan program yang medukung capaian sasaran yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program penyelenggaraan statistik sektoral, dan Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasiInformasi.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang direncanakan pada perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 33.591.809.771,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupah).

Secara rinci, dapat dijealskan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.016.808.637		Sekretariat
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.969.700		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.969.700	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.166.098.750		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.099.985.450	Gaji ASN 1 tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	66.113.300	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.151.900		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.117.600	Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	324.590.800	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.366.500	Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.077.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Mamin rapat	

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.628.527		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	227.910.100	1. Pembelian PC 6 unit dan 1 unit AC) untuk Ruang Media Center 2. Pembelian 1 Switcher, 1 Gimbal dan 2 Camcoder) untuk Studio Sipatahunan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.718.427	Pembelian 6 Buah Meja Kerja, 1 Unit Sofa, 52 m2 Wallpaper, 6 buah Kursi Kantor untuk Ruang Media Center	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.570.507.950		
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.058	Belanja tagihan telepon	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.565.707.892	1. Tenaga Pendukung Teknis 2. Tenaga Kebersihan 3. Tenaga Supir 4. Iuran Jaminan/ Asuransi	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.451.810		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.872.784	1. Pembayaran Pajak Kendaraan 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.579.026	1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan PC/ Laptop 3. Pemeliharaan Printer	
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.852.190.370		Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.852.190.370		
	Monitoring Informasi Kebijakan. Opini. dan Aspirasi Publik	305.808.700	1. Pengembangan dan Perawatan Aplikasi Sibadra 2. Sewa Aplikasi NTPD 112 3. Belanja Cetak Dokumen PPID dan Keterbukaan Informasi Publik 4. Penambahan Leyer Layanan NTPD 112	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.950.326.170	1. Redaktur menulis 2. Advertorial media cetak lokal 3. Advertorial media online lokal 4. Advertorial media online nasional 5. Jumpa Pers	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	429.579.500	Penyusunan Strategi Komunikasi oleh Tim Akselerasi Pembangunan dan monitoring media	
	Penyusunan Konten	166.476.000	Pembuatan Konten digital	
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.975.177.464		Bidang Aplikasi dan Informatika
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	66.142.300		
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	66.142.300	Colocation Server Domain berupa : 1. Perpanjangan pendaftaran nama domain kotabogor.go.id ke PANDI 2. Sewa colocation server	

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.909.035.164		
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	65.000.800	Pendampingan SPBE menuju Pemerintah Digital	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.872.911.490	1. Collocatioan Server Utama (Murni) 2. Collocatioan Server Back Up (Murni) 3. Pemeliharaan Perangkat Multimedia BGR (Murni) 4. Perpanjangan lisensi akun aplikasi teleconference Zoom milik Pemerintah Kota Bogor (Murni) 5. Peningkatan Kapasitas Pusat Data (DIF) 6. Pemeliharaan Pusat Komputasi (APBDP) 7. Pengembangan Pusat Komputasi (APBDP) 8. Collocation Server Kluster Baru (APBDP - 4 bulan) 9. Pengadaan UPS (APBDP) 10. Jasa Konsultasi Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Integrated Command and Control Center (APBDP)	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	219.899.400	1. Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor 2. Sewa Layanan Colocation Server Webmail 3. Penyediaan Layanan Whatsapp Business API 4. Sosialisasi Pengembangan Aplikasi	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.168.626.174	APBD : 1. Pengadaan Jaringan FO, Rute Kelurahan Kedung Jaya - Kelurahan Kedung Waringin 2. Pengadaan Perangkat Alat Jaringan 3. Pemeliharaan dan Penataan Jaringan Internet Fiber Optik Janji Politik Bogor Cerdas: 1. Pemeliharaan CCTV existing 17 titik 2. Infrastruktur CCTV (Server CCTV) 3. Pengadaan CCTV 31 titik dari janji Politik 100 titik + jasa perencanaan dan jasa pengawasan 4. DED Pembangunan Wifi Publik untuk +- 40% dari 250 titik yang direncanakan 5. Pemasangan Wifi Publik (manage services 15 titik x 3 bulan) 6. Relokasi FO Jalak Harupat, Sudirman, Brigjen saptadji, Batu Tulis, Pajajaran, Lawang gintung (total panjang 8676 m)	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.582.597.300	Bandwidth utama 400 Mbps dan Bandwith backup 200 MBps untuk 1 tahun	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	124.750.900		Bidang Statistik Sektoral
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	124.750.900		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	RINCIAN AKTIVITAS	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	51.525.800	1. Bimtek Aplikasi Satu Data 2. Bimtek Aplikasi Satu Peta	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	38.029.000	1. Penyusunan Geospasial Tematik	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	3.954.900	1. Penyusunan Dokumen Pemeriksaan Data Statistik Sektoral	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	31.241.200	1. Penyusunan Metadata Statistik Sektoral 2. Kegiatan AsistensI Metadata Statistik	
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	622.882.400		Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	622.882.400		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	622.882.400	1. Perangkat Firewall 2. Lisensi Antivirus 3. Lisensi SSL	
		33.591.809.771		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Lampiran j. Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kerja, kedudukan perencanaan kerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan Misi dan Pencapaian Visi Organisasi.

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Didalam Rencana Kerja Perubahan ditetapkan Rencana Capaian Kerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Perubahan dilakukan seiring dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan dan kebijakan anggaran (Rencana Kerja Anggaran/RKA) yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025 Perubahan berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 (tahun berjalan atau tahun n), serta target yang akan dicapai pada Tahun 2025
serta perkiraan maju Rencana Kerja Tahun 2026.

Diawali dengan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di Bidang Pemuda dan Olahraga

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Pemerintah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang Menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (lembaran daerah kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D), Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktur di lingkungan Dinas Pemuda dan olah raga.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

A. Kepala Dinas;
B. Sekretaris membawahkan:
1. Jabatan Struktural
   1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional
   2.1 Perencana Muda

2.2 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

3. Jabatan Pelaksana

3.1 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3.2 Bendahara

3.3 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

3.4 Pengelola Bahan Perencanaan

3.5 Pengelola Keuangan

3.6 Verifikator Data Laporan Keuangan

3.7 Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.8 Pengelola Kepegawaian

3.9 Pengadministrasian Umum

3.10 Pramu Kebersihan

C. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1 Analis Kebijakan Muda

1.2 Analis Kebijakan Pertama

2. Jabatan Pelaksana

2.1 Penyuluh Kepemudaan

2.2 Pengembang Sarana dan Prasarana

2.3 Pengelola Data

2.4 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

D. Bidang Pembudayaan Olah Raga, membawahkan:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1 Analis Kebijakan Muda

1.2 Analis Kebijakan Pertama

1.3 Teknik tata Bangunan dan Perumahan Muda

2. Jabatan Pelaksana

2.1 Penyuluh Olahraga

2.2 Pengembang Sarana dan Prasarana

2.3 Pengelola data

2.4 Pengelola Penataan sarana dan Prasarana

2.5 Pengadministrasi sarana dan Prasarana

E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, membawahkan:

1. Kelompok Jabatan fungsional

1.1 analis Kebijakan Muda

1.2 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana Pemula

1.3 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana

1.4 Asisten Pelatih Olahraga Pelaksana Lanjutan

1.5 Asisten Pelatih Olahraga Penyelia

1.6 Pelatih Olahraga Pertama

1.7 Pelatih Olahraga Muda

1.8 Pelatih Olahraga Madya

2. Jabatan Pelaksana

2.1 Analis Keolahragaan

2.2 Penyuluh Olahraga

2.3 Pengelola data

2.4 Pelatih Atlet

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan jabatan dan bertanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor per awal Juli 2023 berdasarkan golongan dan unit kerjanya sebanyak 49 orang berdasarkan Struktural Jabatan dalam simpeg,sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

Tabel. 1

No	Status	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	32 Orang
3	Golongan II	7 Orang
Jumlah		**45 Orang**

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2025)

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Struktural Jabatan

Tabel. 2

No	Status	Jumlah
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	4 Orang
3	Esselon IV	1 Orang
4	Jabatan Fungsional	7 Orang
5	Pelaksana	32 Orang

Jumlah	45 Orang

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2025)

3. Karyawan NON ASN

Tabel. 3

No	Status	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	1 Orang
2	Sopir	2 Orang
3	Tenaga Kebersihan	2 Orang
4	Tenaga Keamanan	2 Orang
Jumlah		**7 Orang**

(sumber data : Kepegawaian Dispora per bulan Juli 2025)

Sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas Manajerial:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olah Raga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
2. Mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. Merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
2. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olah raga, dan bidang peningkatan prestasi olah raga;
5. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olah raga seizin wali kota;
6. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran meliputi:
   a) Menyusun rka-skpd dinas;
   b) Menyusun dpa-skpd dinas;
   c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d) Melaksanakan anggaran dinas;
   e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h) Menandatangani surat perintah membayar;
   i) Mengelola utang dan piutang daerah kota yang menjadi tanggung jawab dinas;

j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas;

k) Mengawasi pelaksanaan anggaran dinas;

l) Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;

m) Menetapkan pejabat lainnya lingkup dinas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kota;

n) Menyusun anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;

o) Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

p) Menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;

q) Menyusun dokumen pemberian hibah bantuan sosial;

r) Menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, bendahara umum daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan

s) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;

7. Melaksanakan tugas selaku pengguna barang meliputi:

a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah lingkup dinas;

b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban apbd dan perolehan lainnya yang sah;

c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

d) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

e) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g) Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada wali kota melalui pengelola barang;

h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;

8. Melaksanakan monitoring penerapan sp, menetapkan dokumen sop, dan penyusunan skm pada dinas;

9. Menetapkan perjanjian kinerja lingkup dinas; dan

10. Merumuskan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan laporan lainnya lingkup dinas.

2. SEKRETARIS

a. Tugas Manajerial :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
2. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup Dinas, dan kerumahtanggaan;
3. Mengoordinasikan penghimpunan data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
4. Mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
5. Melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
6. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:

a) Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
e) Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

7. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang meliputi:
a) Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
b) Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c) Meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
d) Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
e) Mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
f) Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
g) Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

h) Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;

i) Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

j) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan

k) Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;

8. Mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji, dan tunjangan penghasilan pegawai;
9. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca dinas, dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
10. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
12. Mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM, dan perjanjian kinerja lingkup Dinas;
13. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan
14. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas.

Sekretaris membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:

a. Tugas Manajerial :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas bawahan;
3. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

b. Tugas Teknis :

1. Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Daerah, dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;

4. Melaksanakan penatausahaan barang pengguna meliputi:

   a) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;

   b) Membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

   c) Mengoordinir pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

   d) Membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

   e) Membuat rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;

   f) Membuat usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

g) Mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;

h) Meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

i) Mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;

j) Membuat laporan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan k) Menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.

5. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;

6. Menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan latihan (diklat), atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar, dan lainnya lingkup Dinas;

7. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai, dan pengelolaan SIMPEG, serta administrasi kepegawaian lainnya;

8. Mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;

9. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;

10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;

11. Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;

12. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

13. Menyusun perjanjian kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

14. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

Tugas Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda meliputi *:*

1) memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan;
6) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
7) mengelola gaji dan tunjangan pegawai;

8) memproses dan menghimpun laporan keuangan dan dana-dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Bantuan lainnya;
9) melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah lingkup Dinas meliputi verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, penyiapan SPM, verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.
10) membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas;
11) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan;
12) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Keuangan;
13) menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan;
14) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Keuangan;
16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. PERENCANA MUDA

Tugas Perencana Muda meliputi *:*

1) memimpin pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pelaporan;
2) menyusun rencana kerja Perencanaan dan Pelaporan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberiarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) berkoordinasi dan mengevaluasi hasil kerja bersama dengan Analis Perencanaan dan Pelaporan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaporan;
6) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya lingkup Dinas;

7) melaksanakan koordinasi dengan bidang dan terkait dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
8) mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) lingkup Dinas;
9) melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector dalam perencanaan kegiatan;
10) menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan penyusun evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
11) menghimpun laporan kegiatan yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan bantuan lainnya;
12) memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;
13) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pelaporan;
14) menghimpun bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Lingkup Dinas;
15) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Lingkup Dinas;
16) menyusun Perjanjian Kinerja Perencana Muda dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
17) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta lingkup Dinas;
19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

C. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda meliputi :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi Sub kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Terkait

Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda dan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda dan Sarana Prasarana Kepemudaan;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
10. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, serta pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi;
11. Mengkoordinasikan Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
12. Mengkoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
13. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
14. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;

15. Menyusun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi kemitraan dan kewirausahaan kepemudaan :
   memimpin pelaksanaan tugas Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   1) menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   2) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   3) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   4) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   5) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas TerkaitKepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
   6) menyusun bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dan Pemuda Kader;
   7) melaksanakan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
   8) memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda

sesuai dengan minta, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah;

9) memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses modal;
10) memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan/atau forum kepeloporan pemuda;
11) mengembangkan kepeloporan pemuda yang berkarakter sesuai dengan karakter daerah;
12) melaksanakan tugas koordinasi lintas sektoral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
13) melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha;
14) memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
15) memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara organisasi kepemudaan dengan organisasi kepemudaan negara lain;
16) Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
17) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Terkait Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
18) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPDTerkait Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
19) menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
20) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

21) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Terkait Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
22) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi organisasi kepemudaan dan kepramukaan :*
   1) memimpin pelaksanaan tugas Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   2) menyusun rencana kerja Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
   7) mendorong peran aktif pemuda dalam menumbuh kembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual dan/atau kesadaran hukum;
   8) memberikan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan kepramukaan dan standarisasi organisasi kepemudaandalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;
   9) memfasilitasi upaya dan kegiatan yang bertujuan membina pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah dan nasional;

10) memberdayakan pemuda melalui kegiatan yang memberikan perlindungan dari pengaruh destruktif, membuka akses untuk pengembangan diri, advokasi, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta melibatkan pemuda dalam tahapan pelaksanaan program kepemudaan;
11) Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi;
12) Melaksanakan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
13) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada organisasi kepemudaan, kepramukaan dan standarisasi organisasi kepemudaan dalam bentuk sosialisasi, invitasi, pameran, saresehan, pagelaran, gebyar pemuda, jambore dan atau dalam bentuk lainnya;
14) Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan dalam hal keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
15) Melaksanakan pendataan dan pembaharuan data organisasi kepemudaan dan kepramukaan berbasis Elektronik;
16) Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan yang bergerak dalam ruang lingkup kepelajaran di jenjang menengah dan kemahasiswaan;
17) Melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan hibah bansos;
18) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
19) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
20) Menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
21) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

22) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Terkait Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi* Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1) memimpin pelaksanaan tugas terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
2) menyusun rencana kerja terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) engevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
7) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
8) melaksanakan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
9) mendata sarana Prasarana Kepemudaan;
10) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
11) menyusun Perjanjian Kinerja terkait Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
12) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
13) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil terkait kegiatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya

D. KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olah Raga yang meliputi Terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Terkait Olah Raga Rekreasi, Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2. Mengoordinasikan penyusunan rencanakerja Bidang Pembudayaan Olah Raga;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan member arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga;
5. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
6. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pembudayaan olah raga;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerjabawahan Bidang Pembudayaan Olah Raga;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
9. menyusun standar dan criteria pengelolaan Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga, Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus, serta Terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
10. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan Olah Raga pendidikan, Olah Raga rekreasi masyarakat, pengelolaan pembinaan sentra olah raga dan sekolah khusus Olah Raga, pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus serta Sarana dan Prasarana Olah Raga;
11. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan Olah Raga;
12. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, dan analisis, di bidang pembudayaan Olah Raga;
13. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

14. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pembudayaan Olah Raga;
15. mengoordinasikan menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Pembudayaan Olah Raga;
16. mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Pembudayaan Olah Raga;
17. melaksanakan koordinasi denganinstansi terkait;
18. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19. melaksanakan monitoring,evaluasi,pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pembudayaan Olah Raga;
20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga*
   1) memimpin pelaksanaan tugas terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
   2) menyusun rencana kerja yang terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
   6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
   7) menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
   8) menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Olah Raga pendidikan yang terkait dengan

pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;

9) melaksanakan supervisi pengelolaan Olah Raga pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
10) melaksanakan sinkronisasi dan pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga serta Sekolah Olah Raga yang di selenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
11) melaksanakan fasilitasi kemitraan dalam dan luar negeri;
12) melaksanakan bimbingan dan pengembangan karier atlet;
13) melaksanakan bimbingan teknis dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet;
14) melaksanakan supervisi dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet;
15) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
16) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
17) menyusun Perjanjian Kinerja terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
18) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kegiatan yang terkait Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Kemitraan Olah Raga;
20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi Olah raga Rekreasi, Masyarakat Dan Layanan Khusus*
   1) memimpin pelaksanaan tugas yang terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;

2) menyusun rencana kerja terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
7) memfasilitasi pengembangan Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khusus;
8) Melaksanakan penyelenggaraan olah raga massal dan kesehatan olah raga;
9) Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Olah Raga petualangan, Olah Raga tantangan, Olah Raga wisata dan pengembangan ruang publik Olah Raga;
10) Menyelenggarakan dan Mengembangkan Festival Olah Raga tradisional, Olah Raga usia dini, Olah Raga usia lanjut dan olah raga khusus;
11) Melaksanakan penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khusus;
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Olah Raga rekreasi masyarakat dan layanan khsusus;
13) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)sertabahan Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
14) Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
15) Menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
16) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

17) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kegiatan terkait Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA

1) Memimpin pelaksanaan tugas terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
2) Menyusun rencana kerja terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5) Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
6) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas yang terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
7) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat yang terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
8) Melaksanakan pendataan sarana dan Prasarana Olah Raga;
9) Merencanakan, mengembangkan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana Olah Raga;
10) Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;
11) Menyusun Perjanjian Kinerja terkait Sarana dan Prasarana Olah Raga;

12) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
13) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kegiatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

E. KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga yang meliputi Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
3. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang peningkatan prestasi Olahraga;
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasilkerja bawahan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Terkait Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
8. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
9. memantau menganalisa mengevaluasi dan melaporkan Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
10. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di Terkait Pembibitan,Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;

11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan, Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi dan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
12. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
13. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
14. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
15. mengoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
16. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga;
19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

1. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan*
   1) memimpin pelaksanaan tugas Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
   2) menyusun rencana kerja Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
   6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
   7) melaksanakan pemanduan bakat dan kompetisi atlit usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;

8) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemnaduan bakat dan kompetisi usia muda, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;
9) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, peningkatan mutu pelatih, peningkatan mutu instruktur, peningkatan mutu tenaga pendukung;
10) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
11) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Kelah Ragaan;
12) menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
13) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
14) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Terkait Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi Promosi Olah Raga, Penghargaan Dan Olah Raga Prestasi*
   1) memimpin pelaksanaan tugas Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
   2) menyusun rencana kerja Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;

6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
7) memfasilitasi Pengelolaan Kejuaraan dan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
8) menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
9) menyiapkan norma,standar,prosedur dan kriteria Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
10) melaksanakan bimbingan teknis Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
11) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pekan Olah Raga prestasi tingkat daerah, nasional, internasional dan promosi Olah Raga;
12) melaksanakan penyelenggaraan penghargaan olah raga bagi atlit berprestasi;
13) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
14) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
15) menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah Raga Prestasi;
16) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
17) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Terkait Promosi Olah Raga, Penghargaan dan Olah RagaPrestasi;
18) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. *ANALIS KEBIJAKAN MUDA yang membidangi Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan*
   1) memimpin pelaksanaan tugas Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   2) menyusun rencana kerja Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   3) mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   4) mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
   5) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   6) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas TerkaitPembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   7) menyiapkan Standarisasi Organisasi keolahragaan;
   8) memfasilitasi pengembangan organisasi keolahragaan;
   9) menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria organisasi keolahragaan;
   10) melaksanakan pembinaan dan peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   11) melaksanakan verifikasi, monitoring, pembinaan, evaluasi dan pelaporan hibah bansos;
   12) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan organisasi keolahragaan;
   13) melaksanakan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaankabupaten/kota dengan lembaga terkait;
   14) melaksanakan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi;
   15) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta bahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
   16) menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;

17) menyusun Perjanjian Kinerja Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
18) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Terkait Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Keolahragaan;
20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja ini disusun berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bogor.
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah

Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kewajiban Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perencana dan perumus kebijakan sebagian urusan kepemudaan dan keolahraga sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
2. Sebagai alat ukur dalam pelaksanaan program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor pada tahun 2024;
3. Untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional;
4. Untuk memberikan gambaran hasil akhir yang akan dicapai atas visi dan misi Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tabel. TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024

URUSAN PEMERINTAH	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
									TARGET	REALISASI		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
2	4						5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												**87.862.835.217**	**83.468.636.913**	**95%**
	1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga**	**Poin**	**A**	**BB**		**11.516.077.361**	**10.960.460.924**	**95%**
							Nilai Rata Rata Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dinas Pemuda dan Olahraga	**Poin**	**3,40**	**3,40**	**100**			
			1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Nilai AKIP Lingkup Perangkat Daerah**	**Nilai**	**A**	**BB**		**24.746.200**	**24.746.200**	**100%**
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	24.746.200	24.746.200	**100%**
			2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persen**	**100**	**98**	**98**	**8.576.862.917**	**8.402.726.431**	**98%**
					2	Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	49	100	8.576.862.917	8.402.726.431	**98%**
			3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**554.950.900**	**423.227.255**	**76%**
					3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	**100**	38.974.000	38.974.000	**100%**
					4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	**100**	96.337.700	94.721.300	**98%**
					5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	**100**	33.355.500	33.355.500	**100%**
					6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	**100**	64.350.000	35.940.000	**56%**
					7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	**100**	49.907.700	49.896.475	**100%**
					8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	**100**	17.600.000	14.715.000	**84%**
					9	Sun Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket /Bahan Material yang disediakan	Paket	0	0	**0**	0	0	**0%**
					10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	**100**	254.426.000	155.624.980	**61%**
			4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**896.480.100**	**861.457.496**	**96%**
					11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	0	**0**	0	0	**0%**
					12	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	29	29	**100**	896.480.100	861.457.496	**96%**
			5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.288.587.244**	**1.080.124.842**	**84%**
					13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	3	3	**100**	927.657.300	766.548.624	**83%**
					14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	3	3	**100**	67.865.400	66.820.850	**98%**
					15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	7	7	**100**	293.064.544	246.755.368	**84%**

			6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**174.450.000**	**168.178.700**	**96%**
					16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	2	**100**	174.450.000	168.178.700	**96%**
	2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**					**Predikat Kota Layak Pemuda (Permen PORA No 11 Tahun 2017)**	**Predikat**	**50 Persen Menuju Kota Layak**	**50 Persen Menuju Kota Layak Pemuda**	**100**	**2.096.992.500**	**1.847.377.687**	**88%**
							Persentase Pemuda Pelopor Yang Aktif Menggerakkan Kegiatan Kepemudaan	**Persen**	**0**	**0**	**0**			**0%**
			7	**Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			**Persentase Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**1.489.691.500**	**1.249.061.687**	**84%**
					17	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	30	30	100	0	0	**0%**
					18	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	70	120	171%	291.880.300	186.075.300	**64%**
					19	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Orang	100	100	100	356.599.500	303.777.100	**85%**
					20	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	Unit	2	2	100	400.000.000	353.291.287	**88%**
					21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Orang	56	30	54%	441.211.700	405.918.000	**92%**
			8	**Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**			**Jumlah OKP yang terbina**	**OKP**	**5**	**5**	100	**607.301.000**	**598.316.000**	**99%**
					22	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	100	607.301.000	598.316.000	**99%**
	3	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**					**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persen**	**100**	**100**	100	**1.040.894.400**	**1.031.495.000**	**99%**
			9	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**Persen**	**100**	**100**	100	**1.040.894.400**	**1.031.495.000**	**99%**
					23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	laporan	1	1	100	50.894.400	41.495.000	**82%**
					24	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	lembaga	1	1	100	990.000.000	990.000.000	**100%**
	4	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**					**Prosentase Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)**	**Persen**	**49**	**56,91**	116,1429	**73.208.870.956**	**69.629.303.302**	**95%**
							Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan (Per 916,052 Penduduk)	**Per 916,052**	**0,001734:2,08**	**0.003264:2,08**	188			
							Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standart nasional / lokal	**Persen**	**49,98**	**49,98**	100			
			10	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**			**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**Persen**	**100**	**100**	100	**26.267.413.900**	**22.797.995.335**	**87%**
					25	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	Unit	5	5	100	280.917.300	228.243.005	**81%**
					26	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	100	235.688.200	203.256.080	**86%**
					27	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	100	25.750.808.400	22.366.496.250	**87%**

			11	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**Jumlah Perolehan Medali Tingkat Provinsi**	**Medali**	**5**	**241**	4820	**42.065.934.500**	**42.054.720.700**	**100%**
					28	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	300	350	117%	239.684.500	230.720.700	**96%**
					29	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	505	101	39.575.000.000	39.575.000.000	**100%**
					30	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan	Orang	72	76	106%	2.251.250.000	2.249.000.000	**100%**
			12	**Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Perolehan Medali**	**Medali**	**5**	**5**	100	**883.778.400**	**849.379.200**	**96%**
					31	Sub Kegiatan 03.202.01. Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	100	351.005.800	349.405.800	**100%**
					32	Sub Kegiatan 03.202.03. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	Orang	264	274	104%	532.772.600	499.973.400	**94%**
			13	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**100**	**100**	100	**3.991.744.156**	**3.927.208.067**	**98%**
					33	Sub kegiatan 03.205.02 Sub Kegiatan Permberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	4	100	1.389.158.600	1.365.840.200	**98%**
					34	Sub Kegiatan 03.205.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	6	6	100	2.602.585.556	2.561.367.867	**98%**

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	SPM	IKK	Target			Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	persentase penurunan jumlah pemuda pengguna narkoba, psikotropika dan minuman keras			5	5	5	5	5	100	100	
2	persentase prmuda pelopor yg aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan			20	20	20	20	20	100	100	
3	persentase sarana prasaranaolahraga yg tersedia sesuai dgn standar nasional/lokal			33,34	50,01	66,64	33,34	50,01	66,64	83,33	
4	rasio ketersediaan SDM tenaga keolahragaan			0,001552:2,08	0,001661:2,08	0,001180:2,08	0,001552:2,08	0,003264:2,08	100	100	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bogor sebagai Kota Layak Pemuda, Kota Prestasi dan berbudaya Olahraga di tahun 2023 dan 2024 sudah menunjukan peningkatan yang baik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas, antara lain :

a. Masih perlu ditingkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan.
b. Kurangnya Optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas.
c. Kurangnya Optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa.
d. Perbaikan manajemen pembinaan olahraga.
e. Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Olahraga masih banyak yang belum layak menjadi standar Nasional
    f. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih perlu ditingkatkan.
    g. Angka Kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan;
    h. Kurangnya inovasi dan keratifitas pemuda.
    i. Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja.
    j. Kurangnya Kreativitas Pemuda.
    k. Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan.

l. Masih minimnya kader pemuda berbasis gender.

Dengan melihat permasalahan diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor merumuskan cara penanganan yang akan dilaksanakan tahun 2025 antara lain, sebagai berikut :

1. Usulan peningkatan anggaran biaya urusan kepemudaan dan olahraga diharapkan akan mempengaruhi capaian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana Olahraga serta meningkatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan berkompeten dalam pengelolaan kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga merencanakan usulan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta mengusulkan pegawai berpotensi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor untuk diberikan pendidikan sesuai dengan program dan kegiatan yang diperlukan;

2.4. Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Kepemudaan dan keolahragaan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan mengacu kepada Program :

a. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b. Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
c. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 Perubahan, adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025 Perubahan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2025-2026 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dimana dokumen tersebut memperhatikan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya;

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan yang ada di Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor mengacu pada Prioritas Pembangunan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Visi dan Misi Pembangunan Nasional disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (NAWACITA) dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas nasional. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, terdiri dari 5 (lima) prioritas, yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemetaan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektoril, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Ketahanan dan Keamanan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 Perubahan Kota Bogor selain untuk mendukung tercapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga sesuai dengan pririts pembangunan daerah kota bogor, antara lain :

a. Pemetaan Pemenuhan akses pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas;

b. Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Percepatan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan;
d. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal;
e. Penguatan Reformasi Birokrasi;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) PD

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Periode 2019 – 2024 , Dinas Pemuda dan Olahraga mengemban beberapa tugas diantaranya adalah pertama mengemban sebagian misi pertama Kota Bogor yaitu *"Mewujudkan Kota Yang Sehat "* Suatu Kondisi yang bersih,nyaman,aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahan Daerah Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan kualitas lingkungan, baik fisik ,sosial dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Tujuan dari Misi 1 yaitu : *Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas*, sasarannya *Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat*, dengan indikator sasaran *Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga.*

Tugas kedua adalah mengemban sebagian misi kedua kota Bogor yaitu *" Mewujudkan Kota Yang Cerdas"*adalah Kota yang bisa mengelola sumber daya alam dan Manusia, sehingga warganya dapat hidup aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan Kota. Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "Kota" ditambah "Teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

Tujuan dari Misi 2 yaitu : *Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berdasarkan (smart people),* sasarannya *Meningkatnya Kualitas Generasi Muda,* dengan indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Generasi Muda, dengan indikator sasaran *Indeks Pembangunan Pemuda.*

Tugas ketiga adalah mengemban sebagian misi ketiga Kota Bogor yaitu *" Mewujudkan Kota Yang Sejahtera"*adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Tujuan dari Misi 3 yaitu : *Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat,* sasarannya *Menurunnya Tingkat Pengangguran*, dengan indikator sasaran *Tingkat Pengangguran Terbuka.*

Berikut ini disajikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024, sebagai berikut :

VISI, MISI,TUJUAN,SASARAN DAN STRATEGI KOTA BOGOR TERKAIT DENGAN OPD YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA

RPJMD KOTA BOGOR																
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat												
		Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	45	53	Meningkatnya kebugaran masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	45	47	49	51	53
										Rasio Ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	0,001552:2,08	0,001661:2,08	0,001734:2,08	0,001808:2,08	0,001887:2,08
										Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	33,34	33,34	50,1	66,67	83,3
										Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	0	1	2	1	1

RPJMD KOTA BOGOR															
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
2	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (smart People)	Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan berkarakter (smart people)	Indek Pembangunan Pemuda	NA	67,05										
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Indek Pembangunan Pemuda			Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penuatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase penurunsn jumlsh pemuda pengguna narkoba, psikotropika, dan minuman keras	0	5	5	5	5
										Persentase pemuda pelopor yang aktif menggerakan kegiatan kepemudaan	0	0	20	20	20
										Predikat Kota Layak Pemuda (Permenpora No. 11 Tahun 2017)	30% menuju KLP	40% menuju KLP	50% menuju KLP	75% menuju KLP	KLP
							Peningkatan Olahraga Prestasi	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Internasional	0	0	1	1	1
										Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional	0	0	1	1	1
										Jumlah Perolehan Medali Tingkat Jawa Barat	0	0	13	11	15

RPJMD KOTA BOGOR															
NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PROGRAM		CAPAIAN KINERJA PROGRAN				
				AWAL	AKHIR				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3	Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat													
		Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,28	35		Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	Kepemudaan dan Keolahragaan	jumlah Wirausaha muda pemula	0	35	35	35	35

Sasaran dan Target Kerja Sasaran dari Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026 disajikan pada matrik, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan			1. PREDIKAT SAKIP DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	predikat	A	A	13,861,043,591	A	17,374,317,290	A	18,433,905,130
			2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	point	3.52	3.55		3.57		3.57	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	nilai indeks	81.5	83.20	13,861,043,591	83.30	17,374,317,290	66	18,433,905,130
			2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	NA	91%		92%		92%	
			3. Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	NA	95%		95%		95%	
			4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	inovasi	NA	≥ 1 Inovasi/tahun/PD		≥ 1 Inovasi/tahun/PD		≥ 1 Inovasi/tahun/PD	

		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	24.67	27.01	13,861,043,591	27.34	17,374,317,290	27.34	18,433,905,130
			2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	22.13	26.55		26.82		26.82	
			3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	point	11.15	12.48		13		13	
			4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	point	23.55	23.75		23.98		23.98	
			5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100.00		100	
			6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	NA	100		100		100	
			7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	NA	94		94		94	
			8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	%	NA	95		95		95	

			9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	96	97		97		97	
			10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	NA	100		100		94	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	point	88.13	88.75		89.25		89.25	
		Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	point	89.25	89.50		89.75		89.75	
			2 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	point	90.00	90.50		90.75		90.75	
			3 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	point	89.30	89.50		89.75		89.75	
			4 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	point	87.50	88.38		89.39		89.39	

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah**	**persen**	**100**	**100**	**90,000,000**	**100**	**90,000,000**	**100**	**90,000,000**
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**4**	**5**	**5,000,000**	**4**	**5,000,000**	**17**	**5,000,000**
		1. Penyusunan dokumen renstra		dokumen		1	1,000,000			1	
		2. penyusunan Renja Murni dan Renja Perubahan		dokumen	1	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
		3. Penyusunan Dokumen LKPJ		dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
		4. Penyusunan Dokumen Management Resiko Kinerja		dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
		5. Penyusunan Dokumen LKIP		dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Laporan**	**NA**	**10**	**85,000,000**	**10**	**85,000,000**	**10**	**85,000,000**
		Jasa Konsultansi Managemen : SP, SOP,dan SKM		paket	NA	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000
		Cetak buku Laporan		buku	NA	25	10,000,000		10,000,000		10,000,000

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	%	98%	100%	8,738,413,866	100%	11,087,187,930	100%	11,087,187,930
		Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**orang**	46	52	8,738,413,866	56	11,087,187,930	56	11,087,187,930
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**		**100**	**100**	**1,051,989,000**	**100**	**2,160,942,000**	**100**	**2,160,942,000**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**Paket**	**1**	**1**	**40,000,000**	**1**	**50,000,000**	**1**	**50,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Paket	1	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Paket**	**7**	**6**	**80,480,900**	**6**	**100,000,000**	**6**	**100,000,000**
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Paket		1	2,370,000	1	2,370,000	1	2,370,000
		Belanja Isi Tabung Gas 12 Kg		Paket		1	2,853,600	1	2,853,600	1	2,853,600
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Paket		1	34,560,800	1	43,379,900	1	43,379,900
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Paket		1	20,219,000	1	25,219,000	1	25,219,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		Paket		1	15,677,500	1	20,677,500	1	20,677,500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		Paket		1	4,800,000	1	5,500,000	1	5,500,000

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**Paket**	**1**	**3**	**40,250,500**	**3**	**45,000,000**	**3**	**45,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		Paket		**1**	38,246,500	**1**	42,761,000	**1**	42,761,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		Paket		**1**	222,000	**1**	259,000	**1**	259,000
		Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket		**1**	1,782,000	**1**	1,980,000	**1**	1,980,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**Paket**	**2**	**2**	**250,000,000**	**2**	**300,000,000**	**2**	**300,000,000**
		Belanja Natura dan Pakan-Natura		Paket		1	21,560,000	1	24,640,000	1	24,640,000
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Paket		1	228,440,000	1	275,360,000	1	275,360,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**Paket**	**2**	**2**	**50,527,600**	**2**	**57,090,000**	**2**	**57,090,000**
		Penggandaan/Fotocopy		Paket		1	30,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000
		Belanja Cetak Spanduk		Paket		1	20,527,600	1	21,090,000	1	21,090,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan**	**dokumen**	**2**	-	-	-	-	-	-

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang – undangan yang disediakan**	**dokumen**	**2**	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Laporan**	**1**	**3**	**590,730,000**	**3**	**1,608,852,000**	**3**	**1,608,852,000**
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Laporan		1	15,730,000	1	17,730,000	1	17,730,000
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Laporan		1	75,000,000	1	290,995,000	1	290,995,000
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Laporan		1	500,000,000	1	1,300,127,000	1	1,300,127,000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**%**	**100**	**100**	**706,151,700**	**100**	**1,035,846,200**	**100**	**1,326,785,200**
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan**	**unit**	**0**	**1**	**100,000,000**	**1**	**500,000,000**	**6**	**500,000,000**
		Belanja Modal Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4		unit		0	-	0	400,000,000	2	400,000,000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 3 (Motor Sampah)		unit		2	100,000,000	2	100,000,000	4	100,000,000
		Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2		unit		2	90,000,000	5	225,000,000	10	225,000,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan**	**unit**	**29**	**44**	**478,240,700**	**46**	**385,033,200**	**0**	**584,444,200**
		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		unit			106,080,000		106,080,000		106,080,000

		BM AC Standing Floor		unit		4	116,086,800		-		116,086,800
		BM AC Split		unit		6	31,368,600	6	31,368,600		31,368,600
		BM Personal Computer		unit		7	141,381,100	7	141,381,100		141,381,100
		BM Printer Multifungsi		unit			-	2	12,804,000		12,804,000
		BM Laptop		unit			-	4	43,045,200		43,045,200
		BM Camera CCTV		unit		14	37,976,400		-		37,976,400
		BM Camera Digital		unit		2	32,147,800		-		32,147,800
		BM Smart TV		unit			-	1	20,000,000		20,000,000
		BM Mesin Penghancur Kertas		unit		4	13,200,000		-		13,200,000
		BM Drone Camera		unit			-	1	30,354,300		30,354,300
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	**Jumlah paket mebel yang disediakan**	**paket**	**NA**	**3**	**127,911,000**	**3**	**150,813,000**	**6**	**242,341,000**
		BM Filling Cabinet		Paket		1	36,383,000		36,383,000	1	36,383,000
		BM Tempat Tidur Besi		Paket		1	79,010,000		-	1	79,010,000
		BM Meja Kerja 1/2 biro		Paket		1	12,518,000		-	1	12,518,000
		Karpet		Paket			-	1	30,000,000	1	30,000,000
		BM Kursi Kerja Pejabat		Paket			-	1	54,430,000	1	54,430,000
		BM Sofa Tamu		Paket			-	1	30,000,000	1	30,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**2,310,499,025**	**100**	**2,296,351,160**	**100**	**2,285,000,000**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan**	**laporan**	**3**	**3**	**1,541,068,545**	**3**	**1,700,000,000**	**3**	**1,700,000,000**
		Belanja Tagihan Air		laporan		1	742,500,000	1	877,500,000	1	877,500,000
		Belanja Tagihan Listrik Kantor dan Gedung Sarana Prasaran Olahraga		laporan		1	794,750,000	1	823,650,000	1	823,650,000

		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		laporan		1	10,800,000	1	10,800,000	1	10,800,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**laporan**	**3**	**3**	**80,900,000**	**3**	**85,000,000**	**3**	**85,000,000**
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		laporan		1	18,300,000	1	21,350,000	1	21,350,000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		laporan		1	21,900,000	1	29,200,000	1	29,200,000
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		laporan		1	20,700,000	1	24,150,000	1	24,150,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan**	**laporan**	**7**	**7**	**688,530,480**	**7**	**511,351,160**	**10**	**500,000,000**
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi		laporan	693,990,755	1	83,200,000	1	83,200,000	1	83,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		laporan	500,000,000	1	164,010,000	1	164,010,000	1	164,010,000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan		laporan		1	292,500,000	1	136,937,480	1	355,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Supir		laporan		1	71,000,000	1	71,000,000	1	71,000,000
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		laporan		1	41,688,000	1	30,108,000	1	42,316,800

		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		laporan		1	1,658,880	1	1,198,080	1	1,127,520
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		laporan		1	2,073,600	1	1,497,600	1	1,408,200
		Belanja Jaminan Hari Tua		laporan			32,400,000		23,400,000		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**%**	**100**	**100**	**963,990,000**	**100**	**703,990,000**	**100**	**1,483,990,000**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya**	**unit**	**2**	**3**	**183,990,000**	**3**	**183,990,000**	**3**	**183,990,000**
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		unit		1	8,500,000	1	8,500,000	1	8,500,000
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		unit		1	42,090,000	1	42,090,000	1	42,090,000
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		unit		1	133,400,000	1	133,400,000	1	133,400,000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi**	**unit**	**NA**	**1**	**260,000,000**	**1**	**-**	**1**	**260,000,000**
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		unit			6,000,000				6,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan		unit			30,000,000				30,000,000

		BM Pemeliharaan Gedung Kantor		unit			200,000,000				200,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan		unit			24,000,000				24,000,000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi**	**unit**	**NA**	**2**	**520,000,000**		**520,000,000**	**3**	**1,040,000,000**
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					-		6,000,000		6,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					-		30,000,000		30,000,000
		Perbaikan halaman depan gedung					-		200,000,000		200,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					-		24,000,000		24,000,000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					6,000,000		-		6,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					30,000,000		-		30,000,000
		BM Pengadaan Partisi Ruangan dan Front Office Tahap I		unit		1	200,000,000		-	1	200,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					24,000,000		-		24,000,000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					-		6,000,000		6,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					-		30,000,000		30,000,000
		BM Pengadaan Partisi Ruangan dan Front Office Tahap II		unit			-	1	200,000,000	1	200,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					-		24,000,000		24,000,000
		Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					6,000,000		-		6,000,000

		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan					30,000,000		-		30,000,000
		BM Penataan Taman Kantor, Pos Satpam dan Papan nama Kantor Dispora		unit		1	200,000,000		-	1	200,000,000
		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan					24,000,000		-		24,000,000
Terwujudnya Pembudayaan Olah raga pada Masyarakat			**Indeks Pembangunan Olahraga/SDI**	**indeks**	**NA**	**0.274**	**89,867,423,000**	**0.274**	**155,836,680,026**	**0.274**	**163,324,098,318**
	Meningkatnya pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga		**1. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO)**	**%**	**57.3**	**59**	**89,867,423,000**	**60**	**155,836,680,026**	**60**	**163,324,098,318**
			2. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	**%**	**NA**	**10**		**50**		**50**	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional**	**%**	**50**	**50**	**89,867,423,000**	**50**	**155,836,680,026**	**50**	**163,324,098,318**
			2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	**%**	**NA**	**80**		**33**		**100**	
			3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**%**	**74**	50		55		55	
			4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**Persen**	**NA**	**50%**		**55%**		**55%**	

		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**%**	**100**	**100**	**2,020,438,000**	**100**	**1,300,000,007**	**100**	**3,117,162,318**
		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	**Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan**	**lokasi**	**0**	**5**	**500,000,000**	**5**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**
		Pendataan Sentra Olahraga di Kota Bogor		lokasi		5	500,000,000	5	500,000,000	1	500,000,000
		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar**	**dokumen**	**0**	**2**	**788,000,000**	**2**	**800,000,000**	**2**	**800,000,000**
		Sport Development Indeks (SDI)	**Sport Development Indeks (SDI)**	**dokumen**		**1**	**288,000,000**	**1**	**300,000,000**	**1**	**300,000,000**
			Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy				10,000,000		22,000,000		22,000,000
			Belanja bahan kegiatan kantor kertas dan coper				4,000,000		4,000,000		4,000,000
			Belanja peralatan dan pendukung olahraga				64,000,000		64,000,000		64,000,000
			Belanja Snak rapat,jamuan tamu NasiBox dan Snak				57,000,000		57,000,000		57,000,000

			Honorarium tim kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan				20,900,000		20,900,000		20,900,000
			Belanja perjalanan dinas dalam kota/pengganti tranport				122,850,000		122,850,000		122,850,000
			Belanja modal alat kesehatan umum/timbangan badan				5,000,000		5,000,000		5,000,000
			Air Mineral				4,250,000		4,250,000		4,250,000
		Senam Bogor Berlari Edisi 2	**dokumen**			**1**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**	**1**	**500,000,000**
			Belanja Atk,Cetak spandukdan Foto Copy				10,000,000		20,000,000		20,000,000
			Buku panduan				7,500,000		7,500,000		7,500,000
			Dekorasi kegiatan				10,000,000		10,000,000		10,000,000
			Juri perlombaan				16,000,000		16,000,000		16,000,000
			Bahan jasa penyelenggara acara(Vidio Suting)				30,000,000		30,000,000		30,000,000
			hadiah Perlombaan				45,000,000		45,000,000		45,000,000
			Sank rapat dan jamuan tamu nasi bok, snak				25,000,000		25,000,000		25,000,000
			pelatihan senam seris 2 (ful bot)				-		200,000,000		200,000,000
			uang harian peserta				27,500,000		27,500,000		27,500,000
			sosialisasi senam seris 2, 6 kecamata kota bogor				119,000,000		119,000,000		119,000,000

		Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tk. Kab/Kota	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan**	**unit**		**6**	**732,438,000**	**1**	**100,000,000**	**7**	**2,617,162,318**
		Revieu DED Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Kecamatan Bogor Barat		unit				1	100,000,000	1	100,000,000
		Manajemen Konstruksi Wisma Atlet		paket		1	-			1	1,784,724,318
		Manajemen Konstruksi Lapangan Tembak		paket		1	732,438,000			1	732,438,000
		Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Kayumanis (BANKEU PROVINSI)		**paket**		**2**	**297,991,409,214**			**2**	**198,932,425,531**
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**%**	**100**	**100**	**55,105,056,000**	**100**	**2,200,000,019**	**100**	**7,870,256,000**
		Sub kegiatan Sub Kegiatan Permberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi**	**laporan**	**4**	**2**	**1,150,000,000**	**2**	**1,650,000,000**	**2**	**1,650,000,000**
		Giat Olahraga Senam Masyarakat		**laporan**		**1**	**150,000,000**	**1**	**150,000,000**	**1**	**150,000,000**

		Honor Intruktur					70,000,000		70,000,000		70,000,000
		Honor Crew Senam					30,000,000		30,000,000		30,000,000
		Air Mineral Senam					30,000,000		30,000,000		30,000,000
		Belanja Seragam Senam					10,000,000		10,000,000		10,000,000
		sepatu					10,000,000		10,000,000		10,000,000
		HIBAH KORMI		**laporan**		**1**	**1,000,000,000**	**1**	**1,500,000,000**	**1**	**1,500,000,000**
		Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat**	**dokumen**	**2**	**2**	**550,000,000**	**2**	**550,000,000**	**2**	**550,000,000**
		Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Kota Bogor:	**dokumen**			**1**	**300,000,000**		**300,000,000**		**300,000,000**
		honor wasit Juri					40,000,000		40,000,000		40,000,000
		honor panitia					6,000,000		6,000,000		6,000,000
		pembelian alat Ortrad					15,000,000		15,000,000		15,000,000
		Hadiah Perlombaan					112,500,000		112,500,000		112,500,000
		mamin dan Snek					50,000,000		50,000,000		50,000,000

		Seragam kegiatan					25,000,000		25,000,000		25,000,000
		Bener/spanduk					8,000,000		8,000,000		8,000,000
		sertifikat					6,000,000		6,000,000		6,000,000
		Air Mineral					4,500,000		4,500,000		4,500,000
		SPPD					33,000,000		33,000,000		33,000,000
		Giat Invitasi Olahraga Tradisional Tk.Provinsi	**dokumen**			**1**	**250,000,000**		**250,000,000**		**250,000,000**
		Honor atlit,pelatih dan panitia					85,000,000		85,000,000		85,000,000
		Hotel					30,000,000		30,000,000		30,000,000
		Sewa Mobil					10,000,000		10,000,000		10,000,000
		Seragam Kontingen dan Seragam Tanding					50,000,000		50,000,000		50,000,000
		Mamin Kegiatan Provinsi					75,000,000		75,000,000		75,000,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	**Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai**	**unit**		**19**	**53,405,056,000**	**6**	**1,100,000,000**	**19**	**5,670,256,000**
		Revitalisasi Stadion Pajajaran		**unit**		**1**	40,000,000,000				
		JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		Paket		1	3,020,000,000				

		JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		Paket		1	1,750,000,000				
		Pemagaran dan Fasilitas Penunjang GOR Pajajaran		unit		1	2,500,000,000			1	2,500,000,000
		JK. Perencanaan Stadion Pajajaran		dokumen		1	255,750,000			1	255,750,000
		JK. Pengawasan Stadion Pajajaran		dokumen		1	161,750,000			1	161,750,000
		JK. Perencanaan Gedung Indoor A		dokumen		1	100,000,000			1	18,110,000
		JK. PengawasanGedung Indoor A		dokumen		1	100,000,000			1	10,590,000
		Rehabilitasi Gedung Indoor A		unit		1	1,000,000,000				
		Pengadaan Barang Gedung Indoor A : Soundsystem (Tata Suara)		unit		1	100,000,000				
		Pengadaan Barang Gedung Indoor A : LED VIDEOTRON Indoor		unit		1	150,000,000				
		JK. Perencanaan Gedung Indoor B		dokumen		1	100,000,000			1	18,110,000
		JK. PengawasanGedung Indoor B		dokumen		1	100,000,000			1	10,590,000
		Rehabilitasi Gedung Indoor B		unit		1	1,000,000,000				
		Semi Indoor Basket		unit		1	100,000,000	-	0	1	100,000,000

		JK. Perencanaan Semi Indoor Basket		dokumen		1	18,110,000			1	18,110,000
		JK. Pengawasan Semi Indoor Basket		dokumen		1	10,590,000			1	10,590,000
		Semi Indoor Volly		unit		1	100,000,000	-	0	1	100,000,000
		JK. Perencanaan Semi Indoor Volly		dokumen		1	18,110,000			1	18,110,000
		JK. Pengawasan Semi Indoor Volly		dokumen		1	10,590,000			1	10,590,000
		Lapangan Terbuka Luar		unit		1	150,000,000	0	0	1	150,000,000
		JK. Perencanaan Lapangan Terbuka Luar		dokumen		1	27,165,000			1	27,165,000
		JK. Pengawasan Lapangan Terbuka Luar		dokumen		1	15,885,000			1	15,885,000
		Kolam Renang Mila Kencana		unit		1	200,000,000	-	0	1	200,000,000
		JK. Perencanaan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen		1	36,220,000			1	36,220,000
		JK. Pengawasan Kolam Renang Mila Kencana		dokumen		1	21,180,000			1	21,180,000
		Panjat Tebing		unit		1	100,000,000	0	0	1	100,000,000
		JK. PerencanaanPanjat Tebing		dokumen		1	18,110,000			1	18,110,000

		JK. Pengawasan Panjat Tebing		dokumen		1	10,590,000			1	10,590,000
		Wisma Atlet		unit		1	150,000,000			1	150,000,000
		JK. Perencanaan Wisma Atlet		dokumen		1	27,165,000			1	27,165,000
		JK. Pengawasan Wisma Atlet		dokumen		1	15,885,000			1	15,885,000
		Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Selatan		unit		1	300,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		JK. Perencanaan Kawasan GOR Selatan		dokumen		1	52,482,000			1	52,482,000
		JK. Pengawasan Kawasan GOR Selatan		dokumen		1	30,906,000			1	30,906,000
		Pemeliharaan Fisik Kawasan GOR Utara		unit		1	300,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		JK. Perencanaan Kawasan GOR Utara		dokumen		1	52,482,000			1	52,482,000
		JK. Pengawasan Kawasan GOR Utara		dokumen		1	30,906,000			1	30,906,000
		Kimia Kolam Renang Mila Kencana		paket		1	350,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		Kimia Rumput Stadion Pajajaran		unit		1	182,200,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		Pemeliharaan Rumput Stadion Pajajaran		unit		1	190,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000

		Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Selatan		paket		1	179,490,000	0		1	179,490,000
		Pemeliharaan Rumput Sintetis dan Lingkungan Kawasan GOR Utara		paket		1	179,490,000	0		1	179,490,000
		P O K I R		paket		-	0	-	-		
		M U S R E M B A N G Tenis meja		paket		4	40,000,000	-	-	4	40,000,000
		Honorarium Pendampingan Kejaksaan/Tim/Tenaga Ahli		paket		2	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kejuaraan**	**2**	**2**	**2,153,604,000**	**2**	**2,047,654,800**		**2,047,654,800**
		Sub Kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Sub Kegiatan Keiikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	**Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan**	**Atlet**	**207**	**350**	**2,153,604,000**	**350**	**2,047,654,800**	**350**	**2,047,654,800**
		1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Kegiatan	NA	1	1,427,035,000	1	1,321,085,800	1	1,321,085,800
			Honorarium PP/PPK				6,270,000		6,270,000		6,270,000
			ATK				4,415,000		4,415,000		4,415,000
			Obat				23,324,000		23,324,000		23,324,000
			Perlengkapan Olahraga				285,336,000		185,996,800		185,996,800
			Minum				49,620,000		49,620,000		49,620,000
			Penginapan/Hotel				877,760,000		723,360,000		723,360,000
			Kendaraan				179,410,000		186,400,000		186,400,000
			Rapat				900,000		900,000		900,000
			Uang saku				216,000,000		140,800,000		140,800,000
		2. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)		Kegiatan	NA	1	726,569,000	1	726,569,000	1	726,569,000
			ATK				4,415,000		4,415,000		4,415,000

			Perlengkapan Olahraga				110,964,000		110,964,000		110,964,000
			Minum				49,620,000		49,620,000		49,620,000
			Penginapan/Hotel				345,240,000		345,240,000		345,240,000
			Kendaraan				102,520,000		102,520,000		102,520,000
			Uang saku				84,000,000		84,000,000		84,000,000
			Rapat				900,000		900,000		900,000
			Perjalanan Dinas				28,910,000		28,910,000		28,910,000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi**	**Medali**	**74**	**50**	**30,588,325,000**	**250**	**150,289,025,200**	**250**	**150,289,025,200**
		Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	**Jumlah Atlet yang diseleksi**	**Atlet/Orang**	**250**	**300 orang**	**149,325,000**	**300 orang**	**149,325,000**	**300 orang**	**149,325,000**
		Seleksi Atlet menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		Atlet/Orang		500 orang	149,325,000	300 orang	149,325,000	300 orang	149,325,000
			ATK				3,009,000		3,009,000		3,009,000
			Obat				6,668,000		6,668,000		6,668,000
			Perlengkapan Olahraga				34,788,000		34,788,000		34,788,000

			Minum				8,040,000		8,040,000		8,040,000
			Honor Wasit				49,500,000		49,500,000		49,500,000
			Honor Pelatih				21,600,000		21,600,000		21,600,000
			Rapat				780,000		780,000		780,000
			Makan Aktivitas Lapangan				12,600,000		12,600,000		12,600,000
			Perjalanan Dinas				12,340,000		12,340,000		12,340,000
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan**	**Atlet/Orang**	**300 orang**		**30,439,000,000**		**111,134,975,200**		**111,134,975,200**
		1. Pemusatan Latihan (Training Center) menuju Pekan Olahraga Tingkat Daerah/Provinsi		**Orang**	**300**	**350**	**150,000,000**	**350**	**150,000,000**	**350**	**150,000,000**
			Honorarium PPTK				10,080,000		10,080,000		10,080,000
			Honorarium PP/PPK				2,090,000		2,090,000		2,090,000
			ATK				900,000		900,000		900,000
			Obat				6,668,000		6,668,000		6,668,000
			Perlengkapan Olahraga				52,232,000		52,232,000		52,232,000

			Minum				8,040,000		8,040,000		8,040,000
			Rapat				900,000		900,000		900,000
			Uang saku				56,700,000		56,700,000		56,700,000
			Perjalanan Dinas				12,390,000		12,390,000		12,390,000
		2. Dana Cadangan PORPROV (ada di BKAD)					**50,000,000,000**		**0**		**100,000,000,000**
		3. Hibah KONI Kota Bogor (Pelaksanaan PORPROV 2026)		**Lembaga/Organisasi**	**1**	**1**	**29,989,000,000**	**1**	**70,984,975,200**	**1**	**70,984,975,200**
		4. Hibah NPCI Kota Bogor		**Lembaga/Organisasi**	**1**	**1**	**300,000,000**	**1**	**40,000,000,000**	**1**	**40,000,000,000**
		Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Penghargaan**	**Orang**	**0**			**825**	**39,004,725,000**	**825**	**39,004,725,000**
		Pemberian Penghargaan/Bonus Kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi			**0**			**825**	**39,004,725,000**	**825**	**39,004,725,000**
		1. Penghargaan PORPROV						825	**39,004,725,000**	825	**39,004,725,000**
			Emas Perorangan	Medali				141	14,100,000,000	141	14,100,000,000
			Emas Berpasangan	Medali				80	4,920,000,000	80	4,920,000,000
			Emas Beregu	Medali				73	2,343,000,000	73	2,343,000,000
			Perak Perorangan	Medali				65	2,178,000,000	65	2,178,000,000
			Perak Berpasangan	Medali				53	1,060,000,000	53	1,060,000,000

			Perak Beregu	Medali				80	1,080,000,000	80	1,080,000,000
			Perunggu Perorangan	Medali				58	783,000,000	58	783,000,000
			Perunggu Berpasangan	Medali				60	600,000,000	60	600,000,000
			Perunggu Beregu	Medali				80	560,000,000	80	560,000,000
			Pelatih	Medali				135	10,125,000,000	135	10,125,000,000
			Pajak Penghargaan						1,255,725,000		1,255,725,000
Terwujudnya Pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan			**Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor**	**%**	**NA**	**0.0002**	**2,299,500,000**	**0.0003**	**3,341,000,000**	**0.0003**	**3,955,500,000**
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda		**1. Persentase peningkatan wirausaha muda baru**	**%**	**NA**	**1.8**	**2,299,500,000**	**2.1**	**3,341,000,000**		**3,955,500,000**
			2. Persentase Pemuda yang berprestasi di Kota Bogor	**%**	**NA**	**0.0002**		**0.0003**			
		Program Pengembangan Kapsitas daya saing Pemuda	**persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan**	**%**	**NA**	21.18	**1,309,500,000**	22	**2,101,000,000**	21	**2,715,500,000**
			Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	**%**	**NA**	4		4		4	
			Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	**%**	**NA**	2.175		2.18		2.173	
			Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	**%**	**NA**	30		35		30	

		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**%**	**100**	**100**	**809,500,000**	**100**	**1,601,000,000**	**100**	**2,215,500,000**
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	**Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya**	**orang**	**20**	**30 orang**	**98,000,000**	**30 orang**	**98,000,000**	**30 orang**	98,000,000.00
		1. Uji Kopetensi dan Seleksi Pemuda Pelopor				**30 orang**	**98,000,000**	**30 orang**	**98,000,000**	**30 orang**	98,000,000.00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5,213,000		5,213,000		5,213,000.00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					16,065,000		16,065,000		16,065,000.00
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6,000,000		6,000,000		6,000,000.00
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					7,500,000		7,500,000		7,500,000.00
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Masyarakat					6,300,000		6,300,000		6,300,000.00
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					41,922,000		41,922,000		41,922,000.00
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					15,000,000		15,000,000		15,000,000.00

		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	**Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya**	**orang**	**80**	**300 orang**	**246,500,000**	**600 orang**	**203,000,000**	**600 orang**	**318,000,000**
		1. Seosialisasi dan Pengenalan Wira Usaha Muda Pemula				**300 orang**	**246,500,000**	**600 orang**	**203,000,000**	**600 orang**	**318,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					25,000,000		50,000,000		50,000,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					15,000,000		30,000,000	50,000	30,000,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					60,000,000		60,000,000		60,000,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31,500,000		63,000,000		63,000,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan					115,000,000				115,000,000

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	**Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya**	**orang**	**100**	**800**	**65,000,000**	**800**	**1,300,000,000**	**800**	**1,399,500,000**
		1. Penyusunan RAD		**Dokumen**		**1**	**65,000,000**			**1**	**99,500,000**
		2. Sosialisasi RAD		**orang**				**150**	**150,000,000**	**1**	**150,000,000**
		Sub Kegitan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	**Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi**	**orang**		**300**	**435,120,000**				
		1.Sosialisasi dan Pengenalan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS				**300**	**105,690,000**	**300**	**250,000,000**	300	**250,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9,448,500		16,448,500		16,448,500
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					42,241,500		42,241,500		42,241,500
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					22,500,000		22,500,000		22,500,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31,500,000		31,500,000		31,500,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		137,310,000		137,310,000

		2. Sosialisasi PELITA				**100**	-	**100**	**100,000,000**	100	**100,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					-		8,553,200		8,553,200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					-		30,574,800		30,574,800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-		5,000,000		5,000,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					-		10,500,000		10,500,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan					-		45,372,000		45,372,000
		3. Sosialisasi Profile Kepemudaan						**100**	**100,000,000**	100	**100,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							8,553,200		8,553,200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga							30,574,800		30,574,800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							5,000,000		5,000,000

		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah							10,500,000		10,500,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							45,372,000		45,372,000
		4. Diklat Kepemimpinan				115	**132,280,000**	**115**	**350,000,000**	115	**350,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5,155,000		9,155,000		9,155,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					81,900,000		81,900,000		81,900,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9,000,000		9,000,000		9,000,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					36,225,000		36,225,000		36,225,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		213,720,000		213,720,000

		5. Peringatan Hari Sumpah Pemuda				**1**	**96,000,000**	**1**	**100,000,000**	1	**100,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4,553,200		8,553,200		8,553,200
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					30,574,800		30,574,800		30,574,800
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5,000,000		5,000,000		5,000,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					10,500,000		10,500,000		10,500,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45,372,000		45,372,000		45,372,000
		6, Workshop Pemuda Kreatif				**150**	**101,150,000**	**150**	**250,000,000**	150	**250,000,000**
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5,525,000		10,525,000		10,525,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga					55,125,000		55,125,000		55,125,000

		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9,000,000		9,000,000		9,000,000
		Uang Pengganti Transport untuk Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah					31,500,000		31,500,000		31,500,000
		Paket Fullday dalam kota sosialisasi dan pengenalan kewirausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		143,850,000		143,850,000
		Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan**	**unit**		**1**	**400,000,000**	**1**	**-**	**2**	**400,000,000**
		1. Pemeliharaan Gedung Serbaguna		unit		1	200,000,000			1	200,000,000
		2. Pemeliharaan Panggung Terbuka		unit			200,000,000	1	-	1	200,000,000
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah OKP yang terbina**	**okp**	**78**	**78**	**500,000,000**	**78**	**500,000,000**	**2**	**500,000,000**
		Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	**Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan**	**dokumen**	**1**	**1**	**500,000,000**	**2**	**500,000,000**	**2**	**500,000,000**

		1. Hibah DPD KNPI Kota Bogor		dokumen	1	1	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**%**	**100**	**100**	**990,000,000**	**100**	**1,240,000,000**	**100**	**1,240,000,000**
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**%**	**100**	**100**	**990,000,000**	**100**	**1,240,000,000**	**100**	**1,240,000,000**
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	**Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**	**laporan**	**1**			**1**	**250,000,000**	**1**	**250,000,000**
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		laporan	1			1	250,000,000	1	250,000,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							7,234,000		7,234,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung							14,751,000		14,751,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							4,500,000		4,500,000
		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan							6,750,000		6,750,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							180,840,000		180,840,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							29,925,000		29,925,000
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan							6,000,000		6,000,000

		Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	**Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan**	**organisasi**	**1**	**1**	**990,000,000**	**1**	**990,000,000**	**1**	**990,000,000**
		1. Hibah Kwarcab Pramuka Kota Bogor		**organisasi**	1	1	990,000,000	1	990,000,000	1	990,000,000
TOTAL		**TOTAL**					**106,027,966,591**		**174,450,997,316**		**185,713,503,448**

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksankan pada Tahun 2025

Tabel.6

Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 Perubahan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025					
	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
		VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
3	4	5		6	7	8	9		10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01	point	**14.896.144.187**	**14.636.288.687**	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01	point	**14.614.997.208**	**43.083.621**
	2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55	point			2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55	point		
	3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48	point			3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48	point		
	4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	23,75	point			4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	23,75	point		
	5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	%			5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	%		
	6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%			6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%		
	7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%			7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%		
	8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	95	%			8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	95	%		
	9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	97	%			9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	97	%		
	10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%			10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%		
	11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	89,50	point			11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	89,50	point		
	12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	90,50	point			12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	90,50	point		
	13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	89,50	point			13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	89,50	point		
	14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88,38	point			14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88,38	point		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	100	persen	75.974.200	75.974.200	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	100	persen	75.974.200	0
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	3.799.700	3.799.700	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	3.799.700	-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	10	Laporan	72.174.500	72.174.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	11	Laporan	72.174.500	**0**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**%**	**9.050.122.370**	**9.050.122.370**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**%**	**9.302.023.691**	**252.001.321**
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang	9.050.122.370	9.050.122.370	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang	9.291.123.691	**241.001.321**
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		Laporan	-	-	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18	Laporan	10.900.000	11.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.216.753.934**	**971.889.934**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**719.889.934**	**-252.000.000**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	47.288.000	47.288.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	47.288.000	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1**	Paket	343.697.134	343.697.134	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**0**	Paket	91.697.134	252.000.000

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	32.171.500	32.171.500	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	32.171.500	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	77.336.400	77.336.400	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	77.336.400	-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	61.546.900	61.546.900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	61.546.900	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	654.714.000	409.850.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	409.850.000	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**1.036.953.300**	**1.021.961.800**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**1.000.769.000**	**43.082.300**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	unit	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	unit	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	44	unit	904.704.600	904.704.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	44	unit	904.704.600	-
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	paket	132.248.700	117.257.200	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	paket	96.064.400	43.082.300
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.554.908.457**	**2.554.908.457**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.554.908.457**	**-**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	laporan	1.539.842.728	1.539.842.728	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	laporan	1.539.842.728	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	laporan	86.204.113	86.204.113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	laporan	86.204.113	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	laporan	928.861.616	928.861.616	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	laporan	928.861.616	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**%**	**961.431.926**	**961.431.926**	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**%**	**961.431.926**	**-**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	unit	181.711.926	181.711.926	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	unit	181.711.926	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	260.000.000	260.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	260.000.000	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	519.720.000	519.720.000	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	519.720.000	-
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional**	**50**	**%**	**58.624.363.104**	**57.817.115.764**	**1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional**	**50**	**%**	**65.454.225.564**	**7.637.110.000**
	2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	**80**	**%**			**2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar**	**80**	**%**		
	3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**50**	**%**			**3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan**	**50**	**%**		
	4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**50%**	**Persen**			**4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan**	**50%**	**Persen**		
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**%**	**448.399.600**	**400.206.880**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**%**	**500.206.880**	**100.000.000**
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	5	lokasi	160.399.600	160.399.600	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	5	lokasi	160.399.600	-

Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2	dokumen	288.000.000	239.807.280	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2	dokumen	239.807.280	-
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tk. Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	unit	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	unit	100.000.000,00	**100.000.000**
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**%**	**35.929.728.884**	**35.417.994.064**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**%**	**36.055.103.864**	**637.110.000**
Sub kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	laporan	1.137.242.000	1.134.826.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4	laporan	1.634.826.000	500.000.000
Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	dokumen	536.650.000	366.741.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	dokumen	503.851.200	137.110.000
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	19	unit	34.255.836.884	33.916.426.664	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	19	unit	33.916.426.664	0
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kejuaraan	1.489.757.560	1.268.327.560	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kejuaraan	1.468.327.560	200.000.000
Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	350	Atlet	1.489.757.560	1.268.327.560	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	350	Atlet	1.468.327.560	200.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi**	**50**	**Medali**	**20.756.477.060**	**20.730.587.260**	**Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi**	**50**	**Medali**	**27.430.587.260**	**6.700.000.000**
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang diseleksi	300 orang	Atlet/Orang	141.923.060	140.729.260	Jumlah Atlet yang diseleksi	300 orang	Atlet/Orang	140.729.260	**0**
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	350	Atlet/Orang	20.614.554.000	20.589.858.000	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	350	Atlet/Orang	23.089.858.000	2.500.000.000
										0
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	Atlet/Orang	0	0	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	130	Atlet/Orang	4.200.000.000	4.200.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING PEMUDA	**persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan**		**%**	**1.251.950.900**	**1.109.478.030**	**persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan**		**%**	**1.109.478.030**	-
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif		**%**			**Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif**		**%**		
	Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan		**%**			**Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan**		**%**		
	Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional		**%**			**Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional**		**%**		
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**%**	751.950.900	609.478.030	**Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**%**	609.478.030	**0**
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	orang	50.635.200	36.495.640	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	orang	36.495.640	0
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula tingkat Kab/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	300	orang	155.842.400	95.911.080	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	300	orang	106.503.080	10.592.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	800	orang	0	0	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	800	orang	0	0
Sub Kegitan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi	300	orang	145.775.300	77.735.710	Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi	300	orang	67.143.710	-10.592.000
Sub Kegiatan Penyediaan an pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	1	unit	399.698.000	399.335.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	1	unit	399.335.600	0
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah OKP yang terbina**	**okp**	**78**	500.000.000	500.000.000	**Jumlah OKP yang terbina**	**okp**	**78**	500.000.000	**0**
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	500.000.000	500.000.000	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	500.000.000	**0**
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	100	%	1.200.000.000	1.200.000.000	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	100	%	1.200.000.000	**0**
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**100**	**%**	1.200.000.000	1.200.000.000	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**100**	**%**	1.200.000.000	**0**
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	1.200.000.000	1.200.000.000	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	1.200.000.000	**0**
TOTAL				**75.972.458.191**	**74.762.882.481**				**82.378.700.802**	**7.680.193.621**

Selanjutnya dalam rangka pencapaian meningkatkan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, maka ditetapkan Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada sarana yang ada, sebagai berikut :

Tabel. 7

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tahun Anggaran 2024 dan 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET 2024		TARGET 2025
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
KODE REKENING 4.1.2.02.09				
1	WISMA	-	-	
2	RUANG DIKLAT	-	-	
3	INDOOR A	134,500,000	189,700,000	53,000,000
4	INDOOR B	56,000,000	56,000,000	21,600,000
5	LAP. OLAHRAGA TERBUKA	24,275,000	24,275,000	8,920,000
	-Lap Voly	3,275,000	3,275,000	1,160,000
	-Lap Sepak bola	19,500,000	19,500,000	7,200,000
	-Lap Softball	1,500,000	1,500,000	560,000
6	PANGGUNG TERBUKA	20,000,000	20,000,000	8,000,000
7	LAP. SEMI INDOOR	115,500,000	115,500,000	43,000,000
8	STADION PAJAJARAN	200,500,000	200,500,000	79,200,000
	-Lintasan Atlentik	3,000,000	3,000,000	1,200,000
	-Sepak bola	197,500,000	197,500,000	78,000,000
9	KOLAM RENANG	533,565,000	478,365,000	179,000,000
10	GEDUNG SERBA GUNA	63,000,000	63,000,000	24,000,000
11	PANAHAN	960,000	960,000	1,280,000
12	PANJAT TEBING	500,000	500,000	-
13	ANGKAT BESI	600,000	600,000	-
14	ANGGAR	600,000	600,000	-
15	Lapangan Sepak Bola Rumput Sintesis di Kecamatan	21,800,000.00	79,750,000	85,500,000
16	Gedung Olahraga Indoor di Kecamatan	71,950,000.00	14,000,000	12,400,000
17	Lapangan Olahraga Outdoor di Kecamatan	6,250,000.00	6,250,000	5,750,000
	JUMLAH	1,250,000,000	1,250,000,000	521,650,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun 2025 secara Detail kami sajikan pada Tabel. 4.1. sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025				
	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH
		VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN		
3	4	5		6	7	8	9		10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01	point	14.896.144.187	14.636.288.687	1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27,01	point	14.614.997.208	43.083.621
	2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55	point			2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55	point		
	3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48	point			3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48	point		
	4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	23,75	point			4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	23,75	point		
	5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	%			5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	%		
	6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%			6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%		
	7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%			7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%		
	8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	95	%			8 : Persentase Kepatuhan Anggaran	95	%		
	9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	97	%			9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	97	%		
	10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%			10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%		
	11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	89,50	point			11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	89,50	point		
	12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	90,50	point			12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	90,50	point		
	13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	89,50	point			13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	89,50	point		
	14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88,38	point			14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	88,38	point		

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	100	persen	75.974.200	75.974.200	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	100	persen	75.974.200	0
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	3.799.700	3.799.700	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	3.799.700	-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	10	Laporan	72.174.500	72.174.500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	11	Laporan	72.174.500	**0**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**%**	**9.050.122.370**	**9.050.122.370**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100%**	**%**	**9.302.023.691**	**252.001.321**
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang	9.050.122.370	9.050.122.370	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	orang	9.291.123.691	**241.001.321**
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		Laporan	-	-	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18	Laporan	10.900.000	11.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.216.753.934**	**971.889.934**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**719.889.934**	**-252.000.000**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	47.288.000	47.288.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	47.288.000	-
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**1**	Paket	343.697.134	343.697.134	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**0**	Paket	91.697.134	252.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**3**	Paket	32.171.500	32.171.500	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**3**	Paket	32.171.500	-

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	77.336.400	77.336.400	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	77.336.400	-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	61.546.900	61.546.900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	61.546.900	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	654.714.000	409.850.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	409.850.000	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**1.036.953.300**	**1.021.961.800**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**1.000.769.000**	**43.082.300**
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	unit	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	unit	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	44	unit	904.704.600	904.704.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	44	unit	904.704.600	-
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	paket	132.248.700	117.257.200	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	paket	96.064.400	43.082.300
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.554.908.457**	**2.554.908.457**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.554.908.457**	**-**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	laporan	1.539.842.728	1.539.842.728	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	laporan	1.539.842.728	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	laporan	86.204.113	86.204.113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	laporan	86.204.113	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	laporan	928.861.616	928.861.616	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7	laporan	928.861.616	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**%**	**961.431.926**	**961.431.926**	**Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**%**	**961.431.926**	**-**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	unit	181.711.926	181.711.926	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaeraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	unit	181.711.926	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	260.000.000	260.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	260.000.000	-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	519.720.000	519.720.000	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	519.720.000	-

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional**	**50**	**%**	**58.624.363.104**	**57.817.115.764**	**1. Persentase pemenuhan Kawasan GOR berstandar Nasional/Internasional**	**50**	**%**	**65.454.225.564**	**7.637.110.000**
	2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar	**80**	**%**			**2. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR rekreasi di kawasan GOR sesuai dengan standar**	**80**	**%**		
	3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**50**	**%**			**3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan**	**50**	**%**		
	4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	**50%**	**Persen**			**4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan**	**50%**	**Persen**		
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**%**	**448.399.600**	**400.206.880**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan**	**100**	**%**	**500.206.880**	**100.000.000**
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Tk. Kab/Kota	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	5	lokasi	160.399.600	160.399.600	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan	5	lokasi	160.399.600	-
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2	dokumen	288.000.000	239.807.280	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2	dokumen	239.807.280	-
Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tk. Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	unit	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	unit	100.000.000,00	**100.000.000**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**%**	**35.929.728.884**	**35.417.994.064**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100**	**%**	**36.055.103.864**	**637.110.000**
Sub kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	laporan	1.137.242.000	1.134.826.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4	laporan	1.634.826.000	500.000.000
Sub kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	dokumen	536.650.000	366.741.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	dokumen	503.851.200	137.110.000
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	19	unit	34.255.836.884	33.916.426.664	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	19	unit	33.916.426.664	0
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kejuaraan	1.489.757.560	1.268.327.560	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2	Kejuaraan	1.468.327.560	200.000.000
Sub Kegiatan Keiikutsertaan anggota kontingen kab/Kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	350	Atlet	1.489.757.560	1.268.327.560	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	350	Atlet	1.468.327.560	200.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi**	**50**	**Medali**	**20.756.477.060**	**20.730.587.260**	**Jumlah Perolehan Medali tingkat Provinsi**	**50**	**Medali**	**27.430.587.260**	**6.700.000.000**
Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang diseleksi	300 orang	Atlet/Orang	141.923.060	140.729.260	Jumlah Atlet yang diseleksi	300 orang	Atlet/Orang	140.729.260	**0**

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	350	Atlet/Orang	20.614.554.000	20.589.858.000	Jumlah Atlet yang dibina dan dikembangkan	350	Atlet/Orang	23.089.858.000	2.500.000.000
										0
Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	Atlet/Orang	0	0	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	130	Atlet/Orang	4.200.000.000	4.200.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING PEMUDA	**persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan**		**%**	**1.251.950.900**	**1.109.478.030**	**persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan**		**%**	**1.109.478.030**	-
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif		**%**			**Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif**		**%**		
	Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan		**%**			**Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan**		**%**		
	Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional		**%**			**Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional**		**%**		
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**%**	751.950.900	609.478.030	**Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan**	**100**	**%**	609.478.030	**0**
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	orang	50.635.200	36.495.640	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	30	orang	36.495.640	0
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wira Usaha Pemula tingkat Kab/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	300	orang	155.842.400	95.911.080	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	300	orang	106.503.080	10.592.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi Kab/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tk. Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	800	orang	0	0	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	800	orang	0	0

Sub Kegitan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kab/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi	300	orang	145.775.300	77.735.710	Jumlah pemuda di tingkat kan/kota yang hak nya terpenuhi	300	orang	67.143.710	-10.592.000
Sub Kegiatan Penyediaan an pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan T.kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	1	unit	399.698.000	399.335.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang terkelola dan termanfaatkan	1	unit	399.335.600	0
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah OKP yang terbina**	**okp**	**78**	500.000.000	500.000.000	**Jumlah OKP yang terbina**	**okp**	**78**	500.000.000	**0**
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pemeguhan kemandirian ekonomi pemuda tk.kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	500.000.000	500.000.000	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	1	500.000.000	**0**
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	100	%	1.200.000.000	1.200.000.000	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	100	%	1.200.000.000	**0**
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**100**	**%**	1.200.000.000	1.200.000.000	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan**	**100**	**%**	1.200.000.000	**0**
Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	1.200.000.000	1.200.000.000	Jumlah Organisasi Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	1.200.000.000	**0**
TOTAL				**75.972.458.191**	**74.762.882.481**				**82.378.700.802**	**7.680.193.621**

BAB V

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Satuan Kerja Perangkat daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Tahun Anggaran 2025 perubahan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan aset yang terbatas. Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi. Permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 perubahan adalah terletak pada sumber daya manusia sebagai perencana dan ketersediaan dana untuk membiayai sosialisasi program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, serta kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor dengan mitra kerjanya.

Lampiran k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Triwulan II pada Renja Disparbud Kota Bogor Tahun 2025. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan arahan dan pedoman penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disparbud Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan disparbud tahun 2025.
2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.

3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.
4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan triwulan II, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2025 sesuai dengan RPD Kota Bogor tahun 2025-2026.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Disparbud Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2025-2026 Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
	2,22	**BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN**			**77.568.847.446**		**12.353.045.500**		**2.678.482.440**		**3.070.212.341**		**5.748.694.781**						
	2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**29,08 Nilai**	**37.327.137.046**	**25,807 Nilai**	**10.556.207.044**		**2.439.164.440**	**A**	**2.747.918.341**		**5.187.082.781**						
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**30,00 Nilai**		**26,55 Nilai**													
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**11,53 Nilai**		**12,48 Nilai**													
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**15,65 Nilai**		**21,97 Nilai**													
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100%**		**100%**													
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100%**		**100%**													
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94%**		**94%**													
			Persentase Kepatuhan Anggaran	**100%**		**100%**													
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	**95%**		**95%**													
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94%**		**94%**													
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	**85,99 Nilai**		**87,11 Nilai**													
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**93,71 Nilai**		**88,75 Nilai**													
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**94,62 Nilai**		**88,38 Nilai**													
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**93,48 Nilai**		**88,38 Nilai**													
	2.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100 %**	**12.939.800**	**100 %**	**803.600**		**-**		**-**		**-**						
1	*2.22.01.2.01.0001*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*10 dokumen*	*12.939.800*	*5 dokumen*	*803.600*		*-*		*-*		*--*						
	2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100 %**	**28.770.282.696**	**100 %**	**8.216.435.524**	**25**	**1.914.463.770**	**50**	**2.315.723.215**	**50**	**4.230.186.985**						
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	**100 %**		**100 %**													
2	*2.22.01.2.02.0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*28.770.886.696*	*36 orang/ bulan*	*8.158.457.924*	*36*	*1.900.123.770*	*36*	*2.302.063.215*	*36*	*4.202.186.985*						
3	*2.22.01.2.02.0007*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*24 laporan*	*69.396.000*	*12 laporan*	*57.977.600*	*3*	*14.340.000*	*3*	*13.660.000*	*6*	*28.000.000*						
	2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**2.776.460.300**	**100 %**	**557.599.000**		**42.197.230**		**101.159.038**		**143.356.268**						
4	*2.22.01.2.06.0002*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*2 paket*	*365.076.100*	*1 paket*	*332.306.100*		*28.187.000*		*31.499.760*		*59.686.760*						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
5	*2.22.01.2.06.0005*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*2 paket*	*59.819.800*	*1 paket*	*14.348.500*		*-*		*10.885.000*		*10.885.000*						
6	*2.22.01.2.06.0009*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*2 laporan*	*2.351.564.400*	*1 laporan*	*210.945.000*		*14.010.230*		*58.774.278*		*72.784.508*						
	2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**814.143.000**	**100 %**	**128.130.400**		**23.700.000**		**83.076.00**		**106.776.000**						
7	*2.22.01.2.07.0011*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*87 unit*	*814.143.000*	*5 unit*	*128.130.400*		*23.700.000*		*83.076.00*		*106.776.000*						
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**3.016.391.850**	**100 %**	**1.008.549.421**		**100.437.807**		**197.490.793**		**297.928.600**						
8	*2.22.01.2.08.0002*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*2 laporan*	*726.523.310*	*1 laporan*	*275.699.613*		*43.870.877*		*42.311.780*		*86.182.657*						
9	*2.22.01.2.08.0004*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*2 laporan*	*2.289.868.540*	*1 laporan*	*732.849.808*		*56.566.930*		*155.179.013*		*211.745.943*						
	2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100 %**	**1.936.919.400**	**100 %**	**644.688.499**		**358.365.633**		**50.469.295**		**408.834.928**						
10	*2.22.01.2.09.0002*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*460.570.000*	*15 unit*	*177.214.102*		*42.445.933*		*39.629.295*		*82.075.288*						
11	*2.22.01.2.09.0006*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*85 unit*	*533.111.600*	*77 unit*	*34.313.597*		*15.396.640*		*10.840.000*		*26.236.640*						
12	*2.22.01.2.09.0009*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*3 unit*	*943.237.800*	*3 unit*	*433.160.800*		*300.523.000*		*-*		*300.523.000*						
	2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kontribusi event seni budaya dalam CoE**	**3 event**	**3.878.025.800**	**3 event**	**778.917.065**		**143.318.000**		**226.294.000**		**369.612.000**						
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan**	**10 objek**	**2.789.320.700**	**9 objek**	**70.075.000**		**-**		**67.932.000**		**67.932.000**						
13	*2.22.02.2.01.0001*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*10 objek*	*2.789.320.700*	*9 objek*	*70.075.800*		*-*		*67.932.000*		*67.932.000*						
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**74 kegiatan**	**1.088.705.100**	**34 kegiatan**	**708.841.265**	**12**	**143.318.000**	**2**	**158.362.000**	**14**	**301.680.000**						
14	*2.22.02.2.02.0001*	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*10 objek*	*1.088.705.100*	*9 objek*	*708.841.265*		*143.318.000*		*158.362.000*		*301.680.000*						
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase lembaga seni tradisional yang dibina**	**10 %**	**3.036.415.100**	**10 %**	**43.555.391**		**-**		**-**		**-**						
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**102 orang/ lembaga**	**3.036.415.100**	**45 orang/ Lembaga**	**43.555.391**		**-**		**-**		**-**						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
15	*2.22.03.2.01.03*	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*7 lembaga*	*3.036.415.100*	*5 Lembaga*	*43.555.391*		-		-		-						
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase status ODCB menjadi CB**	**10 %**	**8.319.924.750**	**10 %**	**479.700.000**	**-**	**96.000.000**		**96.000.000**		**192.000.000**						
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**38 objek**	**8.319.924.750**	**3 objek**	**94.340.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**						
16	*2.22.05.2.01.0001*	*Penetapan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*38 objek*	*8.319.924.750*	*3 objek*	*94.340.000*	-	-		-		-						
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**37 objek**	**8.319.924.750**	**32 objek**	**385.360.000**	**32 objek**	**96.000.000**	**32 objek**	**96.000.000**		**192.000.000**						
17	*2.22.05.2.02.0001*	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*35 objek*	*8.319.924.750*	*32 objek*	*385.360.000*	*32 objek*	*96.000.000*		*96.000.000*		*192.000.000*						
	2.22.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**55,72 %**	**16.687.420.000**	**55,71 %**	**494.666.000**		**-**		**-**		**-**						
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**488.246 orang**	**16.687.420.000**	**313.481 orang**	**494.666.000**	**41.237**	**-**	**44.449**	**-**	**85.686**	**-**						
18	*2.22.06.2.01.0005*	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	*16.687.420.000*	*1 unit*	*494.666.000*		-	-	-		-						
		URUSAN PILIHAN			**6.663.513.660**		**2.073.167.375**		**9.098.000**		**626.255.900**		**635.353.900**						
		BIDANG URUSAN PARIWISATA			**6.663.513.660**		**2.073.167.375**		**-**		**626.255.900**		**635.353.900**						
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**1.276.189.500**	**1 destinasi**	**604.430.125**	**56,14 %**	**-**		**193.080.400**		**193.080.000**						
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kotata**	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**1.276.189.500**	**1 destinasi**	**383.785.945**		**-**		**191.870.400**		**193.080.400**						
19	*3.26.02.2.03.0003*	*Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kotalan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	*2 lokasi*	*1.276.189.500*	*1 lokasi*	*199.922.600*	-	-		*191.870.400*		*191.870.400*						
20	*3.26.02.2.03.0006*	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*2 laporan*	*1.276.189.500*	*1 laporan*	*183.863.345*	-	-		*1.210.000*		*1.210.000*						
	3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi**	**250 pelaku usaha**	**1.276.189.500**	**1 daya tarik**	**220.644.180**		**-**		**-**		**-**						
21	*3.26.02.2.04.0007*	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*100 usaha*	*1.276.189.500*	*50 usaha*	*220.644.180*	-	-		-		-						
	3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**7.742.899 orang**	**2.655.655.360**	**7.038.999 orang**	**1.015.465.500**	**1.280.160 orang**	**2.510.000**	**911.117**	**329.428.800**	**2.191.277 orang**	**331.938.800**						
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	**23,45 %**		**23,44 %**													

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15= 14/5x100%	
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi kepariwisataan**	**35 kegiatan**	**2.655.655.360**	**18 kegiatan**	**1.015.465.500**	**-**	**2.510.000**	**-**	**329.428.800**	**-**	**331.938.800**						
22	*3.26.03.2.01.03*	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*12 dokumen*	*365.390.060*	*1 dokumen*	*233.187.200*	*-*	*-*	*-*	*-*		*-*						
23	*3.26.03.2.01.02*	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*6 laporan*	*1.832.921.500*	*34 laporan*	*725.818.300*	*-*	*900.000*		*287.770.000*		*288.670.000*						
24	*3.26.03.2.01.01*	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri*	*8 dokumen*	*457.343.800*	*4 dokumen*	*56.460.000*	*-*	*1.610.000*		*41.658.800*		*43.268.800*						
	3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI**	**25 %**	**14.684.800**	**25 %**	**33.313.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**						
	3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**2 laporan**	**14.684.800**	**1 laporan**	**33.313.100**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**						
25	*3.26.04.2.02.0022*	*Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual*	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*	*150 produk*	*14.684.800*	*50 produk*	*33.313.100*	*-*	*-*		*-*		*-*						
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina**	**10 %**	**1.342.403.600**	**10 %**	**508.639.700**	**1**	**6.588.000**	**-**	**103.746.700**		**110.334.700**						
			Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	**3,86 %**		**3,62 %**		**-**											
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya**	**120 orang**	**1.342.403.600**	**60 orang**	**431.650.400**	**-**	**6.588.000**	**-**	**103.746.700**		**110.334.700**						
			Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**2 laporan**		**1 laporan**		**-**											
26	*3.26.05.2.01.0005*	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*2 laporan*	*635.630.600*	*1 laporan*	*246.064.650*	*-*	*6.588.000*	*-*	*59.150.000*		*65.738.000*						
27	*3.26.05.2.01.0008*	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*120 orang*	*606.773.000*	*30 orang*	*48.028.800*	*-*	*-*		*44.596.700*		*44.596.700*						
28	*3.26.05.2.01.0010*	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*120 orang*	*100.000.000*	*30 orang*	*125.865.200*	*-*	*-*		*-*		*-*						
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					**85.410.159.706**		**14.192.056.205**		**2.687.580.440**		**3.696.468.241**		**6.384.048.681**						

Dari data tabel 2.1 di atas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025 Disparbud Kota Bogor masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan masih belum terlihatnya progres pancapaian target indikator program.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Disparbud Kota Bogor Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disparbud Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2025 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disparbud Kota Bogor
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Realisasi Triwulan II
			Qty	Satuan				
1	3	4	5		6			7
	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN				**12.618.012.689**	**12.353.045.500**	**264.967.189**	**5.748.694.781**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**25,80**	**Nilai**	**10.809.806.233**	**10.556.207.044**	**253.599.189**	**5.187.082.781**
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26,55**	**Nilai**				
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12,48**	**Nilai**				
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21,97**	**Nilai**				
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100**	**%**				
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**	**%**				
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**	**%**				
		Persentase Kepatuhan Anggaran	**100**	**%**				
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	**95**	**%**				
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94**	**%**				
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	**87,11**	**Nilai**				
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**88,75**	**Nilai**				
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**88,38**	**Nilai**				
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**	**Nilai**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100**	**%**	**1.199.800**	**803.600**	**396.200**	**-**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5*	*dokumen*	1.199.800	803.600	396.200	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**%**	**8.216.710.524**	**8.216.435.524**	**275.000**	**4.230.186.985**
		Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	**100**	**%**				
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36*	*Orang/ bulan*	*8.158.457.924*	*8.158.457.924*	-	*4.202.186.985*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan*	*12*	*laporan*	*58.252.600*	*57.977.600*	*275.000*	*28.000.000*

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Realisasi Triwulan II
			Qty	Satuan				
1	3	4	5		6			7
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**702.515.900**	**557.599.600**	**144.916.300**	**143.356.268**
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1*	*paket*	*335.848.100*	*332.306.100*	*3.542.000*	*59.686.760*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1*	*paket*	*20.497.800*	*14.348.500*	*6.149.300*	*10.885.000*
6	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1*	*laporan*	*346.170.000*	*210.945.000*	*135.225.000*	*72.784.508*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**203.868.600**	**128.130.400**	**75.738.200**	**106.776.000**
7	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*47*	*unit*	*203.868.600*	*128.130.400*	*75.738.200*	*106.776.000*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**1.008.549.421**	**1.008.549.421**	**-**	**297.928.600**
8	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12*	*laporan*	*275.699.613*	*275.699.613*	*-*	*86.182.657*
9	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1*	*laporan*	*732.849.808*	*732.849.808*	*-*	*211.745.943*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**676.961.988**	**644.688.499**	**32.273.489**	**408.834.928**
10	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15*	*Unit*	*177.214.102*	*177.214.102*	*-*	*82.075.288*
11	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*77*	*unit*	*66.587.086*	*34.313.597*	*32.273.489*	*26.236.640*
12	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2*	*unit*	*433.160.800*	*433.160.800*	*-*	*300.523.000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Kontribusi event seni budaya dalam CoE**	**3**	**event**	**782.281.865**	**778.917.065**	**3.364.800**	**369.612.000**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan**	**9**	**objek**	**70.075.800**	**70.075.800**	**-**	**67.932.000**
13	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*9*	*objek*	*70.075.800*	*70.075.800*	*-*	*67.932.000*
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**34**	**kegiatan**	**712.206.065**	**708.841.265**	**3.364.800**	**301.680.000**
14	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*9*	*objek*	712.206.065	708.841.265	3.364.800	301.680.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase lembaga seni tradisional yang dibina**	**25**	**%**	**51.348.591**	**43.555.391**	**7.793.200**	**-**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**45**	**Orang/ lembaga**	**51.348.591**	**43.555.391**	**7.793.200**	**-**
15	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*5*	*lembaga*	51.348.591	43.555.391	7.793.200	-
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase status ODCB menjadi CB**	**7**	**%**	**479.910.000**	**479.700.000**	**210.000**	**192.000.000**
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**3**	**objek**	**94.550.000**	**94.340.000**	**210.000**	**-**
16	*Penetapan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*3*	*objek*	94.550.000	94.340.000	210.000	-
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32**	**objek**	**385.360.000**	**385.360.000**	**-**	**192.000.000**
17	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32*	*objek*	385.360.000	385.360.000	-	192.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**8,5**	**%**	**494.666.000**	**494.666.000**	**-**	**-**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**236.375**	**Orang**	**494.666.000**	**494.666.000**	**-**	**-**
18	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*	*1*	*unit*	494.666.000	494.666.000	-	-
	BIDANG URUSAN PARIWISATA				**2.541.624.530**	**2.073.167.375**	**468.457.155**	**635.353.900**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1**	**destinasi**	**769.793.830**	**604.430.125**	**165.363.705**	**193.080.400**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1**	**destinasi**	**502.574.890**	**383.785.945**	**118.788.945**	**193.080.400**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Realisasi Triwulan II
			Qty	Satuan				
1	3	4	5		6			7
19	*Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	*1*	*lokasi*	199.999.800	199.922.600	77.200	191.870.400
20	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*2*	*laporan*	302.575.090	183.863.345	118.711.745	1.210.000
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi**	**100**	**pelaku usaha**	**267.218.940**	**220.644.180**	**46.574.760**	**-**
21	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*50*	*usaha*	267.218.940	220.644.180	46.574.760	-
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**9.711.844**	**orang**	**1.157.489.700**	**1.015.465.500**	**142.024.200**	**331.938.800**
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	**23,44**	**%**				
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah promosi kepariwisataan**	**18**	**promosi**	**1.157.489.700**	**1.015.465.500**	**142.024.200**	**331.938.800**
22	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik&Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri*	*1*	*dokumen*	*321.895.200*	*233.187.200*	*88.708.000*	-
23	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*3*	*laporan*	*762.898.500*	*725.818.300*	*37.080.200*	*288.670.000*
24	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4*	*dokumen*	*72.696.000*	*56.460.000*	*16.236.000*	*43.268.800*
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI**	**9**	**%**	**46.003.900**	**33.313.100**	**12.690.800**	**-**
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**1**	**Laporan**	**46.003.900**	**33.313.100**	**12.690.800**	**-**
25	*Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual*	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*	*50*	*Produk*	46.003.900	33.313.100	12.690.800	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina**	**9**	**%**	**568.337.100**	**419.958.650**	**148.378.450**	**110.334.700**
		Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	**3,62**	**%**				
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**60**	**orang**	**568.337.100**	**419.958.650**	**148.378.450**	**110.334.700**
		Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**1**	**laporan**				
26	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1*	*laporan*	*368.887.900*	*246.064.650*	*122.823.250*	*65.738.000*
27	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*30*	*orang*	*49.999.800*	*48.028.800*	*1.971.000*	*44.596.700*
28	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*30*	*orang*	*149.449.400*	*125.865.200*	*23.584.200*	-
J U M L A H					**15.159.637.219**	**14.426.212.875**	**733.424.344**	**6.384.048.681**

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu Murni Disparbud Kota Bogor senilai Rp.15.159.637.219,00 berkurang Rp.733.424.344 sehingga total pagu perubahan menjadi Rp.14.426.212.875,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.6.384.048.681,00.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan Disparbud adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Disparbud Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Capaian s.d Triwulan II
Terwujudnya pemajuan kebudayaan	Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan masuarakat untuk pemajuan kebudayaan	Nilai Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	82 nilai	-
Terwujudnya daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kompetensi pelaku pariwisata	4,74 %	-
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif	9,29 %	-
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan per tahun	10 %	-
		Lama Tinggal Wisatawan	1,54 hari	-
		Jumlah Event Nasional yang terselenggara	1 event	-
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	87,70 nilai	-
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	95 %	50 %
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ Itda	91 %	-
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1 inovasi	-
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	93,23 nilai	93,34 nilai

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Disparbud sampai dengan triwulan II tahun 2025 tersebut di atas masih belum ada yang tercapai sehingga masih membutuhkan upaya untuk mencapai terget yang telah di tentukan, begitu juga dengan indikator kinerja program masih perlu upaya untuk mencapai target, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program Disparbud Kota Bogor
Triwulan II Tahun 2025

Program	Indikator Program	Target	Capaian s.d Triwulan II
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	25,80 poin	-
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,55 poin	-
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	12,48 poin	-
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	21,97 poin	-
	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100 %	-
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100 %	50 %
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94 %	-
	Persentase Kepatuhan Anggaran	100 %	50 %
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95 %	44,25 %
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94 %	-
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87,11 poin	93,20 poin
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75 poin	95,65 poin
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88,38 poin	93,25 poin
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38 poin	90,17 poin
Pengembangan Kebudayaan	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	3 event	1 event
Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	25 %	-
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	7 %	-
Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	8,5 %	-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 destinasi	1 destinasi
Program Pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	9.711.844 orang	2.191.277 orang
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	23,44 %	-
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	9 %	4 %
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	3,62 %	-
	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina	9 %	2 %

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Berdasarkan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Disparbud Kota Bogor Tahun 2025

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025				Perubahan Renja 2025		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**12.618.012.689**			**12.353.045.500**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Perencanaan Kinerja**	**29,07 Nilai**	**10.809.806.233**	**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**25,80 Nilai**	**10.556.207.044**
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	**30,00 Nilai**		**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26,55 Nilai**	
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	**11,52 Nilai**		**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12,48 Nilai**	
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	**15,64 Nilai**		**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah**	**21,97 Nilai**	
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100 %**		**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100 %**	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100%**		**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100%**	
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94 %**		**Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan**	**94 %**	
			Persentase Kepatuhan Anggaran	**100 %**		**Persentase Kepatuhan Anggaran**	**100 %**	
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	**95 %**		**Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**	**95 %**	
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94 %**		**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**94 %**	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	**85,98 Nilai**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana**	**87,11 Nilai**	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**93,70 Nilai**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM**	**88,75 Nilai**	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**94,61 Nilai**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan**	**88,38 Nilai**	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**93,47 Nilai**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38 Nilai**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100 %**	**1.199.800**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu**	**100 %**	**803.600**
1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*1.199.800*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*5 dokumen*	*803.600*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100 %**	**8.216.710.524**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100 %**	**8.216.435.524**
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	**100 %**		**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**		
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*8.158.457.924*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*36 orang/ bulan*	*8.158.457.924*
3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*58.252.600*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*12 laporan*	*57.977.600*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025				Perubahan Renja 2025		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**702.515.900**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**557.599.600**
4	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*335.848.100*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*	*1 paket*	*332.306.100*
5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*20.497.800*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 paket*	*14.348.500*
6	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*346.170.000*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*1 laporan*	*210.945.000*
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**203.868.600**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**128.130.400**
7	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*47 unit*	*203.868.600*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*47 unit*	*128.130.400*
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**1.008.549.421**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**1.008.549.421**
8	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 laporan*	*275.699.613*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*1 laporan*	*275.699.613*
9	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*732.849.808*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*1 laporan*	*732.849.808*
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100 %**	**676.961.988**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100 %**	**644.688.499**
10	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*177.214.102*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*15 unit*	*177.214.102*
11	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*77 unit*	*66.587.086*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*77 unit*	*34.313.597*
12	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*433.160.800*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi*	*2 unit*	*433.160.800*
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		**Kontribusi event seni budaya dalam CoE**	**3 event**	**782.281.865**	**Kontribusi event seni budaya dalam CoE**	**3 event**	**778.917.065**
7	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan**	**9 objek**	***70.075.800***	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan**	**9 objek**	**70.075.800**
13	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*9 objek*	*70.075.800*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*9 objek*	*70.075.800*
8	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**34 kegiatan**	**712.206.065**	**Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**34 kegiatan**	**708.841.265**
14	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*9 objek*	712.206.065	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*	*9 objek*	*708.841.265*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025				Perubahan Renja 2025		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**Persentase lembaga seni tradisional yang dibina**	**10 %**	**80.595.000**	**Persentase lembaga seni tradisional yang dibina**	**10 %**	**43.555.391**
9	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**45 orang/ Lembaga**	**51.348.591**	**Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**45 orang/ Lembaga**	**43.555.391**
15	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*5 Lembaga*	*51.348.391*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*5 Lembaga*	*43.555.391*
IV	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**Persentase status ODCB menjadi CB**	**10 %**	**479.910.000**	**Persentase status ODCB menjadi CB**	**10 %**	**479.700.000**
10	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**3 objek**	**94.550.000**	**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**3 objek**	**94.340.000**
16	Penetapan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*3 objek*	94.550.000	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*3 objek*	94.340.000
11	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**		**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32 objek**	**385.360.000**	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**32 objek**	**385.360.000**
17	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32 objek*	385.360.000	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi*	*32 objek*	385.360.000
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**25 %**	**494.666.000**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**	**25 %**	**494.666.000**
12	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**		**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**494.666.000**	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	**130.000 orang**	**494.666.000**
18	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	*1 unit*	494.666.000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi*	494.666.000	92.420.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**2.541.624.530**			**2.073.167.375**
VI	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**769.793.830**	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**604.430.125**
13	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**502.574.890**	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**	**1 destinasi**	**383.785.945**
19	*Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	1 lokasi	199.999.800	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	1 lokasi	199.922.600
20	*Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	1 laporan	302.575.090	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	1 laporan	183.863.345
14	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***100 pelaku usaha***	**267.218.940**	**Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi**	***100 pelaku usaha***	**220.644.180**
21	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*50 usaha*	267.218.940	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*	*50 usaha*	*220.644.180*

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025				Perubahan Renja 2025		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisatawan**	**7.038.999 orang**	**1.157.489.700**	**Jumlah kunjungan wisatawan**	**7.038.999 orang**	**1.015.465.500**
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	**23,44 %**		**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**	**23,44 %**	
15	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**1.157.489.700**	**Jumlah Kunjungan wisatawan**	**5.062.449 orang**	**1.015.465.500**
22	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	*321.895.200*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*1 Dokumen*	*233.187.200*
23	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*3 laporan*	*62.898.500*	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*	*3 laporan*	*25.818.300*
24	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4 dokumen*	*72.696.000*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*4 dokumen*	*56.460.000*
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI**	**25 %**	**46.003.900**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI**	**25 %**	**33.313.100**
16	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		***Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif***	**1 kegiatan**	**46.003.900**	***Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif***	**1 kegiatan**	**33.313.100**
25	*Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*	*50 produk*	46.003.900	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*	*50 produk*	33.313.100
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**10 %**	**568.337.100**	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**10 %**	**419.958.650**
			Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	**3,62 %**		**Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi**	**3,62 %**	
17	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**60 orang**	**568.337.100**	**Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya**	**60 orang**	**419.849.400**
			Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**1 laporan**		**Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1 laporan**	
26	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	*368.887.900*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	*1 laporan*	*246.064.650*
27	*Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*30 orang*	*49.999.800*	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*	*30 orang*	*48.028.800*
28	*Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	*Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*30 orang*	*149.449.400*	*Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata*	*30 orang*	*125.865.200*
					15.159.637.219			**14.426.212.875**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPARBUD KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator kinerja program 1) Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja; (2) Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja; (3) Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja; (4) Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal; (5) Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah; (6) Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu; (7) Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan; (8) Persentase kepatuhan penganggaran; (9) Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA; (10) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (11) Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana; (12) Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM; (13) Rata - rata Nila SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan; (14) Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan indikator kinerja program Kontribusi event seni budaya dalam CoE, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
   1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
   2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
      1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan indikator kinerja program Persentase lembaga seni tradisional yang dibina, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:
   1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

D. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan indikator kinerja program Persentase status ODCB menjadi CB, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

   1) Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya

2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

   2) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

F. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan indikator kinerja program Persentase peningkatan kunjungan ke museum, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

G. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan indikator kinerja program Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
   2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

2. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota

H. Program Pemasaran Pariwisata, dengan indikator kinerja program (1) Jumlah Kunjungan wisatawan (2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

I. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator kinerja program Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

J. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator kinerja program (1) Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina (2) Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
   2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
   3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**15.507.280.252**	**15.159.637.219**	**15.697.274.473**	**189.994.221**							**34.049.636.967**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.722.701.921**	**12.618.012.689**	**12.424.107.695**	**-298.594.226**							**19.729.636.967**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**12.722.701.921**	**12.618.012.689**	**12.424.107.695**	**-298.594.226**							**19.729.636.967**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kontribusi event seni budaya dalam CoE**				**3 event**	**3 event**	**783.990.457**	**782.281.865**	**871.667.065**	**87.676.608**							**1.350.000.000**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	9 Objek	70.075.800	70.075.800	70.075.800	-			-	-	pelaku seni dan masyarakat kota bogor		350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				*10 Objek*	*9 Objek*	*70.075.800*	*70.075.800*	*70.075.800*	-	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*350.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				34 Kegiatan	34 Kegiatan	713.914.657	712.206.065	801.591.265	87.676.608			-	-	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor		1.000.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				*10 Objek*	*9 Objek*	*713.914.657*	*712.206.065*	*801.591.265*	*87.676.608*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*1.000.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase lembaga seni tradisional yang dibina**				**10%**	**25%**	**64.399.770**	**51.348.591**	**43.555.391**	**-20.844.379**							**50.000.000**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				45 orang/ lembaga	45 orang/ lembaga	64.399.770	51.348.591	43.555.391	-20.844.379			-	-	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor		50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	*Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*64.399.770*	*51.348.591*	*43.555.391*	*-20.844.379*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*50.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase status ODCB menjadi CB**				**10%**	**7%**	**480.360.000**	**479.910.000**	**479.700.000**	**-660.000**							**520.000.000**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	3 Objek	95.000.000	94.550.000	94.340.000	-660.000			-	-	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor		100.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	*Penetapan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				*3 Objek*	*3 Objek*	*95.000.000*	*94.550.000*	*94.340.000*	*-660.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*100.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/ Kota yang Dikelola				37 Objek	37 Objek	385.360.000	385.360.000	385.360.000	-			-	-	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor		420.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	*Pelindungan Cagar Budaya*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				*35 Objek*	*35 Objek*	*385.360.000*	*385.360.000*	*385.360.000*	-	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*420.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase peningkatan kunjungan ke museum**				**55,71%**	**8,5%**	**494.666.000**	**494.666.000**	**494.666.000**	-							**5.000.000.000**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan ke Museum				313.481 orang	236.375 orang	494.666.000	494.666.000	494.666.000	-			-	-	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor Kota Bogor		5.000.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	*Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				*1 Unit*	*1 Unit*	*494.666.000*	*494.666.000*	*494.666.000*	-	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*5.000.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*

5.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**				**29,07 Nilai 30,00 Nilai 11,52 Nilai 15,64 Nilai 100 % 100% 94% 100% 95% 94% 85,98 Nilai 93,70 Nilai 94,61 Nilai 93,47 Nilai**	**25,80 Nilai 26,55 Nilai 12,48 Nilai 21,97 Nilai 100 % 100% 94% 100% 95% 94% 87,11 Nilai 88,75 Nilai 88,38 Nilai 88,38 Nilai**	**10.899.285.694**	**10.809.806.233**	**10.534.519.239**	**-364.766.455**							**12.809.636.967**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu				100%	100%	1.499.800	1.199.800	803.600	-696.200			-	-	Disparbud Kota Bogor		3.500.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*1.499.800*	*1.199.800*	*803.600*	*-696.200*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*3.500.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA				100 % 98 %	100 % 95 %	8.192.142.377	8.216.710.524	8.400.112.188	207.969.811			-	-	Disparbud Kota Bogor		9.432.786.967	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				*37 Orang/ bulan*	*36 Orang/ bulan*	*8.133.666.177*	*8.158.457.924*	*8.342.134.588*	*208.468.411*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	-	-			*9.362.786.967*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*				*12 Laporan*	*12 Laporan*	*58.476.200*	*58.252.600*	*57.977.600*	*-498.600*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*70.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100%	100%	615.256.200	702.515.900	335.532.600	-279.723.600			-	-	Disparbud Kota Bogor		1.385.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				*1 Paket*	*1 Paket*	*109.752.800*	*335.848.100*	*80.306.100*	*-29.446.700*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*165.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				*1 Paket*	*1 Paket*	*28.692.000*	*20.497.800*	*14.312.500*	*-14.379.500*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*31.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*13.946.400*	*-*	*-*	*-13.946.400*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*24.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*462.865.000*	*346.170.000*	*240.914.000*	*-221.951.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*1.165.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD				100%	100%	307.257.500	203.868.600	154.211.400	-153.046.100			-	-	Disparbud Kota Bogor		-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0011	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				*5 Unit*	*47 Unit*	*307.257.500*	*203.868.600*	*154.211.400*	*-153.046.100*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*-*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	100%	1.038.411.521	1.008.549.421	921.945.041	-116.466.480			-	-	Disparbud Kota Bogor		1.145.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				*12 Laporan*	*12 Laporan*	*305.553.313*	*275.699.613*	*219.731.873*	*-85.821.440*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	-	-			*365.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				*1 Laporan*	*1 Laporan*	*732.858.208*	*732.849.808*	*702.213.168*	*-30.645.040*	*Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	-	-			*780.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik				100%	100%	744.718.296	676.961.988	721.914.410	-22.803.886			-	-	Disparbud Kota Bogor		843.350.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	3.26.01.2.09 0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				*15 Unit*	*16 Unit*	*236.004.102*	*177.214.102*	*215.544.102*	*-20.460.000*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*265.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				*0 Unit*	*77 Unit*	*75.197.194*	*66.587.086*	*43.490.508*	*-31.706.686*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-			*175.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*				*2 Unit*	*2 Unit*	*433.517.000*	*433.160.800*	*462.879.800*	*29.362.800*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*403.350.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.784.578.331**	**2.541.624.530**	**3.273.166.778**	**488.588.447**							**14.320.000.000**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.784.578.331**	**2.541.624.530**	**3.273.166.778**	**488.588.447**							**14.320.000.000**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi**				**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**986.492.780**	**769.793.830**	**804.429.928**	**-182.062.852**							**600.000.000**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi				1 Destinasi	1 Destinasi	583.274.440	502.574.890	583.785.748	*511.308*			-	-	Pelaku usaha pariwisata		400.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	*Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				*1 Lokasi*	*1 Lokasi*	*199.999.800*	*199.999.800*	*399.922.432*	*199.922.632*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*200.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.02.2.03.0006	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				*2 Laporan*	*2 Laporan*	*383.274.640*	*302.575.090*	*183.863.316*	*-199.411.324*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*200.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi				100 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	403.218.340	267.218.940	220.644.180	-182.574.160			-	-	Pelaku usaha pariwisata		200.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0007	*Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota*	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi*				*50 Usaha*	*50 Usaha*	*403.218.340*	*267.218.940*	*220.644.180*	*-182.574.160*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*200.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Jumlah kunjungan wisatawan**				**23,44 % 7.038.999 orang**	**23,44 % 9.711.844 orang**	**1.149.999.651**	**1.157.489.700**	**1.315.465.450**	**165.465.799**							**12.900.000.000**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi kepariwisataan				18 Kegiatan	1 Kegiatan	1.149.999.651	1.157.489.700	1.315.465.450	165.465.799			-	-	Wisatawan nusantara dan		12.900.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	*Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*332.904.000*	*321.895.200*	*233.187.200*	*-99.716.800*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*3.100.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.03.2.01.0006	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*732.111.400*	*762.898.500*	*1.025.818.250*	*293.706.850*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*3.600.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
	3.26.03.2.01.0007	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				*4 Promosi*	*4 Promosi*	*84.984.251*	*72.696.000*	*56.460.000*	*-28.524.251*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*6.200.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI**				**25%**	**9%**	**43.353.200**	**46.003.900**	**33.313.100**	**-10.040.100**							**150.000.000**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				15 Laporan	1 Laporan	43.353.200	46.003.900	33.313.100	-10.040.100			-	-	Pelaku ekonomi kreatif		150.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	*Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual*	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*				*0 Produk*	*50 Produk*	*43.353.200*	*46.003.900*	*33.313.100*	*-10.040.100*	*Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	-			*150.000.000*	*DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN*
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina**				**3,62 % 10 %**	**3,62 % 9 %**	**604.732.700**	**568.337.100**	**1.119.958.300**	**515.225.600**							**670.000.000**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				1 Laporan 60 Orang	1 Laporan 30 Orang	604.732.700	568.337.100	1.119.958.300	515.225.600			-	-	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif		670.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	406.646.700	368.887.900	946.064.300	539.417.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	30 Orang	49.999.800	49.999.800	48.028.800	-1.971.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	30 Orang	148.086.200	149.449.400	125.865.200	-22.221.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**15.507.280.252**	**15.159.637.219**	**15.697.274.473**	**189.994.221**							**34.049.636.967**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

Lampiran l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perubahan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan dengan telah ditetapkannya RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah "Memperkokoh Kemandirian Masyarakat", sedangkan untuk RKPD Perubahan Tahun 2025 mengusung tema "Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas". Selanjutnya perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor memandang perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RKPD 2025

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021Nomor 3);
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 46).
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomjor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan perubahan Renja adalah

1. Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
2. Menjabarkan perubahan indikator knerja kegiatan berdasarkan Perubahan RKPD Tingkat Kota Bogor Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan.

Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai dasar penyusunan Perubahan DPA Tahun 2025 sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 yang terdiri dari 8 (delapan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antar Renja PD dengan Dokumen RKD, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini dijelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di Tahun 2025 ditujukan untuk mengindentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja Perangkat Daerah, dimana laporan tersebut merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Adapun penyusunan Perubahan Renja Dinas Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan berikut pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

Selain hal diatas penyusunan perubahan Renja Dinas Tahun 2025 memperhatikan juga hal berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun 2025, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sampai dengan Triwulan 2 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Evaluasi RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
Triwulan 2 Tahun 2025

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
TAHUN 2005

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kab/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kab/kota:

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV												
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
						Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										1.293.996.200	-	6.450.000	150	45.440.000	-	-	-	-	150	51.890.000	#DIV/0!	4,01005814 4	150	51.890.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

						Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									1.293.996.200	-	6.450.000	150	45.440.000	-	-	-	-	150	51.890.000	#DIV/0!	4,01005814	150	51.890.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan koperasi berizin	70,00	%					70,00	%	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!	
						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase koperasi yang berbadan hukum	50	%					50	%	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	10	Unit Usaha					5	Unit Usaha	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	#DIV/0!	Dinkukmdagin
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																									
Predikat kinerja																																									
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	11,21	%					11,21	%	79.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	

						Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	2,11	%					2,11	%	79.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	Unit Usaha					25	Unit Usaha	79.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	

						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	50,00	%					50,00	%	34.200.000	-	-	150	36.620.000	-	-	-	-	150	36.620.000	300	107,076034	150	36.620.000	300	#DIV/0!	
						Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengurus dan pengawas Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	7,80	%					7,80	%	34.200.000	-	-	150	36.620.000	-	-	-	-	150	36.620.000	1923,07692	107,076034	150	36.620.000	1923,076923	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	310	Orang					150	Orang	34.200.000	-	-	150	36.620.000	-	-	-	-	150	36.620.000	100	107,076034	150	36.620.000	48	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																
Predikat kinerja																																

						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	6,24	%					6,24	%	222.614.200	-	3.630.000	-	-	-	-	-	-	-	3.630.000	0	1,6306237 43	-	3.630.000	0	#DIV/0!	
						Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	1,06	%					1,06	%	222.614.200	-	3.630.000	-	-	-	-	-	-	-	3.630.000	0	1,6306237 43	-	3.630.000	0	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10	Unit Usaha					5	Unit Usaha	222.614.200	-	3.630.000	-	-	-	-	-	-	-	3.630.000	0	1,6306237 43	-	3.630.000	0	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																															
Predikat kinerja																															

						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	18,00	%					16,00	%	710.214.000	-	2.820.000	-	8.820.000	-	-	-	-	-	11.640.000	0	1,63894262 9	-	11.640.000	0	#DIV/0!	
							Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	7,00	%					3,00	%																		
						Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapat pemberdayaan	220	Usaha Mikro					200	Usaha Mikro	710.214.000	-	2.820.000	-	8.820.000	-	-	-	-	-	11.640.000	0	1,63894262 9	-	11.640.000	0	#DIV/0!	

							Jumlah usaha mikro yang mendapat mendapat kesempatan bermitra dengan pengusaha besar	815	Usaha Mikro					725	Usaha Mikro																	
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	220	Unit Usaha					200,00	Unit Usaha	146.996.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	225	Unit Usaha					200	Unit Usaha	335.534.000	-	2.820.000	-	8.820.000	-	-	-	-	-	11.640.000	-	3	-	11.640.000	0	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200	Orang					175	Orang	166.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	340	Unit Usaha					320	Unit Usaha	11.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170	Orang					150	Orang	196.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (UMKM Startup)	4,00	%					2,00	%	230.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	
							Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya	3,00	%					3,00	%																		

						Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah wirausaha pemula yang terverifikasi di Aplikasi SOLUSI	340,00	Wira usaha					320,00	Wira usaha	230.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	
							Persentase pelaku usaha mikro yang memahami digitalisasi pemasaran	9,00	%					8,00	%																		
							Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omzetnya melalui pelatihan dan pendampingan	5,80	%					5,40	%																		
						Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	670	Unit Usaha					605	Unit Usaha	230.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	

							Manusia, Serta Desain dan Teknologi																										
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	
						Urusan Pemerintahan Pilihan										566.658.308	2.159	227.139.691	1	76.180.000	-	-	-	-	2.160	303.319.691	#DIV/0!	53,527793 86	2.160	303.319.691	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										566.658.308	2.159	227.139.691	1	76.180.000	-	-	-	-	2.160	303.319.691	#DIV/0!	53,527793 86	2.160	303.319.691	#DIV/0!	#DIV/0!	
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	100	%					100	%	91.999.608	-	10.010.000	1	62.470.000	-	-	-	-	1	72.480.000	1	78,782944 38	1	72.480.000	1	#DIV/0!	
						Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Persentase Pelaksanaan Pemantauan yang terlaporkan	100	%					100	%																		

							Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar yang terlaporkan	100	%					100	%	91.999.608	-	10.010.000	1	62.470.000	-	-	-	-	1	72.480.000	1	78,782944 38	1	72.480.000	1	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	4	Laporan					2	Laporan	91.999.608	-	10.010.000	1	62.470.000	-	-	-	-	1	72.480.000	50	78,782944 38	1	72.480.000	25	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																
Predikat kinerja																																
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Realisasi Ekspor	139.025.307,45	USD					139.025.307,45	USD	128.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	0	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	
						Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang melakukan Ekspor	19,35	%					12,90	%	128.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	#DIV/0!	

						Kabupaten /Kota																											
						Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	270	Pelaku Usaha					135	Pelaku Usaha	128.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	11,87	%					11,87	%	51.193.200	2.134	9.377.900	-	12.300.000	-	-	-	-	2.134	21.677.900	17978,096	4234527242	2.134	21.677.900	17978,09604	#DIV/0!	
						Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Jumlah UTTP yang sudah bertanda Tera/Tera Ulang	8,20	%					8,00	%	51.193.200	2.134	9.377.900		12.300.000	-	-	-	-	2.134	21.677.900	26675	4234527242	2.134	21.677.900	26024,39024	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	16646	Unit					16320	Unit	51.193.200	2.134	9.377.900	5.100	12.300.000	-	-	-	-	7.234	21.677.900	44,325980 4	42,345272 42	7.234	21.677.900	43,457887 78	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																			
Predikat kinerja																																			
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	10,00	%					5,00	%	294.825.500	25	207.751.791	-	1.410.000	-	-	-	-	25	209.161.791	500	70,944267 37	25	209.161.791	250	#DIV/0!	
						Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM Kota Bogor yang produknya terfasilitasi promosi (Pameran, kemitraan)	3,10	%					1,55	%	294.825.500	25	207.751.791	-	1.410.000	-	-	-	-	25	209.161.791	1612,90323	70,944267 37	25	209.161.791	806,451612 9	#DIV/0!	
							Persentase UMKM yang produknya terdaftar dalam E-Commerce /TPMSE	6,64	%					3,32	%	-	-	-		-		-		-	-	-	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	140	UMKM					70	UMKM	294.825.500	25	207.751.791	-	1.410.000	-	-	-	-	25	209.161.791	35,714285 7	70,944267 37	25	209.161.791	17,857142 86	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	
						Urusan Pemerintahan Pilihan										16.649.755.878	-	3.738.667.593	-	4.196.018.535	-	-	-	-	-	7.934.686.128	#DIV/0!	47,656471 28	-	7.934.686.128	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										16.649.755.878	-	3.738.667.593	-	4.196.018.535	-	-	-	-	-	7.934.686.128	#DIV/0!	47,656471 28	-	7.934.686.128	#DIV/0!	#DIV/0!	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	28,06	Poin					28,05	Poin	16.219.986.978	-	3.720.483.093		4.173.516.935		-		-	-	7.894.000.028	0	48,668349 97	-	7.894.000.028	0	#DIV/0!	
							Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,82	Poin					26,64	Poin																		
							Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	13,00	Poin					12,48	Poin																		

							Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	21,98	Poin					21,97	Poin																													
							Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	%					100	%																															
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%					100	%																															
							Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai ketentuan	94,00	%					94,00	%																															
							Persentase Kepatuhan Anggaran	100	%					100	%																															
							Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95,00	%					95,00	%																															

							Transparansi Penglolaan Keuangan Daerah	94,00	%					94,00	%																		
							Rata-rata Nilai SKM aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	87,87	%					87,11	%																		
							Rata-rata Nilai SKM aspek Pemenuhan kualitas SDM	89,25	%					88,75	%																		
							Rata-rata Nilai SKM aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	89,39	%					88,38	%																				
							Rata-rata Nilai SKM aspek Penangan Pengaduan	88,39	%					88,38	%																		
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95,00	%					95,00	%	12.611.625.869	100	3.128.516.153	98	3.669.316.949	-	-	-	-	198	6.797.833.102	208,77193	53,9013222 6	198	6.797.833.102	208,771929 8	#DIV/0!	
							Persentase Kepatuhan Anggaran	100	%					100	%																		

							Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94,00	%					94,00	%																		
							Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%					100	%																		
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67	Orang/Bulan					60	Orang/Bulan	12.564.465.869	60	3.116.726.153	59	3.657.526.949	-	-	-	-	59	6.774.253.102	98	53,915965 65	59	6.774.253.102	88,059701 49	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan					12	Laporan	47.160.000	3	11.790.000	3	11.790.000	-	-	-	-	6	23.580.000	50	50	6	23.580.000	25	#DIV/0!	

						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%					100	%	1.518.806.918	21	128.136.740	14	156.195.990	-	-	-	-	34	284.332.730	34,482758 6	18,720795 03	34	284.332.730	34,482758 62	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket					1	Paket	24.000.000	1	8.631.100	-	7.486.800	-	-	-	-	1	16.117.900	100	67,157916 67	1	16.117.900	50	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket					1	Paket	120.000.000	1	22.460.300	-	21.125.800	-	-	-	-	1	43.586.100	100	36,32175	1	43.586.100	50	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket					1	Paket	60.000.000	1	15.009.200	-	9.355.200	-	-	-	-	1	24.364.400	100	40,607333 33	1	24.364.400	50	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket					1	Paket	68.535.000	-	10.650.000	-	10.500.000	-	-	-	-	-	21.150.000	0	30,860144 45	-	21.150.000	0	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediaka n	2	Paket					1	Paket	133.653.500	-	4.246.400	1	40.374.662	-	-	-	-	1	44.621.062	100	33,385629 26	1	44.621.062	50	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka n	24	Dokumen					12	Dokumen	47.816.418	-	3.486.600	-	3.486.600	-	-	-	-	-	6.973.200	0	14,583275 56	-	6.973.200	0	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan					12	Laporan	1.064.802.000	3	63.653.140	3	63.866.928	-	-	-	-	6	127.520.068	50	11,975941 82	6	127.520.068	25	#DIV/0!	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%					100	%	1.295.408.316	25	323.853.300	25	245.108.676	-	-	-	-	50	568.961.976	50	43,921439 21	50	568.961.976	50	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	24	Laporan					12	Laporan	370.290.764	3	54.287.302	3	51.969.132	-	-	-	-	6	106.256.434	50	28,695404 89	6	106.256.434	25	#DIV/0!	

							Disediakan																										
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan					12	Laporan	925.117.552	3	269.565.998	3	193.139.544	-	-	-	-	6	462.705.542	50	50,015864 58	6	462.705.542	25	#DIV/0!	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	94	%					94	%	794.145.875	9	139.976.900	5	102.895.320	-	-	-	-	15	242.872.220	15,715667 3	30,582822 08	15	242.872.220	15,715667 31	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	Unit					42	Unit	462.393.775	7	104.939.200	6	89.135.320	-	-	-	-	13	194.074.520	30,952381	41,971698 26	13	194.074.520	14,285714 29	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484	Unit					217	Unit	161.032.100	18	35.037.700	8	13.760.000	-	-	-	-	26	48.797.700	11,981568	30,303088 64	26	48.797.700	5,371900826	#DIV/0!	

						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit					5	Unit	170.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																	
Predikat kinerja																																	
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	*Persentase Peningkatan IKM yang produktif*	9,28	%					8,70	%	429.768.900	-	18.184.500	-	22.501.600	-	-	-	-	-	40.686.100	0	9,4669716 68	-	40.686.100	0	#DIV/0!	
						Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Industri yang memiliki sertifikasi kompetensi	0,17	%					0,08	%	429.768.900	-	18.184.500	-	22.501.600	-	-	-	-	-	40.686.100	0	9,4669716 68	-	40.686.100	0	#DIV/0!	
						Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	Dokumen					2	Dokumen	233.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	#DIV/0!	Dinkukmdagin

						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7	Dokumen					3	Dokumen	60.000.000																						
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14	Dokumen					7	Dokumen	136.096.900	1	18.184.500	1	22.501.600	-	-	-	-	2	40.686.100	28,571428 6	29,894949 85	2	40.686.100	14,285714 29	#DIV/0!	Dinkukmdagin
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																									
Predikat kinerja																																									
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																																									
Predikat kinerja																																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																																									

2.1.1. Urusan Koperasi dan UMKM

a. Urusan Koperasi

1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN;**

   Melalui kegiatan pemberdayaan dan perlindungn koperasi yang keanggotannya dalam daerah kabupten/kota dengan sub kegiatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukrisasi usaha; penyelesaian sengketa Koperasi KSU Atmo Styo Utomo (ASO), melakukan rapat koordinasi terkait pentaan dan perbitan usaha simpan pinjam (USP)

2. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI:**

   Melalui kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;

3. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI;**

   Melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pelasnaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota

4. **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**

   Melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaan dalam Daearh Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan Kastor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggoyaan dalam daerah kabupaten/Kota;

b. Urusan UMKM

1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM**

   Melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan , kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan ***1). sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan usaha mikro***, yaitu salah satunya adalah dengan :

   a). telah menerbitkan dan menyerahkan Tanda Daftar Usaha (TDU) kepada para pedagang kaki lima (PKL) di zona PKL Binaan, sebagai berikut:

1). Zona PKL Gang Selot sebanyak 21 TDU;
2). Zona PKL Ceremai Ujung sebnyak 36 TDU;
3). Zona PKL Cidangiang sebanayak 14 TDU;
4). Zona PKL batutulis sebanyak 32 TDU;
5). Zona PKL Dadali sebanyak 30 TDU;
6). Zona PKL Bunga Potong sebanyak 13 TDU;
7). Zona PKL Pengadilan sebanyak 13 TDU;
8). Zona PKL Jalan R3 sebanyak 118 TDU;

b). Melakukan monitoring di zona PKL ceremai Ujung dan Sempur serta monitoring pembangunan sentra kuliner di Gang Roda 3 dan 4 dengan hasil :
1). Zona PKL Ceremei Ujung dengan jumlah PKL sebanyak 53 Pedagang;
2). Zona PKL Sempur dengan jumlah PKL sebanyak 120 Pedagang;
3). Pembangunan sentra kuliner di Gang Roda 3 sudah 100%;
4). Pembangunan sentra kuliner di Gang Roda 4 sudah 95%

c). pelatihan terintegrasi UMKM produktif yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari bertempat di Sentra Cipta Mandiri Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, dengan tujuan dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor bekerjasama dengan Nusa Karya Inovasi (NKI) Indonesia, dimana kolaborasi ini bertujuan memberikan pelatihan teknis yang mencakup aspek pembukuan sederhana, manajemen produksi (meliputi perhitungan harga pokok produksi/HPP, pengemasan, pelabelan dan perencana pengembangan usaha), serta keterampilan digital marketing untuk memperluas akses pasar UMKM.

d). Dinas KUKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah menerbitkan dan menyerahkan TDU kepada PKL di zona PKL binaan Teras Surken sebanyak 7 (tujuh) PKL dan melakukan monitoring di zona PKL jalan R3 sebanyak 150 (seratus lima puluh) pedagang .

2.1.2 . Urusan Perdagangan

1 . **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI;** melalui kegiatan pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dengan sub keg pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota dengan melaksanakan:

a. Monitoring dan pendampingan promosi perdagangan pada IKM Dekranasda yaitu Gadih, Cheklie Art dan Mells Indonesia) dimana hasilnya untuk IKM Gadih setelah mengikuti pameran inacraf tetap mendapatkan pesanan dari luar Kota Bogor dimana Mell's Indonesia dapat memberdayakan warga sekitar dengan tenaga kerja sebanyak 20 orang,

b. Melaksanakan monitoring rangkaian kegiatan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2025 di mana Kota Bogor produk unggulan berupa produk batik organik, itando, galis batik, batik kayu dan woodezig, Kota Bogor juga meraih prestasi juara umum stand terbaik, juara 1 (satu) anugerah produk kriya terbaik dan nominasi Dekranasda Award 2025 untuk IKM Adrie Basuki kategori serat kain. Pada pameran ini juga jumlah omset penjualan produk unggulan kota bogor sebesar Rp. 5.560.000 serta ada pengunjung yang menjadi reseler tas IKM Itando.

2. **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**, melalui kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota dengan sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota pada bulan Maret terkait:

a. Operasi Pasar Bersubsidi pada Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan dengan Kuota masing-masing 1.515 paket (beras premium 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg dan terigu 1 kg);

b. Pelaksanaan pasar murah barang kebutuhan pokok dan rumah tangga di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.

3. **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,** melalui kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera / tera ulang dan pengawasan, dengan sub kegiatan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang pada bulan Juni 2025 di Kecamatan Bogor Utara, Pasar Merdeka sedangkan pada bulan Mei 2025 di laksanakan di Kecamatan Bogor Tengah , Pasar Baru Bogor dan Pasar Padasuka (UTTP tanpa anak timbangan sejumlah 19 , UTTP dan anak timbangan sejumlah 83) , Tera, Tera/Ulang juga dilaksanakan bulan Maret dan April 2025 di Kecamatan Bogor Barat , dan di Bogor Timur

2.1.3.Urusan Perindustrian

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, melalui kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota dengan sub keg koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan aksi pada bulan Februari 2025 memberikan bantuan kemasan di lokasi lomba PKK (P2WKSS) di Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur, berupa standing pouch, botol minuman, dus kue serta memberikan pelatihan kemasan dengan narasumber dari Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Saung Inovasi Bogor Utara di lokasi lomba PKK sebanyak 30 orang IKM, serta memfasilitasi 5 (lima) IKM untuk mendaftarkan HKI merek , serta memberikan bantuan kemasan di lokasi 5 lomba PKK di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat berupa standing pouch, dus kue, botol minum serta pelatihan kemasan sebanyak 30 orang dengan metode pendampingan label kemasan sesuai produk yang dihasilkan.

2.2. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGNAGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR

Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.100- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor/2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran endapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.12.1/Kep.134-Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor/2025 Tentang Pengalihan Dan Penggunaan Anggaran Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dalam melaksanakan Capaian Keuangan sampai dengan Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025, yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Pembangunan Kota Bogor (APBD) dan Dana Pemanfaatan Efisiensi adalah sebesar **Rp. 17.135.800.706,- dengan Capaian Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.289.895.819 atau mencapai 48,38%,** sebagaimana tabel di bawah ini:

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU Perubahan	sd Juni 2025	%	Sisa Pagu Anggaran
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**12.904.109.136**	**12.904.109.136**	**6.774.253.102**	**52,50%**	**6.129.856.034**
	1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.904.109.136**	**12.904.109.136**	**6.774.253.102**	**52,50%**	**6.129.856.034**
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.904.109.136	12.904.109.136	6.774.253.102	52,50%	6.129.856.034
		JUMLAH I (GAJI)	**12.904.109.136**	**12.904.109.136**	**6.774.253.102**	**52,50%**	**6.129.856**
	2.	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**17.500.000**	**255.500.000**	**-**	**0,00%**	**255.500.000**
	2.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000	255.500.000	-	0,00%	255.500. 000
2.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**53.156.000**	**28.893.000**	**-**	**0,00%**	**28.893.000**
	3.	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,**	**53.156.000**	**28.893.000**	**-**	**0,00%**	**28.893.000**

		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	3.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	53.156.000	28.893.000	-	0,00%	28.893.000
3.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**39.040.000**	**39.040.000**	**36.620.000**	**93,80%**	**2.420.000**
	4.	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**39.040.000**	**39.040.000**	**36.620.000**	**93,80%**	**2.420.000**
	4.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	39.040.000	39.040.000	36.620.000	93,80%	2.420.000
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**95.280.000**	**66.570.000**	**3.630.000**	**5,45%**	**62.940.000**
	5.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**95.280.000**	**66.570.000**	**3.630.000**	**5,45%**	**62.940.000**

	5.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.280.000	66.570.000	3.630.000	5,45%	62.940.000
		JUMLAH II (BIDANG KOPERASI)	**204.976.000**	**390.003.000**	**40.250.000**	**10,32%**	**349.753.000**
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**569.712.000**	**177.880.000**	**11.640.000**	**7,41%**	**166.240.000**
	6.	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**569.712.000**	**177.880.000**	**11.640.000**	**7,41%**	**166.240.000**
	6.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	206.582.000	157.080.000	11.640.000	7,41%	145.440.000
	7.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	166.550.000	11.800.000	-	0,00%	11.800.000

	8.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	196.580.000	9.000.000	-	0,00%	9.000.000
6.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**157.888.000**	**8.420.000**	**-**	**0,00%**	**8.420.000**
	7.	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**157.888.000**	**8.420.000**	**-**	**0,00%**	**8.420.000**
	9.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	157.888.000	8.420.000	-	0,00%	8.420.000
		JUMLAH III (BIDANG UMKM)	**727.600.000**	**186.300.000**	**11.640.000**	**6,25%**	**174.660.000**
7.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**91.953.608**	**427.107.752**	**72.480.000**	**16,97%**	**354.627.752**
	8.	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**91.953.608**	**427.107.752**	**72.480.000**	**16,97%**	**354.627.752**
	10.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	91.953.608	427.107.752	72.480.000	16,97%	354.627.752

		JUMLAH V (BIDANG PPDNPKTN)	**91.953.608**	**427.107.752**	**72.480.000**	**16,97%**	**354.627.752**
8.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**51.193.200**	**51.193.200**	**21.677.900**	**42,35%**	**29.515.300**
	9.	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**51.193.200**	**51.193.200**	**21.677.900**	**42,35%**	**29.515.300**
	11.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	51.193.200	51.193.200	21.677.900	42,35%	29.515.300
		JUMLAH IV (UPTD Metrologi)	**51.193.200**	**51.193.200**	**21.677.900**	**42,35%**	**29.515.300**
8.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**54.616.000**	**32.126.000**	**-**	**0,00%**	**32.126.000**
	10.	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**54.616.000**	**32.126.000**	**-**	**0,00%**	**32.126.000**
	12.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	54.616.000	32.126.000	-	0,00%	32.126.000
10.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**294.825.500**	**275.325.500**	**209.161.791**	**75,97%**	**66.163.709**

	11.	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**294.825.500**	**275.325.500**	**209.161.791**	**75,97%**	**66.163.709**
	13.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	294.825.500	275.325.500	209.161.791	75,97%	66.163.709
		JUMLAH VI (BIDANG PROMIJA)	**349.441.500**	**307.451.500**	**209.161.791**	**68,03%**	**98.289.709**
11.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**166.598.100**	**143.188.100**	**40.686.100**	**42,93%**	**102.502.000**
	12.	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**166.598.100**	**143.188.100**	**40.686.100**	**42,93%**	**102.502.000**
	14.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	48.411.200	48.411.200	-	0,00%	48.411.200
	15.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	118.186.900	94.776.900	40.686.100	42,93%	54.090.800
		JUMLAH VIII (INDUSTRI)	**166.598.100**	E ‘R**143.188.100**	**40.686.100**	**28,41%**	**102.502.000**
12.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**47.160.000**	47.160.000	23.580.000	50,00%	23.580.000
	13.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	47.160.000	47.160.000	23.580.000	50,00%	23.580.000

	16.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.160.000	47.160.000	23.580.000	50,00%	23.580.000
	14.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.069.974.818**	**783.116.700**	**284.332.730**	**334,64%**	**498.783.970**
	17.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	24.000.000	16.117.900	67,16%	7.882.100
	18.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	74.449.000	43.586.100	58,54%	30.862.900
	19.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.930.100	46.503.600	24.364.400	52,39%	22.139.200
	20.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.320.000	66.150.000	21.150.000	31,97%	45.000.000
	21.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.310.300	94.852.700	44.621.062	47,04%	50.231.638
	22.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.816.418	13.946.400	6.973.200	50,00%	6.973.200
	23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	698.598.000	463.215.000	127.520.068	27,53%	335.694.932
	15.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.295.408.316**	**1.295.408.316**	**568.961.976**	**78,71%**	**462.412.010**

	24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.290.764	370.290.764	106.256.434	28,70%	264.034.330
	25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.117.552	925.117.552	462.705.542	50,02%	462.412.010
	16.		**592.846.302**	**178.636.700**	**242.872.220**	**98,07%**	**357.890.782**
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.126.302	422.126.302	194.074.520	45,98%	228.051.782
	27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.457.700	93.677.700	48.797.700	52,09%	44.880.000
	28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.720.000	84.959.000	-	0,00%	84.959.000
		JUMLAH VII (SEKRETARIAT)	**3.158.847.136**	**2.726.448.018**	**1.119.746.926**	**41,07%**	**1.606.701.092**
		JUMLAH II + III + IV + V + VI + VII + VIII (KEGIATAN)	**4.750.609.544**	**4.231.691.570**	**1.515.642.717**	**35,82%**	**2.716.048.853**
		JUMLAH GAJI dan KEGIATAN	**17.654.718.680**	**17.135.800.706**	**8.289.895.819**	**48,38%**	**8.845.904.887**

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Jika menyandingkan isu-isu strategis dari tingkat internasional,nasional Hingga regional, isu yang diangkat Kota Bogor memperlihatkan keselarasan. Pertama, kaitannya dengan pembangunan manusia. Hal ini menjadi fokus yang selalu dikembangan di empat daerah di atas dan pastinya di beberapa daerah lainnya. Tujuan ini selaras dengan arah tujuan pembangunan jangka panjang nasional dalam menghadapi bonus demografi serta menuju Indonesia Emas. Kota Bogor mengangkat isu pertama ini sebagai pembentukan pilar pembangunan, di mana sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing akan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. Kedua adalah pengembangan ekonomi. Empat wilayah berfokus dalam mengembangkan ekonomi. Setelah terdampak Covid-19, seluruh daerah mencoba pulih dari keterpurukan. Pengoptimalan peran ekonomi daerah dan UMKM juga menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, Kota Bogor mengangkat isu pengembangan daya saing ekonomi mengupayakan peningkatan peran UMKM dan ekonomi lokal dalam upaya bersama mewujudkan ekonomi yang lebih baik. Era globalisasi dan perkembangan digitalisasi mengharuskan pelaku ekonomi beradaptasi dengan hal tersebut. Perdagangan bebas di era sekarang ini tidak terbatas pada skala nasional, melainkan sudah pada lingkup internasional. Maka dari itu, perlunya ekonomi yang berdaya saing adalah kaitannya dengan kemampuan ekonomi daerah dalam bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar. Isu ketiga yaitu pembangunan wilayah yang kaitannya dengan infrastruktur. Pembangunan yang lebih baik harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Ketimpangan maupun ketidakmerataan infrastruktur yang tersedia di setiap daerah membuat tidak semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut. Maka dari itu perlu adanya pemerataan dan pembangunan wilayah, salah satunya terhadap infrastruktur sebagai sarana masyarakat dalam meningkatkan kehidupannya. Terakhir, kaitannya dengan internal pemerintah sebagai leading sector pembangunan daerah harus selalu berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Adanya reformasi birokrasi dan SAKIP yang disusun Pemerintah Pusat yaitu Negara Indonesia menjadi arahan bagi pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan internalnya. Arahan tersebut bertujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah , Perdaganagn dan Perindustrian Kota Bogor , dimana pembangunan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian selaras dengan tujuan pembangunan daerah di Kota Bogor yaitu untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat. Agar pembangunan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian di Kota Bogor yang lebih baik.

Selanjutnya hasil identifikasi potensi permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan Pokok merupakan masalah yang bersifat makro. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci. Pemetaan permasalahan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas, maka permasalahan pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM;
2. Masih Lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM;
3. Proses produksi yang inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk;
4. Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM;
5. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangan kemampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran;
6. Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan menengah;
7. Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah;

Sedangkan permasalahan pada urusan perdagangan, adalah sebagai berikut:

1. Gejolak Inflasi yang cukup tinggi ;
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan di sector perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE) ;
3. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan ;
4. Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor;
5. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas koperasi, usaha kecil, menengah perdagangan dan perindustrian Kota Bogor dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dengan arahan Kepala Dinas terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk berdasarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Renja Perubahan 2025 berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Daerah yang relevan. Perubahan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renha, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan Renja.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Peningkatan koperasi berizin	80,00 Persen	**17.500.000,00**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**		Persentase Peningkatan koperasi berizin	60,00 Persen	**255.500.000,00**	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	2,27 Persen	17.500.000,00	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi berIzin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	2,27 Perse	255.500.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Des	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	17.500.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	255.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Berkualitas	10 persen	**53.156.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase Koperasi Berkualitas	10,15 persen	**28.893.000,00**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	3,37 persen	**53.156.000,00**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	3,37 persen	**28.893.000,00**	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 unit usaha	53.156.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 unit usaha	28.893.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang Sehat	10,71 Persen	**146.519.900,00**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		Persentase Koperasi yang Sehat	15,20 Persen	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	3,37 Persen	146.519.900,00	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	3,37 Persen	0	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	146.519.900,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	0	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	30,00 Persen	**39.040.000,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	47,18 Persen	**39.040.000,00**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,09 Persen	**39.040.000,00**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,09 Persen	**39.040.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas danKompetensi SDM Koperasi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	410 Orang	39.040.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas danKompetensi SDM Koperasi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	275 orang	39.040.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	17,21 Persen	**95.280.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		Persentase Koperasi Aktif	21,45 Persen	**66.570.000,00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2,24 Persen	**95.280.000,00**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	2,24 Persen	**66.570.000,00**	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	110 Unit Usaha	95.280.000,00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	66.570.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)		Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	25,00 Persen	**569.712.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	53,00 Persen	**177.880.000,00**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	30,00 Persen	**569.712.000,00**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	30,00 Persen	**177.880.000,00**	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikr		umlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	206.582.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	157.080.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha	166.550.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha	11.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		umlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	196.580.000,00	Koordinasi danSinkronisasi dengan Para PemangkuKepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		umlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	9.000.000,00	
								umlah Unit Usaha Mikro Terdata	48346 Unit Usaha	50.000.000	
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	192.280.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	15,00 Persen	**157.888.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya**	**22,00 Persen**	**8.420.000,00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	15,00 Persen	**157.888.000,00**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		Persentase peningkatan jumlah skala usaha menjadi usaha kecil	15,00 Persen	**8.420.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	157.888.000,00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	8.420.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				**91.953.608,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	<9,00 Persen	**427.107.752,00**	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				**91.953.608,00**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00 Persen	**427.107.752,00**	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/Desa			91.953.608,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler danPasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	427.107.752,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	3,13 Persen	**33.840.000,00**	
						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memahami Regulasi yang Berlaku	40,00 Persen	33.840.000,00	
						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	33.840.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Realisasi Ekspor	75.763.689,97USD	54.616.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Nilai Realisasi Ekspor	142.433.793,75 USD	**32.126.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	2,10 Persen	**54.616.000,00**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	2,10 Persen	**32.126.000,00**	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		umlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	54.616.000,00	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha	32.126.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentse Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	13,15 Persen	**51.193.200,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentse Kesuaian data dan Akurasi Ukuran	39,32 Persen	**51.193.200,00**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	75,03 Persen	**51.193.200,00**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Persentase Kesesuaian data dan Akurasi ukuran	75,03 Persen	51.193.200,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	60500 Unit	51.193.200,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	60500 Unit	51.193.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	24,27 Persen	**294.825.500,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase Produk Pelaku Usaha yang difasilitasi pemasarannya	60,70 Persen	**275.325.500,00**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/TPMSE	240 Produk 10,00 Persen	294.825.500,00	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Jumlah Produk yang difasilitasi promosi dan pemasarannya Persentase pelaku usaha yg melaksanakan pemasaran melalui E-Commerce/ TPMSE	240 Produk 10,00 Persen	**275.325.500,00**	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	294.825.500,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	275.325.500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**19.455.003.061,00**					**17,273,396,309**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah** **Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat**	**3.50 Poin**	**18.669.309.061,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah** **Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat**	**A** **3.61 Poin**	**17.463.725.986,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**12.951.269.136,00**			**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**14.201.954,354,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	12.904.109.136,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ bulan	**12.904.109.136,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	47.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	**47.160.000,00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	**1.069.974.818,00**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	**783.116.700,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	101.395.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	53.930.100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	86.212.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.320.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	64.455.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	118.310.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	123.159.400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.816.418,0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.000.000,00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	698.598.000,0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	620.238.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 Persen**	**552.817.200,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 Persen**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	57 Unit	552.817.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	**0**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 %**	**784.745.890,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**90 %**	**1.282.656.832,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	429.173.250,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361.535.120,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355.572.640,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	921.121.712,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**1.274.366.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**ersentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**900.036.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	451.680.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	455.440.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	50 Unit	124.630.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	698.056.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	319.966.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase Peningkatan IKM yang produktif**	**4,00 Persen**	**685.694.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase Peningkatan IKM yang produktif**	**7,80 Persen**	**257.510.500,00**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Industri yang menerapkan standart produk	20,00 Persen	685.694.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Industri yang menerapkan standart produk	20 Persen	**257.510.500,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	233.672.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	138.080.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	452.022.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	119.430.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**27,61 %**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**27,61 %**	0	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**11,80 %**	**100.000.000,00**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Perusahaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**11,80 %**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	0	
TOTAL					**23.548.258.561,00**					**19.006.756.036,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kota.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor.

Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan Musrenbang Yang Akan diakomodir Dalam Renja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Peridnustrian
Kota Bogor Tahun 2025

nama pengusul	alamat	rt	rw	Kec	kelurahan	permasalahan usulan	uraian usulan	dampak usulan	jumlah penerima manfaat	vol	satuan	pagu biaya	perangkat daerah	bidang	program	kegiatan	sub kegiatan
Asep Safei	Kampung Wangun Atas	01	01	KEC. BOGOR TIMUR	KEL. SINDANGSARI	Pelatihan pekerja kerajinan	Pelatihan kerajinan UMKM	Terciptanya sumber daya manusia produktif	60	60	orang	154.830.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Daden Fikruzzaman	Bojong Baru	01	02	KEC. BOGOR BARAT	KEL. PASIRKUDA	belum/kurangnya modal & pembinaan usaha eco print	Perlu modal dan pembinaan utk pengembangan usaha eco print	agar umkm menjadi lebih maju	1000	10	orang	24.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
elly	pulo geulis	01	04	KEC. BOGOR TENGAH	KEL. BABAKANPASAR	tidak adanya koperasi di dalam kelompok umkm	pelatihan perkoperasian	Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200	100	orang	28.088.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

faisal muslim	jl mbah dalem rt.02/013 kedung badak	002	13	KEC. TANAH SAREAL	KEL. KEDUNGBADAK	masyarakat belum ada pemahaman mengenai sistem perkoprasian	mengajukan pelatihan dasar mengenai perkoprasian keanggotaan dan pembentukan koperasi	menambah pengetahuan sdm dalam bidang koperasi dan perekonomian warga	10	1	paket	14.094.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Heri Supriatin	Jl. Tembakang Bawah No.63, RT.02/RW.02, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, Indonesia	03	02	KEC. TANAH SAREAL	KEL. KEDUNGWARINGIN	belum adanya koperasi rw.02	mengadakan pelatihan dan membangun koperasi	kemudahan berbelanja di masyarakat dan terhindar dari bank keliling	500	20	orang	14.094.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

RW 02	Kp Sindang Sari	04	02	KEC. BOGOR UTARA	KEL. TANAHBARU	belum adanya pelatihan UMKM	Pembuatan dari kerajinan bambu, Pelatihan Keterampilan Macrame, Pelatihan Pembuatan alas kaki, Pelatihan Kerajinan dari kayu jati belanda	Optimalisasi potensi UMKM dan Koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40	40	orang	54.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Ujang Sutisna	Tamansari Persada Blok D4 No. 25	03	15	KEC. TANAH SAREAL	KEL. CIBADAK	Kurangnya pelatihan digital marketing untuk UMKM di tingkat komplek	Pelatihan digital marketing untuk UMKM agar bisa bersaing	Meningkatkan UMKM yang sudah go digital	100	100	orang	124.570.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
												414.426.000					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPD Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 khususnya periode keempat, yaitu tahun 2021-2025. Dengan begitu tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2025-2026 mengacu pada target RPJPD Kota Bogor di tahun yang berkenan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan RPD tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif danberkelanjutan, diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja KUKMdagin tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang mengacu pada tema RPD Kota Bogor 2025-2026 yaitu " Memperkokoh Kemandirian Masyarakat" dan untuk RPD Kota Bogor di Tahun 2025 adalah Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang berkualitas.

Adapun tujuan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang terdiri dari (1) Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 2) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah, dan (4) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuan dan Sasaran baik Renstra maupun Renja yang disusun Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bogor pada dasarnya mengacu pada tujuan keempat dari RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menetapkan tujuan Dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Ssaran Tahun ke....
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A
			Survey Kepuasan Masayarkat di Lingkup Perangkat Daerah	88,75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20%
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95,00%
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91,00%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1 inovasi
2	Terwujudnya daya saing Koperasi dan UMKM		Persentase Peningkatan Koperasi yang Berdaya Saing	1,56%
			Indeks Daya Saing UMKM	0,8%
		Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Persentase Koperasi Berdaya Saing	14,39%
		Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan	UMKM yang Produktif	133 UMKM

		ekonomi daerah		
3.	terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan perinustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bogor		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB (ADHB)	19,30%
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan jumlah UMKM yg mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran utk peningkatan penjualan	5.00%
		Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor	11,2%
		Optimalisasi Pembinaan pada Sektor Perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/sosialisasi	5,80%
		Optimalisasi Perlindungan Konsumen	Tingkat Akurasi ukuran sarana perdagangan	31,38%
		Pengendalian Stabilitas Harga kebutuhan Barang Pokok dan penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	< 9%
4.	terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan perinustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bogor		Persentase Kontribusi Sektor Industri pada PDRB (ADHB)	18,76
		Meningkatnya IKM Berdayasaing	Persentase Peningkatan IKM Berdayasaing	20,20%

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya koperasi, perdagangan dan industri lebih baik dan lebih sejahtera. Penetapan tujuan, sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

a. Indikator Kinerja Utama RPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	Persentase	2,72	3,13	5,71	5,71
2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	Persentase	NA	1,19	3,89	3,89
3	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Persentase	4,46	2,45	6,37	6,37
4	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	Persentase	NA	7,43	15,64	15,64

b. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	
			Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
1	Persentase koperasi berdaya saing	Persen	18,94	17,16	17,16
2	UMKM yang Produktif	unit	NA	133 unit usaha	133 unit usaha
3	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi atau pemasaran untuk peningkatan penjualan	Persen	NA	5	5
4	Persentase peningkatan nilai ekspor	Persen	-30,27	11,2	8,10
5	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana distribusi perdagangan melalui pembinaan/ sosialisasi	Persen	NA	5,80	5,80
6	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang berizin dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin usahanya	Persen	NA	19,80	19,80
7	Tingkat akurasi ukuran sarana perdagangan	Persen	NA	31,38	31,38
8	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	8,35	<9	<9
9	Persentase peningkatan IKM berdaya saing	Persen	NA	20,20	20,20
10	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	Persen	NA	86,99	86,99
11	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	95	95
12	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	NA	91	91
1	Jumlah Inovasi Perangkat	Inovas	NA	1	1

3	Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi ≥70)	i			
14	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	NA	88,75	88,75

b. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
B	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**					
1.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	21.45	23.1	23.4	6,24
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	10.15	10.73	11.21	11,21
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	371	536	380	380
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	194.2	164	200	200
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	683	689	-	15
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	88	175	-	20
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Jumlah	50	175	50	-
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	90	-	90	-
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	96	96	106	106
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	180	399	450	450
C	**FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**					
2.	**PERDAGANGAN**					
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	16.00	-30,27	11.2	8,10

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	77.17	79.78	77	80
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	99.93	70.3	57.44	71
4	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	persen	39.32	52.73	39.44	52,80
3.	**PERINDUSTRIAN**					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	100	100	100	100
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	52.38	25.6	52.38	25,7
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	12.2	0	12,3
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha	persen	Indikator baru	NA	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
	industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	0	0	0	0
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	0	0	0	0
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	70	70	70	70

d.Target Program

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
Tujuan	**Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan**							
Sasaran	**Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah**							
Program 3.2.1.2	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	1	persentase peningkatan koperasi berijin	%	60.00	60.00	70	70
Program 3.2.1.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	persentase koperasi yg berkualitas	%	10,00	11,32	11.37	11,21
Program 3.2.1.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	Persentase Koperasi yang sehat	%	14,20	17,05	15.6	15,6
Program 3.2.1.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	%	47,17	47,20	50	50
Program 3.2.1.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Persentase Koperasi aktif	%	18.75	18,75	32,11	6,24

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
Program 3.2.1.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	52,00	59,00	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha		Indikator Baru		16	16
		2	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan		Indikator Baru	NA	3	4,40
Program 3.2.1.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	15,00	19,08	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	%	Indikator Baru	NA	3	2
		2	Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet	%	Indikator Baru	NA	3	4,40

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
			penjualannya					
		3	Persentase Pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	%	Indikator Baru	NA	3	7
Sasaran	Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar							
Program 3.2.1.25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	%	< 9,00	8,35	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	Indikator Baru	NA	100	100
Program 3.2.1.24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	%	3,13	4,07	-	-
Program 3.2.1.23	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar	%	Indikator Baru	NA	29,19	7,14

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	30,77	79,78	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
Program 3.2.1.30	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	27,61	21,81	14.30	24,20
Program 3.2.1.26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	Nilai Realisasi Ekspor	USD	119.540.872,64	87.178.132,53	139.025.307,45	139.025.307,45
Program 3.2.1.27	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	25,64	52,73	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	%	Indikator Baru	NA	11,87	67,12
Program 3.2.1.28	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	60.70	60.70	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Persentase UMKM yang Difasilitasi	%	Indikator Baru	NA	5	19,05

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
			Pemasarannya dari data UMKM yang Terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI					
Program 3.2.1.29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	7,31	25,60	22,89	22,89
Tujuan	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**							
Sasaran	**Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif**							
Program 2.2.1.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3.52	3.414	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	A	A	Indikator ini tidak dipake lagi di 2025	-
		1	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Point	Indikator baru	NA	25,8	25,8
		2	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Point	Indikator baru	NA	26.55	26.55

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
		3	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Point	Indikator baru	NA	12,48	12,48
		4	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Point	Indikator baru	NA	21,97	21,97
		5	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	Indikator baru	NA	100	100
		6	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	Indikator baru	NA	100	100
		7	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	Persen	Indikator baru	NA	94	94
		8	Persentase Kepatuhan Anggaran	Persen	Indikator baru	NA	100	100
		9	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	Persen	Indikator baru	NA	95	95

Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program		Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Realisasi	Target Awal	Target Kesepakatan
		10	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	Indikator baru	NA	94	94
		11	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	Persen	Indikator baru	NA	87,11	87,11
		12	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	Persen	Indikator baru	NA	88,75	88,75
		13	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Persen	Indikator baru	NA	88,38	88,38
		14	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Persen	Indikator baru	NA	88,38	88,38

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilakasanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang direncanakan untuk periode tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

	DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
6.	PENGEMBANGAN UMKM	6. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
7.	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	7. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
8.	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	9. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
10.	PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
11.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

12.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		13. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025, dimana masuk pada URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN dan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN), dapat terlihat pada matrik di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**18.473.735.286,00**	**17.654.718.680,00**	**17.478.757.368,00**		**18.788.185.326,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.440.993.100,00**	**932.576.000,00**	**576.303.000,00**		**1.654.022.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.440.993.100,00**	**932.576.000,00**	**576.303.000,00**		**1.654.022.000,00**	
1,	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Peningkatan koperasi berizin**	**70 Persentase**	**70 Persentase**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**255.500.000,00**		**70.000.000,00**	

	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase koperasi yang berbadan hukum*	50 Persen	50 Persen	17.500.000,00	17.500.000,00	255.500.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	17.500.000,00	17.500.000,00	255.500.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Berkualitas**	**11,21 Persentase**	**11,21 Persentase**	**79.452.000,00**	**53.156.000,00**	**28.893.000,00**		**70.000.000,00**	

	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase koperasi yang di periksa dan diawasi*	2,11 Persen	2,11 Persen	79.452.000,00	53.156.000,00	28.893.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	79.452.000,00	53.156.000,00	28.893.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3,	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal**	**50 Persentase**	**50 Persentase**	**34.200.000,00**	**39.040.000,00**	**39.040.000,00**		**150.000.000,00**	

	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengurus dan pengawas Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan*	7,80 Persen	7,80 Persen	34.200.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	150 Orang	34.200.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4,	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Koperasi Aktif**	**6,24 Persentase**	**6,240 Persentase**	**222.614.200,00**	**95.280.000,00**	**66.570.000,00**		**70.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	*Persentasi koperasi yang di berdayakan dan di lindungi*	1,06 Persen	1,06 Persen	222.614.200,00	95.280.000,00	66.570.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGAN

		Kabupaten/Kota									GAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	222.614.200,00	95.280.000,00	66.570.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5,	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan**	**163 Persenta se Persentas e**	**164,40 Persentase Persentas e**	**857.210.900,00**	**569.712.000,00**	**177.880.000,00**		**994.022.000,00**	

	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah usaha mikro yang mendapat mendapat kesempatan bermitra dengan pengusaha besar Jumlah usaha mikro yang mendapat pemberdayaan*	200 Usaha Mikro 725 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro 725 Usaha Mikro	857.210.900,00	569.712.000,00	177.880.000,00		994.022.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	146.996.900,00	0,00	0,00		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	335.534.000,00	206.582.000,00	157.080.000,00		460.442.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	175 Orang	175 Orang	166.550.000,00	166.550.000,00	11.800.000,00		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	320 Unit Usaha	320 Unit Usaha	11.550.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	150 Orang	196.580.000,00	196.580.000,00	9.000.000,00		433.580.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

6,	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (UMKM Startup) Persentase produk UMKM binaan yang meningkat omzet penjualannya**	**2 3 Persent a se Persent as e**	**2,00 4,40 Perse ntase Persent as e**	**230.016.000,00**	**157.888.000,00**	**8.420.000,00**		**300.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah wirausaha pemula yang terverifikasi di Aplikasi SOLUSI Persentase pelaku usaha mikro yang memahami digitalisasi pemasaran Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omzetnya melalui pelatihan dan pendampingan*	320 Wirausaha 5,4 Persen 8 Persen	350 Wirausaha 4,50 Persen 8 Persen	230.016.000,00	157.888.000,00	8.420.000,00		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta	605 Unit Usaha	605 Unit Usaha	230.016.000,00	157.888.000,00	8.420.000,00		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

			Desain dan Teknologi								
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**17.032.742.186,00**	**16.722.142.680,00**	**16.902.454.368,00**		**17.134.163.326,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**566.658.308,00**	**492.588.308,00**	**785.752.452,00**		**720.000.000,00**	
1,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pelaksanaan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**91.999.608,00**	**91.953.608,00**	**427.107.752,00**		**120.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar yang terlaporkan Persentase Pelaksanaan Pemantauan yang terlaporkan*	100 Persen	100 Persen	91.999.608,00	91.953.608,00	427.107.752,00		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	91.999.608,00	91.953.608,00	427.107.752,00		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Realisasi Ekspor**	**139.025.307,45 USD**	**139.025.307,45 USD**	**128.640.000,00**	**54.616.000,00**	**32.126.000,00**		**150.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang melakukan Ekspor*	12,90 Persen	12,90 Persen	128.640.000,00	54.616.000,00	32.126.000,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	135 Pelaku Usaha	135 Pelaku Usaha	128.640.000,00	54.616.000,00	32.126.000,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

											PERINDUSTRIAN
3,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)**	**11,87 Persentase**	**11,87 Persentase**	**51.193.200,00**	**51.193.200,00**	**51.193.200,00**		**150.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Jumlah UTTP yang sudah bertanda Tera/Tera Ulang*	8 Persen	8 Persen	51.193.200,00	51.193.200,00	51.193.200,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	16320 Unit	16320 Unit	51.193.200,00	51.193.200,00	51.193.200,00		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK**	**Persentase UMKM yang Difasilitasi Pemasarannya dari data UMKM**	**-**	**5,00 Persentase**	**294.825.500,00**	**294.825.500,00**	**275.325.500,00**		**300.000.000,00**	

		DALAM NEGERI	**yang Terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI**								
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase UMKM Kota Bogor yang produknya terfasilitasi promosi (Pameran, kemitraan)*	1,55 Persen	1,55 Persen	294.825.500,00	294.825.500,00	275.325.500,00		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	70 UMKM	70 UMKM	294.825.500,00	294.825.500,00	275.325.500,00		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**16.466.083.878,00**	**16.229.554.372,00**	**16.116.701.916,00**		**16.414.163.326,00**	
1,	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM**	**88,75 Nilai**	**88,75 Nilai**	**16.219.986.978,00**	**16.062.956.272,00**	**15.973.513.816,00**		**16.294.163.326,00**	

	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Kepatuhan Anggaran Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*	-	100 Persen 94,00 Persen	12.611.625.869,00	12.951.269.136,00	13.294.225.798,00		12.612.465.869,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	12.564.465.869,00	12.904.109.136,00	13.247.065.798,00		12.564.465.869,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	47.160.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00		48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	1.518.806.918,00	1.069.974.818,00	783.116.700,00		1.502.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	96.000.000,00	74.449.000,00		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

											PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	53.930.100,00	46.503.600,00		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	68.535.000,00	31.320.000,00	66.150.000,00		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	133.653.500,00	118.310.300,00	94.852.700,00		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN

											PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	47.816.418,00	47.816.418,00	13.946.400,00		48.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.064.802.000,00	698.598.000,00	463.215.000,00		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	100 Persen	1.295.408.316,00	1.295.408.316,00	1.295.408.316,00		1.359.697.457,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	370.290.764,00	370.290.764,00	370.290.764,00		411.535.065,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	925.117.552,00	925.117.552,00	925.117.552,00		948.162.392,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik*	90,00 Persen	90,00 Persen	794.145.875,00	746.304.002,00	600.763.002,00		820.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	462.393.775,00	422.126.302,00	422.126.302,00		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	217 Unit	217 Unit	161.032.100,00	153.457.700,00	93.677.700,00		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	170.720.000,00	170.720.000,00	84.959.000,00		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan IKM yang Produktif**	**8,7 Persentase**	**8,7 Persentase**	**246.096.900,00**	**166.598.100,00**	**143.188.100,00**		**120.000.000,00**	

	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Sumber Daya Manusia Industri yang memiliki sertifikasi kompetensi*	0,08 Persen	0,08 Persen	246.096.900,00	166.598.100,00	143.188.100,00		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	48.411.200,00	48.411.200,00		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	136.096.900,00	118.186.900,00	94.776.900,00		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H					**18.473.735.286,00**	**17.654.718.680,00**	**17.478.757.368,00**		**18.788.185.326,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 12 Program dengan 15 kegiatan 28 sub kegiatan.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor .

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Dinas tahun 2025-2026 . Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor .

Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada tahun 2025,

dokumen perubahan Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bogor umumnya untuk mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor pada khususnya.

Demikian Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Tahun 2025.

Lampiran m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Secara umum Renja Perubahan merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terukur dan terarah dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perubahan ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan

yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara opimal. Kualitas dokumen rencana kerja ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sendiri mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dilakukan dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai hasil pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Dalam penyusunan rencana kerja dibutuhkan sinergitas baik internal maupun eksternal antar instansi dalam upaya mendukung pemecahan permasalahan salah satu program prioritas Kota Bogor yang menjadi

komitmen bersama khususnya terkait dengan penyediaan prasarana transportasi, prasarana air minum dan air limbah dan terkait Penataan ruang dan bangunan Selain langkah koordinatif perlu juga dilakukan upaya mendorong partisipatif masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi sehingga terbentuk satu kesatuan pemikiran satu kesatuan pemahaman yang utuh dan terpadu dalam upaya menjawab berbagai dinamisasi persoalan yang berkembang di masyarakat sesuai dengan kewenangan dan urusan wajib yang harus dilaksanakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Rangkaian program telah disusun untuk mencapai maksud tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis memaparkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Kota Bogor secara umum. Sehingga untuk mendapat gambaran yang lebih detail dari proses pembangunan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi PERANGKAT DAERAH akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.

Penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi Perangkat Daerah, berdasarkan Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
9. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 tanggal 10 September 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor;
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 168 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor;
16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada Januari 2025 dan berakhir pada Desember 2025. Selain itu, Renja Perubahan juga menggambarkan keterkaitan sub kegiatan, kegiatan, program dengan sasaran dan tujuan yang ditransformasikan ke dalam Renja Perubahan PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Terakhir, Renja Perubahan adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2025 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan.
2. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi indikator sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 pada akhir tahun.
3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
4. Sebagai standar baku penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGS (Suistanable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru

yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- ✔ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- ✔ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- ✔ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai denggan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, dan realisasi Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/ atau realisasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Review hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1. Capaian Kinerja Sasaran dan Program DPUPR TA 2024

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN			% Capaian Kinerja	KEUANGAN		
		Uraian	Target	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Tujuan: Meningkatkan infrastruktur dan pengaturan pemukiman yang baik untuk menciptakan lingkungan sehat yang berkualitas								
1	Meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman	persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	78,25	72,33	92,43	-	-	-
2.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang aman	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	8,55	6,07	70,99	20.283.276.721	19.927.312.298	98,25
3.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	Persentase irigasi/ saluran/sungai yang berkondisi baik	74,82	70,19	93,81	46.826.033.196	46.124.257.356	98,50
	Sub Jumlah				85,74			65,58
Tujuan II. Meningkatnya layananan publik bidang infrastruktur yang efektif, efisien, dan akuntabel								
4.	Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR	Nilai PMRB Dinas PUPR	85	78,40	92.24	48.634.167.900	46.265.547.623	95,13
	Sub Jumlah				92.24			95,13
Tujuan III. Meningkatkan kualitas ruang dan infrastruktur kebinamargaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi								

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN			% Capaian Kinerja	KEUANGAN		
		Uraian	Target	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatnya pengendalian tata ruang kota	Persentase Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	100	63,61	63,61	10.580.007.448	10.024.429.591	94,75
Sub Jumlah					63,61			94,75
6.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap	90	90,05	100,05	107.178.985.006	103.037.478.716	96,14
Sub Jumlah					100,05			96,14
Rata-rata Persentase					85,41			87,90

Pagu Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 233.502.470.271,00 termasuk anggaran perubahan dengan 9 program dan 11 kegiatan serta 47 subkegiatan. Dari belanja tersebut terealisasi sebesar Rp. 225.379.025.584,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,52 %. Berdasarkan hal tersebut bahwa capaian kinerja seluruhnya 85,41 % atau dengan kategori tidak tercapai karena nilai X ≤ 100 %.

Realisasi setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table sebagaimana berikut ini:

Table 2. Anggaran dan Realisasi Belanja DPUPR Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.003.978.896	19.778.620.511	98,87
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	174.060.000	142.620.000	81,94
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.151.000	77.148.800	97.47
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	99.906.600	99.013.000	99.11
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.282.899.800	1.276.012.450	99.46
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	650.354.700	645.245.900	99.21
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.668.000	49.344.000	99.35
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.869.000	118.975.500	99.25
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.067.730.000	985.154.360	92.09
10	Pengadaan Alat Besar	14.993.882.700	14.130.147.000	94.24
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.493.488	510.372.701	69.30
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.977.718.544	3.662.402.500	92.07

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.732.000	351.436.456	87.26
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.090.405.172	3.586.255.571	87.67
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	697.818.000	649.098.874	93.02
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.500.000	203.700.000	99.12
17	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.794.423.715	1,775.782.995	98.96
18	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	17.339.792.236	17.269.387.021	99.59
19	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	15.556.434.845	15.487.099.050	99.55
20	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.428.582.400	1.403.560.000	98.25
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.706.800.000	10.188.428.290	95.16
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.274.670.000	2.220.908.986	97.64
23	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	803.922.500	792.182.025	98.54

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
24	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.437.929.000	1.339.448.148	93.15
25	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.226.680.000	1.188.354.245	96.88
26	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	14.540.075.221	14.386.418.894	98.94
27	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1,094.306.710	1.073.907.240	98.14
28	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.297.086.891	9.231.388.190	99.29
29	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	10.214.985.450	10.089.565.799	98.77
30	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.975.164.000	1.966.514.375	99.56
31	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	756.000.000	423.000.000	55.95
32	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	8.818.835.448	8.672.184.791	98.34
33	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	105.172.000	101.215.325	96.24

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
34	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.669.961.070	4.051.362.920	60.74
35	Pembangunan Jalan	2.619.885.750	2.428.808.330	92.71
36	Rekonstruksi Jalan	24.829.187.893	24.511.186.169	98.72
37	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.231.670.386	18.122.934.707	99.40
38	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000.000	24.725.985.786	98.90
39	Pembangunan Jembatan	2.020.168.500	1.771.686.418	87.70
40	Rehabilitasi Jembatan	3.165.573.806	3.067.727.755	96.91
41	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000	1,616.906.727	99.50
42	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dan Teknisi Atau Analis	200.000.000	170.210.300	85.11
43	Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	160.994.550	159.340.500	98.97
44	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	75.000.000	49.953.500	66.60
45	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	300,000,000	279.750.525	93.25
46	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300,000,000	269.619.000	89.87
47	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300,000,000	278.659.950	92.89
		233.502.470.271	**225.379.025.584**	**96.52**

Secara umum faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Dalam Pengelolaan Air Limbah adalah karena sebagai berikut:
   a. Belum maksimalnya pelayanan penyedotan lumpur tinja dan belum optimalnya unit pengolahan lumpur tinja dan IPAL.
   b. Keterbatasan armada dan SDM penyedotan lumpur tinja dan belum optimalnya IPLT/IPAL Kota Bogor.
2. Dalam Pembangunan Fisik Jalan, Jembatan dan Trotoar secara umum karena:
   a. Terdapat perkerasan jalan yang kurang optimal.
   b. Terjadi run off berlebih di permukaan jalan
   c. Kualitas pekerjaan konstruksi yang kurang optimal.
3. Dalam pengadaan tanah secara umum:
   a. Pengadaan tanah untuk Jalan R3 Lanjutan, terdapat kendala dalam pembebasan lahan bidang Ma'ruf dikarenakan tidak ditemukannya Berita Acara Konsinyasi bidang tanah Ma'ruf di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga perlu dilakukan appraisal ulang untuk mendapatkan nilai propertinya. Hal ini akan menyebabkan adanya kesenjangan nilai ganti kerugian antara hasil appraisal terbaru untuk bidang tanah Ma'ruf dengan nilai penggantian untuk empat bidang terkonsinyasi (data konsinyasi Tahun 2015) di sekeliling bidang Ma'ruf.
4. Dalam pengeloaan SDA secara umum:
   1. Kondisi alam/morfologi saluran dan sungai. Kondisi alam di kota bogor yang bervariatif menyebabkan seringnya terjadi longsor di tebing saluran/ sungai, terutama pada bagian meander saluran /sungai, sementara pada daerah yang relatif datar sering terjadi banjir akibat peningkatan debit saluran/sungai.
   2. Kondisi masyarakat. Perilaku masyarakat terutama kebiasaan membuang sampah ke saluran/ sungai sangat berpengaruh terhadap kondisi sarana dan prasarana Sumber Daya Air, selain itu perilaku berupa mempersempit saluran/sungai berdampak terhadap kelancaran aliran saluran/Sungai.
   3. Terdapat kerusakan tebingan sungai yang ada pada sungai bukan kewenangan Pemkot.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dapat dilihat pada penerapan SPM dan IKK bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

SPM Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperolah setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkup SPM Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

1. Pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Dengan Mutu Pelayanan Dasar meliputi aspek:
   a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa.
   b. Standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
   c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2. Pelayanan penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik. Dengan Mutu Pelayanan dasar meliputi:
   a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa.
   b. Standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
   c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor juga dapat dilihat pada penerapan IKK bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator Kinerja kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 adalah, sebagai berikut:

Table 3. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor TA. 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	PEKERJAAN UMUM											
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		✔	89,25	89,50	88,5	90	84,20	88,23	88,95	90,05	Tercapai
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		✔	0,0634	0,0625	0,825	0,875	0,1203	0,817	0,197	0,1942	Tidak Tercapai
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)		✔	89,25	89,50	88,5	90,00	84,20	88,23	88,95	90,05	Tercapai
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)		✔	67,50	68,00	520.877	523.377	507,38	518.377	96.121	96.321	Tidak Tercapai
5	Persentase rumah tinggal yang dilayani system air limbah yang aman	✔		70,42	7,20	7,88	8,55	75,12	5,43	5,49	6,07	Tidak Tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		✔	32,6	43,40	54,20	65,00	25,11	25,86	20,15	67,86	Tercapai
7	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		✔	77,5	80	82,5	85	0,509	60,71	0,88	0,82	Tidak Tercapai
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPT nya		✔	985	1,105	1225	1345	921	985	1195	1295	Tidak Tercapai
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik		✔	60	52,23	53,01	53,79	51,58	52,62	53,66	54,65	Tercapai
10	rasio jaringan irigasi (Panjang saluran irigasi/ Luas lahan budidaya pertanian)		✔	0,3374	0,3445	0,3515	0,3574	0,415	0,3450	0,3600	0,3720	Tercapai
11	persentase saluran/sungai yang berkondisi baik		✔	92,06	92,54	96,77	97,62	91,71	94,81	82,46	85,73	Tidak Tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
12	persentase penduduk berakses air minum	✔		94,86	99,20	99,60	100	83,83	68,68	91,90	84,10	Tidak Tercapai
13	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	✔		94,86	99,20	99,60	100	83,83	68,68	91,90	84,10	Tidak Tercapai
	PENATAAN RUANG											
14	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		✔	39	0,0055	0,0067	0,0073	4,20	0,323	0,0035	0,0055	Tidak Tercapai
15	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		✔	84	86	88	90	90	95,18	86,90	88,59	Tidak Tercapai

2.3 Hasil Kesepakatan Target dan Indikator Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025-2026.

Hasil penyesuaian dan penyepakatan beberapa Target Indikator Kinerja Makro, IKK, IKK dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Kesepakatan Target dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RPD tahun 2025-2026 diuraikan pada tabel di bawah ini.

A. Indikator Kinerja Utama

Table 4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Utama
				2025	2026		
1	Persentase realisasi capaian kinerja penataan ruang	%	48	60	65	65	DPUPR

B. Indikator Kinerja Kunci

Table 5 .Indikator Kinerja Kunci

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2025	2026		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,95	89,00	89,20	89,20	PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,197	0,198	0,199	0,199	PUPR
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,95	89,00	89,20	89,20	PUPR
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	96.121	97.221	98.321	98.321	PUPR
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	5,49	6,10	6,60	6,60	PUPR
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	62	75	80	80	PUPR
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	0,89	0,80	0,75	0,75	PUPR
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	191	293	443	443	PUPR
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	53,66	62,21	66,49	66,49	PUPR
10	Rasio jaringan irigasi	Point	0,36	0,39	0,405	0,405	PUPR
11	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	82,46	87,97	93,64	93,64	PUPR
12	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,91	93,68	100	100	PUPR

13	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	91,90	93,68	100	100	PUPR
14	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	0,0038	0,0065	0,01	0,01	PUPR
15	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persen	99,71	99,80	99,85	99,85	PUPR

C. Target Tujuan, Sasaran dan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Table 6. Target Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
Tujuan: Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minun, air limbah dan sumberdaya air yang berkualitas			Capaian Rumah Tangga yang terlayani akses air minum yang aman	%	Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan pengelolaan air minum dengan jaringan perpipaan	Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses perpipaan yang dilayani oleh Perumda Tirta Pakua dibagi seluruh jumlah tangga	76,57	78,37	84,69	84,69	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
					yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	di Kota Bogor x 100%					
			Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang aman	%	Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai SNI (kedap dan disedot untuk diolah di IPLT)	Jumlah Rumah Tangga (SR) yang air limbahnya di olah di IPAL dan IPLT: dibagi Jumlah Rumah Tangga di wilayah Pengembangan SPALDS dan SPALDT X 100%	5,49	6,10	6.60	6.60	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			capaian infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baikk	%	Kondisi infrastruktur pengelolaan sumber daya air baik sungai, saluran, dan irigasi yang berkondisi baik (yang sudah diperbaiki/ ditingkatkan tebingan sungainya)	Jumlah rata2 persentase saluran/sungai yang berkondisi baik dengan persentase irigasi yang berkondisi baik dibagi dua	68,06	75,09	80,07	80,07	Dinas PUPR
	Sasaran: Optimalisasi pemenuhan akses air		capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani	%	Kondisi rumah tangga yang dilayani akses pengelolaan	Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses perpipaan baik Perumda Tirta	91,91	93,68	100	100	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
	minum dan air limbah		air minum layak		air minum baik yang dengan perpipaan maupun yang bukan perpipaan	Pakuan maupun non Perumda Tirta Pakuan dibagi jumlah tangga di Kota Bogor					
			Capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak	%	Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah rumah (SR) yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik dibagi Jumlah rumah (SR) di wilayah pengembangan SPALD-Sesuai dengan kepadatan penduduk pada wil. terbangun <25	73,46	74,99	79,12	79,12	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						jiwa/ H X 100%					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	%	Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan penyediaan air minum yang sudah di uji lab sehingga aman untuk di konsumsi	Jumah Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan layanan air minum yang telah dilakukan uji lab dibagi Jumlah Rumah Tangga (SR) layanan air minum di wilayah pengembangan penyediaan air minum	76,57	78,37	84,69	84,69	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	%	Kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan penyediaan air minum baik Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan	Jumah Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan layanan air minum yang layak baik Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan dibagi Jumlah Rumah Tangga (SR) yang berada di wilayah pengembangan	91,91	93,68	100	100	Dinas PUPR
		Program . Pengelolaan dan Pengemb	cakupan layanan rumah tangga	%	Suatu kondisi rumah tangga yang	Jumlah rumah (SR) yang memiliki akses pengolahan	73,46	74,99	79,12	79,12	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
		angan Sistem Air Limbah	yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak		mendapat pelayanan pengelolaan air limbah domestik	berupa cubluk atau tangki septik dibagi Jumlah rumah (SR) di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wil. terbangun <25 jiwa/H X 100%					
			Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah	%	Suatu kondisi rumah tangga yang mendapat pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai	Jumlah Rumah Tangga (SR) yang air limbahnya di olah di IPAL dan IPLT :dibagi Jumlah Rumah	5,49	6,10	6.60	6.60	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			Domestik (SPALD) yang aman		SNI (kedap dan disedot untuk diolah di IPLT)	Tangga di wilayah Pengembangan SPALDS dan SPALDT X 100%					
	Sasaran : Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi		Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian	Angka	Rasio Jaringan Irigasi ini meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian	Panjang saluran irigasi dibagi Luas lahan budidaya pertanian	0,36	0,39	0,405	0,405	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	Kondisi irigasi yang sudah diperbaiki/ ditingkatkan	Panjang irigasi yang berkondisi baik (diperbaiki kondisi tebingan irigasi) dibagi panjang irigasi di seluruh Kota Bogor (269 km)	53,66	62,21	66,49	66,49	Dinas PUPR
	Sasaran: Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air		Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	%	Kondisi infrastruktur pengelolaan sumber daya air baik sungai dan saluran yang berkondisi baik (yang sudah	Jumlah rata2 persentase saluran/sungai yang berkondisi baik dengan persentase irigasi yang berkondisi baik dibagi dua	68,06	75,09	80,07	80,07	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
					diperbaiki/ ditingkatkan tebingan sungainya)						
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	Panjang sungai yang sudah ditingkatkan tebingannya dan dipelihara	Panjang saluran dan sungai iyang berkondisi baik dibagi jumlah panjang sungai dan saluran seluruh Kota Bogor (118 km)dikali 100%	82,46	87,97	93,64	93,64	Dinas PUPR
			Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani	%	Jumlah lokasi raawan banjir yang ditanganii	jumlah lokasi penanganan dibagi jumlah lokasi genangan sesuai masterplan	2,38	3,57	4,76	4,76	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						drainase 2018 (ada 84 lokasi)					
Tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal			Presentase indikasi program perwujudan struktur ruang pada RTRW/RDTR	%	realisasi capaian kinerja penataan ruang / Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	jumlah program penataan struktur ruang yang terealisasi dibagi jumlah program penataan struktur ruang dalam RTRW/RDTR	60	65	75	75	Dinas PUPR
	Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfa		Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi	%	indikasi program perwujudan struktur ruang pada RTRW/RDT	Jumlah aktivitas pada RKPD yang sesuai dengan dengan indikasi program pada	60	65	75	75	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
	atan dan pengendalian tata ruang wilayah		program pada rencana struktur ruang pada RDTRR		R yang terealisasi	rencana struktur ruang pada RDTR dibagi jumlah aktivitas pada RKPD dikali 100) Permen ATR No 13/2021					
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dibagi jumlah Keseluruhan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai Indikasi Program	60	65	75	75	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						Rencana Tata Ruang					
	Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	Rasio jumlah bangunan ber IMB di Kota Bogor	Jumlah bangunan ber – IMB dibagi Jumlah bangunan di Kota Bogor (Data Jumlah PBB rumah tinggal +data bangunan gedung negara= 240066)	0,0038	0,0065	0,01	0,01	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	%	Persentase bangunan dan gedung milik negara/ kewenangan Kota yang	Jumlah gedung negara dalam kondisi baik dibagi jumlah bangunan gedung negara	n/A	30	50	50	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
					berkondisi baik (sudah berijin dan kondisinya baik)	kewenangan Kota dikali 100 %					
	sasaran: Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan		Persentase ketersediaan dokumen RTBL	%	Banyaknya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun	Jumlah dokumen RTBL yang disusun dibagi jumlah dokumen RTBL yang harus disusun sesuai Peraturan	n/A	50	100	100	Dinas PUPR
			Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL	%	Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan dokumen Rencana	Jumlah realisasi penataan bangunan dan lingkungan yang disusun dibagi jumlah penataan bangunan dan	n/A	25	50	50	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
					Tata bangunan dan Lingkungannya	lingkungan yang harus direalisasikan sesuai RTBL					
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	%	Banyaknya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun seuai yang ada dalam RTR	Jumlah dokumen RTBL yang disusun dibagi jumlah dokumen RTBL yang harus disusun sesuai RTR (RTRWK/RDTRK) dikali 100	n/A	50	100	100	Dinas PUPR
Tujuan : Terwujudnya pemerataan kebutuhan infrastruktur kebinamargaan yang			Persentase pengelolaan infrastruktur kebinamargaan yang	%	Jalan arteri/ kolektor/ lokal yang dilengkapi dengan trotoar dan	Panjang jalan yang memiliki bangunan pelengkap jalan kewenangan kota yang	45,99	46,5	47,0	47,0	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
mendukung pengembangan potensi ekonomi lokall			berkondisi baik		drainase dalam kondisi baik	berkondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan keseluruhan kewenangan kota					
	sasaran: Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan		Persentase Jalan berkondisi mantap		Jalan arteri/ kolektor/ lokal yang berkondisi baik dan sedang	panjang jalan yang berkondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan kewenangan Kota X 100 %%	88,95	89,0	89,20	89,20	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	panjang jalan yang berkondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan kewenangan Kota X 100 %	88,95	89,0	89,20	89,20	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
	sasaran: Meningkatnya kualitas drainase		Persentase drainase yang berkondisi baik	%	Panjang drainase pada jalan arteri, kolektor, lokal yang memiliki drainase yang berkondisi baik	Panjang drainase yang berkondisi baik dibagi panjang seluruh drainase Kota Bogor	62	75	80	80	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	%	Panjang drainase pada jalan arteri, kolektor, lokal yang memiliki drainase yang berkondisi baik	panjang jalan arteri/kolektor/lokal yang memiliki drainase dibagi total panjang jalan arteri/kolektor/lokal x 100	62	75	80	80	Dinas PUPR
			persentase penurunan	%	Luas genangan	(panjang jalan arteri/kolektor	0,89	0,80	0,75	0,75	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			lokasi genangan		yang ditangani	/lokal yang memiliki drainase dibagi total panjang jalan arteri/kolektor /lokal x 100)					
	Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas		Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik	%	penyedia jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib manfaat	jumlah tenaga konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang sudah bersertifikat dibagi seluruh jumlah tenaga kerja konstruksi di Kota Bogor	8,20	14,22	22,22	22,22	Dinas PUPR
		Program Pengembangan	Persentase Penyedia Jasa	%	penyedia jasa konstruksi	jumlah tenaga konstruksi Kualifikasi	8,20	14,22	22,22	22,22	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
		Jasa Konstruksi	Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik		yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib manfaat	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang sudah bersertifikat dibagi seluruh jumlah tenaga kerja konstruksi di Kota Bogor					
Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas			Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	poin	Nilai yang diberikan Inspektorat atas laporan capaian kinerja Dinas	Hasil penilaian SAKIP DInas	A	A	A	A	Dinas PUPR
			Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	NIlai atas hasil survey kepuasan Masyarakat	NIlai atas hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap	3,16	3,55	3,57	3,57	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						pelayanan Dinas					
	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil Penilaian SAKP Dinas dari Inspe	Hasil Penilaian SAKP Dinas dari Inspektorat	84,13	84,5	85,10	85,10	Dinas PUPR
			Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	*1. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan PPAS 2, Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD*	90	95	95	95	Dinas PUPR
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	Jumlah temuan BPK/Itda yang sudah selesai ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Itda yang sudah selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan BPK/Itda dikali 100	100	91	92	92	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	angka	Jumlah Inovasi Dinas yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	Jumlah Inovasi Dinas yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 70)	1	1	1	3	Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	angka	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Dinas	28,65	28,85	29,95	29,95	Dinas PUPR
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di	angka	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di	Hasil penilaian SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Dinas	25,13	26,55	26,82	26,82	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			lingkup Perangkat Daerah		lingkup Perangkat Daerah						
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	angka	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Dinas	11,6	12,48	13	13	Dinas PUPR
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	angka	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Aspek Evaluasi Internal Dinas	18,75	21,97	21,98	21,98	Dinas PUPR
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan	%	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan	Jumlah Rencana Tindak Pencegahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah	100	100	100	100	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			perangkat daerah		perangkat daerah	seluruh Rencana Tindak Pencegahan dikali 100					
			Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	%	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	Banyaknya laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan banyak laporan keuangan yang harus dilaporkan tepat waktu dikali 100	75	100	100	100	Dinas PUPR
			Persentase pengelolaan BMD	%	Persentase pengelolaan BMD	Banyaknya laporan BMD yang disusun sesuai peraturan	94	94	94	94	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						perundang-undangan dibagi dengan seluruh laporan BMD yang harus disusun sesuai peraturan perundang-undangan dikali 100					
			Persentase Kepatuhan Anggaran	%	Persentase Kepatuhan Anggaran	Jumlah pekerjaan yang jadwal pencairannya sesuai dengan anggaran kas dibagi seluruh pencairan yang sesuai anggaran kas dikali 100	94	100	100	100	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Jumlah realisasi keuangan dibagi seluruh pagu dinas dikali 100	100	100	100	100	Dinas PUPR
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	90,6	100	100	100	Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	%	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	Banyaknya laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dengan seluruh laporan keuangan	100	100	100	100	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
						yang harus disusun sesuai peraturan perundang-undangan dikali 100					
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	Penyampaian laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu	Banyaknya laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan banyak laporan keuangan yang harus dilaporkan tepat waktu dikali 100	75	100	100	100	Dinas PUPR
			Persentase Pengelolaan BMD	%	Laporan BMD yang disusun	Banyaknya laporan BMD yang disusun	90	94	94	94	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD		sesuai peraturan perundang undangann	sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dengan seluruh laporan BMD yang harus disusun sesuai peraturan perundang-undangan					
	Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Dinas	Hasil perhitungan pada aplikasi atas Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Dinas	78,97	88,75	89,25	89,25	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
	lingkup Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap sarana prasarana	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap sarana prasarana	80,39	87,11	87,87	87,87	Dinas PUPR
			Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas SDM	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas SDM	80,19	88,75	89,25	89,25	Dinas PUPR
			Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif,	74,92	88,38	89,39	89,39	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	DEFINISI	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2025	2026	Target	
			standar layanan		standar layanan	dan standar layanan					
			Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penangan Pengaduan	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penangan Pengaduan	79,44	88,38	89,39	89,39	Dinas PUPR

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu Strategis adalah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Pemerintah Kota Bogor telah menentukan Isu Strategis dan Permasalahan Tahun 2025 dalam 4 kelompok isu, yaitu:

a. Pembangunan Manusia

- ✔ Angka stunting dan ODF masih tinggi
- ✔ Penyebaran AIDS, HIV dan Tuberkolosis masih tinggi
- ✔ Persebaran sekolah negeri masih belum merata
- ✔ Fasilitas Kesehatan masih kurang baik Kualitas maupun kuantitas
- ✔ Aksesibilitas disabilitas dalam mengakses Pelayanan dasar masih rendah
- ✔ Perlindungan anak dan pemberdayaan lansia belum optimal

b. Infrastruktur Berkelanjutan

- ✔ Infrastruktur transportasi berkualitas belum merata
- ✔ Angkutan kotadi pusat kotamasih belum terkonversi
- ✔ Masih belum terselesaikannya Pembangunan jalan tembus dan alternatif
- ✔ Pengelolaan persampahan berbasis Masyarakat masih belum optimal

c. Percepatan Pemulihan Ekonomi

- ✔ Kesempatan Masyarakat miskin untuk berdaya dari sisi ekonomi masih rendah
- ✔ UMKM masih kurang berdaya saing
- ✔ Kualitas jejaring peningkatan kompetensi perlu ditingkatkan

d. Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Inovasi

- ✔ Inovasi dan integrasi pelayan publik belum optimal
- ✔ Sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat kelurahan belum memadai
- ✔ Sumber daya ASN masih belum optimal
- ✔ Kualitas integrasi satu data Pembangunan yang masih rendah

Isu strategis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada di Kota Bogor untuk tahun 2025 sebagian isu masih meneruskan Isu pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum:

1. Kapasitas dan Kualitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya belum memadai.

   Penyebab belum memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya, antara lain:

   a. Tertib Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Sempadan Badan Air.

      Saat ini tertib pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan badan air menjadi permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan urusan jalan dan sumber daya air, meskipun telah ada beberapa regulasi/ aturan yang mengatur namun faktanya masih banyak terjadi dan hampir sulit dikendalikan. Betuk ketidak tertiban pemanfaatan ini sangat banyak antara lain: penempatan utilitas pada ruang milik jalan, galian dan timbunan utilitas, penutupan saluran drainase jalan, pembuangan sampah di saluran drainase jalan, alih fungsi penghilangan prasarana pedestrian, penghilangan jalur hijau, pendirian bangunan yang tidak sesuai ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), penggunaan prasarana pedestrian menjadi area parkir, pendirian bangunan (legal & illegal) pada ruang sempadan badan air, pemanfaatan badan air sebagai tempat pembuangan limbah dan lain-lain. Hal tersebut tentu harus dibenahi agar infrastruktur tersebut dapat berfungsi dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

   b. Pengadaan Lahan

      Baik dalam penyelenggaraan sub-urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya dalam program pembangunan dan peningkatannya selalu membutuhkan lahan. Dalam pembiayaannya umumnya membutuhkan pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks ditambah dengan kondisi

kawasan di Kota Bogor yang umumnya sudah terbangun dan cukup padat. Hal ini menjadi permasalahan yang menuntut perhatian khusus dalam penyelenggaraannya.

c. Cuaca Extreme/ Perubahan Iklim.

Dampak dari cuaca extreme dan perubahan iklim terhadap infrastruktur Pekerjaan Umum sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat bahkan juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan konstruksi dan penanganan.

Hingga tahun 2023 masih terdapat lokasi rawan banjir yang belum terselesaikan dan munculnya area-area rawan genangan yang umumnya terjadi diruas-ruas jalan.

d. Konektivitas infrastruktur jalan dan sarana prasarana penunjangnya belum terstruktur secara baik.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:

i. Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Perhubungan

Urusan pekerjaan umum bidang ke-Bina Margaan yang sangat pokok adalah memfasilitasi penyediaan infrastruktur/ prasarana jalan jembatan untuk urusan perhubungan, namun dinamika dalam pelaksanaan urusan perhubungan yang sangat dinamis terkadang menyebabkan tidak sinkronnya urusan pekerjaan umum ke-Bina Margaan dengan urusan perhubungan dan masih belum optimal sinergitasnya dalam pembangunan pengembangan sistim transportasi.

ii. Peningkatan Beban Lintas

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal indeks daya beli masyarakat menyebabkan pertumbuhan lalu lintas semakin meningkat signifikan, bukan hanya kendaraan penumpang tetapi juga kendaraan barang dan

berat muatan. Hal tersebut menyebabkan umur penyusutan jalan semakin cepat dan daya dukung konstruksi jalan jembatan saat ini umumnya tidak mampu berperan sesuai umur ekonomis dan daya dukung muatan sumbu terberat (MST) nya.

Permasalahan urusan Penataan Ruang:

1. Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi.
2. Pembenahan terhadap konsistensi perencanaan dan pemanfaatan ruang meliputi aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning regulation belum sepenuhnya dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang. Untuk itu perlu segera disahkannya dokumen RDTRK.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Table 7. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kota Bogor

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
PEMBANGUNAN MANUSIA						
A	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman**	**%**	**78,37**	**-**	**778.917.000**
		cakupan layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	**%**	**93,68**		
I	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*persentase layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman*	*%*	*78,37*	-	*778.917.000*
		persentase layanan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak	*%*	*93,68*		
	Sub Kegiatan:					
1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	4500	-	579.300.000
2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	5	-	199.617.700
B	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN**	**cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak**	**%**	**73,46**	**10.785.448.686**	**20.436.000.486**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman**	**%**	**6,10**		
II	*Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*persentase layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak*	*%*	*73,46*	*10.785.448.686*	*20.436.000.486*
		Persentase layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	*%*	*6,10*		
	Sub Kegiatan:					
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	rumah tangga	1000	721.694.200	721.694.200
4	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	unit	10	1.769.440.000	1.769.440.000
5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1300	1.600.000.000	1,600,000,000
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1.299.998.486	1.278.712.286
7	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1397	5.394.316.000	15.066.154.000

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
C	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Irigasi yang berkondisi baik**	**%**	**62,21**	**24.094.782.452**	**28.094.782.452**
		Persentase Sungai yang berkondisi baik	**%**	**87,97**		
		Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani	**%**	**3,57**		
III	*Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun*	*dokumen*	*20*	*14.387.982.452*	*18.387.982.452*
		Panjang Sungai yang berkondisi baik	*Km*	*103.800*		
		Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	*lokasi*	*1*		
	Sub Kegiatan:					
8	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1	1.365.000.000	1.365.000.000
9	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM	2	7.008.946.052	7.008.946.052
10	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	838,325	5.142.195.000	9.142.195.000
11	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	20	871.841.400	871.841.400
IV	*Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang*	*Panjang Irigasi yang berkondisi baik*	*km*	*33*	*9.706.800.0000*	*9.706.800.0000*

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan:					
12	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	33	9.706.800.000	9.706.800.000
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
D	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang**	**%**	**65**	**782.865.000**	**882.865.000**
V	*Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	*Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang*	*%*	*100*	*584.179.000*	*584.179.000*
	Sub Kegiatan:					
13	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	3	99.323.000	99.323.000
14	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	3	385.533.000	385.533.000
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	100	99.323.000	99.323.000

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	pedoman Bidang Penataan ruang					
VI	*Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*%*	*100*	*99.323.000*	*99.323.000*
	Sub Kegiatan:					
16	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	99.323.000	199.323.000
VII	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase plaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*%*	*100*	*99.323.000*	*99.323.000*
	Sub Kegiatan:					
17	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	99.323.000	99.323.000
E	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung**	**%**	**30**	**4.547.555.300**	**4.647.555.300**
VIII	*Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan*	*Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin*	*%*	*90*	***4.547.555.300***	***4.647.555.300***
		Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB	*%*	*99,8*		
		Presentase permohonan laik fungsi yang telah selesai	*%*	*33*		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
	Sub Kegiatan:					
18	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	3.791.555.300	3.891.555.300
19	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	27	756.000.000	756.000.000
F	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**%**	**89,0**	**63.792.302.752**	**115.196.043.952**
iX		*Persentase panjang jalan yang terbangun*	*%*	*50,0*	*63.792.302.752*	*115.196.043.952*

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase panjang jalan yang ditingkatkan*	*%*	*56,35*		
		Persentase pemenuhan ketersediaan trotoar/pedestrian pada jalan arteri/kolektor	*%*	*12,07*		
		Persentase jembatan yang ditingkatkan	*%*	*26,29*		
		Persentase jembatan yang terbangun	*%*	*75,0*		
	Sub Kegiatan:					
20	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	20	7.211.503.493	33.525.255.693
21	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	1,5	12.011.716.723	12.011.716.723
22	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	11	13.600.844.000	24.977.838.000
23	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	7	2.069.552.536	15.732.291.536
24	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan		1.625.000.000	1.675.256.000
25	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	3	576.888.000	576.888.000
26	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	4	1.696.798.000	1.696.798.000
27	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	%	90	25.000.000.000	25.000.000.000

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
G	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal**	**%**	**75**	**12.211.214.800**	**18.459.688.800**
		persentase penurunan lokasi genangan	**%**	**0,8**		
X	*Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal yang berkondisi baik*	*Km*	*75*	*12.211.214.800*	*18.459.688.800*
	Sub Kegiatan:					
28	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	12	6.835.153.400	10.441.557.400
29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	10	3.817.478.700	5.509.804.700
30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	20	521.621.600	521.621.600
31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	8	1.036.961.100	1.986.705.100
H	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik**	**%**	**14,22**	**167.992.500**	**167,992,500**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
XI	*Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	*Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi*	*%*	*14,22*	*167.992.500*	*167,992,500*
	Sub Kegiatan:					
32	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	100	167.992.500	167.992.500
REFORMASI BIROKRASI						
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Dinas**	**Angka**	**28,85**	**35.669.931.681**	**34.354.475.991**
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Dinas	**Angka**	**26,55**		
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Dinas	**Angka**	**12,48**		
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Dinas	**Angka**	**21,97**		
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**%**	**100**		
		Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	**%**	**100**		
		Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**%**	**94**		
		Persentase kepatuhan Anggaran	**%**	**100**		

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
		Persentase realisasi Anggaran terhadap DPA	**%**	**95**		
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**Angka**	**94**		
		Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	**Angka**	**87,11**		
		Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	**Angka**	**88,75**		
		Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	**Angka**	**88,38**		
		Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	**Angka**	**88,38**		
XII	*Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi*	*%*	*100*	*19.404.411.311*	*19.533.997.569*
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	*%*	*100*		
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD	*%*	*100*		
	Sub Kegiatan:					
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	110	19.404.411.311	19.533.997.569

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
XIII	*Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah*	*%*	*100*	*39.491.000*	*39.491.000*
	Sub Kegiatan:					
34	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	39.491.000	39.491.000
XIV	*Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah*	*%*	*100*	*2.310.176.580*	*1.551.498.000*
	Sub Kegiatan:					
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	49.876.200	22.497.800
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.444.215.400	1.051.779.000
37	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	113.036.700	46.180.400
38	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.978.000	16.694.400
39	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	95.442.500	67.796.400
40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	579.627.780	346.550.000
XV	*Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah*	*Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah*	*%*	*100*	*2.413.844.500*	*2.413.844.500*

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan:					
41	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang disediakan	Paket	2	2.413.844.500	2.413.844.500
XVI	*Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*%*	*100*	*5.619.908.288*	*5.619.908.288*
	Sub Kegiatan:					
42	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	786.439.968	786.439.968
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.833.468.320	4.833.468.320
XVII	*Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan*	*%*	*100*	*5.882.100.002*	*5.195.736.634*
	Sub Kegiatan:					
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	318.479.767	318.479.767
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	4.060.345.172	4.060.345.172

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PAGU BIAYA	
					ANGGARAN MURNI 2025	RENJA Perubahan 2025
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.221.531.553	657.282.325
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	281.743.510,00	159.629.370,00
				J U M L A H	**152.052.093.171**	**223.119.992.254**

Berdasarkan tabel di atas terlihat ada perbedaan Pagu Anggaran Murni TA. 2025 dengan Pagu Anggaran Perubahan TA. 2025. Pada Pagu Anggaran Murni TA. 2025 terdapat 10 (sepuluh) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan. Sedangkan pada Rencana Kerja TA. 2025 terdapat 8 (delapan) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Perbedaan ini disebabkan karena:

a. Mulai berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

b. Serta sudah berlakunya Susunan SOTK Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;

c. Adanya efisiensi anggaran sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak terlepas dari perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta memperhatikan kondisi di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan memadukan pendekatan demokratif, partisipatif dan politis seperti melalui musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kota dan propinsi, hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masukan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun menjadi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan usulan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/

Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamata pelaksanaan Musrenbang Kota. Kemudian disusun berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi serta target capaian kinerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan formulasi persoalan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah agar output yang dihasilkan dapat secara sistematis menjawab permasalahan utama atau permasalahan pokok yang telah diformulasikan sebelumnya agar bisa dipecahkan secara bertahap.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri atas beberapa Sub Kegiatan, yaitu:

a. Hasil Musrenbang, sebesar Rp. 6.925.000.000,00 sebanyak 43 paket pekerjaan yang tersebar pada sub kegiatan sebagai berikut:
   1. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, 30 pekerjaan
   2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, 7 paket pekerjaan
   3. Pemeliharaan Berkala Jalan, 1 paket pekerjaan
   4. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, 4 paket pekerjaan
   5. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, 1 paket pekerjaan.
b. Pokok pokok Pikiran (Pokir), sebesar Rp. 6.265.000.000,00 sebanyak 40 paket pekerjaan yang tersebar pada sub kegiatan sebagai berikut:
   1. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, 31 paket pekerjaan
   2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, 1 paket pekerjaan
   3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, 2 paket pekerjaan
   4. Pemeliharaan Berkala Jalan, 6 paket pekerjaan

Usulan program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan tahun 2025 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 8. Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

NAMA PENGUSUL	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	PAGU BIAYA	NAMA SUB KEGIATAN
Rw 02 Tanah sareal	AHMAD YANI I	60	m3	175,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Ketua Rt.02 Rw.02	Jl. Palupuh I, 2, 6, 5,, RT.02/RW.02, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	20.88	m3	100,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Indra Setia Dewi	Jalan Rimba Mulya II no 25	43.2	m3	175,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
RW 05 Nanang	Babakan Lebak	1125	m3	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
ERI SUWANDI RT01	Gg. ELIF	2000	m3	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Arif Rahman	JL.PAKUAN	200	m3	175,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Boy Andarias Wahyudin	Cijahe	120	m3	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Husin Rusdi	Jalan jabaru 3 pasir kuda	400	m3	200,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Iwan setiawan	CILENDEK TIMUR RAYA	128	m3	200,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
AHMAD	Kp. Rawajati	600	m3	200,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

NAMA PENGUSUL	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	PAGU BIAYA	NAMA SUB KEGIATAN
Hery Sujatmoko RW. 19	Jl Medika	20	m3	200,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Kelurahan	CILENDEK TIMUR RAYA	600	m2	150,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan
Dadang hidayat	Gardu Tugu	22	m	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Warintoko	Vila Bogor Indah Blok AA8 No.1	210	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Robi Sugara	Cikaret Timur	30000	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
RW 11	Babakan Lio RT 005 RW 011	18	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Anwar Suhendar	Jl. Kampung Salabenda Got RT 01 RW 08 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Indonesia	312.5	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
R. TEDY SETYA M	Perumahan Ciparigi Indah	7200	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
BONANG WARIGESANG	bogor raya permai blok fa 6 no 12b	270	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
RW 07	Kp Sawah	120	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
jamaludin	Pabuaran Pesantren Gg H Sholeh	600	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
RW. 004 PASIRJAYA	Cibalagung RW. 004 Kelurahan Pasirjaya	2000	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Rw. 008	Sumurwangi	40	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
ROMLI A. RACHMAN	Perumahan Muara Asri RT.02/RW.12, Pasirkuda,	120	m2	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NAMA PENGUSUL	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	PAGU BIAYA	NAMA SUB KEGIATAN
	Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia				
NURODIN RT.4 RW.5	JL. PEMBANGUNAN RT.04 RW.05 KEL. KEDUNGHALANG KEC. BOGOR UTARA	60	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Mad Badri	Kp.Sawah	150	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Rohmat, SE	Kp. Setuasem	750	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
KETUA RW 04	KP NEGLASARI	18000	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
RW 02	KP. sindangsari	150	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
KETUA RW	Semplak Gg mulya	139.2	m3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
YOYOH	JL BHAYANGKARA RT006/RW003	600	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Jaenudin	Kp.blok paku	400	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ketua RW.15	JL.Bhisma 2 ujung	75	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Darmawan	Jalan Manunggal 2	540	m3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Nanang Mulyana	Kp.Lebaksari	200	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
TAVIP HARJANTO	PERUMAHAN TAMAN TIRTA CIMANGGU	125000	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
RW 02 Ciluar	Babakan	350	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NAMA PENGUSUL	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	PAGU BIAYA	NAMA SUB KEGIATAN
YAYAN SOPIAN.SH	JL. MUSHOLA	9000	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Jusmarwan	Jl. Babakan sukamantri, RT04/RW 07 KEL, RT.01/RW.08, Pasirkuda, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	500	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
KETUA RW 05	KAUM SARI	300	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Agung kurniawan	cipaku skip	6400	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Jafarullah	Kedung Halang Sentral	437.5	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
acep suryadi	DESA SINDANGRASA	15	paket	200,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
J U M L A H				**6.925.000.000**	

Table 9. Usulan Program dan Kegiatan POKIR Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Perumahan Cimahpar residence RT 04 RW 15, Kel. Cimahpar, kec. Bogor Utara, kota Bogor, Jawa barat, Kota Bogor	1	PAKET	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	BTN Tanah Baru Rt.04/rw.08 kel.tanah baru, Kota Bogor	100	m3	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Hj. R. Laniasari, S.A.P	kebon pedes rt 05 rw 11 tanah sareal, Kota Bogor	125	m2	200,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Jl. Manunggal Jaya, Kota Bogor	2750	m2	200,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan
H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Vila Bogor Indah 3 RW15 Kedunghalang, Kota Bogor	1200	m2	200,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	villa bogor indah 3 blok be1 RT 001/ RW 015 kedung halang Usulan Dewan PKS, H. Atang Trisnanto, Kota Bogor	1200	M2	-	Pemeliharaan Berkala Jalan
M. Rusli Prihatevy, SE	KP PATAS RT 01,02,03,04 / RW 08, Kota Bogor	1100	M2	200,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan
H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	KOMPLEK MINA BHAKTI RT 004 RW 003 KELURAHAN CIKARET KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1200	M2	200,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan
Sopian, SE	Villa Bogor Indah 3 Rt 6/15 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	700	m2	200,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan
Endah Purwanti, S.Pi	RT04 RW08 Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor	80	meter kubik	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
Endah Purwanti, S.Pi	RT03 RW03 Kelurahahn Cibuluh, Kota Bogor	80	meter kubik	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ahmad Aswandi, S.H	RT.05 RW.10 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	100	meter	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Taman Tirta Cimanggu RT 03/ RW 13 Kel. Mekarwangi, Ke, Kota Bogor	200	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	belakang komplek BBIA rt 4 rw 2 kelurahan Cikaret kecamatan Bogor Selatan., Kota Bogor	35	m3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Jl. Cimanggu Bharata Rt.01 Rw.04 no.2 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal (Belakang SDITA ELMAMUR), Kota Bogor	225	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
Ade Askiah, S.H	RT 6 RW 4 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	32.4	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Achmad Rifki Alaydrus, SH	RW 4 PASIRJAYA, Kota Bogor	60	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Achmad Rifki Alaydrus, SH	RW 6 SEMPLAK, Kota Bogor	90	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si	Blok B5 dan B6 RT 004 dan 005 RW 10, Kelurahan Ciluar, Bogor Utara (Antara Gapura RT 005), Kota Bogor	84	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I	jalan sayunting lembur sawah RT 03/02 Mulyaharja Bogor Selatan , Kota Bogor	180	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Angga Alan Surawijaya, S.Pi	kali Cisindangbarang RT : 03 RW : 04 Kelurahan : Situgede , Kota Bogor	60	m3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Kp.sindangsari rt.03/rw.02, Kota Bogor	750	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
M. Rusli Prihatevy, SE	MUARASARI RT 03 / RW 5, Kota Bogor	450	M3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
H.R. Oyok Sukardi, SE, MM	Kp.kramat rt.06/rw.01, Kota Bogor	145	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
Angga Alan Surawijaya, S.Pi	Alamat : Sindangbarang Pengkolan RT : 07 RW : 04 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	2000	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ahmad Aswandi, S.H	Blok Binong RT.01 RW.05 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	150	m2	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ahmad Aswandi, S.H	Kalibuluh Kp. Setu Asem RT.03 RW.14 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	150	M2	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Achmad Rifki Alaydrus, SH	sindang barang loji rw 13, Kota Bogor	300	M2	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Gilang Gugum Gumelar	KP MARGHABAKTI RW 04 KEL KERTAMAYA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	60	M3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ujang Sugandi	parung banteng RT.07 RW.01,Kel.Katulampa, Kota Bogor	125	m1	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ujang Sugandi	cikeas RT.02 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ujang Sugandi	cikeas RT.01 RW.03,Kel.Katulampa, Kota Bogor	50	m1	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Iwan Iswanto, ST	KP. SINDANG BARANG LOJI RT 002 RW 005 KELURAHAN LOJI	60	M3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor				
H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E	KP. CIPAKU HAJI RT 04 RW 07 KEL. CIPAKU KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	120	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Iwan Iswanto, ST	KP. BOJONG MENTENG (DEKAT POS YANDU) RT 003 RW 002 KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	90	M3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Iwan Iswanto, ST	KP. CURUG RT 003 RW 009 KELURAHAN CURUG KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	90	M3	150,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ence Setiawan	Jl.BABAKAN LIO NO.36 RT 005 / RW 011 , BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT, Kota Bogor	200	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Ence Setiawan	Jl.BABAKAN LEBAK NO.46 RT/RW 001/005, BALUMBANG JAYA, BOGOR BARAT , Kota Bogor	200	m3	200,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Syafei,ST	KP BLOK PAKU RT 003 RW 010 KELURAHAN CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	100	m3	100,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Syafei,ST	KP SAWAH RT 001 RW 011 KELURAHAN CIMAHPAR	150	m3	15,000,000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

PENGUSUL	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
	KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor				
			J U M L A H	**6.265.000.000**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pada dasarnya program dinas tidak terlepas dari kebijakan nasional maupun propinsi, namum program dibuat dan disusun sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan dinamisasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Kebijakan Daerah tentunya harus mendukung juga kebijakan Nasional begitu pulan sebaliknya, sehingga terjalain satu kesatuan sinergitas dan kesinambungan pembangunan nasional tersebut.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sub urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana Tabel berikut:

Table 10. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014

No	**Sub Bidang**	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	**Pemerintah Daerah Kab/Kota**
1	Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Pengembangan danpengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	A. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. b. Pengembangan danpengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2	Air Minum	Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi,ndan SPAM untukkepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
3	Air Limbah	Penetapan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
		Pengelolaan dan pengembangan Sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan Sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.		domestik dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
4	Drainase	Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi, dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
5	Jalan	Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.	Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan Provinsi.	Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan Kabupaten/ Kota.

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kab/Kota
6	Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi.	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/ Kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten/ Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Perumusan Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan:

PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur air minun, air limbah dan sumberdaya air yang berkualitas.

   Indikator Tujuan:

   1.1 Capaian Rumah Tangga yang terlayani akses air minum yang aman.

   1.2 Capaian Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang aman.

   1.3 Capaian infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik.

   Sasaran:

   1.1.1 Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah.

   1.2.1 Optimalisasi pengelolaan infrastruktur irigasi.

   1.3.1 Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

   Indikator Sasaran:

   1.1.1.1 capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani air minum layak.

   1.1.1.2 Capaian layanan Rumah Tangga yang terlayani pengelolaan air limbah yang layak.

   1.2.1.1 Rasio Jaringan Irigasi kewenangan Kota untuk mendukung budidaya pertanian

   1.3.1.1 Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal.

Indikator Tujuan:

2.1 Presentase indikasi program perwujudan struktur ruang pada RTRW/RDTR.

Sasaran:

2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

2.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung.

2.1.3 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan.

Indikator Sasaran:

2.1.1.1 Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR.

2.1.2.1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan.

2.1.3.1 Persentase ketersediaan dokumen RTBL.

2.1.3.2 Persentase realisasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing pengembangan potensi ekonomi lokal.

Indikator Tujuan:

3.1 Persentase pengelolaan infrastruktur kebinamargaan yang berkondisi baik.

Sasaran:

3.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan.

3.1.2 Meningkatnya kualitas drainase.

3.1.3 Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas.

Indikator Sasaran:

3.1.1.1 Persentase Jalan berkondisi mantap.

3.1.2.1 Persentase drainase yang berkondisi baik.

3.1.3.1 Capaian Penyedia Jasa Konstruksi yang berkondite baik.

REFORMASI BIROKRASI

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator Tujuan:

4.1 Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah.

4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Dinas.

Sasaran:

4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas.

4.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas.

Indikator Sasaran:

4.1.1.1 Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah.

4.1.1.2 Kepatuhan Pengeloaan Keuangan

4.1.1.3 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda.

4.1.1.4 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)

4.1.2.1 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun alokasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada :

a. Keterkaitan dengan Penangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

b. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

c. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan simpul simpul kemacetan di Kota Bogor.

d. Pencapaian SDGs (Suistainable Development Goals) untuk indikator terkait pemenuhan kebutuhan air minum dan air limbah.

Pada Tahun 2025 ini Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang terdiri dari 8 (Delapan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan dan semua kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor. Dengan total anggaran Rp. 137.199.542.555,00

(terbilang: Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Uraian rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025selengkapnya dapat di lihat pada tabel 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraaan Maju Tahun 2026 dibawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA Perubahan OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKOTA BOGOR
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						137.199.542.555,00							134.257.967.535,00	

1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA	Transparansi pengelolaan keuangan daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat	100 Persentase 87,87Nilai 89,39Nilai 100 Persentase 89,39Nilai 94Persentase 100 Persentase 94Persentase 100 Persentase 29,95nila			100 % 21,97 Angka 26,55 Angka 28,85 Angka 87,11 Angka 88,38 Angka 88,75 Angka 94 %	34.095.845.144,00						100Persentase 87,87 Nilai 89,39 Nilai 100Persentase 89,39 Nilai 94Persentase 100Persentase 94Persentase 100Persentase 29,95 nilai 26,82 Nilai 13Nilai 21,98 Nilai 100Pe	38.360.081.183,00	

							Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-Rata Nilai SKM Aspek	i 26,82Nilai 13Nilai 21,98Nilai 100 Persentase 100 Persentase 89,25Nilai										rsentase 100Persentase 89,25 Nilai		

							Penanganan Pengaduan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan													

	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100 %			100 %	19.697.537.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100%	21.667.291.679,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan			113 Orang/bulan	19.697.537.890,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Ka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	115 Orang/bulan	21.667.291.679,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												yu M an is							
	1	0 3	0 1	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100 %			100 %	39.491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100%	95.951.000,00	
	1	0 3	0 1	2 . 0 5	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	39.491.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	95.951.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %			100 %	2.230.759.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	100%	4.059.121.300,00	

	1	0 3	0 1	2 . 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	49.876.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	109.906.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 1	2 . 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa	3 Paket			12 Paket	921.294.200,00	Kota Bogor, Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	1.382.899.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							n Kantor yang Disediakan						Sareal, Kayu Manis	(PAD)	masi Pelayanan Publik	. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik				
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			9 Paket	316.285.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah . Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	917.448.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	27.978.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	59.668.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	3 Paket			2 Paket	112.217.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola	ASN Lingkup Dinas PUPR	1 Paket	129.869.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							Disediakan						Manis			Pelayanan Publik					
	1	03	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			4 Laporan	803.107.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	ASN Lingkup Dinas PUPR	12 Laporan	1.459.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100 persen			100 persen	2.413.844.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	100persen	2.500.000.000,00	

															Aktif Koperasi					
	1	0 3	0 1	2 . 0 7	0 0 0 3	Pengadaan Alat Besar														

							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	2.413.844.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	2 Unit	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

															Aktif Koperasi					
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusa	100 %			94 %	4.771.572.052,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola	Dinas PUPR	100%	5.179.080.032,00	

						Daerah	n pemerintah daerah									Pelayanan Publik				
	1	0 3	0 1	2 . 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			48 Laporan	811.296.732,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	12 Laporan	866.321.488,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 1	2 .	0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

				08	04															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			24 Laporan	3.960.275.320,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	12 Laporan	4.312.758.544,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94%			94 %	4.942.640.002,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	94%	4.858.637.172,00	

															Aktif Koperasi					
	1	0 3	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit			90 Unit	348.959.767,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	60 Unit	402.732.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

															Aktif Koperasi					
	1	0 3	0 1	2 . 0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit			85 Unit	4.090.405.172,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	85 Unit	4.090.405.172,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

															Aktif Koperasi					
	1	0 3	0 1	2 . 0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	221.531.553,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	2 Unit	130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

															Aktif Koperasi					
	1	0 3	0 1	2 . 0 9	0 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit			6 Unit	281.743.510,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas PUPR	5 Unit	235.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

															Aktif Koperasi					
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase lokasi rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berko	66,49Persentase 93,64Persentase 4,76 Persentase			3,57 % 62,21 % 87,97 %	23.577.587.452,00						66,49 Persentase 93,64 Persentase 4,76Persentase	27.319.286.400,00	

						(SDA)	ndisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)													
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Sat	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang	1Lokasi 100 Dokumen 110 500 Km			100 Dokumen 1 Lokasi 103,8 Km	12.870.787.452,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan	Masyarakat Kota Bogor	1Lokasi 100Dokumen 110500Km	15.541.806.400,00	

						u) Daerah Kabupaten/ Kota	berkondisi baik									daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				
	1	0 3	0 2	2 . 0 1	0 0 9 3	Normalisasi/Restorasi Sungai														
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,68 KM			4,18 KM	1.428.582.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Se	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	5,68 KM	1.714.406.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													mua Kel/ Desa			serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	9.889 KM			6,5 KM	7.945.363.652,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkela	Masyarakat Kota Bogor	9.889 KM	8.739.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												Semua Kel/ Desa			njutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi					
	1	03	02	2.01	010	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														

							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	12.383,25 KM			0,2 KM	2.625.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan Kota Bogor, Bogor Barat, Loji Kota Bo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	12.383,25 KM	2.887.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												gor, Bogor Utara, Cibuluh Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana								
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	80 Dokumen			12 Dokumen	871.841.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	80 Dokumen	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Sat	Panjang Irigasi yang berkondisi baik	66,49%			167,357 KM	10.706.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Masyarakat Kota Bogor	66,49%	11.777.480.000,00	

						u) Daerah Kabupaten/ Kota														
	1	0 3	0 2	2 . 0 2	0 0 2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	44 KM			33 KM	10.706.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Se	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	44 KM	11.777.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												mua Kel/ Desa			serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi				
3	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Dome	100 Persentase			6,10 % 74,99 Persentase	11.921.631.815,00						100Persentase	3.800.000.000,00	

							stik (SPALD) yang aman Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) yang layak													

	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan	79,12% 6,60 %			6,10 % 74,99 %	11.921.631.815,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	79,12 % 6,60%	3.800.000.000,00	

							Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak														
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman															
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permu	65.188 M³/Hari			25 M³/Hari	721.694.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	1.000 M³/Hari	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							kiman yang diban gun						Kel/ Desa			ngun Desa Pemba ngunan Infrastr uktur berkela njutan				
	1	0 3	0 5	2 . 0 1	0 0 2 9	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
							Jumla h Siste m Pengel olaan Air Limba h Dome stik (SPAL D) Terpu sat Skala Permu	25 Unit			8 Unit	1.769. 440.0 00,00	Ko ta Bo go r, Se m ua Ke ca m at an , Se m ua	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pengem bangan Infrastr uktur Konekti vitas Wilaya h dan Pengelo laan Lingku ngan Hidup serta Geraka n Memba	Masyarak at Kota Bogor	10 Unit	0,00	DINAS PEKERJA AN UMUM DAN PENATAA N RUANG

							kiman yang diopti malisa si						Kel/ Desa			ngun Desa Pemba ngunan Infrastr uktur berkela njutan				
	1	0 3	0 5	2 . 0 1	0 0 3 3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
							Jumla h Ruma h Tangg a yang Terlay ani Jasa Penye dotan Lump ur Tinja	340 0 Rum ah Tang ga			1100 Rumah Tangga	1.600. 000.0 00,00	Ko ta Bo go r, Se m ua Ke ca m at an , Se m ua	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengem bangan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pengem bangan Infrastr uktur Konekti vitas Wilaya h dan Pengelo laan Lingku ngan Hidup serta Geraka n Memba	Masyarak at Kota Bogor	1500 Ruma h Tangg a	2.000.00 0.000,00	DINAS PEKERJA AN UMUM DAN PENATAA N RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan	1251 Unit			1 Unit	1.300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	650 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							Dipelihara						Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan	4.108 Rumah Tangga			479 Rumah Tangga	6.530.497.615,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	1.537 Rumah Tangga	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							Standar						Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan					
4	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase penurunan lokasi genangan Persentase pemenuhan ketersediaan drainase pada jalan arteri/kolek	80Persentase 0.75 Persentase			0.8 Persentase 75 Persentase	10.211.214.800,00						80Persentase 0.75Persentase	13.217.895.310,00	

							tor/lokal													
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupat	Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	80Km			75 Km	10.211.214.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	80Km	13.217.895.310,00	

						en/ Kota														
	1	0 3	0 6	2 . 0 1	0 0 2 4	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	10 km Sistem Drainase Perkotaan			22 Sistem Drainase Perkotaan	4.835.153.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	31 paket /6 km Sistem Drainase Perkotaan	5.318.668.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/ Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	8 km Sistem Drainase Perkotaan			13 Sistem Drainase Perkotaan	3.817.478.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	11 psket / 4 km Sistem Drainase Perkotaan	4.199.226.570,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkot	8 Dokumen			8 Dokumen	521.621.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	8 Dokumen	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							aan yang disusun						Kel/ Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	440 Sistem Drainase Perkotaan			7 Sistem Drainase Perkotaan	1.036.961.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor	2.000 Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
5	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30 %			30 %	2.247.555.300,00						30 %	2.474.984.000,00	

	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	93%			90 %	2.247.555.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	93%	2.474.984.000,00	

						Laik Fungsi Bangunan Gedung														
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangu				1 Dokumen	1.491.555.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor		1.974.984.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							nan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota						Kel/ Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi	36 Dokumen			10 Dokumen	756.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan	Masyarakat Kota Bogor	36 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis						ua Kel/ Desa			Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				

							(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
6	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	89 Persentase			89 Persentase	54.190.215.544,00						89 Persentase	48.218.220.642,00	

	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase panjang jalan yang ditingkatkan Persentase panjang jalan yang terbangun Perse	100 % 100 % 14,14% 61,62% 26,36%			26,29 % 75 % 56,35 % 50 % 12,07 %	54.190.215.544,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	100% 100% 14,14 % 61,62 % 26,36 %	48.218.220.642,00	

							ntase pemenuhan ketersediaan trotoar/pedestrian pada jalan arteri/kolektor													
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penge	100 Dokumen			20 Dokumen	5.316.246.485,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	100 Dokumen	5.890.720.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							mbangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					, Semua Kel/ Desa			serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan													

							Panjang Jalan yang Dibangun	2,09 KM			0,2 KM	5.367.716.723,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	2,09 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Rekonstruksi Jalan														

							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	128,78 KM			11 KM	11.602.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	128,78 KM	11.602.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	138,69 KM			8 KM	3.005.066.336,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	138,69 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	008	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	138 Jembatan			138 Jembatan	1.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	138 Jembatan	1.725.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	009	Rehabilitasi Jembatan														

							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	822 Jembatan			2 Jembatan	576.888.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	822 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan														

							Jumlah Jembatan yang Dibangun	162 Jembatan			1 unit Jembatan	1.696.798.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	162 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	134,69 KM			209 KM	25.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Kota Bogor	134,69 KM	25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JAS	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota	14,22 %			14,22 %	167.992.500,00						14,22 %	0,00	

						A KONSTRUKSI	Bogor yang berkondite baik													
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	22,22%			14,22%	167.992.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	22,22%	0,00	
	1	03	11	2.	00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

				0 1	1 0															
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	300 Orang			68 Orang	167.992.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	200 Orang	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENG	Persentase kesesuaian antara aktivit	65 Persentase			65 Persentase	787.500.000,00						65 Persentase	867.500.000,00	

						GARAAN PENATAAN RUANG	as pada RPD/ RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RDTR												
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinc	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang	100 %			100 %	472.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan	Masyarakat Kota Bogor	100%	520.500.000,00	

						i Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota										Membangun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	12	2.01	005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor		173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	12	2.01	006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor		173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang				1 Laporan	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Masyarakat Kota Bogor		173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							penataan ruang.						Kel/ Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	100 Kali			100 %	157.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan	Pemerintah Daerah	100Kali	173.500.000,00	

																Infrastruktur berkelanjutan				
	1	03	12	2.03	005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Pemerintah Daerah	0 Dokumen	173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

												Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan					
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah	100 %			100 %	157.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pembangunan	Pemerintah Daerah	100%	173.500.000,00	

																Infrastruktur berkelanjutan				
	1	0 3	1 2	2 . 0 4	0 0 0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Memba	Pemerintah Daerah		173.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Kel/Desa			ngun Desa Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan					
	J U M L A H											**137.199.542.555**							**134.257.967.535**		

BAB V
P E N U T U P

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor ini dibuat sebagai langkah awal yang baik untuk menerapkan Program dan Kegiatan secara sistematis dan terstruktur oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor kepada Walikota Bogor dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian Dokumen Rencana Kerja ini merupakan rekonstruksi dari seluruh program/ kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Perkembangan kondisi infrastruktur yang senantiasa berubah dengan cepat menyebabkan perencanaan yang sudah dirancang secara rincipun dapat terpengaruh oleh situasi dan kondisi lapangan. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan harus dengan cepat menyesuaikan terhadap kondisi yang ada melalui identifikasi, evaluasi dan analisis, dan upaya merespon berbagai perubahan yang berkembang, serta senantiasa tetap berorientasi kepada visi dan misi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025 bisa dikatakan berhasil apabila didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan hasil perencanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Lampiran n. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib Menyusun rencana kerja dan rencana kerja perubahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 ini diharapkan memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Kota Bogor guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bogor. Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan program kerja yang ada dalam suatu organisasi dalam tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan tujuan, sasaran dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026 sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025.
2. Perubahan RENJA merupakan acuan PD untuk menyesuaikan program kegiatan ke dalam KUPA dan PPASP serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025.
3. Perubahan RENJA PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Di samping untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 ini juga dimaksudkan untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 050/5889 Tahun 2021;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;
20. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 171 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, 3 Program, 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BOGOR TAHUN 2024

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan capaian Renstra 2019-2024 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Hal tersebut berguna untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan meliputi; perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program kegiatan.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor tahun 2024, serta progres pencapaian kinerja Perubahan Renstra Periode 2019-2024 sehingga dapat teridentifikasi sejauh mana Program Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan program dan kegiatan, pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan Perangkat Daerah yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada Tahun 2024 untuk urusan Kearsipan ada 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang terurai dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor, yaitu:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

- ✓ Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;

2. Pengembangan Bahan Pustaka

✓ Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Arsip

✓ Kegiatan : Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis
2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

✓ Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2. Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis

✓ Kegiatan: Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kab/kota

1. Sub Kegiatan : Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup
2. Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

✓ Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✓ Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

✓ Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

✓ Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Mebel
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

✓ Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2024 Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, untuk pagu anggaran terdapat pengurangan atau efisiensi dalam rangka defisit anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 183.672.785 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Dan penambahan pagu sesuai dengan urgensi kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2024 sebesar Rp. 1.169.183.456 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) . Adapun rincian dari pagu tersebut seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN			Total Anggaran	Keterangan
			MURNI	Efisiensi (Pengurangan)	PENAMBAHAN PAGU		
1		2	3	4	5		
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**388.748.200**			**380.298.200**	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**388.748.200**			**380.298.200**	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	274.480.000	0	0	274.480.000	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	93.220.000	8.450.000	0	84.770.000	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.048.200	0	0	21.048.200	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**368.144.400**			**364.924.400**	
2.23.02.2.01			**368.144.400**			**364.924.400**	

	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	190.641.900	0	0	190.641.900	
		Pengembangan Bahan Pustaka	177.502.500	3.220.000	-	174.282.500	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**9.755.287.835**			**10.735.722.229**	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**10.421.600**	-	-	**10.425.200**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.421.600	-	3.600	10.425.200	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**7.092.158.704**			**8.097.616.518**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.031.107.404	-	1.033.694.091	8.048.065.218	Kenaikan Gaji 8 % dan gaji 13 dan 14 ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.051.300	11.500.000	-	49.551.300	

2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**510.724.400**			**450.324.400**	
		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.004.200	-	-	23.004.200	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.832.600	-	-	39.832.600	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.852.500	-	-	68.852.500	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.748.000	-	-	31.748.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.047.100	10.000	-	15.037.100	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.240.000	60.390.000	-	271.850.000	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**13.618.400**			**62.242.400**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	11.102.400	-	48.624.000	59.726.400	Pengadaan Papan Nama Ruangan
		Pengadaan Mebel	2.516.000	-		2.516.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.343.122.131**			**1.325.009.111**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	527.981.115	100.112.785	81.999.765	509.868.095	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.141.016	-	-	815.141.016	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**785.242.600**			**790.104.600**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.030.000	-	-	121.030.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.700.000	-	-	87.700.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.418.000	-	4.862.000	68.280.000	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.094.600	-	-	513.094.600	
TOTAL			**10.512.180.435**	**183.672.785**	**1.169.183.456**	**11.480.944.829**	

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2024

Capaian Renja Tahun 2024 berdasarkan target renstra tahun 2019-2024 dilaporkan per triwulan kepada Bapperida Kota Bogor, sesuai dengan matriks (format) yang diberikan oleh Bapperida. Adapun laporan per triwulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Perpustakaan, jumlah pagu Rp. 364.924.400,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan I : 1,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.878.000,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan II : 38,72 % dengan realisasi anggaran sebesar : Rp. 141.290.600,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan III : 89,12% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 319.341.950
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan IV : 89,56% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 330.550.950

Rata-rata capaian kinerja program pembinaan perpustakaan adalah sebesar 89,11% dengan predikat kinerja tinggi

2) Program Pengelolaan Arsip, jumlah pagu Rp. 380.298.200,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan I : 31,28% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.974.500,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan II : 87,30 % dengan realisasi anggaran sebesar : Rp. 333.075.438,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan III : 98,62% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 375.043.138,-
   - ✓ Realisasi Kinerja Triwulan IV : 98,62% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 375.043.138,-

Rata-rata capaian kinerja program Pengelolaan Arsip adalah sebesar 99% dengan predikat kinerja sangat tinggi.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota, jumlah pagu Rp. 10.753.835249,-

- ✓ Realisasi Kinerja Triwulan I : 24,27% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.609.423.316,-
- ✓ Realisasi Kinerja Triwulan II : 44,60 % dengan realisasi anggaran sebesar : Rp. 5.775.124.667,-
- ✓ Realisasi Kinerja Triwulan III : 80,19% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.871.143.294,-
- ✓ Realisasi Kinerja Triwulan IV : 98,82% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.551.256.473,-

Rata-rata capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota adalah sebesar 80,19% dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Hasil evaluasi Renja tahun 2024 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2025 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan di tahun 2025 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Faktor faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut adalah:

a. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai Rencana Kerja Perubahan;
b. Konsisten atas target waktu dan target capaian dari program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
c. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
d. Adanya dukungan anggaran untuk tercapainya layanan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;
e. Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

f. Adanya sarana prasarana yang mencukupi sebagai pendukung dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam mendukung layanan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;

Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Capaian Renja Tahun 2024 Triwulan 1 sd 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2024**			**Realisasi Kinerja Pada Triwulan**												**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi**	
				I			**II**			**III**			**IV**				
	K		**Rp.**	**K**		**Rp.**	**K**		**Rp.**	**K**		**Rp.**	**K**		**Rp.**	**K**	**Rp.**
3	7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11	
Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan																	
Bidang Urusan Perpustakaan																	
Program Pembinaan Perpustakaan	**100**	**%**	**364.924.400**	**1,61**	**%**	**5.878.000**	**37,11**	**%**	**135.412.600**	**48,79**	**%**	**178.051.350**	**2,05**	**%**	**11.209.000**	**89,56**	**319.341.950**
	100	**%**		**1,61**	**%**		**37,11**	**%**		**48,79**	**%**		**2,05**	**%**	**11.209.000**	**89,56**	
Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota	100	%	364.924.400	**1,61**	**%**	5.878.000	**37,11**	**%**	135.412.600	**48,79**	**%**	178.051.350	**2,05**	**%**	**11.209.000**	**89,56**	**319.341.950**

Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100	%	190.641.900	-	**%**	-	39,61	**%**	75.515.500	59,31	**%**	113.064.850	0,36	%	680.000	**99,28**	**189.260.350**
Sub Kegiatan : Pengembangan Bahan Pustaka	100	%	174.282.500	3,37	**%**	5.878.000	34,37	**%**	59.897.100	35,71	**%**	62.243.500	5,48	%	9.542.000	**78,93**	**137.560.600**
Program Pengelolaan Arsip	100	%	380.298.200	31,28	**%**	118.974.500	56,30	**%**	214.100.938	11,04	**%**	41.967.700	-	%	-	**98,62**	**375.043.138**
Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100	%	295.528.200	23,60	**%**	69.754.500	67,64	**%**	199.880.938	6,98	**%**	20.637.700	-	%	-	**98,22**	**290.273.138**
Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100	%	274.480.000	25,27	**%**	69.364.500	72,82	**%**	199.880.938	-	**%**	-	-	%	-	**98,09**	**269.245.438**
Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	100	%	21.048.200	1,85	**%**	390.000	-	**%**	-	98,05	**%**	20.637.700	-	%	-	**99,90**	**21.027.700**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN / KOTA	**100**	**%**	**10.753.835.249**	**24,27**	**%**	**2.609.423.316**	**20,33**	%	**3.165.701.351**	**35,59**	**%**	**2.096.018.627**	**18,63**	%	**2.680.113.179**	**80,19**	**7.871.143.294**

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	10.425.200	**12,08**	%	1.259.000	42,31	%	5.669.500	29,86	**%**	2.256.300	15,75	%	1.641.600	**100**	**10.826.400**
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	100	%	10.425.200	**12,08**	%	1.259.000	42,31	%	5.669.500	29,86	**%**	2.256.300	15,75	%	1.641.600	**100**	**10.826.400**

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	8.097.616.518	**26,72**	%	2.163.975.002	27,67	%	2.237.073.226	19,19	**%**	1.520.475.096	25,24	**%**	2.047.608.313	**98,82**	**5.921.523.324**
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	%	49.551.300	**19,70**	%	9.763.200	24,12	%	11.948.400	21,84	**%**	10.824.700	34,34	**%**	49.551.100	**100**	**82.087.400**
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	8.048.065.218	**26,77**	%	2.154.211.802	27,58	%	2.225.124.826	19,17	**%**	1.542.186.696	25,29	**%**	2.030.593.513	**98,81**	**7.952.116.837**

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	450.324.400	**22,83**	%	102.798.000	27,94	%	84.695.284	30,065	**%**	128.825.100	18,06	**%**	113.940.399	**98,89**	**430.258.783**
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100	%	23.004.200	**52,32**	%	12.035.000	21,32	%	4.905.000	18,93	**%**	4.355.000	6,65	**%**	1.530.000	**99,22**	**22.825.000**
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	39.832.600	**74,75**	%	29.773.000	-	%	-	-	**%**	-	24,35	**%**	9.700.000	**99,10**	**39.473.000**
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	%	68.852.500	**38,77**	%	26.694.000	13,79	%	9.495.000	24,18	**%**	16.648.500	22,01	**%**	15.157.500	**98,75**	**67.995.000**
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	%	31.748.000	**21,76**	%	6.909.000	12,83	%	4.074.000	35,33	**%**	11.216.000	26,85	**%**	8.522.000	**96,77**	**30.721.000**
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	%	15.037.100	**12,66**	%	1.903.500	10,39	%	1.562.400	39,58	**%**	5.951.150	37,12	**%**	5.583.000	**99,75**	**15.000.050**
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	271.850.000	**9,37**	%	25.483.500	23,79	%	64.658.884	33,35	**%**	90.654.450	32,64	**%**	88.730.899	**99,15**	**269.527.733**

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	62.242.400	**21,13**	%	13.150.000	-	%	-	-	**%**	-	80,84	**%**	10.650.000	**148,35**	**13.150.000**
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	%	59.726.400	**17,83**	%	10.650.000	-	%	-	-	**%**	-	80,84	**%**	10.650.000	**98,67**	**21.300.000**
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	100	%	2.516.000	**99,36**	%	2.500.000	-	%	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**99,36**	**2.500.000**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.343.122.131	**22,46**	%	279.216.314	23,12	%	287.301.272	28,78	**%**	357.599.231	119,29	**%**	426.575.767	**74,36**	**924.116.817**
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	509.868.095	**14,69**	%	74.906.390	20,05	%	102.225.176	24,40	**%**	124.401.674	33,99	**%**	173.324.615	**93,13**	**474.857.855**
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	815.141.016	**25,06**	%	204.309.924	22,71	%	185.076.096	20,97	**%**	170.938.364	31,07	**%**	253.251.152	**99,81**	**813.575.536**

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	790.104.600	**6,20**	%	49.025.000	74,75	%	550.962.069	15,77	**%**	86.862.900	91,75	**%**	79.697.100	**96,72**	**766.547.069**
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	%	121.030.000	**25,03**	%	30.290.000	18,95	%	22.933.500	31,6	**%**	38.247.000	15,20	**%**	18.403.300	**90,78**	**109.873.800**
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	%	87.700.000	**18,87**	%	16.545.000	28,79	%	20.333.000	13,48	**%**	16.739.100	19,15	**%**	16.793.800	**80,29**	**70.410.900**
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	%	68.280.000	**3,21**	%	2.190.000	33,42	%	22.819.600	21,71	**%**	14.826.800	40,33	**%**	27.450.000	**98,67**	**67.286.400**

Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	%	513.094.600	**-**	%	-	94,50	%	484.875.969	3,32	**%**	17.050.000	1,68	**%**	17.050.000	**99,50**	**518.975.969**

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD per-Triwulan

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor setingkat Eselon II yang memiliki wewenang penyelenggaraan sebagian urusan wajib pemerintahan daerah dengan tugas pokok dan fungsi dititikberatkan pada urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedua urusan wajib pemerintahan ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor melaksanakan program kegiatan yang relevan serta bersinergi dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD maupun RPJMD Kota Bogor serta tidak terpisahkan dan atau menyimpang dari pencapaian visi dan misinya dalam memberikan pelayanan aparatur kepada pemerintah itu sendiri secara kelembagaan dan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai stakeholdernya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis

kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang telah ditetapkan. Analisis pencapain kinerja dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Bogor

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-	
			2023	2024	2023	2024	2025	2023	2024
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat	Nlai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kategori	60 (Sedang)	52 (Sedang)	69 (Sedang)	79 (Sedang)	79.32 (Sedang)	52 (Sedang)	78.4
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase Perpustakaan Ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persen	15,00	18,53	16	17,50	4,92	18,53	17.6
Tujuan 2 : Terwujudnya pengelolaan Arsip Yang berkualitas	Kualitas pengelolaan arsip	Kategori	81,5 (Memuaskan)	81,94 (Memuaskan)	82,5 (Memuaskan)	83,5 (Memuaskan)	76,30 (Memuaskan)	81,94 (Memuaskan)	75.2

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Kebijakan	Nilai	NA	12.55	NA	NA	12,80	28,48	12.55
	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pembinaan	Nilai	NA	18.68	NA	NA	19,00	15,08	18.68
	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	Nilai	NA	7,38	NA	NA	7,63	5,53	7,38
	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek Penglolaan Arsip Statis	Nilai	NA	16.64	NA	NA	17,00	12,16	16.64
	Nilai Indeks Pengelolaan Arsip Aspek SDM Kearsipan	Nilai	NA	17,08	NA	NA	17,33	16,59	17,08
	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	Nilai	NA	68,75	NA	NA	70	65,59	68,75
Sasaran 2.2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	A	NA	NA	A	BB	A

	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	NA	100	NA	NA	100	NA	NA
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	NA	85,26	NA	NA	88,75	NA	NA
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1	1	NA	NA	1	1	1

Sumber : LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang mencapai/melebihi target dan tidak ada indikator sasaran yang tidak mencapai target. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 telah disusun program dan kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.11.480.944.829 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 8.155.145.218, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.137.270.411, dan Belanja Modal sebesar Rp. 188.529.200 dengan realisasi sebesar 11.267.464.268,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan atau 98,14 %.

Kinerja pelayanan kearsipan dan perpustakaan menjadi hal yang sangat penting guna menilai seberapa jauh layanan yang diberikan oleh perpustakaan dalam memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. Disisi lain kinerja juga penting sebagai evaluasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan perpustakaan. Dengan adanya penilaian terhadap kinerja tersebut, maka upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan perpustakaan bisa dilakukan secara teratur dan sistematis.Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Pepustakaan Kota Bogor dalam rentang tahun 2020-2024 perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 22 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Urusan Kearsipan

1. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan kepada seluruh perangkat daerah, Kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
2. Belum maksimalnya pengamanan seluruh ruangan Depo Arsip terhadap bencana;
3. Aplikasi *e-Arsip* SIMARDI yang ada, tidak optimal Karena harus beralih menggunakan aplikasi umum SRIKANDI oleh pemerintah pusat
4. Persyaratan dalam pelayanan arsip mudah, tapi sering menjadi kendala di instansi unit pencipta arsip dalam pemberian surat keterangan.
5. Belum terakomodirnya seluruh potensi budaya, adat dan wisata di lingkungan Kota Bogor untuk disajikan sebagai informasi dari sisi sejarah;
6. Sulitnya menemukan tokoh masyarakat di Kota Bogor untuk koleksi naskah nasional dan naskah kuno;
7. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kearsipan untuk melaksanakan penelitian tentang sejarah;

8. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan pencacah arsip;
9. Belum adanya tim penilai dan pemusnah arsip;
10. Masih banyak arsip – arsip potensi budaya, adat dan wisata yang berkaitan dengan Kota Bogor yang belum terakomodir;
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dan Perngkat Daerah terhadap arti pentingnya tertib arsip.

Urusan Perpustakaan

1. Belum memadainya SDM pengelola Perpustakaan
2. Jumlah Koleksi buku dan Judul Buku perpustakaan yang belum memadai;
3. Budaya baca di masyarakat Kota Bogor masih rendah;
4. Belum optimalnya pengembangan SDM perpustakaan;
5. Mengantisipasi pengembangan teknologi, kerja sama layanan perpustakaan dan kearsipan.
6. Sistem informasi pengeloaan menggunakan aplikasi umum dari perpusnas
7. Aplikasi e-book gratis masih terbatas

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, diperlukan sikap adaptif, literasi digital yang kuat, serta pemanfaatan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Adapun perbandingan antara anggaran RKPDP 2025 dengan RKPD murni 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor sebagai berikut :

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DIARPUS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025					PERUBAHAN 2025			
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025
			VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN	
1	3	4	6		7	8	9	11		12
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	0,7933	Nilai	702.289.900	593.225.600	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	0,7933	Nilai	593.225.600
		Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	0,0914	Nilai			Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	0,0914	Nilai	
		Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	1	Nilai			Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	1	Nilai	
		Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4)	0,1143	Nilai			Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4)	0,1143	Nilai	
		Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5)	1	Nilai			Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	1	Nilai	

							(SNP) (UPLM 5)			
		Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6)	**1**	**Nilai**			**Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6)**	**1**	**Nilai**	
		Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	**1**	**Nilai**			**Anggota Perpustakaan (UPLM 7)**	**1**	**Nilai**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpustakaan yang aktif**	**12**	**Perpustakaan**	**702.289.900**	**593.225.600**	**Jumlah Perpustakaan yang aktif**	**12**	**Perpustakaan**	**593.225.600**
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan**	**155**	**Perpustakaan**	367.403.500	259.673.200	**Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan**	**155**	**Perpustakaan**	259.673.200
	Aktivitas/ Output :	**Lomba Bercerita, Story telling, Mendongeng, bedah buku, pendataan perpustakaan, pembinaan perpustakaan SD dan SMP, workshop akreditasi perpustakaan,**								

		pendampingan akreditasi perpustakaan , honor narasumber dan moderator								
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	**20**	**Eksemplar**	334.886.400	333.552.400	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	**20**	**Eksemplar**	333.552.400
	Aktivitas/ Output :	**Pengadaan Buku fisik, buku elektronik, majalah, koran dan penjilidan majalah**								
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase naskah kuno yang diinventarisasi**	**50**	**Persen**	**335.108.000**	**325.608.800**	**Persentase naskah kuno yang diinventarisasi**	**50**	**Persen**	**325.608.800**
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah naskah kuno milik Daerah Kota Bogor**	**NA**	**Eksemplar**	**335.108.000**	**325.608.800**	**Jumlah naskah kuno milik Daerah Kota Bogor**	**NA**	**Eksemplar**	**325.608.800**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	**Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno**	**2**	**Orang**	335.108.000	325.608.800	**Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno**	**2**	**Orang**	325.608.800
	Aktivitas/ Output :	**FGD, penelusuran naskah kuno dan**								

		sosialisasi naskah kuno								
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik**	**57.14**	**Persen**	**427.158.200**	**359.344.600**	**Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik**	**57.14**	**Persen**	**359.344.600**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik**	**38**	**PD**	**309.578.200**	**274.984.600**	**Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik**	**38**	**PD**	**274.984.600**
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	**Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan penyusutan**	**38000**	**Berkas**	155.949.300	155.569.300	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan**	**38000**	**Berkas**	155.569.300
	Aktivitas/ Output :	**Alih media arsip peraturan dan belanja boks arsip**								
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan digunakan**	**59065**	**Berkas**	93.759.600	93.222.000	**Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan penyusutan**	**59065**	**Berkas**	93.222.000
	Aktivitas/ Output :	**Sosialisasi dan bimbingan teknis Srikandi**								
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	59.869.300	26.193.300	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**Laporan**	26.193.300

	Aktivitas/ Output :	**Sosialisasi dan pengawasan kearsipan**								
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah arsip statis yang dibuatkan sarana temu baliknya**	**11566**	**Arsip**	**117.580.000**	**84.360.000**	**Jumlah arsip statis yang dibuatkan sarana temu baliknya**	**11566**	**Arsip**	**84.360.000**
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis**	**11566**	**Arsip**	117.580.000	84.360.000	**Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis**	**11566**	**Arsip**	84.360.000
	Aktivitas/ Output :	**workshop penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis**								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.01**	**Point**	**10.237.375.327**	**10.137.978.847**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**27.01**	**Point**	**10.133.298.147**
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**26.55**	**Point**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**26.55**	**Point**	
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	**12.48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah**	**12.48**	**Nilai**	
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	**21.97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di**	**21.97**	**Nilai**	

							lingkup Perangkat Daerah			
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah	100	Persen			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah	100	Persen	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai ketentuan	94	Persen			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai ketentuan	94	Persen	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan secara tepat waktu	100	Persen			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan secara tepat waktu	100	Persen	
		Persentase kepatuhan anggaran	100	Persen			Persentase kepatuhan anggaran	100	Persen	
		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95	Persen			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	95	Persen	
		Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94	Persen			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	94	Persen	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	92.25	Nilai			Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	92.25	Nilai	

		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	**88.75**	**Nilai**			**Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM**	**88.75**	**Nilai**	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	**88.38**	**Nilai**			**Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan**	**88.38**	**Nilai**	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88.38**	**Nilai**			**Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88.38**	**Nilai**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**Persen**	**20.863.400**	**16.844.100**	**Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**Persen**	**12.163.400**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**	20.863.400	16.844.100	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4**	**Laporan**	12.163.400
	Aktivitas/ Output :	**Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, RENJA PERUBAHAN, LAKIP, MANAJEMEN RISIKO, FRA**								

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**Persen**	**7.514.706.903**	**7.510.864.323**	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**	**100**	**Persen**	**7.510.864.323**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN**	**35**	**Orang**	7.451.858.303	7.451.858.303	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN**	**35**	**Orang**	7.451.858.303
	Aktivitas/ Output :	**Laporan Gaji dan Tunjangan ASN**								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD**	**4**	**Laporan**	62.848.600	59.006.020	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD**	**4**	**Laporan**	59.006.020
	Aktivitas/ Output :	**Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	354.807.700,00	273.729.900,00	**Presentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	273.729.900,00

	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan**	**1**	**Paket**	23.002.000	23.002.000	**Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan**	**1**	**Paket**	23.002.000
	Aktivitas/ Output :	**Kebutuhan alat listrik dan elektronik**								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	31.844.100	31.844.100	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	31.844.100
	Aktivitas/ Output :	**kebutuhan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga**	**1**	**Paket**	55.029.000	55.029.000	**Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga**	**1**	**Paket**	55.029.000
	Aktivitas/ Output :	**Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga**								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	31.715.800	31.715.800	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1**	**Paket**	31.715.800
	Aktivitas/ Output :	**Kebutuhan air galon, tabung gas, dan logistik kantor lainnya**								
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan**	**1**	**Paket**	21.754.800	13.347.000	**Jumlah Barang**	**1**	**Paket**	13.347.000

							Cetakan dan Penggandaan			
	Aktivitas/ Output :	**Dokumen kepegawaian dan fotocopy**								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Negeri)**	**12**	**Laporan**	191.462.000	118.792.000	**Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Negeri)**	**12**	**Laporan**	118.792.000
	Aktivitas/ Output :	**Laporan Perjalanan Dinas**								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**Persen**	**303.633.100**	**293.176.300**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**Persen**	**293.176.300**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	258.030.700	247.573.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Unit	247.573.900
	Aktivitas/ Output :	PC, Laptop, Printer, Infocus, TV LED, AC Split, AC Standing								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	105	Unit	45.602.400	45.602.400	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	105	Unit	45.602.400
	Aktivitas/ Output :	Pemeliharaan mebel								

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional**	**100**	**Persen**	**1.328.897.324**	**1.328.897.324**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional**	**100**	**Persen**	**1.328.897.324**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	508.661.108	508.661.108	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	508.661.108
	Aktivitas/ Output :	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	820.236.216	820.236.216	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	820.236.216
	Aktivitas/ Output :	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan berkondisi baik**	**82,14**	**Persen**	**714.466.900,00**	**714.466.900,00**	**Presentase BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan berkondisi baik**	**82,14**	**Persen**	**714.466.900,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	Unit	105.423.118	105.423.118	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	Unit	105.423.118
	Aktivitas/ Output :	Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	4	Unit	72.490.230	72.490.230	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	4	Unit	72.490.230

	Aktivitas/ Output :	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	58	Unit	77.386.568	77.386.568	Jumlah unit Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	58	Unit	77.386.568
	Aktivitas/ Output :	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /rehabilitasi	1	Unit	459.166.984	459.166.984	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /rehabilitasi	1	Unit	459.166.984
				JUMLAH	**11.701.931.427**	**11.416.157.847**				**11.411.477.147**

Sumber : Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur berkualitas, dan pemerataan ekonomi :

No	Prioritas Nasional	Program
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
		Program pengembangan UMKM
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program penanganan kerawanan pangan
		Program pengawasan keamanan pangan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Program penyuluhan pertanian
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Program pengelolaan perikanan budidaya
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
		Program pengelolaan persampahan
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
		Program perencanaan lingkungan hidup
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program penyelenggaraan jalan
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
		Program penataan bangunan gedung
		Program pengembangan jasa konstruksi
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Program pengelolaan perkeretaapian
		Program penyelenggaraan penataan ruang
		Program pengembangan kebudayaan
		Program pengembangan kesenian tradisional
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Program pemasaran pariwisata
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
		Program pengembangan ekspor
		Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Program perencanaan dan pembangunan industri
		Program penempatan tenaga kerja
		Program hubungan industrial
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen
		Program perekonomian dan pembangunan
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak
		Program perlindungan perempuan
		Program pemenuhan hak anak (PHA)

		Program peningkatan kualitas keluarga
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		Program pengelolaan taman makam pahlawan
		Program pengelolaan pendidikan
		Program pembinaan perpustakaan
		Program pengelolaan permuseuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pemberdayaan sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program pengembangan iklim penanaman modal
		Program promosi penanaman modal
		Program pelayanan penanaman modal
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		Program penyelenggaraan pengawasan
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Program kepegawaian daerah
		Program pengembangan sumber daya manusia
		Program administrasi pemerintahan desa
		Program pengelolaan arsip
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Program pengelolaan aplikasi informatika
		Program pengelolaan keuangan daerah
		Program pengelolaan barang milik daerah
		Program penyelenggaraan statistik sektoral
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Program pengelolaan pendapatan daerah
		Program penelitian dan pengembangan daerah
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Program Penyelesaian Tanah dan Garapan
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan	Program penanganan bencana
		Program penanggulangan bencana

	yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sebagaimana kebijakan nasional yang tertuang pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diatas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor urusan kearsipan mendukung Prioritas Nasional yang ke- 7 berbunyi "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan". Urusan Perpustakaan mendukung Prioritas Nasional yang ke- 4 berbunyi Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas .

a. Kebijakan Provinsi Jawa Barat terdiri urusan kearsipan terdiri dari 3 (Tiga) Program yaitu :
    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Program Pengelolaan Arsip;
    - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ;

Sedangkan urusan Perpustakaan kebijakan Provinsi Jawa Barat terdiri dari 2 program yaitu.

- Program Pembinaan Perpustakaan;
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

Untuk program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat sama dengan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah (PD) sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adapun untuk Kegiatan Provinsi Jawa Barat lebih banyak menyangkut ke Perumusan Kebijakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bogor yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra untuk jangkauan waktu 2 (dua) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2026 dengan asumsi Dinas Arsip dan Perpustakaan tetap konsisten dengan menjalankan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Terkait hal di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor mempunyai tujuan :

2. Terwujudnya pembangunan literasi masyarakat;
3. Terwujudnya pengelolaan Arsip Yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Adapun sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP);
2. Optimalisasi pengelolaan Arsip Daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

   Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi terkait dalam rangka kerjasama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang telah dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Program pembinaan perpustakaan
b. Program pengelolaan arsip
c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Pengembangan Bahan Pustaka
Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno
Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan dan mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program dan/kegiatan yang mengarah pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor.

Dalam Misi Dinas, Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor adalah :

(1) Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat,

(2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
3. pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1,328,897,324**
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,328,897,324**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508,661,108

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820,236,216
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**593,225,600**
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**593,225,600**
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	259,673,200
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	333,552,400
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**		**325,608,800**
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	**325,608,800**
			325,608,800
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**443,383,900**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**443,383,900**
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	93,222,000
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	239,608,600
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Arsip Statis	26,193,300
2.24.02.2.02			

	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	84,360,000
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**8,993,688,907**
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**16,844,100**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,844,100
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**7,695,471,707**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,636,465,907
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59,005,800
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**273,729,900**
		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,002,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,844,100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55,029,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,715,800
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,347,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118,792,000
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**293,176,300**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	247,573,900
		Pengadaan Mebel	45,602,400
2.24.01.2.09			**714,466,900**

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105,423,118
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,490,230
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,386,568
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459,166,984
TOTAL			**11,684,804,531**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Selain itu, dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk meningkakan kualitas kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan sehingga memposisikan arsip dan perpustakaan menjadi bagian integral dalam siklus Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dari perencanaan serta dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor maka rencana tindak lanjut yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi SDM Perpustakaan;
3. Meningkatkan koleksi perpustakaan yang *up to date*;
4. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri atau swasta;
5. Peningkatan Kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang pelayanan kearsipan;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan kearsipan;

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,

jika dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Lampiran o. Dinas Tenaga Kerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja 2025-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2026 (RPJMDP) yang tertuang dalam Perwali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dan penyusunan rencana kerja dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja yang optimal.

Rencana Kerja perubahan ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan strategi, program, kegiatan pencapaian Rencana Strategis dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA – PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka mencapai visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kota Bogor yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor yang merupakan panduan kerja yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD dan penyesuaian kebutuhan anggaran TA 2025, Dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian kinerja Triwulan II TA 2025.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka peranan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan pemberian otonomi daerah sejak tahun 2001.

Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dituntut memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan.

Kewenangan dan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Artinya sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewenangan, penyelenggara pemerintahan dituntut melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional agar Visi dan Misi Kota Bogor dan Dinas dapat terwujud penuh. Dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya penyelenggara pemerintahan harus sadar untuk tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada kebenaran dan kewajaran dalam proses pencapaiannya. Setiap upaya yang menggunakan sumberdaya masyarakat, perlu diselenggarakan secara transparan. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dan transparan akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dituntut untuk bersikap profesional. Salah satu wujud dari sikap adalah adanya kepekaan (daya-tanggap) dari para aparat dalam mengkaji berbagai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga dituntut mempunyai daya tanggap yang tinggi dalam memantau berbagai tindakan kepemerintahan di Disnaker, sehingga informasi balik yang diberikannya mempunyai ketepatan yang tinggi dan dapat efektif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor menyusun penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Disnaker Tahun 2025-2026 berupa Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada APBD Kota Bogor Tahun 2025 sebesar Rp.17.626.214.913 dan pada APBD Perubahan 2025 perubahan anggaran sebesar Rp. 23.095.458.315 sehingga total pagu perubahan 2025 sebesar Rp. 5.469.243.402 Dinas Tenaga Kerja dengan Urusan Ketenagakerjaan memiliki Program sebanyak 3 Program yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, Program Penempatan Tenaga Kerja 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, Program Hubungan Industrial 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 6 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pembangunan daerah dan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja, Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dsalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanhun Anggaran 2025
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 90 Tahun 2019 tentang Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor4 tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2017 Seri E).

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2017 Seri E).
26. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018);
27. Peraturan Walikota Bogor No. 172 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 172).
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor disusun dengan maksud :

a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor;
b. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh bidang – bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025;
c. Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Dinas Tenaga Kota Bogor yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
d. Menyesuaiakan penganggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tengang tentang Efisiensi Belanja dsalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor adalah:

a. Sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program – program dan kegiatan – kegiatan, sehingga program – program dan kegiatan – kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan;
b. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor;
c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor selama tahun 2025.
d. Untuk menyesuaiakan penganggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tengang tentang Efisiensi Belanja dsalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanhun Anggaran 2025 dalam meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKER SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Disnaker Kota Bogor

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Disnaker Kota Bogor

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKER KOTA BOGOR

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKER SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Disnaker Kota Bogor

Tabel 2.1
Capaian Indikator Tujuan Renstra 2025-2026

No	Indikator Tujuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,37%	10,78%	9,39%	8,13	8,05	Data capaian akhir Tahun

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 8.13% dari target 10.37%, dengan capaian 127.55%, dan jika Dibandingkan dengan tahun 2023 dengan TPT sebesar 9.39%, maka capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.26% dan jika dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah (RPJMD) dengan target TPT 10,37%, dibanding capaian Tahun 2024 ini telah mencapai 127.55%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor Tahun 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6.75 % serta capaian nasional sebesar 4.19%.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tiap tahun terus melakukan upaya melalui Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan terutama terkait maslaah pengangguran dengan memberikan pelayanan AK I melalui aplikasi bogorkerja.kotabogor.go.id secara gratis, pemberian pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, pemagangan, bimbingan jabatan, pemberian kerja sementara, bursa kerja, pengiriman transmigrasi, penyelesian perselisihan hubungan industrial dan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, dengan pelaku usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor bisa tercapai, dan pada akhir target TPT RPJMD Kota Bogor 10,37% bisa terwujud.

Bogor Motekar yang menjadi salah satu Janji Politis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2019-2024, Menciptakan 20.000 kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara Pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional, menjadi upaya Kota Bogor dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dimana tahun 2024 kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik formal dan informal sebanyak 5.012 pekerja, dimana telah dilaksanakan melalui kegiatan padat karya kegiatan konstruksi dan non konstruksi bagi masyarakat

yang belum pernah mendapatkan bantuan Pemerintah,Tenaga Kerja Mandiri, dan Pelatihan keterampilan bagi masyarakat sebanyak 2.015 pekerja (informal) dan penyerapan/kesempatan kerja melalui perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemagangan Mandiri sebanyak 2.997 (formal). Adapun capaian Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam mendukung Bogor Motekar pada Tahun 2020 Penyerapan/Kesempatan Kerja (Formal dan Informal) sebanyak 965 Orang, Tahun 2021 sebanyak 2.440, tahun 2022 sebanyak 7.005 Orang, tahun 2023 sebanyak 6.729 orang sehingga sampai Tahun 2024 penyerapan/kesempatan kerja mencapai 22.151 Orang dari Target Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebesar 12.500 Orang sampai Tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD Triwulan II

Dari susunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada Tahun 2025 telah membuat Rencana Kerja dan anggaran untuk 4 Program dan 13 kegiatan serta Sub Kegiatan mengalami penambahan 1 sub kegiatan menjadi 28, yang akan dilaksanakan dengan target yang ingin dicapai selama 1 tahun dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Perwali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
Pelayanan antar Kerja
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Perluasan Kesempatan Kerja
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Job Fair/Bursa Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
															I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)					
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				18.407.697.187			22.194.954.017		2.909.090.843		7.108.316.078		10.017.406.921		45,13 %
							PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
	2	**07**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**NA**	**NA**	**10.888.162.659**	**28,04**	**Point**	**10.694.541.020**	**- Point**	**2.531.440.344**	**- Point**	**2.636.695.652**	**- Point**	**5.168.135.996**	**- Point**	**48,32 %**

							KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah**	**NA**	**NA**		**25,00**	**Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**	
								Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	**NA**	**NA**		**12,91**	**Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**	
								Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	**NA**	**NA**		**22,70**	**Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**		**-Point**	
								Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**NA**	**NA**		**100,00**	**Persen**		**-Persen**		**-Persen**		**-Persen**		**-Persen**	
								Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	**NA**	**NA**		**100,00**	**Persen**		**-Persen**		**-Persen**		**-Persen**		**-Persen**	

								secara tepat waktu														
								Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	NA	NA		94,00	Persen		- Persen		- Persen		- Persen		- Persen	
								Persentase Kepatuhan Anggaran	NA	NA		100,00	Persen		- Persen		- Persen		- Persen		- Persen	
								Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	NA	NA		95,00	Persen		- Persen		- Persen		- Persen		- Persen	
								Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA		94,00	Persen		- Persen		- Persen		- Persen		- Persen	
								Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	NA	NA		87,11	Persen		3,83 Nilai		3,45 Nilai		- Nilai		- Persen	
								Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	NA	NA		88,75	Persen		3,83 Nilai		3,56 Nilai		- Nilai		- Persen	

								Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**NA**	**NA**		**88,38**	**Persen**		**3,87 Nilai**		**3,47 Nilai**		**- Nilai**		**- Persen**	
								Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**NA**	**NA**		**88,38**	**Persen**		**4,00 Nilai**		**3,43 Nilai**		**- Nilai**		**- Persen**	
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**NA**	**NA**	**6.695.000**	**100**	**%**	**12.000.000**	**100 %**	**1.955.000**	**- %**	**1.995.000**	**- %**	**3.950.000**	**- %**	**32,92 %**
								Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah	**NA**	**NA**		**100**	**%**		**- %**		**- %**		**- %**		**- %**	
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														

	2	07	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	6.695.000	10	Laporan	12.000.000	3 Laporan	1.955.000	2 Laporan	1.995.000	5 Laporan	3.950.000	50	32,92 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**NA**	**NA**	**8.731.699.257**	**100**	**%**	**8.868.696.541**	**%**	**2.034.414.900**	**- %**	**2.350.584.837**	**- %**	**4.384.999.737**	**- %**	**49,44 %**
								Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	**NA**	**NA**		**100**	**%**		**100 %**		**- %**		**- %**		**- %**	
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														

	2	07	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang	8.691.919.257	39	orang	8.821.416.541	39 Orang	2.022.694.900	34 Orang	2.338.764.837	34 Orang	4.361.459.737	100	49,44 %
	2	07	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	39.780.000	1	Laporan	47.280.000	1 Laporan	11.720.000	- Laporan	11.820.000	1 Laporan	23.540.000	100	49,79 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**806.379.344**	**100**	**%**	**505.306.407**	**100 %**	**80.219.000**	**100 %**	**77.404.060**	**100 %**	**157.623.060**	**100%**	**31,19 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	07	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	122.007.000	13	Paket	317.871.600	8 Paket	33.338.800	5 Paket	31.175.030	13 Paket	64.513.830	100	20,30 %

	2	07	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	18.691.200	2	Paket	20.035.200	1 Paket	3.104.400	- Paket	5.057.000	1 Paket	8.161.400	100	40,74 %
	2	07	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	51.040.000	4	Paket	38.163.607	3 Paket	26.458.800	1 Paket	3.720.000	4 Paket	30.178.800	100	79,08 %
	2	07	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	614.641.144	2	Laporan	129.236.000	1 Laporan	17.317.000	- Laporan	37.452.030	1 Laporan	54.769.030	100	42,38 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**52.010.160**	**100**	**%**	**89.486.800**	**100 %**	**88.445.000**	**-%**	**-**	**100 %**	**88.445.000**	**100 %**	**98,84 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	07	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	52.010.160	11	Unit	89.486.800	11 unit	88.445.000	- Unit	-	11 unit	88.445.000	100	98,84 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														

	2	**07**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**NA**	**NA**	**834.116.594**	**100**	**%**	**891.221.638**	**100 %**	**246.381.444**	**100 %**	**156.871.575**	**100 %**	**403.253.019**	**100%**	**45,25 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	07	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	151.361.818	4	Laporan	159.763.390	1 Laporan	34.662.828	1 Laporan	25.148.259	1 Laporan	59.811.087	50	37,44 %
	2	07	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	682.754.776	1	Laporan	731.458.248	1 Laporan	211.718.616	- Laporan	131.723.316	1 Laporan	343.441.932	100	46,95 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**NA**	**NA**	**457.262.304**	**100**	**%**	**327.829.634**	**100 %**	**80.025.000**	**100 %**	**49.840.180**	**100 %**	**129.865.180**	**100%**	**39,61 %**

							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	0 7	0 1	2	0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	138.598.280	4	Unit	75.228.870	1 unit	10.800.000	1 Unit	28.580.180	1 unit	39.380.180	50	52,35 %
	2	0 7	0 1	2	0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	68.060.000	135	Unit	95.495.764	16 unit	12.120.000	35 Unit	21.260.000	51 unit	33.380.000	37,78	34,95 %
	2	0 7	0 1	2	0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	250.604.024	2	Unit	157.105.000	1 Unit	57.105.000	- Unit	-	1 Unit	57.105.000	50	36,35 %
							PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														

	2	**07**	**03**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**	**3.253.003.128**	**100**	**%**	**5.111.531.700**	**- %**	**331.113.700**	**- %**	**1.641.149.991**	**- %**	**1.972.263.691**	**- %**	**38,58 %**
								Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	**8,08**	**%**		**30**	**%**		**- %**		**- %**		**- %**		**- %**	
								Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	**NA**	**NA**		**30**	**%**		**- %**		**- %**		**- %**		**- %**	
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**NA**	**NA**	**3.227.585.128**	**100**	**%**	**5.077.464.900**	**- %**	**331.113.700**	**- %**	**1.641.149.991**	**- %**	**1.972.263.691**	**- %**	**38,84 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														

	2	07	03	2	01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	458	orang	3.227.585.128	622	orang	5.077.464.900	- orang	331.113.700	220 orang	1.641.149.991	220 orang	1.972.263.691	35,37	38,84 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**03**	**2**	**02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**	**9.049.000**	**100**	**%**	**15.655.000**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	**- %**	**0%**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	07	03	2	02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	25	LPK	9.049.000	30	LPK	15.655.000	- LPK	-	- LPK	-	- LPK	-	0,00	0,00%
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														

	2	**0 7**	**0 3**	**2**	**0 4**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**	**16.369.000**	**100**	**%**	**18.411.800**	**- %**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**0%**	**0%**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	0 7	0 3	2	0 4	0 0 0 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30	Perusahaan	16.369.000	40	Perusahaan	18.411.800	- Perusahaan	-	- Perusahaan	-	- Perusahaan	-	0,00	0,00%
							PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
	2	**0 7**	**0 4**				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,45**	**%**	**4.141.280.000**	**94,65**	**%**	**6.284.722.197**	**361 %**	**45.931.599**	**29265%**	**2.798.496.835**	**31806%**	**2.844.428.434**	**336,04 %**	**45,26 %**
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**0 7**	**0 4**	**2**	**0 1**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha**	**5.012**	**orang**	**3.988.291.000**	**2.500**	**orang**	**6.096.184.573**	**722 Orang**	**3.030.000**	**916 Orang**	**2.784.283.635**	**1,638 Orang**	**2.787.313.635**	**66%**	**45,72 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														

	2	07	04	2	01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	NA	NA	-	40	orang	45.180.400	- Orang	3.030.000	- Orang	3.030.000	- Orang	6.060.000	0,00	13,41 %
	2	07	04	2	01	0002	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	202	orang	3.982.955.000	96	orang	19.218.800	20 Orang	-	1 Orang	11.374.400	21 Orang	11.374.400	21,88	59,18 %
	2	07	04	2	01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350	Orang	3.480.000	2.500	orang	20.268.800	- Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	0,60	0,00%
	2	07	04	2	01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	80	orang	1.856.000	25	orang	9.359.200	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00%

	2	07	04	2	01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	NA	NA	-	3128	orang	6.002.157.373	- Orang	-	1,428 Orang	2.769.879.235	1,428 Orang	2.769.879.235	45,65	46,15 %
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**04**	**2**	**03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.756**	**Lowongan**	**152.989.000**	**1.700**	**Lowongan**	**188.537.624**	**209 lowongan**	**42.901.599**	**183 Lowongan**	**14.213.200**	**392 Lowongan**	**57.114.799**	**23%**	**30,29 %**
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN														
	2	07	04	2	03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen	49.395.000	1	Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	39.249.999	- Dokumen	-	1 Dokumen	39.249.999	100%	98,12 %
	2	07	04	2	03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.173	Orang	99.308.000	3.000	orang	40.000.000	200 orang	3.651.600	313 Orang	14.213.200	513 Orang	17.864.800	17%	44,66 %

	2	07	04	2	03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	85	Orang	4.286.000	100	orang	108.537.624	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0 %	0,00%
							PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM														
	2	**07**	**05**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**	**125.251.400**	**100**	**%**	**104.159.100**	**- %**	**605.200**	**- %**	**31.973.600**	**- %**	**32.578.800**	**0 %**	**31,28 %**
								Penetapan Besaran UMK	**5.126.897**	**Rupiah**		**1**	**Keputusan**		**- Keputusan**		**- Keputusan**		**- Keputusan**		**0 %**	
							KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	**07**	**05**	**2**	**01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,61**	**%**	**109.585.500**	**73,9**	**%**	**68.256.300**	**%**	**605.200**	**%**	**15.157.000**	**%**	**15.762.200**	**%**	**23,09 %**

							(satu) Daerah Kabupaten /Kota															
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	0 7	0 5	2	0 1	0 0 0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	NA	NA	-	15	Perusahaan	55.034.500	- Perusahaan	605.200	33 Perusahaan	15.157.000	33 Perusahaan	15.762.200	220,00	28,64 %
	2	0 7	0 5	2	0 1	0 0 0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	NA	NA	-	2	Perusahaan	13.221.800	- Perusahaan	-	- Perusahaan	-	- Perusahaan	-	0,00	0,00%

	2	0 7	0 5	2	0 2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	100	%	15.665.900	100	%	35.902.800	- %	-	20 %	16.816.600	20 %	16.816.600	20%	46,84 %
							SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN														
	2	0 7	0 5	2	0 2	0 0 0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	NA	NA	-	15	Perkara	35.902.800	- Perkara	-	3 Perkara	16.816.600	3 Perkara	16.816.600	20%	46,84 %

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan realisasi anggaran Disnaker sampai dengan triwulan II atau semester 1 Tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Disnaker Kota Bogor sampai dengan semester 1 Tahun 2025 tersaji pada tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Disnaker Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Jumlah Perubahan (Rp)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Semester I (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**17.626.214.913**	**23.095.458.315**	**5.469.243.402**	**10.017.406.921**
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**28,04**	**Point**	**10.689.690.316**	**10.153.278.355**	**536.411.961**	**5.168.135.996**
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	**25,00**	**Point**				
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	**12,91**	**Point**				
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	**22,70**	**Point**				

	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100,00**	**Persen**				
	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100,00**	**Persen**				
	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	**94,00**	**Persen**				
	Persentase Kepatuhan Anggaran	**100,00**	**Persen**				
	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	**95,00**	**Persen**				
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94,00**	**Persen**				
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	**87,11**	**Persen**				
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**	**Persen**				
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**	**Persen**				
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**	**Persen**				
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**100**	**%**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**3.950.000**
	Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah	**100**	**%**				

SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	12.000.000	12.000.000	0	3.950.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**100**	**%**	**8.868.696.541**	**8.590.277.988**	**278.418.553**	**4.384.999.737**
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	**100**	**%**				
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang	8.821.416.541	8.542.997.988	278.418.553	4.361.459.737
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	47.280.000	47.280.000	0	23.540.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**650.092.407**	**253.246.837**	**396.845.570**	**157.623.060**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	Paket	317.871.600	65.871.600	252.000.000	64.513.830
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	20.035.200	20.035.200	0	8.161.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	38.163.607	38.163.607	0	30.178.800

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	274.022.000	129.176.430	144.845.570	54.769.030
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**89.486.800**	**89.486.800**	**0**	**88.445.000**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	89.486.800	89.486.800	0	88.445.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**891.221.638**	**793.433.646**	**97.787.992**	**403.253.019**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	159.763.390	159.763.390	0	59.811.087
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	731.458.248	633.670.256	97.787.992	343.441.932
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**	**178.192.930**	**414.833.084**	**236.640.154**	**129.865.180**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75.228.870	75.228.870	0	39.380.180

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	Unit	45.859.060	95.487.214	49.628.154	33.380.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	57.105.000	244.117.000	187.012.000	57.105.000
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**	**3.734.256.800**	**5.277.320.593**	**1.543.063.793**	**1.972.263.691**
	Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	**30**	**%**				
	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	**30**	**%**				
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100**	**%**	**3.677.000.000**	**5.243.253.793**	**1.566.253.793**	**1.972.263.691**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	637	orang	3.677.000.000	5.243.253.793	1.566.253.793	1.972.263.691
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**	**26.653.000**	**15.655.000**	**10.998.000**	**-**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	26	Lembaga	26.653.000	15.655.000	10.998.000	-
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**	**30.603.800**	**18.411.800**	**12.192.000**	**-**

SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30	Perusahaan	30.603.800	18.411.800	12.192.000	-
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,65**	**%**	**3.061.017.197**	**6.897.710.197**	**3.836.693.000**	**2.844.428.434**
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	2.500	orang	**2.947.479.573**	**6.709.172.573**	**3.761.693.000**	**2.787.313.635**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40	orang	65.985.400	45.180.400	20.805.000	6.060.000
Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96	orang	31.608.800	19.218.800	12.390.000	11.374.400
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.500	orang	31.608.800	20.268.800	11.340.000	-
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25	orang	16.119.200	9.359.200	6.760.000	-
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3391	orang	2.802.157.373	6.615.145.373	3.812.988.000	2.769.879.235
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.700**	**Lowongan**	**113.537.624**	**188.537.624**	**75.000.000**	**57.114.799**

SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**						
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen	40.000.000	40.000.000	0	39.249.999
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	orang	40.000.000	40.000.000	0	17.864.800
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	33.537.624	108.537.624	75.000.000	-
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**						
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**	**141.250.600**	**767.149.170**	**625.898.570**	**32.578.800**
	Penetapan Besaran UMK	**1**	**Keputusan**				
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,9**	**%**	**86.097.800**	**68.090.800**	**18.007.000**	**15.762.200**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	Perusahaan	66.561.000	54.869.000	11.692.000	15.762.200
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	19.536.800	13.221.800	6.315.000	-

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**55.152.800**	**699.058.370**	**643.905.570**	**16.816.600**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**						
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara	55.152.800	35.902.800	19.250.000	16.816.600
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.894	Orang	0	663.155.570	663.155.570	0
JUMLAH				**17.626.214.913**	**23.095.458.315**	**5.469.243.402**	**10.017.406.921**

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor selama Tahun 2025.

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Triwulan II Tahun 2025)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai IRB Dinas Tenaga Kerja	Nilai	82,00	85,73	104,53	85,75	Capaian akhir Tahun	-

Jumlah Anggaran Tahun 2025	: Rp. 10.689.690.316
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025	: Rp. 5.168.135.996
Presentase Anggaran Tahun 2025	: 48.32 %

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini tercerminkan dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2024 sebesar 104.54% yaitu dari target 82.00 dan terealisasi sebesar 85.73. IRB Dinas Tenaga Kerja diperoleh berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek capaian sasaran strategis sebesar 29.59 point, aspek capaian pelaksanaan kebijakan RB sebesar 18.21 point, aspek capaian strategi pelaksanaan RB Geberal sebesar 4.85 point, aspek strategi membangunan

RB Tematik sebesar 5.00 point, dan aspek capaian dampak RB tematik 26.39 point.

Pada Sasaran ini terdapat indikator kinerja berupa Tingkat Pencapaian penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Evaluasi LAKIP dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan target capaiannya sebesar 100% realisasi dengan poin 88.71 (A). Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh dokumen :

Tabel 2.5
Komponen Penilaian

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,68	27,60	28,04	27,60	-
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,00	26,10	25,00	25,50	-
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,08	11,55	12,91	12,60	-
4.	Evaluasi Internal	10	4,88	21,75	22,70	23,00	-
5.	Pencapaian Sasaran/	20	16,13				-
	Jumlah	**100**	**77,77**	**87,00**	**88,65**	**88,71**	**-**

Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan berupa :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini mempunyai out put berupa tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD berupa Laporan Tahunan sebanyak 10 laporan.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.950.000,- atau 32.92 %

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu peralatan dan bahan pembersih, alat kelistrikan, dan alat tulis kantor.

  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 317.871.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.513.830,- atau 20.30 %.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasionl perangkat daerah yaitu makan minum kegiatan.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 20.035.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.161.400,- atau 40.74%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu penggandaan/fotocopy dan kebutuhan barang cetak.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.163.607,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.178.800,- atau 79.08%.
- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan oeprasional perangkat daerah yaitu perjalanan dinas.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 274.022.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.769.030,- atau 42.38%.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 89.486.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.445.000 atau 98.84%

d. Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu layanan air, layanan internet, layanan listrik, dan layanan telepon.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.159.763.390,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.811.087,- atau 37.44 %.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu tersedianya pelayanan umum kantor.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 731.458.248,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 343.441.932,- atau 46.95 %.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan kendaraan dinas kantor
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.228.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.380.180,- atau 52.35 %.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan asset, computer/notebook, dan printer.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.859.060,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.380.000,- atau 34.95 %.
- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
  Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya.
  Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 57.105.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.105.000- atau 36.35 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Triwulan II Tahun 2025)
Meningkatnya Kesempatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	92,25	90,61	97,51	91,95	Capaian Akhir Tahun	-

Jumlah Anggaran Tahun 2025	: Rp. 3.061.017.197,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025	: Rp.2.844.428.434,-
Presentase Anggaran Tahun 2025	: 45.26 %

Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2023 dengan Realisasi 90,61% (jumlah yang bekerja 484.334 dibagi jumlah angkatan kerja 534.532 dikali 100%) dari Target 92,50, Indikator Sasaran Kinerja ini tidak mencapai Target namun bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 89,22% mengalami peningkatan dengan (jumlah yang bekerja 496.570 dibagi jumlah angkatan kerja 556.541 dikali 100%).

NO	PENDUDUK	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angkatan Kerja	529.003	556.541	534.532	561.986	Data akhir tahun
2	Penduduk yang Bekerja	466.645	496.570	484.334	516.284	Data akhir tahun

Dari Tabel diatas Tingkat Kesempatan Kerja salah satunya dipengaruhi oleh Jumlah Angkatan Kerja yang Tersedia, dimana terdapat peningkatan Angkatan Kerja dari Tahun 2023 ke 2024 sebesar 27.454 orang, peluang kesempatan Kerja bagi angkatan kerja menjadi berkurang, dan untuk meningkatkan tingkat kesempatan kerja untuk Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor terus meningkatkan pelayanan urusan ketenagakerjaan melalui Program dan Kegiatan untuk capaian target.

Pencapaian target Sasaran strategis dengan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penyerapan tenaga kerja

Bogor Sejahtera yang menjadi salah satu Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2025 - 2029, Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara Pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional, menjadi upaya Kota Bogor dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dimana tahun 2025 Dalam rangka peningkatan tingkat kesempatan kerja tahun 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan intervensi antara lain dukungan terhadap Misi Walikota 2025 -2029, melalui Bogor Sejahtera, untuk meningkatkan kesempatan/penyerapan tenaga kerja,pada Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai penyerapan tenaga kerja formal dan informal sebanyak 3.093 dimana 1.638 Orang (Formal) dan 1.455 Orang (informal), dan dengan melihat Pencapaian target 2024 mencapai 5.012 dengan rincian 2.997 penyerapan tenaga kerja formal dan 2.015 penyerapan tenaga kerja informal dari target 2.500 orang yang direncanakan dalam sesuai Renja 2024 dengan Tingkat Pencapaian 200.48%.Hal ini didukung dengan kegiatan Penempatan melalui laporan penempatan dari perusahaan sebanyak 117 orang, Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK sebanyak 140 orang, pelatihan keterampilan 264 orang, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1.800 orang, Pemagangan Mandiri 129 Orang, LPK di Kota Bogor sebanyak 487 Orang, dan Padat Karya Sebanyak 2.008 Orang, pemagangan yang difasilitasi BLK 24 orang, dan penempatan kerja dan wirausaha melalui pelatihan BLK sebanyak 43 orang. Janji Politis melalui bogor motekar dengan 20.000 kesempatan kerja capaian sampai akhir renstra 2019-2024 telah tercapai 22.151 kesempatan kerja atau 110.75%.

Sedangkan pencari kerja sesuai yang pendaftar kartu AK I di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor sebanyak 3.173 orang untuk tahun

2024 dan jumlah lowongan yang tersedia hanya 1.756 Lowongan dengan Penempatan melalui Laporan Perusahaan sebesar 202 orang.

Pencapaian ini didukung oleh faktor antara lain:

- Pendidikan,
- Tingkat Upah,
- Nilai Produksi,
- Investasi

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya,penganggur terdiri dari: (a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adanya pengangguran dapat menyebabkan masalah-masalah lain seperti terganggunya stabilitas perekonomian dan sosial-politik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2023 mencapai 9,39% dari target 10,56%, dengan capaian 112,56%, dan jika Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan TPT sebesar 10,78%, maka capaian tahun 2023 mengalami peningklatan sebesar 1,39% dan jika dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah (RPJMD) dengan target TPT 10,37%, disbanding capaian Tahun 2023 ini telah mencapai 110.45%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,44% serta capaian nasional sebesar 5,32

c) Pertumbuhan ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi secara total yaitu Domestik Bruto (PDB). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota, pertumbuhan produksi tersebut dapat dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan atau atas dasar harga berlaku. Jika PDRB diukur atas dasar harga berlaku, maka nilai tambah barang dan jasa dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan jika PDRB diukur atas dasar harga konstan, maka nilai tambah barang dan jasa tersebut ditunjukkan oleh perhitungan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dari Tahun 2022 PDRB Kota Bogor sebesar 33.372,48 dan Tahun 2023 meningkat menjadi 370.553.60.

d) Upah Minimum

Upah minimum didefinisikan sebagai suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik bagi karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman (social safety net) dan dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum didasarkan pada tiga indikator, yakni: 1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan; 2) pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan 3) inflasi atau kecenderungan kenaikan harga-harga umum pada barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus pada periode tertentu. Upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif. Peningkatan upah minimum akan mengakibatkan biaya produksi ikut meningkat juga. Jika output yang dihasilkan perusahaan tidak mengimbangi input yang dikeluarkan, pengusaha memiliki dua pilihan, yakni menyesuaikan input yang dikeluarkan dengan cara mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan atau meningkatkan harga barang yang diproduksinya. Kedua pilihan ini pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran, hal ini mempengaruhi TPT Kota Bogor, dimana adanya peningkatan UMK Kota Bogor 2023 sebesar Rp. 4.634.429 menjadi Rp 4.833.988 Tahun 2024 dan di Tahun 2025 sebesar Rp. 5.126.897

e) Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, baik aktif maupun non-aktif. Banyaknya pasokan angkatan kerja yang ada dalam perekonomian dapat dihitung dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Untuk pencapaian indikator TPT ditahun mendatang, diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara salah antara lain:

- satunya membuka pintu investasi di sektor riil sehingga banyak orang berusaha membuka lapangan kerja;
- pemerintah perlu menekan tingkat inflasi dengan menjaga kestabilan tingkat produksi dan menjaga keseimbangan harga harga di pasar agar iklim bisnis di Provinsi Jawa Barat bisa stabil;
- pemerintah lebih memperhatikan perhitungan angka upah yang diterapkan saat di Provinsi Dalam penetapan besar upah,
- pemerintah juga harus memperhitungkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga upah yang ditetapkan sesuai dengan tingkat upah yang ditetapkan dirasa sesuai.

Pelaksaan Program dan kegiatan dalam pencapaian target tersebut diatas dijelaskan melalui pelaksaannya sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

A. Pelayanan Antar Kerja

A.1.1 Bantuan ekonomi Transmigrasi

1. JENIS KEGIATAN

Monev Transmigrasi

Upaya monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan program transmigrasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan, baik bagi para transmigran maupun daerah tujuan transmigrasi.

Capaian Kegiatan:

- Pelaksanaan Monev Transmigrasi ke Kabupaten Simeuleu, Aceh terhadap transmigran Kota Bogor pada Bulan Oktober 2025 sebanyak 2 KK, 9 Jiwa berupa pemberian bantuan ekonomi Tahun 2025 sebesar Rp. 15 Juta/ KK

A.1.2 Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya)

Pelaksanaan

Agar dapat terlaksananya seluruh program Pemberian Kerja Sementara/Padat Karya Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor telah membentuk susunan tim administrasi kegiatan terdiri dari :

- 1 (satu) PPTK
- 2 (dua) orang pelaksana Panitia Sosialisasi
- 6 (enam) orang Pengawas/Petugas Monitoring

a. Hasil Pelaksanaan

Pemberian Kerja Sementara/Padat merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan sampai Triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan padat karya di 3 Kecamatan dan 35 Kelurahan dengan sasaran sebanyak 875 Orang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah pengganggur, tenaga kerja yang terkena dampak PHK

(Pemutusan Hubungan Kerja), dan masyarakat miskin ekstrem, khususnya yang berada di wilayah Kota Bogor

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pemberian Kerja Sementara/Padat Karya (Dana Insentif Fiskal) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2025 dilaksanakan di Kecamatan se-Kota Bogor dilaksanakan pada Bulan Juli 2025 untuk tahap 1 dan tahap 2 akan dilaksnakan pada Bulan Agustus 2025

2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

1. TUJUAN RAPAT

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk :

a. Terfasilitasinya para Penyandang Disabilitas dalam memperoleh manfaat pelindungan dan persamaan hak ketenagakerjaan
b. Tersampaikannya informasi pasar kerja dan pelatihan kerja
c. Terealisasinya pelaku usaha mempekerjakan para Penyandang Disabilitas

2. PELAKSANAAN

a. Pelaksanaak kegiata Unit Layanan Disabilitas akan dilaksnakan pada Tri wulan 3 Tahun 2025

3) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengurangi penganggur di Kota Bogor serta memberikan peluang bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja untuk saling bersinergi, serta mendorong perusahaan untuk dapat menggarap tenaga kerja dari Kota Bogor lebih diprioritaskan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ini secara umum bertujuan :

1. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan, serta kualifikasi pendidikan.
2. Membantu Perusahaan pengguna tenaga kerja (pengusaha) untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional sesuai dengan kebutuhan Perusahaan secara efektif dan efesien.
3. Mengurangi angka pengangguran melalui perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.
4. Melaksanakan kegiatan informasi pasar kerja dan pelaksanaan program Antar Kerja Lokal (AKL) , Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Untuk mencapai sasaran kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dapat terlaksana secara efektif dan efesien, maka secara teknis dalam pelaksanaan disusun perencanaan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
- Menyusun tim pelaksana
- Menyusun petunjuk pelaksanaan
- Menginventarisir data kebutuhan baik ATK, lowongan yang tersedia dan perusahaan yang terlibat.
- Mempersiapkan jobdesk pelaksanaan kegiatan

2. Tahap Pelaksanaan

Agar dapat terlaksananya seluruh program Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor telah membentuk susunan tim administrasi kegiatan terdiri dari:

- 1 (satu) Ketua
- 6 (enam) orang Anggota ASN
- 4 (empat) orang Anggota Non ASN

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka mengatasi/menanggulangi masalah pengangguran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah pengganggur, tenaga kerja yang terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), kegiatan ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya mereka diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan produktif.

Upgarding Website/Aplikasi

No.	Nama Aplikasi	Link	Sasaran
1.	Bogor kerja	https://bogorkerja.kotabogor.go.id/	Pencari Kerja (Masyarakat) Pemberi Kerja (Perusahaan) BKK

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume
1.	Pemeliharaan Website BogorKerja	1 Tahun
a.	Pemeliharaan layanan akses web BogorKerja	
b.	Layanan informasi untuk operator	
c.	Perbaikan bug minor pada web aplikasi	
d.	Pemeliharaan layanan webmail API	
e.	Optimalisasi data API	
	- (API Integrasi Internal Data)	

	- (API Integrasi Kemnaker)	
	- (API Google Login)	

Jumlah Pencari Kerja : 513 Orang
Jumlah Lowongan Pekerjaan : 392 Lowongan
Jumlah Penempatan Kerja : 21 Orang

Sasaran 3
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Triwulan II Tahun 2025)
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Pekerja/Tahun	76,50	75,47	98,65	76,5	Capaian Akhir Tahun	-

Jumlah Anggaran Tahun 2025	: Rp. 3.734.256.800,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025	: Rp. 1.972.263.691,-
Prosentase Anggaran Tahun 2025	: 38.58 %

Untuk capaian tingkat produktivitas tenaga kerja Tahun 2025 sampai Triwulan 1 Tahun 2025 belum ada capaian karenga angka tersebut tersaji pada akhir Tahun 2025. Untuk Capaian Tahun 2024 sebesar 75.47 juta/pekerja/tahun belum mencapai target 2024 sebesar 76.50 juta/pekerja/tahun hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pekerja sebesar 31.950 pekerja dibandingkan dengan pekerja tahun 2023 dengan capaian PDRB tahun 2024 sebesar Rp. 38.964.670.000, dengan tingkat capaian target 98.65% namun capaian tahun sebelumnya pada indikator sasaran Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator "Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja" adalah sebesar 76,50 dari target sebesar 71,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,75 %. Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik untuk Kota Bogor, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 37.055,36 dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 484.334, sehingga diperoleh tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 75,60. Adapun pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah melalui pelatihan berbasis kompetensi berupa Pelatihan hidroponik, Pelatihan tata boga, Pelatihan tata kecantikan rambut, dan

Pelatihan Desain Grafis dan dilanjutkan dengan uji kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 176 orang dan dilanjutkan dengan uji kompetensi.

Capaian tersebut belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 76.50% karena belum optimalnya kerja sama dengan perusahaan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga masih perlu dilakukan optimalisasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target indikator.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah :

1) **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**

Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sampai Triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan pelatihan tata boga, barista, desain grafis, barbershop, menjahit, tata rias wajah, digital marketing, servis ac, dan pelatihan las dan dilanjutkan dengan uji kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 320 orang dan dilanjutkan dengan uji kompetensi sebagai berikut

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Tata Boga	80 Orang
2	Pelatihan Barista	20 Orang
3	Pelatihan Desain Grafis	20 Orang
4	Pelatihan Barbershop	40 Orang
5	Pelatihan Menjahit	20 Orang
6	Pelatihan Tata Rias Wajah	20 Orang
7	Pelatihan Barista	40 Orang
8	Pelatihan Digital Marketing	40 Orang
9	Pelatihan Servis AC	20 Orang
10	Pelatihan Las	20 Orang
JUMLAH		**320 ORANG**

Sasaran 4
Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Analisis Pencapaian Sasaran 4 (Triwulan II Tahun 2025)
Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		% Target	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pesentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

Jumlah Anggaran Tahun 2025	: Rp. 86.097.800,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025	: Rp. 15.762.200 ,-
Presentase Anggaran Tahun 2025	: 23.09 %

Sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja indikator 1 "Pesentase kasus tenaga kerja yang terselesaikan" adalah sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan II Tahun 2025 persentase capaian kinerjanya adalah 50 % kasus yang masuk adalah 6 dan difasilitasi dan terselesaikan 3 kasus, 3 kasus sedang dalam proses.

Pencapaian target tersebut diatas di dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Persentase Kasus Ketengakerjaan yang terselesaikan

Penurunan Perselisihan Industrial di Kota Bogor pada Tahun 2025 mencapai 100% hal ini dimungkinkan karna didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang menciptakan keharmonisan pekerja dan perusahaan dan perselisihan / kasus yang masuk dapat diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama kedua belah pihak.

Pencapaian target program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

- **Mayday**

Mayday dilaksanakan tanggal 15 Mei 2025 D'Sawah Resort, Jl. Cilubang Mekar No.2, Kota Bogor, dengan Jumlah Peserta sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Dengan tema "Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional" dan Tag Line Mayday : "Mayday is Kolaborasi Day", May Day 2025 menjadi momentum kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Peringatan Hari Buruh dalam pelaksanaan kegiatan Mayday 2025 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, menjadi ajang dialog bagi serikat pekerja/serikat buruh. Dalam kegiatan ini,

Kepolisian dan DPC Serikat Pekerja Nasional menjadi pemateri atau narasumber. Pada kesempatan tersebut, ditekankan bahwa para pelaku usaha baik pekerja dan pengusaha harus memiliki pandangan jangka panjang akan keberlanjutan usaha. Tantangan ketenagakerjaan yang semakin berat, memerlukan antar pihak untuk saling bergandeng tangan agar kuat menghadapi segala bentuk tantangan sehingga mendorong keberlangsungan usaha yang tegak lurus dengan tumbuhnya peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, pihak BPJS Ketenagakerjaan menambahkan bahwa seluruh pekerja/buruh wajib mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dengan program-progamnya berpegang teguh dan aktif untuk membantu masyarakat dalam hal ini pekerja, untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak dan melanjutkan kehidupan ekonominya.

1. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   - **Kegiatan Dialog dan Pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan**

     Kegiatan Dialog dan Pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2025 Hotel Whiz Prime Pajajaran Bogor, Jl. Cikuray No. 47, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan Jumlah Peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan. Implementasi atas berlakunya peraturan tersebut perlu dipahami oleh pelaku usaha dan pekerja, utamanya pada pengaplikasiaannya di pengaturan syarat kerja dalam hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

     Dialog terbuka yang dihadirkan melalui kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha dan pekerja untuk mengajukan pertanyaan dan aspirasi dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya perlindungan hak-hak pekerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

TABEL 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Sebelum Perubahan (Rp)	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Penyesuaian Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**17.626.214.913**			
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**28,04**	**Point**	**10.689.690.316**	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**28,04**	**Point**
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	**25,00**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah**	**25,00**	**Point**
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	**12,91**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah**	**12,91**	**Point**
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	**22,70**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah**	**22,70**	**Point**
	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100,00**	**Persen**		**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100,00**	**Persen**

	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100,00**	**Persen**		**Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100,00**	**Persen**
	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	**94,00**	**Persen**		**Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah**	**94,00**	**Persen**
	Persentase Kepatuhan Anggaran	**100,00**	**Persen**		**Persentase Kepatuhan Anggaran**	**100,00**	**Persen**
	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	**95,00**	**Persen**		**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**95,00**	**Persen**
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94,00**	**Persen**		**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**94,00**	**Persen**
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	**87,11**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana**	**87,11**	**Persen**
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**	**Persen**
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**	**Persen**
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**	**Persen**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**	**Persen**
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**100**	**%**	**12.000.000**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**100**	**%**
	Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah	**100**	**%**		**Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**100**	**%**	**8.868.696.541**	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**100**	**%**
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	**100**	**%**		**Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang	8.821.416.541	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	47.280.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**650.092.407**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	Paket	317.871.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	20.035.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	38.163.607	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	274.022.000	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**89.486.800**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	89.486.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**891.221.638**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	159.763.390	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	731.458.248	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**	**178.192.930**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75.228.870	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	45.859.060	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	57.105.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**	**3.734.256.800**	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**
	Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	**30**	**%**		**Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi**	**30**	**%**
	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	**30**	**%**		**Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha**	**30**	**%**
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100**	**%**	**3.677.000.000**	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	622	orang	3.677.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	637	orang

KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**	**26.653.000**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	30	Lembaga	26.653.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	26	Lembaga
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**	**30.603.800**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40	Perusahaan	30.603.800	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30	Perusahaan
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,65**	**%**	**3.061.017.197**	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,65**	**%**
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	2.500	orang	**2.947.479.573**	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	2.500	orang
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40	orang	65.985.400	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40	orang
Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96	orang	31.608.800	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96	orang

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.500	orang	31.608.800	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.500	orang
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25	orang	16.119.200	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25	orang
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1442	orang	2.802.157.373	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3391	orang
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.700**	**Lowongan**	**113.537.624**	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.700**	**Lowongan**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen	40.000.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	orang	40.000.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	orang
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	orang	33.537.624	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**	**141.250.600**	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**
	Penetapan Besaran UMK	**1**	**Keputusan**		**Penetapan Besaran UMK**	**1**	**Keputusan**

KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,9**	**%**	**86.097.800**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,9**	**%**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	Perusahaan	66.561.000	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	Perusahaan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	19.536.800	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**55.152.800**	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi**	**100**	**%**
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara	55.152.800	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara

(satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.894	Orang
JUMLAH				**17.626.214.913**			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKER KOTA BOGOR

Sejalan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Tenaga Kerja sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan.

Program dan kebijakan nasional untuk Tahun 2025 - 2026 akan dilakukan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi makro, yang meliputi upaya-upaya untuk stabilitasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara umum pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam ketiga klaster tersebut berjalan dengan baik. Ada delapan arah kebijakan renstra Kemnaker pada 2019-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
2. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial (pendidikan vokasi) dan soft skills.
3. pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.
4. mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi tenaga kerja
5. menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).
6. meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
7. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik. Kedelapan, peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Untuk tahun 2025 kebijakan Dinas Tenaga Kota Bogor sejalan dengan program tersebut diatas dengan upaya penurunan angka pengangguran guna peningkatan mutu sumber daya dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan perbaikan kondisi ekonomi makro, yang meliputi upaya-upaya untuk stabilitasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Secara eksplisit Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor tidak lepas dengan kewenangan yang ada yaitu pembenahan aspek Sumber Daya Manusia, berupa :

1) Peningkatan mutu, keahlian dan keterampilan kerja;
2) Menyediakan informasi pasar kerja;
3) Meningkatkan jumlah penempatan dan perluasan kerja;
4) Meningkatkan permintaan kesempatan kerja;

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan batas akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya karena tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Adapun tujuan Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Mewujudkan kondisi kerja yang aman dan sehat sehingga tercipta produktivitas dan kesejahteraan pekerja;
4. Meningkatkan ekonomi keluarga transmigran serta menekan jumlah pengangguran.

Sasaran Strategis sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik , dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang waktu penyampaiannya jelas , berorientasi pada hasil nyata.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa serangkaian kebijakan dan program, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai misi yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025-2026 diarahkan kepada penurunan angka pengangguran, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan mutu tenaga kerja guna peningkatan sumber daya dan kesejahteraan sosial. Berikut ini akan dijelaskan keterkaitan dan keselarasan antara misi, sasaran serta pencapaiannya melalui kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam kurun waktu 2025-2026, sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja serta sarana dan prasarana pelatihan kerja;
2. Meningkatkan perluasan kerja dan kesempatan kerja.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam Hubungan Industrial
4. Meningkatkan kerjasama dengan daerah tujuan Transmigrasi agar lokasi tujuan Transmigrasi mempunyai akses yang baik dengan pusat perkonomian.

Tabel 3.1
Indikator Tujuan Tahun 2025
terhadap Target RPJMD 2025-2026

No	Indikator Tujuan	Capaian 2024	Target 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,13%	8,05%

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran.Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan

baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2025, terus melakukan upaya melalui Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan terutama terkait maslaah pengangguran dengan memberikan pelayanan AK I melalui aplikasi bogorkerja.kotabogor.go.id secara gratis, pemberian pelaihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, pemaganagan, bimbingan jabatan, pemberian kerja sementara, bursa kerja, pengiriman transmigrasi, pnyelesian perselisihan hubungan industrial dan melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 202 sebesar 805% bisa tercapai.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Tenaga Kerja	Nilai IRB di lingkungan Perangkat Daerah	85.75
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	91,95
3	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	76.50
4	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Presentase Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah secara umum di Kota Bogor mengalami perubahan paradigma terutama masalah Tenaga Kerja sehingga memberikan peluang untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor maka diirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa serangkaian kebijakan dan Program.

Berikut ini akan dijelaskan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Program yang dibiayai oleh APBD Kota Bogor, antara lain :

a. **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Swasta
3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

b. **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

c. **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;

d. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Sebelum Perubahan		Sebelum Perubahan (Rp)	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Sesudah Perubahan		Sesudah Perubahan (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**17.626.214.913**				**23.095.458.315**
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**28,04**	**Point**	**10.689.690.316**	**Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja**	**28,04**	**Point**	**10.153.278.355**
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	**25,00**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah**	**25,00**	**Point**	
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	**12,91**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah**	**12,91**	**Point**	
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	**22,70**	**Point**		**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah**	**22,70**	**Point**	
	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100,00**	**Persen**		**Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah**	**100,00**	**Persen**	
	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100,00**	**Persen**		**Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100,00**	**Persen**	
	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	**94,00**	**Persen**		**Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah**	**94,00**	**Persen**	

	Persentase Kepatuhan Anggaran	**100,00**	**Persen**		**Persentase Kepatuhan Anggaran**	**100,00**	**Persen**	
	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	**95,00**	**Persen**		**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**95,00**	**Persen**	
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94,00**	**Persen**		**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**94,00**	**Persen**	
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana	**87,11**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan sarana dan Prasarana**	**87,11**	**Persen**	
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	**88,75**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM**	**88,75**	**Persen**	
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	**88,38**	**Persen**		**Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan**	**88,38**	**Persen**	
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**88,38**	**Persen**		**Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan**	**88,38**	**Persen**	
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**100**	**%**	**12.000.000**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu**	**100**	**%**	**12.000.000**
	Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah	**100**	**%**		**Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	12.000.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**100**	**%**	**8.868.696.541**	**Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**100**	**%**	**8.590.277.988**
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	**100**	**%**		**Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu**	**100**	**%**	
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang	8.821.416.541	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang	8.542.997.988
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	47.280.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	47.280.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**650.092.407**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**253.246.837**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	Paket	317.871.600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	Paket	65.871.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	20.035.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	20.035.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	38.163.607	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	38.163.607
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	274.022.000	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	129.176.430
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**89.486.800**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintaha n sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**89.486.800**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	89.486.800	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	89.486.800
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**891.221.638**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**793.433.646**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	159.763.390	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	159.763.390
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	731.458.248	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	633.670.256
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**	**178.192.930**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur**	**100**	**%**	**414.833.084**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75.228.870	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	75.228.870

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	45.859.060	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	Unit	95.487.214
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	57.105.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	244.117.000
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**	**3.734.256.800**	**Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi**	**100**	**%**	**5.277.320.593**
	Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi	**30**	**%**		**Persentase Perusahaan yang Memiliki Produktivitas Tenaga Kerja Tinggi**	**30**	**%**	
	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha	**30**	**%**		**Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Mandiri yang Memliki Usaha**	**30**	**%**	
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100**	**%**	**3.677.000.000**	**Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**100**	**%**	**5.243.253.793**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	622	orang	3.677.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	637	orang	5.243.253.793
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**	**26.653.000**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100**	**%**	**15.655.000**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	30	Lembaga	26.653.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	26	Lemba ga	15.655.000
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**	**30.603.800**	**Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100**	**%**	**18.411.800**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40	Perusaha an	30.603.800	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	30	Perusa haan	18.411.800
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,65**	**%**	**3.061.017.197**	**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja**	**94,65**	**%**	**6.897.710.197**
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	2.500	orang	**2.947.479.573**	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	2.500	orang	**6.709.172.573**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40	orang	65.985.400	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	40	orang	45.180.400
Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96	orang	31.608.800	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96	orang	19.218.800
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.500	orang	31.608.800	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.500	orang	20.268.800

Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25	orang	16.119.200	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25	orang	9.359.200
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1442	orang	2.802.157.373	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	3391	orang	6.615.145.373
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.700**	**Lowongan**	**113.537.624**	**Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja**	**1.700**	**Lowongan**	**188.537.624**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**				**INDIKATOR SUB KEGIATAN**			
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen	40.000.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen	40.000.000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	orang	40.000.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3.000	orang	40.000.000
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200	orang	33.537.624	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	108.537.624
PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**				**INDIKATOR PROGRAM**			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**	**141.250.600**	**Persentase Rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**%**	**767.149.170**
	Penetapan Besaran UMK	**1**	**Keputusan**		**Penetapan Besaran UMK**	**1**	**Keputusan**	
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,9**	**%**	**86.097.800**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**73,9**	**%**	**68.090.800**
SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	Perusahaan	66.561.000	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	Perusahaan	54.869.000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	19.536.800	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	Perusahaan	13.221.800
KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**				**INDIKATOR KEGIATAN**			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**55.152.800**	**Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi**	**100**	**%**	**699.058.370**
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara	55.152.800	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15	Perkara	35.902.800

(satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.894	Orang	663.155.570
JUMLAH				**17.626.214.913**				**23.095.458.315**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat 1 (satu) urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah.

a. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Secara menyeluruh prioritas urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketenagakerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Urusan Ketenagakerjaan

Penanganan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, melalui 4 Program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Darah Kota/Kabupaten;
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
c. Program Hubungan Industrial.

Empat program ini diurai dengan berbagai kegiatan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Pelaksanaan urusan ini berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 5889 Tahun 2021.

Program – program dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 5889 Tahun 2021 ini menyesuaikan dengan program yang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

A. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 3 Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan ini bermaksud membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berkompetensi dengan kebutuhan dalam dunia Industri, pasar kerja dan dapat menciptakan peluang usaha mandiri, tujuannya Agar Pelaku Industri dapat menyerap alumni peserta BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan Agar Alumni BLK dapat membuka peluang usaha mandiri dengan rencana peserta 637 orang yang kemudian peserta pelatihan

tersebut dilanjutkan dengan Uji Kompetensi untuk membentuk sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berkompetensi dengan kebutuhan dalam dunia Industri, pasar kerja dan dapat menciptakan peluang usaha mandiri, tujuannya Agar Pelaku Industri dapat menyerap alumni peserta BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan Agar Alumni BLK dapat membuka peluang usaha mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelatihan selesai, tujuannya agar peserta yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, jika dinyatakan kompeten sesuai dengan bidangnya kegunaan sertifikat tersebut sebagai penunjang untuk melamar pekerjaan dan membuka usaha mandiri dan dalam sub kegiatan ini terdapat anggaran sebesar Rp. 5.243.523.793,-.

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Mutu Lembaga Latihan Swasta (LLS) guna menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan menekan angka pengangguran dengan anggaran Rp. 15.655.000,-.

3) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada perusahaan kecil tentang pelaksanaan konsultasi peningkatan produktivitas dengan anggaran Rp. 18.411.800,-

B. Program Penempatan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya SDM pelayanan antar kerja (pengantar kerja dan petugas antar kerja) yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi dengan anggaran Rp. 45.180.400,-

b) Pelayanan Antar Kerja

Pelayanan Antar Kerja dilaksanakan dengan tujuan membentuk Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan, terlaksananya pembekalan tenaga kerja mandiri disektor wirausaha, serta Pemberian kerja sementara dan dilaksanakan juga pengiriman transmigran asal kota bogor, kerja sama antar daerah tujuan transmigrasi. Adapun peserta transmigrasi akan diberikan

pelatihan dan keterampilan serta dilakukan pendampingan sampai ke lokasi transmigrasi, dengan anggaran Rp. 19.218.000,-.

c) **Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi memasuki dunia kerja. Membina pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada pada Lembaga Pendidikan baik Sekolah Menengah Kejuruan,Perguruan Tinggi maupun LPK dengan anggaran Rp. 20.268.000,-

d) **Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan**
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Informasi pelaksanaan/penerangan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disablitas Dengan anggaran Rp. 9.359.2000,-

e) **Perluasan Kesempatan Kerja**
Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan anggaran Rp. 6.615.145.373,-

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online dengan anggaran Rp. 40.000.000,-

b) **Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**
Kegiatan ini bertujuan pencarian lowongan pekerjaan ke perusahaan, lembaga pelayanan, penempatan tenaga kerja lain baik pemerintah maupun swasta dengan cara mengklarifikasikan kualifikasi pencari kerja menurut syarat jabatan, serta adanya pengembangan aplikasi bursa kerja. Pelaksanaan bursa kerja dengan target 3.000 orang dan tersedianya informasi data ketenagakerjaan, pembaharuan data serta menigkatan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi memasuki dunia kerja. Membina pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada pada lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi maupun LPK dengan anggaran Rp. 40.000.000,-.

c) **Job Fair/Bursa Kerja**
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja dengan anggaran Rp. 108.537.624,-

C. Program Hubungan Industrial

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan menjadi rujukan pertama untuk dasar penyelesaian apabila dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi perselisihan dengan anggaran 54.869.000,-

b) Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

Tujuan kegiatan ini adalah agar perusahaan menyusun perjanjian kerja bersama dengan anggaran Rp. 13.221.800,-

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur pengusaha dan pekerja adalah dalam rangka menjalin kerjasama dan komunikasi yang berkesinambungan, perselisihan dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan terencana dengan baik. mendapatkan pemikiran dan ide dari semua unsur untuk dapat disusun sebagai rekomendasi dari pokok-pokok pikiran yang sudah disimpulkan. Kegiatan ini dilakukan pemilihan pekerja teladan tingkat kota bogor dengan anggaran Rp. 35.902.800 -.

b) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tenaga kerja yang terdaftar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan yang menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja di Kab/Kota dengan anggaran Rp. 663.155.570

D. Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021, perangkat daerah melakukan pemetaani program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung program tersebut, perangkat daerah telah melakukan pemetaan.

Program ini dilaksanakan dengan 6 Kegiatan sebagai berikut:

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :
   a) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
      Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun, merencanakan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah. Laporan yang disusun terdiri dari LKPJ, LPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, dan Laporan Tahunan dengan anggaran Rp.12.000.000,-

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :
   a) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 5.542.997.988,-
   b) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 47.280.000,-

3) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :
   a) **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu peralatan dan bahan pembersih, alat kelistrikan, dan alat tulis kantor dengan anggaran Rp. 65.871.600,-
   b) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasionl perangkat daerah yaitu makan minum kegiatan dengan anggaran Rp. 20.035.200,-
   c) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu penggandaan/fotocopy dan kebutuhan barang cetak dengan anggaran Rp. 38.163.607,-
   d) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
      Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan oprasional perangkat daerah yaitu perjalanan dinas dengan anggaran Rp. 129.176.430,-

4) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu CCTV dan Kamera CCTV dengan anggaran Rp. 89.486.800,-

5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu layanan air, layanan internet, layanan listrik, , layanan telepon dengan anggaran Rp. 159.763.390,-

b) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah yaitu tersedianya pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp. 633.670.256,-

6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :

a) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan kendaraan dinas kantor dengan anggaran Rp. 75.228.870,-

b) **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan asset, computer/notebook, dan printer dengan anggaran Rp. 95.487.214,-

c) **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana prasarana aparatur yaitu pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 244.117.000,-

BAB IV
P E N U T U P

Dinas Tenaga Kerja Perubahan Kota Bogor untuk Tahun 2025 dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) telah mengupayakan menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025-2026. Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025 merupakan kelanjutan Renstra-SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025-2026, namun dalam penyusunan program dan kegiatan mengalami perubahan disesuaikan dengan penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025, dan target yang akan dicapai tetep mengaju pada Rentra 2025 - 2026. Renja 2025 ini dilakukan penyesuaian karena adanya perubahan pagu Anggaran kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian termasuk target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja Perubahan Kota Bogor Tahun 2025 maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dan dapat bertanggungjawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2025 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu mendapat ridho Allah SWT Amin.

Lampiran p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang saat ini disebut Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus dibuat dan disusun untuk periode tahunan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Di dalam sistem perencanaan daerah, renja memiliki peran dan fungsi yang sangat penting karena didalamnya tertuang perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan sehingga diperlukan perubahan di dalam Renja Perangkat Daerah.

Diundangkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa nuansa baru dalam sistem perencanaan daerah, dimana dengan adanya pengaturan tentang klasifikasi dan nomenklatur urusan, program dan kegiatan hingga sub kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat terjadinya integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya dapat mendukung terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah terus menerus memperbaharui kebijakan penganggaran, dengan adanya perubahan regulasi tersebut tentu saja berdampak terhadap struktur anggaran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga pada Dokumen Perubahan Rencana Kerjan Tahun 2025 ini dilakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dokumen Perubahan Renja (Rencana Kerja) 2025 adalah dokumen yang memuat perubahan atas rencana kerja perangkat daerah untuk tahun 2025. Pereubahan ini bisa meliputi penyesuaian program, kegiatan, target kinerja, maupun pendanaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Dokumen Perubahan renja 2025 juga tetap mengacu kepada Renstra (Rencana Strategis) daerah Tahun 2025-2026 dan RPD (Rencana Pembangunan Derah). Dokumen ini juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka adaptasi serta penyesuaian terhadap adanya perubahan kebijakan dari pusat hingga daerah serta hasil evaluasi pencapaian kinerja dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi kinerja tahun berjalan pada periode yang sudah dilewati dengan rencana pencapaian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini dilakukan dengan berlandaskan pada beberapa peraturan. Adapun landasan normatif penyusunan Perubahan

Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 23 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah pasal 360 dan pasal 361 ayat 3;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tugas, Funggsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor antara lain :

- Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan menggunakan pendekatan kinerja yang berdasar pada hasil evaluasi renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
- Memberikan gambaran informasi Program, Kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tahun 2025 maupun rencana perubahan Tahun 2025 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan (RKA-P) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025;
- Adanya dokumen perencanaan yang di susun sebagai bentuk penyesuaian dan penyelarasan terhadap perkembangan situasi dan kondisi serta keadaan di Kota Bogor pada tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 adalah :

- Menjamin tersusunnya rencana dan program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang terukur didasarkan pada hasil evaluasi secara berkala;
- Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sasaran Strategis Visi dan Misi pasangan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2030;

- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Disdukcapil Tahun 2025. Selain itu memuat juga maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja, disertai analisis terhadap kinerja pelayanan dan paparan atas permasalahan yang dihadapi dan solusi di dalam melaksanakan Renja Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan teknis DISDUKCAPIL Kota Bogor disertai rencana program dan kegiatan Tahun 2025 serta Prioritas Usulan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2030

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sesuai dengan tugas pokonya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Bogor di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Pembangunan di bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksana program dan disusun oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggararakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependududkan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan Tugas laimn yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja untuk tahun 2025 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah melaksanakan berbagai sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut, didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan 2 (dua) dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025, melaksanakan 4 Program Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.485.547.372,- dengan realisasi anggaran s.d semester II Tahun 2025 sebesar Rp. 9.351.751.768,- atau 53.48%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan 2 (dua) disebabkan kerena terdapat beberapa

kegiatan yang belum terealisasi anggarannya salah satunya Satuan harga di SIPD lebih besar daripada harga satuan di E-Katalog, Dana Insentif Fiskal (DIF) yang belum terealisasi semua dan kegiatan yang anggarannya baru dilaksanakan di triwulan 3 (tiga) tetapi secara fisik telah dilaksanakan di triwulan 2 (dua). Adapun capaian dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor s/d Triwulan II Tahun 2025

Kode						**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2025**			**Realisasi Persentase**
							APBD Tahun 2025	**Target**	**Realisasi (Rp)**	
1						***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
2	**1 2**					**URUSAN PEMERINTAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**17.485.547.372**		**9.351.751.768**	**53,48%**
2	**1 2**	**0 1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.073.264.930**	**100%**	**6.828.226.768**	**48.52%**
2	**1 2**	**0 1**	**2**	**0 1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**113.816.500**	**6 Laporan**	**7.263.600**	**6.38%**
2	1 2	0 1	2	0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.816.500	6 Laporan	7.263.600	6.38%
2	**1 2**	**0 1**	**2**	**0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.488.077.388**	**52 Org/bln**	**5.404.630.138**	**51.53%**
2	1 2	0 1	2	0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.439.504.588	52 Org/bln	5.377.590.138	51.51%
2	1 2	0 1	2	0 2	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	48.572.800	19 Laporan	27.040.000	55.67%
2	**1 2**	**0 1**	**2**	**0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**416.542.300**	**100%**	**296.623.805**	**71.21%**

2	12	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.388.300	1 Paket	17.145.200	98.60%
2	12	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.784.500	1 Paket	18.520.700	45.41%
2	12	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.469.900	1 Paket	175.482.000	98.33%
2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.289.400	1 Paket	0	0
2	12	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.855.200	12 Bulan	20.785.000	35.93%
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.755.000	12 Bulan	64.690.905	61.75%
2	**12**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**750.330.500**	**100%**	**271.862.800**	**41.19%**
2	12	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.330.500		271.862.800	41.19%
2	**12**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.846.026.848**	**100%**	**721.137.093**	**39.06%**
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.159.720	12 Laporan	118.014.851	44.01%
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.577.867.128	12 Laporan	603.122.242	38.22%
2	**12**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**548.717.294**	**100%**	**126.709.332**	**23.09%**
2	12	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Lapangan	178.973.325	17 Unit	39.800.000	22.24%
2	12	01	2	09	00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	234.010,000	1 Unit	25.559.332	10.92%

					09	Kantor dan Bangunan Kantor				
2	12	01	2	09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.733.969		61.350.000	45.20%
2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**2.720.044.000**	**100%**	**2.523.525.000**	**92.78%**
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.631.700	100%	0	0
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.631.700	100%	0	0
2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.704.412.300	1 Laporan	2.523.525.000	93.31%
2	12	02	2	03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.704.412.300	1 Laporan	2.523.525.000	93.31%
2	**12**	**03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**140.889.700**	**100%**	**0**	**0**
2	**12**	**03**	**2**	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**60.562.000**	**100%**	**0**	**0**
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.562.000	515	0	0
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Penting	0	0	0	0
2	**12**	**03**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**80.327.700**	**1 Laporan**	**0**	**0**
2	12	03	2	01	0006	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	80.327.700	1 Laporan	0	0
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**551.348.742**	**%**	**0**	**0**
2	**12**	**04**	**2**	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan**	**483.798.800**	**4 Laporan/**	**0**	**0**

						Penyajian Database Kependudukan		**Data**		
2	1 2	0 4	2	0 1	0 0 0 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.527.300	1 Dok	0	0
2	1 2	0 4	2	0 1	0 0 0 3	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	421.271.500	3 Laporan	0	0
2	**1 2**	**0 4**	**2**	**0 3**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**67.549.942**		**0**	**0**
2	1 2	0 4	2	0 3	0 0 0 7	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	67.549.942	10 Laporan	0	0
						JUMLAH	**17.485.547.372**		**9.351.751.768**	**53.48%**

Sumber Data RKPD Triwulan II Tahun 2025

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, **Sub Kegiatan :**
   Evaluasi Kinerja Perangkat daerah , masih belum tercapai dimana untuk pelaksanaan belanja Jasa Audit *Suveillance*/Perpanjangan ISO baru dilaksanakan di bulan Juli 2025, sesuai anggaran kas yang seharusnya dilaksanakan di bulan Juni 2025. Adapun pada belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei proses kegiatan sudah dilaksanakan dengan keluaran dokumen Laporan Semester I dan pencairan dilakukan per termin I dan II, pada termin I proses pencairan dilakukan pada bulan Juli 2025 dan termin II dilakukan pada bulan Nopember 2025;
   b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Sub Kegiatan :**
   Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya, anggaran Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diberikan dari Dana APBD untuk pembaharuan Data sebesar Rp. 369.169.000 untuk :
   Belanja Bahan Komputer Rp. 18.270.200,-
   Belanja Modal Power Supply Rp. 147.768.800,-

Belanja Personal Computer Rp. 203.130.000,-

Rp. 369.169.000,-

Diberikannya Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk menunjang terlaksananya, MISI 1 : BOGOR CERDAS yang merupakan janji Politik untuk membuat Aplikasi Pembaharuan Data dalam pembaharuan/pemutakhiran Data *Valid* untuk digunakan di Kota Bogor sebesar Rp. 648.092.100,- dan akan ditambahkan pada perubahan anggaran 2025, dimasukan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah.

Sampai dengan Triwulan II belum tercapai, hal ini dikarenakan

1. Terkendalanya dengan e-Katalog versi 6, sehingga semua pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor terlambat dalam penyerapan anggaran kegiatan/ belum sepenuhnya *On The Track* termasuk Dana Insetif Fiskal (DIF) yang diberikan untuk membangun Big Data/Pemutakhiran Data Valid yang merupakan salah Satu Janji Politik arahan Wali Kota Bogor, menunjang pada misi BOGOR CERDAS.
2. Terjadinya Peralihan PPK, SK Nomor : 027/11-PPK.Disdukcapil-tahun 2025 tanggal 08 Mei 2025 dan PPTK, SK Nomor :027/17-PPTK.Disdukcapil-Tahun 2025;

2. Pada Program Pendaftaran Penduduk, ;
   Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk,, **Sub Kegiatan :**
   Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 15.631.700,- s.d Triwulan II belum dapat diserap dikarenakan penyerapan anggaran kas dilakukan pada triwulan IV, keluaran (output) hasil : Cetak Buku Data Penduduk Non Permanen sebanyak 67 buku yang dihasilkan
3. Pada Program Pencatatan Sipil :
   a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, **Sub Kegiatan :**
      - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting sebesar Rp. 60.562.000,- s.d Triwulan II belum dapat diserap dikarenakan anggaran kas baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV, Keluaran (output) hasil : Jilid Buku Register Pencatatan Sipil sebanyak 558 buah
      - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, tidak ada penyerapan anggaran kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, **Sub Kegiatan :**

Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil sejumlah Rp. 80.327.700,- s.d Triwulan II tidak dapat diserap dikarenakan nilai satuan pada SIPD lebih besar dari nilai satuan yang ada di e-katalog, sudah melakukan pergeseran anggaran dan baru dapat diserap di perubahan anggaran pada Triwulan III.

4. Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, **Sub Kegiatan :**
      - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebesar Rp. 62.527.300,- s.d Triwulan II pada belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - Sofware kegiatan sudah dilaksanakan dari bulan Maret s.d Juni 2025, Proses pencairan baru akan di serap minggu ke 3 bulan Juli 2025;
      - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 421.271.500,- diataranya digunakan untuk :
        - ✓ Dana Insentif Fiskal (DIF) :

          Belanja Sewa Komputer Jaringan, Langganan Jasa Layanan Komputasi Awan Rp. 96.300.000,-

          Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, Jasa Pembuatan Aplikasi Dasboard Kependudukan Rp. 98.793.100,-

          Belanja Jasa Pembuatan *Application Programming Interface* Kependudukan Rp. 83.830.000,-

          Jumlah : Rp. 278.923.100,-

          Diberikannya Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk menunjang terlaksananya, MISI 1 : BOGOR CERDAS yang merupakan janji Politik untuk membuat Aplikasi Pembaharuan Data dalam pembaharuan/pemutakhiran Data Valid untuk digunakan di Kota Bogor sebesar Rp. 648.092.100,- dan akan ditambahkan pada perubahan anggaran 2025, dimasukan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah.

          sampai dengan Triwulan II belum dapat diserap dikarenakan :

          1. Terkendalanya dengan e-Katalog versi 6, sehingga semua pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor terlambat dalam penyerapan anggaran kegiatan/ belum sepenuhnya *On The Track* termasuk

Dana Insetif Fiskal (DIF) yang diberikan untuk membangun Big Data/Pemutakhiran Data Valid yang merupakan salah Satu Janji Politik arahan Wali Kota Bogor, menunjang pada misi BOGOR CERDAS.

Terjadinya Peralihan PPK , SK Nomor : 027/11-PPK.Disdukcapil-tahun 2025 tanggal 08 Mei 2025 dan PPTK, SK Nomor :027/17-PPTK.Disdukcapil-Tahun 2025;

✓ Belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Fotocopy	Rp.	1.164.800,-
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp.	2.420.000,-
Honorarium Pengadaan B/J	Rp.	3.780.000,-
Belanja Pemeliharaan Aset Sofware Aplikasi Pakuan Prima dan Sitanduk Wilayah	Rp.	134.983.600,-
JUMLAH	**Rp.**	**142.348.400,-**

kegiatan sudah dilaksanakan dari bulan Maret s.d Juni 2025, Proses pencairan baru akan di serap minggu ke 3 bulan Juli 2025;

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, **Sub Kegiatan :**
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat sebesar Rp. 67.549.942,- sampai dengan triwulan II kegiatan ini sudah dilaksanakan dilaksanakan namum pencairan belum terealisasi dan baru akan dicairakan minggu ke 4 bulan juli 2025

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Indikator KinerjaPelayanan Disdukcapil Kota Bogor
s.d Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Capaian Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Indikator Kinerja (%)			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%	Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah Penduduk Kota Bogor dikali 100%
		Persentase Cakupan Perekaman E-KTP	%	100%	100%	100%	Jumlah Penduduk Wajib KTP Elektronik yang sudah direkam dibagi Jumlah pemohon Wajib KTP dikali 100%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pendataan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	%	99.20%	98.72 %	98.72%	Jumlah data anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah keseluruhan data BNBA anak Usia 0-18 tahun dikali 100%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	65%	60.20 %	60.20%	Jumlah Rumah Tangga Non Muslim yang memiliki Akta Perkawinan dibagi Jumlah Penduduk Non Muslim yang sudah menikah di Kota Bogor dikali 100%

	PROGRAM PENGENDALIAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	60.87%	55.55 %	55.55%	Jumlah Permohonan Penyajian Data yang di proses sesuai SOP dibagi Jumlah Permohonan penyajian data yang masuk dikali 100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai	92.50	91.71	91.71	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	Nilai	93	95.39	95.39	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan	Nilai	96	97.19	97.19	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	98.50	98.13	98.13	

Berdasarkan data pada Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa realisasi kinerja Indikator Pelayanan pada Triwulan II tahun 2025 telah menunjukan angka capaian yang baik dan sesuai target. Sehingga untuk mencapai indikator kinerja s.d Triwulan IV diperkirakan tidak akan terlalu mengalami kesulitan untuk pencapaian dan realisasi kinerja triwulan berikutnya. Evaluasi hasil capaian tujuan/ sasaran Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 di atas merupakan evaluasi hasil Renja sampai degan Triwulan II tahun 2025.

Adapun Pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor s.d Triwulan II diantaranya:

1. **PROGRAM KEGIATAN PENDAFTARAN PENDUDUK**
    1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mencangkup didalamnya :

a. Pelayanan Jemput Bola (Jempol Bahagia)
b. Pelayanan Goes To School
c. Layanan Sore Malam (LSM)
d. Layanan SOS

Layanan ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, untuk sarana penunjang Peugas Lapangan makan dan minum dianggarkan pada sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu. Dan untuk Rencana Tahun 2026 akan dimasukan ke Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.300.000

2. **PROGRAM KEGIATAN PENCATATAN SIPIL**

1. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Mencangkup didalamnya :

a. Layanan Palu Sakti
b. Service On Day Pengadilan
c. Layanan LAPAK CAPIL, dan even-even kegiatan yang diselenggarakan oleh Kota Bogor

Layanan ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, untuk sarana penunjang Peugas Lapangan makan dan minum dianggarkan pada sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu. Dan untuk Rencana Tahun 2026 akan dimasukan ke Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatanb Sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.685.600,-

Fasilitasi layanan Jemput Bola yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor merupakan Janji Politik Wali Kota Bogor Periode Tahun 2025-2029 masuk pada Misi I “Bogor Sehat” kepada

Masyarakat Kota Bogor dan akan ditingkatkan lagi dengan rencana anggaran pembelian Mobil Pelayanan yang sangat bermanfaat untuk memberikan kemudahan akses layanan Adminduk bagi Masyarakat yang berada di daerah terpencil/ memiliki keterbatasan mobilitas dan memudahkan dalam meberikan pelayanan Jemput Bola, juga dapat digunakan untuk even kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bogor sebagai sarana sosialisasi berinteraksi kepada Masyarakat langsung untuk menyampaikan informasi-informasi,

penyuluhan Administrasi Kependudukan, Pada Anggaran Perubahan akan dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran data/membuat Big Data yang sangat berguna magi pemerintah Kota terutama bagi Masyarakat Kota Bogor sehingga Kota Bogor akan memiliki data Update dan dapat mendukung kegiatan kegiatan yang ada di Kota Bogor.

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)

1. Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

   Mencangkup didalamnya :

   Pengumpulan, pengklasifikasian dan pemutakhiran data kependudukan berbasis NIK yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah di berbagai sektor (Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial, infastruktur dan lainnya), bertujuan untuk :

   - Menyediakan data kependudukan uang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
   - Memfasilitasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data;
   - Mendukung integrasi data sektoral dengan data kependudukan nasional.

   Ruang Lingkup Kegiatan :

   - Inventarisasi dan pemetaan kebutuhan data dari perangkat daerah dan instansi terkait
   - Pengumpulan data kependudukan dari database SIAK;
   - Klasifikasi data (Agregat dan Individu) sesuai variable pembangunan;
   - Pemutakhiran data secara berkala untuk mengantisipasi perubahan demografi;
   - Penyajian data dalam bentuk laporan, table, infografis atau dashboard;
   - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan perangkat daerah pengguna data.

   Output yang dikeluarkan :

   - Database Kependudukan yang terinventarisasi dan terdokumentasi
   - Laporan hasil inventarisasi data kependudukan untuk pembangunan daerah

- Tersedianya data yang siap digunakan untuk analisis kebijakan publik

Indikator Kinerja :

✓ Persentase Kelengkapan data yang terinventarisasi

✓ Jumlah Perangkat daerah yang memanfaatkan data hasil inventarisasi

Pada Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai arahan Wali Kota Bogor dan untuk menunjang Janji Politik pada MISI 1 'BOGOR CERDAS" Dinas Kependudukan dan Pencatatan berencana untuk membuat Big Data/pemutakhiran data, yang dilatarbelakangi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana data kependudukan memegang peranan strategis sebagai *primary key* dari seluruh basis data yang digunakan oleh berbagai organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disebabkan oleh keadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai representasi dari *Single Identity Number* (SIN), yaitu Nomor Identitas tunggal yang melekat pada setiap individu di Indonesia. NIK memungkinkan sinkronisasi data lintas sektor secara efektif dan efisien, serta menjadi landasan validasi berbagai layanan publik dan proses pengambilan kebijakan. Kegiatan Pemutakhiran Data /Big data yang sebelumnya pada Tahun 2025 telah memperolaeh Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp. 648.092.100, yang di anggarakan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp. 290.915.600, dan Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 342.348.400,- (anggaran terserap pada triwulan 3 bulan juli 2025) dan sisa anggaran kegiatan diberikan pada Perubahan Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.426.413.100,-

Pelaksanaan Kegiatan penguatan system informasi administrasi kependudukan, pemutakhiran data serta penyediaan infastruktur dan Integrasi data (Big Data/Pemutakhiran Data) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki dasar hukum yang kuat dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 58 ayat (4) "Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara nasional dan terintegrasi" dan psal 63 ayat (3) "Data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, termasuk

pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminalisasi”

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menegaskan perlunya :
   Interoperabilitas dan integrasi data antar sector pemerintahan
   Penunjukan Disdukcapil sebagai walidata sectoral untuk data kependudukan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, yang memberikan kewenangan kepada Instansi pelaksana untuk :
   - Memberikan layanan verifikasi dan validasi data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
   - Menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan OPD secara sah dan sesuai prosedur
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring yang mengatur bahwa :
   - Setiap layanan administrasi kependudukan dapat diselenggarakan secara online untuk mendukung efektifitas, efisiensi dan kemudahan layanan public
   - Disdukcapil daerah didorong mengembangkan inovasi pelayanan berbasis tekhnologi informasi
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yang memberikan arahan kepada instansi pemerintah untuk :
   - Menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan system dan data pemerintah melalui penguatan infastruktur keamanan digital;
   - Melakukan Backup, perlindungan system dan pengelolaan teknologi informasi secara aman dan berstandar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa :
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
   - Kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pengelolaan data dan system informasi adalah bagian dari tugas dan fungsi Disdukcapil daerah
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RPJMD 2025-2029 yang

mengamanatkan transformasi digital layanan public, penguatan kebijakan berbasis data serta integrasi system informasi antar perangkat daerah.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaran tugas dan Fungsi Disdukcapil Kota Bogor

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Perubahan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025. Adanya kebijakan pemerintahan dalam hal efisiensi anggaran sangat berpengaruh dan berdampak terhadap kinerja pelayanan, Dimana mereka dituntut langsung beradaptasi secara cepat didalam pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Kependudukan menjadi dasar dari semua pelayanan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan untuk dapat mengakses berbagai bantuan sosial dan kebutuhan lainnya yang semuanya berdasarkan pada NIK (Nomor Identitas Kependudukan). Hal tersebut menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus memberikan melayani masyarakat dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan.

Dari berbagai telaahan dan analisa yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor antara lain sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya sarana dan prasaranan pendukung pelayanan;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta kompetensi SDM pelaksana/aparatur penyelelnggara pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Masih banyaknya ketidakpahaman masyarakat Kota Bogor dalam menggunakan Aplikasi Online ataupun daftar online, mereka lebih senang datang langsung dan meminta bantuan pelayanan di Disdukcapil Kota Bogor, sehingga masih banyak masyarakat yang menunggu di Disdukcapil Kota Bogor;
4. Belum Optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan Perangkat

Daerah/Kecamatan/Kelurahan sebagai database terpadu (Rumah Data/Satu Data Kependudukan) berskala Kota Bogor;

Kegiatan ini memiliki dampak strategis terhadap transformasi digital Disdukcapil Kota Bogor, antara lain :

- Meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan;
- Memperkuat system satu data berbasis NIK yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD
- Mendukung upaya pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan daerah
- Mempercepat layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat;
- Memberikan jaminan keberlanjutan dan keamanan system informasi yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Untuk menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki beberapa solusi dan telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan anggaran 5 (lima) tahun kedepan terkait pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk menunjang dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Administrasi Kependudukannya serta memberikan kenyamanan fasilitasi Ketika mereka harus datang ke Kantor Disdukcapil Kota Bogor;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Petugas Pelayanan dengan melalkukan Upaya pengajuan usulan untuk penambahan aparatur pelayanan yang berstatus PNS atau PPPK;
3. Dengan teranggarkannya Mobil Pelayanan untuk memudahkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, berinteraksi secara langsung pada saat adanya kegiatan even-even dikota Bogor, bagaimana menggunakan aplikasi online “PRIMA ANTRI”. Juga menyampaikan adanya fasilitas Layanan Inovasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat seperti :
    1. PAKUAN PRIMA
       Pelayanan Administrasi Kependudukan Praktis, Inovatif dan Melayani
    2. Pengantaran GO-Send

Pengantaran Dokumen melalui Go-Send

3. DRIVE THRU (LANTATUR)

   Layanan Tanpa Turun bagi Masyarakat yang membutuhkan layanan cepat

4. PRIMA ANTRI

   Layanan Antrian Online melalui situs resmi Disdukcapil Kota Bogor

5. JEMPOL BAHAGIA

   Jemput Bola Layanan Bogor Adminduk pagi Masyarakat disabilitas, orang sakit, Lansia dll (berkebutuhan Khusus) penuh kehangatan, Gercep, Inklusif dan Setia;

6. PALU SAKTI

   Pelayanan Luar Kantor Sidang Keliling Terintegrasi;

7. LAPAK CAPIL

   Layanan Penuhi Akta Pencatatan Sipil;

8. Sampurasun Disdukcapil

   Layanan Konsultasi dan Informasi Adminduk Kependudukan yang dapat di akses Masyarakat Kota Bogor melalui *Whatssap* resmi Disdukcapil Kota Bogor;

9. LSM Dukcapil

   Layanan Sore Malam yang memberikan pelayanan diluar jam kerja, khususnya pada sore ;hingga malam hari

10. Laksa Pedas dan Lapis Bogor

    Kolaborasi antara Disdukcapil Kota Bogor dan Pengadilan Negeri;

11. Goes To School

    Program Jemput Bola bagi Pelajar Usia 16-17 Tahun langsung di lingkungan sekolah;

12. OBRAS

    Obrolan Rabu Sore melalui Instagram sebagai sarana diskusi Santai antara Disdukcapil Kota Bogor dan Masyarakat terkait Adminduk;

13. Sitanduk Wilayah

    Aplikasi Kewilayahan untuk visualisasi Data Agregat Kependudukan di Tingkat kecamatan dan kelurahan ;

14. Asik di Zoom

    Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Via Zoom untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);

15. Service On Saturday (SOS)

    Inovasi Layanan Disdukcapil Kota Bogor kepada Masyarakat untuk mengurus Adminduk di hari Sabtu;

16. Layanan Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dengan adanya fasilitasi mobil pelayanan yang dianggarkan pada Tahun 2026 dapat meningkatkan kualitas kinerja, Kecepatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

4. Disdukcapil Kota Bogor pada Anggaran Perubahan telah menyusun rencana kegiatan yaitu pembuata Big Data/Pemutakhiran Data yang dimasukan pada Program Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 631.555.700,- dan sarana pendukung penunjang pembuatan Big Data/ Pemutakhiran data pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.876.213.500. Adapun pembuatan Big Data/ Pemutakhiran Data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor arah kebijakan Wali Kota Bogor untuk mendukung Janji Politik periode 2025-2029 dan sangat bermanfaat untuk Perangkat Daerah/ Organisasi pemerintah yang membutukhan data-data *valid* dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya bagi Masyarakat warga Kota Bogor. Anggaran Kegiatan ini pun sudah diberikan baru 10% pada Dana Insentif Fiskal Tahun 2025;

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

3.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada surat dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor (BAPERIDA), Nomor 400.12.2.5/0707-PPEPD Tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk segera Menyusun Renja Perubahan Tahun 2025, bahan pedoman dan rujukan dasar hukum diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 360 dan pasal 361 ayat 3
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025.

Disamping itu juga memperhatikan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Kedua, apakah target rencana lebih realistis dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan APBD, memperhatikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Angaran 2025. Adapun Program dan kegiatan yang masuk dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk
   1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
   1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   1 Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan renja perubahan berpedoman pada renstra perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan renja perubahan Berikut rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2025 dengan Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan sebelum dan sesudah perubahan sebagaimana Rincian perubahan Renja terlampir dalam lampiran matrik renja tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perangkat Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
URUSAN														
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di Lingkup PD	29 Nilai	29 Nilai									29.5 Nilai		Dosduk capil Kota Bogor
	Nilai													

	SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkup PD	28.5 Nilai	28.5 Nilai	13.782.898.930	14.073.264.930	16.590.940.781	Kota Bogor.	PAD, DAU				29 Nilai	115.626.700	
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup PD	11.5 Nilai	11.5 Nilai									12 Nilai		
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Kinerja di Lingkup PD	22 Nilai	22 Nilai									22.5 Nilai		
	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan PD	100%	100%									100%		
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulana, Triwu													

	Lanan, semesteran dan tahunan Secara tepat Waktu	100%	100 %									100%		
	Persentase Pengelolaan BMD yang Dikelola sesuai dengan Ketentuan	94%	94 %									94%		
	Persentase Kepatuhan Anggaran	100%	100 %									100%		
	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	97.50%	97.5 %									98%		
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100 %									100%		
	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana	92.50	92.5									93		

	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	93	93									93.50		
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	96	96									96.50		
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	**98.50**	**98.5**									**99**		
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100 %	113.816.500	113.816.500	113.816.500	Kota Bogor.	PAD, DAU				100%	115.626.700	Disdukcapil Kota Bogor
	Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup PD	100%	100 %									100%		

	Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup PD	97.50%	97.5 %									98%		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						6 Dok	4.069. 100	
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	5 Laporan	5 Lap	113.816. 500	113.816. 500	113.816. 500						6 Lap	111.557. 600	
Kegiatan : Administrasi Keuangan PD	Persentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan	100%	100%	10.488.077. 388	10.488.077. 388	10.862.794. 331	Kota Bogor	PAD, DAU				100%	10.770. 646.309	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang /Bln	52 Org/ Bln	10.439. 504.588	10.439. 504.588	10.803.901. 531		PAD, DAU				54 0rg/ bln	10.714. 371.009	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan	18 Laporan	18 Lap	48.572. 800	48.572. 800	58.892. 800		PAD				18 Lap	56.275. 300	

	Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	100%	100 %	495.345.300	416.542.300	530.427.300	Kota Bogor	PAD				100%	719.033.100	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.388.300	17.388.300	17.388.300						1 Paket	17.388.200	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.784.500	40.784.500	40.784.500						1 Paket	19.999.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	178.469.900	178.469.900	201.994.900						1 Paket	67.163.600	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.289.400	17.289.400	17.289.400						1 Paket	193.858.700	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	12 Laporan	12 Lap	60.105.200	57.855.200	148.215.200						N/A	N/A	

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Lap	181.308.000	104.755.000	104.755.000						12 Lap	420.622.800	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	100 %	290.915.600	660.084.600	2.674.213.500	Kota Bogor.	PAD				100%	1.292.769.600	Disdukcapol Kota Bogor
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan	N/A	N/A									1 Unit	911.627.400	
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediak an	40 Unit	40 Unit	290.915.600	660.084.600	2.674.213.500						35 Unit	381.142.200	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.583.036.848	1.846.026.848	1.860.971.856	Kota Bogor.	PAD				100%	1.522.604.848	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Penyedi aan Jasa Komuni	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber	12 Laporan	12 Lap	268.159.720	268.159.720	283.104.728						12 Lap	261.786.520	

kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediak an													
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lap	1.314.877.128	1.577.867.128	1.577.867.128						12 Lap	1.260.818.328	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	100%	811.707.294	548.717.294	548.717.294	Kota Bogor.	PAD				100%	600.952.442	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	17 Unit	17 Unit	441.963.325	178.973.325	178.973.325						5 Unit	177.402.925	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	234.010.000	234.010.000	234.010.000						1 Unit	133.330.121	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	135.733.969	135.733.969	135.733.969						100%	236.040.900	

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga**	**100%**	**100%**	**2.720.044.000**	**2.720.044.000**	**3.271.011.900**	**Kota Bogor.**	**PAD**				**100%**	**259.008.800**	**Disdukcapil Kota Bogor**
	Persentase cakupan perekaman e-KTP	**100%**	**100%**									**100%**		
Kegiatan 1 : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP.	80%	80%	15.631.700	15.631.700	110.631.700	Kota Bogor.	PAD				85%	259.008.800	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Doikumen	2 Dok	15.631.700	15.631.700	110.631.700						2 Dok	90.708.800	
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	N/A	N/A	0	0	0						2 Lap	168.300.000	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%	2.704.412.300	2.704.412.300	3.160.380.200	Kota Bogor.	PAD				100%	2.428.346.400	Disdukcapil Kota Bogor

Sub Kegiatan : Koordinasi antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban Pelayanan Pendaftaran Pendududk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Lap	2.704.412.300	2.704.412.300	3.160.380.200						1 Lap	2.309.366.400	
Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	N/A	N/A	0	0	0						2 Lap	118.980.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Pendataan akta kelahiran 0-18 Tahun**	**99.20%**	**99.2%**	**154.735.300**	**140.889.700**	**140.889.700**	Kota Bogor	PAD				**99.50%**	**174.341.600**	
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akte Perkawinan	**65.00%**	**65.%**									**70%**		
Kegiatan 1 : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai dengan SOP.	80.00%	80%	74.407.600	60.562.000	60.562.000	Kota Bogor	PAD				85.00%	88.741.600	Disdukcapil Kota Bogor

Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	558 Dokumen	558 Dok	60.562.000	60.562.000	60.562.000						565 Dok	50.056.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	504 Layanan	504 Lay	13.845.600	0	0						576 Layanan	38.685.600	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaran Pencatatan Sipil	100%	100%	80.327.700	80.327.700	80.327.700	Kota Bogor	PAD				100%	85.600.000	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	N/A	N/A	0	0	0						1 Lap	15.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Lap	80.327.700	80.327.700	80.327.700						1 Lap	50.600.000	

Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	N/A	N/A	0	0	0						1 Lap	20.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Penyajian Data Kependudukan yang diperlukan OPD sesuai dengan SOP Kerjasama Pemanfaatan Data**	**60.80%**	**60.87%**	**272.425.642**	**551.348.742**	**761.632.942**	**Kota Bogor**	**PAD**				**69.57%**	**600.952.442**	**Disdukcapil Kota Bogor**
Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Administrasi Kependudukan yang disediakan, disajikan, diolah dan dimutakhirkan secara berkala dalam system Informasi Administrasi Kependudukan	10 Data	10 Data	204.875.700	483.798.800	694.083.000	Kota Bogor	PAD				15 Data	533.402.500	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dok	62.527.300	62.527.300	62.527.300						2 Dok	62.527.300	

Sub Kegiatan : Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Lap	142.348.400	421.271.500	631.555.700						1 Lap	470.875.200	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah institusi dan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	10 Institusi	10 Institusi	67.549.942	67.549.942	67.549.942	Kota Bogor	PAD				15 Institusi	67.549.942	Disdukcapil Kota Bogor
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dok	67.549.942	67.549.942	67.549.942						12 Dok	67.549.942	
JUMLAH				**16.930.103.872**	**17.485.547.372**	**20.764.475.323**							**18.430.103.745**	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada perubahan Renstra Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program kegiatan serta sub kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

4.1. **Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025**

Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Beberapa permasalahan yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berkaitan dengan capaian kinerja, yang dapat menghambat dan sekaligus menjadi evaluasi di tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2026, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran

   Adanya Penundaan Rencana Anggaran Kas (RAK), kegiatan yang semula sudah direncanakan untuk mendukung capaian kinerja harus tertunda sampai dengan adanya Perubahan Anggaran ; - Penyesuaian Anggaran karena Likuiditas Kas Daerah, harus *merefokusing* kegiatan yang mendukung capaian kinerja.
2. Masyarakat sebagai sasaran indikator kinerja

   Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang administrasi kependudukan, dalam mengurus dokumen kependudukan hanya untuk kebutuhan mendesak, kondisi ini menyebabkan jika dokumen tidak dapat terselesaikan pada saat dibutuhkan maka akan dikomplain jika dalam memgurus dokumen dengan waktu yang lama.. Masyarakat masih ada yang enggan untuk melaporkan setiap adanya perubahan baik perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, bahkan pada saat melaporkan adanya perubahan, masyarakat tidak memberikan data yang dimiliki dengan benar dan lengkap sehingga menyebabkan

data base kependudukan kurang akurat. - Perubahan sistem yang semula manual menjadi *online* sebagian menyebabkan masyarakat yang tidak dapat mengoperasionalkan dalam mengurus dokumen kependudukan akan meminta bantuan jasa calo / makelar sehingga berdampak adanya biaya untuk mengurus dokumen tersebut padahal menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dalam pasal 79 A) menyatakan untuk kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

3. Masih banyaknya warga masyarakat yang datang ke Disdukcapil untuk mengurus keperluan Adminduknya karena mereka lebih yakin untuk datang langsung daripada melalui *online* (Aplikasi Prima *Online*), dan masih adanya ketidak tahuan masyarakat untuk mendaftar melalui Prima *online.*

4.2. **Rencana Tindak Lanjut**

Langkah-langkah sebagai strategi peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor guna mencapai keberhasilan Sasaran, Program, dan Kegiatan Perubahan Anggaran mengingat waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan :

1. Merencanakan ulang Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kas (RAK) disesuaikan kondisi waktu pelaksanaan, karena perubahan terbatas waktunya;
2. Memprioritaskan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena waktu pelaksanaan perubahan terbatas (bulan pelaksanaan terbatas);
3. Mengoptimal Sumber Daya Manusia yang ada, dengan mengedapankan perkembangan teknologi dan informasi, terkait dengan pengelolaan *data base* dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.;
4. Menindaklanjuti ketentuan – ketentuan / regulasi yang ada dan terus berkembang;
5. Berkomitmen tetap memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan inovasi pelayanan terintegrasi yang dapat memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat.
6. Lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi penyampaian informasi kepada masyarakat pada saat kegiatan Jemput Bola kepada warga masyarakat.
7. Membuat Big Data/ Pemutakhiran data ketersediaan informasi data kependudukan yang *valid* dan akurat ;

8. Merencanakan dan Memanfaatkan Fasilitas Mobil Pelayanan yang dianggarkan di tahun 2026 dalam kegiatan jemput Bola ataupun kegiatan even-even yang diselenggarakan di Kota Bogor, dan mensosialisasikan dengan menyebarkan brosur-brosur dan sosialisasi kaitan prosedur Adminduk yang ada di Disdukcapil Kota Bogor;
9. Menyusun Rencana untuk Tahun 2026 strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk Menuju Kota Bogor Beres "**Loker Beres"** Layanan *Online* Kependudukan Kelurahan Berintegritas, Efektif, Responsif, Efisien, Sederhana, strategi ini adalah untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk perencanaan kegiatan /kinerja yang akan datang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2025. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2025 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025 dan perlu disusun juga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun anggaran 2025.

1.2 Landsan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 47 Tahun 2021, tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Bapperida Kota Bogor tahun 2025, dalam mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. Mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DPPKB sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2025 dalam perumusannya mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 triwulan II disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN WAJIB												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.14	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM											
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,01	8.527.776.829	-	1.896.401.337	-	2.187.476.631	-	4.083.877.968	0 %	4.083.877.968
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	26,55		-		-		-		0 %	
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	12,48		-		-		-		0 %	
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	21,97		-		-		-		0 %	
		Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100		25		25		50		50 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100		25		25		50		50 %	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94		23,5		23,5		47		50 %	
		Persentase Kepatuhan Anggaran	%	100		25		25		250		50 %	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	100		25		25		50		50 %	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94		23,5		23,5		47		50 %	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87,11		-		96,06		96,06		110 %	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88,75		-		86,45		86,45		97 %	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	88,38		-		90,81		90,81		103 %	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	88,38		-		88,13		88,13		100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**	%	**100**	**31.389.900**	**25**	**9.430.500**	**25**	**7.319.800**	**50**	**16.750.300**	**50 %**	**16.750.300**
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	%	**100**		**25**		**25**		**50**		**50 %**	
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	31.389.900	3	9.430.500	2	7.319.800	5	16.750.300	250 %	16.750.300
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	%	**100**	**6.472.526.777**	**25**	**1.529.947.748**	**25**	**1.785.261.826**	**50**	**3.315.209.574**	**50 %**	**3.315.209.574**
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	**100**		**25**		**25**		**50**		**50 %**	
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	6.425.524.177	30	1.516.533.148	30	1.776.045.826	30	3.292.578.974	107 %	3.292.578.974
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	1	47.002.600	1	13.414.600	1	9.216.000	1	22.630.600	100 %	22.630.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**735.193.300**	**25**	**158.456.600**	**25**	**175.125.335**	**50**	**333.581.935**	**50 %**	**333.581.935**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	90.117.400	1	49.425.350		-	1	49.425.350	50 %	49.425.350
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	149.009.700	1	48.365.600	1	63.350.650	2	111.716.250	67 %	111.716.250
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	50.032.000	1	34.078.700	1	5.106.300	2	39.185.000	67 %	39.185.000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	276.945.000	1	7.645.000	1	59.640.000	1	67.285.000	100 %	67.285.000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	62.898.200	1	10.482.800	1	9.567.600	2	20.050.400	67 %	20.050.400
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	106.191.000	1	8.459.150	1	37.460.785	2	45.919.935	100 %	45.919.935

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**466.548.036**	**25**	**131.059.338**	**25**	**84.226.424**	**50**	**215.285.762**	**50 %**	**215.285.762**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	76.662.500	3	19.200.674	3	18.015.416	6	37.216.090	50 %	37.216.090
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389.885.536	3	111.858.664	3	66.211.008	6	178.069.672	50 %	178.069.672
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**%**	**100**	**822.118.816**	**25**	**67.507.151**	**25**	**135.543.246**	**50**	**203.050.397**	**50 %**	**203.050.397**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	39.676.805	1	8.720.000	1	12.148.650	2	20.868.650	50 %	20.868.650
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	240.224.183	1	45.417.151	2	50.922.096	3	96.339.247	43 %	96.339.247

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	56.416.000	1	13.370.000	1	5.928.000	2	19.298.000	50 %	19.298.000
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	485.801.828	-	-	1	66.544.500	1	66.544.500	100 %	66.544.500
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**											
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang di susun**	**%**	**100**	**1.016.679.400**	**25**	**8.930.000**		**267.979.693**	**25**	**276.909.693**	**25 %**	**276.909.693**
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Dokumen**	**5**	**208.939.900**	**-**	**-**	**-**	**139.303.000**	**-**	**139.303.000**	**0 %**	**139.303.000**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	39.588.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	500	44.243.200	-	-	248	44.020.000	248	44.020.000	50 %	44.020.000
2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	200	27.473.600	-	-	154	27.258.000	154	27.258.000	77 %	27.258.000
2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	30	20.150.000	-	-	30	20.100.000	30	20.100.000	100 %	20.100.000
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	10	21.805.000	-	-	10	21.475.000	10	21.475.000	100 %	21.475.000
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	5	28.580.100	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	10	27.100.000	-	-	5	26.450.000	5	26.450.000	50 %	26.450.000
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pemetaan pengendalian kependudukan**	**Dokumen**	**3**	**807.739.500**	**-**	**8.930.000**	**-**	**128.676.693**	**-**	**137.606.693**	**- %**	**137.606.693**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	340.040.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	44.030.400	1	4.305.000	1	7.951.693	1	12.256.693	100 %	12.256.693
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	90.314.000	-	-	1	8.670.000	1	8.670.000	100 %	8.670.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen	1	61.200.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	33.500.000	-	-	1	7.500.000	1	7.500.000	100 %	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	8	180.087.000	-	4.625.000	5	46.980.000	5	51.605.000	63 %	51.605.000
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	58.568.100	-	-	1	57.575.000	1	57.575.000	100 %	57.575.000
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**											
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)**	**%**	**19,84**	**4.136.580.598**	**20,97**	**181.054.400**	**21,20**	**1.361.175.700**	**21,20**	**1.542.230.100**	**107 %**	**1.542.230.100**
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Orang yang terpapar Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Orang**	**505**	**522.292.700**	**-**	**2.936.800**	**-**	**57.112.500**	**-**	**60.049.300**	**0 %**	**60.049.300**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	44.774.900	-	-	-	418.000	-	418.000	0 %	418.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, danKeluarga Berencana)	Laporan	1	46.131.500	1	337.000	1	11.310.000	1	11.647.000	100 %	11.647.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) MelaluiRapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	91.500.000	-	-	1	25.050.000	1	25.050.000	100 %	25.050.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	49.660.800	1	-	-	-	1	-	100 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Dokumen	3	117.067.000	1	2.599.800	1	20.334.500	2	22.934.300	67 %	22.934.300
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	68	173.158.500	-	-	-	-	-	-	0 %	-
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase kelurahan yang mempunyai IMP mandiri**	**Orang**	**68**	**529.642.000**	**68**	**7.500.000**		**152.436.000**	**68**	**159.936.000**	**100 %**	**159.936.000**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	68	529.642.000	68	7.500.000	68	152.436.000	68	159.936.000	100 %	159.936.000
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	**%**	**80**	**1.865.369.500**	**20**	**103.617.600**	**20**	**998.096.600**	**40**	**1.101.714.200**	**50 %**	**1.101.714.200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	32.321.900	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2.000	1.555.599.400	36	102.590.000	938	826.883.400	974	929.473.400	49 %	929.473.400
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	9	54.777.600	1	1.027.600	7	42.450.000	8	43.477.600	89 %	43.477.600
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	9	128.763.200	-	-	9	128.763.200	9	128.763.200	100 %	128.763.200
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	60	34.779.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	59.128.400	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kampung KB aktif**	**Kampung KB**	**68**	**1.219.276.398**	**68**	**67.000.000**	**68**	**153.530.600**	**68**	**220.530.600**	**100 %**	**220.530.600**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	70	34.680.600	-	-	70	33.780.600	70	33.780.600	100 %	33.780.600
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	27.357.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	68	690.236.352	68	67.000.000	68	119.750.000	68	186.750.000	100 %	186.750.000
2.14.03.2.04.0005	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Kampung Keluarga Berencana	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kampung KB	68	467.002.446	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**											
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif**	**%**	**82,34**	**5.856.607.000**	**-**	**114.386.800**	**-**	**1.763.492.600**	**-**	**1.877.879.400**	**0 %**	**1.877.879.400**
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketaha-nan dan Kesejah-teraan Keluarga**	**Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif**	**Poktan**	**615**	**5.544.986.000**	**-**	**109.500.000**	**-**	**1.569.235.000**	**-**	**1.678.735.000**	**0 %**	**1.678.735.000**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	1	9.480.000	-	-	1	3.585.000	1	3.585.000	100 %	3.585.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningka-tan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	10	130.000.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Kelu-arga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usa-ha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang me-ngikuti Orientasi/ Pe-latihan Teknis Pelaksa-na/Kader Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdaya-an Ekonomi Keluarga /Usaha Pe-ningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	250	68.864.000	-	-	34	20.410.000	34	20.410.000	14 %	20.410.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	2.412	4.824.000.000	-	-	2.409	1.430.640.000	2.409	1.430.640.000	99,88 %	1.430.640.000
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pening-katan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	398	489.600.000	398	109.500.000	368	114.600.000	368	224.100.000	92 %	224.100.000
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk	Kelompok	4	23.042.000	-	-	-	-	-	-	0 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2024 s/d TW II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)	
						I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**											
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keta-hanan dan Kesejah-teraan Keluarga**	**Jumlah Organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Kelompok**	**30**	**311.621.000**	**30**	**4.886.800**	**30**	**194.257.600**	**60**	**199.144.400**	**200 %**	**199.144.400**
	SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**											
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	30	311.621.000	30	4.886.800	30	194.257.600	60	199.144.400	200 %	199.144.400
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**19.537.643.827**		**2.200.772.537**		**3.392.647.993**		**7.780.897.161**	**39,83 %**	**7.780.897.161**

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 39,83%. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

    a. Mekanisme kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
    b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
    c. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :

    a. Masih kurangnya jumlah SDM pada dinas, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
    b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan PD belum optimal.
    c. Terdapat anggaran kegiatan yang masih belum terserap karena terdapat penambahan anggaran dari APBN di pertengahan tahun yang jumlahnya cukup besar sehingga menyebabkan penyerapan belum maksimal.

d. Terdapat anggaran kegiatan tidak dapat diserap karena masa pandemi, namun hal tersebut tidak mengurangi pecapaian target kinerja.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 dapat dikatakan cukup berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya, namun dapat diatasi dengan melakukan pergesaran anggaran (pengurangan dan penambahan anggaran pada kegiatan tertentu) dalam rangka pencapaian output dan outcome kegiatan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PENDANAAN DPPKB

Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor tahun 2025 meliputi pelaksanaan 4 (empat) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 19.537.643.827,00 kemudian mengalami pergeseran menjadi sebesar Rp. 20.054.866.097,00, perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.
DAFTAR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			KET.
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**8.704.248.629**	**8.527.776.829**	**8.870.342.253**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**31.389.900**	**31.389.900**	**31.389.900**	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.389.900	31.389.900	31.389.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6.472.526.777**	**6.472.526.777**	**6.815.092.201**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.425.524.177	6.425.524.177	6.768.089.601	Penambahan Pagu kekurangan gaji sebesar Rp. 342.565.424
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.002.600	47.002.600	47.002.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**911.665.100**	**735.193.300**	**735.193.300**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.992.400	90.117.400	90.117.400	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 34.875.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.009.700	149.009.700	149.009.700	
PROGRAM / KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**

/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.032.000	50.032.000	50.032.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	281.945.000	276.945.000	276.945.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 5.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.998.200	62.898.200	62.898.200	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 5.100.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.538.800	0	0	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 27.538.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.149.000	106.191.000	106.191.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 103.958.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**466.548.036**	**466.548.036**	**466.548.036**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.662.500	76.662.500	76.662.500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.885.536	389.885.536	389.885.536	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**822.118.816**	**822.118.816**	**822.118.816**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.676.805	39.676.805	39.676.805	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.224.183	240.224.183	240.224.183	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.416.000	56.416.000	56.416.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.801.828	485.801.828	485.801.828	
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN**	

			2025	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**1.295.421.380**	**1.016.679.400**	**1.096.991.400**	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**296.286.680**	**208.939.900**	**289.251.900**	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	67.112.000	39.588.000	119.900.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 27.524.000
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	64.000.000	44.243.200	44.243.200	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 19.756.800
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	40.000.000	27.473.600	27.473.600	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 12.526.400
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	24.804.000	20.150.000	20.150.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 4.654.000
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	29.500.000	21.805.000	21.805.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 7.695.000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	41.370.680	28.580.100	28.580.100	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 12.790.580
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	29.500.000	27.100.000	27.100.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 2.400.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**999.134.700**	**807.739.500**	**807.739.500**	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	523.616.000	340.040.000	340.040.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 183.576.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	93.914.900	44.030.400	44.030.400	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 49.884.500
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	58.245.000	0	0	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 2.400.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	49.902.800	90.314.000	90.314.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 40.411.200
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	61.200.000	61.200.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 61.200.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6.300.000	33.500.000	33.500.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.27.200.000
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	196.976.200	180.087.000	180.087.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 16.889.200
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	6.300.000	0	0	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 6.300.000
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	63.879.800	58.568.100	58.568.100	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 5.311.700
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**2.352.340.572**	**4.136.580.598**	**4.230.925.444**	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**298.627.100**	**522.292.700**	**522.292.700**	
Pengendalian Program KKBPK	60.258.700	44.774.900	44.774.900	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 15.483.800
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	12.571.100	0	0	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 12.571.100
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	26.489.500	46.131.500	46.131.500	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.19.642.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	91.500.000	91.500.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.91.500.000
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	108.751.200	49.660.800	49.660.800	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 59.090.400
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	23.899.700	117.067.000	117.067.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.93.167.300
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	66.656.900	173.158.500	173.158.500	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.106.501.600
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**85.846.000**	**529.642.000**	**529.642.000**	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	85.846.000	529.642.000	529.642.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**1.001.244.500**	**1.865.369.500**	**1.865.369.500**	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.199.900	32.321.900	32.321.900	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 20.878.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	568.354.200	1.555.599.400	1.555.599.400	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp.987.245.200
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	104.727.800	54.777.600	54.777.600	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 49.950.200
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	128.763.200	128.763.200	128.763.200	
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	

Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	59.870.000	34.779.000	34.779.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 25.091.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	86.329.400	59.128.400	59.128.400	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 27.201.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasya-rakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**966.622.972**	**1.219.276.398**	**1.313.621.244**	
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	56.036.600	34.680.600	34.680.600	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 21.356.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50.176.800	27.357.000	27.357.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 22.819.800
Pembinaan Terpadu Kampung KB	370.532.126	690.236.352	690.236.352	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 319.704.226
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	489.877.446	467.002.446	561.347.292	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 22.875.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1.052.984.800**	**5.856.607.000**	**5.856.607.000**	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**661.668.000**	**5.544.986.000**	**5.544.986.000**	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	9.480.000	9.480.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 9.480.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejah-teraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0	130.000.000	130.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 130.000.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128.050.000	68.864.000	68.864.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 59.186.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0	4.824.000.000	4.824.000.000	Penambahan Pagu DAK sebesar Rp. 4.824.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	489.760.000	489.600.000	489.600.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 160.000
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	43.858.000	23.042.000	23.042.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 20.816.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**391.316.800**	**311.621.000**	**311.621.000**	
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**KET.**
	RKPD 2025	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	391.316.800	311.621.000	311.621.000	Pengurangan Pagu sebesar Rp. 79.695.800
J U M L A H	**13.404.995.381**	**19.537.643.827**	**20.054.866.097**	

Tabel 3.2.
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100 12,48 21,97 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase	8.704.248.629	8.709.720.116							9.609.972.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu*	100 Persentase	31.389.900	31.389.900			-	- -	-		70.540.000
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	0	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.540.000
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0	0	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31.389.900	31.389.900	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*	-	6.472.526.777	6.654.470.064			-	- -	-		6.522.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	6.425.524.177	6.607.467.464	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.510.000.000
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	47.002.600	47.002.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*	100 Persentase	911.665.100	735.193.300			-	- -	PNS Golongan I s.d IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1.466.832.000
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	124.992.400	90.117.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	149.009.700	149.009.700	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			401.000.000
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	50.032.000	50.032.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			66.000.000
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	281.945.000	276.945.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			325.000.000
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	67.998.200	62.898.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			94.000.000
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	27.538.800	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	210.149.000	106.191.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			348.832.000
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persentase	466.548.036	466.548.036			-	- -	-		617.600.000
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.662.500	76.662.500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			108.000.000
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	389.885.536	389.885.536	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			509.600.000
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik*	-	822.118.816	822.118.816			-	- -	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		933.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.676.805	39.676.805	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			185.000.000
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	240.224.183	240.224.183	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			194.000.000
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	56.416.000	56.416.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			93.500.000
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	485.801.828	485.801.828	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			460.500.000
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase dokumen kegiatan pengendalian kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang disusun**	**100 Persentase**	**1.295.421.380**	**1.207.741.400**							**1.987.071.000**
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG**	**INDIKATOR**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**KELOMPOK**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA**	

		URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TAHUN 2026	
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	5 Dokumen	296.286.680	400.001.900			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		360.000.000
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.112.000	230.650.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	500 Dokumen	64.000.000	44.243.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	200 Dokumen	40.000.000	27.473.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan											
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 Organisasi	24.804.000	20.150.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal											
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	10 Kegiatan	29.500.000	21.805.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal											
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	41.370.680	28.580.100	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal											
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	10 Kegiatan	29.500.000	27.100.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pemetaan pengendalian kependudukan*	3 Dokumen	999.134.700	807.739.500			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		1.627.071.000
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan											
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	523.616.000	340.040.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			840.000.000
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	93.914.900	44.030.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			250.000.000
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga											
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	58.245.000	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	49.902.800	90.314.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			50.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	0	61.200.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	6.300.000	33.500.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			12.600.000
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain											
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	40 Unit	196.976.200	180.087.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.800.000
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana											
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	6.300.000	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.600.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)											
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	63.879.800	58.568.100	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.071.000
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)**	**19,84 Persentase**	**2.352.340.572**	**4.230.925.444**							**2.989.580.000**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Orang yang terpapar Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal*	505 Orang	298.627.100	522.292.700			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		507.400.000
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK											
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	60.258.700	44.774.900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.000.000
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana											
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit	12.571.100	0	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	26.489.500	46.131.500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			36.150.000
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	0	91.500.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	108.751.200	49.660.800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			211.250.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen	23.899.700	117.067.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			25.000.000
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	68 Organisasi	66.656.900	173.158.500	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			120.000.000
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah kelurahan yang mempunyai IMP mandiri*	68 Organisasi	85.846.000	529.642.000			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		158.000.000
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 Orang	85.846.000	529.642.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			158.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi*	80 Persentase	1.001.244.500	1.865.369.500			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		1.524.180.000
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	53.199.900	32.321.900	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			58.600.000
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 Orang	568.354.200	1.555.599.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			945.580.000
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9 Dokumen	104.727.800	54.777.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			130.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	9 Unit	128.763.200	128.763.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	60 Orang	59.870.000	34.779.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			220.000.000
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	86.329.400	59.128.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			170.000.000
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah kampung KB aktif*	68 Kampung KB	966.622.972	1.313.621.244			-	- -	Edukasi Dashat bagi Keluarga Resiko Stunting		800.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70 Organisasi	56.036.600	34.680.600	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB											
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	50.176.800	27.357.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	68 Laporan	370.532.126	690.236.352	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			400.000.000
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	68 Unit	489.877.446	561.347.292	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000
NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	

		URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN								SASARAN	TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif**	**82,34 Persentase**	**1.052.984.800**	**5.856.607.000**							**1.539.000.000**
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif*	615 Poktan	661.668.000	5.544.986.000			-	- -	-		1.039.000.000
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)											
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	0	9.480.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	33 Unit	0	130.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			150.000.000
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN /**	**INDIKATOR PROGRAM /**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**	

		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
					APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250 Orang	128.050.000	68.864.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-	0	4.824.000.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		DANA	NASIONAL	DAERAH			(Rp)
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	398 Kelompok	489.760.000	489.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			514.000.000
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)											
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	4 Kelompok	43.858.000	23.042.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF

		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		DANA	NASIONAL	DAERAH			(Rp)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	30 Kelompok	391.316.800	311.621.000			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		500.000.000
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Organisasi	391.316.800	311.621.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000
	J U M L A H				**13.404.995.381**	**20.004.993.960**							**16.125.623.000**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan rujukan dalam pelaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2025 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen renja menjadi arahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Bogor agar pegawai dapat konsistensi dan disiplin untuk merealisasikan Rencana Kerja ini.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan DPPKB pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan DPPKB dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan DPPKB Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

Lampiran r. Dinas Perhubungan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang seccara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA Perubahan dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tentang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenan.
2. Berpedoman Kepada Perubahan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam fokum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

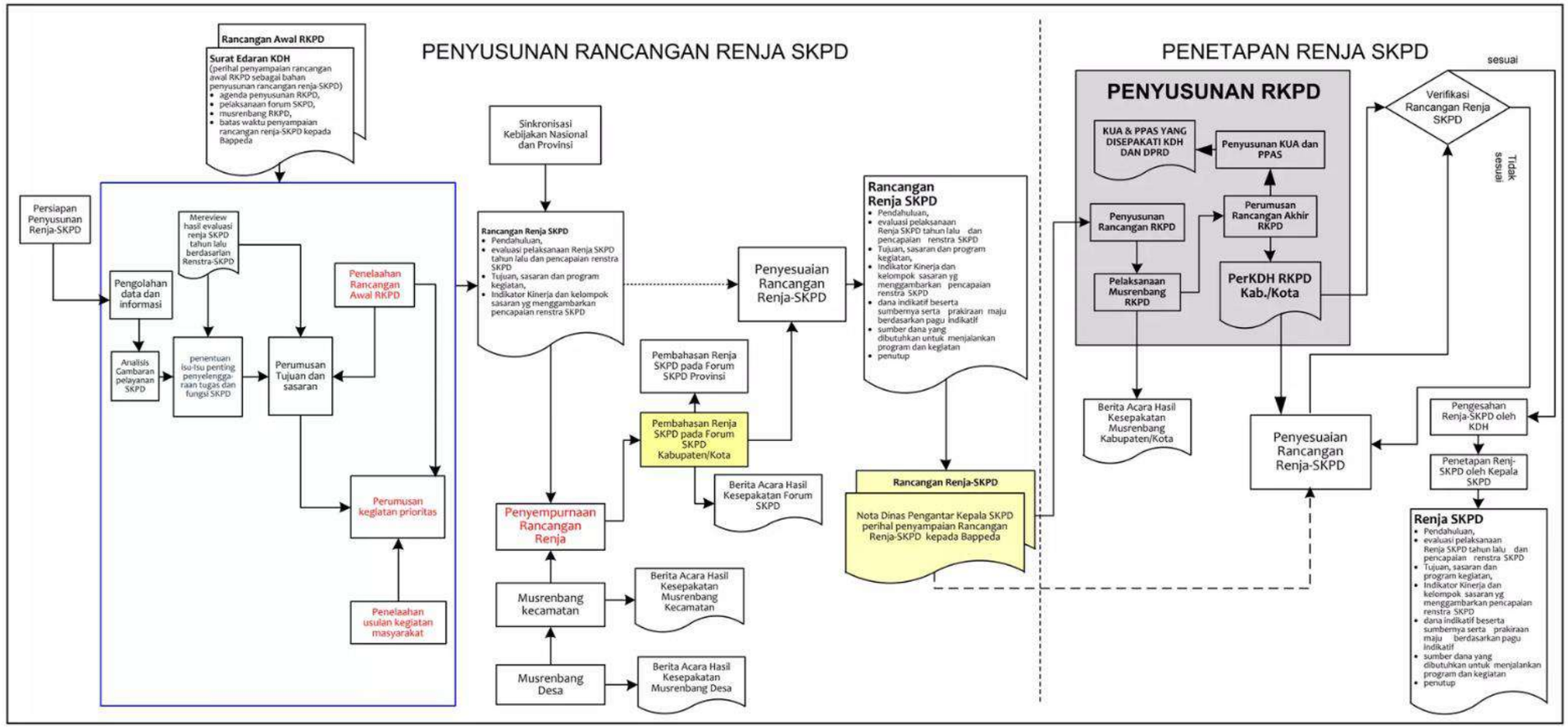

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Bogor, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 17).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bogor disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bogor melaksanakan 3 (tiga) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar **Rp. 145.077.721.943**,- terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 2.1

Pagu Anggaran Program Dinas Perhubungan

Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran Pergeseran Anggaran 2 (Rp)	Realisasi s/d Juni 2025 (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	87.678.291.291	43.345.071.994	49,44
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	57.263.063.752	14.049.628.254	25,54
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	136.366.900	-	-
JUMLAH		**145.077.721.943**	**57.394.700.248**	**31,59**

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2025 didasarkan pada sasaran – sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Sasaran Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d Triwulan II	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase sarana dan prasarana transportasi berkondisi baik	95,5 Persen	-	-
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas	Kecepatan Lalu Lintas Harian Rata - rata	36,87 Km/Jam	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	Persentase peningkatan load factor angkutan umum	69 Persen	38,69 Persen	56,07
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perlintasan Kereta Api dalam daerah kota	Jumlah dokumen kajian Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	-	-
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP di Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai 85,22	-	-
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >70)	1 Inovasi	-	-
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95 Persen	-	-
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100 Persen	-	-
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup Dinas Perhubungan	Nilai 85,5	Nilai 87,34	102,15

Tabel 2.3

Pengukuran Indikator Program Tahun 2025

Berdasarkan Sasaran Strategi

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d Triwulan II	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan	92,5 Persen	-	
			Persentase fasilitas terminal yang terpelihara	77,78 Persen	9 Persen	11,57
			Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	98,10 Persen	92 Persen	93,78
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	100 Persen	-	
			Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	88 Persen	-	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Load Factor Angkutan Perkotaan	59 Persebn	-	
			Load Factor Angkutan Umum Massal	79 Persen	77,73 Persen	98,39
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perlintasan Kereta Api dalam daerah kota	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase penetapan kebijakan Rencana Induk Perekeretaapian	30 Persen	-	
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai 27,73	-	

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d Triwulan II	Persentase (%)
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai 26,55	-	
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pelaporan Kinerja	Nilai 11,01	-	
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Evaluasi Internal	Nilai 21,97	-	
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Dinas Perhubungan	100 Persen	-	
			Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100 Persen	-	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100 Persen	50 Persen	50
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94 Persen	-	
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100 Persen	-	

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d Triwulan II	Persentase (%)
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95 Persen	48,23 Persen	50,77
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94 Persen	-	
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai 87,11	Nilai 87,00	99,87
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai 88,75	Nilai 87,5	98,59
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai 88,38	Nilai 87,35	98,83
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai 88,38	Nilai 87,5	99

2.2 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN																							
A	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Perencanaan	Nilai 27,74	815.000.000	0	26.515.200	27,73	34.997.200	-	**7.588.200**	-	**6.812.800**	-	-	-	-	-	**14.401.000**				**14.401.000**		
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai 26,23		0		26,26		-		-		-		-		-							
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pelaporan Kinerja	Nilai 11,06		0		11,05																	
			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Evaluasi Internal	Nilai 20,22		0		20,21																	
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Dinas Perhubungan	Persen 100		0		100																	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 Persen	815.000.000	0	26.515.2000	100	34.997.200	25	7.588.200	25	6.812.800		-		-	50	14.401.000	50	41,15	50	14.401.000	50	1,77
			Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja	85 Persen		0		80		-		-													

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
			Dinas Perhubungan																						
			Persentase Realisasi Fisik kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan	90 Persen		0		85		17,40		22,68						40,08		47,15		40,08		44,53	
			Persentase Realisasi Anggaran kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan	90 Persen		0		85		16,58		48,23						64,81		76,25		64,81		72,01	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	625.000.000	3	26.515.200	3	19.997.200	1	4.458.400	1	4.243.000					2	8.701.400	66,67	43,51	2	8.701.400	40,00	1,39
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	190.000.000	0		7	15.000.000	2	3.129.800	2	2.569.800					4	5.699.600	57,14	38,00	4	5.699.600	57,14	3,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94 Persen	75.252.000.000	0	30.838.299.608	94	36.444.096.120		8.592.719.764		9.779.228.067						18.371.947.831	-	50,41	-	18.371.947.831	-	24,41
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100 Persen		0		100																	
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	94 Persen		0		95		16,58		48,23						64,81		68,22		64,81		68,95	
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94 Persen		0		94																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	75.252.000.000	0	30.838.299.608	100	36.444.096.120	16,58	8.592.719.764	48,23	9.779.228.067					64,81	18.371.947.631	64,81	50,41	64,81	18.371.947.831	64,81	24,41
			Persentase penyampaian	100 Persen		0		100		25		25						50		50,00		50		50,00	

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
			laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu																						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/Bulan	75.000.000	217	30.838.299.608	229	36.319.813.120	216	8.565.350.064	216	9.751.872.267					216	18.317.222.331	94,32	50,43	216	18.317.222.331	86,40	24,42
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31 Laporan	252.000.000			31	124.283.000	4	27.369.700	5	27.355.800					9	54.725.500	29,03	44,08	9	54.725.500	29,03	21,71
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Dinas Perhubungan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	86.5 Nilai	130.187.630.000	**0**	**12.924.012.162**	87,11	**51.541.796.056**	87,44	**12.129.281.412**	87,00	**12.829.441.751**					174,44	**24.958.723.163**	200,25	**48,42**	174,44	**24.958.723.163.**	201,66	19,17
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85 Nilai		**0**		88,75		85,66		87,5						173,16		195,11		173,16		203,72	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	85,2 Nilai		**0**		88,38		85,89		87,35						173,24		196,02		173,24		203,33	
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	89,39 Nilai		**0**		88,38		91,13		87,5						178,63		202,12		178,63		199,83	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	3.801.000.000	100	734.386.526	100	1.194.779.395	25,0	13.733.400	25	149.930.537					50	163.663.937	50,00	13,70	50	163.663.937	50,00	4,31
		Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	2 Paket	105.000.000	100	28.930.000	2	12.690.198																

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	825.000.000	2	112.441.500	2	99.311.800			2	63.768.733					2	63.768.733	100	64,21	2	63.768.733	100	12,15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	126.000.000	1	29.195.700	2	29.999.700	1	2.100.000							1	2.100.000	50,00	7,00	1	2.100.000	50,00	1,67
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	420.000.000	1	142.605.520	5	312.616.497	1	6.473.400	1	27.587.400					2	34.060.800	40,00	10,90	2	34.060.800	50,00	8,11
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	525.000.000	-	170.595.730	1	499.961.500																
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokuyemen	-	-	6.540.000	12	24.999.700	3	5.160.000	3	7.740.000					6	12.900.000	50,00	51,60	6	12.900.000	50	51,60
		Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.100.000.000	12	244.078.076	12	215.200.000	3		3	50.834.404					6	50.834.404	50,00	23,62	6	50.834.404	50,00	2,42
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	2.255.130.000	100	43.942.000	100	142.999.009	25	-	25						50	-	50,00	-	50	-	50,00	

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	2.255.130.000	9	43.942.0000	15	142.999.009	-	-	-	-												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	108.234.000.000	100	9.723.740.718	100	46.601.096.635	25	11.958.710.039	25	11.275.650.591					50	23.234.3650.630	50,00	49,86	50	23.234.360.630	50,00	21,47
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	85.134.000.000	12	171.365.704	12	36.892.716.800	3	9.083.493.801	3	9.197.854.953					6	18.281.348.754	50,00	49,55	6	18.281.348.754	12,50	21,47
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	23.100.000.000	12	9.552.375.014	48	9.708.380.085	12	2.875.216.238	12	2.077.795.638					24	4.953.011.846	50,00	51,02	24	4.953.011.876	50,00	21,,44
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persen	15.897.500.000	100	2.421.942.918	100	3.602.919.817	25	156.837.973	25	1.403.860.623					50	1.560.698.596						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	7.930.000.000	97	2.290.422.918	95	3.203.336.300	95	104.119.723	98	1.156.784.923					190	1.260.904.646	200,00	39,36	1.260.904.646	197,92	15,90	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 Unit	367.500.000			50	199.645.517	6	18.780.000	6	30.110.000					12	48.890.000	24,00	24,49	12	48.890.000	7,95	13,30

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	7.600.000.000	94	131.520.000	1	199.938.000	1	38.938.250	1	216.965.700					1	250.903.950	100	125,49	1	250.903.950	100	3,30
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase tingkat keselamatan jalan	93 Persen	103.530.400.000	0,78	55.494.780.714	92,5	28.713.906.776	-	4.497.037.000	-	7.537.791.138					0,80	10.034.428.138	0,86	34,95	0,80	10.034.828.138	0,86	9,69
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan perlengkapan jalan yang berkondisi baik	93 Persen	103.530.400.000	74,2	55.494.780.714	92,5	28.718.906.776	-	4.97.037.000	-	7.537.791.138						10.034.828.138		34,95		10.034.828.138		9,69
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	17 Unit	3.380.000.000	6	162.150.677	0	195.747.276	-	-	-	-												
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	6.078	23.980.000.000	4.673	16.012.689.836	5.204	24.760.000.000		16.530.000		5.706.901.638						5.723.431.638		23,12		5.723.431.638		23,87
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	22 Unit	1.468.500.000		197.941.500	144	102.409.500		-	91						91		63,19		91		413,64	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.830 Unit	74.701.900.000	5.960	39.121.998.701	3,414	3.655.750.000		2.480.507.000	1.523	1.830.889.500					1.523	4.311.396.500	44,61	117,93	1,523	4.311.396.500	39,77	5,77
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase fasilitas terminal yang terpelihara	78,95 Persen	10.548.480.000		642.901.630	77,78	3.654.010.077		22.932.100	9	43.809.000					9,00	66.741.100	11,57	1,83	9,00	66,741.100	11,40	0,63

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																							
		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C dan pangkalan yang dikelola	2 Lokasi	10.548.480.000	38,5	642.901.630	2	3.654.010.077	2	22.932.100	2	43.809.000					4	66.741.100	200,00	1,83	4	66.741.100	200,00	0,63
		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	10.250.000.000			1	3.574.010.077	0	1.080.000	1	28.380.000					1	29.460.000	100,00	0,82	1	29.460.000	100,00	0,29
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	298.480.000	1	642.901.630	1	80.000.000	1	21.852.100	1	15.429.000					2	37.281.100	200,00	46,60	2	37.281.100	200,00	12,49
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	98 Persen	4.964.810.000		628.998.550	98,1	570.681.700		136.662.900	92	7.728.300					92	144.391.200	98,78	25,30	92,00	144.391.200	93,88	2,91
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	99 Persen	4.964.810.000	92,3	628.998.550	98	570.681.700	25,94	136.662.900	82	7.728.300			-	-	108	144.391.200	110,14	25,30	108	144.391.200	109,03	2,91
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	1 Unit	1.483.480.000	2	124.830.000	3	79.955.800	1	105.500.000	1	1.500.000					2	107.000.000	66,67	133,82	2	107.000.000	200,00	7,21
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.000 Dokumen	1.522.500.000			0	119.979.300		-		-												

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	15 Unit	1.808.150.000	13	449.705.050	12	319.052.400	13	31.162.900	13	6.228.300					26	37.391.200	216,67	11,72	26	37.391.200	173,33	2,07
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	150.680.000	1	54.463.500	1	51.694.200		-		-												
	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen lalu lintas	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	100 Persen 94 Persen	15.549.020.000		3.19.105.252	100 88	1.385.432.655		188.018.150		577.822.135						765.840.285		55,28		765.840.285		4,93
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	100 Persen	500.000.000		-	100	190.461.200		-		-												
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000		-	1	190.161.200		-														
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase ketersediaan lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	87 Persen	647.000.000		-	86	108.423.200		-														

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	647.000.000			1	108.423.200		-		-												
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase tingkat keterpenuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota	94 Persen	13.102.020.000	85,8	3.060.455.252	88	964.388.255	14,57	171.625.350		533.122.135					15	704.747.485	16,67	73,08	15	704.747.485	15,60	5,38
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	790020.000		323.110.880	2	115.599.800		57.542.400.		6.400.000						63.942.400		55,31		63.942.400		8,09
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	48 Laporan	600.000.000	9	14.289.400	4	9.856.000	1	2.051.000		-					1	2.051.000	25,00	20,81	1	2.051.000	2,08	0,34
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	36 Dokumen	9.612.000.000	760	2.602.331.372	6	600.992.255	1	112.031.950		525.362.135					1	637.394.085	16,67	106,06	1	637.394.085	2,78	6,63

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		dan Rekayasa Lalu Lintas	pengadaan dan Pemasangan																						
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14 Laporan	2.100.000.000	1	120.723.600	2	237.940.200		-		1.360.000						1.360.000		0,57		1.360.000		0,06
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100 Persen	1.300.000.000	23	358.650.000	100	122.160.000	22,7	16.392.800	50	44.700.000					73	61.092.800	72,73	50,01	73	61.092.800	72,73	4,70
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	60 Laporan	350.000.000	33	101.550.000	11	40.880.000	2	5.850.0000	8	14.550.000					10	20.400.000	90,91	49,90	10	20.400.000	16,67	5,83
		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	250 Laporan	950.000.000	84	257.100.000	11	81.280.000	3	10.542.800	12	30.150.000			-		15	40.692.800	136,36	50,06	15	40.692.692.800	6,00	4,28
	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Load Factor Angkutan Perkotaan Load Factor Angkutan Umum Massal	59 Persen 79 Persen	321.514.000.000		1.458.625.405	59 79	59.190.847.337		10.291.600	77,73	3.027.535.931					77,73	3.037.827.531	98,39	5,13	77,73	3.037.827.531	98,39	0,94

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	2.650 Unit	318.835.000.000	3.114	1.166.361.700	2.821	58.774.863.437	2.836	-	2.766	2.991.874.331					2,766	2.991.874.331	101,99	5,09	2,766	2.991.874.331	98,81	0,94
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	12 Laporan	600.000.000	12	129.701.100	6	144.539.600		-		-												
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	1.305 Unit	318.235.000.000	3.071	1.036.660.600	2.821	58.630.323.837	2.836	-	2.766	2.991.874.331												
		Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah	Jumlah Trayek Utama dan Feeder di Kota	33 Trayek	2.300.000.000	80,6	108.994.480	33	271.499.900	28	10.291.600	28	35.661.600					28	45.953.200	84,85	16,93	28	45.953.200	84,85	2,00

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Kabupaten/Kota																							
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Dokumen	2.300.000.000	3	108.994.480	3	271.499.900	1	10.291.600		36.661.600					1	45.953.200	33,33	16,93	1	45.953.200	9,09	2,00
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	379.000.000	24	183.269.225	1	144.484.000		-		-												
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	379.000.000	3	183.269.225	1	144.484.000		-		-												
	Meningkatnya pelayanan transportasi publik yang berkelanjutan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase Penetapan Kebijakan Jaringan Perkeretaapian Kewenangan Kota**	**100 Persen**	**295.000.000**	**23,1**	**-**	**100**	**137.576.900**		**-**		**-**												

NO	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (Persen)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Persen)	
										I		II		III		IV									
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	**Jumlah dokumen perencanaan kebijakan jaringan perkeretaapian**	1 Dokumen	295.000.000	1	-	1	137.576.900		-		-												
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	295.000.000	1	441.170.055	1	137.576.900		-		-												

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kerja Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel dibawah.

3.1. Program dan Kegiatan

Sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Bogor pada Tahun 2025 melaksanakan 1 urusan, 3 Program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dakumen Perencanaan Perangakat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2.3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

2.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota

3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2) Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2.8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota
2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.9. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

3.1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Bogor

Jumlah Pagu Anggaran : **Rp. 163.720.778.843,-**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERHUBUNGAN							181.673.343.821	142.232.344.377	163.720.778.843							348.129.615.280	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							181.673.343.821	142.232.344.377	163.720.778.843							348.129.615.280	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							181.673.343.821	142.232.344.377	163.720.778.843							348.129.615.280	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan Dinas Perhubungan				100 Persen	100 Persen	88.020.888.376	87.995.833.963	89.945.354.265							59.822.199.480	
							Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pelaporan Kinerja				11.05 Nilai	11.05 Nilai											
							Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Evaluasi Internal				20.21 Nilai	20.21 Nilai											
							Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Pengukuran Kinerja				26.26 Nilai	26.26 Nilai											
							Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Aspek Perencanaan Kinerja				27.73 Nilai	27.73 Nilai											
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran Renja Dinas Perhubungan	-			6 Dokumen	100 Persen	34.997.200	34.997.200	34.997.200			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		340.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				7 Laporan	80 Persen											
							Persentase Realisasi Anggaran kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan					85 Persen											
							Persentase Realisasi Fisik kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan					100 Persen											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	19.997.200	19.997.200	17.619.600	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	15.000.000	15.000.000	10.496.200	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	-			250 Orang/ Bulan	100 Persen	36.444.096.120	36.647.621.166	36.647.621.166			-	-	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor		39.132.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA				31 Laporan												
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/bulan	229 Orang/bulan	36.319.813.120	36.537.378.166	37.281.071.740	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			39.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				31 Laporan	31 Laporan	124.283.000	110.243.000	109.318.100	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			132.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0	0	0			-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	-		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Aktivitas Kegiatan : Pengadaan Finger Print				-	11 Unit	0	0	27.089.400	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			12 Laporan 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket	100 Persen	1.194.779.395	796.856.553	796.856.553			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		2.301.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Pengadaan Lampu esensial - Pemeliharaan Jaringan Listrik				2 Paket	2 Paket	12.690.198	13.094.198	13.094.198	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Bahan Komputer				2 Paket	2 Paket	99.311.800	79.460.800	71.105.100	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Belanja Perabot Kantor - Belanja Bendera - Belanja Karangan Bunga				2 Paket	2 Paket	29.999.700	37.106.800	32.076.000	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Pengisian Ulang Tabung Gas LPG - Spanduk - Kegiatan Harhubnas - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				2 Paket	5 Paket	312.616.497	316.466.655	244.087.335	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : Belanja Barang Cetakan				1 Paket	1 Paket	499.961.500	45.388.200	31.703.900	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : Publikasi pada Media Online Lokal				12 Dokumen	12 Dokumen	24.999.700	25.098.100	24.978.100	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aktivitas Kegiatan : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12 Laporan	12 Laporan	215.200.000	280.241.800	176.682.800	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			10 Unit	100 Persen	142.999.009	116.272.200	116.272.200			-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Bogor		826.699.480	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Derek				-	1 Unit	0	0	1.496.280.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Pengadaan Komputer - Pengadaan Printer				15 Unit	15 Unit	142.999.009	116.272.200	81.599.700	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			826.699.480	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Laporan 48 Laporan	100 Persen	46.601.096.835	46.592.066.332	46.592.066.332			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		12.430.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Pembayaran Tagihan Telepon - Pembayaran Tagihan Air - Pembayaran Tagihan Listrik Kantor, Penerangan Jalan Umum dan Fasilitas Lalin - Belanja Kawat/Faksimili/ TV Berlangganan - Biaya Internet				12 Laporan	12 Laporan	36.892.716.800	36.891.935.364	36.890.975.364	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			330.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Aktivitas Kegiatan : - Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja - Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan - Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				48 Laporan	48 Laporan	9.708.380.035	9.700.130.968	9.697.020.568	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			12.100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	-			1 Unit 50 Unit 95 Unit	100 Persen	3.602.919.817	3.808.020.512	3.808.020.512			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		4.792.500.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Aktivitas Kegiatan : - Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Lapangan - Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional atau Lapangan - Pembayaran Pajak Kendaraan - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional				85 Unit	95 Unit	3.203.336.300	3.152.436.221	3.151.583.714	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			3.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Aktivitas Kegiatan : - Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam - Pemeliharaan CCTV - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Printer				20 Unit	50 Unit	199.645.517	203.785.291	136.773.446	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			192.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Aktivitas Kegiatan : - Penambahan Daya Listrik Kantor - Pengecatan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor				1 Unit	1 Unit	199.938.000	451.799.000	451.799.000	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penganan Titik Lokasi Rawan Kemacetan				100 Persen	100 Persen	93.514.878.545	54.100.143.514	73.639.057.678							288.307.415.800	
							Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik				88 Persen	88 Persen											
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	100 Persen	190.461.200	190.461.200	190.461.200			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : Penyusunan Data Dasar Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Bogor				1 Dokumen	1 Dokumen	190.461.200	190.461.200	190.461.200	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang berkondisi baik	-			1 Unit, 2500 Unit, 2 Unit 5063 Unit	92,50 Persen	28.713.906.776	28.815.166.470	28.815.166.470			-	-	Masyarakat		68.367.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Aktivitas Kegiatan :				1 Unit	0 Unit	195.747.276	0	0	Kota Bogor, Bogor Sel, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Aktivitas Kegiatan : - Pengadaan Lampu APJ Pemasangan APJ Usulan POKIR dan Musrenbang - Penyusunan Kajian Inventarisasi Kebutuhan APJ - Penyusunan Kajian Inventarisasi KWH Meter				5831 Unit	5204 Unit	24.760.000.000	25.057.611.770	25.057.611.770	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			12.465.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Aktivitas Kegiatan : - Pemeliharaan Shelter, Pos Gatur, dan Rambu - Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan - Revitalisasi Shelter - Kajian Revitalisasi Shelter Sesuai Standar - Kajian Revitalisasi JPO Paledang				123 Unit	144 Unit	102.409.500	102.409.500	609.534.700	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-			592.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Aktivitas Kegiatan : - Pengadaan Lampu LED - Pengadaan Fotocell - Pengadaan Komponen Jaringan APJ - Pengadaan Komponen MCB dan Panel - Pengadaan Komponen Penunjang Lampu Konvensional - Pengadaan Peralatan Teknisi APJ				15000 Unit	3414 Unit	3.655.750.000	3.655.145.200	5.626.783.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan			55.310.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C dan pangkalan yang dikelola	-			1 U 1 Unit	2 Lokasi	3.654.010.077	12.373.276.496	12.373.276.496			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		10.534.240.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) Aktivitas Kegiatan : - Revitalisasi Terminal Bubulak (Emplacement Tahap I) - Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	3.574.010.077	12.295.398.280	12.382.758.280	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			9.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara Aktivitas Kegiatan : - BBM Mesin Potong Rumput - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Bahan Komputer - Belanja Alat Kebersihan - Sewa Lahan Tempat Parkir Bus Wisata dan Bus Sekolah				1 Unit	1 Unit	80.000.000	77.878.216	76.500.916	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.534.240.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase ketersediaan lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	-			2 Laporan	86 Persen	108.423.200	71.861.600	71.861.600			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : Sosialisasi Perparkiran terhadap Juru Parkir				2 Laporan	1 Laporan	108.423.200	71.861.600	37.411.600	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	-			12 Unit 1 Laporan 2 Unit 4123 Dokumen	98 Persen	570.681.700	499.407.000	499.407.000			-	-	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		2.042.355.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Aktivitas Kegiatan : - Pengadaan Perlengkapan PKB (Kertas Gesek)				2 Unit	4 Unit	79.955.800	154.341.200	453.111.300	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			526.051.800	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							- Pengadaan Perlengkapan PKB (Ribbon Black)																
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Aktivitas Kegiatan :				4123 Dokumen	0 Dokumen	119.979.300	0	0	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			797.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Aktivitas Kegiatan : - Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite (Genset) - Pemeliharaan dan Pembelian Sparepart Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan SIM PKB Pengujian Kendraan Bermotor (Aplikasi SIMA Pangeran)				12 Unit	12 Unit	319.052.400	293.371.600	289.731.400	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			641.629.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Aktivitas Kegiatan : Jasa Audit/Surveillance ISO 9001 : 2015				1 Laporan	1 Laporan	51.694.200	51.694.200	51.694.200	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.175.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	-			2 Laporan 3 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan	88 Persen	964.388.255	1.177.402.348	1.177.402.348			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		6.775.820.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : Kegiatan Pengaturan, Pengamanan Penyelenggaraan Lebaran, Natal dan Malam Tahun Baru				2 Laporan	2 Laporan	115.599.800	106.959.800	96.669.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			413.820.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : Honorarium Anggota Forum LLAJ				4 Laporan	4 Laporan	9.856.000	8.437.500	7.689.500	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan Aktivitas Kegiatan : - Belanja Bahan Marka - Perangkat pendukung APILL ATCS dan Non ATCS - Pengadaan Cermin Tikungan (POKIR & Musrenbang) - Pengadaan dan Pengecatan Marka Zebra Cross (POKIR) - Pengadaan Rambu Standar Uk.75 - Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Pemisah Lajur				18 Dokumen	6 Dokumen	600.992.255	824.064.848	1.820.897.486	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan			5.012.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi Aktivitas Kegiatan : - Kajian Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang di Kota Bogor - Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Rawan Kemacetan dan Rawan Kecelakaan di Kota Bogor				2 Laporan	2 Laporan	237.940.200	237.940.200	237.940.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.050.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	-			11 Laporan	100 Persen	122.160.000	121.568.000	121.568.000			-	-	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Aktivitas Kegiatan : Kegiatan Operasi Terpadu, Pemeriksaan Surat-surat Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bus AKAP/AKDP di Terminal				16 Laporan	11 Laporan	40.880.000	40.464.000	39.964.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Aktivitas Kegiatan : Kegiatan Operasi Terpadu, Pemeriksaan Surat-surat Kendaraan Secara Mobile				24 Laporan	11 Laporan	81.280.000	81.104.000	80.892.800	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	-			2821 Unit 6 Laporan	2821 Unit	58.774.863.437	10.562.643.900	10.562.643.900			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		198.425.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : - Re-routing Angkutan umum Penumpang - Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik (SIMAE)				6 Laporan	6 Laporan	144.539.600	110.031.600	109.553.200	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Aktivitas Kegiatan : - Persiapan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Umum - Audit Pemeriksaan Tertentu dari Akuntan Publik - Kajian Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Umum - Peningkatan layanan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan				2821 Unit	2821 Unit	58.630.323.837	10.452.612.300	26.242.670.926	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			198.125.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang	Jumlah Trayek Utama dan Feeder di Kota	-			2 Dokumen	33 Trayek	271.499.900	144.552.500	144.552.500			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : - Sosialisasi DARTIBLANTAS Setingkat SD, SMP dan SMA - Sosialisasi Aplikasi SIMA-E Terhadap Badan Hukum				2 Dokumen	3 Dokumen	271.499.900	144.552.500	83.378.000	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	144.484.000	143.804.000	143.804.000			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		163.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Aktivitas Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	144.484.000	143.804.000	143.804.000	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
3	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase penetapan kebijakan Rencana Induk Perekeretaapian				100 Persen	100 Persen	137.576.900	136.366.900	136.366.900							0	
	2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	137.576.900	136.366.900	136.366.900			-	-	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Aktivitas Kegiatan : Penyusunan Kajian Kelembagaan Pengelola Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	137.576.900	136.366.900	136.366.900	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0	DINAS PERHUBUNGAN
												J U M L A H	**181.673.343.821**	**142.232.344.377**	**163.720.778.843**							**348.129.615.280**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Perangkat Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Bogor serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026. Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

Lampiran s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RKP) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

DP3A Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja DP3A Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan dan target kinerja.

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2025, yang diharapkan dapat

memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor yaitu "Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing" dan tujuan 4 Rencana Pembangunan Daera Kota Bogor yaitu "Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan". Disamping itu dalam rangka penyelarasan serta kesinambungan upaya pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota bogor dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi DP3A Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap anggaran program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2025.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DP3A Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP3A Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PerubahanUndang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tara Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Perwali Nomor 140 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perwali Nomor 3 tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 3);
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2024-2025 (Berita Daerah Kota Bogor tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor tahun 2024 Nomor 17);
29. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 19)

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja DP3A Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3A TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 12.914.229.230,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 6.398.520.135,- atau 49.5%. Masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan. Adapun capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Kota Bogor 2025 s/d TRW II

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				c							
	2	08				URUSAN PEMBERDAYAAN , PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1	2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A point	10.077.523.411	- point	2.075.813.220	point	2.725.064.049	- point	4.800.877.269	0%	47,6 %
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup DP3A	3,58 point		3,58 point		3,59 point		- point		0%	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
1	**2**	**08**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**A point**	**22.112.400**	**point**	**3.783.600**	**point**	**5.270.000**	**point**	**9.053.600**	**0%**	**40,9%**
	2	08	01	2.01	.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	22.112.400	1 dokumen	3.783.600	1 dokumen	5.270.000	2 dokumen	9.053.600	40%	40,9%
																40%	**41%**
															Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
2	**2**	**08**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**7.336.992.326**	**25 %**	**1.654.650.492**		**1.975.112.906**	**25 %**	**3.629.763.398**	**25%**	**49,5%**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I			II							
								K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8			9			12 = 8+9+10+11			13=12/7*100	
	2	08	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	orang/bulan	7.270.651.526	31	orang/bulan	1.636.459.692		orang/bulan	1.959.062.906	31	orang/bulan	3.595.522.598	100 %	49,5 %
	2	08	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	laporan	66.340.800	1	laporan	18.190.800	1	laporan	16.050.000	2	laporan	34.240.800	50 %	51,6 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																			**75,0%**	**50,5 %**
Predikat Kinerja																			**Sedang**	**Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
3	**2**	**08**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100 %**	**1.107.394.096**	**25 %**	**60.900.790**	**25 %**	**397.982.756**	**50 %**	**458.883.546**	**50 %**	**41,4 %**
	2	08	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.012.000	- paket	0	paket	16.893.800	- paket	16.893.800	0%	67,5 %
	2	08	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	396.596.500	- paket	0	1 paket	128.947.200	1 paket	128.947.200	33 %	32,5 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	65.886.296	1 paket	28.422.900	1 paket	18.387.096	2 paket	46.809.996	67 %	71,0 %
	2	08	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	471.031.000	0 paket	24.069.000	paket	207.755.400	0 paket	231.824.400	0%	49,2 %
	2	08	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.893.300	0 paket	1.899.700	paket	1.285.700	0 paket	3.185.400	0%	46,2 %
	2	08	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	141.975.000	1 laporan	6.509.190	1 laporan	24.713.560	2 laporan	31.222.750	50 %	22,0 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**25 %**	**48%**
Predikat Kinerja																**Sangat**	**Sangat**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
																Rendah	**Rendah**
4	**2**	**08**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100 %**	**217.331.300**	**25 %**	**2.040.000**	**%**	**57.607.000**	**25 -**	**59.647.000**	**25 %**	**27,4 %**
	2	08	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	217.331.300	0 unit	2.040.000	1 unit	57.607.000	1 unit	59.647.000	33 %	27,4 %
															Rata-rata capaian kegiatan (%)	**33 %**	**27%**
															Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
5	**2**	**08**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**916.361.772**	**25 %**	**260.169.838**	**25 %**	**97.989.077**	**50 -**	**358.158.915**	**50 %**	**39,1 %**
	2	08	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	143.069.780	1 laporan	31.468.074	1 laporan	32.886.805	2 laporan	64.354.879	50 %	45,0 %
	2	08	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	773.291.992	1 laporan	228.701.764	1 laporan	65.102.272	2 laporan	293.804.036	50 %	38,0 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**50 %**	**41%**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah
6	**2**	**08**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100 %**	**477.331.517**	**25 %**	**94.268.500**	**25 %**	**191.102.310**	**50 %**	**285.370.810**	**50 %**	**59,8 %**
	2	08	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	296.703.054	5 unit	86.283.500	3 Unit	60.150.300	8 **unit**	146.433.800	47 %	49,4 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 unit	69.734.463	7 unit	7.985.000	20 unit	20.295.000	27 **unit**	28.280.000	39 %	40,6 %
	2	08	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	110.894.000	0 unit	0	1 unit	110.657.010	1 **unit**	110.657.010	100 %	99,8 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**62 %**	**63%**
Predikat Kinerja																**Rendah**	**Rendah**
Rata-rata capaian kinerja program (%)																**48 %**	**45%**
Predikat Kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
2	**2**	**08**	**02**			**Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**	**100 %**	**727.472.911**	**- %**	**70.686.600**	**%**	**128.574.200**	**- %**	**199.260.800**	**0%**	**27,4 %**
1	**2**	**08**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah program yang dilaksanakan oleh PD yang Responsif Gender**	**53 program**	**141.550.600**	**- program**	**3.518.000**	**program**	**62.313.800**	**- program**	**65.831.800**	**0%**	**46,5 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	02	2.01	0003	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 PD	141.550.600	PD -	3.518.000	PD	62.313.800	PD -	65.831.800	0%	46,5 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**0%**	**47%**
Predikat Kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
2	**2**	**08**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perempuan yang mendapatkan penguatan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota**	**30 orang**	**253.217.656**	**10 orang**	**29.705.800**	**orang**	**40.755.200**	**10 orang**	**70.461.000**	**33 %**	**27,8 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	55 organisasi	253.217.656	5 organisasi	29.705.800	10 organisasi	40.755.200	15 organisasi	70.461.000	27 %	27,8 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**27 %**	**28%**
Predikat Kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
3	**2**	**08**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**100 %**	**332.704.655**	**10 %**	**37.462.800**	**8 %**	**25.505.200**	**18 %**	**62.968.000**	**18 %**	**18,9 %**
	2	08	02	2.03	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	450 orang	332.704.655	60 orang	37.462.800	20 orang	25.505.200	80 orang	62.968.000	18 %	18,9 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**18 %**	**19%**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
															Rata-rata capaian kinerja program (%)	15 %	31%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	283.901.200	100 %	58.897.200	100 %	61.573.200	100 %	120.470.400	100 %	42,4 %
1	2	08	03	2.01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17,26 %	25.712.200	0,00 %	0	%	3.907.200	0,000 %	3.907.200	0%	15,2 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.712.200	- dokumen	0	dokumen	3.907.200	- dokumen	3.907.200	0%	15,2%
1	**2**	**08**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**2 layanan**	**220.382.600**	**2,00 layanan**	**58.897.200**	**layanan**	**57.666.000**	**2,00 layanan**	**116.563.200**	**100%**	**52,9%**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
											I				II							
								K		Rp	K		Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2					3	4	7			8				9			12 = 8+9+10+11			13=12/7*100	
	2	08	03	2.01	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	63	orang	220.382.600	16	orang	58.897.200			orang	57.666.000	16	orang	116.563.200	25 %	52,9 %
	2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**76**	**lembaga**	**37.806.400**		**lembaga**	**0**			**lembaga**	**0**		**lembaga**	**0**	**0%**	**0,0 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
											I			II							
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	2					3	4	7			8			9			12 = 8+9+10+11			13=12/7*100	
	2	0 8	0 3	2, 0 3	00 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110	orang	37.806.400		orang	0		orang	0		orang	0	0%	0,0 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																				**50 %**	**15%**
Predikat Kinerja																				**Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja program (%)																				**50 %**	**15%**
Predikat Kinerja																				**Rendah**	**Sangat Rendah**
4	**2**	**0 8**	**0 4**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur**	**79,90**	**point**	**651.445.866**	**-**	**point**	**68.322.700**		**point**	**206.577.666**	**-**	**point**	**274.900.366**	**0,0 %**	**42,2 %**
							Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	**78,27**	**point**		**-**	**point**			**point**		**-**	**point**		**0,0 %**	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
							Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi	68,35 point		- point		point		- point		0,0 %	
							Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,91 point		- point		point		- point		0,0 %	
							Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	66,61 point		- point		point		- point		0,0 %	
1	2	08	04	2.01		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapat Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 orang	343.131.300	0 orang	14.446.000	10 orang	26.169.800	10 orang	40.615.800	10 %	11,8 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II						
								K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9			12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	04	2.01	0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	343.131.300	- laporan	14.446.000	1	laporan	26.169.800	1 laporan	40.615.800	25 %	11,8 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																	**25 %**	**12%**
Predikat Kinerja																	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
2	**2**	**08**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**100 %**	**308.314.566**	**15 %**	**53.876.700**	**50 %**	**180.407.866**	**65 %**	**234.284.566**	**65 %**	**76,0 %**
	2	08	04	2.02	0001	Sub Kegiatan Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	76 lembaga	142.562.700	20 lembaga	39.155.900	20 lembaga	39.806.800	40 lembaga	78.962.700	53 %	55,4 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	04	2.02	0003	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	165.751.866	0 dokumen	14.720.800	2 dokumen	140.601.066	2 dokumen	155.321.866	100 %	93,7 %
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**76 %**	**75%**
Predikat Kinerja																**Tinggi**	**Sedang**
Rata-rata capaian kinerja program (%)																**51 %**	**43%**
Predikat Kinerja																**Rendah**	**Sangat Rendah**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
5	**2**	**8**	**05**			**Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak**	**100 %**	**107.784.500**	**% -**	**2.591.200**	**%**	**21.492.000**	**% -**	**24.083.200**	**0%**	**22,3 %**
1	**2**	**8**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Data gender dan anak**	**36 PD**	**107.784.500**	**- PD**	**2.591.200**	**PD**	**21.492.000**	**PD -**	**24.083.200**	**0%**	**22,3 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	8	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	2 dokumen	81.875.500	- dokumen	1.976.400	dokumen	2.327.400	- dokumen	4.303.800	0%	5,3%
	2	08	05	2,01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	mlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	25.909.000	dokumen	614.800	dokumen	19.164.600	dokumen	19.779.400		
Rata-rata capaian kegiatan (%)																**0%**	**5%**
Predikat Kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Rata-rata capaian kinerja program (%)																**0%**	**5%**
Predikat Kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
6	**2**	**08**	**06**			**Pemenuhan Hak Anak**	**Predikat Kota Layak Anak**	**Utama predikat**	**1.066.101.342**	**- predikat**	**904.137.600**	**Utama predikat**	**74.790.500**	**Utama predikat**	**978.928.100**	**100%**	**91,8%**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
1	**2**	**08**	**06**	**2.01**		**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya pendampingan pemenuhan hak anak terhadap organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha**	**70 %**	**60.144.442**	**0 %**	**558.800**	**10 %**	**6.180.000**	**10 %**	**6.738.800**	**14 %**	**11,2 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	06	2.01	0001	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 organisasi	60.144.442	- organisasi	558.800	5 organisasi	6.180.000	5 organisasi	6.738.800	14 %	11,2 %

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
1	**2**	**08**	**06**	**2.02**		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**6 lembaga**	**1.005.956.900**	**6 lembaga**	**903.578.800**	**lembaga**	**68.610.500**	**6 lembaga**	**972.189.300**	**100 %**	**96,6 %**

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
										I		II					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2					3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
	2	08	06	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.050 orang	219.859.300	7.750 orang	117.481.200	7.750 orang	68.610.500	15.500 orang	186.091.700	86 %	84,6 %
	3	08	06	2.03	0003	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 dokumen	786.097.600	7 dokumen	786.097.600	dokumen	0	7 dokumen	786.097.600	100 %	100,0%

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
						I		II					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100	
Rata-rata capaian kegiatan (%)												**93 %**	**92%**
Predikat Kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Rata-rata capaian kinerja program (%)												**93 %**	**92%**
Predikat Kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												**42,70 %**	**39%**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**12.914.229.230**		**3.180.448.520**		**3.218.071.615**		**6.398.520.135**		**49,5 %**

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
DP3A
TAHUN 2025

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan pengurangan anggaran yang diajukan dalam renja perubahan Tahun Anggaran 2025 DP3A sebesar Rp. 13.013.855.345,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 533.891.323,- (Penambahan PPPK dan CPNS)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp. 15.000.000 (Bertambah anggaran untuk Air PDAM)
3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp. 53721400
4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 399.136.800

Rincian perubahan renja terlampir dalam lampiran matrik renja :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor
Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.10.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**12.914.229.230**	**13.013.855.345**				**14.916.847.318**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja***		***27,01***	**10.077.523.411**	**10.100.759.974**			***27,34***	**11.051.522.294**
						Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		26,55					26,82	
						Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		12,48					13,00	
						Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		21,97					21,98	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
						Presentase Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi		100%						
						Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100%					100,00	
						Persentase Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%					1,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
						Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94%					0,94	
						Persentase Kepatuhan Anggaran		100%					1,00	
						Persentase Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA		95%					0,95	
						Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		94%						
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		88,75					89,00	
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		91,50					91,75	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		88,75					89,00	
						Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		90,50					90,75	
2	**8**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, Evaluasi kinerja, dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi**		**100%**	**22.112.400**	**22.112.400**			**100%**	**5.522.250**
2	8	1	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	9 Dokumen	22.112.400	22.112.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	5.522.250
2	**8**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100%**	**7.336.992.326**	**7.506.523.689**			**100%**	**7.953.933.802**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	32 Orang/bulan	7.270.651.526	7.440.182.889	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Orang/Bulan	7.888.170.802
2	8	1	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	18 laporan	66.340.800	66.340.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	65.763.000
2	**8**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**		**100%**	**1.107.394.096**	**863.734.096**			**100%**	**1.180.065.196**
2	8	1	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	1 Paket	25.012.000	25.012.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	25.011.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	1	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaring in	5 Paket	396.596.500	144.596.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	156.611.500
2	8	1	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaring in	6 Paket	65.886.296	65.886.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	65.884.596
2	8	1	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaring in	1 Paket	471.031.000	477.281.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	590.825.000
2	8	1	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaring in	1 Paket	6.893.300	6.893.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	21.947.700
2	8	1	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaring in	4 Laproran	141.975.000	144.065.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laproran	319.785.000
2	**8**	**1**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**		**100%**	**217.331.300**	**299.696.500**			**100%**	**446.302.300**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
					Pemerintah Daerah									
2	8	1	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	3 Unit	217.331.300	299.696.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	446.302.300
2	**8**	**1**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**916.361.772**	**931.361.772**			**100%**	**854.585.908**
2	8	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	1 Laporan	143.069.780	158.069.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	158.068.196
2	8	1	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	1 Laporan	773.291.992	773.291.992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 laporan	696.517.712
2	**8**	**1**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah berkondisi baik**		**100%**	**477.331.517**	**477.331.517**			**100%**	**611.112.838**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	21 Unit	296.703.054	296.703.054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	296.619.354
2	8	1	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	69 Unit	69.734.463	69.734.463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69 Unit	69.743.484
2	8	1	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	3 Unit	110.894.000	110.894.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	244.750.000
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender**		**100%**	**727.472.911**	**741.182.463**			**100%**	**828.517.628**
2	**8**	**2**	**2**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah sub kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota**		**53,00 sub kegiatan**	**141.550.600**	**141.550.600**			**55 Sub kegiatan**	**145.299.900**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	2	2	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan Kebijakan dan Pendampingan PUG dan PPRG	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	141.550.600	141.550.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	145.299.900
2	**8**	**2**	**2**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perempuan yang mendapatkan penguatan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota**		**30 Perempuan**	**253.217.656**	**253.217.500**			130 Perempuan	**350.606.100**
2	8	2	2	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	55 Organisasi	253.217.656	253.217.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 orang organisasi	350.606.100
2	**8**	**2**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup**		100%	**332.704.655**	**346.414.363**			100%	**332.611.628**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
					Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**								
2	8	2	2	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	450 Orang	332.704.655	346.414.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	**332.611.628**
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase korban Kekerasan Perempuan yang terlayani**		**100%**	**283.901.200**	**286.951.200**			**100%**	**315.934.700**
2	**8**	**3**	**2**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**		**17,26 Nilai**	**25.712.200**	**20.762.200**			**17,25 Nilai**	**0**
2	8	3	2	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	25.712.200	20.762.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
					Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	**8**	**3**	**2**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**		**2,00 Layanan**	**220.382.600**	**228.382.600**			**2,00 Layanan**	**235.808.200**
2	8	3	2	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63 orang	220.382.600	228.382.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		62 Orang	235.808.200
2	**#**	**##**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**		**76 lembaga**	37.806.400	37.806.400			**76 lembaga**	80.126.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	#	# #	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kel. Ciwaring in Kec. Bogor Tengah	**110 Orang**	37.806.400	37.806.400			**120 Orang**	80.126.500
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Nilai Dimensi Kualitas Legal Struktur***		***79,90***	**651.445.866**	**711.075.866**			***80,00***	**623.974.122**
						Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik		78,27					80,00	
						Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi		68,35					70,00	
						Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi		62,91					80,00	
						Nilai Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya		66,61					80,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	**8**	**4**	**2**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah keluarga yang mendapat Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100 Keluarga**	**343.131.300**	**402.761.300**			**100 Keluarga**	**623.974.122**
2	8	4	2	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	343.131.300	402.761.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	623.974.122
2	**8**	**4**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**		**100%**	**308.314.566**	**308.314.566**			**100%**	**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	4	2	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 lembaga	142.562.700	142.562.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76 Lembaga	0
2	8	4	2	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	165.751.866	165.751.866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	0
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak**		100%	**107.784.500**	**107.784.500**			100%	**111.691.000**
2	**8**	**5**	**2**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Data gender dan anak**		**36 PD**	**107.784.500**	**107.784.500**			**36 PD**	**111.691.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	5	2	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	81.875.500	81.875.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	0
2	#	##	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah	1 Dokumen	25.909.000	25.909.000			2 Dokumen	111.691.000
2	**8**	**6**	**2.01**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Skor pada kluster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA**		**101 Angka**	**1.066.101.342**	**1.066.101.342**			104 Angka	**1.985.207.574**
						Skor pada klaster 2 (perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif) KLA		**130 Angka**					137,75 Angka	
						Skor pada kluster 3 (Kesehatan dasar dan kesejahteraan) KLA		**144 Angka**					146 Angka	
						4. Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan		**102 Angka**					102 Angka	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
						Kegiatan Budaya) KLA								
2	**8**	**6**	**2**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**		**70,00 Persen**	**60.144.442**	**60.144.442**			76,00 Persen	**93.866.974**
2	8	6	2	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Organisasi	60.144.442	60.144.442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Organisasi	93.866.974
2	**8**	**6**	**2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**		**7 Lembaga**	**1.005.956.900**	**1.005.956.900**			**7 Lembaga**	1.891.340.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									Sebelum	Sesudah				
2	8	6	2	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.050 Orang	219.859.300	219.859.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.200 Orang	1.165.620.600
2	8	6	2	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	786.097.600	786.097.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	725.720.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra DP3A Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan hasil pelaksanaan Renja DP3A Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Tujuan PembangunanKota Bogor

Perubahan Renja DP3A Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan DP3A Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan yaitu **"*Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing*"** dan ***" Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan".***

Lampiran t. Satuan Polisi Pamong Praja

BAB I
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mempunyai tugas menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib, tidak terlepas dari peran aktif koordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya sebagai Perangkat Daerah, yang mempunyai fungsi yang sama dan pelaksana teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Polisi Pamong Praja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum, dan pembinaan masyarakat dan anggota Satuan.
b. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kota serta kebijakan perlindungan masyarakat.

d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
f. Pelaksanaan administrasi umum Satuan.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Satuan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa dalam era reformasi yang berkembang saat ini, mendesak kita bekerja secara terukur dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi sehingga fungsi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan taat azas maka perlu adanya konsistensi dalam menjalankan tugas yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan yang baik, terukur dan akuntabel telah ditetapkan RPJMD Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor maka RPJMD tersebut sebagai acuannya. Dengan demikian maka untuk melaksanakan program 1 (satu) tahun ke depan maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perubahan sebagai rencana operasional kegiatan 2025. Rencana Kerja tersebut sebagai implementasi strategis jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

Dokumen Renja Perangkat Daerah dan Renja Perubahan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Prioritas Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 diarahkan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota.
7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pamong Praja.
9. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
16. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-BKAD/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.100-Bkad/2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (P-RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selama Tahun 2025 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja perubahan, rencana capaian kinerja perubahan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan dan realisasi.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
Tujuan 1											
Terwujudnya penegakkan perda dan perkada serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9.2%	3.076.138.529	1,6%	458.497.000	1,6%	1.328.207.440	17,3%	47,2%	Sangat Kurang
Sasaran 1.1											
Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada		Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9.2%	3.076.138.529	1,6%	458.497.000	1,6%	1.328.207.440	17,3%	47,2%	Sangat Kurang

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Ketera ngan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	100%	3.076.138.529	100%	458.497.000	100%	1.328.207.440	100%	47,2%	Sangat Tinggi
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan)	100%		100%		100%		100%		
		Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%		100%		100%		100%		
		Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%		100%		100%		100%		
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	1.845.575.000	100%	456.697.000	100%	864.379.000	100%	49,9%	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.165.800	1 Dokumen	7.143.000	1 Dokumen	7.143.000	100%	14,5%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	29.000.000	-	-	-	-	- %	- %	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	208 Orang	112.808.000	125 Orang	-	125 Orang	1.910.000	60%	2,7%	Sedang

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	395 Orang	81.436.200	0 Orang	-	-	1.856.000	-	4%	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	128.745.000	3 Laporan	55.014.000	6 Laporan	69.014.000	100%	53,6%	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.373.420.000	3 Laporan	394.540.000	6 Laporan	784.456.000	100%	57,2%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	37.000.000	- Laporan	-	- Laporan	-	100%	-	Tidak ada warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	100%	1.215.455.529	100%	1.800.000	100%	463.828.440	100%	43,2%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	74.775.784	- Laporan	1.800.000	1 Laporan	10.962.150	20%	14,7%	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	637.612.225	- Laporan	-	1 Laporan	371.530.200	100%	74,9%	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	499.067.820	3 Laporan	-	6 Laporan	81.336.090	100%	16,3%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	3.999.700	3 Laporan	-	6 Laporan	-	100%	-	Sangat Tinggi

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	100%	15.108.000	-%	-	-	-	-	-	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	15.108.000	- Laporan	-	-	-	-	-	Sangat Kurang

Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
Tujuan 2											
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A	44.876.775.705	-	11.571.387.780	-	23.277.912.895	-	51,7%	Penilaian Akhir Tahun
		IKM di Lingkup Perangkat Daerah	3,55		3,71		3,72		104%		Sangat Tinggi
Sasaran 2.1											
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	88,75	44.876.775.705	-	11.571.387.780	-	23.277.912.895	-	51,7%	Sangat Kurang

Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	44.876.775.705	-	11.571.387.780	-	23.277.912.895	-	51,7%	Penilaian Akhir Tahun
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥ 1 Inovasi /tahun /PD		-		-		-		Penilaian Akhir Tahun
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91%		-		-		-		Penilaian Akhir Tahun
Sasaran 2.1											
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80	44.876.775.705	92,78	11.571.387.780	92,98	23.277.912.895	103%	51,7%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28,00	44.876.775.705	-	11.571.387.780	-	23.277.912.895	-	51,7%	Penilaian Akhir Tahun
		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26,10		-		-		-		
		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	11,65		-		-		-		
		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23,05		-		-		-		
		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	100%		25%		50%		50%		Kurang

Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%	44.876.775.705	100%	11.571.387.780	100%	23.277.912.895	100%	51,7%	Penilaian Akhir Tahun
		Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah	94%		-		-		-		
		Persentase Kepatuhan Anggaran	100%		-		-		-		
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	100%		-		-		-		
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94%		-		-		-		

Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	90,30	44.876.775.705	92,37	11.571.387.780	92,72	23.277.912.895	102%	51,7%	Sangat Tinggi
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85,15		93,16		93,31		109%		
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	90,00		94,26		94,76		105%		
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	93,85		92,63		92,13		98%		

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	19.999.800	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	30%	Sangat Tinggi
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		
		Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		
		Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.999.800	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	33,3%	31,3%	Sangat Kurang
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000	3 Laporan	3.500.000	3 Laporan	3.500.000	50%	29,2%	Kurang

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100%	37.287.583.892	100%	8.653.792.996	100%	18.962.795.591	100%	50,9%	Sangat Tinggi
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%		100%		100%		100%		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210/14 orang/ bulan	37.287.583.892	210/3 orang/bulan	8.653.792.996	200/6 orang/bulan	18.962.795.591	100%	50,9%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	851.806.567	100%	456.013.876	100%	550.116.876	100%	69,1%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	414.824.200	1 Paket	212.253.800	1 Paket	265.253.800	100%	63,9%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	52.441.100	1 Paket	12.882.000	1 Paket	25.588.000	100%	48,8%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	1 Paket	6.900.000	1 Paket	10.650.000	100%	47,3%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	228.313.904	1 Paket	204.285.000	1 Paket	207.277.000	100%	90,8%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	40.953.363	1 Dokumen	8.675.000	1 Dokumen	13.045.000	100%	31,9%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.274.000	1 Laporan	11.018.076	1 Laporan	28.303.076	100%	77,5%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	150.834.700	100%	150.750.000	100%	150.750.000	100%	99,9%	Sangat Tinggi
	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.834.700	100%	150.750.000	100%	150.750.000	100%	99,9%	Sangat Tinggi
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.001.778.171	100%	1.708.003.564	100%	2.677.526.514	100%	53,5%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	219.875.155	3 Laporan	24.837.237	6 Laporan	51.759.207	50%	23,5%	Kurang
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.781.903.016	3 Laporan	1.683.166.327	6 Laporan	2.625.767.307	50%	54,9%	Kurang
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	1.564.772.575	100%	596.827.344	100%	930.723.914	100%	60,8%	Sangat Tinggi

Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025		Keterangan
					I		II				
			Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Anggaran (%)	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1.440.842.203	16 Unit	565.487.344	33 Unit	859.345.914	50%	59,6%	Kurang
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	81.630.372	21 unit	17.040.000	43 Unit	41.528.000	50%	68,2%	Kurang
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.300.000	1 Unit	14.300.000	1 Unit	29.850.000	100%	99,9%	Sangat Tinggi

Penjelasan dari tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja capaian pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025
- Kolom 6 merupakan kondisi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sub kegiatan triwulan I tahun 2025.
- Kolom 8 merupakan kondisi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sub kegiatan triwulan II tahun 2025.
- Kolom 10 merupakan realisasi capaian target renja perangkat daerah s/d triwulan II tahun berjalan 2025.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

2.2. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Gambaran pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020. Dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Kondisi Kinerja pada Tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	-	-	1,6%	9,2%	10,9%	-	-	2,2%	2,9%	
2	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	-	-	A	A	A	-	-	A	A	
3	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	-	-	N/A	95%	95%	-	-	95%	95%	
4	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	-	-	N/A	≥ 1 Inovasi/ tahun/ PD	≥ 1 Inovasi/ tahun/ PD	-	-	≥ 1 Inovasi /tahun/PD	≥ 1 Inovasi /tahun/PD	
5	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	-	-	N/A	92%	92%	-	-	92%	92%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Kondisi Kinerja pada Tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	√	-	-	29	29	-	-	29	29	
7	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	√	15,4	15,5	15,7	-	-	15,5	15,7	
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	√	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
9	Persentase Penegakan PERDA	-	√	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	√	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	√	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

Pada Tabel diatas menggambarkan kondisi kinerja pada tahun 2024 serta target, realisasi capaian, proyeksi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026, yang mana merupakan tahun transisi perencanaan. Menunjukan adanya perbedaan indikator sasaran dengan Renstra sebelumnya dan belum ada realisasi capaian pada tahun 2025 dan 2026.

Capaian kinerja berdasarkan 2 Sasaran Renstra 2025-2026 yaitu : *Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada* dan *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah*.

Indikator sasaran renstra adalah :

1. Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada

   Indikator Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dapat dikategorikan *memenuhi target*, dengan kondisi kinerja awal 1,6%.
2. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

   Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja nilai A dan realisasi nilai A dengan capaian 100%.
3. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

   Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dengan kondisi kinerja awal N/A.
4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)

   Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dengan kondisi kinerja awal N/A.

5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

   Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dengan kondisi kinerja awal N/A.

Capaian kinerja selama tahun 2024 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai Permendagri nomor 121 tahun 2018.

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

   Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2024 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 29 orang atau 100% dengan asumsi penilaian terbalik yaitu 100% sama dengan 0 (nol) orang. Sehingga capaian SPM trantibum berdasarkan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada tahun 2024 realisasinya 100% dengan capaian 100% (tidak ada masyarakat Kota Bogor yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada).

Capaian kinerja selama tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja menurut Bidang urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

   Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2024 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 15,4 dan realisasi 15,4 dengan capaian 100%.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

   Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2024 dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
3. Persentase Penegakan PERDA

   Indikator Persentase Penegakan PERDA dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja selama tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Permendagri Nomor 18 tahun 2020.

1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

   Indikator Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
2. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

   Indikator Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan dapat dikategorikan *memenuhi target*, target kinerja 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

1. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Keberadaan Satpol PP Kota Bogor, sebagai entitas wilayah Kota di Propinsi Jawa Barat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan lembaga pusat dan lembaga daerah Propinsi. Sehingga

untuk menghindari duplikasi program maupun tidak terakomodasi beberapa kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Rencana Kerja Satpol PP Kota Bogor perlu disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian dan Rencana Kerja Propinsi Jawa Barat. Hal ini penting sebagai upaya menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dari Rencana Kerja kedua entitas tersebut (Pusat dan Propinsi) dalam pelayanan Satpol PP di Kota Bogor.

Dimana tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, semestinya dimulai dengan kesatuan arah dan gerak yang saling mendukung. Selanjutnya faktor pendorong terhadap pelayanan Satpol PP Kota Bogor, yaitu mengenai kesamaan penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Kerja yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam ranah kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satpol PP Kota Bogor dengan Satpol PP Propinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ini oleh Kementerian terkait.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh

pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal

maupun eksternal. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sarana dan prasarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal
			Kapasitas sumber daya anggota Satpol PP dan Sat linmas belum optimal
		Rendahnya pemahaman masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya peran serta masyarakat dan perlunya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan

dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :

a. Era revolusi industri 4.0 berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat, dimana pemanfaatan teknologi internet dalam berbagai hal mulai menjadi kebutuhan utama setelah sandang dan pangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tentu harus merespon revolusi industri 4.0 ini dengan sumber daya manusia yang cakap dan melek teknologi.
b. Pembangunan ruang publik dan infrastruktur yang sangat pesat, berdampak pada meningkatnya aktifitas masyarakat pada ruang publik dan kunjungan wisatawan sehingga diperlukan pengawasan ekstra guna meminimalisir terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun peluang yang ada diantaranya :

a. Peraturan perundang - undangan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkannya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.
b. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berusia relatif muda / fresh graduate diharapkan dapat

membawa pada perubahan positif yang merespon era revolusi industri 4.0.

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda.

d. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah yang baik .

e. Menguatnya demokratisasi dan good governance.

4. Rekomendasi strategis dalam penyelenggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di lingkungan Kota Bogor :

   a. Aspek regulasi yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan.

   b. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.

   c. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

   d. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur Satpol PP.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab III fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (P RKPD). Rencana Kerja Perubahan disusun memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Dalam Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Berikut program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
3) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

B. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1) Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
2) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

4) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025
dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
105	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				**44.876.775.705**				**48.463.151.027**
105.02	Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Dan Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan		100%	2.276.558.829	APBD, DBHCHT		100%	2.868.760.929
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)		100%				100%	
		Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan		100%				100%	
		Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	Kota Bogor	100%	1.845.575.000	APBD		100%	1.732.843.200
105.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 Dokumen	83.165.800	APBD		1 Dokumen	49.290.000
105.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bogor	1 Dokumen	29.000.000	APBD		1 Dokumen	28.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bogor	208 Orang	112.808.000	APBD		104 Orang	71.416.000
105.02.2.01.0 0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kota Bogor	395 Orang	81.436.200	APBD		307 Orang	46.412.200
105.02.2.01.0 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bogor	12 Laporan	128.745.000	APBD		12 Laporan	128.745.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.01.00016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Bogor	12 Laporan	1.373.420.000	APBD		12 Laporan	1.371.980.000
105.02.2.01.00017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Bogor	1 Laporan	37.000.000	APBD		1 Laporan	37.000.000
105.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada	Kota Bogor	100%	415.875.829	APBD		100%	1.128.769.729

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kota Bogor	1 Laporan	74.775.784	APBD		1 Laporan	74.775.784
105.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bogor	4 Laporan	317.780.345	APBD, DBHCHT		4 Laporan	550.926.425
105.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Bogor	12 Laporan	19.320.000	APBD, DBHCHT		12 Laporan	499.067.820

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.02.2.02.00012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bogor	12 Laporan	3.999.700	APBD		12 Laporan	3.999.700
105.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	Kota Bogor	100%	15.108.000	APBD		100%	7.148.000
105.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Bogor	1 Laporan	15.108.000	APBD		1 Laporan	7.148.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja		28,00	44.876.775.705	APBD		28,00	45.594.390.098
		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		26,10				26,10	
		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		11,65				11,65	
		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		23,05				23,05	
		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%	44.876.775.705	APBD		100%	45.594.390.098
		Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah		94%				94%	
		Persentase Kepatuhan Anggaran		100%				100%	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA		100%				100%	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		94%				94%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%	44.876.775.705	APBD		100%	45.594.390.098
		Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah		94%				94%	
		Persentase Kepatuhan Anggaran		100%				100%	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA		100%				100%	

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	Kota Bogor	100%	19.999.800	APBD		100%	19.999.800
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	Kota Bogor	100%				100%	
		Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	Kota Bogor	100%				100%	
		Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	Kota Bogor	100%				100%	

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	3 Dokumen	7.999.800	APBD		3 Dokumen	7.999.800
105.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6 Laporan	12.000.000	APBD		6 Laporan	12.000.000

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	Kota Bogor	100%	37.287.583.892	APBD		100%	38.220.620.285
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100%		APBD		100%	
105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	210/14 orang/bulan	37.287.583.892	APBD		210/14 orang/bulan	38.220.620.285

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Kota Bogor	100%	851.806.567	APBD		100%	669.572.567
105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	414.824.200	APBD		1 Paket	288.824.200.
105.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	52.441.100	APBD		1 Paket	52.441.100
105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	45.000.000	APBD		1 Paket	22.500.000

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	228.313.904	APBD		1 Paket	228.313.904
105.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Bogor	1 Dokumen	40.953.363	APBD		1 Dokumen	40.953.363
105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	70.274.000	APBD		1 Laporan	36.540.000

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	150.834.700	APBD		100%	150.834.700
105.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	10 Unit	150.834.700	APBD		10 Unit	150.834.700
105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	5.001.778.171	APBD		100%	5.001.778.171
105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	219.875.155	APBD		12 Laporan	219.875.155

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025	Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	4.781.903.016	APBD		12 Laporan	4.781.903.016
105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Kota Bogor	100%	1.564.772.575	APBD		100%	1.531.584.575
105.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bogor	65 Unit	1.440.842.203	APBD		65 Unit	1.440.842.203

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	RKPD 2025 Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
105.01.2.09.0006	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	86 Unit	81.630.372	APBD		86 Unit	60.850.372
105.01.2.09.0009	**Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	42.300.000	APBD		1 Unit	29.892.000

BAB VI
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merupakan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang merupakan rencana strategis berjangka waktu 2 (dua) tahun dan harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan usulan anggaran APBD sebesar Rp. 44.876.775.705,- menjadi Rp. 48.463.151.027,- yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan.

Lampiran u. Dinas Perumahan dan Permukiman

Bab I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan kerja tahunan dan menjadi terjemahan dari dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) ke dalam kegiatan operasional tahunan. Perubahan Renja menjadi instrumen penting yang mendukung penyusunan Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), serta mengimplementasikan tujuan strategis dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Kualitas dari Renja sangat bergantung pada mutu program dan kegiatan yang dirancang, yang tentunya harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan perubahan Renja merupakan hasil dari analisis strategis terhadap berbagai isu yang berkembang dan harus direspons melalui program dan kegiatan yang relevan. Oleh karena itu, keberhasilan penyusunan Renja dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam merancang, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kinerja, khususnya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 merujuk pada arahan strategis yang tercantum dalam Perubahan RKPD tahun 2025, dan dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan Perubahan RKPD. Penyusunan diawali dengan evaluasi kondisi perangkat daerah, kinerja semester I Renja 2025, dan pemetaan capaian kinerja.

Penetapan dokumen Perubahan Renja dilakukan melalui pengesahan oleh kepala daerah dan menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan prioritas untuk tahun anggaran

berjalan. Penyusunan ini mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Disperumkim Kota Bogor Tahun 2025 didasari oleh berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain:

- Undang-undang mengenai pembentukan kota besar dan kecil (UU No. 16 Tahun 1950, dan perubahannya).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No. 17 Tahun 2007 (RPJPN 2005–2025).
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, dan lainnya terkait evaluasi dan pengelolaan keuangan daerah.
- Permendagri terkait perencanaan, pengelolaan keuangan, gender mainstreaming, sistem informasi pembangunan daerah, dan klasifikasi perencanaan pembangunan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor tentang RPJPD, RPJMD, RTRW, serta struktur organisasi perangkat daerah.
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Tusi Disperumkim.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk:

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Visi Kota Bogor "**BOGOR BERES, BOGOR MAJU**" dengan Misi sebagai berikut :

1. BOGOR PINTAR

   Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal;
2. BOGOR SEHAT

   Memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan manusia;
3. BOGOR SEJAHTERA

   Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. BOGOR LANCAR

   Menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik;

Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD perpanjangan tangan Kepala Daerah yang mendukung pencapaian Misi ke-2 yakni "***BOGOR SEHAT***" akan berupaya untuk mendukung pencapaian Visi Misi tersebut melalui program dan kegiatan yang akan tertuang dalam Dokumen Rencana

Kerja Tahun 2026.

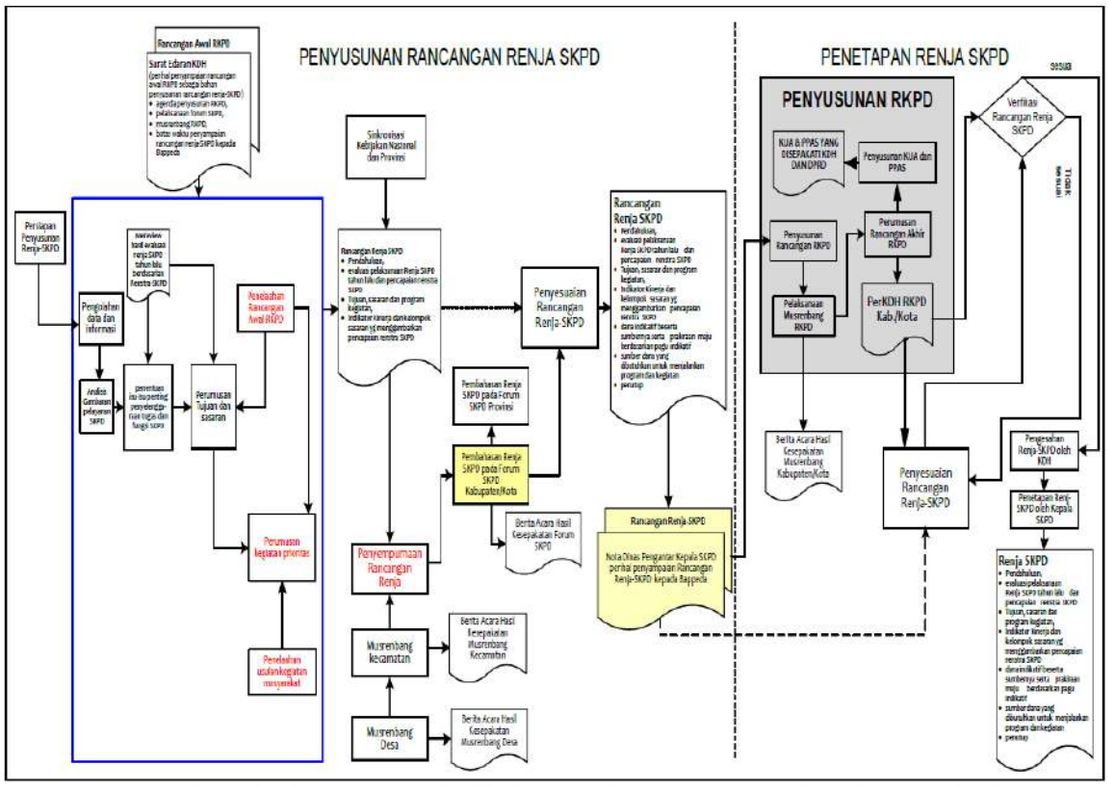

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025 meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025

Bab IV Penutup

Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan PD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan, dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Disperumkim disusun berdasarkan analisis kondisi objektif dari permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut, disusunlah suatu program dan kegiatan perubahan. Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perubahan PD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Selanjutnya program - program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2025 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Perumahan
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
d. Program Kawasan Permukiman
e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Renja hingga Semester I Tahun 2025

Sampai dengan pertengahan tahun 2025, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor telah menjalankan berbagai program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam Renja 2025. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator kinerja terhadap target tahunan serta membandingkannya dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya (Tahun 2024).

Secara umum, kinerja Disperumkim hingga Semester I tahun 2025 memperoleh raport merah dikarenakan adanya kesalahan perencanaan baik target fisik dan keuangan, kendala administrasi serta penganggaran. Selain itu ada pula kegiatan yang sudah direncanakan tetapi terkendala anggaran sehingga tidak dilaksanakan. Meskipun demikian capaian Disperumkim menunjukkan tren positif jika dibandingan dengan capaian target tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Secara umum Disperumkim Kota Bogor sudah melakukan tugas dan fungsinya pada perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), rusunawa, dan kawasan kumuh, penyelenggaraan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum), seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya di kawasan permukiman, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pelaksanaan tugas teknis lain yang diberikan oleh wali kota sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah korektif melalui penyesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja 2025 agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2. 1 Raport Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Semester 1 (Periode Januari s/d Juni Tahun 2024)

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEU	FISIK	
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	5.152.800,00	2.726.400,00	52.91	2.726.400,00	52.91	52.91	52.91	0	0	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
2	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	3.150.000,00	2.127.600,00	67.54	2.127.600,00	67.54	67.54	67.54	0	0	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	98.839.420,00	9.139.900,00	9.25	9.139.900,00	9.25	9.25	9.25	0	0	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	15.155.464.317,00	8.300.027.969,00	54.77	8.300.027.969,00	54.77	54.77	58.1	0	3.33	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
5	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	1.259.600,00	1.259.600,00	100	1.259.600,00	100	100	100	0	0	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	125.331.300,00	60.170.400,00	48.01	60.170.400,00	48.01	48.01	48.01	0	0	RESKA NURDIANTI, S.E.,M.M.
7	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	156.338.500,00	156.338.500,00	100	79.618.000,00	50.93	100	52.19	-49.07	-47.81	MIRNA, S.P.
8	**Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor**	11.987.500,00	11.987.500,00	100	0,00	0	100	10	-100	-90	MIRNA, S.P.
9	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	174.217.800,00	58.075.800,00	33.34	57.395.400,00	32.94	33.34	40	-1.17	6.66	MIRNA, S.P.
10	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	40.428.800,00	29.443.200,00	72.83	4.459.900,00	11.03	72.83	4.48	-84.85	-68.34	MIRNA, S.P.
11	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	84.836.900,00	77.285.900,00	91.1	4.803.600,00	5.66	19.05	5.67	-93.78	-13.38	MIRNA, S.P.
12	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	170.179.000,00	60.791.690,00	35.72	42.331.690,00	24.87	22.62	11.65	-30.37	-10.98	MIRNA, S.P.
13	**Pengadaan Kendaraan Perorangan**	1.376.332.124,00	1.376.332.124,00	100	1.221.900.000,00	88.78	100	87.48	-11.22	-12.52	MIRNA, S.P.

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
14	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	503.792.900,00	503.792.900,00	100	406.600.000,00	80.71	100	99.83	**-19.29**	**-0.17**	MIRNA, S.P.
15	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	1.081.082.315,00	561.107.757,00	51.9	407.136.638,00	37.66	0.69	100	**-27.44**	**99.31**	MIRNA, S.P.
16	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	17.618.698.836,00	9.201.947.538,00	52.23	9.075.694.356,00	51.51	53.63	50.18	**-1.37**	**-3.46**	MIRNA, S.P.
17	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	4.320.112.600,00	2.160.105.700,00	50	1.030.883.060,00	23.86	47.5	46.25	**-52.28**	**-1.25**	MIRNA, S.P.
18	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	162.580.000,00	98.045.000,00	60.31	45.474.050,00	27.97	60.31	27.97	**-53.62**	**-32.34**	MIRNA, S.P.
19	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	360.092.200,00	349.592.200,00	97.08	283.944.410,00	78.85	97.08	65.07	**-18.78**	**-32.01**	MIRNA, S.P.
20	**Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani**	97.525.900,00	96.512.500,00	98.96	1.012.500,00	1.04	98.96	1.04	**-98.95**	**-97.92**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
21	**Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana**	97.525.900,00	96.512.500,00	98.96	1.012.500,00	1.04	98.96	1.04	**-98.95**	**-97.92**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
22	**Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	97.525.900,00	1.012.500,00	1.04	1.012.500,00	1.04	1.04	1.04	**0**	**0**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
23	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	952.268.654,00	311.246.354,00	32.68	97.050.495,00	10.19	32.68	10.24	**-68.82**	**-22.44**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
24	**Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun**	358.725.800,00	358.725.800,00	100	136.156.890,00	37.96	100	38.19	**-62.04**	**-61.81**	ILHAM GUNAWAN, S.E.
25	**Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	3.641.735.300,00	3.294.172.800,00	90.46	371.594.830,00	10.2	90.46	10.26	**-88.72**	**-80.19**	ILHAM GUNAWAN, S.E.
26	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	2.025.900,00	1.012.500,00	49.98	1.012.500,00	49.98	49.98	50	**0**	**0.02**	DENI MOHAMAD RIDWAN,

											S.T.,M.A
27	**Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh**	77.000.000,00	700.000,00	0.91	700.000,00	0.91	0.91	0.91	**0**	**0**	RAHMADANI, ST
28	**Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh**	56.283.000,00	55.283.000,00	98.22	53.918.000,00	95.8	98.22	98.22	**-2.47**	**0**	RAHMADANI, ST
29	**Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh**	4.753.849.900,00	992.055.900,00	20.87	3.172.300,00	0.07	25.22	0.07	**-99.68**	**-25.15**	RAHMADANI, ST
30	**Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh**	97.000.000,00	96.340.000,00	99.32	840.000,00	0.87	99.32	10.71	**-99.13**	**-88.61**	RAHMADANI, ST
31	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	34.480.562.000,00	11.888.612.000,00	34.48	4.190.692.000,00	12.15	35.02	12.34	**-64.75**	**-22.67**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
32	**Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan**	92.025.900,00	1.012.500,00	1.1	1.012.500,00	1.1	1.1	1.1	**0**	**0**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
33	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	99.717.503.334,00	42.006.235.224,00	42.13	10.332.587.363,00	10.36	41.39	10.45	**-75.4**	**-30.94**	RAHMADANI, ST
34	**Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	142.160.000,00	139.910.000,00	98.42	2.250.000,00	1.58	98.42	1.58	**-98.39**	**-96.83**	DENI MOHAMAD RIDWAN, S.T.,M.A
35	**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	298.637.700,00	100.818.000,00	33.76	1.999.800,00	0.67	36.5	3.53	**-98.02**	**-32.97**	BUNGBUNG ALAM KRISNAWAN, S.T.
36	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	4.810.899.316,00	2.426.512.800,00	50.44	1.197.118.248,00	24.88	50.23	24.96	**-50.67**	**-25.26**	DEVI LIBRIANTI JUVITA PERMATA, SP, MT
37	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam**	112.009.300,00	112.009.300,00	100	71.840.000,00	64.14	30.78	63.88	**-35.86**	**33.11**	DEVI LIBRIANTI

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										JUVITA PERMATA, SP, MT
38	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**	3.151.929.300,00	2.131.052.300,00	67.61	1.730.588.490,00	54.91	0	69.75	**-18.79**	**69.75**	DEVI LIBRIANTI JUVITA PERMATA, SP, MT
39	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**	6.651.413.117,00	4.337.519.815,00	65.21	595.047.339,00	8.95	45.2	15	**-86.28**	**-30.2**	DEVI LIBRIANTI JUVITA PERMATA, SP, MT
	Total	**201.138.483.133,00**	**91.467.553.471,00**	**45.47**	**39.826.311.228,00**	**19.8**	**55.74**	**34.89**	**-56.46**	**-20.85**	

	Jumlah Paket			
	Realisasi Keuangan	**%**	**Realisasi Fisik**	**%**
> 0 %	0	0	6	15.38
< 0 %	13	33.33	12	30.77
< -6 %	0	0	1	2.56
< -11 %	26	66.67	20	51.28

Tabel 2. 2 Raport Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Semester 1 (Periode Januari s/d Juni Tahun 2025)

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.139.200	2.268.800	54.81	2.268.800	54.81	54.81	54.81	0	0	Reska Nurdianti, S.E.,M.M.		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.641.600	11.154.400	59.84	10.924.000	58.6	59.84	58.6	-2.07	-1.24	Reska Nurdianti, S.E.,M.M.		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.593.331.837	9.138.931.865	58.61	7.564.308.998	48.51	58.61	48.51	-17.23	-10.1	Reska Nurdianti, S.E.,M.M.	Terdapat kesalahan perencanaan anggaran (TPP bulan januari seharusnya tidak dianggarkan)	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	737.200	737.200	100	737.200	100	100	100	0	0	Reska Nurdianti, S.E.,M.M.		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	121.683.200	60.356.800	49.6	60.356.800	49.6	49.6	49.6	0	0	Reska Nurdianti, S.E.,M.M.		
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	219.967.000	219.967.000	100	217.844.775	99.04	100	100	-0.96	0	Mirna, S.P.		

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.774.300	5.774.300	100	5.735.500	99.33	100	100	-0.67	0	Mirna, S.P.		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.299.100	34.955.400	32.88	34.922.600	32.85	33.9	32.88	-0.09	-1.03	Mirna, S.P.		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.999.100	18.676.100	64.4	18.646.400	64.3	64.4	64.39	-0.16	-0.01	Mirna, S.P.		
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.912.400	38.323.400	96.02	7.874.700	19.73	80.27	19.73	-79.45	-60.54	Mirna, S.P.		
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.528.078	65.362.445	58.61	56.672.403	50.81	58.6	50.82	-13.3	-7.79	Mirna, S.P.	Pencairan sesuai dengan kegiatan di setiap bulannya	
12	Pengadaan Mebel	105.112.700	105.112.700	100	104.700.000	99.61	100	99.61	-0.39	-0.39	Mirna, S.P.		
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.751.500	245.751.500	100	242.675.000	98.75	100	98.75	-1.25	-1.25	Mirna, S.P.		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.424.311.950	712.155.978	50	441.878.854	31.02	50	31.03	-37.95	-18.97	Mirna, S.P.		
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.998.384.536	9.593.505.168	53.3	8.825.232.844	49.03	52.66	54.85	-8.01	2.19	Mirna, S.P.		
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.351.780.748	1.889.170.538	43.41	809.071.341	18.59	43.34	54.69	-57.17	11.36	Mirna, S.P.	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan	Pencairan diluar kontrak sesuai dengan anggaran kas

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												pencairan	
17	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**141.118.380**	**84.334.190**	**59.76**	**74.056.500**	**52.48**	**36.36**	**52.85**	**-12.19**	**16.49**	**Mirna, S.P.**		
18	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**341.488.155**	**330.988.155**	**96.93**	**329.071.071**	**96.36**	**96.93**	**96.93**	**-0.58**	**0**	**Mirna, S.P.**		Pencairan sesuai dengan anggaran kas
19	**Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan**	**85.879.100**	**85.299.100**	**99.32**	**580.000**	**0.68**	**99.32**	**0.68**	**-99.32**	**-98.65**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Karena masih terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
20	**Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani**	**91.242.400**	**90.662.400**	**99.36**	**90.512.200**	**99.2**	**99.36**	**99.36**	**-0.17**	**0**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**		Pencairan sesuai dengan anggaran kas dan kegiatan telah selesai di laksanakan
21	**Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana**	**90.444.400**	**89.864.400**	**99.36**	**580.000**	**0.64**	**99.36**	**0.64**	**-99.35**	**-98.72**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Karena masih terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
22	**Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi**	**85.879.100**	**85.299.100**	**99.32**	**580.000**	**0.68**	**99.32**	**0.68**	**-99.32**	**-98.65**	**Deni Mohamad**	Karena masih	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota										**Ridwan, S.T.,M.A**	terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
23	**Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**89.284.400**	**89.284.400**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**-100**	**-100**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Karena masih terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
24	**Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**85.879.100**	**85.299.100**	**99.32**	**580.000**	**0.68**	**99.32**	**0.68**	**-99.32**	**-98.65**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Karena masih terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
25	**Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**90.444.400**	**89.864.400**	**99.36**	**580.000**	**0.64**	**99.36**	**0.64**	**-99.35**	**-98.72**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Karena masih terdapat Revisi pada Pembuatan Laporan Akhir	
26	**Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**	**3.442.800**	**2.220.000**	**64.48**	**0**	**0**	**64.48**	**0**	**-100**	**-64.48**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Tidak akan diserap, karena rencana akan di drop	
27	**Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau**	**2.982.198.700**	**2.612.000.600**	**87.59**	**1.354.429.665**	**45.42**	**87.52**	**47.6**	**-48.15**	**-39.92**	**Ilham Gunawan, S.E.**	Penyedia terlambat mengajukan	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK	Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI				
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rumah Khusus											permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan	
28	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	3.284.000	2.142.000	65.23	0	0	65.23	0	-100	-65.23	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**		
29	**Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh**	53.228.800	53.048.800	99.66	52.523.800	98.68	99.66	99.77	-0.99	0.1	**RR. Mutiara Adhi Sarasati, S.T.**		Pencairan sesuai dengan anggaran kas dan kegiatan telah selesai di laksanakan
30	**Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh**	565.211.800	258.521.200	45.74	164.664.200	29.13	45.74	29.17	-36.31	-16.57	**RR. Mutiara Adhi Sarasati, S.T.**	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan	
31	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**	24.414.175.139	6.855.953.100	28.08	1.684.165.100	6.9	20.27	6.96	-75.43	-13.31	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Tidak akan diserap, karena rencana akan di drop	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK	Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI				
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan**	**96.878.400**	**1.080.000**	**1.11**	**1.080.000**	**1.11**	**1.11**	**1.11**	**0**	**0**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**		Pencairan sesuai dengan anggaran kas dan kegiatan telah selesai di laksanakan
33	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	**86.772.760.681**	**10.083.987.408**	**11.62**	**6.804.713.076**	**7.84**	**11.62**	**7.88**	**-32.52**	**-3.74**	**Rahmadani, ST**	Dikarenakan Pejabat Pengadaan merangkap sebagai PPK Kegiatan lain sehingga honor pejabat pengadaan barang/jasa tidak bisa diserap	
34	**Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**348.425.300**	**75.650.000**	**21.71**	**0**	**0**	**0**	**26.72**	**-100**	**26.72**	**Bungbung Alam Krisnawan, S.T.**	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan dan ada paket yang berubah	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												lokasi sehingga diusulkan di perubahan	
35	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**5.940.775.152**	**2.479.047.321**	**41.73**	**1.696.632.608**	**28.56**	**0**	**37.56**	**-31.56**	**37.56**	**Devi Librianti Juvita Permata, SP, MT**	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan dan ada paket yang lokasi bertambah sehingga diusulkan di perubahan	
36	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**83.924.829**	**70.324.829**	**83.8**	**0**	**0**	**82.11**	**0**	**-100**	**-82.11**	**Devi Librianti Juvita Permata, SP, MT**	penyesuaian jadwal narasumber dan lokus kunjungan yang belum sesuai dengan jadwal peserta pelatihan	
37	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati**	**4.040.109.900**	**2.963.754.400**	**73.36**	**2.580.109.630**	**63.86**	**71.15**	**71.48**	**-12.94**	**0.33**	**Devi Librianti Juvita**	Penyedia terlambat mengajukan	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Permata, SP, MT	permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan	
38	**Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya**	**8.927.368.620**	**1.623.292.600**	**18.18**	**594.530.529**	**6.66**	**0**	**15.04**	**-63.38**	**15.04**	**Bungbung Alam Krisnawan, S.T.**	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan	
39	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1.013.756.600**	**1.013.756.600**	**100**	**819.000.000**	**80.79**	**0**	**80.79**	**-19.21**	**80.79**	**Mirna, S.P.**	Dikarenakan terdapat selisih hasil dari Negosiasi	
40	**Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh**	**6.593.632.865**	**345.961.800**	**5.25**	**93.865.680**	**1.42**	**5.25**	**1.43**	**-72.87**	**-3.81**	**RR. Mutiara Adhi Sarasati, S.T.**	Penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran sehingga belum dilakukan pencairan dan ada paket yang berubah lokasi sehingga	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI									Faktor	
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		PPTK/PPK		
			TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	KEU	FISIK		Penghambat	Pendorong
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												diusulkan di perubahan	
41	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**497.366.000**	**768.000**	**0.15**	**768.000**	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0**	**0**	**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**		Pencairan sesuai dengan anggaran kas dan kegiatan telah selesai di laksanakan
42	**Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU**	**1.997.600**	**1.498.000**	**74.99**	**0**	**0**	**74.99**	**0**	**1**		**Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A**	Tidak akan diserap, karena rencana akan di drop	
43	**Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun**	**45.650.458**	**65.794.258**	**144.13**	**45.650.458**	**100**	**100**	**100**	**-30.62**	**0**	**Ilham Gunawan, S.E.**		
	Total	**183.862.201.528**	**51.681.899.755**	**28.11**	**34.792.522.732**	**18.92**	**61.97**	**41.78**	**-32.68**	**-20.19**			

Keterangan :

Jumlah Paket

	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%
> 0 %	0	0	9	20.93
< 0 %	15	34.88	17	39.53
< -6 %	1	2.33	2	4.65
< -11 %	27	62.79	15	34.88

2.2. Evaluasi Kinerja Disperumkim

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, dapat diketahui bahwa serapan anggaran Semester I Disperumkim rata – rata tidak sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada pelaksanaan paket fisik seperti tender yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, proses administrasi yang memakan waktu, adanya pergantian kepemimpinan, sehingga pelaksanaan paket fisik mengalami kemunduran dari waktu rencana awal.

Dalam penanganan permasalahan kumuh, Disperumkim telah memberikan kontribusi signifikan pada pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh serta pelaksanaan pemugaran kawasan kumuh. Hanya saja, dalam kegiatan pemugaran terdapat keterlambatan pengajuan permohonan pembayaran serta terdapat paket yang berubah lokasi sehingga anggaran baru diusulkan di perubahan.

Pada bidang pengelolaan keanekaragaman hayati, Disperumkim telah melaksanakan kegiatan sesuai target baik pada bidang pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya. Meskipun demikian, target keuangan tidak tercapai karena pihak penyedia terlambat mengajukan permohonan pembayaran.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Disperumkim yang memiliki banyak kegiatan fisik harus lebih matang dalam proses perencanaan keuangan serta tertib administrasi sehingga diharapkan memperoleh raport hijau pada periode selanjutnya.

Bab III
Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025

3.1. Arah Kebijakan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada "Pemantapan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Penguatan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Daerah." Arah ini selaras dengan target pembangunan Kota Bogor tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2019–2025, dengan tema pembangunan:

“Mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.”

Sebagai perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta permukiman di Kota Bogor, termasuk penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan Disperumkim memiliki kegiatan prioritas yang mendukung Kota Bogor Sehat sasaran ke-3 (tiga) Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman pada strategi ke-3 (tiga) yaitu:

- Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan
- Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
- Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman
- Pengembangan dan pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
- Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana
- Akselerasi pemulihan infrastruktur pasca bencana.

3.2. Program dan Kegiatan Prioritas

Renja Perubahan Disperumkim Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan serta dinamika pembangunan terkini. Fokus kegiatan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Disperumkim, dengan penyesuaian pada perubahan target kinerja, pagu indikatif, serta pemenuhan terhadap kebutuhan mendesak.

Program dan kegiatan prioritas mencakup:

1. **Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum**
    - Perbaikan jalan lingkungan
    - Perbaikan drainase
    - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
    - Pembangunan jembatan
2. **Program Kawasan Permukiman**
    - Penurunan Kawasan kumuh.
3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati**
    - Ruang Terbuka Hijau

3.3. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan program dan kegiatan Disperumkim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 seperti PAD, insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, Pajak Rokok, Opsen PKB dan BBNKB. Sedangkan pada kegiatan penanganan RTLH terdapat sumber dana dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi anggaran disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan kebutuhan prioritas yang telah melalui proses evaluasi dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Berikut merupakan **Tabel 3.1** yang menggambarkan rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025.

Tabel 3. 1 Pagu Murni dan Perubahan Disperumkim Kota Bogor Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Murni (03-Januari 2025)	RKPD-Perubahan			KUA-PPAS
			Pagu Murni	Pagu Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	Pagu
1	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.139.200	4.139.200	-	Tidak ada perubahan	4.139.200
2	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.641.600	18.641.600	-	Tidak ada perubahan	18.641.600
3	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.593.331.837	15.587.241.124	-6.090.713	Pengurangan Anggaran (Penyesuaian Kebutuhan Gaji ASN)	15.074.448.857
4	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	737.200	737.200	-	Tidak ada perubahan	737.200
5	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	121.683.200	121.683.200	-	Tidak ada perubahan	121.683.200
6	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	219.967.000	219.967.000	-	Tidak ada perubahan	219.967.000
7	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	5.774.300	-1.725.700		5.774.300
8	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.793.000	106.299.100	-12.493.900		106.299.100
9	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.005.800	28.999.100	-3.006.700		28.999.100
10	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.326.100	39.912.400	-10.413.700		39.912.400
11	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.328.478	111.528.078	-78.800.400		262.799.078
12	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.756.600	1.013.756.600	-	Tidak ada perubahan	1.013.756.600
13	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	105.112.700	479.500.000	374.387.300	Penambahan Anggaran Rp. 374,387,300	479.500.000
14	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.751.500	414.731.200	168.979.700	(Penambahan Anggaran) Pengadaan personal computer 94.847.400 Pengadaan printer 19.643.700 pengadaan scanner 35.261.600 Total : 168.979.700	414.731.200
15	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.424.311.950	1.169.141.260	- 255.170.690	Pengurangan Anggaran (PERGESERAN air ke listrik dan penyesuaian listrik untuk tampilan seni)	1.169.141.260
16	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.998.384.536	17.272.490.836	- 725.893.700	Pengurangan Anggaran (Gaji Non ASN)	17.272.490.836

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Murni (03-Januari 2025)	RKPD-Perubahan			KUA-PPAS
			Pagu Murni	Pagu Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	Pagu
17	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.351.780.748	3.351.765.748	-1.000.015.000	Pengurangan Anggaran (Penyesuaian Kebutuhan)	3.351.765.748
18	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.884.893	141.118.380	-3.766.513		141.118.380
19	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.324.155	540.432.555	198.108.400	(Perubahan, Penambahan Rp.198.108.400)	1.191.013.155
20	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	85.879.100	85.879.100	-	Tidak ada perubahan	85.879.100
21	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2 Usulan Pokir	91.242.400	91.242.400	-	Tidak ada perubahan	91.242.400
22	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	90.444.400	90.444.400	-	Tidak ada perubahan	90.444.400
23	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.879.100	85.879.100	-	Tidak ada perubahan	85.879.100
24	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	91.444.400	89.284.400	-2.160.000		89.284.400
25	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	85.879.100	85.879.100	-	Tidak ada perubahan	85.879.100
26	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	90.444.400	90.444.400	-	Tidak ada perubahan	90.444.400
27	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	22.320.800	-	-22.320.800	Pengurangan Anggaran (Refocusing)	-
28	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	497.366.000	923.556.000	426.190.000	Penambahan Anggaran Penambahan Paket Pekerjaan dan Perubahan Perubahan Paket Pekerjaan Pembangunan TPT dilokasi Ciranjang dan Pamoyanan (1 paket perencanaan, pengawasan, fisik) Rp. 236,0100 tahap 2 Rp. 190,1800 Belanja jalan bagi korban bencana	923.556.000

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Murni (03-Januari 2025)	RKPD-Perubahan			KUA-PPAS
			Pagu Murni	Pagu Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	Pagu
						150.000.000 Perencanaan Jalan Bagi Korban Bencana 25.354.000 Pengawasan bagi korban bencana 14.826.000	
29	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	65.794.258	45.650.458	-20.143.800		45.650.458
30	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.986.198.700	3.696.445.560	710.246.860	(Penambahan Anggaran Rp. 714.246.860)	5.492.623.700
31	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	27.336.000	-	-27.336.000	Pengurangan Anggaran (*Refocusing*)	-
32	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	54.578.800	53.228.800	-1.350.000		53.228.800
33	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	565.211.800	565.211.800	-	Tidak ada perubahan	565.211.800
34	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	22.160.468.139	24.414.175.139	2.253.707.000	Tidak ada perubahan	24.414.175.139
35	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.593.632.865	6.593.632.865	-	(Pengurangan Honorarium PPTK,PP, Dan TFL BANKEU, Penambahan Anggaran pada Paket Pekerjaan, dan Penambahan Paket Pekerjaan Saluran pada Lokasi Kumuh)	6.593.632.865
36	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	96.878.400	146.978.400	50.100.000	Penambahan Anggaran (TIM Pendaping Kejaksaan)	146.978.400
37	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	79.366.007.987	92.580.728.706	13.214.720.719	Pengurangan dan Penambahan Paket Pekerjaan dan Perubahan Perubahan Paket Pekerjaan Penambahan Anggaran FS Makam Rp. 90,348,950 Tahap 2 Penambahan volume dan Paket di Pemakaman Rp. 426.621.740 PSU Infrastruktur 199.988.689 PSU Pokir Rp. 5.141.108.695	94.570.728.706
38	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	22.069.600	-	-22.069.600	Pengurangan Anggaran (*Refocusing*)	-

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Murni (03-Januari 2025)	RKPD-Perubahan			KUA-PPAS
			Pagu Murni	Pagu Renja Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Keterangan	Pagu
39	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	348.825.300	348.425.300	-400.000		446.243.300
40	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.714.280.752	5.940.775.152	2.226.494.400	(Belanja Perjalanan Dinas Biasa & Belanja Jasa Tenaga Ahli) (Perubahan penambahan judul lokasi)	6.842.957.152
41	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	164.486.229	83.924.829	-80.561.400	Tidak ada perubahan	83.924.829
42	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3.542.668.300	4.965.103.100	1.422.434.800	Penambahan Anggaran Pengurangan Ban Rp. 21,2170 Pengurangan Rp. 24,569,400 Penambahan Sarana dan Prasarana Taman Rp. 970,779,600 (Perubahan Penambahan judul lokasi)	5.947.739.660
43	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	8.927.928.620	11.862.471.620	2.934.543.000	Penambahan Anggaran Penambahan Paket Pekerjaan dan Perubahan Paket Pekerjaan Hutan Kota Batutulis Rp. 2000 Tahap 2 Pembangunan Taman Ciluar dan Revititalisasi SSA dan Rajapermas Rp. 80000	15.291.805.320
TOTAL			**171.761.025.947**	**193.467.219.510**	**21.706.193.563**		**202.954.427.243**

Tabel 2. 3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2025

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.983.760.497**	**41.872.717.584**	**41.872.717.584**	**41.872.717.584**	**41.872.717.584**	**40.916.918.214**	**-955.799.370**
2	**1.04.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.780.800**	**22.780.800**	**22.780.800**	**22.780.800**	**22.780.800**	**22.780.800**	**-**
3	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.139.200	4.139.200	4.139.200	4.139.200	4.139.200	4.139.200	-
4	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.641.600	18.641.600	18.641.600	18.641.600	18.641.600	18.641.600	-
5	**1.04.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.715.752.237**	**15.715.752.237**	**15.715.752.237**	**15.715.752.237**	**15.715.752.237**	**15.196.869.257**	**-518.882.980**
6	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.593.331.837	15.593.331.837	15.593.331.837	15.593.331.837	15.593.331.837	15.074.448.857	-518.882.980
7	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	737.200	737.200	737.200	737.200	737.200	737.200	-
8	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	121.683.200	121.683.200	121.683.200	121.683.200	121.683.200	121.683.200	-

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	**1.04.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**219.967.000**	**219.967.000**	**219.967.000**	**219.967.000**	**219.967.000**	**219.967.000**	**-**
10	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	219.967.000	219.967.000	219.967.000	219.967.000	219.967.000	219.967.000	-
11	**1.04.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**398.953.378**	**292.512.978**	**292.512.978**	**292.512.978**	**292.512.978**	**443.783.978**	**151.271.000**
12	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	5.774.300	5.774.300	5.774.300	5.774.300	5.774.300	-
13	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.793.000	106.299.100	106.299.100	106.299.100	106.299.100	106.299.100	-
14	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.005.800	28.999.100	28.999.100	28.999.100	28.999.100	28.999.100	-
15	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.326.100	39.912.400	39.912.400	39.912.400	39.912.400	39.912.400	-
16	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.328.478	111.528.078	111.528.078	111.528.078	111.528.078	262.799.078	151.271.000
17	**1.04.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.364.620.800**	**1.364.620.800**	**1.364.620.800**	**1.364.620.800**	**1.364.620.800**	**1.907.987.800**	**543.367.000**
18	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.756.600	1.013.756.600	1.013.756.600	1.013.756.600	1.013.756.600	1.013.756.600	-
19	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	105.112.700	105.112.700	105.112.700	105.112.700	105.112.700	479.500.000	374.387.300
20	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.751.500	245.751.500	245.751.500	245.751.500	245.751.500	414.731.200	168.979.700
21	**1.04.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.422.696.486**	**19.422.696.486**	**19.422.696.486**	**19.422.696.486**	**19.422.696.486**	**18.441.632.096**	**-981.064.390**

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.424.311.950	1.424.311.950	1.424.311.950	1.424.311.950	1.424.311.950	1.169.141.260	-255.170.690
23	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.998.384.536	17.998.384.536	17.998.384.536	17.998.384.536	17.998.384.536	17.272.490.836	-725.893.700
24	**1.04.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.838.989.796**	**4.834.387.283**	**4.834.387.283**	**4.834.387.283**	**4.834.387.283**	**4.683.897.283**	**-150.490.000**
25	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.351.780.748	4.351.780.748	4.351.780.748	4.351.780.748	4.351.780.748	3.351.765.748	-1.000.015.000
26	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.884.893	141.118.380	141.118.380	141.118.380	141.118.380	141.118.380	-
27	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.324.155	341.488.155	341.488.155	341.488.155	341.488.155	1.191.013.155	849.525.000
28	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**4.220.228.658**	**4.150.994.858**	**4.150.994.858**	**4.150.994.858**	**4.150.994.858**	**7.080.883.058**	**2.929.888.200**
29	**1.04.02.2.01**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**621.212.900**	**619.052.900**	**619.052.900**	**619.052.900**	**619.052.900**	**619.052.900**	**-**
30	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	-
31	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian	91.242.400	91.242.400	91.242.400	91.242.400	91.242.400	91.242.400	-

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sebelumnya yang Belum Tertangani 2 Usulan Pokir							
32	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	-
33	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	-
34	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	91.444.400	89.284.400	89.284.400	89.284.400	89.284.400	89.284.400	-
35	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	85.879.100	-
36	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	90.444.400	-
37	**1.04.02.2.02**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**22.320.800**	**3.442.800**	**3.442.800**	**3.442.800**	**3.442.800**	**-**	**-3.442.800**
38	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	22.320.800	3.442.800	3.442.800	3.442.800	3.442.800	-	-3.442.800

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**1.04.02.2.03**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**497.366.000**	**497.366.000**	**497.366.000**	**497.366.000**	**497.366.000**	**923.556.000**	**426.190.000**
40	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	497.366.000	497.366.000	497.366.000	497.366.000	497.366.000	923.556.000	426.190.000
41	**1.04.02.2.05**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**3.051.992.958**	**3.027.849.158**	**3.027.849.158**	**3.027.849.158**	**3.027.849.158**	**5.538.274.158**	**2.510.425.000**
42	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	65.794.258	45.650.458	45.650.458	45.650.458	45.650.458	45.650.458	-
43	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.986.198.700	2.982.198.700	2.982.198.700	2.982.198.700	2.982.198.700	5.492.623.700	2.510.425.000
44	**1.04.02.2.06**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**27.336.000**	**3.284.000**	**3.284.000**	**3.284.000**	**3.284.000**	**-**	**-3.284.000**
45	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	27.336.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	-	-3.284.000
46	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**29.373.891.604**	**29.241.755.604**	**29.241.755.604**	**31.349.955.604**	**31.626.248.604**	**31.626.248.604**	**-**

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	**1.04.03.2.02**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**619.790.600**	**618.440.600**	**618.440.600**	**618.440.600**	**618.440.600**	**618.440.600**	**-**
48	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	54.578.800	53.228.800	53.228.800	53.228.800	53.228.800	53.228.800	-
49	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	565.211.800	565.211.800	565.211.800	565.211.800	565.211.800	565.211.800	-
50	**1.04.03.2.03**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**28.754.101.004**	**28.623.315.004**	**28.623.315.004**	**30.731.515.004**	**31.007.808.004**	**31.007.808.004**	**-**
51	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	22.160.468.139	22.029.682.139	22.029.682.139	24.137.882.139	24.414.175.139	24.414.175.139	-
52	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.593.632.865	6.593.632.865	6.593.632.865	6.593.632.865	6.593.632.865	6.593.632.865	-
53	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**79.484.955.987**	**79.362.894.101**	**82.741.522.781**	**85.802.306.781**	**86.871.636.681**	**94.717.707.106**	**7.846.070.425**
54	**1.04.05.2.01**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**79.484.955.987**	**79.362.894.101**	**82.741.522.781**	**85.802.306.781**	**86.871.636.681**	**94.717.707.106**	**7.846.070.425**
55	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	96.878.400	96.878.400	96.878.400	96.878.400	96.878.400	146.978.400	50.100.000
56	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	79.366.007.987	79.264.018.101	82.642.646.781	85.703.430.781	86.772.760.681	94.570.728.706	7.797.968.025

No	Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Murni APBD 2025	Pagu Pengurangan Hasil (Efisiensi Inpres 1/2025)	Pagu Perubahan Setelah BTT Pergeseran 1	Pagu Perubahan Setelah Penambahan Pengalihan Efisiensi, Pergeseran Reguler Pergeseran 2	Pagu Perubahan Setelah DIF Pergeseran 2	Pagu Perubahan Anggaran	Selisih Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		untuk Menunjang Fungsi Hunian							
57	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	22.069.600	1.997.600	1.997.600	1.997.600	1.997.600	-	-1.997.600
58	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**16.698.189.201**	**16.563.009.401**	**16.563.009.401**	**19.340.603.801**	**19.340.603.801**	**28.612.670.261**	**9.272.066.460**
59	**2.11.04.2.01**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**16.698.189.201**	**16.563.009.401**	**16.563.009.401**	**19.340.603.801**	**19.340.603.801**	**28.612.670.261**	**9.272.066.460**
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	348.825.300	348.425.300	348.425.300	348.425.300	348.425.300	446.243.300	97.818.000
61	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.714.280.752	3.663.180.752	3.663.180.752	5.940.775.152	5.940.775.152	6.842.957.152	902.182.000
62	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	164.486.229	83.924.829	83.924.829	83.924.829	83.924.829	83.924.829	-
63	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3.542.668.300	3.540.109.900	3.540.109.900	4.040.109.900	4.040.109.900	5.947.739.660	1.907.629.760
64	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	8.927.928.620	8.927.368.620	8.927.368.620	8.927.368.620	8.927.368.620	15.291.805.320	6.364.436.700
	TOTAL		**171.761.025.947**	**171.191.371.548**	**174.570.000.228**	**182.516.578.628**	**183.862.201.528**	**202.954.427.243**	**19.092.225.715**

Bab IV
Penutup

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Disperumkim Kota Bogor Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2022 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dapat diketahui capaian target dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun berjalan sehingga dapat diketahui pencapaian kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan dilakukan percepatan pencapaian target yang belum tercapai pada tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Disperumkim tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 31.193.401.296,- atau 18.16% dari anggaran semula murni Rp. 171.761.025.947,- menjadi anggaran perubahan Rp. 202.954.427.243,- perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Disperumkim Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bogor. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis baik dalam lingkup Pemerintah Kota Bogor maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bogor.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen penting yang disusun sebagai tindak lanjut sekaligus wujud implementasi dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); hingga tata cara perubahan baik pada RPJPD, RPJMD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, keberadaan Renja Perubahan BPBD Kota Bogor tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung konsistensi proses pembangunan daerah.

Secara substansial, Renja Perubahan BPBD Kota Bogor Tahun 2025 memuat penjabaran mengenai prioritas program dan kegiatan yang disusun melalui perpaduan berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan meliputi perencanaan teknokratik, pendekatan partisipatif melalui mekanisme *bottom-up* dan *top-down*, serta pemikiran politis yang pada akhirnya disinkronisasikan dalam Forum Perangkat Daerah. Proses ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta memiliki legitimasi secara politis maupun administratif.

Berdasarkan tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, dokumen Renja Perubahan BPBD Kota Bogor memiliki fungsi strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan. RKA ini kemudian akan digunakan dalam tahapan penganggaran Dengan demikian, Renja Perubahan BPBD Kota Bogor Tahun 2025 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan bencana

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota.
6. Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bogor.

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 165 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja rencana capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja-SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1 evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampai Dengan Triwulan Ii
- 2.2 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor
- 2.3 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA BOGOR

BAB IV PENUTUPAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap kinerja keuangan pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan menggunakan acuan capaian realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan II atau semester I. Proses evaluasi ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran oleh perangkat daerah. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai target yang direncanakan, atau masih terdapat hambatan dan kendala yang perlu segera diperbaiki.

Selain itu, kegiatan evaluasi kinerja keuangan ini juga memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kebutuhan nyata di lapangan dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana monitoring, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan kinerja keuangan daerah.

Adapun rincian lebih lanjut mengenai jumlah pagu anggaran yang telah dialokasikan, beserta realisasi penggunaannya hingga semester I tahun 2025, disajikan secara sistematis dan terperinci pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan BPBD Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	REALISASI TW 2
1	*2*	*3*	*7*	*4*	*5*
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7,807,785,860	Rp7,370,414,644	**Rp3,019,797,092**
1.1	**5-1.05.01.2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp10,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Rp10,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp0**
1.2	**5-1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp3,772,804,748**	**Rp3,772,804,748**	**Rp1,794,125,577**
	5-1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Rp3,719,524,748**	**Rp3,719,524,748**	**Rp1,767,485,577**
	5-1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Rp53,280,000**	**Rp53,280,000**	**Rp26,640,000**
1.3	**5-1.05.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp249,179,000**	**Rp0**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Rp249,179,000**	**Rp0**	**Rp0**
1.4	**5-1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp537,197,914**	**Rp381,955,200**	**Rp69,244,811**
	5-1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Rp9,908,400**	**Rp9,908,400**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Rp52,964,114**	**Rp41,740,750**	**Rp5,044,000**
	5-1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Rp21,275,900**	**Rp21,275,900**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Rp145,210,600**	**Rp143,657,600**	**Rp39,789,500**
	5-1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Rp22,399,500**	**Rp15,679,650**	**Rp1,365,000**
	5-1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Rp13,946,400**	**Rp13,946,400**	**Rp5,970,000**

	5-1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Rp271,493,000**	**Rp135,746,500**	**Rp17,076,311**
1.5	**5-1.05.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp301,718,400**	**Rp301,718,400**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Rp199,859,200**	**Rp199,859,200**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Rp101,859,200**	**Rp101,859,200**	**Rp0**
1.6	**5-1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp2,140,883,560**	**Rp2,140,883,560**	**Rp1,055,792,211**
	5-1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	**Rp140,085,000**	**Rp140,085,000**	**Rp52,681,665**
	5-1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Rp2,000,798,560**	**Rp2,000,798,560**	**Rp1,003,110,546**
1.7	**5-1.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp796,002,238**	**Rp766,052,736**	**Rp100,634,493**
	5-1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Rp38,330,000**	**Rp38,330,000**	**Rp8,100,158**
	5-1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Rp649,972,238**	**Rp649,972,238**	**Rp91,359,335**
	5-1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Rp107,700,000**	**Rp77,750,498**	**Rp1,175,000**
		Program Penanggulangan Bencana	**Rp1,912,346,450**	**Rp1,713,049,870**	**Rp92,854,500**
2.1	**5-1.05.03.2.02**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Rp1,235,835,600**	**Rp1,036,539,020**	**Rp17,654,500**
2.1.1	5-1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp701,879,300	Rp701,879,300	Rp0
2.1.2	5-1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	**Rp10,008,100**	**Rp9,406,180**	**Rp8,584,500**
2.1.3	5-1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	**Rp523,948,200**	**Rp325,253,540**	**Rp9,070,000**
2.2	**5-1.05.03.2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Rp606,514,850**	**Rp606,514,850**	**Rp70,500,000**
2.2.1	5-1.05.03.2.03.0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Rp50,000,000**	Rp50,000,000	Rp3,100,000

2.2.2	5-1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Rp556,514,850**	Rp556,514,850	Rp67,400,000
2.3	**5-1.05.03.2.04**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Rp69,996,000**	**Rp69,996,000**	**Rp4,700,000**
2.3.1	5-1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	**Rp69,996,000**	Rp69,996,000	Rp4,700,000
TOTAL			**Rp9,720,132,310**	**Rp9,083,464,514**	**Rp3,112,651,592**
PERSENTASE TOTAL PENCAPAIAN PENYERAPAN					**34.27%**

1.2 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dilaksanakan dengan mengemban fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam urusan kebencanaan di wilayah Kota Bogor. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bogor berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan BPBD. Selain itu, landasan hukum lainnya yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor dilakukan berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Semester I Tahun 2025

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Program Bapperida Kota Bogor Semester I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025		CAPAIANS SEMESTER I TAHUN 20275	PREDIKAT
		TARGET AWAL	TARGET KESEPAKATAN		
1	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	83,2	83,2	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuanga	95	95	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/It	91	95	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun
4	Survey Kepuasan Masyarakat Linhkup Perangkat Daerah	88,75	85,70	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi 70)	1 Inovasi	1 Inovasi	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun
6	Indeks Ketahanan Daerah	0,79	0,76	-	Hasil Pengukuran Akhir tahun

1.3 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara anggaran rancangan awal perubahan RKPD 2025 dengan RKPD murni 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2025						PERUBAHAN 2025 (EFESIENSI INPRES)					
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET INDIKATOR		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET INDIKATOR		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	JUMLAH PERUBAHAN
					VOLUME	SATUAN					VOLUME	SATUAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*12*	*13*
1	**1.05.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**27,01**	**Nilai**	**Rp7.807.785.860**	**Rp7.370.414.644**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**27,01**	**Nilai**	**Rp7.370.414.644**	**Rp437.371.216**
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja		**26,55**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja**		**26,55**	**Nilai**		
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja		**12,48**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja**		**12,48**	**Nilai**		
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal		**21,97**	**Nilai**			**Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal**		**21,97**	**Nilai**		
			Presentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko dilingkungan perangkat daerah		**100**	**Persentase**			**Presentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko dilingkungan perangkat daerah**		**100**	**Persentase**		
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran dan tahunan secara tepat waktu		**100**	**Persentase**			**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran dan tahunan secara tepat waktu**		**100**	**Persentase**		

			Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persentase			Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persentase		
			Presentase kepatuhan anggaran		100	Persentase			Presentase kepatuhan anggaran		100	Persentase		
			Presentase realisasi anggaran terhadap DPA		100	Persentase			Presentase realisasi anggaran terhadap DPA		100	Persentase		
			Transparansi Pengelola keuangan daerah		94	Persentase			Transparansi Pengelola keuangan daerah		94	Persentase		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		87,11	Nilai			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		87,11	Nilai		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		88,75	Nilai			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		88,75	Nilai		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan Prosedur Waktu Tarif dan Standar layanan		88,38	Nilai			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan Prosedur Waktu Tarif dan Standar layanan		88,38	Nilai		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38	Nilai		
1.1	5-1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A	Nilai	Rp10.000.000	Rp7.000.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A	Nilai	Rp7.000.000	Rp3.000.000

	5-1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*5*	*Dokumen*	**Rp10.000.000**	**Rp7.000.000**	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*5*	*Dokumen*	***Rp7.000.000***	**Rp3.000.000**
1.2	**5-1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100**	**Persentase**	**Rp3.772.804.748**	**Rp3.772.804.748**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**		**100 %**	**100%**	**Rp3.772.804.748**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*19*	*Orang/ Bulan*	**Rp3.719.524.748**	**Rp3.719.524.748**	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*18*	*Orang/ Bulan*	*Rp3.719.524.748*	Rp0
	5-1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	**Rp53.280.000**	**Rp53.280.000**	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	***Rp53.280.000***	**Rp0**
1.3	**5-1.05.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah		**100**	**Persentase**	**Rp249.179.000**	**Rp0**	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah		**100**	**100**	***Rp0***	**Rp249.179.000**
	5-1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*80*	*Paket*	**Rp249.179.000**	**Rp0**	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*80 Paket*	*80 Paket*	**Rp0**	**Rp249.179.000**
1.4	**5-1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		**100**	**Persentase**	**Rp537.197.914**	**Rp381.955.200**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		**100**	**100**	**Rp381.955.200**	**Rp155.242.714**
	5-1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan*	Badan Penanggulangan	*1 Paket*	*Paket*	**Rp9.908.400**	**Rp9.908.400**	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan*	Badan Penanggulangan	*1 Paket*	*Paket*	***Rp9.908.400***	**Rp0**

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Bangunan Kantor yang Disediakan*	Bencana Daerah					*Bangunan Kantor yang Disediakan*	Bencana Daerah				
	5-1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp52.964.114**	**Rp41.740.750**	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp41.740.750**	**Rp11.223.364**
	5-1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp21.275.900**	**Rp21.275.900**	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp21.275.900**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp145.210.600**	**Rp143.657.600**	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp143.657.600**	**Rp1.553.000**
	5-1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp22.399.500**	**Rp15.679.650**	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1 Paket*	*Paket*	**Rp15.679.650**	**Rp6.719.850**
	5-1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12 Dokumen*	*Dokumen*	**Rp13.946.400**	**Rp13.946.400**	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12 Dokumen*	*Dokumen*	**Rp13.946.400**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12 Laporan*	*12 Laporan*	**Rp271.493.000**	**Rp135.746.500**	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12 Laporan*	*12 Laporan*	***Rp135.746.500***	**Rp135.746.500**
1.5	**5-1.05.01.2.07**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***		**100**	**Persentase**	**Rp301.718.400**	**Rp301.718.400**	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***		**100**	**Persentase**	**Rp301.718.400**	**Rp0**

	5-1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1*	*Unit*	**Rp199.859.200**	**Rp199.859.200**	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1*	*Unit*	**Rp199.859.200**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*2*	*Unit*	**Rp101.859.200**	**Rp101.859.200**	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*2*	*Unit*	***Rp101.859.200***	**Rp0**
	5-1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	**Rp140.085.000**	**Rp140.085.000**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	***Rp140.085.000***	**Rp0**
	5-1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	**Rp2.000.798.560**	**Rp2.000.798.560**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*12*	*Laporan*	***Rp2.000.798.560***	**Rp0**
1.7	**5-1.05.01.2.09**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**		**100**	**Persentase**	**Rp796.002.238**	**Rp766.052.736**	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik		**100**	**Persentase**	**Rp766.052.736**	**Rp29.949.502**
	5-1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1*	*Unit*	**Rp38.330.000**	**Rp38.330.000**	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*1*	*Unit*	***Rp38.330.000***	**Rp0**
	5-1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	Badan Penanggulangan	*17*	*Unit*	**Rp649.972.238**	**Rp649.972.238**	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	Badan Penanggulangan	*17*	*Unit*	***Rp649.972.238***	**Rp0**

		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Bencana Daerah					*dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Bencana Daerah				
	5-1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*42*	*Unit*	**Rp107.700.000**	**Rp77.750.498**	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	*42*	*Unit*	**Rp77.750.498**	**Rp29.949.502**
2	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Presentase masyarakat tangguh bencana**		**5**	**Persentase**	**Rp1.912.346.450**	**Rp1.713.049.870**	**Persentase Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA)**	Kota Bogor	**39.71**	**Persentase**	**Rp1.713.049.870**	**Rp199.296.580**
			Presentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana		**20**	**Persentase**			**Persentase Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB)**		**N/A**	**Persentase**		
									Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana		**100**	**Persentase**		
2.1	**5-1.05.03.2.02**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase kelurahan tangguh**		**42,65**	**Persentase**			**Persentase Masyarakat Tangguh Bencana**	Kota Bogor	**2**	**kawasan**		
			Presentase sekolah aman bencana		**0,13**	**Persentase**			**Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana**		**100**	**Persentase**		
			Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**14**	**Persentase**					**-**	**Persentase**		

2.1.1	5-1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga NegaraKeluargamau pun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya*	Kota Bogor	*123*	*Unit*	**Rp701.879.300**	**Rp701.879.300**	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga NegaraKeluargamau pun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	Kota Bogor	*123*	*Unit*	***Rp701.879.300***	**Rp0**
2.1.2	5-1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*	Kota Bogor	*500*	*Orang*	**Rp10.008.100**	**Rp9.406.180**	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	*500*	*Orang*	***Rp9.406.180***	**Rp601.920**
2.1.3	5-1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	Kota Bogor	*5*	*Kawasan*	**Rp523.948.200**	**Rp325.253.540**	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	Kota Bogor	*3*	*Kawasan*	***Rp325.253.540***	**Rp198.694.660**
2.2	**5-1.05.03.2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana**		**12**	**Laporan**			**Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana**		**12**	**Laporan**		

2.2.1	5-1.05.03.2.03.0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	Kota Bogor	*4930*	*Orang*	**Rp50.000.000**	**Rp50.000.000**	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	Kota Bogor	*5088*	*Orang*	***Rp50.000.000***	**Rp0**
2.2.2	5-1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	Kota Bogor	*3000*	*Orang*	**Rp556.514.850**	**Rp556.514.850**	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	Kota Bogor	*3000*	*Orang*	***Rp556.514.850***	**Rp0**
2.3	**5-1.05.03.2.04**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**		**2**	**Dokumen**			**Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**		**1**	**Dokumen**		
2.3.1	5-1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	Kota Bogor	*1*	*Kegiatan*	**Rp69.996.000**	**Rp69.996.000**	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*	Kota Bogor	*1*	*Dokumen / Kegiatan*	***Rp69.996.000***	**Rp0**
	TOTAL						**Rp9.720.132.310**	**Rp9.083.464.514**					**Rp9.083.464.514**	**Rp636.667.796**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA BOGOR

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk Tahun 2025, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, diperlukan langkah nyata berupa perumusan Sasaran dan tujuan yang terarah dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan.

Terkait hal di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor mempunyai tujuan :

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

2 Terwujudnya penurunan resiko bencana daerah

Adapun sasaran yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor adalah :

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup BPBD Kota Bogor

3 Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana

Oleh karena itu, pada Tahun 2025 BPBD Kota Bogor telah memiliki berbagai program dan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelayanan dasar di bidang kebencanaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas serta efektivitas penanggulangan bencana secara menyeluruh. Rangkaian program dan kegiatan beserta indikator yang ditetapkan tersebut disajikan secara lebih rinci pada uraian berikut :

Tabel 3. 1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kota Bogor Tahun 2025

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**1.05.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja**
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal
			Presentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko dilingkungan perangkat daerah
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran dan tahunan secara tepat waktu
			Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan
			Presentase kepatuhan anggaran
			Presentase realisasi anggaran terhadap DPA
			Transparansi Pengelola keuangan daerah
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan Prosedur Waktu Tarif dan Standar layanan
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan
1.1	**5-1.05.01.2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**
	5-1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
1.2	**5-1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**
	5-1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*
	5-1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
1.3	**5-1.05.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah
	5-1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*
1.4	**5-1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
	5-1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*

	5-1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*
	5-1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
1.5	**5-1.05.01.2.07**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD***
	5-1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*
1.6	**5-1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
	5-1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*
	5-1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*
1.7	**5-1.05.01.2.09**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**
	5-1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*
	5-1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*
	5-1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*
2	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**	**Presentase masyarakat tangguh bencana** **Presentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana**
2.1	**5-1.05.03.2.02**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan T erhadap Bencana**	**Persentase kelurahan tangguh** **Presentase sekolah aman bencana** **Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana**
2.1.1	5-1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga NegaraKeluargamaupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya*

2.1.2	5-1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*
2.1.3	5-1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*
2.2	**5-1.05.03.2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana**
2.2.1	5-1.05.03.2.03.0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*
2.2.2	5-1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*
2.3	**5-1.05.03.2.04**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan**
2.3.1	5-1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*

Tabel 3. 2
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							9.564.310.894,00	9.720.132.310,00	9.349.468.009,00							10.396.910.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.564.310.894,00	9.720.132.310,00	9.349.468.009,00							10.396.910.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.564.310.894,00	9.720.132.310,00	9.349.468.009,00							10.396.910.000,00	

1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Rata-Rata				100 12,48 21,97 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 undefined Persentase Nilai Nilai nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase undefined	100 12,48 21,97 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 Persentase Nilai Nilai nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase	7.993.713.319,00	7.807.785.860,00	7.387.239.139,00							8.211.910.000,00	

							Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan (target ditentukan oleh BKAD)																	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Waktu dan sesuai regulasi	-			4 Dokumen	100 Persen	5.021.740,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan secara tepat Wakt		11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																				u dan sesuai regulasi			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	5.021.740,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan adminsitrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	4.009.009.434,00	3.772.804.748,00	3.772.804.748,00			-	-	Pelaksanaan adminsitrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi		4.054.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

				0 2	0 1																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.955.729.434,00	3.719.524.748,00	3.736.349.243,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2 . 0 2	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.280.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	-			80 Paket	80 Paket	249.179.000,00	249.179.000,00	249.179.000,00			-	-	Pemenuhan kebutuhan kepegawaia		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

																				n perangkat daerah			DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	249.179.000,00	249.179.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	506.165.200,00	537.197.914,00	537.197.914,00			-	-	Pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		503.910.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.908.400,00	9.908.400,00	9.908.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.910.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.710.100,00	52.964.114,00	41.740.750,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.695.700,00	21.275.900,00	21.275.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.478.600,00	145.210.600,00	143.657.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

				0 6	0 5																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	22.399.500,00	15.679.650,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2 . 0 6	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.946.400,00	13.946.400,00	13.946.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2 . 0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	210.426.000,00	271.493.000,00	135.746.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			2 unit	2 unit	238.122.147,00	301.718.400,00	301.718.400,00			-	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD		307.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	201.769.747,00	199.859.200,00	199.859.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				14 Unit	2 Unit	36.352.400,00	101.859.200,00	101.859.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

							Lainnya yang Disediakan									Kayu Manis							DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-			24 Laporan	24 Laporan	2.140.883.560,00	2.140.883.560,00	2.140.883.560,00			-	-	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		2.245.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.085.000,00	140.085.000,00	140.085.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.798.560,00	2.000.798.560,00	2.000.798.560,00	Kota Bogor, Tanah	Dana Alokasi Umum	-	-			2.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCA

							Umum Kantor yang Disediakan									Sareal, Kayu Manis	(DAU)						NA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	-			91 Unit	91 Unit	845.332.238,00	796.002.238,00	796.002.238,00			-	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD		841.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.090.000,00	38.330.000,00	38.330.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	683.242.238,00	649.972.238,00	649.972.238,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	42 Unit	120.000.000,00	107.700.000,00	77.750.498,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			108.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase masyarakat tangguh bencana				5 persen	5 persen	1.570.597.575,00	1.912.346.450,00	1.962.228.870,00							2.185.000.000,00	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase	-			123 Unit 42,65 Persen	123 Unit 42,65 Persen	1.175.422.600,00	1.235.835.600,00	1.235.835.600,00			-	-	Persentase kelurahan tanggguh		1.252.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							Kelurahan Tangguh																
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				123 Unit	123 Unit	701.879.300,00	701.879.300,00	701.879.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret Kota Bogor, Bogor Timur, Barangsiang Kota Bogor, Bogor Tengah, Panaragan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			705.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	

							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	2.006.400,00	10.008.100,00	9.406.180,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				4 Kawasan	5 Kawasan	471.536.900,00	523.948.200,00	325.253.540,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			535.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

																	Bogor Timur, Sindangsari Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa Kota Bogor, Bogor Tengah, Tegallega Kota Bogor, Bogor Tengah, Kebon Kalapa							
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik	-			12 laporan	12 laporan	325.178.975,00	606.514.850,00	606.514.850,00			-	-	Jumlah laporan yang diterima dan yang		862.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

						Bencana	kepada korban bencana													bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana			
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				12 Laporan Orang	12 Laporan Orang	26.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik				3000 Orang	3000 Orang	299.178.975,00	556.514.850,00	805.693.850,00	Kota Bogor, Semua Keca	PENDAPATAN ASLI DAE	-	-			835.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

							Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									mata n, Semu a Kel/D esa	RAH (PAD)						DAERA H
	1	0 5	0 3	2 . 0 4		Penataa n Sistem Dasar Penangg ulangan Bencan a	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			1 Unit	2 Doku men	69.996. 000,00	69.996. 000,00	69.996. 000,00			-	-	jumla h doku men data dan infor masi keben canaa n yang tersa mpai kan		71.000. 000,00	BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H
	1	0 5	0 3	2 . 0 4	0 0 1 0	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/K ota yang dilegalkan				1 Doku men Kegia tan	1 Doku men Kegia tan	69.996. 000,00	69.996. 000,00	69.996. 000,00	Kota Bogor , Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	-	-			71.000. 000,00	BADAN PENAN GGULA NGAN BENCA NA DAERA H

	J U M L A H	**9.564.310.894,00**	**9.720.132.310,00**	**9.349.468.009,00**							**10.396.910.000,00**	

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025 memuat program, kegiatan, serta pagu indikatif yang disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mendukung prioritas pembangunan, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Keberhasilan setiap program sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh instansi, sehingga diperlukan identifikasi yang jelas antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran, dilakukan penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan program/kegiatan. Oleh karena itu, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan BPBD Kota Bogor disusun secara sistematis untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rencana Kerja BPBD Kota Bogor Tahun 2025 terjadi perubahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata, kondisi, serta situasi terkini yang dihadapi. Rincian mengenai perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3
Perubahan Pagu Anggaran BPBD Kota Bogor 2025

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	PAGU PERUBAHAN TAMBAHAN PASCA EFESIENSI	PAGU PERUBAHAN
1	*2*	*3*	*7*	*4*		*5*
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp7,807,785,860**	**Rp7,370,414,644**	**Rp7,387,239,139**	**Rp7,189,354,237**
1.1	**5-1.05.01.2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp10,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp7,000,000**
	5-1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Rp10,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp7,000,000**	**Rp7,000,000**
1.2	**5-1.05.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp3,772,804,748**	**Rp3,772,804,748**	**Rp3,789,629,243**	**Rp3,672,382,414**
	5-1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Rp3,719,524,748**	**Rp3,719,524,748**	**Rp3,736,349,243**	**Rp3,619,102,414**
	5-1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Rp53,280,000**	**Rp53,280,000**	**Rp53,280,000**	**Rp53,280,000**
1.3	**5-1.05.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp249,179,000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
	5-1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Rp249,179,000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
1.4	**5-1.05.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp537,197,914**	**Rp381,955,200**	**Rp381,955,200**	**Rp403,104,600**

	5-1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Rp9,908,400**	**Rp9,908,400**	**Rp9,908,400**	**Rp9,908,400**
	5-1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Rp52,964,114**	**Rp41,740,750**	**Rp41,740,750**	**Rp40,581,500**
	5-1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Rp21,275,900**	**Rp21,275,900**	**Rp21,275,900**	**Rp21,270,000**
	5-1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Rp145,210,600**	**Rp143,657,600**	**Rp143,657,600**	**Rp166,130,600**
	5-1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Rp22,399,500**	**Rp15,679,650**	**Rp15,679,650**	**Rp15,533,700**
	5-1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Rp13,946,400**	**Rp13,946,400**	**Rp13,946,400**	**Rp13,946,400**
	5-1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Rp271,493,000**	**Rp135,746,500**	**Rp135,746,500**	**Rp135,734,000**
1.5	**5-1.05.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp301,718,400**	**Rp301,718,400**	**Rp301,718,400**	**Rp296,718,200**
	5-1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Rp199,859,200**	**Rp199,859,200**	**Rp199,859,200**	**Rp194,859,000**
	5-1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Rp101,859,200**	**Rp101,859,200**	**Rp101,859,200**	**Rp101,859,200**
1.6	**5-1.05.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp2,140,883,560**	**Rp2,140,883,560**	**Rp2,140,883,560**	**Rp1,967,383,160**
	5-1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	**Rp140,085,000**	**Rp140,085,000**	**Rp140,085,000**	**Rp140,085,000**
	5-1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Rp2,000,798,560**	**Rp2,000,798,560**	**Rp2,000,798,560**	**Rp1,827,298,160**
1.7	**5-1.05.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp796,002,238**	**Rp766,052,736**	**Rp766,052,736**	**Rp842,765,863**
	5-1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	**Rp38,330,000**	**Rp38,330,000**	**Rp38,330,000**	**Rp38,330,000**

		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	5-1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Rp649,972,238**	**Rp649,972,238**	**Rp649,972,238**	**Rp657,245,361**
	5-1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Rp107,700,000**	**Rp77,750,498**	**Rp77,750,498**	**Rp147,190,502**
		Program Penanggulangan Bencana	**Rp1,912,346,450**	**Rp1,713,049,870**	**Rp1,962,228,870**	**Rp1,964,198,200**
2.1	**5-1.05.03.2.02**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Rp1,235,835,600**	**Rp1,036,539,020**	**Rp1,036,539,020**	**Rp1,036,386,200**
2.1.1	5-1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Rp701,879,300	Rp701,879,300	Rp701,879,300	Rp701,879,300
2.1.2	5-1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	**Rp10,008,100**	**Rp9,406,180**	**Rp9,406,180**	**Rp9,339,300**
2.1.3	5-1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	**Rp523,948,200**	**Rp325,253,540**	**Rp325,253,540**	**Rp325,167,600**
2.2	**5-1.05.03.2.03**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Rp606,514,850**	**Rp606,514,850**	**Rp855,693,850**	**Rp857,816,000**
2.2.1	5-1.05.03.2.03.0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Rp50,000,000**	Rp50,000,000	Rp50,000,000	Rp50,000,000
2.2.2	5-1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Rp556,514,850**	Rp556,514,850	Rp805,693,850	Rp807,816,000

2.3	**5-1.05.03.2.04**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Rp69,996,000**	**Rp69,996,000**	**Rp69,996,000**	**Rp69,996,000**
2.3.1	5-1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	**Rp69,996,000**	Rp69,996,000	Rp69,996,000	Rp69,996,000
	TOTAL		**Rp9,720,132,310**	**Rp9,083,464,514**	**Rp9,349,468,009**	**Rp9,153,552,437**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindak lanjut sekaligus implementasi dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut secara komprehensif mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, aturan ini juga memberikan pedoman tentang bagaimana perubahan dapat dilakukan pada RPJPD, RPJMD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai salah satu dokumen resmi perangkat daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan. Dokumen ini berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan pada level perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD**)**, sehingga menjadi instrumen penting dalam implementasi strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dengan demikian, Perubahan Renja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi satu kesatuan perencanaan yang integral guna mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh. Selain itu Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 memiliki arti penting karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja BPBD, baik dalam aspek perencanaan maupun implementasi. Perubahan Renja ini

berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi, yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, capaian program BPBD dapat dievaluasi secara terukur serta dipertanggungjawabkan.

Lampiran w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 merupakan bentuk implementasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas berpedoman pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, sehingga sebagai dasar acuan adalah RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 serta RKPD Kota Bogor Tahun 2025.

Secara umum, substansi Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun berisi prioritas program dan kegiatan yang merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratik, *bottom up* dan *top down* yang dihimpun secara partisipatif dan politis serta melalui proses sinkronisasi dalam Forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dalam tahapan penganggaran sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Kota Bogor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Bogor Tahun 2025.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/permen/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/kepmen/ 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir Pada Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.

Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perubahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor Tahun 2025 adalah dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2026 dan hubungannya dengan RKPD Kota Bogor. Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2025;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan/sasaran dan indikator-indikatornya selama 1 tahun oleh SKPD;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas- tugas

sesuai dengan kewenangannya;

4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar
   melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD tahun lalu

Berdasarkan amanat konstitusi, salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa. Secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang sangat sentral yaitu memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Petugas teknis lapangan atau lebih sering disebut Pasukan Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pasukan inilah yang secara langsung akan dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan, apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Institusi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti institusi TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit.

Bagi institusi pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia termasuk di Kota Bogor agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jam kerja 1x24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang satria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih popular dengan sebutan anggota pemadam kebakaran. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kota Bogor hingga akhir tahun 2021 masih bergabung satu atap dengan kantor Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Program Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

No.			**Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif Tahun 2025 (Perubahan)**	**Keterangan**
1.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Rp.16.393.210.121,-**	
	1.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp.10.000.000,-**	
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.5.578.000,-	
		b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.4.422.000,-	
	1.2		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	**Rp.12.580.287.343,-**	
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.12.525.287.343,-	
		b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.55.000.000,-	
	1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp.314.058.100,-**	
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut kelengkapannya	Rp.314.058.100,-	
	1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp.589.201.600.-**	
		a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.39.546.100.-	
		b.	Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.50.397.700,-	
		d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.220.647.800,-	
		e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Rp.278.610.000,-	
		f.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Tidak dianggarkan
	1.5		Pengadaan BMD Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Rp.939.527.352,-**	
		a.	Pengadaan Mebel	Rp.66.112.500,-	
		b.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.178.448.460,-	
		d.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.694.966.392,-	
	1.6		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Rp.1.307.610.028,-**	
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.113.777.612,-	
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.193.832.416,-	
	1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp.1.506.418.296,-**	

		a.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	Rp.200.843.326,-	
		b.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.962.864.304,-	
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.30.383.586,-	
		d.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	Tidak dianggarkan
		e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Rp.312.327.080,-	
2.			**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rp.2.899.060.680**,-	
	2.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.2.157.748.400,-**	
		a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		b.	Pemadaman dan PengendalianKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		c.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
		d.	Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Tidak dianggarkan
		e.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	Tidak dianggarkan
		f.	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Rp.2.082.758.400,-	
		g.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp.74.990.000,-	
		h.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan(SKIK)	-	Tidak dianggarkan
		i.	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalamPencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	
		a.	Pendataan Sarana Prasarana ProteksiKebakaran	-	Tidak dianggarkan
		b.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.3		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan

		a.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian PenyebabKejadian Kebakaran	-	Tidak dianggarkan
	2.4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Rp. 380.958.380,-**	
		a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.161.287.880,-	
		b.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 120.696.600,-	
		c.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 98.973.900,-	
	2.5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap KondisiMembahayakan Manusia	**Rp. 360.353.900,-**	
		a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 360.353.900,-	
		b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadapKondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan
		c.	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	Tidak dianggarkan

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BOGOR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Realisasi/Kinerja (10.12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Anggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM aspek penyampaian Pengaduan Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase realisasi anggaran terhadap DPA				100 12,48 21,97 26,28 27,01 87,11 87,76 88,38 94 98 Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen	100 12,48 21,97 26,28 27,01 87,11 87,76 88,38 94 98 Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen	15.627.607.680,00	17.312.737.733,00	17.247.102.719,00	-15.627.507.680,00							0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah* *Persentase pagu usulan dokumen perencanaan yang tepat waktu*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	5.578.000,00	5.578.000,00	5.578.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	NON URUSAN							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	4.422.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	NON URUSAN							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.559.604.780,00	20.292.874.133,00	20.146.103.399,00	2.586.468.619,00							450.000.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu* *Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				100 persen	100 Persen	11.830.192.296,00	12.409.860.097,00	12.580.287.343,00	1.080.086.045,00			-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	11.465.192.296,00	12.364.860.097,00	12.535.287.343,00	1.080.086.045,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana Administrasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapnya*				1 paket	1 paket	166.840.800,00	314.058.100,00	314.058.100,00	153.217.300,00			-	-	Aparatur DKPP		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	160.840.900,00	314.058.100,00	314.058.100,00	153.217.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	690.107.000,00	694.774.000,00	589.201.600,00	-90.905.400,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.161.500,00	45.151.500,00	39.545.100,00	-5.615.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.767.700,00	50.797.700,00	50.397.700,00	-370.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.142.600,00	225.942.600,00	339.647.600,00	113.705.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	471.136.000,00	486.160.000,00	278.610.000,00	-192.510.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai standard*				12 Paket	100 Persen 12 Paket	187.792.500,00	310.855.300,00	939.527.352,00	771.734.752,00			-	-	DPKP dan Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Meja																		
			Jumlah Paket Meja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	65.194.700,00	65.194.700,00	65.112.500,00	-82.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	101.597.900,00	176.670.500,00	179.446.400,00	76.850.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	694.096.300,00	694.096.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Kantor yang Disediakan* *Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen 12 Laporan Lapangan	100 persen 12 Laporan Lapangan	1.313.610.576,00	1.307.537.020,00	1.307.610.026,00	5.890.548,00				-	ajusatan perubahan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119.651.468,00	113.777.612,00	113.777.612,00	-5.873.856,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.190.759.400,00	1.190.759.400,00	1.190.832.400,00	73.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase RMU lingkup perangkat daerah berkondisi baik*				100 persen	100 persen	1.674.574.000,00	2.395.662.416,00	1.506.416.206,00	-166.155.710,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	214.003.336,00	200.843.336,00	200.843.336,00	-13.160.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	973.507.504,00	962.662.504,00	962.662.504,00	-10.845.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	74.895.176,00	30.383.580,00	30.383.580,00	-44.511.596,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	411.168.000,00	1.011.429.000,00	312.927.000,00	-98.220.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.	1.05.03	**PROGRAM PENCEGAHAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rasio (%) Rasio Tiap penanggulangan kebakaran**				**5,25 Rasio**	**5,25 rasio**	**2.032.857.100,00**	**2.960.338.400,00**	**2.899.968.600,00**	**-1.892.857.100,00**							**450.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Aus dan Layak Sesuai Standar Teknis Tersedia*				203 Buah	203 Buah	1.180.279.100,00	2.157.750.400,00	2.157.746.400,00	977.469.300,00				-	ASN Kota Bogor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi/Kelompokan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	74.990.000,00	-10.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tentang				203 Unit	203 Unit	1.105.279.100,00	2.082.758.400,00	2.082.758.400,00	977.479.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Kelurahan Tanggap Kebakaran Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran kepada Masyarakat*				10 Kegiatan 10 Kelurahan 120 Relawan	10 Kegiatan 10 Kelurahan 120 Relawan	492.004.100,00	452.024.100,00	380.958.380,00	-111.085.720,00			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				150 Orang	150 Orang	209.999.600,00	239.999.600,00	161.287.880,00	-198.711.720,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	123.080.600,00	123.080.600,00	120.696.600,00	-2.384.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Dasarnya				1 Dokumen	1 Dokumen	98.973.900,00	98.973.900,00	98.973.900,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Jumlah Sarana Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Sesuai Standart Jumlah Sarpras Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Sesuai Standar Jumlah SDM Aparatur Pencarian dan Pertolongan yang ditingkatkan Kompetensinya*				217 buah 25 buah 5 orang	217 buah 25 buah 5 orang	360.353.900,00	360.353.900,00	360.353.900,00	0,00			-	- -	ASN Kota Bogor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				18 Unit	18 Unit	360.353.900,00	360.353.900,00	360.353.900,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	J U M L A H								**17.669.894.790,00**	**20.292.874.133,00**	**20.146.163.392,00**	**2.586.468.619,00**							**450.000.000,00**	

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Walikota Bogor Nomor 177 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan **urusan pemerintahan bidang tramtibumlinmas sub urusan kebakaran** yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, dan Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a) Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM, sehingga sulit untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam mengelola wilayah manajemen kebakaran;
b) Penambahan fungsi penyelamatan belum diimbangi dengan kualitas standar kompetensi SDM maupun peralatan penyelamatan guna pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
c) Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran, hidran kota tidak berfungsi, sumur pemadam yang kondisi air belum memenuhi kebutuhan serta kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan;
d) Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk maupun pos pembantu serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;
e) Belum lengkapnya sarana dan perlengkapan di pos induk maupun pos pembantu serta rusaknya peralatan pemadam yang tidak sebanding dengan pengadaan baru berdampak pada kurang optimalnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan;
f) Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan Perda Nomor 6 tahun 2000 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Bogor, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana;

g) Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada, maka sasaran/target yang akan dicapai selama 1 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui :
   a. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (warga di tingkat Kelurahan, instansi pemerintah, siswa sekolah dan pasar di Kota Bogor);
   b. Pengembangan dan Pemberdayaan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang sudah dan akan dibentuk di tingkat Kelurahansebanyak 68 kelompok REDKAR di Kota Bogor;
2. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;
3. Melaksanakan pengkajian lebih mendalam sesuai peraturan perundang- undangan dalam memeriksa sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung melalui kegiatan koordinasi perijinan dan pemanfaatan gedung;
4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaranyang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dll;
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui kegiatan Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau;
6. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dengan cara:
   a. Mengikutsertakan personil aparatur pemadam mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar kualifikasi;

b. Mengikutsertakan personil aparatur pemadam untuk mengikuti lomba ketrampilan pencegahan bahaya kebakaran baik ditingkat Propinsi maupun Nasional.

7. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan pengadaan peralatan PMK berupa Pompa Portabel, Flashlight dan pengadaan APD berupa masker, baju tahan panas, self containing breathing apparatus (SCBA) dan kaos tangan kebakaran.
8. Melakukan pendataan dan pelaporan secara rutin kejadian kebakaran di Kota Bogor.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menentukan usulan program dan kegiatan untuk bahan penyusunan Renja-SKPD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang ataupun Pokok-pokok Pikiran DPRD. Berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokir, usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa:

a) Pelatihan cara mengatasi kebakaran (Tanggap Kebakaran);
b) Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran; dan
c) Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (APAR, Pompa Portable, Pompa Apung dan Peralatan lainnya

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Namun berdasarkan Nilai Pagu yang diterima, ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor terutama untuk penyediaan Sarana dan Prasarana serta peralatan pendukung baik untuk peralatan Pemadaman Kebakaran, Pencegahan maupun peralatan penyelamatan (Rescue).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Nihil

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis stratejik. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah:

a. Terwujudnya kemampuan SDM (*Human Resources Capability*) yang profesional.
b. Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lain
c. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang memadai.
d. Terinventarisasinya data daerah rawan kebakaran.
e. Berupaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas di tempat bekerja.
f. Terwujudnya Peraturan Daerah (bidang kebakaran dan bidang bencana) tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
g. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
h. Terwujudnya kerja sama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

Sasaran Kota Bogor sebagai Kota Jasa mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga permasalahan kebakaran dan bencana diperlukan penanganan profesional (cepat dan tepat) agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik harta maupun jiwa. Untuk itu menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat kota Bogor untuk menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan maupun aset pemerintah Kota Bogor baik sebelum, sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Usaha- usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi sasaran tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Mengembangkan dan memberdayakan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat Kelurahan;
3. Meningkatkan pengawasan dalam pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan baru, mulai dari gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi proteksi kebakaran tersebut terpasang;
4. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, sedang, vital, dan industri sebagai persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dll;
5. Mengurangi hambatan saat pelaksanaan pemadaman kebakaran, seperti: penertiban gapura, portal, patok, polisi tidur dll.
6. Mempertahankan respon time pertolongan kebakaran pada masyarakat 15 menit dengan cara pengajuan permohonan kepada instansi yang bersangkutan untuk penambahan pos pembantu, sarana dan prasarana, dan personil Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor.
7. Meningkatkan keterampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dengan cara mengikutsertakan dalam Diklat Pemadam Kebakaran

Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka strategi pencegahan bahaya kebakaran diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran baik peningkatan kesiapsiagaan pada personil aparatur pemadam kebakaran maupun pada peningkatan kesiapsiagaan pada masyarakat Kota Bogor. Berdasarkan kebijakan strategi yang diterapkan dalam Rencana Strategis SKPD maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor membuat Rencana Program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

o.			**Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**
.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**
	.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
	.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		.	Pengadaan Mebel
		.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		.	
	.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
.			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN**
	.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakarandan APD
		.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
		.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
	.3		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran di Perubahan tahun 2025

No.			Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Pagu Indikatif Tahun 2025 (Perubahan)	Keterangan
.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Rp.16.393.210.121,-**	
	.1		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp.10.000.000,-**	APBD
		.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.5.578.000,-	
		.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.4.422.000,-	
	.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp.12.580.287.343,-**	APBD
		.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.12.525.287.343,-	
		.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.55.000.000,-	
	.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp.314.058.100,-**	APBD
		.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Rp.314.058.100,-	
	.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp.589.201.600.-**	APBD
		.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.39.546.100.-	
		.	Barang Cetakan dan Penggandaan	-	
		.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.50.397.700,-	
		.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.220.647.800,-	
		.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.278.610.000,-	
		.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
	.5		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp.939.527.352,-**	APBD
		.	Pengadaan Mebel	Rp.66.112.500,-	
		.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	
		.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.178.448.460,-	
		.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.694.966.392,-	
	.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp.1.307.610.028,-**	APBD

		.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.113.777.612,-	
		.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.193.832.416,-	
	.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp.1.506.418.296,-**	APBD
		.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinasjabatan	Rp.200.843.326,-	
		.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.962.864.304,-	
		.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.30.383.586,-	
		.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	
		.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Rp.312.327.080,-	
.			**PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rp.2.899.060.680**,-	
	.1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp.2.157.748.400,-**	APBD
		.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
		.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
		.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	
		.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
		.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	
		.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan APD	Rp.2.082.758.400,-	
		.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp.74.990.000,-	
		.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	
		.	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	
	.2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	
		.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	

		.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	
	.3		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	
		.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	
	.4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		APBD
		.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp.161.287.880,-	
		.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp. 120.696.600,-	
		.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 98.973.900,-	
	.5		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Rp. 360.353.900,-**	APBD
		.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 360.353.900,-	
		.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	-	
		.	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	

BAB V PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor tahun 2025 dapat tersusun dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan di bidang kebakaran dan bencana lainnya. Untuk mencapai berbagai indikator sasaran pembangunan di bidang kebakaran dan bencana yang telah termuat di dalam Renja Perubahan ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan pembangunan bidang kebakaran dan bencana. Oleh karena itu Rencana Kerja Perubahan ini perlu disosialisasikan kepada *stakeholder* agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaannya.

Walaupun dalam Rencana Kerja Perubahan ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada berbagai kekurangan, mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat, kompleks, dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja Perubaahan ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini dapat dicapai melalui semangat pengabdian, kerjasama yang baik dan berkesinambungan yang saling menguatkan.

Dengan semangat pengabdian yang tinggi dan kerja keras kita semua, Insya Allah masyarakat Kota Bogor akan merasakan keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, karena apa yang kita harapkan tercipta dengan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat terhadap bahayakebakaran dan bencana lainnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahana tahun 2025 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya serta semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan pada kita semua.

Lampiran x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Sebagai sebuah Dokumen Resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja

merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu- isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

1. Renja merupakan Dokumen Dasar Penyusunan Program Kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta Penyusunan dan Perencanaan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun2025.
2. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis(Renstra).

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain Pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

7. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236)

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E)

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);

29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);

31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);

33 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha

34 Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;

35 Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

36. Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

37. Keputusan Walikota Bogor Nomor 503/ Kep.202-DPMPTSP/2022 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem SMART pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor selama Tahun 2025 berupa penjabaran dari Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025-2029.

1.3.2. 1.3.2 Tujuan

Tujuannya Peyusunan Perubahan Renja 2025 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 berupa Rencana Kinerja yang mencakup Rencana Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk Program Prioritas dan salah satu acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bogor

2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triw I I Tahun 2025

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BOGOR

3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP

TAHUN 2025 Triwulan II

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026. Dalam penyusunan Perubahan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan semester satu, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bapperida Kota Bogor sampai dengan semester duatahun 2025 sesuai dengan RPD Kota Bogor tahun 2025-2026

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 DPMPTSP Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2025-2026 DPMPTSP Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP
Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	94.5	Nilai		91.5	Nilai									
						Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	100	Persen		100	Persen									
						Nilai Hasil Survey Kepuasan	91.25	Nilai		88.25	Nilai									
						Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	1	Inovasi/ Tahun/ PD		1	Inovasi/ Tahun/ PD									
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	Persen		100	Persen	100	Persen		100	Persen				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	46.959.100	12	Dokumen	110.109.100	3 Doku Men	10.840.200	6 Doku Men	10.840.200		21.680.400		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen		100	Persen		100 Persen		100 Persen					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Orang	15.077.017.943	41	Orang	11.441.316.595	123 Orang	2.669.744.025	246 Orang	3.108.748.083		5.778.492.108		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	50.787.200	18	Laporan	53.367.200	54 Lapoan	12.381.200	108 Laporan	12.696.800		25.078.000		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	Persen		100	Persen									
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	100.000.000	1	Paket	69.554.890	1 Paket	-	1 Paket	59.415.528		59.415.528		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	118.450.082	1	Paket	82.332.870	1 Paket	43.09.300	1 Paket	31.780.900		36.090.200		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	22.021.128	1	Paket	15.765.280	1 Paket	3.480.000	1 Paket	3.967.200		7.447.200		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176	Laporan	213.326.025	136	Laporan	116.483.500		13.970.700		29.108.800		43.079.500		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	100	Persen		100	Persen									
					Pengadaan Kendaraan		1	Unit	350.000.000	1	Unit	616.154.000	-	-	-	-		-		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	350.000.000	23	Unit	797.450.800	-	-	-	301.890.000		301.890.000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		100	Persen									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporn	13.184.923	12	Laporn	11.377.529	3 Laporan	1.556.471	6 Laporan	2.863.180		4.419.651		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporn	1.379.402.559	12	Laporn	932.506.420	3 Laporan	207.872.402	6 Lap oran	243.557.262		451.429.664		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100	Persen		100	Persen									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biay a Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	325.732.408	28	Unit	244.727.580		21.100.000		56.467.000		77.567.000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	Unit	66.854.868	37	Unit	23.139.670	-	-		5.795.000		5.795.000		
					Pemeliharaan/Rehabilit a si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	253.129.580			495.128.600	-	-		24.689.000		24.689.000		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimpleme ntasi	100	Persen		100	Persen									
					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Forum Investasi Daerah	2	Dokumen		2	Dokumen									
					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	115.000.000	1	Dokumen			5.664.000		92.671.400		98.335.400		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	1	Dokumen (kesepakatan kemitraan)	120.000.000	1	Dokumen (kesepakatan kemitraan)	46.340.850		-		-		-		
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen peta potensi, peluang investasi dan dokumen IPRO yang terealisasi	2	Dokumen		2	Dokumen									
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	Dokumen	89.128.500		-		-				
					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Koa	3	Dokumen	220.000.000	3	Dokumen	199.371.400		-		2.420.000		2.420.000		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	2.080	Trilliun		1.998	Trilliun									
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota														
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	205.568.429		14.202.300		166.853.900		181.056.200		
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha	94	Persen		89	Persen									
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha	94	Persen		89	Persen									
					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200	Pelaku Usaha	120.000.000	200	Pelaku Usaha	98.000.000		-		-		-		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta di lakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25	Kegiatan Usaha		25	Kegiatan Usaha			-		-		-		
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peresentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	Persen		100	Persen									
					Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100	Persen		100	Persen									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2029 (Ahir Periode Renstra)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan tahun 2025 yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			6			7		8					
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7.300	Pelaku Usaha	2.150.000.000	7.000	Pelaku Usaha	3.019.677.744		-		845.910.972		845.910.972		
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	Persen		100	Persen									
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	7	Dok Umen		6	Dok Umen									
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7	Dok Umen		6	Dok Umen			-		92.382.300		92.382.300		

Dari data tabel 2.1 di atas bahwa evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sampai dengan semester satu tahun 2025, progress pencapaian target indikator program masih belum bisa terlihat karena sebagian besar kegiatan belum selesai pelaksanaannya dan hampir seluruh indikator program baru dapat diukur pada akhir tahun.

Tabel 2.2

Raport Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Semester 1 (Periode Januari s/d Juni Tahun 2025)

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		
			RENCANA/TARGET		REALISASI		RENCANA/TARGET	REALISASI	KEU	FISIK	
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	205.567.709,00	183.488.109,00	89.26	181.056.200,00	88.08	100	100	-1.33	0	MOHAMAD ZAELANI, S.E., M.Si.
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.787.200,00	25.078.000,00	49.38	25.078.000,00	49.38	100	100	0	0	ERAYANTI DEWI, S.IP
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.109.100,00	21.680.400,00	19.69	21.680.400,00	19.69	37.28	37.28	0	0	DEWI ARDIATI, S.Sos.
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.327.586.736,00	6.351.386.602,00	56.07	5.778.492.108,00	51.01	100	100	-9.02	0	ERAYANTI DEWI, S.IP
5	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	99.516.800,00	99.516.800,00	100	98.335.400,00	98.81	100	100	-1.19	0	LUCYANA MEILANI SIPAYUNG, S.E.

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		
			RENCANA/TARGET		REALISASI		RENCANA/TARGET	REALISASI	KEU	FISIK	
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	199.371.400,00	7.260.000,00	3.64	2.420.000,00	1.21	3.64	3.64	-66.67	0	LUCYANA MEILANI SIPAYUNG, S.E.
7	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.764.600,00	92.382.300,00	50	92.382.300,00	50	100	100	0	0	MOHAMAD ZAELANI, S.E., M.Si.
8	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	89.128.500,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	LUCYANA MEILANI SIPAYUNG, S.E.
9	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	46.340.850,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	LUCYANA MEILANI SIPAYUNG, S.E.
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.554.890,00	321.554.890,00	100	59.415.528,00	18.48	100	21.63	-81.52	-78.37	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		
			RENCANA/TARGET		REALISASI		RENCANA/TARGET	REALISASI	KEU	FISIK	
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.526.770,00	48.037.370,00	58.21	36.090.200,00	43.73	100	83.2	-24.87	-16.8	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.765.280,00	8.272.400,00	52.47	7.447.200,00	47.24	100	100	-9.98	0	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.062.500,00	74.226.500,00	83.34	43.079.500,00	48.37	100	100	-41.96	0	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	874.429.600,00	544.573.400,00	62.28	301.890.000,00	34.52	91.12	79.37	-44.56	-11.75	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.906.029,00	6.204.029,00	62.63	4.419.651,00	44.62	100	100	-28.76	0	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.036.365.560,00	479.622.464,00	46.28	451.429.664,00	43.56	100	100	-5.88	0	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUNI								PPTK/PPK
			KEUANGAN				FISIK		DEVIASI		
			RENCANA/TARGET		REALISASI		RENCANA/TARGET	REALISASI	KEU	FISIK	
			Rp	%	Rp	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.727.580,00	120.859.760,00	49.39	77.567.000,00	31.7	100	100	-35.82	0	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.906.183,00	25.466.513,00	94.65	5.795.000,00	21.54	94.65	21.54	-77.24	-73.11	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.048.000,00	190.180.000,00	48.76	24.689.000,00	6.33	100	13.46	-87.02	-86.54	ELIS KARTIKASARI, S.Sos.
20	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.019.677.744,00	1.497.131.972,00	49.58	845.910.972,00	28.01	85.33	80.34	-43.6	-4.99	SITI MAESAROH, SE, MM.
	Total	18.424.143.031,00	10.096.921.509,00	54.8	8.057.178.123,00	43.73	80.6	67.02	-20.2	-13.58	

	Jumlah Paket			
	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%
> 0 %	0	0	0	0
< 0 %	8	40	15	75
< -6 %	2	10	0	0
< -11 %	10	50	5	25

2.2. Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triw II Tahun 2025

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan realisasi anggaran Bapperida sampai dengan triwulan II atau semester 1 tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor sampai dengan semester satu tahun 2025 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PERUBAHAN DPMPTSP Triwulan II Tahun 2025

Kode	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	A		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.55		
	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	90		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	**100**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	37 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100		
	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	90		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	12 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, SAKIP, PMPRB, MCP, STANDAR PELAYANAN, SOP, PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK, PENILAIAN OMBUDSMEN, MANAJEMEN RESIKO)	**100**		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	31 Unit		

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudahTerintegrasi	100		
	Pengelolaan Data Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistim Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu	**100**		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi Yang Tersedia Tepat Waktu	100		
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha		
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan danNon Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	**100**		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100		
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yangMendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	41.400 Pelaku Usaha		
	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi	**1.940 Trilliun**		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang telah di Promosikan	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja C apaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen HasilKegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang Terimplementasi	**100**		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah Potensi dan Peluang Investasi yangTerealisasi**	100		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes(/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja C apaian Program dan Kegiata RENJA DPMPTSP Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan I (Tahun 2025)	Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	2 Dokumen		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		
	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DPMPTSP

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Sejalan dengan hal tersebut Capaian Indikator Kinerja dapat dinilai dari Capaian Indikatornya. Indikator Sasaran dan Program RENSTRA sebagai berikut:

Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP
Kota Bogor Semester I Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	CAPAIAN SD SEMESTER I TAHUN 2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup DPMPTSP	A	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup DPMPTSP	3.55	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup DPMPTSP	89.50	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91	-
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup DPMPTSP	85.50	-
Meningkatnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	21.25	-
	Meningkatnya Fasilitasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	90	-
		Persentase Capaian Kinerja Realisasi Investasi	100	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran DPMPTSP sampai dengan semester satu tahun 2025 tersebut di atas masih belum dapat diukur ketercapaiannya, begitu juga dengan indikator kinerja program yang masih belum dapat diukur ketercapaiannya, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Program DPMPTSP
Kota Bogor Semester I Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28.81	-
	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	28.05	-
	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	13.98	-
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23.47	-
	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah	100	-
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	-
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	-
	Persentase Kepatuhan Anggaran	100	-
	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	-
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94	-
	Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11	-
	Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75	-
	Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38	-
	Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38	-
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang tersedia Tepat Waktu	100	-

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	1.940	-
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi	100	-
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	-
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	-

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review teradap Rencana Kerja (Renja) RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program dan Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan Kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan Tingkat Kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait Prioritas Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD, meliputi Kegiatan Identifikasi Prioritas Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, tolok ukur atau target Sasaran Program/Kegiatan, serta Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk setiap Program/Kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Reiview terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2025

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				PERUBAHAN RENJA DPMPTSP 2025			
1	2	3	4		5	6	7		8
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28.81	Nilai		Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	28.81	Nilai	
		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	28.05	Nilai		Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	28.05	Nilai	
		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	13.98	Nilai		Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	13.98	Nilai	
		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23.47	Nilai		Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	23.47	Nilai	
		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah	100	Persen	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	Persen		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	Persen	
		Persentase Kepatuhan Anggaran	100	Persen		Persentase Kepatuhan Anggaran	100	Persen	
		Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	Persen		Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	Persen	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94	Persen		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94	Persen	
		Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11	Nilai		Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11	Nilai	
		Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75	Nilai		Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75	Nilai	
		Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38	Nilai		Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38	Nilai	
		Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38	Nilai		Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38	Nilai	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	DPMPTSP	Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Perencanaan,	100	Persen		Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Perencanaan,	100	Persen	

Perangkat Daerah		Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal yang selesai tepat waktu				Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal yang selesai tepat waktu			
		Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	100	Persen		Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	100	Persen	
		Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	95	Persen		Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	95	Persen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84	Dokumen	121.863.100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84	Dokumen	43,427,600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	11.327.586.736	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	10,835,049,481
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	69.470.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	50,482,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	Persen		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	Persen	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	331.995.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	68,671,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	88.993.300	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	78,370,200
Penyediaan Bahan Logistik Kanto	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	16.544.800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	26,785,300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	160.275.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	Laporan	299,109,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	DPMPTSP	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	100	Persen		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	100	Persen	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP		1	Unit	616.154.000		1	Unit	397,179,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	Unit	561.454.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	Unit	412,255,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9.906.029	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12,028,029
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	1.036.365.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	970,972,696
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100	Persen		Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100	Persen	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	Unit	244.727.580	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	Unit	249,453,706
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	Unit	50.229.053	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	Unit	54,309,340
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	190.180.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	197,802,600
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi	100	Persen		Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi	100	Persen	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	2	Dokumen		Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	2	Dokumen	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	99.780.000	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	99,968,000
Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	75.541.000	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	275,351,600
Pembuatan Peta Potensi Investasi	DPMPTSP	Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi	100	Persen		Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi	100	Persen	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	136.759.800	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	136,759,800
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	Dokumen	199.962.000	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	Dokumen	199,959,400

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Nilai Realisasi Investasi	1.940	Trilliun		Nilai Realisasi Investasi	1.940	Trilliun	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan	100	Persen		Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan	100	Persen	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	230.153.089	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	431,957,980
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	Persen		Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	Persen	
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100	Persen		Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100	Persen	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	41.400	Pelaku Usaha	1.995.164.044	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	41.400	Pelaku Usaha	2,000,645,357
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang tersedia Tepat Waktu	100	Persen		Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang tersedia Tepat Waktu	100	Persen	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Persentase Jumlah Laporan Investasi yang tersedia tepat waktu	100	Persen		Persentase Jumlah Laporan Investasi yang tersedia tepat waktu	100	Persen	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	Pelaku Usaha	98.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	Pelaku Usaha	98,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	Persen		Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	Persen	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	6	Dokumen		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	6	Dokumen	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	Dokumen	184.764.600	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	Dokumen	184,172,400

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

Rencana pendanaan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor digunakan untuk membiayai 6 Program yang terdiri dari 5 Program Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Total Alokasi Rencana Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah sebesar **Rp18.424.143.751** Dalam mewujudkan Tujuan dan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025, seperti di Uraikan dalam BAB sebelumnya, maka di rumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta Indikatornya yang akan di Laksanakan di Tahun 2025 :

3.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Indikator Kinerja Program (1) Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja; (2) Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja; (3) Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja; (4) Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal; (5) Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah; (6) Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu; (7) Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan; (8) Persentase Kepatuhan Anggaran; (9) Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA; (10) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (11) ; Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana; (12) Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM; (13) Nilai SKM

Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan; (14) Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan, Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota, dengan Sub Kegiatan:
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program : Nilai Realisasi Investasi, Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

   1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan:
      - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program : Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu, Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

   1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Bimbingan Teknis kepada Pelaku.
      - Pengawasan Penanaman Modal.

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program : Persentase Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terimplementasi, Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

   1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
      - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   2) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
      - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indikator Kinerja Program : Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi, Adapun Kegiatannya adalah :

   1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
      - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

6. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP, Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

   1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, ***dengan Sub Kegiatan :***
      - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.1.
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) 2025

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025						PERUBAHAN 2025						KETERANGAN
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	
					VOLUME	SATUAN					VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja		28.81	Nilai	11.518.920.636	22.816.069.772	Nilai SAKIP di Lingkup DPMPTSP		91.5	Nilai	22.816.069.772	- 11.297.149.136	
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		28.05	Nilai			Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan		100	Persen			
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		13.98	Nilai			Nilai Hasil Survey Kepuasan		88.25	Nilai			
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		23.47	Nilai			Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan		1	Inovasi/Tahun/PD			
			Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah		100	Persen									
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100	Persen									
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94	Persen									
			Persentase Kepatuhan Anggaran		100	Persen									
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA		95	Persen									
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		94	Persen									
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**		**100**	**Persen**	**121.863.100**	**110.109.100**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Laporan Perencanaan, Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal yang selesai tepat waktu**		**100**	**Persen**	**110.109.100**	**11.754.000**	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	84	Dokumen	121.863.100	110.109.100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84	Dokumen	110.109.100	11.754.000	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (FELISIFSI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**		**100**	**Persen**	**11.397.057.536**	**22.705.960.672**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**		**100**	**Persen**	**22.705.960.672**	**- 11.308.903.136**	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	45	Orang	11.327.586.736	22.655.173.472	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41	Orang	22.655.173.472	- 11.327.586.736	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	18	Laporan	69.470.800	50.787.200	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	Laporan	50.787.200	18.683.600	
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		87.11	Nilai	**2.690.672.022**	**2.553.899.392**	-		-	-	**2.553.899.392**	**136.772.630,00**	
			Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		88.75	Nilai			-		-	-			
			Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		88.38	Nilai			-		-	-			
			Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88.38	Nilai			-		-	-			
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**597.808.900**	**508.909.440**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**508.909.440**	**88.899.460**	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1	Paket	331.995.800	321.554.890	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	321.554.890	10.440.910	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMPTSP	1	Paket	88.993.300	82.526.770	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	82.526.770	6.466.530	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1	Paket	16.544.800	15.765.280	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	15.765.280	779.520	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	45	Laporan	160.275.000	89.062.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		136	Laporan	89.062.500	71.212.500	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota**	**Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**561.454.900**	**536.904.600**	**Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**536.904.600**	**24.550.300**	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	90	Unit	561.454.900	536.904.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		23	Unit	536.904.600	24.550.300	
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**Persen**	**1.046.271.589**	**1.046.271.589**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**Persen**	**1.046.271.589**	**-**	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	12	Laporan	9.906.029	9.906.029	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	9.906.029	-	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12	Laporan	1.036.365.560	1.036.365.560	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	1.036.365.560	-	
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**		**100**	**Persen**	**485.136.633**	**461.813.763**	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**		**100**	**Persen**	**461.813.763**	**23.322.870**	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	31	Unit	244.727.580	244.727.580	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		28	Unit	244.727.580	-	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	37	Unit	50.229.053	26.906.183	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37	Unit	26.906.183	23.322.870	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	1	Unit	190.180.000	190.180.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	190.180.000	-	
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi**		**100**	**Persen**	**512.042.800**	**434.357.550**	**Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi**		**100**	**Persen**	**434.357.550**	**77.685.250**	
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**		**2**	**Dokumen**	**175.321.000**	**145.857.650**	**Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**		**2**	**Dokumen**	**145.857.650**	**29.463.350**	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	1	Dokumen	99.780.000	99.516.800	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1	Dokumen	99.516.800	263.200	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	1	Dokumen	75.541.000	46.340.850	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		3	Dokumen	46.340.850	29.200.150	
	2.18.02.2.0	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi**		**100**	**Persen**	**336.721.800**	**288.499.900**	**Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi**		**100**	**Persen**	**288.499.900**	**48.221.900**	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1	Dokumen	136.759.800	89.128.500	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen	89.128.500	47.631.300	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	3	Dokumen	199.962.000	199.371.400	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		3	Dokumen	199.371.400	590.600	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi**		**1.940**	**Trilliun**	**230.153.089**	**205.568.429**	**Nilai Realisasi Investasi**		**1.999**	**Trilliun**	**205.568.429**	**24.584.660**	
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan**		**100**	**Persen**	**230.153.089**	**205.568.429**	**Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan**		**100**	**Persen**	**205.568.429**	**24.584.660**	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1	Dokumen	230.153.089	205.568.429	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1	Dokumen	205.568.429	24.584.660	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang tersedia Tepat Waktu**		**100**	**Persen**	**-**	**-**	**Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha**		**90**	**Persen**	**98.000.000,00**	**-**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Laporan Investasi yang tersedia tepat waktu**		**100**	**Persen**	**-**	**-**	**Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha**		**90**	**Persen**	**98.000.000,00**	**-**	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	-	Pelaku Usaha	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		200	Pelaku Usaha	98.000.000	-	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta di lakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	-	Kegiatan Usaha	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta di lakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		0	Kegiatan Usaha	-	-	Mamin di Umpeg

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	PAGU PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025 (EFISIESI INPRES 1/2025)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	LOKASI	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	SELISIH	KETERANGAN
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP**		**100**	**Persen**	**1.995.164.044**	**1.929.046.444**	**Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP**		**100**	**Persen**	**1.929.046.444**	**66.117.600**	
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan**		**100**	**Persen**	**1.995.164.044**	**1.929.046.444**	**Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan**		**100**	**Persen**	**1.929.046.444**	**66.117.600**	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	MPP KOTA BOGOR	41.400	Pelaku Usaha	1.995.164.044	1.929.046.444	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		7000	Pelaku Usaha	1.929.046.444	66.117.600	
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi**		**100**	**Persen**	**184.764.600**	**184.764.600**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi**		**100**	**Persen**	**184.764.600**	**-**	
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi**		**6**	**Dokumen**	**184.764.600**	**184.764.600**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi**		**6**	**Dokumen**	**184.764.600**	**-**	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	6	Dokumen	184.764.600	184.764.600	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		6	Dokumen	184.764.600	-	
TOTAL							**17.131.717.191**	**28.123.706.187**					**28.221.706.187**	**- 10.991.988.996**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2025, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun *Action Plan* yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian Sasaran Program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ini merupakan Dokumen Perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan- bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

Lampiran y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perubahan Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan perubahan Renja sangat di tentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2025 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Bapperida Kota Bogor Tahun 2025. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

7. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025

33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
35. Peraturan Walikota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;
36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ... Tahun ... Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Bapperida Kota Bogor tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bogor secara berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan bapperida tahun 2025.
2. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.
3. mengakomodir perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa perubahan target kinerja, pengurangan dan pergeseran aggaran kegiatan.

4. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA BOGOR

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor sebagai Badan Perencana dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan

serta sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan warga kota.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan semester satu, juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Bapperida Kota Bogor sampai dengan semester dua tahun 2025 sesuai dengan RPD Kota Bogor tahun 2025-2026.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Bapperida Kota Bogor

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2025-2026 Bapperida Kota Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
													I		II					
1	2				3	4	5			7			8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
							K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
	5	**01**			**PERENCANAAN**															
					PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**														
	5	01	01		**Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja**	**27,34**	**Nilai**	**20.245.560.000**	**27,25**	**Nilai**	**17.594.936.499**		**3.898.641.512**		**5.105.942.956**	**-**	**9.004.584.468**	**0,00**	51,18
						Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	**26,82**	**Nilai**		**26,55**	**Nilai**						**-**		**0,00**	
						Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	**13**	**Nilai**		**12,48**	**Nilai**						**-**		**0,00**	
						Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	**23,65**	**Nilai**		**23,60**	**Nilai**						**-**		**0,00**	
						Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**						**-**		**0,00**	

						lingkungan perangkat daerah														
						Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen		100	Persen						-		0,00	
						Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	Persen		94	Persen						-		0,00	
						Persentase kepatuhan penganggaran	100	Persen		100	Persen						-		0,00	
						Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	≥95	Persen		≥95	Persen						-		#VALUE!	
						Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persen		100	Persen						-		0,00	
						Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	77,27	Nilai		76,51	Nilai						-		0,00	
						Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	78,04	Nilai		77,27	Nilai						-		0,00	
						Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	97,93	Nilai		96,96	Nilai						-		0,00	
						Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	98,69	Nilai		97,72	Nilai						-		0,00	

		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**	**100**	**Persen**	**26.000.000**	**100**	**Persen**	**21.406.300**		**3.030.000**		**3.965.000**	**-**	**6.995.000**	**-**	**32,68**
			Persentase ketercapaiantarget indikator sasaran renjaperangkat daerah	**87,50**	**Persen**		**75**	**Persen**									
			Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**									
			Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	**≥95**	**Persen**		**≥95**	**Persen**									
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	21.000.000	9	Dokumen	14.406.800	2	-		1.800.000	2	1.800.000	22	12,49
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	5.000.000	25	Laporan	6.999.500	10	3.030.000	8	2.165.000	18	5.195.000	72	74,22
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**47,11**	**43,36**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**99**	**Persen**	**16.390.000.000**	**98**	**Persen**	**13.889.389.599**	-	**3.515.770.301**		**4.251.592.351**	-	**7.767.362.652**	-	55,92

		Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**		**-**				**-**			
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang/ Bulan	16.250.000.000	47	Orang/ Bulan	13.802.928.399	47	3.491.846.701		4.230.232.351	47	7.722.079.052	100	55,95
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	140.000.000	18	Laporan	86.461.200	4	23.923.600	5	21.360.000	9	45.283.600	50	52,37
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**75,00**	**54,16**
Predikat kinerja																**Sedang**	**Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**1.735.610.000**	**100**	**Persen**	**1.177.142.924**		**63.417.147**		**182.664.606**	**-**	**246.081.753**	**-**	**20,91**
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														

	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	1	Paket	10.037.500		-			-	-	-	-
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	140.000.000	1	Paket	334.157.700		-			-	-	-	-
	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	17.500.000	1	Paket	28.578.624		-	1	7.186.800	1	7.186.800	100	25,15
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	43.110.000	2	Paket	38.541.700	1	935.000	1	3.873.000	2	4.808.000	100	12,47
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	15.000.000	3	Paket	10.622.400	1	5.424.300	1	1.804.000	2	7.228.300	67	68,05
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.505.000.000	12	Laporan	755.205.000	3	57.057.847	3	169.800.806	6	226.858.653	50	30,04
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**52,78**	**22,62**
															Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD**	**100**	**Persen**	**90.000.000**	**100**	**Persen**	**649.061.700**	-	**0**		**191.352.000**	**-**	**191.352.000**	**-**	29,48

		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	90.000.000	1	Unit	43.549.000			1	42.500.000	1	42.500.000	100	97,59
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	30	Unit	605.512.700			4	148.852.000	4	148.852.000	13	24,58
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**56,67**	**61,09**
															Predikat kinerja	**Rendah**	**Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.150.000.000**	**100**	**Persen**	**1.176.788.743**		**300.780.924**		**165.285.732**	**-**	**466.066.656**	**-**	3,96
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	150.000.000	12	Laporan	160.385.952	3	32.943.612	3	33.417.132	6	66.360.744	50	41,38
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.000.000.000	12	Laporan	1.016.402.791	3	267.837.312	3	131.868.600	6	399.705.912	50	39,33
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**50,00**	**40,35**
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														

	5.01.01.2.09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik**	**100**	**Persen**	**853.950.000**	**95**	**Persen**	**681.147.233**	**-**	**15.643.140**	**-**	**311.083.267**	**-**	**326.726.407**	**-**	**47,97**
					SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32	Unit	266.800.000	32	Unit	281.311.149	6	11.318.140		52.661.450	6	63.979.590	19	22,74
	5.01.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181	Unit	87.150.000	181	Unit	144.732.084	11	4.325.000	35	4.345.000	46	8.670.000	25	5,99
	5.01.01.2.09.09				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	500.000.000	1	Unit	255.104.000			1	254.076.817	1	254.076.817	100	99,60
																		Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**48,05**	**42,78**
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
					PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**														
	5	**01**	**02**		**Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi**	**Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)**	**32,50**	**Rasio**	**2.525.000.000**	**30,00**	**Rasio**	**1.346.983.300**		**140.967.200**		**399.616.000**	**-**	**540.583.200**	**0,00**	

					Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan**	**100,00**	**Persen**		**100,00**	**Persen**						**-**		**0**	
						Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	**80,00**	**Persen**		**75,00**	**Persen**		**-**		**-**		**-**		**0,00**	
						Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	**38,00**	**Persen**		**37,50**	**Persen**		**-**		**-**		**-**		**0,00**	
					KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.02.2.01				**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi**	**100**	**Persen**	**1.550.000.000**	**100**	**Persen**	**1.198.021.900**		**140.967.200**		**399.616.000**	**-**	**540.583.200**	**-**	**45,12**
						Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	**3.250**	**Orang**		**3.050**	**Orang**		**1.209**		**250**		**1.459**		**48**	
					SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.02.2.01.03				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	150.000.000	2	Berita Acara	53.621.200	2	53.401.200	-		2	53.401.200	100	99,59

	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	200.000.000	1	Berita Acara	3.768.800	-		1	3.700.000	1	3.700.000	100	98,17
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	350.000.000	2	Berita Acara	388.052.700	-		2	379.536.000	2	379.536.000	100	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	850.000.000	3	Dokumen	752.579.200	-	87.566.000	-	16.380.000	-	103.946.000	-	
															Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)	**75,00**	**98,88**
															Predikat kinerja	**Sedang**	**Sangat Tinggi**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemrintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola**	**647**	**Data**	**300.000.000**	**647**	**Data**	**74.532.300**		**0**		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	4.000.000		-		-	-	-	-	-

			Pembangunan Daerah)														
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	250	Orang	200.000.000	250	Orang	70.532.300		-	86	-	86	-	34	-
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**17,20**	**-**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai**	**25**	**Indikator**	**675.000.000**	**24**	**Indikator**	**74.429.100**	-	**0**	-	**0**	-	-	-	-
			Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	**45**	**Program**		**44**	**Program**		-		-		-	-	-	
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	Kerja Sama	525.000.000	1	Kerja Sama	20.330.100	1	-	1	-	2	-	200	-

	5.01.02.2.03.03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	150.000.000	2	Laporan	54.099.000	1	-	1	-	2	-	100	-
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			**150,00**	**-**
Predikat kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**
	5	01	03		**PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**														
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**27,14**	**Point**	**790.000.000**	**26,88**	**Point**	**1.855.065.200**		**34.495.000**		**25.645.000**	**-**	**60.140.000**	**0,00**	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**26,47**	**Point**		**26,21**	**Point**					**-**		**0,00**	
						Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**83,87**	**Persen**		**80,60**	**Persen**					**-**		**0,00**	

						Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,62	Point		28,34	Point						-		0,00	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,75	Point		27,47	Point						-		0,00	
						Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	83,87	Persen		80,60	Persen						-		0,00	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,77	Point		28,48	Point						-		0,00	
						Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	26,80	Point		26,80	Point						-		0,00	

						Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	83,87	Persen		80,60	Persen					-		0,00	
					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN													
	5.01.03.2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	95,00	Persen	5.000.000	90,00	Persen	1.000.803.600	-	23.035.000		23.035.000	-	46.070.000	-	4,60
						Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	95,00	Persen		90,00	Persen					-		-	
						Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target	139	Indikator		133	Indikator					-		-	
					SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN													

	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	5.000.000	4	Dokumen	1.000.803.600	-	23.035.000		23.035.000	-	46.070.000	-	4,60
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**-**	**4,60**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point**	**100**	**Persen**	**190.000.000**	**100**	**Persen**	**132.581.700**		**3.820.000**		**-**	**-**	**3.820.000**	**-**	
			Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**						**-**		**-**	

						Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target	**44**	**Indikator**		**42**	**Indikator**					**-**		**-**	
					SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**													
	5.01.03.2.02.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	175.000.000	1	Dokumen	34.272.000	-	3.820.000	-	-	-	3.820.000	-	11,15
	5.01.03.2.02.02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	5.000.000	2	Laporan	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.01.03.2.02.03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9	Laporan	5.000.000	1	Laporan	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-

	5.01.03.2.02.04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	5.000.000	1	Laporan	92.909.700	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**-**	**2,79**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100**	**Program**	**595.000.000**	**100**	**Program**	**721.679.900**	**-**	**7.640.000**	**-**	**2.610.000**	**-**	**10.250.000**	**-**	**1,42**
			Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	**100**	**Indikator**		**100**	**Indikator**		**-**		**-**		**-**		**-**	
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan	**43**	**Program**		**42**	**Program**		**-**		**-**		**-**		**-**	

			Kewilayahan yang mencapai target.														
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	29.285.000	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	6,15
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2		5.000.000	2	Dokumen	2.700.000	-	-	-		-	-	-	-
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	5.000.000	2	Laporan	2.700.000	-	-	-		-	-	-	-

	5.01.03.2.03.05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	Dokumen	-	2	Dokumen	661.305.900	-	5.840.000	-	1.610.000	-	7.450.000	-	1,13
	5.01.03.2.03.08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	85.000.000	1	Laporan	25.689.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	3,89
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																			**-**	**2,23**
Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	5	**05**			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
					PROGRAM	**INDIKATOR PROGRAM**														
	5	**05**	**02**		**Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n**	**41,66**	**Persen**	**1.300.000.000**	**36,11**	**Persen**	**1.110.621.100**		**17.241.000**		**20.880.000**	**-**	**38.121.000**	**0,00**	3,43
						Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**									
						Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	**10**	**Persen**		**10**	**Persen**						**-**		**0,00**	

						Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	**50**	**Persen**		**30**	**Persen**					**-**		**0,00**	
					KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**										**-**			
	5.05.02.2.01				**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan**	**100**	**Persen**	**400.000.000**	**90**	**Persen**	**382.097.100**	**-**	**7.200.000**		**1.800.000**	**-**	**9.000.000**	**-**	**2**
					SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**													
	5.05.02.2.01.0001				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	Laporan		1	Laporan	60.285.800	-	-			-	-	-	-
	5.05.02.2.01.0004				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	Laporan		1	Laporan	205.891.600	-	-			-	-	-	-

	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	72.973.900	-	7.200.000			-	7.200.000	-	9,87
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	42.945.800	-	-		1.800.000	-	1.800.000	-	4,19
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**-**	**3,51**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklajuti jadi kebijakan**	**100**	**Persen**	**0**	**90**	**Persen**	**255.550.700**	-	**5.730.000**		**5.730.000**	-	**11.460.000**	-	**4,48**
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen		1	Dokumen	255.550.700	-	5.730.000		5.730.000	-	11.460.000	-	4,48
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																**-**	**4,48**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
		KEGIATAN	**INDIKATOR KEGIATAN**														

	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n**	**15**	**Perangkat Daerah**	**900.000.000**	**10**	**Perangkat Daerah**	**472.973.300**	-	**4.311.000**		**13.350.000**	-	**17.661.000**	-	3,73
			Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	**25**	**Persen**		**20**	**Persen**		-				-		-	
		SUB KEGIATAN	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**														
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	Laporan	800.000.000	3	Laporan	440.866.100	-	4.311.000		13.350.000	-	17.661.000	-	4,01
	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	32.107.200	-	-			-	-	-	-
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)																-	**2,00**
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
JUMLAH REALISASI									**21.907.606.099**		**4.091.344.712**		**5.552.083.956**		**9.643.428.668**		**44,02**

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor

Dari data tabel 2.1 di atas bahwa evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2025 sampai dengan semester satu tahun 2025, progress pencapaian target indikator program masih belum bisa terlihat karena sebagian besar kegiatan belum selesai pelaksanaannya dan hampir seluruh indikator program baru dapat diukur pada akhir tahun.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan realisasi anggaran Bapperida sampai dengan triwulan II atau semester 1 tahun 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bapperida Kota Bogor sampai dengan semester satu tahun 2025 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Bapperida Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	TARGET INDIKATOR SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN	REALISASI SEMESTER I
	SESUDAH PERUBAHAN	VOLUME	SATUAN				
PERENCANAAN							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,61	Nilai	17.706.634.299	17.594.936.499	111.697.800	9.004.584.468
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	27,61	Nilai				
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	13,81	Nilai				
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6	Nilai				
	Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di	100	Persen				

	lingkungan perangkat daerah						
	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen				
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100	Persen				
	Persentase kepatuhan penganggaran	100	Persen				
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	98,7	Persen				
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persen				
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	88,55	Nilai				
	Rata - rata NilaiSKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	91,26	Nilai				
	Rata - rata NilaSKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	96,96	Nilai				
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	97,72	Nilai				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	Persen	27.995.000	21.406.300	6.588.700	6.995.000
	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	75	Persen				
	Persentase Realisasi fisik kegiatan	100	Persen				

	dilingkup perangkat daerah						
	Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	**≥95**	**Persen**				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	17.825.000	14.406.800	3.418.200	1.800.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Laporan	10.170.000	6.999.500	3.170.500	5.195.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase**	**99**	**Persen**	**13.895.034.399**	**13.889.389.599**	**5.644.800**	**7.767.362.652**
	Realisasi Anggaran terhadap DPA	**100**	**Persen**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47	Orang / bulan	13.802.928.399	13.802.928.399	0	7.722.079.052
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	92.106.000	86.461.200	5.644.800	45.283.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**82.064.000**	0	**82.064.000**	**0**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	Orang /bulan	82.064.000	0	82.064.000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.628.915.824**	**1.177.142.924**	**451.772.900**	**246.081.753**

Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.037.500	10.037.500	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	352.047.000	334.157.700	17.889.300	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.578.624	28.578.624	0	7.186.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	42.083.700	38.541.700	3.542.000	4.808.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	12.144.000	10.622.400	1.521.600	7.228.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.184.025.000	755.205.000	428.820.000	226.858.653
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD**	**100**	**Persen**	**214.689.100**	**649.061.700**	**-434.372.600**	**191.352.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	61.943.200	43.549.000	18.394.200	42.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	Unit	152.745.900	605.512.700	-452.766.800	148.852.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**1.176.788.743**	**1.176.788.743**	**0**	**466.066.656**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	160.385.952	160.385.952	0	66.360.744

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.016.402.791	1.016.402.791	0	399.705.912
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**100**	**Persen**	**681.147.233**	**681.147.233**	**0**	**326.726.407**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit	281.311.149	281.311.149	0	63.979.590
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181	Unit	144.732.084	144.732.084	0	8.670.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	255.104.000	255.104.000	0	254.076.817
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)**	**58,96**	**Rasio**	**2.825.824.800**	**1.346.983.300**	**1.478.841.500**	**540.583.200**
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	**100**	**Persen**				
	Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	**75**	**Persen**				
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	**37,5**	**Persen**				
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan**	**100**	**Persen**	**2.544.034.400**	**1.198.021.900**	**1.346.012.500**	**540.583.200**

	RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi						
	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	**3050**	**Orang**				
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	255.900.000	53.621.200	202.278.800	53.401.200
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	300.000.000	3.768.800	296.231.200	3.700.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	746.725.400	388.052.700	358.672.700	379.536.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	1.241.409.000	752.579.200	488.829.800	103.946.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola**	**647**	**Data**	**193.438.600**	**74.532.300**	**118.906.300**	**0**
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	4.400.000	4.000.000	400.000	0
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Orang	189.038.600	70.532.300	118.506.300	0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai**	**24**	**Indikator**	**88.351.800**	**74.429.100**	**13.922.700**	**0**
	Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang	**44**	**Program**				

	didanai dari TJLSP/CSR						
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	Kerja Sama	29.726.800	20.330.100	9.396.700	0
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	58.625.000	54.099.000	4.526.000	0
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**26,88**	**Point**	**2.373.720.500**	**1.855.065.200**	**518.655.300**	**60.140.000**
	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**26,21**	**Point**				
	Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**80,6**	**Persen**				
	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	**28,34**	**Point**				
	Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	**27,47**	**Point**				

	Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	85,3	Persen				
	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48	Point				
	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	27,05	Point				
	Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	80,6	Persen				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	90	Persen	1.023.216.800	1.000.803.600	22.413.200	46.070.000
	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	90	Persen				

	minimal 24 point						
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target	**133**	**Indikator**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	4.000.000	0	4.000.000	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan	6.000.000	0	6.000.000	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	4.000.000	0	4.000.000	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1.001.216.800	1.000.803.600	413.200	46.070.000

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan	4.000.000	0	4.000.000	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	4.000.000	0	4.000.000	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point**	**100**	**Persen**	**184.383.900**	**132.581.700**	**51.802.200**	**3.820.000**
	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	**100**	**Persen**				
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target	**42**	**Indikator**				

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	75.284.200	34.272.000	41.012.200	3.820.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	4.050.000	2.700.000	1.350.000	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	4.050.000	2.700.000	1.350.000	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	100.999.700	92.909.700	8.090.000	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.**	**100**	**Program**	**1.166.119.800**	**721.679.900**	**444.439.900**	**10.250.000**
	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	**100**	**Indikator**				

	yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.						
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target.	**42**	**Program**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	397.519.900	29.285.000	368.234.900	1.800.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	4.050.000	2.700.000	1.350.000	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	4.050.000	2.700.000	1.350.000	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	713.539.900	661.305.900	52.234.000	7.450.000

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	46.960.000	25.689.000	21.271.000	1.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan	**Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n**	**36,11**	**Persen**	**1.436.435.600**	**1.110.621.100**	**325.814.500**	**38.121.000**
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	**100**	**Persen**				
	Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	**10**	**Persen**				
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	**30**	**Persen**				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan**	**90**	**Persen**	**605.273.600**	**382.097.100**	**223.176.500**	**9.000.000**
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	180.875.600	60.285.800	120.589.800	0

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	241.679.400	205.891.600	35.787.800	0
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	Laporan	122.427.000	72.973.900	49.453.100	7.200.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	60.291.600	42.945.800	17.345.800	1.800.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan**	**90**	**Persen**	**291.574.000**	**255.550.700**	**36.023.300**	**11.460.000**
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen	291.574.000	255.550.700	36.023.300	11.460.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n**	**10**	**Perangkat Daerah**	**539.588.000**	**472.973.300**	**66.614.700**	**17.661.000**
	Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	**20**	**Persen**				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	3	Laporan	499.304.000	440.866.100	58.437.900	17.661.000

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	40.284.000	32.107.200	8.176.800	0
JUMLAH				**24.342.615.199**	**21.907.606.099**	**2.435.009.100**	**9.643.428.668**

Table 2 Realisasi Keuangan Bapperida Kota Bogor sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa total pagu murni Bapperida Kota Bogor senilai Rp. 24.342.615.199,00 berkurang Rp. 2.435.009.100,00 sehingga total pagu perubahan menjadi Rp. 21.907.606.099,00.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan Bapperida adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bogor yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bogor didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Bogor

Semester I Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	CAPAIAN SD SEMESTER I TAHUN 2025	PREDIKAT
Terwujudnya Pelaksanaan Litbang Jirap, Invensi dan Inovasi yang Memperkuat Iptek Sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor	Termanfaatkannya hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	70	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
		Kategori Inovasi Daerah	Inovatif	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang holistik, sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	24,55	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
		Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	25,05	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi yang Terukur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bappeda Kota Bogor	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	AA	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100	-	Hasil pengukuran di akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	3,66	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	1	-	Hasil pengukuran di akhir tahun

Table 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Bogor

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Bapperida sampai dengan semester satu tahun 2025 tersebut di atas masih belum dapat diukur ketercapaiannya, begitu juga dengan indikator kinerja program yang masih belum dapat diukur ketercapaiannya, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Program Bapperida Kota Bogor

Semester I Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	36,11	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	-

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
	Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	10	-
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	30	-
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	58,96	-
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100	-
	Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	75	-
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	37,5	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88	-
	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21	-
	Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,6	-

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34	-
	Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47	-
	Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	85,3	-
	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48	-
	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	27,05	-
	Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	80,6	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,61	-
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	27,61	-
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	13,81	-

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	CAPAIAN S.D SEMESTER I 2025
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6	-
	Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	100	-
	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	-
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100	-
	Persentase kepatuhan penganggaran	100	-
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	98,7	-
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	-
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	88,55	-
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	91,26	-
	Rata - rata Nila SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	96,96	-
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	97,72	-

Table 4 Capaian Indikator Kinerja Program Bapperida Kota Bogor

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dari hasil evaluasi terdapat beberapa indikator tujuan, sasaran, dan program yang realisasinya pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah di tetapkan pada RPD 2025-2026, sehingga perubahan RKPD dan Renja tahun 2025 ini perlu adanya penyesuaian target kinerja IKU, IKK, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya reviu perubahan Renja Bapperida Kota Bogor tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2025				PERUBAHAN RENJA BAPPERIDA 2025			
1	2	3	4		5	6	7		8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,25	Nilai	17.706.634.299	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	27,61	Nilai	17.594.936.499
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,55	Nilai		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	27,61	Nilai	
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	12,48	Nilai		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	13,81	Nilai	
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6	Nilai		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	23,6	Nilai	
		Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	100	Persen		Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah	100	Persen	
		Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen		Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	Persen	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	Persen		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	100	Persen	
		Persentase kepatuhan penganggaran	100	Persen		Persentase kepatuhan penganggaran	100	Persen	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	≥95	Persen		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	98,7	Persen	

		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persen		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persen	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	76,51	Nilai		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	88,55	Nilai	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	77,27	Nilai		Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	91,26	Nilai	
		Rata - rata Nila SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	96,96	Nilai		Rata - rata Nila SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	96,96	Nilai	
		Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	97,72	Nilai		Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	97,72	Nilai	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	Persen	27.995.000	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	Persen	21.406.300
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	75	Persen		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	75	Persen	
		Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	100	Persen		Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	100	Persen	
		Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	≥95	Persen		Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah	≥95	Persen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	17.825.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	14.406.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	10.170.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Laporan	6.999.500

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase	99	Persen	13.895.034.399	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase	99	Persen	13.889.389.599
		Realisasi Anggaran terhadap DPA	100	Persen		Realisasi Anggaran terhadap DPA	100	Persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	Orang/bulan	13.802.928.399	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Orang/bulan	13.802.928.399
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	92.106.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	86.461.200
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	82.064.000	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Persen	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	Orang/bulan	82.064.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang/bulan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100	Persen	1.628.915.824	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100	Persen	1.177.142.924
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.037.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.037.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	352.047.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	334.157.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.578.624	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.578.624
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	42.083.700	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	38.541.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	12.144.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	10.622.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.184.025.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	755.205.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100	Persen	214.689.100	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100	Persen	649.061.700
Pengadaan Mebel	Bapperida	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	61.943.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	43.549.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	Unit	152.745.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	605.512.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.176.788.743	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	1.176.788.743
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	160.385.952	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	160.385.952

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.016.402.791	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.016.402.791
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100	Persen	681.147.233	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100	Persen	681.147.233
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit	281.311.149	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit	281.311.149
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181	Unit	144.732.084	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181	Unit	144.732.084
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	255.104.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	255.104.000,0
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)	30	Rasio	2.825.824.800	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)	58,96	Rasio	1.346.983.300
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100	Persen		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	100	Persen	
		Persentase Ketercapaian target	75	Persen		Persentase Ketercapaian target	75	Persen	

		sasaran perencanaan pembangunan daerah				sasaran perencanaan pembangunan daerah			
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	37,5	Persen		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP	37,5	Persen	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	100	Persen	2.544.034.400	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	100	Persen	1.198.021.900
		Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	3050	Orang		Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	3050	Orang	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	255.900.000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	53.621.200
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	300.000.000	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	3.768.800
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	746.725.400	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	388.052.700
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	1.241.409.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	752.579.200
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola	647	Data	193.438.600	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola	647	Data	74.532.300

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	4.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	4.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	Orang	189.038.600	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 250 perbaikan	Orang	70.532.300
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	24	Indikator	88.351.800	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	24	Indikator	74.429.100
		Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	44	Program		Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	44	Program	
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Bapperida	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	Kerja Sama	29.726.800	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	Kerja Sama	20.330.100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	58.625.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	Laporan	54.099.000
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88	Point	2.373.720.500	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,88	Point	1.855.065.200

		Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21	Point		Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,21	Point	
		Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,6	Persen		Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,6	Persen	
		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34	Point		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	28,34	Point	
		Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47	Point		Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA	27,47	Point	
		Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	80,6	Persen		Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA	85,3	Persen	
		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48	Point		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	28,48	Point	

		Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	26,8	Point		Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan	27,05	Point	
		Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	80,6	Persen		Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	80,6	Persen	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	90	Persen	1.023.216.800	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	90	Persen	1.000.803.600
		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	90	Persen		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	90	Persen	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target	133	Indikator		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target	133	Indikator	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	4.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	4.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1.001.216.800	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Dokumen	1.000.803.600

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan	4.000.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	4.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	100	Persen	184.383.900	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	100	Persen	132.581.700
		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	100	Persen		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point	100	Persen	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan	42	Indikator		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan	42	Indikator	

		SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target				SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	75.284.200	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	34.272.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	4.050.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	2.700.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Laporan	4.050.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	2.700.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	100.999.700	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	92.909.700

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.	100	Program	1.166.119.800	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.	100	Program	721.679.900
		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	100	Indikator		Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	100	Indikator	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target.	42	Program		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target.	42	Program	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	397.519.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	29.285.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	4.050.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	2.700.000

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	4.050.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Laporan	2.700.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	713.539.900	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	661.305.900
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	46.960.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	25.689.000
Program Penelitian dan Pengembangan	Bapperida	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	36,11	Persen	1.436.435.600	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n	36,11	Persen	1.110.621.100
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	Persen		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	Persen	
		Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	10	Persen		Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi	10	Persen	

		Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	30	Persen		Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah	30	Persen	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	90	Persen	605.273.600	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	90	Persen	382.097.100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	180.875.600	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	60.285.800
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	241.679.400	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	205.891.600
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bapperida	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	Laporan	122.427.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5	Laporan	72.973.900

Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	60.291.600	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	42.945.800
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	90	Persen	291.574.000	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan	90	Persen	255.550.700
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen	291.574.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen	255.550.700
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n	10	Perangkat Daerah	539.588.000	Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n	10	Perangkat Daerah	472.973.300
		Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	20	Persen		Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI	20	Persen	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	Laporan	499.304.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	Laporan	440.866.100
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	40.284.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	32.107.200
JUMLAH					24.342.615.199				21.907.606.099

Table 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2024

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program dan Kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program (1) Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja; (2) Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja; (3) Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja; (4) Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal; (5) Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah; (6) Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu; (7) Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan; (8) Persentase kepatuhan penganggaran; (9) Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA; (10) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (11) Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana; (12) Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM; (13) Rata - rata Nila SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan; (14) Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah :

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

      I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      II. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

I. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

IV. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

V. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

VI. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

I. Pengadaan Mebel.

II. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

II. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

III. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, dengan indikator kinerja program (1) Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk); (2) Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan; (3) Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah; (4) Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP. Adapun kegiatan dan Sub Kegiatannya adalah:

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

I. Pelaksanaan Konsultasi Publik.

II. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

III. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

IV. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

I. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

I. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

II. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja program (1) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia; (2) Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia; (3) Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; (4) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA; (5) Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA; (6) Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA; (7) Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan; (8) Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan; (9) Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Adapun kegiatan dan sub kegiatannya adalah :

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

   II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

   III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

IV. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

V. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

VI. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

IV. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

3) Koordinasi Perencaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

I. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

II. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

III. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

IV. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

V. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan indikator kinerja program (1) Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan; (3) Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi; (4) Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah, adapun kegiatannya adalah:

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

I. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

II. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

III. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

IV. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

I. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

I. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

II. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 3.1.

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Kota Bogor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**24.463.725.890,00**	**24.342.615.199,00**	**24.049.374.608,80**	**-414.351.281,20**							**25.279.560.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**24.463.725.890,00**	**24.342.615.199,00**	**24.049.374.608,80**	**-414.351.281,20**							**25.279.560.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**22.738.725.890,00**	**22.906.179.599,00**	**22.938.753.508,80**	**200.027.618,80**							**23.979.560.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA				100 100 12,48 23,60 26,55 27,25 87,11 88,75 94 95 96,96 97,72 Persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase Nilai Nilai	100 13,81 23,6 27,25 27,61 95 Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Persen	18.423.040.490,00	17.706.634.299,00	19.736.773.008,80	1.971.519.510,00							20.394.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah*				100 % 75 % 95 %	100 Persen 75 Persen 95 Persen	31.493.600,00	27.995.000,00	21.406.300,00	-10.087.300,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	19.985.800,00	17.825.000,00	14.406.800,00	-5.579.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	11.507.800,00	10.170.000,00	6.999.500,00	-4.508.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				100 % 98 %	100 Persen 99 Persen	14.123.017.907,00	13.895.034.399,00	14.642.686.972,00	519.669.065,00			-	- -	-		16.390.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	14.026.207.907,00	13.802.928.399,00	14.556.225.772,00	530.017.865,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	96.810.000,00	92.106.000,00	86.461.200,00	-10.348.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 Persen	149.999.826,00	82.064.000,00	0,00	-149.999.826,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	0 Orang	149.999.826,00	82.064.000,00	0,00	-149.999.826,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah*				100 %	100 Persen	1.392.425.738,00	1.628.915.824,00	925.142.924,00	-467.282.814,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		1.735.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.397.600,00	10.037.500,00	10.037.500,00	-1.360.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	124.888.800,00	352.047.000,00	82.157.700,00	-42.731.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.636.438,00	28.578.624,00	28.578.624,00	-8.057.814,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			17.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34.999.700,00	42.083.700,00	38.541.700,00	3.542.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			43.110.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.072.200,00	12.144.000,00	10.622.400,00	-4.449.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.169.431.000,00	1.184.025.000,00	755.205.000,00	-414.226.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			1.505.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD*				100 %	100 Persen	837.196.400,00	214.689.100,00	1.265.895.700,00	428.699.300,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	616.834.000,00	0,00	0,00	-616.834.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	616.834.000,00	616.834.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	61.943.200,00	61.943.200,00	43.549.000,00	-18.394.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	30 Unit	158.419.200,00	152.745.900,00	605.512.700,00	447.093.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 Persen	1.176.789.786,00	1.176.788.743,00	1.176.788.743,00	-1.043,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.386.995,00	160.385.952,00	160.385.952,00	-1.043,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.016.402.791,00	1.016.402.791,00	1.016.402.791,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik*				100 %	100 Persen	712.117.233,00	681.147.233,00	1.704.852.369,80	992.735.136,80			-	- -	Bapperida Kota Bogor		853.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	306.071.149,00	281.311.149,00	281.311.149,00	-24.760.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			266.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	150.942.084,00	144.732.084,00	144.732.084,00	-6.210.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			87.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	255.104.000,00	255.104.000,00	1.278.809.136,80	1.023.705.136,80	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari TJSLP Rasio Keterwakilan masyarakat dalam musrenbamg (Per 10000 penduduk) Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaa**				**10027,537.575 Persentase Rasio Persentase Persentase**	**10037,558,9675 Persentase Persentase Rasio Persentase Persentase**	**2.000.898.500,00**	**2.825.824.800,00**	**1.346.983.300,00**	**524.101.500,00**							**2.525.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n pembangunan daerah																	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik pada tahapan penyusunan RPJPD,RPD,RPJMD dan RKPD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan*				100 Persentase 3050 Orang	100 Persentase 6721 Orang	1.550.898.500,00	2.544.034.400,00	1.198.021.900,00	-352.876.600,00			-	- -	Masyarakat Kota Bogor		1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			sesuai regulasi																	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	149.999.800,00	255.900.000,00	53.621.200,00	-96.378.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	150.000.000,00	300.000.000,00	3.768.800,00	-146.231.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	399.842.700,00	746.725.400,00	388.052.700,00	-11.790.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	851.056.000,00	1.241.409.000,00	752.579.200,00	-98.476.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang dikelola*				647 Data	647 Data	200.000.000,00	193.438.600,00	74.532.300,00	-125.467.700,00			-	- -	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	54.166.400,00	4.400.000,00	4.000.000,00	-50.166.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				1 Orang	250 Orang	145.833.600,00	189.038.600,00	70.532.300,00	-75.301.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai*				24 Indikator 44 Program	24 Indikator 44 Program	250.000.000,00	88.351.800,00	74.429.100,00	-175.570.900,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		675.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dari TJLSP/CSR																	
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	150.000.000,00	29.726.800,00	20.330.100,00	-129.669.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	58.625.000,00	54.099.000,00	-45.901.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3,	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**26.21 26.88 26.8 27.47 28.34 28.48 80.6 nilai Persentase nilai nilai nilai nilai Persentase**	**26,21 26,88 80,6 Point Point Persen**	**2.314.786.900,00**	**2.373.720.500,00**	**1.854.997.200,00**	**-1.254.786.900,00**							**1.060.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai*				133 Indikator 90 Persentase	133 Indikator 90 Persentase	764.787.600,00	1.023.216.800,00	1.000.803.600,00	236.016.000,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point																	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	--			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	6.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	--			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	--			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	737.287.600,00	1.001.216.800,00	1.000.803.600,00	263.516.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai target*				100 % 42 Indikator	42 Indikator	237.999.500,00	184.383.900,00	137.743.700,00	-100.255.800,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang				1 Dokumen	1 Dokumen	124.999.800,00	75.284.200,00	39.434.000,00	-85.565.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)																	
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	--			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang				-	9 0	5.000.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	--			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perekonomian																	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	102.999.700,00	100.999.700,00	92.909.700,00	-10.090.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.*				100 % 42 Indikator	100 Persen 42 Indikator	1.311.999.800,00	1.166.119.800,00	716.449.900,00	-595.549.900,00			-	- -	Bapperida Kota Bogor		495.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunan				1 Dokumen	1 Dokumen	424.999.900,00	397.519.900,00	1.800.000,00	-423.199.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			nya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)																	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	799.999.900,00	713.539.900,00	671.975.900,00	-128.024.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	46.960.000,00	37.274.000,00	-39.726.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.725.000.000,00**	**1.436.435.600,00**	**1.110.621.100,00**	**-614.378.900,00**							**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n**				**100 10 30 36.11 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 10 30 36,11 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**1.725.000.000,00**	**1.436.435.600,00**	**1.110.621.100,00**	**-425.000.000,00**						**1.300.000.000,00**		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian*				90 %	90 Persen	775.000.000,00	605.273.600,00	382.097.100,00	-392.902.900,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peraturan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan																	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	180.875.600,00	60.285.800,00	-139.714.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	241.679.400,00	205.891.600,00	-94.108.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	122.427.000,00	72.973.900,00	-127.026.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	60.291.600,00	42.945.800,00	-32.054.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di tindak lanjuti menjadi kebijakan*				90 %	90 Persen	400.000.000,00	291.574.000,00	255.550.700,00	-144.449.300,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	291.574.000,00	255.550.700,00	-144.449.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n Persentase inovasi yang di fasilitasi HAKI*				10 Perangkat Daerah 20 %	10 Perangkat Daerah 20 Persen	550.000.000,00	539.588.000,00	472.973.300,00	-77.026.700,00			-	- -	Perangkat Daerah Kota Bogor		900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	499.304.000,00	440.866.100,00	-59.133.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.284.000,00	32.107.200,00	-17.892.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	JUMLAH								**24.463.725.890,00**	**24.342.615.199,00**	**24.049.374.608,80**	**508.225.273.942,90**							**25.279.560.000,00**	

Table 6 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapperida pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapperida dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders,* serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapperida Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan / pedoman kerja dari setiap perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Proses perumusan Renja PD didasarkan pada kebutuhan, penjabaran dari visi misi Walikota, aspirasi dari DPRD, penjaringan aspirasi (bottom up) melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan serta usulan aspirasi melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja PD yang merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana RKPD merupakan implementasi/turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpiilih. Selain itu Renja PD juga harus mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD. Dari hal tersebut telihat bahwa Renja PD merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional.

Produk Renja PD ditentukan dari Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan kepada Perangkat Daerah tersebut. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Bogor. Renja BKPSDM harus disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dijadikan dasar dalam peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sehingga program dan kegiatan yang bersifat operasional dapat dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bogor.

Penyusunan dokumen Renja BKPSDM Kota Bogor Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun penyusunan dokumen Renja Perubahan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025 berdasarkan perubahan anggaran, target kinerja dan capaian kinerja melalui Forum Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh BAPPERIDA Kota Bogor.

B. Landasan Hukum

Di dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat Nomor
    9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah

Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021);
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 179 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor;
27. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026;
28. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomjor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kota Bogor Tahun 2025;
30. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-BKAD/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor

Nomor 900.1.2/Kep.100-Bkad/2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 53. Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.12.1/Kep.134-Bkad/2025 Tentang Pengalihan Dan Penggunaan Anggaran Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renja Perubahan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja BKPSDM di Tahun 2025 yang ada perubahan berupa kegiatan yang berasal dari penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Tujuan yang hendak dicapai adalah tersusunnya dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 berupa rencana kinerja 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I	berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja Perubahan PD, landasan hukum penyusunan Renja Perubahan PD, maksud dan tujuan disusunnya Renja PD dan sistematika penulisan penyusunan Renja Perubahan PD;

BAB II	berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, yang terdiri atas uraian evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisa kinerja pelayanan PD, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta revieuw terhadap rancangan awal RKPD-P dan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat;
BAB III	berisi uraian yang menjelaskan tujuan, sasaran PD yaitu uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD dan penjelasan mengenai Program dan Kegiatan;
BAB IV	berisi rencana kerja perubahan dan pendanaan perangkat daerah;
BAB V	berisi uraian penutup yang menguraikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun masalah ketersedian anggaran yang tidak sesuai kebutuhan, uraian kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut Renja perubahan BKPSDM tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2023 dan perkiraan capaian rencana strategis Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2024, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Renstra BKPSDM di tahun 2023 dan 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan pemasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Renja BKPSDM tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Sesuai dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diamanatkan di dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terjadi perubahan nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pada tahun 2025 indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026.

Terdapat 3 Program pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan dari BKPSDM kota Bogor. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana

kerja dan pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja program dengan hasil sebagai berikut :

a. Target Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah adalah A dan realisasi pencapaian Kinerja A. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan.

   Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini adalah :

   i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen renstra dan dokumen renja.

   ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen- dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen LPPD, LKPJ, LKIP. Selain itu diselesaikan juga pelaksanaan Resertifikasi ISO 9001:2015, pembuatan kajian pelayanan kepegawaian pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan SPAK (Survey Persepsi Anti Korupsi).

b. Target Indikator Kinerja Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN adalah 100 % dan realisasi pencapaian sebesar 100% ASN di BKPSDM dapat terpenuhi gaji dan tunjangannya. Hal ini terlaksana dari hasil pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan.

   Adapun pelaksanaan sub kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini adalah :

   i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Ouput dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama tahun 2025 untuk seluruh Pegawai BKPSDM.

ii. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Semester dan Tahunan Perangkat Daerah.

c. Target persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi tersebut dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

Adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan yang masuk dalam dua kegiatan tersebut adalah :

i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, alat tulis, amplop, dan sebagainya yang terpenuhi selama 1 tahun.

ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik kantor seperti, air minum, gas elpiji dan bahan bakar minyak kendaraan operasional dinas selama periode 1 tahun.

iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan barang cetakan berupa blangko dinas, blangko SK, map dinas, spanduk, banner selama 1 tahun.

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan

kebutuhan perjalanan dinas luar daerah pegawai BKPSDM serta PNS Pemerintah Kota Bogor yang ditugaskan untuk mengikuti diklat, workshop atau sosialisasi. Selain itu juga pemenuhan kebutuhan

makan minum untuk rapat, workshop, sosialisasi serta kebutuhan paket meeting fullday, fullboard pengembangan kompetensi.

v. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output dari Sub Kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan tagihan listrik, air PDAM, telpon, surat kabar dan langganan akses internet selama 1 tahun.

vi. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan tenaga kebersihan, keamanan, supir dan administrasi kantor selama 1 tahun.

d. Target dari Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur ditetapkan 100% dengan tingkat realisasi kinerja 100%. Hal ini terlaksana dari pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di kantor selama 1 (satu) tahun. Adapun pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tersebut dihasilkan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun output dari sub kegiatan yang masuk pada dua kegiatan tersebut adalah :

i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output dari sub kegiatan ini adalah pengadaan peralatan dan mesin penunjang sarana prasarana kantor. Pengadaan tersebut berupa pembelian CCTV, Whiteboard, projector, vacum cleaner, Komputer, Printer dan Scanner.

ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin dari kendaran mobil dinas serta

pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat yang menjadi inventaris BKPSDM.

iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dari inventaris kantor yang sudah ada seperti pemeliharaan alat alat komputer, Penyejuk ruangan (AC) serta penyedian pengharum ruangan.

iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ouput dari sub kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dari bangunan kantor agar dapat terpelihara dengan baik dan menunjang aktivitas pelayanan kepegawaian.

2. <u>Program Kepegawaian Daerah</u>

Pelaksanaan program Kepegawaian Daerah ini memiliki 3 indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut :

a. Target kinerja Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini terlaksana dari pelayanan administrasi, data dan informasi kepegawaian untuk aparatur pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Hasil output dari sub kegiatan tersebut adalah :

i. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Output dari sub kegiatan ini adalah kegiatan berupa kegiatan Pengadaan ASN dalam hal ini seleksi PPPK Formasi 2025 sebanyak

440 Formasi, Pengambilan sumpah janji PNS Seleksi

2024, Penyusunan dokumen rencana kebutuhan pegawai.

ii. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemberkasan pensiun untuk 319 pegawai.

iii. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan HUT Korpri ke- 54 Tahun 2025 dengan rangkaian acara berupa tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dreded, Upacara HUT Korpri di Balaikota Bogor dan Jalan Sehat bagi ASN.

iv. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pemprosesan berkas administrasi pegawai seperti Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Konversi NIP, Usulan Cuti dan Pendampingan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang tidak sehat jasmani dan/atau rohani. Hasil dari pemeriksaan kesehatan ini menjadi dasar rekomendasi untuk pegawai yang sedang sakit apakah dapat diberikan cuti sakit atau pensiun dini.

v. Pengelolaan Data Kepegawaian

Output dari sub kegiatan ini adalah pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dari penyiapan data kepegawaian, penyiapan aplikasi kepegawaian, pemeliharaan server dan penambahan inovasi aplikasi kepegawaian. Untuk Pelayanan Administrasi kepegawaian Pencetakan ID Card 880 buah, Usulan perubahan tunjangan keluarga 1044 orang, Proses cuti PNS 5528

orang, usulan konversi NIP 8 Orang, dan Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit bekelanjutan, tidak cakap jasmani dan/atau rohani 12 Orang.

b. Target kinerja Persentase Penempatan Aparatur yang Sesuai dengan Syarat Jabatan pada tahun 2025 sebesar 80%, jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta sebanyak 35 Jabatan, Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu sebanyak 850 SK dan Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah sebanyak 90%. Realisasi dari kinerja ini dilaksanakan dari pelaksanaan penempatan aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan serta aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan dari pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Adapun output sub kegiatan dari pelaksanaan dua kegiatan tersebut adalah :

i. Pengelolaan Mutasi ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah penempatan aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan dan kompetensi dasarnya dengan melaksanakan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Eselon yaitu Jabatan Sekretaris Daerah, Jabatan setingkat Administor dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Kota Bogor.

ii. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemberkasan kenaikan pangkat untuk 850 pegawai, pemberkasan kenaikan gaji berkala pelaksanaan ujian dinas persentase pelaksanaan sebesar 90%.

iii. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi dari proses

administrasi pendidikan lanjutan pegawai dan pemberian bantuan/bea siswa untuk pegawai yang melaksanakan ijin belajar ataupun tugas belajar. Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment sebanyak 50% dan Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan sebanyak 90%.

c. Target kinerja Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin pada tahun 2025 sebesar 0,05% dengan target 8000 orang pegawai dan realisasi pelaksanaan sebesar 100 %. Realisasi dari kinerja ini didapatkan dari pelaksanaan pembinaan disiplin, evaluasi kinerja dan pelaporan LHKPN dari pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Adapun output dari sub kegiatan tersebut adalah :

i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bagi 37 Perangkat Daerah, dimana dilihat kesesuaian antara SKP dengan kinerja harian tiap pegawai.

ii. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Output dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi pengajuan penghargaan Satya Lencana ke Kementrian Dalam Negeri sebanyak 400 pegawai.

iii. Pembinaan Disiplin ASN

Output dari sub kegiatan ini adalah pemprosesan 2 (dua) pelanggaran disiplin pegawai, monitoring kehadiran masuk kerja melalui aplikasi Simpeg Mobile, dan fasilitasi pelaporan LHKPN untuk 134 pegawai yang termasuk wajib LHKPN. Selain itu juga tersusunnya dokumen Kajian Penegakan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut memiliki dua target kinerja yaitu :

Target kinerja Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2025 sebesar 76,6%. Realisasi dari kinerja ini dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan ouput dari sub kegiatannya adalah :

i. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

   Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan berbagai diklat teknis dan fungsional untuk 200 aparatur, diantaranya diklat kepamongprajaan, diklat calon kepala sekolah, Pelatihan dan Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa serta diklat lainnya.

ii. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

   Output dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan berbagai pengembangan kompetensi untuk pegawai seperti talent pool dan uji kompetensi pegawai.

1. Faktor Penghambat :

a. Kebutuhan personil di BKPSDM yang dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja belum memadai dan seimbang.
b. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk malaksanakan pengembangan kompetensi ke seluruh ASN

membuat peningkatan profesionalitas ASN Kota Bogor terhambat.

Melihat analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja Program dan Kegiatan secara umum dapat dikatakan berjalan sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam meminimalisir hambatan agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2. Analisis Perbandingan Capaian Pencapaian kinerja BKPSDM Kota Bogor

Didasarkan oleh target dari indikator sasaran strategis yang ingin dicapai sehingga dapat menunjang pencapaian visi misi Kepala Daerah pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Target kinerja tahun 2025 yang ingin dicapai tersebut telah dijabarkan di dalam dokumen RPJMD 2025-2029, dimana terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai. Perubahan tersebut disebabkan karena kondisi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah.

Perubahan sasaran strategis yang baru tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pencapaian dari sasaran strategis yang lama agar sesuai dengan standar nasional dan regulasi terbaru. Sehingga target-target yang ingin dicapai di dalam indikator sasaran strategis yang baru dapat dihitung sesuai regulasi yang ada. Perbandingan antara capaian kinerja BKPSDM Kota Bogor yang sesuai dengan Renstra Kota Bogor Tahun 2025 - 2029. dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran			Satuan	Realisasi			Capaian Kinerja (%)
	2019-2024	2025-2029	2019-2024	2024-2029			2023	2024	2025	
1	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai,	point	344	344	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran			Satuan	Realisasi			Capaian Kinerja (%)
	2019-2024	2025-2029	2019-2024	2024-2029			2023	2024	2025	
	kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi		Penghargaan		Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan					
			Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian		Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan					
			Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan		Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian					
			Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat					
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup BKPSDM Kota Bogor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat		3,89	3,84	N/A	N/A
			Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup BKPSDM Kota Bogor							
			Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup BKPSDM Kota Bogor							
3		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) lingkup perangkat daerah	Berdasarkan PermenPANRB No. 88 Thn 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		86,85	88,65	89,40	N/A

B. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan yang dibutuhkan telah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan perangkat daerah tersebut. Selain itu dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masa yang akan datang akan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini sesuai denga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran target sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut dan hasil analisis standar kebutuhan Pelayanan.

Adapun untuk rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Bogor

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Evaluasi
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	1	1	1	1	2	2	20	22	20	47	Tercapai
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91,84	92	94,12	92,5	94,4	93	95,39	95,59	85,47	96	153,3	Tercapai
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	68	75	52,72	77,5	69	80	51,50	82,50	35,31	85	36,68	Tidak tercapai
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	35	34	35	34	35	35	35	35	31	Tidak tercapai
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	157	150	150	150	150	150	150	150	142	Tidak tercapai
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3651	3710	3483	3720	4015	3730	4723	3740	5583	Tercapai
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	101,53	103,73	103,73	105,16	115,73	105,42	132,78	58,00	58,83	58,00	60,34	Tercapai
8	Rasio pegawai	persen	9,52	10,43	10,43	11,96	11,56	24,20	21,16	25,07	21,16	25,96	22,98	Tidak

	Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan													tercapai
9	Rasiopegawai fungsional bersetifikat kompetensi (%) PNS tdk trmsuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	57,76	100	57,76	100	56,28	Tidak tercapai

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Dari hasil kajian evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya serta capaian kinerja rencana strategis perangkat daerah.

Isu-isu strategis yang dapat diambil dari hasil evaluasi rencana kerja dan rencana strategis tahun sebelumnya adalah :

1. Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak ASN diterima menjadi pegawai sampai mereka mengakhiri masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugas secara profesional.
2. Mengembangkan manajemen kinerja untuk memastikan masing- masing pegawai dapat mencapai target yang telah diturunkan dari visi, misi dan tujuan instansi.
3. Menyusun kebijakan penggajian, penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin sehingga menjadi reward and punishment yang efektif dalam mendorong kinerja serta membentuk budaya kerja yang lebih produktif.
4. Peningkatan kapasitas untuk para calon pemimpin dengan membangun sistem talent pool yang berkesinambungan
5. Mengatasi kesenjangan jumlah ASN dengan jumlah formasi berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja akibat pensiun, alih tugas ke daerah lain maupun jumlah ketersediaan formasi CPNS baru.
6. Peningkatan kompetensi ASN berupa pelaksanaan kegiatan Diklat, Workshop dan Tugas Belajar untuk mendukung profesionalitas ASN

7. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi ASN berupa Teknologi Informasi maupun gedung diklat

Menyikapi berbagai permasalahan pelayanan Kepegawaian di atas, harus disikapi juga perubahan regulasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi yang berisi penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang salah satu tujuan dari regulasi ini adalah menyamakan kode dan nomenklatur dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat digunakan oleh semua Pemerintah Daerah.

Kaitannya dengan tugas pokok BKPSDM adalah regulasi ini membagi urusan BKPSDM menjadi dua yaitu urusan Kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga BKPSDM Kota Bogor sebagai unsur Penunjang Pemerintah memiliki 3 (tiga) Program yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari pembagian dua urusan ini, menjadikan adanya revisi terhadap perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi dari BKPSDM pada Kota Bogor pada tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Hal lain yang harus disikapi adalah kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dengan dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional agar terwujud birokrasi yang agile,

efetif dan efisien. Regulasi yang secara umum memangkas jumlah struktural yang beralih menjadi fungsional, yang akan berimbas kepada pola karir ASN, pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas aparatur dan hal lain yang menyangkut layanan kepegawaian.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, terdapat peluang yang bisa didapatkan diantaranya adalah :

1. Aturan-aturan kepegawaian di dalam penyederhanaan birokrasi sudah banyak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sehingga tujuan menjadikan ASN yang profesional lebih terstruktur dan berkelanjutan.
2. Prosedur pelayanan di kepegawaian yang sudah banyak dibantu oleh Teknologi Informasi sehingga pelayanan bisa dapat lebih ditingkatkan.
3. Besarnya atensi dari setiap aparatur untuk meningkatkan kompetensi SDM teknis, fungsional maupun manajerial.
4. Adanya komitmen dari stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan diimbangi dengan menigkatnya disiplin dan kinerja ASN.

Dari kendala dan peluang yang didapatkan di atas, dapat ditentukan kebijakan umum dari BKPSDM Kota Bogor untuk dijadikan rencana kerja tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Implementasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ditinjau dari kebijakan Pola Karir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administasi dan Jabatan Fungsional serta Pelaksana
2. Pengembangan kompetensi ASN untuk menyiapkan aparatur sesuai talenta yang dimiliki.
3. Pemberian reward dan punnishment untuk ASN, pembinaan disiplin serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat memanfaatkan teknologi informasi.
5. Peningkatan sarana prasarana BKPSDM Kota Bogor serta peningkatan kompetensi aparatur yang melayani administrasi kepegawaian.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA

Review terhadap rancangan awal Rencana Strategis (Rentra) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program atau kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadp rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Review terhadap Perubahan RENSTRA Kota Bogor Tahun 2025 pada BKPSDM Kota Bogor disajikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Perubahan RENSTRA tahun 2025 Kota Bogor

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	114	Poin	1.150.627.380	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	114	Poin	518.207.980	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi	95	%	498.876.000	Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi	95	%	22.938.000	
			Jumlah Formasi ASN yang diterima	440	Formasi		Jumlah Formasi ASN yang diterima	440	Formasi		
			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	95	%	651.751.380	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	95	%	495.269.980	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Penyusunan Formasi ASN, Penyelenggaraan Penerimaan CASN, Pelaksanaan Usul NIP bagi ASN, Pelaksanaan Sumpah janji CPNS	2	Dokumen	498.876.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Formasi ASN, Penyelenggaraan Penerimaan CASN, Pelaksanaan Usul NIP bagi ASN, Pelaksanaan Sumpah janji CPNS	2	Dokumen	22.938.000	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Peremajaan Data Pensiun, Pengusulan ASN yang Pensiun dan Penerbitan SK Pensiun ASN, Pelaksanaan Purna Bakti	319	Orang	53.740.000	Jumlah Dokumen Peremajaan Data Pensiun, Pengusulan ASN yang Pensiun dan Penerbitan SK Pensiun ASN, Pelaksanaan Purna Bakti	319	Orang	29.502.000	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Fasilitasi rangkaian kegiatan Hari HUT KORPRI	1	Lembaga	299.716.000	Jumlah Laporan Fasilitasi rangkaian kegiatan Hari HUT KORPRI	1	Lembaga	171.062.600	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	266.863.380	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	264.469.380	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian	12	Dokumen	31.432.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian	12	Dokumen	30.236.000	
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	165	Poin	233.857.785	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	165	Poin	215.745.785	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja dan Disiplin	30,06	Poin			30.06	Poin		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya	80	%	134.541.785	Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya	80	%	150.825.785	
			Jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta	35	Jabatan		Jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta	35	Jabatan		
			Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu	850	SK	99.316.000	Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu	850	SK	64.920.000	
			Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	90	%		Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	90	%		
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Laporan	134.541.785	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Laporan	150.825.785	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Peremajaan Data Usul Kenaikan Pangkat, Pembuatan Usul Kenaikan pangkat, Penerbitan SK Kenaikan Pangkat, Pelaksanaan Ujian Dinas, dan Pendampingan dan verifikasi usul kenaikan pangkat	6	Dokumen	99.316.000	Jumlah Dokumen Peremajaan Data Usul Kenaikan Pangkat, Pembuatan Usul Kenaikan pangkat, Penerbitan SK Kenaikan Pangkat, Pelaksanaan Ujian Dinas, dan Pendampingan dan verifikasi usul kenaikan pangkat	6	Dokumen	64.920.000	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	44	Poin	617.254.800	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	44	Poin	414.850.400	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	21,52	Poin			21,52	Poin		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment	50	%	350.000.000	Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment	50	%	197.871.200	
			Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan	90	%	267.254.800	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan	90	%	216.979.200	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	350.000.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	Dokumen	197.871.200	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65	Orang	267.254.800	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65	Orang	216.979.200	
4	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	165	Poin	205.310.000	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	165	Poin	141.160.000	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja dan Disiplin	30,06	Poin			30.06	Poin		
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi	95	%	78.276.000	Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi	95	%	36.100.000	
			Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun	319	Orang	49.326.000	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun	319	Orang	41.520.000	
			Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin	0,05	%	77.708.000	Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin	0,05	%	63.540.000	
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dokumen	78.276.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dokumen	36.100.000	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400	Orang	49.326.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400	Orang	41.520.000	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8000	Pegawai	77.708.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8000	Pegawai	63.540.000	
5.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	88	Poin (A)	113.413.700	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	88	Poin (A)	89.415.000	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah	25,5	Poin	113.413.700	a) Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah	25,5	Poin	89.415.000	
			b) Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah	26,6	Poin		b) Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah	26,6	Poin		
			c) Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah	12,9	Poin		c) Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah	12,9	Poin		
			d) Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah	23	Poin		d) Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah	23	Poin		
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda di Lingkup Perangkat Daerah	100	%		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda di Lingkup Perangkat Daerah	100	%		
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi>100)	1	Inovasi		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi>100)	1	Inovasi		

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Trasnparansi pengelolaan keuangan daerah	94	%		Trasnparansi pengelolaan keuangan daerah	94	%		
			Kepatuhan Pengelolaan Anggaran	95	%		Kepatuhan Pengelolaan Anggaran	95	%		
	5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.905.200	
	5.03.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	109.413.700	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	86.509.800	
6	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	88	Poin (A)	17.578.619.574	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	88	Poin (A)	15.918.776.090	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100	%	17.578.619.574	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100	%	15.918.776.090	
			Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%		Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%		
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang	17.502.299.574	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	Orang	15.843.106.090	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	1	Laporan	76.320.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	1	Laporan	75.670.000	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semesteran SKPD	an SKPD				an SKPD				
7	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	1.581.174.874	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	1.113.846.058	
			Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	1.581.174.874	Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	1.113.846.058	
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100	%	1.581.174.874	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100	%	1.113.846.058	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1	Paket	367.319.000	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1	Paket	107.437.200	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas, Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor	3	Paket	81.341.100	Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas, Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor	3	Paket	81.338.700	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM	1	Paket	73.469.100	Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM	1	Paket	62.581.100	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin rapat, tamu, seminar pelatihan sosialisasi. Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin, Penyelenggaraan Rapat, Sosialisasi (Fullday, Fullboard)	12	Laporan	1.059.045.674	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin rapat, tamu, seminar pelatihan sosialisasi. Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin, Penyelenggaraan Rapat, Sosialisasi (Fullday, Fullboard)	12	Laporan	862.489.058	
8	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	498.772.500	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	1.041.877.000	
			Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	498.772.500	Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	1.041.877.000	
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	498.772.500	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.041.877.000	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel kantor	1	Unit	106.545.900	Terlaksananya Pengadaan Mebel kantor	1	Unit	65.091.200	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Inventaris Kantor (Alat Pembersih, Alat Rumah Tangga Lainnya, Personal Komputer, Alat Studio)	38	Unit	392.226.600	Terlaksananya Pengadaan Inventaris Kantor (Alat Pembersih, Alat Rumah Tangga Lainnya, Personal Komputer, Alat Studio)	38	Unit	976.785.800	
9	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	764.066.450	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	794.066.450	
			Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	764.066.450	Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	794.066.450	
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	764.066.450	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	794.066.450	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone	12	Laporan	333.331.066	Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone	12	Laporan	363.331.066	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	12	Laporan	430.735.384	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	12	Laporan	430.735.384	
10	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	539.423.377	Survey kepuasan masyarakat di lingkup perangkat daerah	3,55	Poin	654.146.077	
			Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	539.423.377	Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	3,3	Poin	654.146.077	
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan	3,55	Poin		
			Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	3,8	Poin		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	539.423.377	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	654.146.077	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas	6	Unit	173.396.354	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas	6	Unit	173.396.354	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	163	Unit	161.225.423	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	163	Unit	161.225.423	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor	1	Unit	204.801.600	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor	1	Unit	319.524.300	
11	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	38	Poin	1.482.138.800	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	38	Poin	1.215.372.800	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Kompetensi	32,18	Poin			32,18	Poin		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	76,6	%	1.482.138.800	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	76,6	%	1.215.372.800	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	30.600.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	20.400.000	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	Orang	1.451.538.800	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	Orang	1.194.972.800	
12	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	38	Poin	2.648.194.600	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	38	Poin	1.499.820.800	
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Kompetensi	32,18	Poin			32,18	Poin		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	1,3	%	2.648.194.600	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	1,3	%	1.499.820.800	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025				PERUBAHAN 2025				KET
			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN APBD 2025	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2025	
				VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	16.200.000	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	13.500.000	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	2.631.994.600	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Laporan	1.486.320.800	
						27.412.853.840				23.617.284.440	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepegawaian di BKPSDM Kota Bogor menjadi lebih baik, maka program dan kegiatan yang ada harus selaras dengan program nasional di Kementrian PAN-RB, Badan Kepegawaian Nasonal maupun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Visi Kementrian PAN-RB adalah mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Misi Kementrian PAN-RB adalah :

1. Mengembangkan Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Membangun SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
3. Menciptakan Pemerintahan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi

Tugas Kementrian PAN-RB adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sasaran Kementrian PAN-RB adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
3. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas
5. Terwujudnya aparatur Kementrian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi

Sedangkan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, memiliki Visi BKN dalam Renstra 2020-2024, yaitu: "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik koprupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara..

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap

pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN,
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKN. Tujuan BKN dalam Renstra 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan

3. prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
5. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
6. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Permerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Untuk Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, menetapkan Visi berupa “Terwujudnya Aparatur yang Baik dan Sejahtera”. Penjabaran dari ‘Baik dan Sejahtera” adalah Bermutu, Akuntabel, Inovatif, Kreatif dan Sejahtera. Penjabaran dari Visi tersebut adalah :

1. Bermutu, memiliki kualitas yang memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditentukan
2. Akuntabel, dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah/kegiatan yang telah dilaksanakan
3. Inovatif, memiliki sifat memperkenalkan/menampilkan sesuatu pembaharuan (kreasi baru)

4. Kreatif, memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan seusatu yang bermanfaat.
5. Sejahtera, memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun bathin/jiwa.

Sedangkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang ingin dicapai dari Visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisne pegawai
2. Mewujudkan modernisasi sistem kepegawaian
3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.

Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian PAN-RB, BKN dan BKD Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Bogor, berikut ini dapat ditarik beberapa hal yang menjadi faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM Kota Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dengan aparatur yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas baik dengan aparatur yang inovatif dan kreatif yang harus diimbangi dengan kesejateraan aparatur.
3. Manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien disertai peningkatan sarana prasarana ASN agar tercipta aparatur yang kompeten dan kompetitif.

B. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Mencermati berbagai Visi Misi dari Kementrian PANRB, BKN maupun BKD Provinsi Jawa Barat, dapat diambil kesamaan persepsi yaitu keinginan mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten, profesional, inovatif dan berorientasi pelayanan prima serta aparatur yang sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Misi kedua untuk Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas dengan menetapkan Tujuan dari Misi Kedua yaitu Terwujudnya Pemerintah Yang Cerdas dan Melayani (Smart Government) sehingga diharapkan akan tercapai sasaran dari tujuan tersebut yaitu terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang ditandai dengan Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi di akhir tahun 2024 di katagori Nilai A.

Sejalan dengan tujuan dari Misi Kedua Walikota Bogor tersebut, maka BKPSDM Kota Bogor yang memiliki urusan/kewenangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026. Yaitu

1. Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi yang ditandai dengan pencapaian Indeks Sistem Merit.
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah yang ditandai dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah.

Dengan sasaran kinerja **Meningkatnya Profesionalitas ASN.** Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu membangun aparatur sipil negara yang profesional yang dapat diukur dari Kualifikasi Aparatur, Kompetensi, Kinerja (target dan pencapaian) dan Disiplin Pegawai.

Berikut ini tabel 3.1 keselarasan antara tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Bogor beserta indikator kinerja :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...								
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					2020	2021	2022		2023		2024		2025
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Awal	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal
Tujuan 1 : Meningkatnya profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84	85	86	55	87	57	88	60	87
	Terpenuhinya aparatur sesuai kebutuhan organisasi	Terciptanya manajemen ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Persentase kesesuaian aparatur dengan kebutuhan (%)	Indeks Sistem Merit	87%	89%	91%	300	93%	336	95%	336	383,5
			Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi		87%	89%	91%		93%		95%		
	Terlaksanany a pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase aparatur yang terlayani administrasi kepegawaian		100%	100%	100%		100%		100%		
	Meningkatny a inovasi aparatur yang berkelanjuta n		Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan		35%	40%	45%		50%		55%		
	Meningkatny a akuntabilitas	Meningkatn ya Kualitas Tatakelola	IKA (Indeks Kepuasan Aparatur)	Indeks Reformasi Birokrasi	3.35	3.4	3.4	81	3.45	82	3.5	86,79	97,30

	kinerja dan	Pemerintah an	Nilai AKIP	Lingkup	85%	86%	87%		88%		89%		88

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...								
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					2020	2021	2022		2023		2024		2025
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Awal	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal
	pelayanan Badan	yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan tersebut harus selalu berkesinambungan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Untuk itu, agar menjamin kesinambungan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor pada tahun-tahun mendatang sebagai upaya pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan, BKPSDM Kota Bogor mengusulkan Rencana Kerja Tahun 2025 sejumlah 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan total kebutuhan dana atau pagu indikatif awal yang direncanakan sebesar Rp. 27.412.853.840,- (dua puluh milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 23.617.284.440,- (dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat empat ratus empat puluh rupiah).

Secara umum rincian program, kegiatan dan pagu indikatif BKPSDM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 21.075.470.475,- (dua puluh satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.612.126.675.- (sembilan belas milyar enam ratus dua belas juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 1.150.627.380,- (satu milyar seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.289.964.165,- (satu milyar dua ratus delapan puluh

sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah).

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang semula senilai Rp. 4.130.333.400,- (empat milyar seratus tiga puluh juta juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.715.193.600,- (dua milyar tujuh ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2025

dapat dilhat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Awal	Pagu Perubahan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**			**27.412.853.840**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A point	**21.075.470.475**	
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,55 point		
5	**3**	**1**	**2:01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	**113.413.700**	**89.415.000**
5	3	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000	2.905.200
5	3	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	109.413.700	86.509.800
5	**3**	**1**	**2:02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100%	**17.578.619.574**	**15.918.776.090**
5	3	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ bulan	17.502.299.574	15.843.106.090

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Awal	Pagu Perubahan
5	3	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	76.320.000	75.670.000
5	**3**	**1**	**2:06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	**1.581.174.874**	**1.113.846.058**
5	3	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	367.319.000	107.437.200
5	3	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	81.341.100	81.338.700
5	3	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	73.469.100	62.581.100
5	3	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.059.045.674	862.489.058
5	**3**	**1**	**2:07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	**498.772.500**	**1.041.877.000**
5	3	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	106.545.900	65.091.200
5	3	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	392.226.600	976.785.800
5	**3**	**1**	**2:08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	**764.066.450**	**794.066.450**
5	3	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	333.331.066	363.331.066
5	3	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.735.384	430.735.384
5	**3**	**1**	**2:09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	**539.423.377**	**654.146.077**
5	3	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	173.396.354	173.396.354
5	3	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	163 Unit	161.225.423	161.225.423

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Awal	Pagu Perubahan
						Dipelihara			
5	3	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	204.801.600	319.524.300
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	114 Point	**2.207.049.965**	**1.289.964.165**
						Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi	44 Point		
						Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	170 Point		
5	**3**	**2**	**2:01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	114 point	**1.150.627.380**	**518.207.980**
5	3	2	2:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	498.876.000	22.938.000
5	3	2	2:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	53.740.000	29.502.000
5	3	2	2:01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	299.716.000	171.062.600
5	3	2	2:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	266.863.380	264.469.380
5	3	2	2:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	31.432.000	30.236.000
5	**3**	**2**	**2:02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi	60 Point	**233.857.785**	**215.745.785**
5	3	2	2:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	134.541.785	150.825.785
5	3	2	2:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	99.316.000	64.920.000
5	**3**	**2**	**2:03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi ASN	56,5 point	**617.254.800**	**414.850.400**
5	3	2	2:03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	350.000.000	197.871.200
5	3	2	2:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	267.254.800	216.979.200

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Awal	Pagu Perubahan
5	**3**	**2**	**2:04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	110 point	**205.310.000**	**141.160.000**
5	3	2	2:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	78.276.000	36.100.000
5	3	2	2:04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 Orang	49.326.000	41.520.000
5	3	2	2:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8000 Orang	77.708.000	63.540.000
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**4.130.333.400**	**2.715.193.600**
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	30,5 point	**4.130.333.400**	**2.715.193.600**
5	**4**	**2**	**2:01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan dan Evaluasi Diklat	10,5 point	**1.482.138.800**	**1.215.372.800**
5	4	2	2:01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	30.600.000	20.400.000
5	4	2	2:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	1.451.538.800	1.194.972.800
5	**4**	**2**	**2:02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat	20 point	**2.648.194.600**	**1.499.820.800**
5	4	2	2:02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	1 Dokumen	16.200.000	13.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Awal	Pagu Perubahan
5	4	2	2:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2.631.994.600	1.486.320.800
TOTAL								**27.412.853.840**	**23.617.284.440**

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja perubahan, program, kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaan anggaran BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025, Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana dan Perubahan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Sumber Dana	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**									
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah		A (88) point	**23.517.952.684**			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A point	**39.033.401.953**
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah		3,89 point				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	3,55 point	

												Lingkup Perangkat Daerah		
5	**3**	**1**	**2:01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan		100 %	**145.000.000**			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	**150,000,000**
5	3	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	2 Dokumen	5.000.000		APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000
5	3	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	6 Laporan	140.000.000		APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	145,000,000
5	3	1	2:02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan		100%	**18.068.460.000**			Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan	100 %	**18.068.460.000**
5	3	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	95 Orang/ bulan	18.000.000.000		APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ bulan	18,000,000,000

5	3	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	68,460,000			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	**3.360.420.447**
5	3	1	2:06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor		100 %	**3.054.927.679**		APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Paket	194.153.696
5	3	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Bogor	1 Paket	176.503.360		APBD	Terpenuhiny a Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas, Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor	1 Paket	95.396.037
5	3	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas, Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor	Kota Bogor	3 Paket	86.723.670			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100 %	**3.360.420.447**
5	3	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM	Kota Bogor	1 Paket	102.040.950		APBD	Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko Dinas dan Publikasi BKPSDM	1 Paket	112.245.045
5	3	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin rapat, tamu, seminar pelatihan sosialisasi. Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin, Penyelenggaraan Rapat, Sosialisasi (Fullday, Fullboard)	Kota Bogor	12 Laporan	2.689.659.699		APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Mamin rapat, tamu, seminar pelatihan sosialisasi. Terpenuhinya Kebutuhan Perjadin, Penyelenggar	12 Laporan	2.958.625.669

												aa n Rapat, Sosialisasi (Fullday, Fullboard)		
5	3	1	2:07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	**1.041.640.831**			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100 %	**16.145.804.914**
5	3	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel kantor	Kota Bogor	1 Unit	116.325.000		APBD	Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone	1 Unit	127.957.500
5	3	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Inventaris Kantor (Alat Pembersih, Alat Rumah Tangga Lainnya, Personal Komputer, Alat Studio)	Kota Bogor	38 Unit	725.315.831		APBD	Terpenuhinya Kebutuh an Tenaga Kebersih an, Keamana n dan Administ rasi Kantor	38 Unit	1.017.847.414
5	3	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	1 Unit	200.000.000			Terlaksanan ya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	15.000.000.000
5	3	1	2:08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor		100 %	**747.741.174**			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100 %	**822.515.292**

5	3	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone	Kota Bogor	12 Laporan	277.809.092			Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone	12 Laporan	305.590.001
5	3	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	Kota Bogor	12 Laporan	469.932.082			Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Administrasi Kantor	12 Laporan	516.925.291
5	3	1	2:09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	**460.183.000**			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**486.201.300**
5	3	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas	Kota Bogor	6 Unit	202.653.000		APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas	6 Unit	222.918.300
5	3	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	Kota Bogor	163 Unit	57.530.000		APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor	163 Unit	63.283.000
5	3	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor	Kota Bogor	1 Unit	200.000.000		APBD	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Kantor	1 Unit	200,000,000
5	3	2			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem		114 Point	**1.565.000.000**			Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan	112 Point	**1.610.000.000**

						Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.						Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.		
						Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan		170 Point	280.000.000			Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	44 Point	300.000.000
						Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian		56,5 Point	900.000.000			Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	157,5 Point	1.330.000.000
5	3	2	2:01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi	Kota Bogor	95%	**1.565.000.000**		APBD	Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi	95%	**1,610,000,000**
												Jumlah Formasi ASN yang diterima	440 Formasi	
												Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	95%	
						Jumlah Formasi ASN yang diterima	Kota Bogor	440 Formasi						
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Kota Bogor	95%						

5	3	2	2:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Seleksi CPNS dan PPPK, Terlaksananya Penetapan Formasi, Terlaksananya Sumpah Janji CPNS dan PPPK	Kota Bogor	2 Dokumen	700.000.000		APBD	Terlaksananya Seleksi CPNS dan PPPK, Terlaksananya Penetapan Formasi, Terlaksananya Sumpah Janji CPNS dan PPPK	2 Dokumen	700.000.000
5	3	2	2:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang Pensiun	Kota Bogor	319 Orang	175.000.000		APBD	Jumlah ASN yang Pensiun	1 Dokumen	200,000,000
5	3	2	2:01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri	Kota Bogor	1 Lembaga	300.000.000		APBD	Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri	1 Lembaga	320,000,000
5	3	2	2:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bogor	12 Dokumen	350.000.000		APBD	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	350,000,000
						Jumlah Fitur Aplikasi yang terbangun pada SIMPEG		1 Aplikasi				Jumlah Fitur Aplikasi yang terbangun pada SIMPEG	1 Aplikasi	
5	3	2	2:01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Bogor	12 Dokumen	40.000.000	lkllll	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	40,000,000
						Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani		12 orang				Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani	12 orang	
						Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak		12 orang				Terlaksananya Tes Kesehatan	12 orang	

						Cakap Jasmani dan Rohani						PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani		
5	3	2	2:02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya	Kota Bogor	80%	**600.000.000**			Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya	80%	**650,000,000**
						Jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta		35 Jabatan				Jumlah Pengisian Jabatan ASN berdasarkan Manajemen Talenta	35 Jabatan	
						Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu		850 SK				Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu	850 SK	
						Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah		90%				Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	90%	
5	3	2	2:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Bogor	4 Dokumen	400.000.000		APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	4 Dokumen	400,000,000

												Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
5	3	2	2:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bogor	6 Dokumen	200.000.000		APBD	Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment	50%	**1.330,000,000**
5	3	2	2:03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment	Kota Bogor	50%	900.000.000			Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan	90%	
						Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan		90%			APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	700,000,000
5	3	2	2:03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Bogor	1 Dokumen	280.000.000		APBD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	700,000,000
5	3	2	2:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Bogor	65 Orang	620.000.000		APBD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	65 Orang	630,000,000
5	3	2	2:04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi	Kota Bogor	95%	**280.000.000**		APBD	Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi	95%	**300,000,000**
						Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun		319 Orang				Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun		

						Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin		0,05%				Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin	0,05%	
						Persentase wajib lapor LHKPN di LIngkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor		100%				Persentase wajib lapor LHKPN di LIngkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	100%	
5	3	2	2:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bogor	5 Dokumen	100.000.000		APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	100,000,000
5	3	2	2:04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Bogor	400 Orang	80.000.000		APBD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 Orang	100,000,00 0
5	3	2	2:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Bogor	8.000 Orang	100.000.000		APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8000 Pegawai	100,000,00 0
5	4				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5.667.372.645**			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		**5.582.887.00 0**
5	4	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat		43 point	**5.667.372.645**			Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggar aa n dan Evaluasi	43 point	**5.582.887.00 0**

												Diklat		
5	4	2	2:01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya		76.60%	**2.292.132.000**			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	76,60%	**2.576.142.000**
5	4	2	2:01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	40.000.000		APBD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000
5	4	2	2:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Bogor	200 Orang	2.252.132.000		APBD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	2.252.132.000

					Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5	4	2	2:02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Indeks Sistem Merit Aspek Penyelenggaraan Diklat		23,5 point	**3.375.240.645**			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	1,30%	**3.006.745.000**
5	4	2	2:02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	40.000.000		APBD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Se rt a Jabatan Fungsional	1 Dokumen	40,000,000

												yang Disusun		
5	4	2	2:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Bogor	1 Laporan	3.335.240.645		APBD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2.956.745.000
					TOTAL				**31.930.325.329**					**47.856.288.953**

BAB V PENUTUP

Sebagai upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun maka Dokumen Renja BKPSDM Kota Bogor ini disusun sebagai implementasi operasional pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bogor yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bogor. Dokumen Perubahan Renja ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM tahun 2025 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM tahun 2025 yang menjadi acuan dan arahan operasional kegiatan di lingkup BKPSDM Kota Bogor Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan BKPSDM tahun 2025 ini memuat indikator, tolak ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja serta jumlah anggaran tahun 2025 dan dapat dijadikan dasar pengukuran dan mengevaluasi kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus Laporan Kinerja Keuangan BKPSDM tahun 2025. Sehingga dengan tersusunnya Renja Perubahan BKPSDM tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisiten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum khususnya ASN di Pemerintah Kota Bogor.

Lampiran aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perubahan BKAD Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan telah ditetapkannya RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah **“Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”**, sedangkan untuk RKPD Perubahan Tahun 2025 mengusung tema **“Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”.** Selanjutnya Rencana Kerja BKAD Tahun 2025 ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan BKAD Kota Bogor Tahun 2025 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BKAD Kota Bogor Tahun 2025 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bogor Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

20) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP. JP) Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

23) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);

25) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 180 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 180);
27) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
28) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
29) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKAD Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2025-2026 Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BKAD Kota Bogor memiliki 3 program yang sampai dengan triwulan II tahun 2025 memiliki target sebesar Rp18.576.815.088 dengan realisasi sebesar Rp16.856.032.602 atau 90,74% dari target triwulan II. Sedangkan, jika dibandingkan dengan keseluruhan pagu sebelum perubahan yang sebesar Rp83.022.164.350 maka realisasi sampai dengan triwulan II baru mencapai 20,30%. Rendahnya nilai realisasi tersebut disebabkan karena kegiatan yang dijadwalkan untuk direalisasikan di triwulan III dan IV lebih banyak dibandingkan dengan triwulan I dan II sehingga beberapa kegiatan pada dasarnya memang belum dilaksanakan yang menyebabkan realisasi anggaran sampai triwulan II masih terhitung rendah. Berikut adalah tabel capaian target dan realisasi penyelenggaraan rencana kerja BKAD Kota Bogor sampai dengan triwulan II tahun 2025.

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN III			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Anggaran (%)
1	2	3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
	5 02	KEUANGAN				83.022.164.350			7.093.576.836			9.762.455.766									16.856.032.602	%	20,30
	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.398.416.783			4.288.682.716			4.469.655.956									8.758.338.672	%	37,43
			1. Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup BKAD	26,2	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%
			2. Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup BKAD	27,1	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%
			3. Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup BKAD	12,4	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%
			4. Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup BKAD	21,7	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%
			5. Persentase Kepatuhan Penganggaran	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							6. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	85,97	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							7. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu	100	%		100	%		100	%								-	%		-	%	
							8. Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup BKAD	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							9. Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							10. Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							11. Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	90	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
							12. Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	90	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
							13. Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	90	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
							14. Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	90	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
	5	02	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan				230.795.900			-			-									-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	87.4	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
							2. Persentase Standarisasi Mutu BKAD	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							3. Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di Lingkup BKAD	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							4. Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup BKAD	95	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				230.795.900			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		-	Dokumen			Dokumen								-	Dokumen		-	%	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan		-	Laporan			Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4	Dokumen		-	Dokumen			Dokumen								-	Dokumen		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.147.891.677			3.062.688.133			3.718.041.642									6.780.729.775		%	39,54
							1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
							2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%		100	%		100	%								200	%		25,00	%	
							3. Persentase kepatuhan laporan barang pengguna	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.075.738.877			3.045.018.133			3.700.371.642									6.745.389.775			39,50
							Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang Perbulan		48	Orang Perbulan		49	Orang Perbulan								97	Orang		197,96	%	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen								6	Dokumen		50,00	%	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0	Laporan		0	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				72.152.800			17.670.000			17.670.000									35.340.000			48,98

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
											I			II			III			IV							
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00 %	
	5	02	01	2.03		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-			-			-									-		-
							1. Persentase tingkat kepatuhan perizinan Bangunan	100	%		0	%		0	%								-	%		- %	
							2. Persentase tingkat kepatuhan pensertipikatan tanah	100	%		0	%		0	%								-	%		- %	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-			-			-									-		-
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen								1	Dokumen		50,00 %	
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-			-			-									-		-
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen								-	Dokumen		- %	
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-			-			-									-		-
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00 %	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-			-			-									-		-
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		- %	
	5	02	01	2.05		Kegiatan: Administrasi				-			-			-									-		-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
						Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase terlaksananya perencanaan pegawai, pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, dan pengendalian pegawai	100	%		0	%		0	%								-	%		-	%	
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen								-	Dokumen		-	%	
	5	02	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.124.818.465			256.537.226			432.277.628									688.814.854			32,42
							1. Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%		0	%		0	%								100	%		25,00	%	
							2. Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Nilai		0	Nilai		0	Nilai								-	Nilai		-	%	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.490.330			8.310.144			8.310.144									16.620.288			85,27
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		-	Paket		-	Paket								-	Paket		-	%	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.628.100			1.000.000			181.429.500									182.429.500			91,38
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		-	Paket		1	Paket								1	Paket		100,00	%	
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga				253.957.335			42.198.180			63.253.017									105.451.197			41,52

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV								
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		-	Paket		1	Paket								1	Paket		100,00	%	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				120.842.000			70.193.500			1.040.000									71.233.500			58,95
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		-	Paket		1	Paket								1	Paket		100,00	%	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13.946.400			3.257.260			868.140									4.125.400			29,58
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen								6	Dokumen		50,00	%	
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				566.572.300			61.719.000			57.840.200									119.559.200			21,10
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950.382.000			69.859.142			119.536.627									189.395.769			19,93
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen								-	Dokumen		-	%	
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-			-			-									-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen								-	Dokumen		-	%	
	5	02	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.082.501.816			594.247.500			-									594.247.500		%	54,90
							1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							2. Persentase kepatuhan penggunaan Barang Milik Daerah	100	%		0	%		0	%								0	%		25,00	%	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				437.451.116			-			-									-			-
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit		-	Unit		-	Unit								-	Unit		-	%	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				645.050.700			594.247.500			-									594.247.500			92,12
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit		1	Unit		2	Unit								3	Unit		50,00	%	
	5	02	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				882.657.236			279.643.298			183.172.476									462.815.774		%	52,43
							1. Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%		0	%			%								0	%		-	%	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.075.572			83.117.586			31.851.480									114.969.066			61,79
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.581.664			196.525.712			151.320.996									347.846.708			49,94

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.929.751.689			95.566.559			136.164.210									231.730.769		%	12,01
							1. Persentase BMD lingkup perangkat daerah yang terpelihara	100	%		-	%		-	%								-	%		-	%	
							2. Persentase Kepatuhan penghapusan BMD	100	%		-	%		-	%								-	%		25,00	%	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				288.033.752			40.921.109			64.829.910									105.751.019			36,71
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit		6	Unit		6	Unit								12	Unit		200,00	%	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				346.135.937			54.645.450			71.334.300									125.979.750			36,40
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	Unit		13	Unit		13	Unit								26	Unit		50,00	%	
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.295.582.000			-			-									-			-
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		-	Unit		1	Unit								1	Unit		100,00	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				50.008.191.167			1.465.232.000			2.957.572.587								4.422.804.587		%	8,84
							1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							2. Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							3. Transparansi Perencanaan Penganggaran	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							4. Transparansi Pelaksanaan APBD	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							5. Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	93	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
	5	02	02	2.01		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				775.375.000			18.319.500			214.554.670								232.874.170		%	30,03
							1. Persentase kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							2. Persentase kesesuaian program KUA PPAS dan APBD	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							3. Persentase pengalokasian kepatuhan anggaran belanja bidang pendidikan, infrastruktur, belanja pegawai, dan anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan keterntuan peraturan perundang-undangan	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV								
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							4. Persentase transparansi ringkasan kebijakan umum anggaran, ringkasan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, ringkasan dokumen RAPBD, perda APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, ringkasan dokumen Rancangan Perubahan APBD, perkada perubahan APBD, dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				164.440.500			-			149.420.000									149.420.000			90,87
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen									-	Dokumen		-	%	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				7.220.500			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen									1	Dokumen		50,00	%	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				116.488.400			-			61.493.470									61.493.470			52,79
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen		-	Dokumen			Dokumen									-	Dokumen		-	%	
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				52.810.000			-			-									-			-
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen									1	Dokumen		100,00	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				164.719.800			14.679.500			-								14.679.500				8,91
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	Dokumen		1	Dokumen		-	Dokumen									1	Dokumen		33,33	%	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				180.505.800			3.640.000			3.641.200								7.281.200				4,03
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	9	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen									2	Dokumen		22,22	%	
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				89.190.000			-			-								-				-
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	205	Orang		-	Orang		-	Orang									-	Orang		-	%	
	5	02	02	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				263.944.800			49.250.000			52.350.000								101.600.000			%	38,49
							1. Persentase skor rata-rata indikator dimensi penyerapan anggaran	93	%		0	%		0	%									0	%		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							2. Persentase Transparansi SK Wali Kota tentang pejabat pengelola keuangan daerah dan laporan arus kas	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen								6	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan		-	Laporan			Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen								6	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen								6	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				-			-			-									-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen									6	Dokumen		50,00	%	
	5	02	02	02.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				-			-			-										-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen									1	Dokumen		50,00	%	
	5	02	02	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				-			-			-										-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				-			-			-									-			-
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen								1	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				-			-			-									-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen									6	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				-			-			-										-			-
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen									1	Dokumen		50,00	%	
	5	0 2	0 2	02. 02	00 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				263.944.800			49.250.000			52.350.000									101.600.000			38,49
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang		-	Orang		-	Orang									-	Orang		-	%	
	5	0 2	0 2	2.0 3		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				465.398.400			189.102.500			61.578.500									250.681.000			53,86
							1. Persentase Penandatanganan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli	100	%		0	%		0	%									0	%		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							2. Persentase penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							3. Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
							4. Persentase transparansi realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor, dan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kots Bogor, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100	%		0	%		0	%								0	%		-	%	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran				206.851.200			48.450.000			48.450.000								96.900.000			46,85
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				223.744.000			140.652.500			2.252.500								142.905.000			63,87
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan		7	Laporan		-	Laporan								7	Laporan		100,00	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			34.803.200			-			10.876.000									10.876.000				31,25
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen									-	Dokumen		-	%	
	5	02	02	2.04		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				48.503.472.967			1.208.560.000			2.629.089.417									3.837.649.417				7,91
							1. Persentase realisasi anggaran kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap APBD	50	%		-	%		-	%									0	%		-	%	
							2. Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi daerah	100	%		-	%		-	%									0	%		-	%	
	5	02	02	2.04	0002	Analisis investasi Pemerintah Daerah				350.400.000			-			116.800.000									116.800.000				33,33
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	6	Laporan		-	Laporan		2	Laporan									2	Laporan		33,33	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				7.065.099.082			7.560.000			2.505.623.417									2.513.183.417			35,57
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Laporan		-	Laporan		1	Laporan								1	Laporan		50,00	%	
	5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	3	Laporan		-	Laporan		1	Laporan								1	Laporan		33,33	%	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1.665.750.000			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				39.422.223.885			1.201.000.000			6.666.000									1.207.666.000			3,06
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan								2	Laporan		200,00	%	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan		3	Laporan		5	Laporan								8	Laporan		66,67	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				9.615.556.400			1.339.662.120			2.335.227.223								3.674.889.343		%	38,22
							1. Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan	7	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							2. Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah	24	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							3. Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	67	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							4. Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	100	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
	5	02	03	2.01		Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah				9.615.556.400			1.339.662.120			2.335.227.223								3.674.889.343		%	38,22
							1. Persentase tersusunnya RKBMD tepat waktu	100	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							2. Persentase tersusunnya laporan BMD semester dan tahunan tepat	100	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							3. Persentase Pengamanan Aset melalui Pengasuransian atas bangunan dan kendaraan	100	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
							4. Persentase Pengamanan Aset melalui Pensertipikatan Tanah	24	%		-	%		-	%								0	%		-	%	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga				518.157.800			51.330.000			-								51.330.000			9,91
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	7	Dokumen		3	Dokumen		-	Dokumen								3	Dokumen		42,86	%	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				-			-			-								-			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV									
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen		-	Dokumen		1	Dokumen								1	Dokumen		50,00	%	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				467.574.400			116.465.000			33.750.000									150.215.000			32,13
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				7.757.680.800			1.126.367.120			2.214.783.523									3.341.150.643			43,07
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen								-	Dokumen		-	%	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah				217.799.400			45.500.000			20.150.000									65.650.000			30,14
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	8	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				321.124.000			-			66.543.700									66.543.700			20,72
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
											I			II			III			IV								
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Anggaran (%)
1	2					3	4	7			8			9			10			11			12=8+9=10+11			13=12/7x100		
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	Laporan		3	Laporan		3	Laporan								6	Laporan		50,00	%	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				-			-			-									-			-
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan		-	Laporan		-	Laporan								-	Laporan		-	%	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				333.220.000			-			-									-			-
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52	Orang		-	Orang		-	Orang								-	Orang		-	%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025 (hingga TW II)	Tahun 2026	
1	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi ≥70)	1 Inovasi	1 Inovasi	-		
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	91,65%	91,70%	-		
3	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	87,4	87,90	-		
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100%	100%	-		
5	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	99,30	99,40	-		
6	Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,561	12,3	8,561		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan yang menjadi kekurangan pada Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran adalah 1.Perlu meningkatkan Kesesuaian Program RPJMD - RKPD, Jumlah Program 187, tidak sesuai 187 2. Perlu meningkatkan Kesesuaian program RKPD dengan KUA PPAS, Jumlah Program 190 yang tidak sesuai 134 3. Perlu meningkatkan Kesesuaian pagu KUA PPAS dengan APBD, jumlah program 183 yang tidak sesuai 72
7	Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	2,037	3,7	2,037		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan yang menjadi kekurangan pada Dimensi Kondisi Keuangan Daerah adalah Nilai yang Rendah pada Indeks Fleksibilitas Keuangan, Indeks Solvabilitas Jangka Pendek, Indeks Solvabilitas Jangka Panjang, dan Indeks Solvabilitas Layanan
8	Dimensi Opini BPK atas LKPD	15	15	15		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan untuk Dimensi Opini BPK atas LKPD telah mencapai nilai maksimal karena Opini BPK atas LKPD yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut telah mendapatkan Opini WTP
9	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	14,828	19,83	14,828		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan yang menjadi kekurangan pada Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah Nilai Skor Alokasi Belanja Infrastruktur 0 dan Terdapat 1 jenis pelayanan dasar SPM dengan pagu 0 yaitu Pelayanan informasi rawan bencana

10	Dimensi Penyerapan Anggaran	15	15	15		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan yang menjadi kekurangan pada Dimensi Penyerapan Anggaran adalah Penyerapan Belanja Tidak Terduga di tahun 2024 hanya sebesar 6,3% tidak mencapai 80%
11	Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	13,708	9,3	13,708		Berdasarkan hasil evaluasi IPKD dalam acara desk evaluasi IPKD TA 2024 diinformasikan yang menjadi kekurangan pada Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah terdapat 5 dokumen yang tidak memenuhi ketepatan waktu dan keteraksesan, yaitu 1. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD 2. Informasi CaLK Pemerintah Daerah 3. Informasi Ringkasan DPA SKPD 4. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
12	Rata-rata Persentase Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah	56%	62,25%	-		

Adapun beberapa faktor pendorong yang mendukung keberhasilan capaian target BKAD Kota Bogor serta beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan misi BKAD Kota Bogor. Faktor-faktor berikut adalah

1. Faktor Pendorong
   a) Digitalisasi beberapa penyelenggaraan kegiatan, seperti pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD/RKAP-SKPD dan DPA-SKPD/DPPPA-SKPD, juga

pencairan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan secara *online* menggunakan sistem informasi e-office BKAD.

b) Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas

c) Sarana dan prasarana yang mendukung

2. Kendala

a) Perubahan peraturan dan kebijakan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

b) Kuantitas pegawai yang kurang dari nilai ideal

c) Kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan yang dapat turut menghambat capaian target dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bogor

d) Kurangnya pemahaman terkait bagaimana indikator penilaian dilakukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKAD Kota Bogor didukung oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan juga diberikan kewenangan penuh dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, BKAD Kota Bogor juga memiliki sistem IT yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun demikian masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi, yaitu:

- Ketepatwaktuan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Kurangnya kuantitas dan perlu ditingkatkan lagi kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah. Ada kalanya hal ini menyebabkan terjadi kesalahan dan atau keterlambatan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Serta Kementerian Lembaga yang berlokasi di Kota Bogor sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota;

- Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor atas beberapa barang milik daerah masih lemah.

Apabila dievaluasi lebih jauh, permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena:

a. Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
b. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
c. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi masih rendah;
d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah;
e. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
f. Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Bogor.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target Indikator kinerja berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja BKAD Kota Bogor pada masa mendatang, tantangan yang akan dihadapi BKAD adalah

1. Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan terhadap pelayanan baru dilakukan 1 kali dalam setahun;
3. Adanya kendala pada sistem aplikasi sehingga memungkinkan perangkat daerah terlambat dalam penyusunan dokumen anggaran, laporan keuangan dan laporan BMD;
4. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat;

5. BMD masih dalam proses inventarisasi sehingga pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, penjualan dan pemusnahan BMD tidak berjalan secara optimal.

Sedangkan peluang bagi BKAD Kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya adalah

1. Melaksanakan tahapan penyusunan dokumen anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan amanat perundang-undangan
3. Peningkatan kapasitas SDM bagi penyusun laporan keuangan dan penyusunan laporan BMD pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
4. Sistem informasi memudahkan proses penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan keuangan, laporan keuangan dan pengelolaan BMD
5. Pengadministrasian BMD terus dioptimalkan

Isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih terus perlu ditingkatkan dalam rangka percepatan pencapaian visi misi kepala daerah.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh BKAD Kota Bogor dalam Rencana Kerja Perubahan pada dasarnya mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 yang telah disusun dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Bogor. Renstra yang disusun tersebut berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan, yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RKPD Pemerintah Kota Bogor. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh BKAD Kota Bogor dalam Rencana Kerja Perubahan secara umum tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kota Bogor. Berikut program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 perubahan adalah: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Adapun Perubahan Rencana Kerja PD tetap berpedoman pada Renstra dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah, baik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah secara langsung maupun yang ditempuh dengan dorongan peran/partisipasi masyarakat.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja BKAD Kota Bogor pada dasarnya dibahas dalam forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan. Terdapat 7 (tujuh) tahapan penyusunan rencana kerja, yaitu (1) Pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja PD, (2) Penyusunan Awal Rancangan RKPD dan Rancangan Awal Renja PD, (3) Musrenbang Desa/Kelurahan, (4) Musrenbang Kecamatan, (5) Forum PD Kabupaten/Kota, (6) Musrenbang Kabupaten/Kota, dan (7) Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD. Melalui pembahasan Forum Perangkat Daerah, didapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat yang kemudian usulan-usulan tersebut akan disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Jika usulan-usulan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan isu penting, tugas pokok, dan fungsi suatu Perangkat Daerah maka program dan kegiatan yang diusulkan tersebut akan dicantumkan sebagai program dan kegiatan yang kemudian dilaksanakan dalam tahun berjalan oleh Perangkat Daerah tersebut. Dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKAD Kota Bogor baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan Perguruan Tinggi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema pembangunan tersebut menggambarkan perekonomian di tahun 2025 yang difokuskan untuk mendukung pencapaian target pembangunan lain, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Pengurangan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Terdapat beberapa komponen yang menjadi fokus penekanan dalam tema RKP tahun 2025 di antaranya, yaitu

1. Infrastruktur Berkualitas: Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas
   a) Transformasi Ekonomi
      - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
      - Penguatan infrastruktur digital
      - Pengembangan infrastruktur transisi energi
      - Percepatan infrastruktur IKN
   b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
      - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
2. SDM Berkualitas: SDM Berdaya Saing dan Produktif
   a) Transformasi Sosial
      - Penetapan wajib belajar 13 tahun
      - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
      - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan *stunting*
      - Penetapan penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
      - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas

- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*

b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - Pengembangan skema graduasi bansos
   - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
   - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   - Peningkatan produksi industri pengolahan
   - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   - Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tujuan, Sasaran dan target Indikator Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4: Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Selain hal tersebut diatas, telah ditetapkan isu strategis Pembangunan Provinsi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai berikut: Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BKAD

Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD Tahun 2025-2026, yang mengacu pada tema RPD Kota Bogor 2025-2026, yaitu **"Memperkokoh Kemandirian Masyarakat"** dan untuk tema RPD Kota Bogor di tahun 2025 sendiri adalah **"Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas"**. Adapun tujuan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang terdiri dari (1) Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (2) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah, dan (4) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuan dan Sasaran baik Renstra maupun Renja yang disusun BKAD Kota Bogor pada dasarnya mengacu pada tujuan keempat dari RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menetapkan tujuan Dan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Tujuan:
   - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas;
   - Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang berkualitas
2. Sasaran:
   - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah;
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   - Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan BKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke..
(1)	(2)	(3)	(4)	2025 (5)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	A
			IKM Lingkup Perangkat Daerah	97,59
			Nilai SAKIP Lingkup BKAD	A
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	91,65%
			Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup BKAD	97,59
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1 Inovasi
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	69,134
			Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	8,561
			Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	2,037
			Dimensi Opini BPK atas LKPD	15
			Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	14,828
			Dimensi Penyerapan	15

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke..
(1)	(2)	(3)	(4)	2025
				(5)
			Anggaran	
			Dimensi Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah	13,708
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Rata-rata Persentase Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	56%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan sesuai dengan RKPD yang dirumuskan bersama. Semua kegiatan dilaksanakan di Kota Bogor dengan total anggaran Rp62.877.325.883 dengan sumber pendanaan dari APBD. Adapun Program/Kegiatan di maksud adalah sebagai berikut:

caranya kita mengetahui itu fakta atau engga gimana?

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di Lingkup BKAD
2. Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di Lingkup BKAD
3. Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di Lingkup BKAD
4. Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di Lingkup BKAD
5. Persentase Kepatuhan Penganggaran
6. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA
7. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan secara tepat waktu
8. Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup BKAD
9. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah
11. Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana
12. Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM

13. Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan
14. Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan

Kegiatan:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Indikator kinerja Kegiatan:

   1) Nilai SAKIP di Lingkup BKAD
   2) Persentase Standarisasi Mutu BKAD
   3) Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di Lingkup BKAD
   4) Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup BKAD

   Sub Kegiatan:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator kinerja Kegiatan:

   1) Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA
   2) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan secara Tepat Waktu
   3) Persentase Kepatuhan Laporan Barang Pengguna

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      Indikator kinerja: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Indikator kinerja Kegiatan:

   1) Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
   2) Indeks Kepuasan Masyarakat

   Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Indikator kinerja: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Indikator kinerja: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Indikator kinerja: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Indikator kinerja: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja:

1) Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD
2) Persentase Kepatuhan Penggunaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Indikator kinerja: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
2) Pengadaan Mebel
   Indikator kinerja: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja: Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja:

1) Persentase BMD lingkup perangkat daerah yang terpelihara
2) Persentase Kepatuhan Penghapusan BMD

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Indikator kinerja: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Indikator kinerja: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Indikator kinerja: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator program adalah sebagai berikut:

1. Persentase Kesesuaian Pagu Program pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
2. Persentase Kepatuhan Pengalokasian Anggaran Mandatory Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3. Transparansi Perencanaan Penganggaran

4. Transparansi Pelaksanaan APBD
5. Persentase Penyerapan Realisasi Anggaran dalam APBD

Kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Persentase Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS
2) Persentase Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD
3) Persentase pengalokasian kepatuhan anggaran belanja bidang pendidikan, infrastruktur, belanja pegawai, dan anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4) Persentase transparansi ringkasan kebijakan umum anggaran, ringkasan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, ringkasan dokumen RAPBD, perda APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, ringkasan dokumen Rancangan Perubahan APBD, perkada perubahan APBD, dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
   Indikator kinerja: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
   Indikator kinerja kinerja: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
   Indikator kinerja: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
   Indikator kinerja: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
   Indikator kinerja: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
   Indikator kinerja: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

   Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

8) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Persentase skor rata-rata indikator dimensi penyerapan anggaran
2) Persentase Transparansi SK Wali Kota tentang pejabat pengelola keuangan daerah dan laporan arus kas

Sub Kegiatan:

1) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Persentase Penandatanganan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan
2) Persentase penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli
3) Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu
4) Persentase Transparansi informasi perkada tentang kebijakan akuntansi, realisasi anggaran seluruh SKPD, realisasi anggaran PPKD, informasi neraca, CaLK, LK BUMD, perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan opini BPK

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Indikator kinerja: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Persentase realisasi anggaran kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap APBD
2) Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi daerah

Sub Kegiatan:

1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah

2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Program adalah sebagai berikut:

1) Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan

2) Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah
3) Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik
4) Persentase Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Stock Opname dan BA Rekon

Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Persentase tersusunnya RKBMD tepat waktu
2) Persentase tersusunnya laporan BMD semester dan tahunan tepat waktu
3) Persentase Pengamanan Aset melalui Pengasuransian atas bangunan dan kendaraan
4) Persentase Pengamanan Aset melalui Pensertipikatan Tanah

Sub Kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Standar Harga
   Indikator kinerja: Jumlah Standar Harga yang Disusun
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
3) Pengamanan Barang Milik Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
4) Penilaian Barang Milik Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
   Indikator kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen penyesuaian atas perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam Renja BKAD Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada tujuan keempat RPD Kota Bogor tahun 2025-2026, yaitu **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan".** Berikut poin-poin yang menjadi sasaran BKAD Kota Bogor di Tahun 2025:

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah;
b. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program yang telah ditetapkan untuk Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tahun 2025 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan, dan 38 sub kegiatan, yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   Kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan:
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah
2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

1) Penyusunan Standar Harga
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah
3) Pengamanan Barang Milik Daerah
4) Penilaian Barang Milik Daerah
5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKAD Kota Bogor Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 BKAD Kota Bogor untuk sumber dana APBD Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
BKAD Kota Bogor

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							62.877.325.883,00	83.022.164.350,00	83.608.707.057,00	20.731.381.174,00							37.099.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							62.877.325.883,00	83.022.164.350,00	83.608.707.057,00	20.731.381.174,00							37.099.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN							62.877.325.883,00	83.022.164.350,00	83.608.707.057,00	20.731.381.174,00							37.099.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup BKAD Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup BKAD Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup BKAD Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana Prasarana Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan				100 12,4 21,7 26,2 27,1 85,97 99,3 % Poin Poin Poin Poin % Poin	21,70 26,20 27,10 99,3 99,3 undefined Poin Poin Poin Poin undefined undefined	18.631.347.477,00	23.398.416.783,00	26.010.401.996,00	-494.347.477,00							18.137.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Standarisasi Mutu BKAD*				100 % 87,40 Poin 95 %	100 % 87,40 Poin 95 %	232.097.600,00	230.795.900,00	229.494.200,00	-2.603.400,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	232.097.600,00	230.795.900,00	229.494.200,00	-2.603.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kepatuhan laporan barang pengguna Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				100 % 95 %	100 % 95 %	12.419.666.521,00	17.147.891.677,00	17.687.817.897,00	5.268.151.376,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		12.600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	49 Orang/bulan	12.384.345.521,00	17.075.738.877,00	17.616.401.497,00	5.232.055.976,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.321.000,00	72.152.800,00	71.416.400,00	36.095.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah*				100 % 99,3 Poin	100 % 99,3 Poin	2.634.947.665,00	2.124.818.465,00	2.929.020.381,00	294.072.716,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		2.917.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.490.330,00	19.490.330,00	19.490.330,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	723.842.300,00	199.628.100,00	300.243.800,00	-423.598.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			470.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	255.647.335,00	253.957.335,00	453.136.351,00	197.489.016,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.950.000,00	120.842.000,00	131.584.200,00	8.634.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.946.400,00	13.946.400,00	13.946.400,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	436.922.300,00	566.572.300,00	472.882.300,00	35.960.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.062.149.000,00	950.382.000,00	1.537.737.000,00	475.588.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase kepatuhan penggunaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD*				100 %	100 %	1.110.587.500,00	1.082.501.816,00	2.198.485.973,00	1.087.898.473,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	319.574.600,00	437.451.116,00	461.602.873,00	142.028.273,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	791.012.900,00	645.050.700,00	1.736.883.100,00	945.870.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	807.462.256,00	882.657.236,00	888.867.612,00	81.405.356,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		820.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	187.965.572,00	186.075.572,00	192.294.948,00	4.329.376,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			170.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	619.496.684,00	696.581.664,00	696.572.664,00	77.075.980,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik* *Persentase Kepatuhan Penghapusan BMD*				100 %	100 %	1.426.585.935,00	1.929.751.689,00	2.076.715.933,00	650.129.998,00			-	- -	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	637.923.752,00	288.033.752,00	288.725.852,00	-349.197.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	314.074.783,00	346.135.937,00	491.771.557,00	177.696.774,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	474.587.400,00	1.295.582.000,00	1.296.218.524,00	821.631.124,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan penganggaran Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD				100 93 % %	100 93 % %	33.711.363.006,00	50.008.191.167,00	48.907.602.661,00	-21.751.363.006,00							11.960.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD Persentase kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS Persentase pengalokasian kepatuhan anggaran belanja bidang pendidikan, infrastruktur, belanja pegawai, dan anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan keterntuan peraturan perundang-undangan Persentase transparansi ringkasan kebijakan umum anggaran, ringkasan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, ringkasan dokumen RAPBD, perda APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, ringkasan dokumen Rancangan Perubahan APBD, perkada perubahan APBD, dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD*				100 %	100 %	726.296.600,00	775.375.000,00	686.619.400,00	-39.677.200,00			-	- -	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		783.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	166.240.500,00	164.440.500,00	162.819.700,00	-3.420.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	7.220.500,00	7.220.500,00	5.599.700,00	-1.620.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	56.020.000,00	116.488.400,00	116.488.400,00	60.468.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	52.810.000,00	52.810.000,00	52.810.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	168.519.800,00	164.719.800,00	146.891.000,00	-21.628.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	184.305.800,00	180.505.800,00	157.814.600,00	-26.491.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	91.180.000,00	89.190.000,00	44.196.000,00	-46.984.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentse skor rata-rata indikator dimensi penyerapan anggaran Transparansi SK Wali Kota tentang pejabat pengelola keuangan daerah dan laporan arus kas*				100 % 93 %	100 % 93 %	200.000.000,00	263.944.800,00	210.670.800,00	10.670.800,00			-	- -	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	200.000.000,00	263.944.800,00	210.670.800,00	10.670.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Penandatanganan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu Persentase penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan juli Persentase Transparansi informasi perkada tentang kebijakan akuntansi, realisasi anggaran seluruh SKPD, realisasi anggaran PPKD, informasi neraca, CaLK, LK BUMD, perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan opini BPK*				100 %	100 %	482.228.000,00	465.398.400,00	372.757.800,00	-109.470.200,00			-	- -	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		527.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	210.114.000,00	206.851.200,00	202.500.800,00	-7.613.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	228.610.000,00	223.744.000,00	148.505.000,00	-80.105.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	43.504.000,00	34.803.200,00	21.752.000,00	-21.752.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase realisasi anggaran kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap APBD Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi daerah*				100 % 50 %	100 % 50 %	32.302.838.406,00	48.503.472.967,00	47.637.554.661,00	15.334.716.255,00			-	- -	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		10.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	350.400.000,00	350.400.000,00	350.400.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	286.688.406,00	7.065.099.082,00	7.065.099.082,00	6.778.410.676,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			8.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1.665.750.000,00	1.665.750.000,00	1.665.750.000,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000,00	39.422.223.885,00	38.556.305.579,00	8.556.305.579,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatwaktuan penyampaian laporan stock opname dan BA rekon Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah Persentase Tingkat Kepatuhan Perizinan Bangunan Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik				100 34 7 83 % % %	100 34 7 83 % % %	10.534.615.400,00	9.615.556.400,00	8.690.702.400,00	-3.532.615.400,00							7.002.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Pengamanan Aset melalui Pengasuransian atas bangunan dan kendaraan Persentase Pengamanan Aset melalui Pensertipikatan Tanah Persentase tersusunnya laporan BMD semester dan tahunan tepat waktu Persentase tersusunnya RKBMD tepat waktu*				100 % 34 %	100 % 34 %	10.534.615.400,00	9.615.556.400,00	8.690.702.400,00	-1.843.913.000,00			- -	- -	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah		7.002.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	518.157.800,00	518.157.800,00	518.157.800,00	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			672.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				8 Laporan	8 Laporan	477.582.800,00	467.574.400,00	683.324.400,00	205.741.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			675.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.659.850.800,00	7.757.680.800,00	6.791.188.800,00	-1.868.662.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				16 Laporan	2 Laporan	218.000.000,00	217.799.400,00	217.799.400,00	-200.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	327.804.000,00	321.124.000,00	321.124.000,00	-6.680.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				54 Orang	54 Orang	333.220.000,00	333.220.000,00	159.108.000,00	-174.112.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								62.877.325.883,00	83.022.164.350,00	83.608.707.057,00	508.225.273.942,90							37.099.000.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan Rencana Kerja ini berkedudukan dan berfungsi antara lain menyesuaikan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan bidang keuangan dan aset sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh Perangkat Daerah, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan bidang keuangan dan aset dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Tahun 2025 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun RKPD Perubahan dan RAPBD Perubahan serta khususnya dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bogor.

bb. Badan Pendapatan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi dari dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor disusun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, serta kegiatan yang berasal dari partisipasi masyarakat sebagai acuan.

Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, yaitu Visi dan Misi Walikota Terpilih yang memuat sasaran strategis dan target untuk masing-masing perangkat daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun, Kota Bogor saat ini sedang memasuki proses transisi kepemimpinan sehingga Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih belum tersedia. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sasaran strategis dan target mempertimbangkan dokumen perencanaan yang masih berlaku untuk tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. Maka, penentuan sasaran strategis dan target mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tujuan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memuat Bapenda Kota Bogor sebagai salah satu organisasi yang berperan untuk mencapainya antara lain:

1. "Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata dan Berkelanjutan"
2. "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan"

Dalam mencapai Tujuan tersebut ada beberapa Sasaran yang harus dipenuhi, antara lain:

1. "Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif"
2. "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif"

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dilaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini. Dalam pelaksanaannya, tentunya dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Lembaga Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat kepada Pemerintah Kota Bogor diperlukan.

Bapenda Kota Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
   Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 08 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembara Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 06);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 05 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 130);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
30. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144)
31. Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 adalah penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan Bapenda Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapenda Kota Bogor, serta Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025 dalam rangka menunjang Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026; dan
2. Penyelarasan tolok ukur dan target kinerja Bapenda Kota Bogor khusus dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahunan oleh Kepala Bapenda Kota Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan daerah Kota Bogor Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

BAB III : TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM BAPENDA
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA
BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2023

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Bapenda Kota Bogor berdasarkan Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor yang telah disusun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan daerah Kota Bogor Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut:
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
        (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
        (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
        (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
        (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
        (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan

(6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; dan

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

(5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan sebagai berikut:
   1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
      (1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
      (2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
      (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
      (4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
      (5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
      (6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      (7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
      (8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
      (9) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
      (10) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah; dan
      (11) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan Renja bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan, menyelaraskan

perencanaan dan penganggaran, dan terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Perangkat Daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Bapenda Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18.74	98,23	26,34	16,57	62,90

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	81	87,21	107,67
2	Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan Wajib Pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100

3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*smart city*)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	25,70	20,51	79,82
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	26,34	16,57	62,90

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3

Pencapaian Target Sasaran

No	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi Kedua	Sasaran 1	1	1	107,67	-	-	-	-
2	Misi Ketiga	Sasaran 2	1	-	-	1	100	-	-
3	Misi Ketiga	Sasaran 3	1	-	-	1	100	-	-
4	Misi Ketiga	Sasaran 4	2	-	-	-	-	2	71,36

Dari 4 Sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Jumlah	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	20,00
2	Sesuai Target	2	40,00
3	Tidak Mencapai Target	2	40,00

B. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 2 Program dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4

Pencapaian Indikator Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,40	3,71	110	3,45	3,75	108,70

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	936.732.610.511,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.710,80	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90

Realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program ini, 2 (dua) Indikator Kinerja tercapai dan 4 (empat) Indikator Kinerja belum tercapai, antara lain:

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 100%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Nilai A dari target A yang ditetapkan pada tahun 2023.

2. Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 108,70% mendapatkan Poin 3,75 dari target 3,45 yang ditetapkan pada tahun 2023.
3. Capaian kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 92,26%. Realisasi Nilai Pajak Daerah sebesar Rp. 897.753.380.910,00 dari target Rp. 936.732.610.511,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.
4. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 79,82%. Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah terealisasi sebesar 20,51% dari target 25,70% yang ditetapkan pada tahun 2023.
5. Capaian kinerja Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62,90%. Realisasi Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 dari target Rp. 1.403.260.832.834,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.
6. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62,90%. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 16,57% dari target 26,34% yang ditetapkan pada tahun 2023.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.403.260.832.834,00 realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 (95,33%), namun mengalami peningkatan sebesar 16,57% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.147.619.218.758,92 (99,72%) dari target sebesar Rp. 1.150.887.225.486,00 dengan perincian:

No.	Uraian PAD	2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
2	Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	326.707.820.522,00	346.545.749.527,92	106,07	342.580.071.400	374.854.205.817,80	109,45
Jumlah PAD		**1.150.887.225.486,00**	**1.147.619.218.758,92**	**99,72**	**1.403.260.832.834,00**	**1.337.749.753.710,80**	**95,33**

Adapun Penerimaan Pajak Daerah meliputi 9 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2023 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, target pajak Tahun 2023 menurut RPJMD yaitu sebesar Rp. 976.000.000.000,00 APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar sebesar Rp. 936.732.610.511,00 akan tetapi dalam APBD Perubahan ditetapkan target pajak sebesar Rp. 973.102.231.105,00 dengan realisasi sebesar Rp. 897.753.380.910,00 (92,26%).

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini antara lain Perencanaan Target BPHTB. BPHTB 2023 ditargetkan sebesar 389.667.231.105,00 dengan ketercapaian 260.142.927.458,00 (66,76%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2022 sebesar 208.240.798.617,00.

Adapun faktor dibalik tidak tercapainya BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50.000.000.000. Namun tahun 2023 pembayaran BPHTB dari PTPN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut:

Tabel 5

Pencapaian Target Program

No.	Sasaran	Program	Jumlah Indikator Program	Pencapaian Indikator Program					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	Program 1	2	1	108,70	1	100	-	-

2	Sasaran 2,3,4	Program 2	4	-		-		4	82,58

Dari 2 Program dengan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Pencapaian Indikator Kinerja Program

No.	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	108,70
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	4	82,58

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 7

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100	100	100	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	100	100	100	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa	%	100	100	100	100	100	100

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
7	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	100	99,72	99,72	100	95,33	99,18
		Persentase Service Level Agreement (SLA) atas Layanan Sistem Pajak	%	95	95	100	95	97,52	97,52
		Persentase Realisasi PAD dibandingkan Target	%	100	99,72	99,72	100	95,33	98,42
		Persentase Keberatan Pajak Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Penambahan Wajib Pajak Baru	%	247	247	100	247	239	96,76
		Persentase Capaian Target PAD dari Sektor PBB dan BPHTB	%	100	94,45	94,45	100	82,77	82,77
		Persentase Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Yang Ditetapkan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penurunan Jumlah Piutang Pajak Daerah	%	5	7,41	148,20	5	0,82	16,30
		Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diperiksa	%	2,5	2,5	100	2,5	6,05	242,05
		Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diawasi	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut:

Tabel 8

Pencapaian Target Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Jumlah Indikator Kegiatan	Pencapaian Indikator Program					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program 1	Kegiatan 1	1	-	0	1	100	-	0

		Kegiatan 2	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 3	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 4	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 5	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 6	1	-	0	1	100	-	0
2	Program 2	Kegiatan 1	1	1	242,05	3	100	6	81,83

Dari 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	6,25
2	Sesuai Target	9	56,25
3	Tidak Mencapai Target	6	37,50

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

C. Kerangka Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2024 perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,87
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100	1	1	100
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90

Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran ini, 3 (tiga) Indikator Kinerja tercapai dan 2 (dua) Indikator Kinerja belum tercapai. Salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini antara lain Perencanaan Target BPHTB. BPHTB 2023 ditargetkan sebesar 389.667.231.105,00 dengan ketercapaian 260.142.927.458,00 (66,76%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2022 sebesar 208.240.798.617,00.

Adapun faktor dibalik tidak tercapainya BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementerian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50.000.000.000. Namun tahun 2023 pembayaran BPHTB dari PTPN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Jumlah Anggaran Tahun 2023	Rp. 50.263.760.137,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	Rp. 48.559.192.269,00
Persentase Anggaran Tahun 2023	96,61%

Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu	Realisasi	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**45.239.619.037**	**43.577.919.768**	**96,33**
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.405.000	33.533.100	89,65
		1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.498.500	99,90
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.605.000	31.734.900	89,13
		3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	299.700	99,90
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.397.855.677	36.911.775.852	96,13
		1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.396.355.677	36.910.277.352	96,13
		2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.498.500	99,90
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.359.632.200	2.283.605.589	96,78
		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36.455.800	36.455.800	100
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.885.400	172.658.791	99,87
		3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.396.400	47.755.600	83,20
		4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.902.000	7.012.000	64,32
		5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	312.476.600	311.758.835	99,77
		6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.010.000	78.985.000	99,97
		7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.690.506.000	1.628.979.563	96,36
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		869.008.800	861.291.940	99,11
		1)	Pengadaan Mebel	69.120.100	68.911.450	99,70
		2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799.888.700	792.380.490	99,06
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.235.591.360	2.214.947.356	99,08
		1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.650.000	12.650.000	100
		2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	837.420.000	827.672.964	98,84
		3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.521.360	1.374.624.392	99,21
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.340.126.000	1.316.827.381	98,26
		1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.830.000	371.814.338	100
		2)	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	12.000.000	100
		3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	512.980.000	503.647.000	98,18
		4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	413.316.000	399.366.043	96,62
		5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Pagu	Realisasi	%
II	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**5.024.141.100**	**4.937.211.051**	**98,27**
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.024.141.100	4.937.211.051	98,27

		1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	193.409.500	188.701.302	97,57
		2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	572.417.000	562.001.950	98,18
		3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	912.100.000	889.476.000	97,52
		4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	157.995.000	154.960.400	98,08
		5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.085.423.400	2.070.036.400	99,26
		6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	302.926.000	301.712.252	99,60
		7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	69.196.000	69.022.800	99,75
		8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	88.370.000	87.647.000	99,18
		9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	382.080.500	381.048.847	99,73
		10)	Penagihan Pajak Daerah	171.028.000	144.973.000	84,77
		11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	89.195.700	87.631.100	98,25
Jumlah				**50.263.760.137**	**48.559.192.269**	**96,61**

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Misi Kedua, antara lain:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	73,87	92,33	81,00	87,21	107,67

Capaian kinerja Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah sebesar 107,67%. Nilai IRB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai 87,21 dari target 81,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,40	3,71	110	3,40	3,75	110,29

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 45.239.619.037,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 43.621.981.218,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	96,42%

Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 100%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai A dari target A yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk merealisasikan Indikator Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan tepat data. Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Dokumen antara lain Rencana Kerja (Renja), dan 4 (empat) Laporan antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume	1 Dokume	100

		n	n	
2	Buku Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokume n	1 Dokume n	100

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100
2	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut antara lain:

a. Belum efektifnya sistem pengumpulan data dan informasi yang menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
b. Hasil Audit BPK terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 setiap tahun akan berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya sehingga angka realisasi PAD masih merupakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK. Maka untuk pengisian data capaian kinerja tahun 2023 baik LKPJ, LKIP maupun Laporan keuangan masih menggunakan data yang terdapat dalam SIMRAL per tanggal 31 Desember 2023;
c. Masih banyaknya permasalahan SIPD dalam penyusunan anggaran tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

a. *Monitoring* dan evaluasi terkait pengendalian pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK secara berkala;
b. Membuat laporan realisasi capaian pada setiap triwulan tahun berjalan yang berisi hasil rekonsiliasi internal untuk menyandingkan realisasi Sub Kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi barang jasa bersama Bendahara Pengeluaran dengan SIMRAL;
c. Angka realisasi PAD masih menggunakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK;
d. Koordinasi dengan BKAD Kota Bogor.

Dengan anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 37.405.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 33.533.100,00 (89,65%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.871.900,00 (10.35%) merupakan efisiensi kegiatan.

Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 110,29%. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Poin 3,75 dari target 3,40 poin yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk merealisasikan Indikator Kedua Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN. Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Laporan antara lain Laporan Keuangan. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Orang Yang	87	87	100

	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	
2.	Belanja Gaji Pokok ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Belanja Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
5.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100

Dengan anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 38.397.855.677,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 36.911.775.852,00 (96,13%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.486.078.325,00 (3,87%).

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah. kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dalam rangka mendukung pencapaian tupoksi yang menjadi beban tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Belanja Alat Listrik	1 Paket	1 Paket	100

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	100

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Perabot Kantor	1 Paket	1 Paket	100
3.	Tabung Gas	84 Tabung	84 Tabung	100
4.	Tabung Pemadam Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun	100

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Belanja Spanduk	100 Meter	100 Meter	100
3.	Belanja Karangan Bunga	20 Buah	20 Buah	100

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi Incomer se - Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Terpenuhinya Makan dan Minum Tamu	1 Tahun	1 Tahun	100

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	%

				Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Rapat Koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	100

Dengan anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.359.632.200,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 2.283.605.589,00 (96,78%) , sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 76.026.611,00 (3,22%).

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

   1) Pengadaan Mebel

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	100
2.	Kursi Kerja	17 Unit	17 Unit	100
3.	Sofa	1 Unit	1 Unit	100

   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	100
2.	Drone	1 Unit	1 Unit	100
3.	Laptop	11 Unit	11 Unit	100
4.	PC	5 Unit	5 Unit	100
5.	PC Tablet	15 Unit	15 Unit	100
6.	Printer	4 Buah	4 Buah	100
7.	Scanner	3 Unit	3 Unit	100
8.	TV	1 Unit	1 Unit	100
9.	Genset	1 Unit	1 Unit	100

Dengan anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 869.008.800,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp.

576.941.940,00 (66,39%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 292.066.860,00 (33,61%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Surat Kabar	1 Tahun	1 Tahun	100

   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Telepon/Internet	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Air	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100

   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	4 Orang	4 Orang	100
3.	Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	100
4.	Tersedianya Outsourcing Tenaga Khusus Kehumasan/Design Grafis	2 Orang	2 Orang	100
5.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Customer Service Pajak Daerah	10 Orang	10 Orang	100
6.	Tersedianya Tenaga Outsourcing IT	6 Orang	6 Orang	100
7.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Keamanan	10 Orang	10 Orang	100

8.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Kebersihan	7 Orang	7 Orang	100
9.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah	6 Orang	6 Orang	100

Dengan anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.235.591.360,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 2.214.947.356,00 (99,08%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 20.644.004,00 (0,92%).

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dari target indikator kinerja Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik sebesar 100%, realisasi sebesar 100%. Tujuannya untuk menjaga agar perlengkapan/peralatan kantor dan gedung kantor tetap dalam kondisi baik dan layak pakai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100
2.	Pajak Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	100

   2) Pemeliharaan Mebel

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Mebel Inventaris Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	100

2.	Terpeliharanya AC Presisi	5 Unit	5 Unit	100
3.	Terpeliharanya Air Conditioner	98 Unit	98 Unit	100
4.	Terpeliharanya Genset	2 Unit	2 Unit	100
5.	Terpeliharanya Lift	1 Unit	1 Unit	100
6.	Terpeliharanya Mesin Perporasi	2 Unit	2 Unit	100
7.	Terpeliharanya Pompa Air	1 Unit	1 Unit	100

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Jaringan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100

Dengan anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.340.126.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.316.827.381,00 (98,26%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 23.298.619 (1,74%).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%. Dari target Persentase

Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%, realisasi tahun 2023 sebesar 100%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100
2	*Surveillance* ISO 9001:2015	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

Maksud dari kegiatan ini adalah pelayanan prima terhadap masyarakat, dengan tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah.

Melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Hasil survei secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 3,74 poin. Selain itu telah dilaksanakan juga :

a. Pelayanan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak dengan hasil pelayanan :

1) Pelayanan PBB sejumlah 4470 berkas dengan rincian :

- Keberatan : 61 berkas
- Pengurangan : 593 berkas
- Restitusi : 0 berkas
- Daftar baru : 287 berkas
- Mutasi : 2707 berkas
- Pembetulan : 520 berkas
- Pembatalan : 73 berkas
- Penerbitan kembali : 209 berkas

2) Pelayanan BPHTB sebanyak 2273 berkas.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar Rp. 88.370.000,00 realisasi keuangan sampai Desember 2023 sebesar Rp. 87.647.000,00 (99,18%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 723.000,00 (0,82%) merupakan efisiensi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100			

Capaian kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebesar 100%. Dari target Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 Inovasi, realisasi tahun 2023 sebanyak 1 Inovasi.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26

	Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100
2	Terlaksananya dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
3	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan E-Retribusi	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
4	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
5	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer, Server, Laptop, Mini PC, Mesin Antrean, Mesin Anjungan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
6	Tersedianya Colocation Aplikasi Perpajakan	1 Paket	1 Paket	100
7	Tersedianya Whatsapp Business API	1 Paket	1 Paket	100
8	Terlaksananya Pengadaan Internet Dedicated	1 Paket	1 Paket	100

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengembangan, atau pemeliharaan aplikasi/sistem informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor. Melalui kegiatan ini sistem dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat mendukung semua proses bisnis pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, dan aplikasi yang digunakan dalam konteks pelaksanaan aktivitas perkantoran seperti Website, Sistem Informasi Dokumen Digital, dikembangkan dan/atau dipelihara. Melalui kegiatan

ini juga dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor Seperti SIMBPHTB, SIPDEH, SISMIOP dan Web R.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sehingga Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor dapat terlaksana dengan optimal.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara sosialisasi terhadap Wajib Pajak melalui pemberitahuan *Pop-Up* pada aplikasi perpajakan mengenai informasi penting mengenai perpajakan serta kanal media sosial yang di miliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor seperti Instagram. Selain itu Wajib Pajak diingatkan dengan penyebaran E-SPPT melalui Whatsapp Blast terkait jumlah pajak PBB yang harus dibayar sehingga Wajib Pajak dapat segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp. 912.100.000,00 realisasi keuangan sampai Desember 2023 sebesar Rp. 889.476.000,00 (97,52%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 22.624.000,00 (2,48%) merupakan efisiensi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 62,90%. Dari target sebesar 25,70%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 16,57%. Sedangkan Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 79,82%. Dari target sebesar 26,34%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 20,51%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

3. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	Tersedianya Jasa Konsultan Kajian Dalam Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Bahan Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi	1 Kali	1 Kali	100,00
4	Terlaksananya Rakor PAD	2 Kali	2 Kali	100,00
5	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bapenda dengan PPAT dan BPN	1 Kali	1 Kali	100,00

Dilaksanakan pengadaan belanja jasa konsultasi non konstruksi berorientasi bidang keuangan berupa Kajian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027.01/06/KAJI-PERDA/SPPBJ/PPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 kepada CV. Graha Prabayaksa dengan tujuan melakukan analisa dan proyeksi potensi pajak dan retribusi daerah Kota Bogor sebagai pedoman dalam penetapan tarif pajak dan retribusi

dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai upaya evaluasi dan optimalisasi pendapatan yaitu:

1. Rapat Koordinasi dengan PPAT/PPATS: Ketentuan BPHTB dan Kewajiban PPAT/PPATS pada tanggal 20 Juni 2024 di The Sahira Hotel;
2. Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 1 Dan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) Serta Launching Lapak-On pada tanggal 6 Juni 2023 di The Sahira Hotel; dan
3. Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 2: Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dan Perumusan Peraturan Wali Kota Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada tanggal 7 Desember 2023 di D'Anaya Hotel.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan juga melaksanakan kegiatan :

1. Memfasilitasi penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melaksanakan asistensi DPA Pendapatan;
2. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 119/Perj. 103-Bapenda/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Beberapa rumusan kerja sama antara pihak ketiga yang masih berlanjut yaitu:

1. PKS dengan PT Ayopop sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama tentang Kerja Sama Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Bogor;
2. PKS dengan PT Shopee Indonesia sebagai tindak lanjut dengan PT Shopee sebagai chanelling pembayaran PBB;
3. PKS dengan PT Bima Sakti Alterra tentang Pemasangan Bima Tapping Apps;
4. PKS dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor;
5. PKS dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kota Bogor;
6. PKS dengan PKN STAN tentang Pengadaan ASN yang berasal dari lulusan PKN STAN.

Penyusunan kebijakan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga difasilitasi oleh kegiatan ini. Sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan 1 Peraturan Daerah, 3 Peraturan Wali Kota, dan 10 Surat Keputusan Wali Kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Peraturan	Nomor dan Tanggal
1.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tentang Daftar Wajib Pajak yang Memperoleh Pengurangan Ketetapan PBB P2 Tahun 2022, dan Daftar Wajib Pajak yang Memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 Yang Melakukan Pembayaran pada Tahun 2022	973.1/82.1/Kep-33/Bapenda 30 Januari 2023
2.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-248/Bapenda Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	060/548/Kep-277/Bapenda 6 Juli 2023
3.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-	060/484/Kep-248/Bapenda

	248/Bapenda Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	23 Mei 2023
4.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penjabaran Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023	973/Kep-83-Bapenda/2023 17 Februari 2023
5.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Kesatu Tahun Anggaran 2023	973/Kep.118-Bapenda/2023 28 Maret 2023
6.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023	973/Kep.212-Bapenda/2023 3 Juli 2023
7.	Peraturan wali Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Elektronik	Nomor 29 Tahun 2023 4 Juli 2023
8.	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun2018 dan Tahun 2023, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2022	Nomor 5 tahun 2023 10 Februari 2023
9.	Keputusan wali Kota Bogor Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah dan Mitra Pendukung Pengelolaan Perpajakan Daerah Tahun 2022	973/Kep.207-Bapenda/2023 27 Juni 2023
10.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Ketiga Tahun Anggaran 2023	973/Kep.291-Bapenda/2023 4 Oktober 2023
11.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Keempat Tahun Anggaran 2023	900.1.13.1/Kep.376-Bapenda/2023 21 Desember 2023
12.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Satuan Tugas Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023	973/Kep.290-Bapenda/2023 4 Oktober 2023
13.	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang Pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	Nomor 42 Tahun 2023 4 Oktober 2023
14.	Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nomor 11 Tahun 2023 29 Desember 2023
15.	Keputusan Wali Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 973/Kep.418-Bapenda/2022 tentang Pengurangan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak	900.1.13.1/Kep.391-Bapenda/2023 29 Desember 2023
16.	Keputusan wali Kota Bogor tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah	900.1.13.1/Kep.21-Bapenda 27 Desember 2023

17.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2024	900.1.13.1/Kep.392-Bapenda 29 Desember 2023

Penyusunan dan pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga difasilitasi pada sub kegiatan ini dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/548/Kep-277/Bapenda tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-248/Bapenda Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 63 SOP pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
2. Terdapat penambahan 4 SOP baru pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan 1 pembaharuan SOP pada Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Memfasilitasi pelaporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan berupa 1 dokumen Excel dan 1 dokumen *slide* presentasi, yang turut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Komisi II DPRD Kota Bogor.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tahun 2023 Sub Bidang Analisa dan Pengembangan memfasilitasi penyusunan Kebijakan Kepala Daerah sebanyak 16 (enam belas) yang mana pada Tahun 2022 diterbitkan sebanyak 8 (delapan) Kebijakan Kepala Daerah. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Pembaharuan atau penambahan produk hukum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan hukum dan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dari anggaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 193.409.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar

Rp. 188.701.302,00 (97,57%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.708.198,00 (2,43%) merupakan efisiensi.

2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	1.450 Meter	1.450 Meter	100
3	Sosialisasi Langsung Kepada Wajib Pajak	12 Kali	13 Kali	108,33
4	Sosialisasi melalui *Leaflet*	3.500 Lembar	3.500 Lembar	100
5	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Cetak dan Elektronik	55 Kali	55 Kali	100
6	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Online/Medsos/Website	110 Kali	110 Kali	100
7	Video Profil dan Sosialisasi	1 Paket	1 Paket	100

Selama tahun 2023, kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali. Bulan Juni dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, Bulan Juli sebanyak 6 (enam) kali, Bulan September sebanyak 3 (tiga) kali, Bulan November sebanyak 1 (satu) kali, dan Bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali dari target sebanyak 9 (sembilan) kali.

Kegiatan dilakukan sesuai aturan dan terus berupaya melaksanakan penyuluhan/sosialisasi untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban pembayaran. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan/sosialisasi melalui berbagai sarana ini, Wajib Pajak semakin sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Upaya yang akan terus dilakukan adalah memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban dalam membayar pajak melalui sarana sosialisasi dan terus melakukan strategi inovasi penyuluhan.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 572.417.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 562.001.950,00 (98,18%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.415.000,00 (1,82%).

3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Pemutakhiran Data NPWPD	1.500 NPWPD	1.368 NPWPD	91,20
3	Terlaksananya Akurasi Data Wajib Pajak Daerah	1.500 OP	1.368 OP	91,20
4	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak	247 WP	287 WP	116,19

Maksud dari kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ini adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui kegiatan sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.

Hasil dari kegiatan Pendataan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebagai berikut:

4. Kegiatan Pendataan (PBJT) Pajak Barang dan Jasa Tertentu dilaksanakan di 6 Kecamatan 68 Kelurahan setiap tahunnya;
5. PBJT terdiri dari PBJT-Perhotelan, PBJT-Makan dan/Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Reklame, PBJT-Jasa Parkir, Air Tanah dan PBJT-Tenaga Listrik;
6. Metode ekstensifikasi yang dilaksanakan dengan melakukan pencarian calon wajib pajak baru atau pengumpulan data melalui *canvassing* (penyisiran) serta melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan basis data melalui program Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH); dan
7. Melaksanakan sosialisasi ke para pelaku usaha, sosialisasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi tentang Pajak Daerah. Sekaligus memberi tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak;

Dengan kegiatan pemasangan Sistem/Alat Fiskal Elektronik pada Wajib Pajak Daerah Kota Bogor tersebut dapat menggantikan pelaksanaan pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak Daerah di mana tujuan kedua kegiatan tersebut adalah sama-sama dalam rangka upaya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak serta meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah Kota Bogor.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah dan penolakan oleh Calon Wajib Pajak untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sosialisasi terkait pajak daerah terhadap Wajib Pajak dan pemberian Surat Himbauan dan Teguran Pendaftaran Wajib Pajak.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar Rp. 157.995.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 154.960.400,00 (98,08%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.034.600,00 (1,92%).

4) Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB P2	25.000 Objek Pajak	23.975 Objek Pajak	95,90
3	Terlaksananya Pemetaan Objek Pajak	1 Kali	1 Kali	100

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 Spasial di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sareal dengan target sebanyak 25.000 NOP tersebar di 3 kecamatan dan 25 kelurahan.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemetaan dan basis data PBB tahun 2023 di Kecamatan Bogor Utara adalah sebanyak 37.081 Objek Pajak yang berhasil dipetakan (75,1%), 4.011 Objek Pajak adalah

Fasos dan Fasum, 12.031 Objek Pajak Tidak Diketahui/Ditemukan, 283 Objek dapat diusulkan untuk dihapuskan karena *double anslagh* atau masalah lain.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemetaan dan basis data PBB tahun 2023 di Kecamatan Bogor Timur adalah sebanyak 21.275 Objek Pajak yang berhasil dipetakan (82,1%), 2.177 Objek Pajak adalah Fasos dan Fasum, 4.193 Objek Pajak Tidak Diketahui/Ditemukan, 437 Objek dapat diusulkan untuk dihapuskan karena *double anslagh* atau masalah lainnya.

Pencapaian kinerja pemeliharaan basis data di tahun 2023 bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait. Selain itu, upaya yang telah dilaksanakan yaitu mengadakan sosialisasi kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 kepada Masyarakat dengan cara diadakannya *workshop* di masing-masing kelurahan setempat, mengadakan sosialisasi kegiatan pemutakhiran basis data PBB-P2 kepada petugas kelurahan, RT dan RW, serta memberikan bekal ilmu kepada petugas-petugas pendata Objek Pajak dan menjalin kerja sama terhadap *stakeholder* terkait.

Penyebab kegagalan dan terhambatnya kegiatan di tahun 2023 antara lain keterbatasan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak dan peran serta masyarakat Wajib Pajak PBB. Utamanya ketika diminta melengkapi data-data administrasi pendukung yang terkadang kurang antusias atau tidak memiliki data pendukung yang diminta sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan data yang diolah tidak optimal.

Realisasi kinerja tahun ini mampu ditingkatkan dari realisasi tahun sebelumnya. Penyebab yang mendorong peningkatan realisasi antara lain dengan melakukan sosialisasi lanjutan yang mendalam kepada petugas yang turun ke lapangan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan teknis. Sosialisasi dan arahan lanjutan dilakukan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu, dengan tujuan agar petugas mampu mengantisipasi permasalahan yang muncul di lapangan dan mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan.

Selain itu, hubungan dengan *stakeholder* yang terjalin dengan baik mempermudah terjadinya koordinasi sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan lebih baik.

Solusi alternatif untuk selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi di setiap Kelurahan dan melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun sarana publik lainnya seperti memasang iklan pada sosial media Facebook, Instagram dan X (Twitter), begitu juga sosialisasi melalui papan reklame di tempat umum.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp. 2.085.423.400,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.070.036.400,00 (99,26), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.387.000,00 (0,74%).

5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	5 Objek Pajak	5 Objek Pajak	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem GIS	1 Sistem	1 Sistem	100
3	Tersedianya Hasil Analisa Penyesuaian NJOP	500 Kode ZNT	500 Kode ZNT	100
4	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 Objek Pajak	14 Objek Pajak	280

Maksud dari kegiatan ini antara lain tersedianya harga penawaran tanah dan bangunan, tersedianya data harga transaksi atas tanah dan bangunan, pemeliharaan Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System* (GIS)) dan tersedianya hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar.

Terdapat target sebanyak 5 objek pajak untuk dilakukan penilaian individual dengan realisasi sebanyak 14 objek pajak. Keberhasilan dalam mencapai target tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi secara aktif ke lapangan mendata objek dan subjek pajak di lapangan;
2. Pembetulan luasan dan kondisi bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi di lapangan yang tentunya akan menambah potensi pendapatan daerah; dan

3. Melakukan penyesuaian nilai terhadap bumi dan bangunan secara individual.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian salah satunya adalah Wajib Pajak kurang kooperatif dalam memberikan data terkait PBB.

Penilaian individual mencapai realisasi 14 objek pajak pada tahun 2023, terdapat penambahan potensi sebesar Rp. 4.822.311.765. Nilai ketetapan sebelum dilakukan penilaian adalah sebesar Rp. 440.309.874, setelah dilakukan penilaian menjadi Rp. 5.262.621.639.

Penyebab peningkatan kinerja adalah adanya target kinerja dari perangkat daerah, yang jika tidak tercapai berdampak pada menurunnya optimalisasi pendapatan daerah. Pertumbuhan persentase pajak daerah mencapai angka 20% yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mencapai kinerja tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan, antara lain:

1. Menentukan target objek pajak yang akan dilakukan penilaian individual;
2. Melakukan pengecekan administrasi kantor dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak;
3. Melakukan proses pendataan objek pajak individual; dan
4. Melakukan penyesuaian nilai objek pajak sesuai dengan kondisi *existing*.

Solusi alternatif yang dapat dilakukan selanjutnya antara lain bekerja sama dengan DPMPTSP dan Dinas PUPR terkait integrasi sistem dan data Perizinan Bangunan Gedung (PBG) untuk menentukan target penilaian individual serta bekerja sama dengan ATR/BPN untuk menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Dari anggaran Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 302.926.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 301712.252,00 (99,60), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.213.748,00 (0,40%).

6) Penetapan Wajib Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	Tercetaknya Buku DHKP PBB	408 Buku	320 Buku	78,43

Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah melaksanakan pekerjaan penjilidan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 sebanyak 408 Buku. Jumlah buku tersebut terdiri dari 68 Kelurahan untuk Buku Golongan 1,2, dan 3 serta Buku Golongan 4 dan 5 sebanyak 3 rangkap, yang diperuntukkan Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 tidak terealisasi sesuai target sebanyak 408 Buku. Hal ini disebabkan anggaran kegiatan tersebut mengalami *refocussing* sebesar 20% sehingga pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan dengan pagu anggaran setelah *refocussing* yaitu Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 sebanyak 320 Buku. Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 tahun sebelumnya juga mengalami capaian yang tidak terealisasi sesuai target dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami *refocussing* anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 untuk tahun berikutnya akan digantikan dengan proses yang berbasis elektronik yaitu dengan pengembangan aplikasi e-DHKP PBB-P2 yang dapat diakses oleh masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar Rp. 69.196.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 69.022.800,00 (99,75%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 173.200,00 (0,25%).

7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Pada kegiatan ini dilaksanakan *monitoring, profiling, dan maintenance* alat fiskal elektronik serta terlaksananya penetapan, validasi, dan verifikasi pajak daerah yang terealisasi sepenuhnya dari target yang telah ditentukan.

Faktor yang mendukung tercapainya target tahun 2023 karena adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang disertai dengan inovasi yang diciptakan dalam rangka meningkatkan kinerja terkait

kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta didukung dengan infrastruktur digital yang berdampak dalam memberi kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena faktor internal dan eksternal yang mendukung. Faktor internal tersebut adalah pemanfaatan berbagai aplikasi yang mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta memudahkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan karena pada tahun ini efek dari Covid-19 tidak sebesar tahun sebelumnya yang sangat berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Untuk mengoptimalkan kinerja ke depan, dibutuhkan adanya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah (SIVERA), Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (e-SSPD), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Elektronik (e-DHKP) yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan masing-masing.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp. 382.080.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 381.048.847,00 (99,73%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.031.653,00 (0,27%).

8) Penagihan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Operasi Gabungan Pemasangan Plang Pengawasan PBB P2	2 Kali	2 Kali	100
3	Operasi Gabungan Pemasangan Stiker Pengawasan Pajak Daerah	2 Kali	2 Kali	100
4	Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen	2 Kali	2 Kali	100
5	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh	6 Kali	4 Kali	66,67
6	Terlaksananya Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah	8 Kali	8 Kali	100

7	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Kali	12 Kali	100
8	Terlaksananya Penertiban Reklame Non Permanen	144 Kali	144 Kali	100

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, di mana dalam kegiatan ini dilakukan upaya-upaya penindakan yang dilaksanakan baik berupa teguran lisan, tertulis, penutupan sampai dengan tindakan pembongkaran.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor, serta mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak reklame. Para Wajib Pajak diharapkan disiplin dan patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Bogor dan khususnya dalam kewajiban perpajakan di Kota Bogor.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait penagihan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang terhadap Wajib Pajak Daerah PBB P2 dengan jumlah yang diverifikasi adalah 4.326 NOP. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi terdapat 513 NOP yang minta untuk dihapuskan.
2. Melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor kaitan penyelesaian piutang PBB P2 dan Pajak Daerah Lainnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : 119/Perj.103-Bapenda/2023, Nomor : B-07/M.2.12/Gs/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Melalui kerja sama ini telah dilakukan upaya penagihan piutang Wajib Pajak sebanyak 67 Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp.10.401.325.609,- dan realisasi Rp. 1.245.410.909,-
3. Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pemasangan Plang dan Stiker Dalam Pengawasan terhadap 23 Wajib Pajak dengan jumlah piutang sebesar Rp. 6.662.359.259,- dan realisasi

sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.070.785.649,-.

4. Sebagai upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB, Bapenda Kota Bogor melaksanakan pelayanan Mobil Keliling Pembayaran PBB P2 di Kelurahan – Kelurahan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus dan September dengan realisasi pembayaran PBB P2 sebesar Rp. 4.935.498.385,- dan jumlah NOP sebanyak 10.201.
5. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah PBBP2 dilaksanakan operasi sisir penagihan pajak PBB P2 secara langsung ke wajib pajak yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember dengan realisasi sebesar Rp. 35.700.000.000,-.
6. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penertiban reklame permanen dan non permanen dengan hasil sebagai berikut:

Penertiban Reklame Non Permanen		
No.	**Jenis Reklame**	**Jumlah**
1.	Spanduk	3.104
2.	*Banner*	157
3.	Pamflet	1.892
4.	Umbul	3.124
	Jumlah	**8.277**
Penertiban Reklame Permanen		
1.	Pembongkaran	48

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan adalah perencanaan dilakukan pada awal tahun, sehingga target dan jadwal sudah tersedia. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengikuti target dan jadwal yang sudah disusun tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama dengan satu kegiatan yang tidak tercapai, yaitu Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan. Penyebab tidak tercapainya target pada kegiatan tersebut adalah proses MOU dengan kejaksaan yang belum selesai dan adanya

pergantian pejabat di lingkup kejaksaan negeri, sehingga kegiatan bantuan hukum menyesuaikan dengan keadaan tersebut.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja adalah penyusunan rencana kerja secara realistis dan menjalankan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun.

Sebagai alternatif untuk tahun selanjutnya diperlukan anggaran untuk menunjang kegiatan pembongkaran reklame melalui pihak ketiga, sehingga pelaksanaan penindakan pembongkaran reklame terhadap wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak atau yang tidak memiliki izin dapat berjalan dengan lancar.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 171.028.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 144.973.000,00 (84,77%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 26.055.000,00 (15,23%).

9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	Kajian Pemetaan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Risiko Ketidakpatuhan	1 Kajian	1 Kajian	100,00
3	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	2 Kali	2 Kali	100,00
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150 Wajib Pajak	168 Wajib Pajak	104,00

Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dilakukan terhadap 168 Wajib Pajak selama 1 tahun atas pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 102 Wajib Pajak Restoran, 27 Wajib Pajak Hiburan, 7 Wajib Pajak Hotel, 8 Wajib Pajak Parkir, dan 24 Wajib Pajak BPHTB.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut diperoleh hasil selisih (kurang/lebih) bayar pada pelaporan SPTPD sebesar Rp. 21.964.025.472 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Jumlah	Pemeriksaan (Rp)	Pengawasan (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Restoran	102	4.286.177.862	4.354.982.221	Kurang

					Bayar
2.	Pajak Hiburan	27	-	960.926.721	Kurang Bayar
3.	Pajak Hotel	6	11.863.727.790	542.398.006	Kurang Bayar
		1	(150.000)	-	Lebih Bayar
4.	Pajak Parkir	8	-	36.184.000	Kurang Bayar
5.	BPHTB	20	179.204.972	-	Kurang Bayar
		4	(259.426.100)	-	Lebih Bayar
Total		**168**	**16.069.534.524**	**5.894.490.948**	

Bertambahnya jumlah SDM di Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta meningkatnya kualitas SDM setelah melaksanakan Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah menjadi faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja.

Bersamaan dengan dilakukannya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, tentunya evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan serta pembentukan tim pemeriksa dan penunjukan penanggung jawab telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

7. Belum diakomodasinya anggaran untuk melaksanakan observasi lapangan terhadap Wajib Pajak;
8. Belum tersedianya Data Dukung Rincian Omzet dan Data Potensi Wajib Pajak dalam aplikasi SIPDEH sehingga menyulitkan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak;
9. Wajib Pajak tidak menggunakan sistem kasir dan masih melakukan pencatatan secara manual sehingga tidka bisa menyampaikan data dan memenuhi permintaan data dari Tim Pengawasan;
10. Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pengawasan sehingga membuat proses pengawasan memakan waktu yang lama;

11. Wajib Pajak pemeriksaan tidak menyediakan data secara lengkap bahkan pada saat pemeriksaan lapangan dan pengambilan data dari sistem;
12. Data pembanding *bill* tidak tersedia;
13. Ketidakmampuan bayar Wajib Pajak;
14. Wajib Pajak belum memungut pajak dan tidak mau melakukan koreksi kurang bayar omzet.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar Rp. 89.195.700,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 87.631.100,00 (98,25%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.564.600,00 (1,75%).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM BAPENDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial;
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi
3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan pendanaan yang merupakan peran tugas Badan Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Dibutuhkan kerja keras Badan Pendapatan Daerah sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan Program Prioritas Kota Bogor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

Rencana Kerja Bapenda Bogor mencakup Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahu 2025 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026. Program yang disajikan sebagai strategi relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*).

Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Bapenda Kota Bogor.

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Berorientasi pada Hasil (Outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Dari uraian tersebut, maka hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program) yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Bogor.

Tujuan menjabarkan misi organisasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dan merupakan ukuran kinerja sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya tujuan, maka arah organisasi akan lebih jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang.

Pada masa pergantian kepemimpinan Kepala Daerah seperti saat ini, belum tersedianya Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih menjadikan Tujuan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 sebagai tujuan yang ingin diwujudkan selama dua tahun ke depan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai pedoman.

Bapenda Kota Bogor akan berupaya untuk mencapai Tujuan, yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata, dan Berkelanjutan” dengan Sasaran “Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif”, di mana Bapenda Kota Bogor akan berperan dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah kebijakan, serta "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan" dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup Perangkat Daerah sebagai arah kebijakan.

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sebagai penjabaran tujuan dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Penetapan sasaran akan sangat baik, apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas, berorientasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi Kota yang telah ditetapkan dan dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut, *"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah", "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah"*, dan *"Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah"*. Indikator Kinerja dari Sasaran Perangkat Daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam dua tahun ke depan. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2025 Perubahan	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83,20	83,20	83,30
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	95%	95%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100%	100%	100%
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 70)	1 Inovasi/ Tahun/PD	1 Inovasi/ Tahun/PD	1 Inovasi/ Tahun/PD
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup	93,74	93,74	93,88

	Publik di Lingkup Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			
3	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.578.673.043.360	1.722.779.509.687	1,675.250.889.178

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
serta merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Bapenda Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Dalam upaya mencapai tujuan, rencana program merupakan aplikasi
arah kebijakan dan cara mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun rencana program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu. Adapun kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Mebel
    3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan :
   1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
      1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
      2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
      3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
      4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
      5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
      6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
      7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
      8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
      9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
      10. Penagihan Pajak Daerah
      11. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Dari uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, masing-masing kegiatan memiliki pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, namun besaran dari pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Tahun Anggaran.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berisi Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebanyak 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Total Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57,433,618,241,00 dengan perubahan pagu menjadi Rp. 53.004.618.985,00. Nilai Total anggaran tersebut di alokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 akan dirinci pada Tabel sebagai berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENDAPATAN DAERAH							57.433.618.241,00	51.573.857.351,00	53.004.618.985,00							82.948.824.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							57.433.618.241,00	51.573.857.351,00	53.004.618.985,00							82.948.824.000,00	
	5	02				KEUANGAN							57.433.618.241,00	51.573.857.351,00	53.004.618.985,00							82.948.824.000,00	

1	5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di lingkungan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Pelayanan Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA				100 10,88 17,8 25,8 25,98 81,11 88.38 88,75 94 95 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %	100 10,88 17,8 25,8 25,98 81,11 88.38 88,75 94 95 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %	51.735.298.905,00	46.259.962.393,00	47.849.170.197,00							69.641.976.000,00	

	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu**	**-**			**100 %**	**100 %**	**17.747.000,00**	**14.601.600,00**	**9.499.700**			**-**	**-**	**Bapenda Kota Bogor**		**83.721.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	5	**02**	**01**	**2.01**	**0001**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2.211.000,00**	**1.768.800,00**	**1,105,500.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**8.576.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyusunan Dokumen Renja*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*											
	5	**02**	**01**	**2.01**	**0006**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				**4 Laporan**	**4 Laporan**	**12.989.000,00**	**10.795.200,00**	**7,288,700.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**70.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja*				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*											
							Penyusunan LKIP				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
							Penyusunan Draft Bahan LKPJ				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
							Penyusunan Draft Bahan LPPD				*1 Laporan*	*1 Laporan*											

							Belanja Penggandaan/Fotokopi				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Honorarium PPTK				*2 Orang/Bulan*	*2 Orang/Bulan*											
	5	**02**	**01**	**2.01**	**0007**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2.547.000,00**	**2.037.600,00**	**1,105,500.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**5.145.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penilaian RB*				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
							Evaluasi SAKIP				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
							Penilaian Identifikasi Risiko				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
							Penyusunan Draft Bahan EPPD				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA**	**-**			**100 % 95 %**	**100 % 95 %**	**40.851.835.465,00**	**33.205.342.769,00**	**35.150.401.455,00**			**-**	**-**	**Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan**		**58.282.915.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	5	**02**	**01**	**2.02**	**0001**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				**86 Orang/bulan**	**84 Orang/bulan**	**40.819.333.465,00**	**33.173.725.169,00**	**35,119,447,155.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum**	**-**	**-**			**58.219.390.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

																	(DAU)						
						Aktivitas:	*Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				100%	100%											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 02**	**00 05**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2.211.000, 00**	**1.768.800, 00**	**1,768,800. 00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**4.288.000, 00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*				*1 Laporan*	*1 Laporan*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 02**	**00 07**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				**2 Laporan**	**2 Laporan**	**30.291.00 0,00**	**29.848.80 0,00**	**29,185,50 0.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**59.237.00 0,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran*				*2 Laporan*	*2 Laporan*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 06**		**Administra si Umum Perangkat**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan**	**-**			**100 %**	**100 %**	**2.252.629. 100,00**	**3.887.488. 000,00**	**3.739.902. 717,00**			**-**	**-**	**ASN Bapen da**		**3.525.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN**

						Daerah	**Operasional Perangkat Daerah**													**Kota Bogor**			**DAERAH**
	5	**02**	**01**	**2.06**	**0001**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				**1 Paket**	**1 Paket**	**51.180.300,00**	**51.180.300,00**	**58,697,100.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**100.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyediaan Alat Listrik*				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**02**	**01**	**2.06**	**0002**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				**1 Paket**	**1 Paket**	**235.833.900,00**	**503.461.900,00**	**790,945,995.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**300.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan Komputer*				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**02**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				**1 Paket**	**1 Paket**	**89.169.500,00**	**76.098.000,00**	**83,939,600.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**100.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengisian Tabung Gas 12 Kg				*60 Tabung*	*60 Tabung*											

							Penyediaan Kebutuhan Alat Kebersihan				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 06**	**00 04**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				**1 Paket**	**1 Paket**	**150.233.6 00,00**	**150.228.0 00,00**	**150,228,0 00.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**75.000.00 0,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk Pelayanan Wajib Pajak*				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 06**	**00 05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				**1 Paket**	**1 Paket**	**252.521.7 00,00**	**1.160.198. 900,00**	**904,666,7 00.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**450.000.0 00,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penyediaan Barang Cetakan untuk PBB dan Keperluan Kantor Lainnya*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Barang Cetakan Karcis/Retribusi Untuk OPD Lain				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Sticker PBB				*1 Paket*	*0 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 06**	**00 09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.473.690.100,00**	**1.946.320.900,00**	**1,751,425,322.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**2.500.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyediaan Banner/Spanduk dan Karangan Bunga untuk Hari Besar Nasional*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum Rapat				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum Lapangan				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Kebutuhan Honor Narasumber Sosialisasi dan Honor PPTK				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Sewa Kendaraan untuk Study Tiru				*1 Paket*	*0 Paket*											
							Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Kota, dan Paket Meeting				*1 Paket*	*1 Paket*											

							Pembayaran Biaya Transportasi bagi Peserta Rapat dari Wilayah				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pelaksanaan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD**	**-**			**100 %**	**100 %**	**3.870.550. 500,00**	**3.869.929. 500,00**	**3.525.560. 140,00**			**-**	**-**	**ASN Bapen da Kota Bogor**		**498.750.0 00,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 07**	**00 02**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				**24 Unit**	**4 Unit**	**1.290.648. 900,00**	**1.290.404. 700,00**	**1,326,638, 400.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Bea Balik Nama Kendara an Bermoto r (BBNKB) Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**0,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Motor Operasional Dinas*				*1 Unit*	*2 Unit*											
							Mobil Operasional Dinas				*0 Unit*	*0 Unit*											
							Mobil Pelayanan Pajak Keliling				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor / Pick Up				*1 Unit*	*1 Unit*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 07**	**00 05**	**Pengadaan Mebel**																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				**120 Unit**	**43 Unit**	**184.623.400,00**	**184.328.700,00**	**210,909,340.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**238.750.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Filling Cabinet*				*4 Unit*	*4 Unit*											
							Kursi Roda				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Kursi Putar				*9 Buah*	*9 Buah*											
							Kursi Susun				*20 Unit*	*20 Unit*											
							Kursi Lipat				*0 Buah*	*16 Buah*											
							Meja Kerja Pegawai				*8 Unit*	*8 Unit*											
							Karpet Mushola				*1 Unit*	*1 Unit*											
	5	**02**	**01**	**2.07**	**0006**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				**49 Unit**	**54 Unit**	**2.395.278.200,00**	**2.395.196.100,00**	**1,988,012,400.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**260.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Instalasi Genset*				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Locker				*4 Unit*	*4 Unit*											
							Mesin Pelayanan				*10 Unit*	*6 Unit*											

							Anjungan Mandiri																
							Alat Penghancur Kertas				*6 Unit*	*6 Unit*											
							AC Split				*6 Unit*	*6 Unit*											
							Lemari Es				*3 Unit*	*3 Unit*											
							Dispenser				*8 Buah*	*8 Buah*											
							Unit Power Supply				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Speaker Aktif				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Microphone Amplifier				*1 Unit*	*1 Unit*											
							PC				*8 Unit*	*8 Unit*											
							Printer Dot Matrik				*2 Unit*	*6 Unit*											
							Scanner				*4 Buah*	*4 Buah*											
							Printer Ink Jet				*4 Unit*	*4 Unit*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**			**100 %**	**100 %**	**2.943.772. 873,00**	**3.343.697. 533,00**	**3.354.327. 617,00**			**-**	**-**	**Bapen da Kota Bogor**		**4.875.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 08**	**00 01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**7.438.200, 00**	**407.438.2 00,00**	**15,188,20 0.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**25.000.00 0,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penyediaan Materai*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Honorarium Petugas Penempel Sticker PBB/Distribusi SPPT PBB				*1 Paket*	*0 Paket*											
							Pembayaran Langganan Surat Kabar				*1 Paket*	*1 Paket*											

	5	**0 2**	**0 1**	**2. 08**	**00 02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.527.173. 249,00**	**1.527.173. 249,00**	**1,535,984, 033.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Opsen Bea Balik Nama Kendara an Bermoto r (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)**	**-**	**-**			**1.750.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Tagihan Listrik*				*1 Paket*	*1 Paket*										
							Tagihan Air				*1 Paket*	*1 Paket*										
							Tagihan Telepon				*1 Paket*	*1 Paket*										
							Mengirimkan tagihan PBB dan Tagihan PKB/BBNKB lewat WA Blast, Menyediakan Internet Dedicated, dan Kuota Internet Mobil Keliling				*1 Paket*	*1 Paket*										
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 08**	**00 04**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.409.161. 424,00**	**1.409.086. 084,00**	**1,803,155, 384.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendap atan Bagi Hasil Dana Alokasi**	**-**	**-**			**3.100.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**

																	Umum (DAU)						
						Aktivitas:	*Pengadaan Tenaga Non ASN Bapenda (Tenaga Administrasi)*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengadaan Tenaga Non ASN Bapenda (Tenaga Security)				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengadaan Tenaga Non ASN Bapenda (Tenaga Kebersihan)				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengadaan Tenaga Non ASN Bapenda (Tenaga Customer Service)				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengadaan Tenaga Non ASN Bapenda (Tenaga Supir)				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Petugas Penelusur Opsen PKB/BBNKB				*0 Paket*	*1 Paket*											
							Petugas Opsir				*0 Paket*	*1 Paket*											
							Apresiasi Kelurahan Terbaik				*0 Paket*	*1 Paket*											
							Pakaian Dinas Lapangan Sekretariat				*1 Paket*	*1 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik**	**-**			**100 %**	**100 %**	**1.798.763. 967,00**	**1.938.902. 991,00**	**2.069.478. 568,00**			**-**	**-**	**Inventaris Bapenda Kota Bogor**		**2.376.590. 000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 09**	**00 02**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				**48 Unit**	**48 Unit**	**421.189.951,00**	**384.029.951,00**	**411,349,530.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**626.590.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan*				*48 Unit*	*48 Unit*											
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berpenumpang/Operasional				*11 Unit*	*11 Unit*											
							Bahan Bakar Genset				*0 Unit*	*3 Unit x 19.655 Liter x 2 Kali x 3 Bulan*											
							Bahan Bakar Kendaraan Operasional (Residu)				*0 Unit*	*1 Kendaraan x 20 Liter x 4 Minggu x 4 Bulan*											
							Bahan Bakar Minyak (Dexlite)				*0 Unit*	*20 Liter x 4 Minggu x 4 Bulan*											
	5	**02**	**01**	**2.09**	**0006**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				**194 Unit**	**133 Unit**	**484.008.139,00**	**582.928.460,00**	**453,924,282.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**700.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Pemeliharaan Lift*				*1 Unit*	*1 Unit*											

							Pemeliharaan Genset				*3 Unit*	*3 Unit*											
							Pemeliharaan Pompa				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Pemeliharaan Mesin Fotokopi				*2 Unit*	*1 Unit*											
							Pemeliharaan Mesin Perforasi				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Peneliharaan AC				*67 Unit*	*66 Unit*											
							Pemeliharaan PC				*56 Unit*	*28 Unit*											
							Pemeliharaan Printer				*50 Unit*	*25 Unit*											
							Pemeliharaan Scanner				*10 Unit*	*5 Unit*											
							Pemeliharaan CCTV				*1 Paket*	*0 Paket*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 09**	**00 09**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**1 Unit**	**1 Unit**	**392.312.000,00**	**392.312.000,00**	**694,412,176.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**1.000.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Pemeliharaan Gedung Kantor*				*2.204 m2*	*1.654 m2*											
							Revitalisasi Depo Arsip				*0 m2*	*2.248 m2*											
	5	**0 2**	**0 1**	**2. 09**	**00 10**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**2 Unit**	**6 Unit**	**501.253.877,00**	**579.632.580,00**	**509,792,580.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**50.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Kajian Pemeliharaan Drainase*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Partisi Skat Mushola				*2 Buah*	*2 Buah*											

							Pemeliharaan Halaman Kantor (Rooftop)				*13.326 m2*	*10.837 m2*											
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Halaman Gedung Kantor				*14.540 m2*	*11.825 m2*											
							Penataan Ruang Arsip				*562 m2*	*462 m2*											
							Pemeliharaan Jaringan Listrik				*60 Titik*	*60 Titik*											
2	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Target Penerimaan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah**				**1.144.382.200.000,0027,47˙ Rupiah %**	**1.159.247.898.07519,05 Rupiah %**	**5.698.319.336,00**	**5.313.894.958,00**	**5.155.448.788,00**							**13.306.848.000,00**	
	5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Capaian Nilai Pajak Daerah Target Penerimaan Pajak Daerah**	**-**			**100 % 1.144.382.200.000,00 Rupiah**	**100 % 1.159.247.898.075 Rupiah**	**5.698.319.336,00**	**5.313.894.958,00**	**5.155.448.788,00**			**-**	**-**	**Wajib Pajak Daerah Kota Bogor**		**13.306.848.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
	5	**02**	**04**	**2.01**	**0002**	**Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**170.675.300,00**	**128.725.700,00**	**113,048,100.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**2.428.797.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Ketetapan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan serta Penghapusan Denda Administratif*				*1 Peraturan*	*1 Peraturan*											
							Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait Retribusi Daerah				*1 Peraturan*	*1 Peraturan*											

							Penyusunan SK Insentif				*4 Peraturan*	*4 Peraturan*											
							Penyusunan SK Penjabaran Target (Target Per Tahun, Target Per Triwulan, dan Perubahan Per Triwulan				*3 Dokumen*	*3 Dokumen*											
							Penyusunan SK Penetapan NJOP				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*											
							Penyusunan SK Gebyar Pajak				*1 Dokumen*	*1 Dokumen*											
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PAD				*4 Kali*	*1 Kali*											
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN				*1 Kali*	*1 Kali*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 03**	**Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.475.039. 498,00**	**1.231.888. 370,00**	**1,031,521, 170.00**	**Kota Bogor, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa**	**PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**2.000.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Frekuensi Sosialisasi Pajak Daerah*				*300 Wajib Pajak*	*300 Wajib Pajak*											
							Pembuatan Leaflet Informasi PBJT				*500 Lembar*	*350 Lembar*											
							Pembuatan Leaflet Informasi Opsen PKB				*800 Lembar*	*800 Lembar*											
							Pembuatan Leaflet Informasi Opsen BBNKB				*200 Lembar*	*200 Lembar*											
							Pembuatan				*500 Buah*	*350 Buah*											

							Maklumat Informasi PBJT																
							Pembuatan Roll Up Banner Informasi PBJT				*395 Set*	*276 Set*											
							Pembuatan Spanduk Informasi PBJT				*1.028 Meter*	*717 Meter*											
							Pembuatan Spanduk Informasi Opsen PKB				*372 Meter*	*372 Meter*											
							Pembuatan Spanduk Informasi Opsen BBNKB				*72 Meter*	*72 Meter*											
							Pembuatan Plakat Penghargaan untuk PBJT				*30 Buah*	*0 Buah*											
							Pembuatan Plakat Penghargaan untuk Opsen PKB				*20 Buah*	*20 Buah*											
							Pembuatan Boneka untuk Souvenir Pekan Panutan Pembayaran PBB P2				*200 Buah*	*0 Buah*											
							Pembuatan Bantal untuk Souvenir Pekan Panutan Pembayaran PBB P2				*200 Buah*	*0 Buah*											
							Pembuatan Payung untuk Souvenir Pekan Panutan Pembayaran PBB P2				*200 Buah*	*0 Buah*											
							Pembuatan Tas Lipat untuk Souvenir Pekan Panutan Pembayaran PBB P2				*400 Buah*	*0 Buah*											

							Pembuatan Boneka untuk Souvenir Gebyar Pajak Daerah				*300 Buah*	*0 Buah*											
							Pembuatan Tas Transparan/Kantong Wadah untuk Souvenir Gebyar Pajak Daerah				*300 Buah*	*0 Buah*											
							Penyelenggaraan Pekan Panutan Pembayaran PBB P2				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Penyelenggaraan Gebyar Pajak Daerah				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Publikasi Informasi PBJT melalui Koran				*55 Halaman*	*55 Halaman*											
							Publikasi Informasi PBJT melalui Online				*55 Tayang*	*55 Tayang*											
							Publikasi Informasi PBJT melalui Radio				*26 Tayang*	*26 Tayang*											
							Publikasi Informasi Opsen PKB melalui Online				*25 Tayang*	*25 Tayang*											
							Publikasi Informasi Opsen PKB melalui Radio				*18 Tayang*	*18 Tayang*											
							Publikasi Informasi Opsen BBNKB melalui Online				*8 Tayang*	*0 Tayang*											
							Publikasi Informasi Opsen BBNKB melalui Radio				*4 Tayang*	*0 Tayang*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 04**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				**4 Unit**	**25 Unit**	**1.524.662.524,00**	**1.512.174.124,00**	**1,598,439,024.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)**	**-**	**-**			**2.287.100.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
							Penyediaan Paket Data Internet atau Tagihan Kartu Halo QRIS				*12 Bulan*	*12 Bulan*											
							Sewa Colocation Server Aplikasi Perpajakan				*1 Tahun*	*1 Tahun*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Contact Center				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-SPPT PBB				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Host To Host Pajak dan Retribusi, Kode Pembayaran, VA, dan PCPD				*0 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Lapak On				*1 Paket*	*1 Paket*											

							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perkantoran				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBPHTB				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPDEH				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SISMIOP				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Berbasis Geospasial				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pengadaan UPS 10 KVa				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Pembelian LAN Card Server				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Pengadaan Gimbal Stabilizer Kamera				*1 Unit*	*0 Unit*											
							Pengadaan Tang Potong				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Pengadaan Tang Crimping				*4 Unit*	*4 Unit*											
							Pengadaan Kabel UTP				*1 Unit*	*1 Unit*											
							Pengadaan Konektor RJ 45				*5 Unit*	*5 Unit*											
							Pengadaan LAN Tester				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Pengadaan Switch 16 Port				*2 Unit*	*2 Unit*											
							Pengadaan Switch 24 Port				*6 Unit*	*6 Unit*											
							Kajian Master Plan IT Tahun 2026 sd tahun 2030 Bapenda Kota Bogor				*0 Dokumen*	*1 Dokumen*											

	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 05**	**Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**																	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**80.794.000,00**	**69.666.600,00**	**49,699,000.00**	**Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**400.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penjaringan Wajib Pajak Baru*				*50 Wajib Pajak*	*50 Wajib Pajak*											
							Penyelenggaraan Bimtek Pajak Daerah				*1 Kali*	*1 Kali*											
							Pengadaan Kaos Lapangan/Pakaian Petugas Pendata PBJT				*55 Buah*	*55 Buah*											
							Pengadaan Rompi Petugas Pendata PBJT				*104 Buah*	*104 Buah*											
							Belanja Cetak (Spanduk)				*12 Meter*	*0 Meter*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 06**	**Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**877.037.400,00**	**856.295.600,00**	**856,295,600.00**	**Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**3.500.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

						Aktivitas:	*Jumlah Objek Pajak yang Dilakukan Pemutakhiran Basis Data*				*66.000 Objek Pajak*	*66.000 Objek Pajak*											
							Pemutakhiran Basis Data				*1 Kegiatan*	*1 Kegiatan*											
							Belanja Cetak Peta Blok				*400 Lembar*	*400 Lembar*											
							Tenaga Ahli Untuk Pemutakhiran Basis Data				*1 Orang x 10 Bulan*	*1 Orang x 10 Bulan*											
							Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Pendata PBB-P2				*50 Buah*	*50 Buah*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 07**	**Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**																	
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				**5 Objek Pajak**	**5 Objek Pajak**	**316.732.1 00,00**	**314.235.3 00,00**	**316,255,3 00.00**	**Kota Bogor, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**1.000.000. 000,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Jumlah Objek Pajak yang Dilakukan Penilaian Individu*				*10 Objek Pajak*	*10 Objek Pajak*											
							Petugas Pendata Harga Pasar				*4.668 Objek Pajak*	*4.668 Objek Pajak*											
							Tenaga Ahli Penilaian PBB				*1 Orang x 10 Bulan*	*1 Orang x 10 Bulan*											
							Kajian Penilaian Zona Nilai Tanah/Penyesuaian NJOP				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Rompi)				*111 Buah*	*111 Buah*											

							Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Kaos Lapangan)				*111 Buah*	*111 Buah*											
							Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Sepatu Lapangan)				*111 Buah*	*111 Buah*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 08**	**Penetapan Wajib Pajak Daerah**																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**107.120.3 00,00**	**85.859.10 0,00**	**66,568,20 0.00**	**Kota Bogor, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa**	**Pendap atan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**205.699.0 00,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**
						Aktivitas:	*Penetapan Pajak Air Tanah*				*192 Ketetapan*	*192 Ketetapan*											
							Penetapan Pajak Reklame				*3.600 Ketetapan*	*3.600 Ketetapan*											
							Validasi BPHTB				*6.000 Berkas*	*6.000 Berkas*											
							Penjilidan Buku DHKP dan Buku Klasifikasi NJOP PBB-P2				*354 Buku*	*275 Buku*											
							Flash Disk Custom - DHKP Dan Klasifikasi NJOP PBB-P2				*6 Buah*	*6 Buah*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 09**	**Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**																	
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				**1 Layanan**	**1 Layanan**	**77.543.76 4,00**	**77.344.96 4,00**	**62,234,19 4.00**	**Kota Bogor, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Bogor, Tanah**	**Pendap atan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)**	**-**	**-**			**270.000.0 00,00**	**BADAN PENDA PATAN DAERA H**

																Sareal, Tanah Sareal							
						Aktivitas:	*Jasa Audit/Surveillance ISO*				*1 Paket*	*1 Paket*											
							Pemeliharaan Call Center				*12 Bulan*	*2 Bulan*											
							SPOP/LSPOP				*0 Rim*	*36 Rim*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 10**	**Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**																	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**475.987.900,00**	**475.987.900,00**	**475,987,900.00**	**Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**708.546.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hiburan*				*192 Wajib Pajak*	*192 Wajib Pajak*											
							Verifikasi dan Penghitungan Pajak Hotel				*274 Wajib Pajak*	*274 Wajib Pajak*											
							Verifikasi dan Penghitungan Pajak Parkir				*612 Wajib Pajak*	*612 Wajib Pajak*											
							Verifikasi dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan				*12 Berkas*	*12 Berkas*											
							Verifikasi dan Penghitungan Pajak Restoran				*1.829 Wajib Pajak*	*1.829 Wajib Pajak*											
							Penyediaan Pakaian Dinas Lapangan Petugas Verifikator Pajak				*7 Buah*	*7 Buah*											

							Penyediaan Paket Data Internet Tapping Box				*97 Buah x 12 Bulan*	*97 Buah x 12 Bulan*											
							Pemeliharaan Tapping Box				*97 Unit x 10 Bulan*	*97 Unit x 10 Bulan*											
	5	**0 2**	**0 4**	**2. 01**	**00 11**	**Penagihan Pajak Daerah**																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**529.527.750,00**	**524.864.900,00**	**576,028,300.00**	**Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**300.000.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen*				*4 Kali*	*4 Kali*											
							Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah				*8 Kali*	*8 Kali*											
							Penagihan Piutang Pajak Daerah				*12 Kali*	*12 Kali*											
							Penertiban Reklame Non Permanen				*144 Kali*	*144 Kali*											
							Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh				*6 Kali*	*6 Kali*											
							Operasi Gabungan Pemasangan Plang dan Stiker Pengawasan PBB P2				*4 Kali*	*4 Kali*											

							Honorarium Penelusur Keg. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				*42.500 Objek Pajak*	*0 Objek Pajak*											
							Honorarium Penelusur Keg. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB)				*42.500 Objek Pajak*	*0 Objek Pajak*											
							Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Penelusur				*0 Stel*	*0 Stel*											
							Penyediaan Pakaian Kerja Penagihan dan Penindakan Pajak Daerah				*15 Stel*	*15 Stel*											
							Penyediaan Sepatu Safety				*15 Pasang*	*15 Pasang*											
							Pengadaan Mata Gurinda / Gerinda Potong Besi 16 Inch				*0 Buah*	*24 Buah*											
							Jasa Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Bogor				*60 Orang/Kegiatan*	*60 Orang/Kegiatan*											
							Pembongkaran Reklame Melalui Pihak Ketiga (Luas 40 m2 s/d 50 m2)				*2 Unit*	*14 Unit*											
							Pembongkaran Reklame Melalui Pihak Ketiga (Luas Lebih Dari 50 m2)				*1 Unit*	*3 Unit*											
							Penyediaan Tali Karmantel Statis				*0 Roll*	*1 Roll*											
							Penyediaan Tang Potong				*0 Buah*	*4 Buah*											
							Penyediaan Palu 1 Kg				*0 Buah*	*4 Buah*											

							Penyediaan Sarung Tangan Karet Heavy Duty				*0 Pasang*	*4 Pasang*											
							Penyediaan Head Lamp Rescue				*0 Buah*	*4 Buah*											
							Penyediaan Topi Pelindung (Safety Helmet)				*0 Buah*	*10 Buah*											
							Makan dan Minum Aktivitas Lapangan				*0 Box*	*0 Box*											
							Kajian Penyelenggaraan Reklame				*0 Paket*	*1 Paket*											
							Penyediaan Materai				*250 Lembar*	*250 Lembar*											
							Belanja Cetak Spanduk Dalam Pengawasan Pajak Daerah				*50 Meter*	*50 Meter*											
	5	**02**	**04**	**2.01**	**0015**	**Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**																	
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**63.198.800,00**	**36.852.400,00**	**9,372,000.00**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**206.706.000,00**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
						Aktivitas:	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*				*2 Kali*	*1 Kali*											
	5	**02**	**04**	**2.01**	**0013**	**Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**0**	**0**	**0**	**Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal**	**Pendapatan Bagi Hasil**	**-**	**-**			**0**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

						Aktivitas:	*Jumlah Wajib Pajak yang Diperiksa di Luar Klarifikasi*				*75 Wajib Pajak*	*75 Wajib Pajak*											
												J U M L A H	**57.433.618.241,00**	**51.573.857.351,00**	**53.004.618.985,00**							**82.948.824.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman dasar untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mencapai Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebijakan pada tahun yang ditetapkan.

Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra PD, RKPD dan RPD Kota Bogor) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk mempersiapkan diri agar dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Kebutuhan Anggaran Belanja untuk pencapaian program-program yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 53.004.618.985,00 dengan 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri 1 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menerapkan manajemen strategis sebagai langkah awal dalam menentukan strategi ke depan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan apa yang dituangkan dalam Rencana Strategis dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang lebih baik.

Lampiran cc. Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor tahun 2025.

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

sampai dengan dengan triwulan I (satu) tahun 2025

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor sampai dengan triwulan satu tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepatsasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta

triwulan I (satu) tahun 2025.

5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

   2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
14. Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Renja perubahan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 46.231.923.576,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan I sebesar Rp. 17.828.685.622,00 atau 38,56 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Maret 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target RPD Tahun 2025-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
													I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13 = 12/6*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**47.544.182.076**			**54.476.121.956**			**81.376.125.425**		**17.828.685.622**		**26.047.400.734**						**43.655.163.790**								
	7	**NON URUSAN**				**10.003.176.476**			**6.808.718.861**			**9.090.624.508**		**1.555.454.822**		**3.183.471.577**						**4.518.003.833**			**0,00**	**11.326.722.694**	**-**	**2.265.344.538,80**		
1	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	24,00	Angka	**10.003.176.476**	23,53	Angka	**6.808.718.861**			**9.090.624.508**		**1.555.454.822**		**3.183.471.577**					**0**	**4.518.003.833**	**162,20**	**238,33**	**400,00**	**11.087.438.036**	**123,9**	**47,11**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			Nilai SaKIP Aspek Pengukuran Kinerja	26,80	Angka		26,78	Angka																						
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	13	Angka		12,05	Angka																						
1	**8.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, perangkat Daerah**	100	Persen	**30.999.800**	100	Persen	**36.118.000**	100	Persen	**14.244.800**		**3.000.000**		**10.510.000**					**-**	**13.510.000**	**-**	**94,84**	**1,00**	**49.628.000**	**1,59**	**1.417.943**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			Prosentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	8	Persen																									
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	9	Dokumen	30.999.800	1	Dokumen	36.118.000	1	Dokumen	14.244.800		3.000.000		10.510.000					-	13.510.000	-	-	1,00	49.628.000	**11,11**	**9.925.600**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**-**	**94,84**			**#REF!**	**#REF!**		
																						Predikat kinerja	**SR**	**ST**			**#REF!**	**#REF!**		
2	**8.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**6.044.185.795**	**100**	**Persen**	**5.003.012.817**	**100**	**Persen**	**5.286.502.205**	**25**	**1.118.518.957**		**2.414.880.340**					**25**	**3.533.399.297**	**89,29**	**66,84**	**125,00**	**8.536.412.114**	**50,48**	**47**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	6.044.185.795	28	Orang	5.003.012.817	28	Orang	5.286.502.205	25	1.118.518.957		2.414.880.340					25	3.533.399.297	89,29	66,84	53,00	8.536.412.114	151,4	141,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**89,29**	**66,84**			**#REF!**	**#REF!**		
																						Predikat kinerja	**T**	**S**			**#REF!**	**#REF!**		
3	**8.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan data kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**2.787.725.700**	**100**	**Persen**	**1.358.586.675**	**100**	**Persen**	**2.039.547.179**	**25**	**332.405.765**		**555.843.771**					**25**	**888.249.536**	**56,25**	**43,55**	**125,00**	**2.246.836.211**	**590,48**	**69**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	481.764.900	12	Paket	127.575.600	12	Paket	236.019.580	25	162.300.100		221.783.600					25	384.083.700	208,33	**162,73**	37,00	511.659.300	3.700,0	106,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	1	Paket	30.660.600			-				-														
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	462.484.400	1	Paket	144.437.400	1	Paket	331.049.923		91.870.000		148.170.700					-	240.040.700	-	72,51	1,00	384.478.100	100,0	83,13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	13.946.400	1	Dokumen	11.910.000	1	Dokumen	11.980.800		3.025.000		6.490.000					-	9.515.000	-	79,42	1,00	21.425.000	100,0	153,62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.08	Penyediaan Makanan dan Minuman / Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	243.000.000	12	Laporan	47.655.495	12	Laporan	224.460.000	1	31.500.000	1	81.900.000					2	113.400.000		50,52	14,00	161.055.495	116,7	66,28		
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.586.530.000	12	Laporan	996.347.580	12	Laporan	1.236.036.876	1	43.710.665	1	97.499.471					2	141.210.136	16,67	11,42	14,00	1.137.557.716	116,7	71,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**56,25**	**43,55**			**#REF!**	**#REF!**		
																						Predikat kinerja	**R**	**SR**			**#REF!**	**#REF!**		
4	**8.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**75**	Persen	**637.417.400**	**50**	Persen	**0**			**1.223.737.998**										**0**	**-**	**-**	**50,00**	**0**	**100**	**-**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit					1	Unit	591.460.000																		
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	Paket	274.444.600	1	Paket						-							-	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**	1,00	0	100	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	362.972.800	1	Unit		1	Unit	128.663.200		-							-	-	-	-	1,00	0	100	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket					1	Paket	503.614.798																		
5	**8.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**290.307.116**	**100**	**Persen**	**239.284.658**			**276.270.974**	**25**	**79.710.100**		**141.212.466**						**220.922.566**	**#DIV/0!**	**79,97**	**100,00**	**460.207.224**	**1,00**	**158,52**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	39.985.100	12	Laporan	48.018.908	12	Laporan	276.270.974	1	9.430.100	1	18.251.858					2	27.681.958	16,67	**10,02**	14,00	75.700.866	116,7	189,3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan	12	Bulan	250.322.016	12	Bulan	191.265.750				1	70.280.000	1	122.960.608					2	193.240.608	#DIV/0!	**#DIV/0!**	14,00	384.506.358	116,7	153,6		
6	**8.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dilingkup Bakesbangpol berkodisi baik**	**100**	**Persen**	**212.540.665**	**100**	**Persen**	**171.716.711**			**250.321.352**	**25**	**21.820.000**		**61.025.000**						**82.845.000**	**16,67**	**33,10**	**100,00**	**254.561.711**	**1,00**	**119,77**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah servis kendaraan	6	Unit	179.821.105	3	Unit	122.736.708	3	Unit	208.050.000	1	15.600.000		47.745.000					1	63.345.000	33,33	**30,45**	4,00	186.081.708	66,7	103,5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	1	Unit	32.719.560	1	Unit	48.980.003	1	Unit	42.271.352		6.220.000		13.280.000					-	19.500.000	-	**46,13**	1,00	68.480.003	100,0	209,3		
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**16,67**	**33,10**			**66,67**	**103,48**		
																						Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#REF!**	**49,70**			**#REF!**	**#REF!**		
																						Predikat kinerja	**#REF!**	**SR**			**#REF!**	**#REF!**		
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**37.541.005.600**			**47.667.403.095**			**72.285.500.917**		**16.273.230.800**		**22.863.929.157**						**39.137.159.957**			**0,00**	**86.804.563.052**	**-**	**231,23**	**Kecamatan Cisarua**	
2	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk**	**13**	**Rasio**	**783.260.200**	**13**	**Rasio**	**266.166.800**	**13**	**Rasio**	**1.096.107.659**		**8.410.000**		**26.756.000**						**35.166.000**				**301.332.800**	**-**	**38,47**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
7	**8.01.02.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah msyarakat yang memperoleh penyuluhan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang di implementasikan**	**81.600**	**Orang**	**783.260.200**	**####**	**Orang**	**266.166.800**	**81.600**	**Orang**	**1.096.107.659**		**8.410.000**		**26.756.000**						**35.166.000**	**#DIV/0!**	**3,21**	**81600,00**	**301.332.800**	**20**	**15**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan Kader Penyuluh Wasbang	2	Kegiatan	396.558.000	2	Kegiatan	266.166.800	2	Kegiatan	1.096.107.659		8.410.000		15.846.000						24.256.000	-	2,21	2,00	290.422.800	100,00	73,24	BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.06	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	60	Orang	386.702.200	0	Orang	-							10.910.000,00						10.910.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	10.910.000	-	2,82		
																						Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**#DIV/0!**	**3,21**			**-**	**2,82**		
																						Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**SR**	**SR**		
																						Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#DIV/0!**	**3,21**			**#REF!**	**#REF!**		
																						Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**#REF!**	**#REF!**		
3	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pendidikan Politik	**100**	**Persen**	**5.681.392.800**	100	Persen	**34.020.325.867**	**100**	**Persen**	**43.219.714.901**		**19.710.800**		**3.338.496.400**						**3.358.207.200**				**37.378.533.067**	**-**	**657,91**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Subkegiatan	Target RPD Tahun 2025-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
													I (Jan-Mar)		II (Apr-Jun)		III (Jul-Sept)		IV (Okt-Des)											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13 = 12/6*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16	17
			- Persentase Partai Politik dalam Pemilu	0	Persen		100	Persen																						
			- Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legeslatif	0	Persen		22	Persen																						
8	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100**	**Persen**	**5.681.392.800**	**100**	**Persen**	**34.020.325.867**	**100**	**Persen**	**43.219.714.901**		**19.710.800**		**3.338.496.400**					**3.358.207.200**	**#DIV/0!**	**7,77**	**100,00**	**37.378.533.067**	**40**	**#REF!**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi regulasi tentang Bantuan Keuangan bagi Partai Politik, Terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik							1	Kegiatan	43.219.714.901																		
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dialog Politik (Partai Politik, Tokoh Masyarakat,Perempuan dan Generasi Muda)	1	Kegiatan	5.681.392.800	1	Kegiatan	34.020.325.867					19.710.800		3.338.496.400					3.358.207.200	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	37.378.533.067	100,00	657,91		
			Pemantauan Situasi Politik (terkait pilkada, Caleg, Gubernur dan ketertinan	1	Bulan		1	Bulan													-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	-	100,00	#DIV/0!		
																					Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**#DIV/0!**	**7,77**			**100,00**	**#DIV/0!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**ST**	**#DIV/0!**		
																					Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#DIV/0!**	**7,77**			**#REF!**	**#REF!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**#REF!**	**#REF!**		
4	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Jumlah kebijakan dalam Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	1	Dokumen	**352.296.800**	1	Dokumen	**0**	1	Dokumen	**219.734.900**				**7.034.800**					**7.034.800**				**7.034.800**	**-**	**2,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			Penurunan Jumlah pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika Persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	0,0011	Angka		0,0001	Angka		0,00013	Angka																			
9	**8.01.05.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Jumlah Dokumen dalam Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	1	Dokumen	**352.296.800**	1	Dokumen	**0**			**219.734.900**				**7.034.800**					**7.034.800**	**#DIV/0!**	**3,20**	**1,00**	**7.034.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penghitungan Survei Kerukunan Umat Beragama	79,26	Angka	352.296.800	79,16	Angka	-	79,16	Angka	219.734.900				7.034.800					7.034.800	-	3,20	79,16	7.034.800	99,87	2,00		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	150	Orang		150	Orang		150	Orang										-	-	#DIV/0!	150,00	-	100,00	#DIV/0!		
																					-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
																					Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**#DIV/0!**	**3,20**			**100,00**	**#DIV/0!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**ST**	**#DIV/0!**		
																					Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#DIV/0!**	**3,20**			**#REF!**	**#DIV/0!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**SR**			**#REF!**	**#DIV/0!**		
5	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik SARA yang Tertangan**	**100**	**Persen**	**29.261.634.200**	**100**	**Persen**	**11.980.910.428**	**100**	**Persen**	**26.965.887.257**		**16.245.110.000**		**18.565.551.157**					**34.810.661.157**				**46.791.571.585**	**40,00**	**159,91**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
10	**8.01.06.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase tersusunnya kebijakan teknis dalam rangka Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100**	**Persen**	**29.261.634.200**	**100**	**Persen**	**11.980.910.428**	**100**	**Persen**	**26.965.887.257**		**16.245.110.000**		**18.565.551.157**					**34.810.661.157**	**#DIV/0!**	**129,09**	**100,00**	**46.791.571.585**	**40**	**#DIV/0!**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Forkopimda Kota Bogor	12	Bulan	29.261.634.200	12	Bulan	11.980.910.428			-	1	16.245.110.000	1	18.565.551.157					34.810.661.157	#DIV/0!	#DIV/0!	12,00	46.791.571.585	100,00	159,91		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19	Orang		19	Orang													-	#DIV/0!	#DIV/0!	19,00	-	100,00	#DIV/0!		
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Forkopimda Kota Bogor, Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							12	Bulan	26.965.887.257																		
																					Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**#DIV/0!**	**129,09**			**100,00**	**#DIV/0!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**ST**			**ST**	**#DIV/0!**		
																					Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#DIV/0!**	**129,09**			**#REF!**	**#DIV/0!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**ST**			**#REF!**	**#DIV/0!**		
6	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**52,51**	**Persen**	**1.462.421.600**	**52**	**Persen**	**1.400.000.000**	**52**	**Persen**	**784.056.200**				**926.090.800**					**0**	**926.090.800**	**-**	**118,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**8.01.04.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100**	**Persen**	**1.462.421.600**	**100**	**Persen**	**1.400.000.000**	**100**	**Persen**	**784.056.200**				**926.090.800**					**0**	**926.090.800**	**-**	**118,12**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penerima Hibah Ormas	11	Ormas	1.462.421.600	11	Ormas	1.400.000.000	11	Ormas	784.056.200				926.090.800					-	926.090.800	-	118,12			-	-		
			Rakor Pemberdayaan Ormas	1	Kegiatan		1	Kegiatan													-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!		
			Peningkatan kelembagaan ormas (Bintek)	100	Orang			Orang													-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!		
																					Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	**#DIV/0!**	**118,12**			**#REF!**	**#REF!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**ST**			**#REF!**	**#REF!**		
																					Rata-rata capaian Kinerja Program (%)	**#DIV/0!**	**118,12**			**#REF!**	**#REF!**		
																					Predikat kinerja	**#DIV/0!**	**ST**			**#REF!**	**#REF!**		
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)	**#DIV/0!**	**53,65**			**#REF!**	**#REF!**		
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)	**#DIV/0!**	**R**			**#REF!**	**#REF!**		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR BARAT TAHUN 2025

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 44.476.337.739 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.383.171.239;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 91.788.200;
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 24.3000.000.
4. Pengadaan Mebel Rp. 147.795.400;
5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 165.154.300;
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 0;
7. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Usulan Pokir Rp. 73.1214.000;
8. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp. 5.673.883.500;
9. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp. 32.040.331.100.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2025- 2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.

Lampiran dd. Kecamatan Bogor Tengah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 1 (satu) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan satu tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sampai dengan triwulan satu tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
14. 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja KECAMATAN BOGOR TENGAH Tahun 2025

BAB IV Pen

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR TENGAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Renja perubahan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 5 program dengan anggaran sebesar Rp. 35.321.105.620,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan I sebesar Rp. 8.532.885.279 atau 24,16%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan I disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Maret 2025 masih rendah tetapi secara fisik ada beberapa kegiatan telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*			*7*			*8*			*12 = 8+9+10+11*			*13 = 12/7*100%*			*14 = 6+12*		*15 = 14/5*100%*			*16*
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																									
	2.13	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																									
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**IK : Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**	**100**	**%**	**2.436.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**2.436.600.000**	**25**	**%**	**609.150.000**	**25**	**%**	**609.150.000**	**25**	**%**	**609.150.000**		**615.750.000**	**25,271**	**%**		
			IK2 Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Keluraha yang Aktif	**100**	**%**		**NA**			**100**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**		**25**	**%**				**25,271**	**%**		
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100**	**%**	**2.436.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**2.436.600.000**	**25**	**%**	**609.150.000**	**25**	**%**	**609.150.000**	**25**	**%**	**609.150.000**		**615.750.000**	**25,271**	**%**		
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	6.600.000	100	%	6.600.000	100	%	6.600.000	25	%	1.650.000	25	%	1.650.000	25	%	1.650.000		8.250.000	125	%		Kasi Pemerintahan Kecamatan
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	192.600.000	NA	NA	-	100	%	192.600.000	25	%	48.150.000	25	%	48.150.000	25	%	48.150.000		48.150.000	25	%		Lurah Babakan
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	156.600.000	NA	NA	-	100	%	156.600.000	25	%	39.150.000	25	%	39.150.000	25	%	39.150.000		39.150.000	25	%		Lurah Cibogor
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	256.200.000	NA	NA	-	100	%	256.200.000	25	%	64.050.000	25	%	64.050.000	25	%	64.050.000		64.050.000	25	%		Lurah Ciwaringin
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	289.800.000	NA	NA	-	100	%	289.800.000	25	%	72.450.000	25	%	72.450.000	25	%	72.450.000		72.450.000	25	%		Lurah Gudang

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	245.400.000	NA	NA	-	100	%	245.400.000	25	%	61.350.000	25	%	61.350.000	25	%	61.350.000		61.350.000	25	%		Lurah Kebon Kalapa
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	320.400.000	NA	NA	-	100	%	320.400.000	25	%	80.100.000	25	%	80.100.000	25	%	80.100.000		80.100.000	25	%		Lurah Paledang
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	273.600.000	NA	NA	-	100	%	273.600.000	25	%	68.400.000	25	%	68.400.000	25	%	68.400.000		68.400.000	25	%		Lurah Tegallega
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	178.800.000	NA	NA	-	100	%	178.800.000	25	%	44.700.000	25	%	44.700.000	25	%	44.700.000		44.700.000	25	%		Lurah Sempur
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	224.400.000	NA	NA	-	100	%	224.400.000	25	%	56.100.000	25	%	56.100.000	25	%	56.100.000		56.100.000	25	%		Lurah Babakan Pasar
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	187.200.000	NA	NA	-	100	%	187.200.000	25	%	46.800.000	25	%	46.800.000	25	%	46.800.000		46.800.000	25	%		Lurah Panaragan
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	105.000.000	NA	NA	-	100	%	105.000.000	25	%	26.250.000	25	%	26.250.000	25	%	26.250.000		26.250.000	25	%		Lurah Pabaton
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**25**	**%**						
																			Predikat kinerja	**Sangat Rendah**						
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**25**	**%**						
																			Predikat kinerja	**Sangat Rendah**						
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**IK 1 : Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur**	**100**	**%**		**NA**			**100**	**%**			**%**											
			IK 2 : Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang Kelurahan	**20**	**%**	**2.461.790.820**	**NA**		**4.613.045.406**	**20**	**%**	**2.435.105.020**	**25**	**%**	**355.041.619**	**15**	**%**	**355.041.619**	**15**	**%**	**355.041.619**	**###########**			
			IK 3 : Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang Kelurahan	**2**	**%**		**NA**			**2**	**%**			**%**											
			IK 4 : Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang Kelurahan	**1**	**%**		**NA**			**1**	**%**			**%**											
			IK 5 : Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang Kelurahan	**100**	**%**		**NA**			**100**	**%**			**%**											
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**100**	**%**	**2.100.187.393**	**100**	**%**	**4.257.471.206**	**100**	**%**	**2.100.187.393**	**25**	**%**	**274.911.119**	**13**	**%**	**274.911.119**	**13**	**%**	**274.911.119**	**###########**			
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	1.049.600	1	Lembaga Kemasyara	1.312.000	1	Lembaga Kemasya	1.049.600	25	%	-	0	%	-	0	%	-	1.312.000	125	%		Lurah Babakan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	276.732.800	1	Unit	139.140.351	1	Unit	276.732.800	25	%	-	0	%	-	0	%	-	139.140.351	50	%		Lurah Babakan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	22.923.000	3	Pokmas / Orma	192.250.000	1	Pokmas /	22.923.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-	192.250.000	839	%		Lurah Babakan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.472.000	1	Lembaga Kemasyara	3.675.000	1	Lembaga Kemasya	2.472.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-	3.675.000	149	%		Lurah Cibogor
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	121.676.800	1	Unit	131.200.000	1	Unit	121.676.800	25	%	-	0	%	-	0	%	-	131.200.000	108	%		Lurah Cibogor
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.300.000	3	Pokmas / Orma	156.600.000	1	Pokmas /	21.300.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-	156.600.000	735	%		Lurah Cibogor

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.331.000	1	Lembaga Kemasyara	3.330.000	1	Lembaga Kemasya	2.331.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.330.000	143	%		Lurah Ciwaringin
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	138.048.000	2	Unit	136.249.906	1	Unit	138.048.000	25	%	18.562.000	13	%	18.562.000	13	%	18.562.000		154.811.906	112	%		Lurah Ciwaringin
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	27.971.500	3	Pokmas / Orma	256.200.000	1	Pokmas /	27.971.500	25	%	1.533.000	5	%	1.533.000	5	%	1.533.000		257.733.000	921	%		Lurah Ciwaringin
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.325.000	1	Lembaga Kemasyara	3.330.000	1	Lembaga Kemasya	2.325.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.330.000	143	%		Lurah Gudang
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	198.488.000	2	Unit	196.240.713	1	Unit	198.488.000	25	%	196.229.619	99	%	196.229.619	99	%	196.229.619		392.470.332	198	%		Lurah Gudang
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.300.000	3	Pokmas / Orma	321.591.400	1	Pokmas /	21.300.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		321.591.400	1510	%		Lurah Gudang
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	4.421.200	1	Lembaga Kemasyara	5.930.400	1	Lembaga Kemasya	4.421.200	25	%	-	0	%	-	0	%	-		5.930.400	134	%		Lurah Kebon Kalapa
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	121.575.200	1	Unit	125.460.000	1	Unit	121.575.200	25	%	-	0	%	-	0	%	-		125.460.000	103	%		Lurah Kebon
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.300.000	3	Pokmas / Orma	264.938.800	1	Pokmas /	21.300.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		264.938.800	1244	%		Lurah Kebon Kalapa
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	3.279.400	1	Lembaga Kemasyara	4.521.300	1	Lembaga Kemasya	3.279.400	25	%	-	0	%	-	0	%	-		4.521.300	138	%		Lurah Paledang
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	229.433.193	1	Unit	309.744.912	2	Unit	229.433.193	25	%	-	0	%	-	0	%	-		309.744.912	135	%		Lurah Paledang
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.656.400	3	Pokmas / Orma	320.400.000	1	Pokmas /	21.656.400	25	%	-	0	%	-	0	%	-		320.400.000	1479	%		Lurah Paledang
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.362.500	1	Lembaga Kemasyara	3.375.000	1	Lembaga Kemasya	2.362.500	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.375.000	143	%		Lurah Tegallega
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	192.379.500	1	Unit	192.437.500	1	Unit	192.379.500	25	%	-	0	%	-	0	%	-		192.437.500	100	%		Lurah Tegallega
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	23.010.000	3	Pokmas / Orma	273.600.000	1	Pokmas /	23.010.000	25	%	6.018.900	26	%	6.018.900	26	%	6.018.900		279.618.900	1215	%		Lurah Tegallega
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	3.150.000	1	Lembaga Kemasyara	4.500.000	1	Lembaga Kemasya	3.150.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		4.500.000	143	%		Lurah Sempur
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	127.572.300	1	Unit	114.478.000	1	Unit	127.572.300	25	%	16.206.000	13	%	16.206.000	13	%	16.206.000		130.684.000	102	%		Lurah Sempur
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.300.000	3	Pokmas / Orma	199.178.100	1	Pokmas /	21.300.000	25	%	5.324.700	25	%	5.324.700	25	%	5.324.700		204.502.800	960	%		Lurah Sempur
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	11.830.000	1	Lembaga Kemasyara	16.700.000	1	Lembaga Kemasya	11.830.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		16.700.000	141	%		Lurah Babakan Pasar
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	199.870.800	1	Unit	150.225.500	1	Unit	199.870.800	25	%	-	0	%	-	0	%	-		150.225.500	75	%		Lurah Babakan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.000.000	3	Pokmas / Orma	224.400.000	1	Pokmas /	21.000.000	25	%	3.825.000	18	%	3.825.000	18	%	3.825.000		228.225.000	1087	%		Lurah Babakan Pasar
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.325.000	1	Lembaga Kemasyara	3.330.000	1	Lembaga Kemasya	2.325.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.330.000	143	%		Lurah Panaragan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	102.643.200	2	Unit	129.309.724	1	Unit	102.643.200	25	%	-	0	%	-	0	%	-		129.309.724	126	%		Lurah Panaragan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.300.000	3	Pokmas / Orma	187.200.000	1	Pokmas /	21.300.000	25	%	4.639.000	22	%	4.639.000	22	%	4.639.000		191.839.000	901	%		Lurah Panaragan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasya	2.355.000	1	Lembaga Kemasyara	3.375.000	1	Lembaga Kemasya	2.355.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.375.000	143	%		Lurah Pabaton
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	109.806.000	1	Unit	78.247.600	1	Unit	109.806.000	25	%	14.307.900	13	%	14.307.900	13	%	14.307.900		92.555.500	84	%		Lurah Pabaton
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas /	21.000.000	3	Pokmas / Orma	105.000.000	1	Pokmas /	21.000.000	25	%	8.265.000	39	%	8.265.000	39	%	8.265.000		113.265.000	539	%		Lurah Pabaton
															Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)				**8**								
																		Predikat kinerja			**Sangat Rendah**						
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**361.603.427**		**%**	**355.574.200**	**100**	**%**	**334.917.627**	**25**	**%**	**80.130.500**	**24**	**%**	**80.130.500**	**24**	**%**	**80.130.500**		**435.704.700**				
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lem	30.573.600	1	Lembaga	37.473.400	1	Lembaga	21.452.300	25	%	-	0	%	-	0	%	-		37.473.400	123	%		Kasi Kemasyara
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lem	283.865.827	2	Lembaga	309.070.800	1	Lembaga	280.001.827	25	%	80.130.500	29	%	80.130.500	29	%	80.130.500		389.201.300	137	%		Kasi Kemasyara

	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	37.024.800	0	Laporan	-	1	Laporan	24.597.300	25	%	-	0	%	-	0	%	-		-	0	%	Kasi Perekonomian
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Lapo	10.139.200	1	Laporan	9.030.000	1	Laporan	8.866.200	25	%	-	0	%	-	0	%	-		9.030.000	89	%	Kasi Perekonomi
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**7**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**15**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan**	**88,1**	**%**	**132.274.600**	**88**	**%**	**60.499.200**	**88,1**	**%**	**124.590.600**	**25**	**%**	**57.052.200**	**46**	**%**	**57.052.200**	**46**	**%**	**57.052.200**		**117.551.400**			
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan**	**88,1**	**%**	**132.274.600**	**88**	**%**	**60.499.200**	**88,1**	**%**	**124.590.600**	**25**	**%**	**57.052.200**	**46**	**%**	**57.052.200**	**46**	**%**	**57.052.200**		**117.551.400**			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	88,1	%	132.274.600	88	%	60.499.200	88,1	Laporan	124.590.600	25	%	57.052.200	46	%	57.052.200	46	%	57.052.200		117.551.400	89	%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**46**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**46**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja**	**28,52**	**Nilai**	**30.155.166.088**	**28,51**	**Nilai**	**##############**	**28,52**	**Nilai**	**29.711.801.296**	**25**	**%**	**7.476.483.660**	**25**	**%**	**7.476.483.660**	**25**	**%**	**7.476.483.660**		**############**			
			IK 2 : Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	**22,14**	**Nilai**		**22,13**	**Nilai**		**22,14**	**Nilai**															
			IK 3 : Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	**11,21**	**Nilai**		**11,2**	**Nilai**		**11,21**	**Nilai**															
			IK 4 : Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	**21,06**	**Nilai**		**21,05**	**Nilai**		**21,06**	**Nilai**															
			IK 5 : perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
			IK 6 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
			IK 7 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	**94**	**Persentase**		**93**	**Persentase**		**94**	**Persentase**															
			IK 8 Persentase Kepatuhan Anggaran	**100**	**Persenta**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persenta**															
			IK 9 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	**95**	**Persenta**		**96,84**	**Persentase**		**95**	**Persenta**															
			IK 10 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	**94**	**Persenta**		**NA**	**Persentase**		**94**	**Persenta**															
			IK 11 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	**91,61**	**nilai**		**91,6**	**nilai**		**91,61**	**nilai**															
			IK 12 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	**93,45**	**nilai**		**93,44**	**nilai**		**93,45**	**nilai**															
			IK 13 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	**91,2**	**nilai**		**91,19**	**nilai**		**91,2**	**nilai**															
			IK 14 : Rata-rata Nilai SKM aspek penangan Pengaduan	**90,65**	**nilai**		**90,64**	**nilai**		**90,65**	**nilai**															
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**	**100**	**Persenta**	**29.040.900**	**100**	**Persentase**	**19.880.225**	**100**	**Persenta**	**22.377.700**	**25**	**%**	**9.330.700**	**42**	**%**	**9.330.700**	**42**	**%**	**9.330.700**		**29.210.925**			
			Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
			Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
			Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	**96,85**	**Persentase**		**96,84**	**Persentase**		**96,85**	**Persentase**															
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokume	14.876.000	3	Dokumen	4.412.975	3	Dokume	9.552.800	25	%	6.362.400	67	%	6.362.400	67	%	6.362.400		10.775.375	72	%	Kasubag Renlap
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	14.164.900	2	Laporan	15.467.250	2	Laporan	12.824.900	25	%	2.968.300	23	%	2.968.300	23	%	2.968.300		18.435.550	130	%	Kasubag Renlap
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**42**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA**	**96,85**	**Persenta**	**20.762.741.953**	**96,84**	**Persentase**	**##############**	**96,85**	**Persenta**	**20.760.415.553**	**25**	**%**	**4.852.793.213**	**23**	**%**	**4.852.793.213**	**23**	**%**	**4.852.793.213**		**############**			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	Orang/	20.701.707.953	97	Orang/Bul	21.220.949.148	97	Orang/Bu	20.701.707.953	25	%	4.838.143.913	23	%	4.838.143.913	23	%	4.838.143.913		############	126	%	Kasubag Renlap

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.871.000	1	Laporan	5.278.375	1	Laporan	3.544.600	25	%	876.600	25	%	876.600	25	%	876.600		6.154.975	105	%	Kasubag Renlap
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	55.163.000	1	Laporan	67.712.775	1	Laporan	55.163.000	25	%	13.772.700	25	%	13.772.700	25	%	13.772.700		81.485.475	148	%	Kasubag Renlap
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**23**							
																		Predikat kinerja		**Sangat Rendah**						
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah**	**100**	**Persenta**	**3.653.290.250**	**100**	**Persentase**	**3.133.990.600**	**100**	**Persenta**	**3.292.030.150**	**25**	**%**	**1.509.636.300**	**46**	**%**	**1.509.636.300**	**46**	**%**	**1.509.636.300**		**###########**			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	34.296.000	1	Paket	25.069.500	1	Paket	34.296.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		25.069.500	73	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.796.457.200	1	Paket	978.827.100	1	Paket	1.669.542.100	25	%	1.268.393.000	76	%	1.268.393.000	76	%	1.268.393.000		###########	125	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	153.604.800	1	Paket	22.488.000	1	Paket	153.604.800	25	%	7.684.800	5	%	7.684.800	5	%	7.684.800		30.172.800	20	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	512.047.000	1	Paket	250.069.500	1	Paket	411.382.000	25	%	1.377.200	0	%	1.377.200	0	%	1.377.200		251.446.700	49	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	7.743.100	1	Paket	9.010.000	1	Paket	7.743.100	25	%	4.177.800	54	%	4.177.800	54	%	4.177.800		13.187.800	170	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Paket	9.297.600	1	Paket	9.060.000	1	Paket	9.297.600	25	%	2.265.000	24	%	2.265.000	24	%	2.265.000		11.325.000	122	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Paket	274.560.950	1	Paket	815.858.000	1	Paket	140.880.950	25	%	9.130.000	6	%	9.130.000	6	%	9.130.000		824.988.000	300	%	Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.583.000	1	Paket	1.594.000	1	Paket	1.583.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-		1.594.000	101	%	Lurah Babakan
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.259.800	1	Paket	15.325.900	1	Paket	12.259.800	25	%	3.533.100	29	%	3.533.100	29	%	3.533.100		18.859.000	154	%	Lurah Babakan
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.860.500	1	Paket	3.576.100	1	Paket	2.860.500	25	%	-	0	%	-	0	%	-		3.576.100	125	%	Lurah Babakan
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	60.915.000	1	Paket	74.220.000	1	Paket	60.915.000	25	%	12.780.000	21	%	12.780.000	21	%	12.780.000		87.000.000	143	%	Lurah Babakan
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.228.800	1	Paket	-	1	Paket	2.228.800	25	%	-	0	%	-	0	%	-		-	0	%	Lurah Babakan
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.823.100	1	Paket	3.823.200	1	Paket	3.823.100	25	%	1.769.200	46	%	1.769.200	46	%	1.769.200		5.592.400	146	%	Lurah Cibogor
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.440.800	1	Paket	14.301.400	1	Paket	11.440.800	25	%	3.112.900	27	%	3.112.900	27	%	3.112.900		17.414.300	152	%	Lurah Cibogor
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.779.700	1	Paket	5.976.500	1	Paket	4.779.700	25	%	1.418.800	30	%	1.418.800	30	%	1.418.800		7.395.300	155	%	Lurah Cibogor
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	53.820.000	1	Paket	63.000.000	1	Paket	53.820.000	25	%	10.890.000	20	%	10.890.000	20	%	10.890.000		73.890.000	137	%	Lurah Cibogor
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.179.600	1	Paket	5.223.800	1	Paket	4.179.600	25	%	918.900	22	%	918.900	22	%	918.900		6.142.700	147	%	Lurah Cibogor
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	25	%	617.300	51	%	617.300	51	%	617.300		1.819.800	151	%	Lurah Ciwaringin
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.970.200	1	Paket	8.365.100	1	Paket	6.970.200	25	%	1.733.600	25	%	1.733.600	25	%	1.733.600		10.098.700	145	%	Lurah Ciwaringin
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.251.700	1	Paket	6.565.800	1	Paket	5.251.700	25	%	2.752.400	52	%	2.752.400	52	%	2.752.400		9.318.200	177	%	Lurah Ciwaringin
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	66.360.000	1	Paket	72.570.000	1	Paket	66.360.000	25	%	17.595.000	27	%	17.595.000	27	%	17.595.000		90.165.000	136	%	Lurah Ciwaringin
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.893.700	1	Paket	3.617.600	1	Paket	2.893.700	25	%	960.000	33	%	960.000	33	%	960.000		4.577.600	158	%	Lurah Ciwaringin
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	25	%	868.900	72	%	868.900	72	%	868.900		2.071.400	172	%	Lurah Gudang
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.970.700	1	Paket	8.714.100	1	Paket	6.970.700	25	%	2.345.500	34	%	2.345.500	34	%	2.345.500		11.059.600	159	%	Lurah Gudang
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.248.000	1	Paket	6.565.800	1	Paket	5.248.000	25	%	1.134.600	22	%	1.134.600	22	%	1.134.600		7.700.400	147	%	Lurah Gudang
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.650.000	1	Paket	72.570.000	1	Paket	62.650.000	25	%	17.242.500	28	%	17.242.500	28	%	17.242.500		89.812.500	143	%	Lurah Gudang
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.894.000	1	Paket	3.617.600	1	Paket	2.894.000	25	%	1.789.200	62	%	1.789.200	62	%	1.789.200		5.406.800	187	%	Lurah Gudang
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	640.200	1	Paket	644.400	1	Paket	640.200	25	%	294.500	46	%	294.500	46	%	294.500		938.900	147	%	Lurah Kebon Kalapa
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.362.600	1	Paket	6.803.000	1	Paket	5.362.600	25	%	1.461.300	27	%	1.461.300	27	%	1.461.300		8.264.300	154	%	Lurah Kebon Kalapa
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.398.500	1	Paket	1.761.200	1	Paket	1.398.500	25	%	404.400	29	%	404.400	29	%	404.400		2.165.600	155	%	Lurah Kebon
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	61.200.000	1	Paket	78.075.000	1	Paket	61.200.000	25	%	12.570.000	21	%	12.570.000	21	%	12.570.000		90.645.000	148	%	Lurah Kebon

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.228.800	1	Paket	2.786.000	1	Paket	2.228.800	25	%	481.200	22	%	481.200	22	%	481.200	3.267.200	147	%	Lurah Kebon
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.233.100	1	Paket	3.233.300	1	Paket	3.233.100	25	%	1.831.200	57	%	1.831.200	57	%	1.831.200	5.064.500	157	%	Lurah Paledang
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.720.700	1	Paket	12.157.500	1	Paket	9.720.700	25	%	2.713.100	28	%	2.713.100	28	%	2.713.100	14.870.600	153	%	Lurah Paledang
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.179.400	1	Paket	6.474.700	1	Paket	5.179.400	25	%	-	0	%	-	0	%	-	6.474.700	125	%	Lurah Paledang
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	63.195.000	1	Paket	75.840.000	1	Paket	63.195.000	25	%	13.290.000	21	%	13.290.000	21	%	13.290.000	89.130.000	141	%	Lurah Paledang
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.622.400	1	Paket	3.168.300	1	Paket	4.622.400	25	%	3.153.600	68	%	3.153.600	68	%	3.153.600	6.321.900	137	%	Lurah Paledang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.588.600	1	Paket	3.594.600	1	Paket	3.588.600	25	%	1.565.400	44	%	1.565.400	44	%	1.565.400	5.160.000	144	%	Lurah Tegallega
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.267.200	1	Paket	7.834.000	1	Paket	6.267.200	25	%	2.270.300	36	%	2.270.300	36	%	2.270.300	10.104.300	161	%	Lurah Tegallega
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	6.816.300	1	Paket	8.520.800	1	Paket	6.816.300	25	%	1.263.200	19	%	1.263.200	19	%	1.263.200	9.784.000	144	%	Lurah Tegallega
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.460.000	1	Paket	78.150.000	1	Paket	65.460.000	25	%	17.430.000	27	%	17.430.000	27	%	17.430.000	95.580.000	146	%	Lurah Tegallega
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.225.600	1	Paket	6.439.200	1	Paket	5.225.600	25	%	1.307.900	25	%	1.307.900	25	%	1.307.900	7.747.100	148	%	Lurah Tegallega
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.694.500	1	Paket	3.694.600	1	Paket	3.694.500	25	%	1.230.600	33	%	1.230.600	33	%	1.230.600	4.925.200	133	%	Lurah Sempur
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.097.000	1	Paket	13.918.800	1	Paket	11.097.000	25	%	1.915.200	17	%	1.915.200	17	%	1.915.200	15.834.000	143	%	Lurah Sempur
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.927.800	1	Paket	6.041.400	1	Paket	4.927.800	25	%	1.628.200	33	%	1.628.200	33	%	1.628.200	7.669.600	156	%	Lurah Sempur
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	52.070.000	1	Paket	62.625.000	1	Paket	52.070.000	25	%	13.500.000	26	%	13.500.000	26	%	13.500.000	76.125.000	146	%	Lurah Sempur
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4.176.000	1	Paket	5.220.200	1	Paket	4.176.000	25	%	1.043.400	25	%	1.043.400	25	%	1.043.400	6.263.600	150	%	Lurah Sempur
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.850.000	1	Paket	1.850.000	1	Paket	1.850.000	25	%	1.850.000	100	%	1.850.000	100	%	1.850.000	3.700.000	200	%	Lurah Babakan Pasar
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.400.000	1	Paket	4.250.000	1	Paket	3.400.000	25	%	1.860.900	55	%	1.860.900	55	%	1.860.900	6.110.900	180	%	Lurah Babakan Pasar
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.200.000	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.200.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-	1.500.000	125	%	Lurah Babakan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.105.000	1	Paket	70.200.000	1	Paket	57.105.000	25	%	15.495.000	27	%	15.495.000	27	%	15.495.000	85.695.000	150	%	Lurah Babakan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.200.000	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.200.000	25	%	-	0	%	-	0	%	-	1.500.000	125	%	Lurah Babakan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	1	Paket	1.202.500	25	%	450.500	37	%	450.500	37	%	450.500	1.653.000	137	%	Lurah Panaragan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.963.500	1	Paket	8.714.100	1	Paket	6.963.500	25	%	2.355.000	34	%	2.355.000	34	%	2.355.000	11.069.100	159	%	Lurah Panaragan
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.251.500	1	Paket	6.565.800	1	Paket	5.251.500	25	%	1.296.300	25	%	1.296.300	25	%	1.296.300	7.862.100	150	%	Lurah Panaragan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	61.410.000	1	Paket	72.570.000	1	Paket	61.410.000	25	%	11.850.000	19	%	11.850.000	19	%	11.850.000	84.420.000	137	%	Lurah Panaragan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.894.000	1	Paket	3.617.600	1	Paket	2.894.000	25	%	250.800	9	%	250.800	9	%	250.800	3.868.400	134	%	Lurah Panaragan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.898.100	1	Paket	1.899.900	1	Paket	1.898.100	25	%	1.898.100	100	%	1.898.100	100	%	1.898.100	3.798.000	200	%	Lurah Pabaton
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.803.500	1	Paket	6.125.700	1	Paket	4.803.500	25	%	2.011.000	42	%	2.011.000	42	%	2.011.000	8.136.700	169	%	Lurah Pabaton
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.251.800	1	Paket	5.320.600	1	Paket	4.251.800	25	%	2.255.500	53	%	2.255.500	53	%	2.255.500	7.576.100	178	%	Lurah Pabaton
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	69.790.000	1	Paket	76.245.000	1	Paket	69.790.000	25	%	14.220.000	20	%	14.220.000	20	%	14.220.000	90.465.000	130	%	Lurah Pabaton
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.426.400	1	Paket	3.033.400	1	Paket	2.426.400	25	%	-	0	%	-	0	%	-	3.033.400	125	%	Lurah Pabaton
																	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**46**						
																	Predikat kinerja	**Sangat Rendah**						
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**Persentase**	**121.160.400**	**100**	**Persentase**	**147.324.500**	**100**	**Persentase**	**73.076.000**	**25**	**%**	**73.068.000**	**100**	**%**	**73.068.000**	**100**	**%**	**73.068.000**	**220.392.500**			
7.01.01.2.07.1	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang disediakan	7	Unit	48.084.400	71	Unit	147.324.500	7	Unit	-	25	%	-	#####	%	-	#DIV/0!	%	-	147.324.500	306	%	Kasubag
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	2	Unit	73.076.000	0	Unit	-	2	Unit	73.076.000	25	%	73.068.000	100	%	73.068.000	100	%	73.068.000	73.068.000	100	%	Kasubag Umpeg
																	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**100**						
																	Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**						
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persentase**	**2.309.431.274**	**100**	**Persentase**	**2.281.807.336**	**100**	**Persentase**	**2.309.431.274**	**25**	**%**	**676.735.107**	**29**	**%**	**676.735.107**	**29**	**%**	**676.735.107**	**###########**			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	222.086.722	1	Laporan	225.615.544	1	Laporan	222.086.722	25	%	56.035.365	25	%	56.035.365	25	%	56.035.365	281.650.909	127	%	Kasubag Umpeg

	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.087.344.552	1	Laporan	2.056.191.792	1	Laporan	2.087.344.552	25	%	620.699.742	30	%	620.699.742	30	%	620.699.742	###########	128	%		Kasubag Umpeg
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**29**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**Persentase**	**3.279.501.311**	**100**	**Persentase**	**2.566.581.535**	**100**	**Persentase**	**3.254.470.619**	**25**	**%**	**354.920.340**	**11**	**%**	**354.920.340**	**11**	**%**	**354.920.340**	**###########**				
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	144.810.919	4	Unit	175.179.830	40	Unit	144.810.919	25	%	21.594.000	15	%	21.594.000	15	%	21.594.000	196.773.830	136	%		Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	49.359.392	72	Unit	45.855.000	65	Unit	24.328.700	25	%	-	0	%	-	0	%	-	45.855.000	93	%		Kasubag Umpeg
	7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	3.085.331.000	3	Unit	2.345.546.705	10	Unit	3.085.331.000	25	%	333.326.340	11	%	333.326.340	11	%	333.326.340	###########	87	%		Kasubag Umpeg
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**11**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**25**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IK1 :Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur**	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
			IK.2 Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	**20**	**Persentase**		**NA**	**Persentase**		**20**	**Persentase**															
			IK. 3 Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)	**1**	**Persentase**	**135.274.112**	**NA**	**Persentase**	**154.442.500**	**1**	**Persentase**	**109.063.512**	**25**	**%**	**35.157.800**	**32**	**%**	**35.157.800**	**32**	**%**	**35.157.800**	**189.600.300**				
			IK. 4 Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulaitf kelurahan)	**2**	**Persentase**		**NA**	**Persentase**		**2**	**Persentase**															
			ik. 5 Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan	**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**		**100**	**Persentase**															
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**1**	**Laporan**	**67.120.800**	**1**	**Laporan**	**96.791.800**	**1**	**Laporan**	**47.368.000**	**25**	**%**	**2.811.000**	**6**	**%**	**2.811.000**	**6**	**%**	**2.811.000**	**99.602.800**				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	67.120.800	1	Laporan	96.791.800	1	Laporan	47.368.000	25	%	2.811.000	6	%	2.811.000	6	%	2.811.000	99.602.800	148	%		Kasi Pemerintahan
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**6**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di**	**Presentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan (7 pelayanan)**	**100**	**Persentase**	**68.153.312**	**100**	**Persentase**	**57.650.700**	**100**	**Persentase**	**61.695.512**	**25**	**%**	**32.346.800**	**52**	**%**	**32.346.800**	**52**	**%**	**32.346.800**	**89.997.500**				
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	54.335.612	1	Dokumen	57.650.700	1	Dokumen	54.335.612	25	%	32.346.800	60	%	32.346.800	60	%	32.346.800	89.997.500	166	%		Kasi Dalbang
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	13.817.700	1	Laporan	-	1	Laporan	7.359.900	25	%	-	0	%	-	0	%	-	-	0	%		Kasi Dalbang
																		Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**52**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
																		Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**32**							
																		Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**21**							
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**Sangat Rendah**							
	JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN					**35.321.105.620**			**##############**			**34.817.160.428**			**8.532.885.279**	**25**	**%**	**8.532.885.279**	**25**	**%**	**8.532.885.279**					

Faktor penghambat pencapaian kinerja : pelaksanakan kegiatan kurang tepat waktu, Kurang meratanya kapasitas dan kualitas SDM, Kurang tersedianya data-data yang diperlukan yang tersusun secara sistematis dan akurat, kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): agar mentaati jadwal yang telah dicantumkan dalam Rencana angaran Kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya): .....**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR TENGAH TAHUN 2025

3.1 Unsur W a j i b Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 455.907.503 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 109.000.000;

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 346.907.503.

3. Sub kegiatan yang berkurang yaitu :
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 313.181.400;
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 12.225.000;
   c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 1.720.000;
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 151.600
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 163.200;
   f. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 110.845.200;
   g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibogor sebesar Rp. 21.600.

NO	SUB KEGIATAN	PAGU SETELAH EFISIENSI / PERGESERAN TERAKHIR	PENAMBAHAN PAGU	PENGURANGAN PAGU	FINALISASI BADAN ANGGARAN DPRD DAN TAPD (P KUA PPAS)
1	Pagu Efisiensi / Pergeseran Terakhir	34.817.160.428			
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		109.000.000		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		346.907.503		
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			422.571.100	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.225.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.720.000	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			151.600	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			163.200	
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibogor			21.600	
10	Pengadaan Mebel			110.845.200	
	JUMLAH	**34.817.160.428**	**455.907.503**	**547.697.700**	**34.725.370.231**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Tengah Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Tengah.

Lampiran ee. Kecamatan Bogor Selatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 Disusun BerdasarkanHasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah

bagi Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengantriwulan I (satu) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sampai dengan

   triwulan satu tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan

dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

   2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Selatan

    Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor

    9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Selatan Nomor 237);
15. Peraturan Gubernur Jawa Selatan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Selatan Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 **Sistematika Perubahan**

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja KECAMATAN BOGOR SELATAN Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR SELATAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Renja perubahan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 5 program dengan anggaran sebesar Rp. 53.360.121.003,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 22.437.264.130 atau 42.05 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja TA 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2029 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										I		II									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	K	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x100 %	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100 %		16	17
	32.0000	KECAMATAN																			
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN					-								-						

		MASYARAKAT DAN DESA																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah						27,01	Nilai															**Kecamatan Bogor Selatan**	
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah						26,55	Nilai																
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah						12,48	Nilai																
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah						22,51	Nilai																
			Persentase realisasi rencana tindak						100	~~Persen~~																

			pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah																								
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu							100	Persen																
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan							94	Persen																
			Persentase Kepatuhan Anggaran							100	Persen																
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA							95	Persen																

			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah							94	Persen																
			Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana							87,11	Nilai																
			Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM							88,75	Nilai																
I	**2.13.01**		Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	**100**	**%**					88,38	Nilai	**44.901.283.198**	**25**	**%**	**8.635.124.766**	**50**	**%**	**9.123.252.808**			17.758.377.574	**39,55**	**16.179.371.114**				
			Rata-rata Nilai SKM aspek penangan	**100**	**%**					88,38	Nilai		**25**			**50**											

			Pengaduan																							
1	**5-2.13.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu							100	Persen															
			Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah							100	Persen															
			Persentase Realisasi Anggaran kegiatan lingkup Perangkat Daerah							100	Persen															
			Persentase Realisasi Anggaran kegiatan lingkup Perangkat Daerah				**17 Dok**		**-**	100	Persen	**30.547.500**	**-**		**3.442.100**	**4**		**23.920.500**	**4**		27.362.600	**89,57**	**26.036.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersediany a dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	17	Dok		17 Dok			3	Dok	27.894.300	-		2.115.500	4		23.920.500	4		26.036.000	93,34	26.036.000				
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen Laporan Kinerja Bulanan	12	Bulan					16 Dok	Laporan	2.653.200			1.326.600						1.326.600						

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**93,34**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
			Persentase Realisasi Anggaran Terhadapat DPA																								
2	**5-2.13.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	**100**	**%**		**1 Tahun**		**-**	**130.**	**Persen**	**28.295.200.790**	**100%**		**6.618.734.527**	**6 Bulan**		**7.776.992.552**	**25%**		14.395.727.079	**50,88**	**14.369.941.779**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji	134	Orang		1 Tahun			130.	Orang/Bulan	28.243.179.590	100%		6.605.729.227	6 Bulan		7.764.212.552	25%		14.369.941.779	50,88	14.369.941.779				

	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan							12 Dok		52.021.200			13.005.300			12.780.000			25.785.300						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**50,88**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
3	**5-2.13.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**				**-**	100 %	Persen	**1.840.574.600**			**368.422.100**	**6 Bulan**		**455.723.460**			824.145.560	**44,78**	**62.841.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**6**	**Paket**		**1 Tahun**			1.	Paket	**287.550.600**	**100 %**		**1.890.000**	**6 Bulan**		**60.951.000**	**25 %**		62.841.000	**21,85**	**62.841.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

			yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		4.425.500	6 Bulan		2.488.900	25%		6.914.400	57,62	6.914.400			Lurah Batutulis	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	10.570.300	100%		1.496.500	6 Bulan		1.826.700	25%		3.323.200	31,44	3.323.200			Lurah Bojongkerta	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket					1.	Paket	12.000.000	100%		1.712.200	6 Bulan		5.415.100	25%		7.127.300	59,39	7.127.300			Lurah Bondongan	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkap	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		3.439.800	6 Bulan		3.934.800	25%		7.374.600	61,46	7.374.600			Lurah Cikaret	

			an Kantor yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.583.800	100%		1.870.000	6 Bulan		2.095.100	25%		3.965.100	31,51	3.965.100			Lurah Cipaku	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.390.500	100%		4.952.400	6 Bulan		5.516.500	25%		10.468.900	84,49	10.468.900			Lurah Empang	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		4.500.800	6 Bulan		2.528.900	25%		7.029.700	58,58	7.029.700			Lurah Genteng	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		4.229.200	6 Bulan		1.437.300	25%		5.666.500	47,22	5.666.500			Lurah Harjasari	

			Perlengkapan Kantor yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		3.222.700	6 Bulan		3.074.900	25%		6.297.600	52,48	6.297.600			Lurah Kertamaya	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	11.814.900	100%		6.009.900	6 Bulan		3.800.200	25%		9.810.100	83,03	9.810.100			Lurah Lawanggintung	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		3.510.000			3.374.200	25%		6.884.200	57,37	6.884.200			Lurah Muarasari	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	11.999.400	100%		3.568.200	6 Bulan		2.867.600	25%		6.435.800	53,63	6.435.800			Lurah Mulyaharja	

		an Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.002.500	100%		3.147.000	6 Bulan		3.076.500	25%		6.223.500	51,85	6.223.500			Lurah Pakuan	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		7.783.200	6 Bulan		1.885.800	25%		9.669.000	80,58	9.669.000			Lurah Pamoyanan	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	10.824.000	100%		2.835.400	6 Bulan		2.730.700	25%		5.566.100	51,42	5.566.100			Lurah Rancamaya	

	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	12.000.000	100%		6.618.000	6 Bulan		3.010.500	25%		9.628.500	80,24	9.628.500			Lurah Ranggamekar	
	2.13.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan**	**3**	**Paket**		**1 Tahun**			1.	Paket	**67.502.700**	**100%**		**25.602.000**	**6 Bulan**		**34.286.260**	**25%**		59.888.260	**88,72**	**59.888.260**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		226.800	6 Bulan		475.800	25%		702.600	43,91	702.600			Lurah Batutulis	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%			6 Bulan		206.000	25%		206.000	12,88	206.000			Lurah Bojongkerta	

	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		482.700			430.500	25%		913.200	57,08	913.200			Lurah Bondongan	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		1.286.000			314.000	25%		1.600.000	100,00	1.600.000			Lurah Cikaret	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.810.000	100%		1.810.000				25%		1.810.000	100,00	1.810.000			Lurah Cipaku	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.737.300	100%		1.366.700			370.600	25%		1.737.300	100,00	1.737.300			Lurah Empang	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Penyediaan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		1.227.400	6 Bul		186.300	25%		1.413.700	88,36	1.413.700			Lurah Genteng	

		Tangga	Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan													an											
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		795.000	6 Bulan		333.000	25%		1.128.000	70,50	1.128.000			Lurah Harjasari	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		954.600	6 Bulan			25%		954.600	59,66	954.600			Lurah Kertamaya	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.597.700	100%		1.597.700	6 Bulan			25%		1.597.700	100,00	1.597.700			Lurah Lawanggintung	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.643.600	100%		204.600			333.300	25%		537.900	32,73	537.900			Lurah Muarasari	

			Yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.599.900	100 %		1.599.900	6 Bulan			25 %		1.599.900	100,00	1.599.900			Lurah Mulyaharja	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.597.500	100 %		503.200	6 Bulan		313.200	25 %		816.400	51,10	816.400			Lurah Pakuan	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.510.600	100 %		1.510.600	6 Bulan			25 %		1.510.600	100,00	1.510.600			Lurah Pamoyanan	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100 %		626.900	6 Bulan		403.000	25 %		1.029.900	64,37	1.029.900			Lurah Rancamaya	

	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		1.250.800	6 Bulan		349.200	25%		1.600.000	100,00	1.600.000			Lurah Ranggamekar	
	2.13.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan**	**1**	**Paket**		**1 Tahun**			**1.**	**Paket**	**265.910.000**	**100%**		**59.746.000**	**6 Bulan**		**68.292.000**	**25%**		128.038.000	**48,15**	**128.038.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	51.750.000	100%		14.085.000	6 Bulan		9.645.000	25%		23.730.000	45,86	23.730.000			Lurah Batutulis	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	52.290.000	100%		13.980.000	6 Bulan		16.365.000	25%		30.345.000	58,03	30.345.000			Lurah Bojongkerta	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	40.950.000	100%		7.200.000	6 Bul		14.400.000	25%		21.600.000	52,75	21.600.000			Lurah Bondongan	

		Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan													an											
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	51.105.000	100%		8.685.000	6 Bulan		13.830.000	25%		22.515.000	44,06	22.515.000			Lurah Cikaret	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	47.160.000	100%		10.410.000	6 Bulan		12.270.000	25%		22.680.000	48,09	22.680.000			Lurah Cipaku	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	51.300.000	100%		13.310.000	6 Bulan		11.650.000	25%		24.960.000	48,65	24.960.000			Lurah Empang	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	52.290.000	100%		11.555.000	6 Bulan		9.805.000	25%		21.360.000	40,85	21.360.000			Lurah Genteng	

			yang disediakan																								
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	50.175.000	100%		11.600.000	6 Bulan		12.350.000	25%		23.950.000	47,73	23.950.000			Lurah Harjasari	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	55.495.000	100%		13.710.000	6 Bulan		16.320.000	25%		30.030.000	54,11	30.030.000			Lurah Kertamaya	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	53.190.000	100%		12.590.000	6 Bulan		8.410.000	25%		21.000.000	39,48	21.000.000			Lurah Lawanggintung	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	51.570.000	100%		17.805.000	6 Bulan		19.815.000	25%		37.620.000	72,95	37.620.000			Lurah Muarasari	

	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	54.720.000	100%		14.295.000			7.200.000	25%		21.495.000	39,28	21.495.000			Lurah Mulyaharja	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	51.750.000	100%		10.475.000	6 Bulan		15.645.000	25%		26.120.000	50,47	26.120.000			Lurah Pakuan	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	56.385.000	100%		12.443.000	6 Bulan		16.335.000	25%		28.778.000	51,04	28.778.000			Lurah Pamoyanan	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	53.100.000	100%		10.520.000	6 Bulan		13.400.000	25%		23.920.000	45,05	23.920.000			Lurah Rancamaya	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	52.245.000	100%		11.870.000	6 Bul		9.985.000	25%		21.855.000	41,83	21.855.000			Lurah Ranggameka	

		Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan													an									r	
	2.13.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an**	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	**1**	**Paket**		**1 Tahun**			1.	Paket	**30.696.600**	**100%**			**6 Bulan**		**2.600.000**	**25%**		2.600.000	**8,47**	**2.600.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	764.000	100%		224.000	6 Bulan		180.000	25%		404.000	52,88	404.000			Lurah Batutulis	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.945.200	100%		252.000	6 Bulan		368.000	25%		620.000	31,87	620.000			Lurah Bojongkerta	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Penyediaan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.571.400	100%		360.400	6 Bul		778.400	25%		1.138.800	72,47	1.138.800			Lurah Bondongan	

		dan Pengganda an	Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan													an											
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.610.500	100%		360.000	6 Bulan		376.100	25%		736.100	45,71	736.100			Lurah Cikaret	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.302.000	100%					120.000	25%		120.000	9,22	120.000			Lurah Cipaku	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.568.000	100%		952.000	6 Bulan		616.000	25%		1.568.000	100,00	1.568.000			Lurah Empang	
	2.13.01.2.06.00	Penyediaan Barang	Jumlah Paket	1	Paket		12 Bul			1.	Paket	1.600.	100		300.00	6 B		300.00	25%		600.0	37,5	600.00			Lurah Gente	

	05	Cetakan dan Pengganda an	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan				an					000	%		0	ul an		0			00	0	0			ng	
	2.13.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Pak et		12 Bul an			1.	Paket	1.636. 000	10 0 %		360.00 0	6 B ul an		360.00 0	25 %		720.0 00	44,0 1	720.00 0			Lurah Harjas ari	
	2.13.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Pak et		12 Bul an			1.	Paket	1.625. 200	10 0 %		480.00 0	6 B ul an		480.00 0	25 %		960.0 00	59,0 7	960.00 0			Lurah Kerta maya	
	2.13.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Pak et		12 Bul an			1.	Paket	1.600. 000	10 0 %		400.00 0	6 B ul an		400.00 0	25 %		800.0 00	50,0 0	800.00 0			Lurah Lawan ggintu ng	

	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.412.000	100%			6 Bulan		341.600	25%		341.600	24,19	341.600			Lurah Muarasari	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.600.000	100%		420.000	6 Bulan		400.000	25%		820.000	51,25	820.000			Lurah Mulyaharja	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	1.542.000	100%		310.800			359.200	25%		670.000	43,45	670.000			Lurah Pakuan	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang	1	Paket		12 Bulan			1.	Paket	828.000	100%						25%		-	-	-			Lurah Pamoyanan	

			disediakan																								
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Pak et		12 Bul an			1.	Paket	1.600.000	100 %		359.700			443.300	25 %		803.000	50,19	803.000			Lurah Rancamaya	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	1	Pak et		12 Bul an			1.	Paket	1.408.000	100 %		384.000	6 Bul an		384.000	25 %		768.000	54,55	768.000			Lurah Ranggamekar	
	2.13.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**2**	**Lapora n**		**1 Tahun**			**1.**	**Paket**	**13.946.400**	**100 %**			**6 Bulan**			**25 %**		**-**	**-**	**-**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan**	**2**	**Lapora n**		**1 Tahun**			1.	Paket	**109.799.000**	**100 %**		**2.724.500**	**6 Bulan**		**23.484.000**	**25 %**		26.208.500	**23,87**	**26.208.500**			**Kecamatan Bogor**	

		dan Konsultasi SKPD	**Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**																							**Selatan**	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**54,58**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
4	**5-2.13.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**		**1 Tahun**		**-**			**9.032.873.600**			**732.210.000**			**58.380.000**			790.590.000	**0%**	**-**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Paket		1 Tahun			20.	Unit	732.370.000	100%		732.210.000		100%				732.210.000	#VALUE!	732.210.000			Kecamatan Bogor Selatan	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1	Paket		1 Tahun			1	Paket	161.104.400	100%				100				-	0%	-			Kecamatan Bogor	

																	%									Selatan	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Paket		1 Tahun			24	Unit	165.989.200	100%					58.380.000			58.380.000	0%	58.380.000			Kecamatan Bogor Selatan	
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Paket		1 Tahun			1	Unit	7.973.410.000	100%								-	0%	-			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**0%**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
5	**5-2.13.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	**100**	**%**		**1 Tahun**		**-**	1 Tahun		**3.021.920.384**	**100%**		**874.997.539**	**6 Bulan**		**647.247.631**	**25%**		1.522.245.170	**50,37**	**1.522.245.170**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

			an daerah																									
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Laporan		1 Tahun			12 %	Lap	378.133.856	100 %		84.220.399	6 Bulan		121.287.497	25 %		205.507.896	208 %	205.507.896			Kecamatan Bogor Selatan	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan		1 Tahun			12 %	Lap	2.643.786.528	100 %		790.777.140	6 Bulan		525.960.134	25 %		1.316.737.274	208 %	1.316.737.274			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**208 %**						
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**						
6	**5-2.13.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**		**12 Bulan**		**-**	12 Bulan		**2.680.166.324**			**37.318.500**			**160.988.665**			198.307.165	**7,40**	**198.307.165**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	Unit		12 Bulan			6	Unit	224.751.324	3 Bulan		28.798.500	6 Bulan		38.964.600	3 Bulan		67.763.100	30,15	67.763.100			Kecamatan Bogor Selatan	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah UnitPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit		12 Bulan			134	Unit	54.360.000	3 Bulan		8.520.000	6 Bulan		7.870.000	3 Bulan		16.390.000	30,15	16.390.000			Kecamatan Bogor Selatan	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit		12 Bulan			16	Unit	2.401.055.000	3 Bulan		-	6 Bulan		114.154.065	3 Bulan		114.154.065	4,75	114.154.065			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**21,69**					
Predikat kinerja																						**Sangat**					

																						Tinggi					
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**39,55**					
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif di kecamatan**							100	%																
II	**2.13.05**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif di kelurahan**	65	%				-	100	%	**4.355.400.000**	16,25	%	**1.087.450.000**	32,5	%	**1.086.750.000**	65,00	%	3.300.000	**0,08**	**3.300.000**				

7	**5-2.13.05.2.01**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan di Kecamatan/Kelurahan yang aktif**	65	%		65	%		100	%	**4.355.400.000**	16,25	%	**1.087.450.000**	32,5	%	**1.086.750.000**	**65,00**	**%**	3.300.000	**0,08**	**3.300.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

	2.13.05.2.01.03	**Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kecamatan**	**1**	**Lembaga**		**65**	**%**		1	Dok	**6.600.000**	**1**	**Lembaga**	**1.650.000**	**32,50**	**%**	**1.650.000**	**1**	**Lembaga**	3.300.000	**50,00**	**3.300.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	232.800.000	1	Lembaga	57.500.000	32,50	%	57.150.000	1	Lembaga	114.650.000	49,25	114.650.000			Lurah Batutulis	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	160.800.000	1	Lembaga	40.200.000	32,50	%	40.200.000	1	Lembaga	80.400.000	50,00	80.400.000			Lurah Bojongkerta	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	438.000.000	1	Lembaga	109.500.000	32,50	%	109.500.000	1	Lembaga	219.000.000	50,00	219.000.000			Lurah Bondongan	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	340.200.000	1	Lembaga	85.050.000	32,50	%	85.050.000	1	Lembaga	170.100.000	50,00	170.100.000			Lurah Cikaret	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	360.000.000	1	Lembaga	90.000.000	32,50	%	90.000.000	1	Lembaga	180.000.000	50,00	180.000.000			Lurah Cipaku	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	568.200.000	1	Lembaga	141.350.000	32,50	%	141.000.000	1	Lembaga	282.350.000	49,69	282.350.000			Lurah Empang	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	204.600.000	1	Lembaga	51.150.000	32,50	%	51.150.000	1	Lembaga	102.300.000	50,00	102.300.000			Lurah Genteng	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	265.800.000	1	Lembaga	66.450.000	32,50	%	66.450.000	1	Lembaga	132.900.000	50,00	132.900.000			Lurah Harjasari	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	160.200.000	1	Lembaga	40.050.000	32,50	%	40.050.000	1	Lembaga	80.100.000	50,00	80.100.000			Lurah Kertamaya	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	201.000.000	1	Lembaga	50.250.000	32,50	%	50.250.000	1	Lembaga	100.500.000	50,00	100.500.000			Lurah Lawanggintung	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	192.600.000	1	Lembaga	48.150.000	32,50	%	48.150.000	1	Lembaga	96.300.000	50,00	96.300.000			Lurah Muarasari	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	319.200.000	1	Lembaga	79.800.000	32,50	%	79.800.000	1	Lembaga	159.600.000	50,00	159.600.000			Lurah Mulyaharja	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	145.200.000	1	Lembaga	36.300.000	32,50	%	36.300.000	1	Lembaga	72.600.000	50,00	72.600.000			Lurah Pakuan	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	300.600.000	1	Lembaga	75.150.000	32,50	%	75.150.000	1	Lembaga	150.300.000	50,00	150.300.000			Lurah Pamoyanan	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	172.800.000	1	Lembaga	43.200.000	32,50	%	43.200.000	1	Lembaga	86.400.000	50,00	86.400.000			Lurah Rancamaya	

	2.13.05.2.01.03	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan	1	Lembaga		65	%		1	Dok	286.800.000	1	Lembaga	71.700.000	32,50	%	71.700.000	1	Lembaga	143.400.000	50,00	143.400.000			Lurah Ranggamekar	
				12	Bulan		1	Lembaga		12	Bulan		3	Bulan					3,00	Bulan		25,00%					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**50,00**					
Predikat kinerja																						**Sang**					

																						at Tinggi					
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**0,08**					
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**					
III	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur																								
			Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)																								

			Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)																								
			Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulaitf kelurahan)																								
			Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan			**3.2 Point**					**185.884.600**			**135.985.600**			**22.284.200**			158.269.800	**85,14**	**3.2 Point**				
8	**5-7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata**	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	**100**	**%**		**12 Bulan**			1		**77.283.600**			**38.347.600**			**18.863.200**			57.210.800	74,03	**57.210.800**			**Kecamatan Bogor Selatan**	

		n	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																								
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait				12 Bulan			1		77.283.600	1	Dok	38.347.600	1 Dok		18.863.200			57.210.800	74,03	57.210.800			Kecamatan Bogor Selatan	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah				12 Bulan		-	1											-					Kecamatan Bogor Selatan	

			Kecamatan																								
9	**5-7.01.02.2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan**	**100**	**%**				**-**	100	Persen	**108.601.000**			**97.638.000**			**3.421.000**			101.059.000	93,06	101.059.000				
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				12 Bulan			1	Dok	108.601.000	1	Dok	97.638.000	1 Dok		3.421.000	1 Dok		101.059.000	93,06	101.059.000			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**93,06**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																											

																						85,14					
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**					
IV	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur							100	Persen																
			Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang Kelurahan							1	Persen																
			Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang							1	Persen																

			Kelurahan																								
			Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang Kelurahan							1	Persen																
			Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang Kelurahan							100	Persen	**3.817.977.205**			**622.421.286**			**1.662.070.470**			2.284.491.756	**59,84**	**2.284.491.756**				
10	**7.01.03.2.02**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**						**-**	100	Persen	**3.098.076.500**			**430.951.286**			**1.471.750.470**			1.902.701.756	61,42	**1.902.701.756**				

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok					7	LK	7.325.000			-						-	-	-			Lurah Batutulis	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok					7	LK	7.154.000			-						-	-	-			Lurah Bojongkerta	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.347.000			-						-	-	-			Lurah Bondongan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.028.000			-						-	-	-			Lurah Cikaret	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok					7	LK	7.010.000			-						-	-	-				Lurah Cipaku	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.100.000			-						-	-	-				Lurah Empang	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	5.809.500			-						-	-	-			Lurah Genteng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.280.000			-						-	-	-			Lurah Harjasari	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.325.000			-						-	-	-			Lurah Kertamaya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok					7	LK	7.194.100			-						-	-	-			Lurah Lawanggintung	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.280.000			-						-	-	-			Lurah Muarasari	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.370.000			-						-	-	-			Lurah Mulyaharja	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.325.000			-						-	-	-			Lurah Pakuan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.325.000			-						-	-	-			Lurah Pamoyanan	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.550.000			-						-	-	-			Lurah Rancamaya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Dok		1 Bulan			7	LK	7.146.400			-						-	-	-			Lurah Ranggamekar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	144.998.800			22.724.300			47.929.160			70.653.460	48,73	70.653.460			Lurah Batutulis	

			terbangun																								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	150.000.000			-			720.000			720.000	0,48	720.000			Lurah Bojongkerta	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	150.000.000			149.168.331	6 Bulan					149.168.331	99,45	149.168.331			Lurah Bondongan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	141.852.000			22.752.100						22.752.100	16,04	22.752.100			Lurah Cikaret	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		1 Bulan			1	Unit	150.000.000			18.750.800			130.494.200			149.245.000	99,50	149.245.000			Lurah Cipaku	

	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	129.265.600			20.451.600	6 Bulan		108.070.690			128.522.290	99,42	128.522.290			Lurah Empang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	150.000.000			25.633.800	6 Bulan		8.237.600			33.871.400	22,58	33.871.400			Lurah Genteng	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	166.050.000			-			164.796.668			164.796.668	99,25	164.796.668			Lurah Harjasari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	239.201.600			-	6 Bulan		145.372.647			145.372.647	60,77	145.372.647			Lurah Kertamaya	

	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	141.852.000			6.951.500	6 Bulan		133.813.900			140.765.400	99,23	140.765.400			Lurah Lawanggintung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	178.965.000			25.078.700	6 Bulan		152.788.200			177.866.900	99,39	177.866.900			Lurah Muarasari	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	110.700.000				6 Bulan		109.818.169			109.818.169	99,20	109.818.169			Lurah Mulyaharja	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	150.000.000			26.757.765	6 Bulan		122.528.624			149.286.389	99,52	149.286.389			Lurah Pakuan	

	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	400.230.000			59.824.690	6 Bulan		157.600.162			217.424.852	54,32	217.424.852			Lurah Pamoyanan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	184.500.000				6 Bulan					-	-	-			Lurah Rancamaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1	Unit		12 Bulan			1	Unit	114.390.000			3.340.000			108.426.650			111.766.650	97,71	111.766.650			Lurah Ranggamekar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		3.655.000	6 Bulan		5.111.600	25 %		8.766.600	49,39	8.766.600			Lurah Batutulis	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.700.500	100 %		2.451.200	6 Bulan		5.876.300	25 %		8.327.500	47,05	8.327.500			Lurah Bojongkerta	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.507.000	100 %		3.197.000	6 Bulan		6.300.000	25 %		9.497.000	54,25	9.497.000			Lurah Bondongan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		3.125.000	6 Bulan		5.760.000	25 %		8.885.000	50,70	8.885.000			Lurah Cikaret	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.615.000	100 %		2.700.000	6 Bulan		2.700.000	25 %		5.400.000	30,66	5.400.000			Lurah Cipaku	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		3.940.200	6 Bulan		4.781.500	25 %		8.721.700	49,14	8.721.700			Lurah Empang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		3.150.000	6 Bulan		4.725.000	25 %		7.875.000	44,94	7.875.000			Lurah Genteng	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		4.350.400	6 Bulan		4.849.600	25 %		9.200.000	51,83	9.200.000			Lurah Harjasari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		3.150.000	6 Bulan		4.725.000	25 %		7.875.000	44,94	7.875.000			Lurah Kertamaya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		5.150.000	6 Bulan		3.150.000	25 %		8.300.000	46,76	8.300.000			Lurah Lawanggintung	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.030.000	100 %		1.755.000	6 Bulan		8.615.000	25 %		10.370.000	60,89	10.370.000			Lurah Muarasari	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		1.575.000	6 Bulan		6.400.000	25 %		7.975.000	45,51	7.975.000			Lurah Mulyaharja	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		2.096.400	6 Bulan		5.128.200	25 %		7.224.600	40,70	7.224.600			Lurah Pakuan	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		3.087.000	6 Bulan		4.725.000	25 %		7.812.000	44,58	7.812.000			Lurah Pamoyanan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.750.000	100 %		2.985.500	6 Bulan		5.156.600	25 %		8.142.100	45,87	8.142.100			Lurah Rancamaya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas		12 Bulan			3	Ormas / Pokmas	17.525.000	100 %		3.150.000	6 Bulan		3.150.000	25 %		6.300.000	35,95	6.300.000			Lurah Ranggamekar	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**61,4**					

																						2					
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**					
11	**5-7.01.03.2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina (UMKM, PKK, Kartar)**	**100**	**%**		**12 Bulan**		**-**	100	Persen	**719.900.705**			**191.470.000**	**3 Bulan**		**190.320.000**			381.790.000	**53,03**	**381.790.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Pokmas		12 Bulan			1	LK	470.460.000	3 Bulan		62.720.000	3 Bulan		125.880.000	3 Bulan		188.600.000	40,09	188.600.000			Kecamatan Bogor Selatan	
				3	Pokmas											6 Bulan					-		-				
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dok					1	LK	131.557.200			128.750.000			-			128.750.000	97,87	128.750.000				

	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Dok					1	Laporan	97.883.505			-			64.440.000			64.440.000	65,83	64.440.000				
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Dok		12 Bulan			1	Laporan	20.000.000			-						-	-	-			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**53,03**					
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**					
V	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase jumlah gangguan trantibum yang terselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum**						**-**	88,1	%	**99.576.000**			**8.420.000**			**53.505.000**			61.925.000	**62,19**	**61.925.000**				

			yang diselesaikan di Kecamatan																								
12	**5-7.01.04.2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase ganguan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang tertanggani**	**100**	**%**		**1 Kegiatan**		**-**	88,1	Persen	**99.576.000**	**3 Bulan**		**8.420.000**	**6 Bulan**		**53.505.000**	**3 Bulan**		61.925.000	**62,19**	**61.925.000**			**Kecamatan Bogor Selatan**	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan		1 Kegiatan			1	Laporan	99.576.000	3 Bulan		8.420.000	6 Bulan		53.505.000	3 Bulan		61.925.000	62,19	61.925.000			Kecamatan Bogor Selatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**62,19**					
Predikat kinerja																						**Sang**					

																						at Tinggi						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																						**62,19**						
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						**49,83**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																						**Sangat Tinggi**						
JUMLAH REALISASI									-			**53.360.121.003**			**10.489.401.652**			**11.947.862.478**			22.437.264.130	**42,05**	**22.437.264.130**					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													**42,05**	**%**														
Predikat Kinerja																												

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR SELATAN TAHUN 2025

3.1 Unsur W a j i b Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bogor Selatan Bertambah sebesar Rp.830.448.237 dengan rincian peambahan sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 243.250.000;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 100.000.000;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 487.198.237.
4. Adapun sub kegiatan yang berkurang yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 204.000.000;

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BOGOR SELATAN							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah*				100 % 95 % 95,17 %	100 % 95 % 95,17 %	39.807.000,00	40.429.000,00	30.547.500,00	-9.259.500,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		56.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	34.663.000,00	34.663.000,00	27.894.300,00	-6.768.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.144.000,00	5.766.000,00	2.653.200,00	-2.490.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA*				100 %	100 %	27.838.244.947,00	28.295.929.590,00	28.782.399.027,00	944.154.080,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		28.575.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/ bulan	126 Orang/ bulan	27.775.288.947,00	28.243.179.590,00	28.730.377.827,00	955.088.880,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.956.000,00	52.750.000,00	52.021.200,00	-10.934.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SEATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	105.655.000,00	315.464.000,00	83.550.600,00	-22.104.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55.195.500,00	67.502.700,00	67.502.700,00	12.307.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	357.750.000,00	392.360.000,00	265.910.000,00	-91.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	73.000.000,00	75.338.000,00	30.696.600,00	-42.303.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.946.400,00	13.946.400,00	13.946.400,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200.399.000,00	348.527.000,00	144.459.000,00	-55.940.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD*				100 %	100 %	10.433.251.074,00	9.118.308.500,00	9.032.873.600,00	-1.400.377.474,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		11.800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	398.589.000,00	0,00	397.179.000,00	-1.410.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			450.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	732.370.000,00	732.370.000,00	732.370.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	160.904.400,00	161.104.400,00	161.104.400,00	200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				57 Unit	57 Unit	231.264.100,00	231.264.100,00	165.989.200,00	-65.274.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.910.123.574,00	7.993.570.000,00	7.576.231.000,00	-1.333.892.574,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.906.426.384,00	3.021.920.384,00	3.087.260.384,00	180.834.000,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		3.100.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	298.519.856,00	378.133.856,00	443.473.856,00	144.954.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.607.906.528,00	2.643.786.528,00	2.643.786.528,00	35.880.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.800.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik*				100 %	100 %	1.104.768.218,00	2.740.569.218,00	2.680.166.324,00	1.575.398.106,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		2.900.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	244.791.324,00	224.751.324,00	224.751.324,00	-20.040.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				165 Unit	165 Unit	109.963.894,00	108.743.894,00	54.360.000,00	-55.603.894,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	750.013.000,00	2.407.074.000,00	2.401.055.000,00	1.651.042.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**264.581.000,00**	**255.204.600,00**	**185.884.600,00**	**40.419.000,00**							**305.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	131.903.600,00	77.283.600,00	-72.716.400,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	131.903.600,00	77.283.600,00	-72.716.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan*				100 %	100 %	114.581.000,00	123.301.000,00	108.601.000,00	-5.980.000,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	114.581.000,00	123.301.000,00	108.601.000,00	-5.980.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	793.524.505,00	794.226.705,00	719.900.705,00	-73.623.800,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		570.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	476.535.000,00	485.160.000,00	470.460.000,00	-6.075.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			275.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	185.576.000,00	177.653.200,00	131.557.200,00	-54.018.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			190.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	111.413.505,00	111.413.505,00	97.883.505,00	-13.530.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan**				**88.1 Persentase**	**88.1 Persentase**	**119.635.500,00**	**121.662.000,00**	**99.576.000,00**	**5.364.500,00**							**125.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan*				88,1 %	88,1 %	119.635.500,00	121.662.000,00	99.576.000,00	-20.059.500,00			-	- -	Kecamatan Bogor Selatan		125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	119.635.500,00	121.662.000,00	99.576.000,00	-20.059.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			125.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN BATUTULIS							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Batutulis		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				52 Dokumen	52 Dokumen	232.800.000,00	232.800.000,00	245.800.000,00	13.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.800.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i Nila i % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Batutulis		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	-6.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	764.000,00	764.000,00	-1.236.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak**				**100 100 1 20 2 % Persenta s e Persenta s e Persenta s e Persenta s e**	**100 100 1 20 2 % Persenta s e Persenta s e Persenta s e Persenta s e**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	

			dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)																	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Batutulis		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				52 Lembaga K emasyara k atan	52 Lembaga K emasyara k atan	10.000.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	-2.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	144.998.800,00	144.998.800,00	144.998.800,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N KELURAHA N	-	- -			144.988.800,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN BOJONGKERTA							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Bojongkerta		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	160.800.000,00	160.800.000,00	169.800.000,00	9.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.800.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Bojongkerta		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.570.300,00	10.570.300,00	-4.429.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	52.290.000,00	52.290.000,00	-6.210.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.945.200,00	1.945.200,00	-54.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Bojongkerta		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	7.154.000,00	7.154.000,00	-2.846.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				36 Pokmas / Ormas	36 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.700.500,00	17.700.500,00	-7.299.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN BONDONGAN							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Bondongan		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	-17.550.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.571.400,00	1.571.400,00	-428.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Bondongan		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Pokmas/ Ormas Dokumen	3 Pokmas/ Ormas Dokumen	438.000.000,00	438.000.000,00	462.500.000,00	24.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			438.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Bondongan		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.347.000,00	7.347.000,00	-2.653.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			160.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.507.000,00	17.507.000,00	-7.493.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN CIKARET							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Cikaret		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				77 Dokumen	77 Dokumen	340.200.000,00	340.200.000,00	359.450.000,00	19.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			340.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai Nilai %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	

								%												
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Cikaret		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	51.105.000,00	51.105.000,00	-7.395.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.610.500,00	1.610.500,00	-389.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Cikaret		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				77 Lembaga Kemasyarakatan	77 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	-2.972.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	141.852.000,00	141.852.000,00	141.852.000,00	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			141.852.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN CIPAKU							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Cipaku		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79 Dokumen	79 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	380.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			360.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	

			Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA				**Nilai Nilai % %**	**i Sko r Nila i Nila i Nila i % %**											
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Cipaku		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	12.583.800,00	12.583.800,00	-2.416.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.583.800,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	-190.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.810.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.500.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00	-11.340.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.400.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	-698.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.302.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Persentase Keterwakilan Kelompok Rentan dalam Musrenbang Kecamatan (Kumulatif Kelurahan) Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan (Kumulatif Kelurahan) Persentase Keterwakilan Anak dalam Musrenbang Kecamatan (Kumulatif Kelurahan)**				**100 1 20 2 Persen Persen Persen Persen**	**100 1 20 2 Persen Persen Persen Persen**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Cipaku		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				19 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	-2.990.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.010.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.615.000,00	17.615.000,00	-7.385.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.615.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN EMPANG							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Empang		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	568.200.000,00	568.200.000,00	600.450.000,00	32.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			568.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

			Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkungan Perangkat Daerah Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Sko r Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nila i Nila i Nila i Sko r Nila i Nila i Nila i Nila i % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Empang		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.390.500,00	12.390.500,00	-2.609.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.737.300,00	1.737.300,00	-262.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	-7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	-432.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Empang		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-2.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	130.031.000,00	129.265.600,00	129.265.600,00	-765.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			130.031.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN GENTENG							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Genteng		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	204.600.000,00	204.600.000,00	215.850.000,00	11.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			204.600.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Genteng		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	52.290.000,00	52.290.000,00	-6.210.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Genteng		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	5.809.500,00	5.809.500,00	-4.190.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN HARJASARI							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Harjasari		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	265.800.000,00	265.800.000,00	280.550.000,00	14.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			265.800.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100** **12,48** **22,51** **26,55** **27,01** **87,11** **88,38** **88,75** **94** **96,17 %** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **%** **%**	**100** **12,48** **22,51** **26,55** **27,01** **87,11** **88,38** **88,75** **94** **96,17 %** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **Nila i** **%** **%**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Harjasari		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	50.175.000,00	50.175.000,00	-8.325.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	-364.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Harjasari		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	-2.720.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	166.050.000,00	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			166.050.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN KERTAMAYA							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Keluraha n Kertamay a		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	160.200.000,00	160.200.000,00	168.950.000,00	8.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Kertamaya		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	55.495.000,00	55.495.000,00	-3.005.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.625.200,00	1.625.200,00	-374.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Kertamaya		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	-2.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	243.457.530,00	239.201.600,00	239.201.600,00	-4.255.930,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			141.852.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN LAWANG GINTUNG							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Lawanggintung		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	201.000.000,00	201.000.000,00	212.250.000,00	11.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			201.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Lawanggintung		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.814.900,00	11.814.900,00	-3.185.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.814.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.597.700,00	1.597.700,00	-402.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.597.700,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	53.190.000,00	53.190.000,00	-5.310.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.190.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.600.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Lawanggintung		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyar a katan	9 Lembaga Kemasyar a katan	10.000.000,00	7.194.100,00	7.194.100,00	-2.805.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.194.100,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	141.852.000,00	141.852.000,00	141.852.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N KELURAHA N	-	- -			141.852.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggintung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.750.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN MUARASARI							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persen tase**	**100 Persen tase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Muarasari Kota Bogor		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				52 Dokumen	52 Dokumen	192.600.000,00	192.600.000,00	203.350.000,00	10.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			192.600.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Muarasari Kota Bogor		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.643.600,00	1.643.600,00	-356.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	51.570.000,00	51.570.000,00	-6.930.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	-588.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelayanan administrasi ditingkat kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan**				**100 1 20 % Presenta s e Presenta s e**	**100 1 20 % Presenta s e Presenta s e**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Muarasari Kota Bogor		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				52 Lembaga K emasyara k atan	52 Lembaga K emasyara k atan	10.000.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00	-2.720.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	178.965.000,00	178.965.000,00	178.965.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAA N KELURAHA N	-	- -			178.965.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				52 Pokmas / Ormas	52 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.030.000,00	17.030.000,00	-7.970.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN MULYAHARJA							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Mulyaharja		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	319.200.000,00	319.200.000,00	337.200.000,00	18.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			319.200.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Sko r Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nila i Nila i Nila i Sko r Nila i Nila i Nila i Nila i % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Mulyaharja		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.999.400,00	11.999.400,00	-3.000.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.599.900,00	1.599.900,00	-400.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.500.000,00	54.720.000,00	54.720.000,00	-3.780.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persantase Persantase Persentase Persantase**	**100 1 20 2 Persantase Persantase Persentase Persantase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Mulyaharja		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	7.370.000,00	7.370.000,00	-2.630.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	110.700.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			110.700.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN PAKUAN							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	-		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	145.200.000,00	145.200.000,00	153.200.000,00	8.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			164.400.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Pakuan		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.002.500,00	12.002.500,00	-2.997.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.597.500,00	1.597.500,00	-402.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

			Disediakan																	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	-6.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	-458.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	-		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	-2.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN PAMOYANAN							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	-		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	300.600.000,00	300.600.000,00	317.350.000,00	16.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			310.600.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Skor Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	-		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.510.600,00	1.510.600,00	-489.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	56.385.000,00	56.385.000,00	-2.115.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	828.000,00	828.000,00	-1.172.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	-		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	-2.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	400.102.000,00	400.230.000,00	400.230.000,00	128.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			400.102.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN RANCAMAYA							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Rancamaya		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	172.800.000,00	172.800.000,00	182.300.000,00	9.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			172.800.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	

			Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA				**i Nila i Nila i % %**	**i Nila i Nila i % %**												
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Rancamaya		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.824.000,00	10.824.000,00	-4.176.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	Kelurahan Rancamaya		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100% Lembaga Kemasyarakatan	100% Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	-2.450.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100% Unit	100% Unit	184.500.000,00	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			184.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
		KELURAHAN RANGGAMEKAR							**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**818.086.382,00**							**57.278.150.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**48.285.843.523,00**	**49.412.864.092,00**	**49.420.631.435,00**	**1.134.787.912,00**							**52.669.298.400,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif**				**100 Persentase**	**100 Persentase**	**4.355.400.000,00**	**4.355.400.000,00**	**4.598.650.000,00**	**30.100.000,00**							**4.385.500.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW,RT) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				100 %	100 %	4.355.400.000,00	4.355.400.000,00	4.598.650.000,00	243.250.000,00			-	- -	Kelurahan Ranggamekar		4.385.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	286.800.000,00	286.800.000,00	302.800.000,00	16.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			286.800.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

			dan Masyarakat Hukum Adat																	
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penganggaran Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja Rata Rata Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA**				**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**100 12,48 22,51 26,55 27,01 87,11 88,38 88,75 94 96,17 % Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai % %**	**44.368.443.523,00**	**45.495.464.092,00**	**45.284.481.435,00**	**4.353.354.877,00**							**48.721.798.400,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.045.945.900,00	2.278.307.400,00	1.671.234.600,00	-374.711.300,00			-	- -	Kelurahan Ranggamekar		2.290.798.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.500.000,00	52.245.000,00	52.245.000,00	-6.255.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.500.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	-592.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

			yang Disediakan										Rangga mekar							
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.882.639.335,00**	**4.707.169.805,00**	**4.565.937.805,00**	**-316.701.530,00**							**4.608.851.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase**				**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase**	**4.060.422.835,00**	**3.892.303.205,00**	**3.817.977.205,00**	**-319.570.935,00**							**3.740.851.900,00**	

			keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)																	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				100 %	100 %	3.266.898.330,00	3.098.076.500,00	3.098.076.500,00	-168.821.830,00			-	- -	-		3.170.851.900,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	7.146.400,00	7.146.400,00	-2.853.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rangga mekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	114.390.000,00	114.390.000,00	114.390.000,00	0,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rangga mekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			114.390.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	-7.475.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rangga mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	J U M L A H								**53.168.482.858,00**	**54.120.033.897,00**	**53.986.569.240,00**	**508.225.273.942,90**							**57.278.150.300,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Selatan.

Lampiran ff. Kecamatan Bogor Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 Disusun BerdasarkanHasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengantriwulan I (satu) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sampai dengan

triwulan satu tahun 2025.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2025sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja KECAMATAN BOGOR BARAT Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Renja perubahan Kecamatan Bogor Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 51.639.193.827,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan I sebesar Rp. 10.364.643.141 atau 20%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Maret 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										1		II		III		IV													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6+12		15 = 14/5*100%		16	17
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									

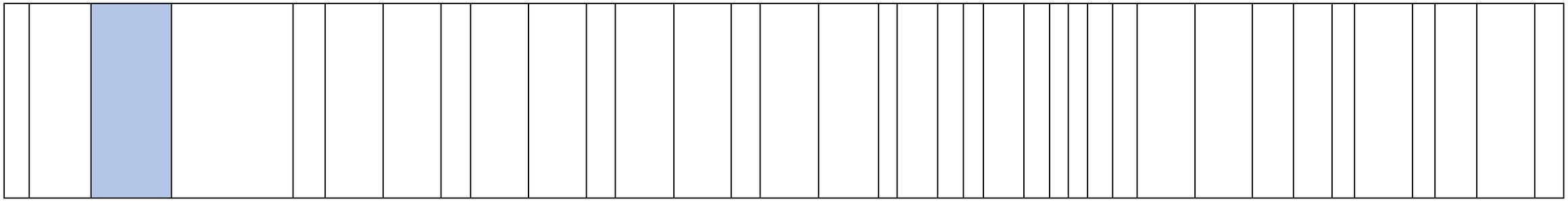

		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																												
	2.13	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																																												
1	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakat an (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif**	**75**	**%**	**4.732.760.800**			**25.749.400**	**75**	**%**	**4.732.760.800**	**75**	**%**	**1.178.420.000**																														

	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase partisipasi Lembaga Kemasyarakat an (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**4.732.760.800**			**25.749.400**	**100**	**%**	**4.732.760.800**	**100**	**%**	**1.178.420.000**			**-**			**-**		**-**							**5.911.180.800**		124,9%		

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	20.360.800	5	Lembaga	25.749.400	1	Dokumen	20.360.800	0	Dokumen	3.670.000,00											Lembaga	3.670.000	18,02%	18,02%		24.030.800		118,0%	Kasi Pemerintahan Kecamatan	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	1	Dokumen	265.800.000	-	-	-	1	Dokumen	265.800.000	0	Dokumen	66.450.000,00											Lembaga	66.450.000	25,00 %	25,00 %		332.250.000		125,0 %	Lurah Balumbangjaya	

		(RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag a Adat Desa/K e lurahan dan Masyar a kat Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																																
	2.13. 05.2. 01.00 02	Fasilita si Penataa n, Pember d ayaan dan Penday a gunaan Kelemb a gaan Lembag a Kemasy a rakatan Desa/K e lurahan (RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag	Jumlah Lembaga kemasyaraka ta n Desa/Kelura h an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura h an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatka n Kapasitasny a	1	Doku men	286.8 00.00 0	-	-	-	1	Doku men	286.8 00.00 0	0	Doku men	71.70 0.000 ,00											Lemb aga	71.70 0.000	25, 00 %	25 ,0 0 %		358.5 00.00 0		12 5,0 %	Lura h Bub u lak	

		a Adat Desa/Ke lurahan dan Masyar a kat																																	

		Hukum Adat																																		
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	431.400.000	-	-	-	1	Dokumen	431.400.000	0	Dokumen	106.950.000,00											Lembaga	106.950.000	24,79%	24,79%		538.350.000		124,8%	Lurah Cilendek Barat	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	327.600.000	-	-	-	1	Dokumen	327.600.000	0	Dokumen	81.900.000,00											Lembaga	81.900.000	25,00 %	25,00 %		409.500.000		125,0 %	Lurah Cilendek Timur	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	1	Dokumen	318.600.000	-	-	-	1	Dokumen	318.600.000	0	Dokumen	78.600.000,00											Lembaga	78.600.000	24,67%	24,67%		397.200.000		124,7%	Lurah Curug	

		(RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag a Adat Desa/K e lurahan dan Masyar a kat Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																																
	2.13. 05.2. 01.00 02	Fasilita si Penataa n, Pember d ayaan dan Penday a gunaan Kelemb a gaan Lembag a Kemasy a rakatan Desa/K e lurahan (RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag	Jumlah Lembaga kemasyaraka ta n Desa/Kelura h an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura h an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatka n Kapasitasny a	1	Doku men	308.4 00.00 0	-	-	-	1	Doku men	308.4 00.00 0	0	Doku men	77.10 0.000 ,00											Lemb aga	77.10 0.000	25, 00 %	25 ,0 0 %		385.5 00.00 0		12 5,0 %	Lura h Cur u g Mek a r	

		a Adat Desa/Ke lurahan dan Masyar a kat																																	

		Hukum Adat																																	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	359.400.000	-	-	-	1	Dokumen	359.400.000	0	Dokumen	89.850.000,00											Lembaga	89.850.000	25,00%	25,00%		449.250.000		125,0%	Luraah Gunung Batu	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	291.000.000	-	-	-	1	Dokumen	291.000.000	0	Dokumen	72.750.000,00											Lembaga	72.750.000	25,00%	25,00%		363.750.000		125,0%	Lurah Loji	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembaga gaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakata n Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat	1	Dokumen	162.000.000	-	-	-	1	Dokumen	162.000.000	0	Dokumen	40.500.000,00											Lembaga	40.500.000	25,00 %	25,00 %		202.500.000		125,0 %	Lurah Margajaya	

		(RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag a Adat Desa/K e lurahan dan Masyar a kat Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																																
	2.13. 05.2. 01.00 02	Fasilita si Penataa n, Pember d ayaan dan Penday a gunaan Kelemb a gaan Lembag a Kemasy a rakatan Desa/K e lurahan (RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag	Jumlah Lembaga kemasyaraka ta n Desa/Kelura h an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura h an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatka n Kapasitasny a	1	Doku men	433.8 00.00 0	-	-	-	1	Doku men	433.8 00.00 0	0	Doku men	108.4 50.00 0,00											Lemb aga	108.4 50.00 0	25, 00 %	25 ,0 0 %		542.2 50.00 0		12 5,0 %	Lura h Ment eng	

		a Adat Desa/Ke lurahan dan Masyar a kat																																	

		Hukum Adat																																	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	352.200.000	-	-	-	1	Dokumen	352.200.000	0	Dokumen	86.650.000,00											Lembaga	86.650.000	24,60 %	24,60 %		438.850.000		124,6 %	Lurah Pasir Jaya	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	315.000.000	-	-	-	1	Dokumen	315.000.000	0	Dokumen	78.750.000,00											Lembaga	78.750.000	25,00 %	25,00 %		393.750.000		125,0 %	Lurah Pasir Kuda	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	1	Dokumen	136.800.000	-	-	-	1	Dokumen	136.800.000	0	Dokumen	34.200.000,00											Lembaga	34.200.000	25,00 %	25,00 %		171.000.000		125,0 %	Lurah Pasir Mulya	

		(RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag a Adat Desa/K e lurahan dan Masyar a kat Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya																																
	2.13. 05.2. 01.00 02	Fasilita si Penataa n, Pember d ayaan dan Penday a gunaan Kelemb a gaan Lembag a Kemasy a rakatan Desa/K e lurahan (RT, RW, PKK, Posyan d u, LPM, dan Karang Taruna) , Lembag	Jumlah Lembaga kemasyaraka ta n Desa/Kelura h an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura h an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatka n Kapasitasny a	1	Doku men	232.8 00.00 0	-	-	-	1	Doku men	232.8 00.00 0	0	Doku men	58.20 0.000 ,00											Lemb aga	58.20 0.000	25, 00 %	25 ,0 0 %		291.0 00.00 0		12 5,0 %	Lura h Sem p lak	

		a Adat Desa/Ke lurahan dan Masyar a kat																																	

		Hukum Adat																																	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	287.400.000	-	-	-	1	Dokumen	287.400.000	0	Dokumen	71.850.000,00											Lembaga	71.850.000	25,00%	25,00%		359.250.000		125,0%	Lurah Sindang Barang	

	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	203.400.000	-	-	-	1	Dokumen	203.400.000	0	Dokumen	50.850.000,00											Lembaga	50.850.000	25,00 %	25,00 %		254.250.000		125,0 %	Luraah Situ Gede	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																											**6,01 %**							
Predikat kinerja																											**Sangat Rendah**							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																											**6,01 %**							
Predikat kinerja																											**Sangat Rendah**							

2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	100	%	**4.030.877.832**			**8.398.374.627**	100	%	**4.030.877.832**	100	%																	**8.589.682.767**		**213,10%**		
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan**	**100**	%	**3.517.590.570**			**7.855.562.027**	**100**	%	**3.517.590.570**	**100**	%	**108.239.740**			-	-		-			-							**7.963.801.767**		**226,40%**		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	2.778.600	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.915.800	7	Lembaga Kemasyarakatan	2.778.600	0	Lembaga Kemasyarakatan	-									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.915.800		140,9%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	210.109.000	2	Unit	184.753.550	2	Unit	210.109.000	0	Unit	-									0	Unit	-	0,00%	0,00%		184.753.550		87,9%	Lurah Balumbang Jaya	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	8.059.800	3	Pokmas/Ormas	265.800.000	1	Pokmas/Ormas	8.059.800	0	Pokmas/Ormas	-										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		265.800.000		3297,8%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.152.300	6	Lembaga Kemasyarakatan	11.040.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.152.300	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		11.040.000		135,4%	Lurah Bubulak	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	130.030.800	2	Unit	149.460.925	2	Unit	130.030.800	0	Unit	18.295.100,00										0	Unit	18.295.100	14,07%	14,07%		167.756.025		129,0%	Lurah Bubulak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas	13.748.400	5	Pokmas/Ormas	357.387.300	5	Pokmas/Ormas	13.748.400	0	Pokmas/Ormas	-										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		357.387.300		2599,5%	Lurah Bubulak	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.500.000		142,9%	Lurah Cilendek Barat	

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan																																
	7.01.03.2.02.02	Pembang unan Sarana dan Prasaran a Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	206.917.600	2	Unit	206.138.817	1	Unit	206.917.600	0	Unit	0,00										0	Unit	-	0,00%	0,00%		206.138.817		99,6%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	8.352.400	3	Pokmas/Ormas	444.256.200	1	Pokmas/Ormas	8.352.400	0	Pokmas/Ormas	0,00										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		444.256.200		5318,9%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembang unan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	3.550.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	3.550.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	0										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.500.000		126,8%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.03.2.02.02	Pembang unan Sarana dan Prasaran a	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	234.959.900	2	Unit	200.036.624	2	Unit	234.959.900	0	Unit	0										0	Unit	-	0,00%	0,00%		200.036.624		85,1%	Lurah Cilendek Timur	

		Kelurahan																																	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	2.580.000	3	Pokmas/Ormas	327.600.000	1	Pokmas/Ormas	2.580.000	0	Pokmas/Ormas										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		327.600.000		1269 7,7%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.177.200	6	Lembaga Kemasyarakatan	9.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.177.200	0	Lembaga Kemasyarakatan	-									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		9.750.000		135,8%	Lurah Curug	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	393.288.900	2	Unit	149.324.477	1	Unit	393.288.900	0	Unit	27.279.600,00									0	Unit	27.279.600	6,94%	6,94%		176.604.077		44,9%	Lurah Curug	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.250.000	3	Pokmas/Ormas	337.438.800	1	Pokmas/Ormas	10.250.000	1	Pokmas/Ormas	10.250.000,00									1	Pokmas/Ormas	10.250.000	100,00%	100,00%		347.688.800		3392,1%	Lurah Curug	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	2.777.600	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.915.800	3	Lembaga Kemasyarakatan	2.777.600	0	Lembaga Kemasyarakatan	-										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.915.800		141,0%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	199.641.000	2	Unit	178.454.606	1	Unit	199.641.000	0	Unit	-										0	Unit	-	0,00%	0,00%		178.454.606		89,4%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	1.864.200	3	Pokmas/Ormas	308.400.000	1	Pokmas/Ormas	1.864.200	0	Pokmas/Ormas	-										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		308.400.000		1654 3,3%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	0	Lembaga Kemasyarakatan											0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.500.000		142,9%	Lurah Gunung Batu	

		Kelurahan																																	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	201.696.000	2	Unit	216.687.694	2	Unit	201.696.000	0	Unit	12.549.040,00										0	Unit	12.549.040	6,22%	6,22%		229.236.734		113,7%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	22.902.800	3	Pokmas/Ormas	359.400.000	1	Pokmas/Ormas	22.902.800	0	Pokmas/Ormas	5.828.400,00										0	Pokmas/Ormas	5.828.400	25,45%	25,45%		365.228.400		1594,7%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.485.500	3	Lembaga Kemasyarakatan	7.584.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.485.500	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		7.584.200		217,6%	Lurah Loji	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	118.170.600	2	Unit	135.653.676	1	Unit	118.170.600	0	Unit	0,00										0	Unit	-	0,00%	0,00%		135.653.676		114,8%	Lurah Loji	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	10.744.400	3	Pokmas/Ormas	339.888.000	1	Pokmas/Ormas	10.744.400	0	Pokmas/Ormas	0,00										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		339.888.000		3163,4%	Lurah Loji	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.380.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.790.600	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.380.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.790.600		141,7%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	102.672.400	1	Unit	111.361.650	1	Unit	102.672.400	0	Unit	0,00										0	Unit	-	0,00%	0,00%		111.361.650		108,5%	Lurah Marga Jaya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	9.068.000	3	Pokmas/Ormas	183.359.300	1	Pokmas/Ormas	9.068.000	0	Pokmas/Ormas	0,00										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		183.359.300		2022,0%	Lurah Marga Jaya	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6.368.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	7.549.200	6	Lembaga Kemasyarakatan	6.368.400	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		7.549.200		118,5%	Lurah Menteng	

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan																																
	7.01.03.2.02.02	Pembang unan Sarana dan Prasaran a Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	558.446.900	2	Unit	175.625.806	4	Unit	558.446.900	0	Unit	0,00										0	Unit	-	0,00%	0,00%		175.625.806		31,4%	Lurah Mentteng	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	5.776.400	3	Pokmas/Ormas	433.800.000	1	Pokmas/Ormas	5.776.400	0	Pokmas/Ormas	0,00										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		433.800.000		7509,9%	Lurah Mentteng	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembang unan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.570.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.042.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.570.300	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		5.042.300		141,2%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.03.2.02.02	Pembang unan Sarana dan Prasaran a	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	265.256.200	3	Unit	210.422.360	2	Unit	265.256.200	0	Unit	8.968.800,00										0	Unit	8.968.800	3,38%	3,38%		219.391.160		82,7%	Lurah Pasir Jaya	

		Kelurahan																																		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	18.484.400	3	Pokmas/Ormas	359.989.100	1	Pokmas/Ormas	18.484.400	0	Pokmas/Ormas	0,00										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		359.989.100		1947,5%	Lurah Pasir Jaya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	5.868.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	9.262.400	3	Lembaga Kemasyarakatan	5.868.400	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		9.262.400		157,8%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	195.039.320	2	Unit	182.684.732	1	Unit	195.039.320	0	Unit	0,00										0	Unit	-	0,00%	0,00%		182.684.732		93,7%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	9.135.700	3	Pokmas/Ormas	315.222.500	1	Pokmas/Ormas	9.135.700	0	Pokmas/Ormas	3.045.800,00										0	Pokmas/Ormas	3.045.800	33,34%	33,34%		318.268.300		3483,8%	Lurah Pasir Kuda	

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.404.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.102.300	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.404.400	0	Lembaga Kemasyarakatan										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.102.300		129,0%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	141.851.700	1	Unit	109.964.898	1	Unit	141.851.700	0	Unit										0	Unit	-	0,00%	0,00%		109.964.898		77,5%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	2.418.800	3	Pokmas/Ormas	143.994.000	3	Pokmas/Ormas	2.418.800	0	Pokmas/Ormas										0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		143.994.000		5953,1%	Lurah Pasir Mulya	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.341.900	6	Lembaga Kemasyarakatan	5.998.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.341.900	0	Lembaga Kemasyarakatan										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		5.998.400		138,2%	Lurah Semplak	

		Kelurahan																																	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	92.204.000	2	Unit	136.931.358	1	Unit	92.204.000	0	Unit	12.543.000,00										0	Unit	12.543.000	13,60%	13,60%		149.474.358		162,1%	Lurah Semplak	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	6.500.800	3	Pokmas/Ormas	293.497.800	1	Pokmas/Ormas	6.500.800	0	Pokmas/Ormas											0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		293.497.800		4514,8%	Lurah Semplak	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	6.176.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	8.435.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	6.176.000	0	Lembaga Kemasyarakatan											0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		8.435.000		136,6%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	73.799.900	2	Unit	142.127.288	1	Unit	73.799.900	0	Unit											0	Unit	-	0,00%	0,00%		142.127.288		192,6%	Lurah Sindang Barang	

	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	9.480.000	3	Pokmas/Ormas	391.525.500	3	Pokmas/Ormas	9.480.000	0	Pokmas/Ormas	9.480.000,00										0	Pokmas/Ormas	9.480.000	100,00%	100,00%		401.005.500		4230,0%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.646.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.735.900	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.646.400	0	Lembaga Kemasyarakatan	-										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.735.900		141,2%	Lurah Situ Gede	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	161.089.900	2	Unit	149.247.966	2	Unit	161.089.900	0	Unit	-										0	Unit	-	0,00%	0,00%		149.247.966		92,6%	Lurah Situ Gede	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	24.073.350	3	Pokmas/Ormas	257.505.200	1	Pokmas/Ormas	24.073.350	0	Pokmas/Ormas											0	Pokmas/Ormas	-	0,00%	0,00%		257.505.200		1069,7%	Lurah Situ Gede	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**6,31%**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Pembangunan Wilayah**	**0,3**	%	**513.287.262**			**542.812.600**			**513.287.262**												-						**625.881.000**		**121,94%**		
			Terlaksanaan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	**3,4**	**Point**										**83.068.400**			-																
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	389.683.262	1	Lembaga Kemasyarakatan	454.576.700	1	Lembaga Kemasyarakatan	389.683.262	0	Lembaga Kemasyarakatan	61.350.000,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	61.350.000	15,74%	15,74%		515.926.700		132,4%	Kasi Kemasyarakatan	
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	93.201.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	58.123.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	93.201.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	13.520.000,00										0	Lembaga Kemasyarakatan	13.520.000	14,51%	14,51%		71.643.200		76,9%	Kasi Kemasyarakatan	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	16.750.400	1	Laporan	23.112.700	1	Laporan	16.750.400	0	Laporan	5.698.400,00										0	Laporan	5.698.400	34,02%	34,02%		28.811.100		172,0%	Kasi Perekonomian	

	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfa atan Teknolog i Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	13.652.600	1	Laporan	7.000.000	1	Laporan	13.652.600	0	Laporan	2.500.000,00										0	Laporan	2.500.000	18,31%	18,31%		9.500.000		69,6%	Kasi Perekonomian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**20,6**								

																												5 %							
																												Predikat kinerja			**Sangat Rendah**				
																												Rata-rata capaian kinerja Program (%)			**20,65 %**				
																												Predikat kinerja			**Sangat Rendah**				
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	90	**%**	**81.517.200**			**98.703.685**	90	**%**	**81.517.200**	90	**%**	**16.339.400**			**-**			**-**			**-**							**115.043.085**				
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	88.1	**Point**	**81.517.200**			**98.703.685**	88.1	**Point**	**81.517.200**	88.1	**Point**																	**115.043.085**		**141,13%**		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indones	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	1	Laporan	81.517.200	1	Laporan	98.703.685	1	Laporan	81.517.200	0	Laporan	16.339.400,00										0	Laporan	16.339.400	20,04 %	20,04 %		115.043.085		141,13%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiba	

		i a dan																																n	

		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																																
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**20,04%**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																												**20,04%**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							
4	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%	**42.625.164.928**	**100**	%	**35.182.277.072**																						**44.030.705.006**		**0,03%**		
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	12,48	Nilai																														
			Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup	21,97	Nilai																														

			Perangkat Daerah																																	
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	26,55	Nilai																															
			Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan Prasarana	81,11	%																														
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan	88,38	%																														
			Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75	%																														
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%																														
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	%										**5.953.000**			-			-			-												
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALU**	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100	%	**13.734.200**			**9.999.800**			**13.734.200**																			**15.952.800**				

		A SI																																	

		KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	%																																					
			Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	95,4	%																																					
			Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	95,8	%																																					
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	10.484.800	1	Dokumen	6.999.800	3	Dokumen	10.484.800	0	Dokumen	5.953.000,00										-	Dokumen	5.953.000	56,78%	56,78%		12.952.800		123,54%	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	Laporan	3.249.400	1	Laporan	3.000.000	2	Laporan	3.249.400	0	Laporan	-										-	Dokumen	-	0,00%	0,00%		3.000.000		92,32%	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	

			Ikhtisar																																

			Realisasi Kinerja SKPD																																
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**28,39 %**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	100	%	**28.324.355.594**	**100**	%	**28.468.889.822**	100	%	**28.324.355.594**			**6.503.512.363**			-			-									**34.954.180.885**		**123,41%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
			Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	%					95	%																								
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Orang/bulan	28.253.006.394	133	Orang/bulan	28.467.728.522	132	Orang/bulan	28.253.006.394	0	Orang/bulan	6.486.452.363,00										-	Orang/bulan	6.486.452.363	22,96 %	22,96 %		34.954.180.885		123,72%		

	7.01.01.2.02.05	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.432.400	1	Laporan	1.161.300	1	Laporan	1.432.400	0	Laporan	-									-	Laporan	-	0,00%	0,00%		1.161.300		81,07%		
	7.01.01.2.02.0	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	69.916.800	1		41.226.600	1	Laporan	69.916.800	0	Laporan	17.060.000,00									-	Laporan	17.060.000	24,40%	24,40%		58.286.600		83,37%		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																											**11,48%**								
Predikat kinerja																											**Sangat Rendah**								
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	%	**3.416.399.575**	**100**	%	**3.339.746.160**	**100**	%	**3.416.399.575**			**1.321.255.050**			-			-			-							**4.661.001.210**		**136,43%**		

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.954.600	1	Paket	11.962.400	1	Paket	11.954.600	1	Paket	11.933.000,00										1	Paket	11.933.000	99,82%	99,82%		23.895.400		199,88%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.162.710.000	12	Paket	907.600.260	12	Paket	1.162.710.000	3	Paket	648.052.000,00										3	Paket	648.052.000	55,74%	55,74%		1.555.652.260		133,80%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	295.737.400	1	Paket	28.188.500	1	Paket	295.737.400	0	Paket	267.170.950,00										0	Paket	267.170.950	90,34%	90,34%		295.359.450		99,87%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	249.435.000	1	Paket	211.815.000	1	Paket	249.435.000	0	Paket	42.825.000,00										0	Paket	42.825.000	17,17%	17,17%		254.640.000		102,09%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.769.500	1	Paket	27.996.800	1	Paket	25.769.500	0	Paket	4.344.600,00										0	Paket	4.344.600	16,86%	16,86%		32.341.400		125,50%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

	7.01.01.2.06.06	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratur a n Perund a ng-undang a n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	34.866.000	4	Dokumen	23.780.000	1	Dokumen	34.866.000	0	Dokumen	6.355.000,00										0	Dokumen	6.355.000	18,23%	18,23%		30.135.000		86,43%	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	7.01.01.2.06.09	Penyelen ggaraan Rapat Koordin a si dan Konsult a si SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	252.754.975	1	Laporan	538.029.000	1	Laporan	252.754.975	0	Laporan	9.878.500,00										-	Laporan	9.878.500	3,91%	3,91%		547.907.500		216,77%	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	7.01.01.2.06.01	Penyedia an Kompo n en Instalas i Listrik/ P enerang a n Bangun a n Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.498.000	1	Paket	3.975.500	1	Paket	2.498.000	0	Paket	1.261.000,00										0	Paket	1.261.000	50,48%	50,48%		5.236.500		209,63%	Lurah Balumban g Jaya	
	7.01.01.2.06.02	Penyedia an Peralat a n dan Perleng k apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.356.500	1	Paket	14.003.000	1	Paket	9.356.500	0	Paket	3.173.600,00										0	Paket	3.173.600	33,92%	33,92%		17.176.600		183,58%	Lurah Balumban g Jaya	
	7.01.01.2.06.03	Penyedia an Peralat a n Ruma h Tangg a	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.678.800	1	Paket	9.877.400	1	Paket	8.678.800	0	Paket	3.013.300,00										0	Paket	3.013.300	34,72%	34,72%		12.890.700		148,53%	Lurah Balumban g Jaya	

	7.01.01.2.06.04	Penyedia an Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.890.000	1	Paket	66.420.000	1	Paket	55.890.000	0	Paket	13.890.000,00										0	Paket	13.890.000	24,85%	24,85%		80.310.000		143,69%	Lurah Balumban	

		Logistik Kantor																																		g Jaya	
	7.01.01.2.06.05	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.586.500	1	Paket	1.983.300	1	Paket	1.586.500	0	Paket	576.300,00										0	Paket	576.300	36,33%	36,33%		2.559.600		161,34%	Lurah Balumbang Jaya	
	7.01.01.2.06.01	Penyedia an Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.298.500	1	Paket	2.311.600	1	Paket	2.298.500	0	Paket	2.298.500,00										0	Paket	2.298.500	100,00%	100,00%		4.610.100		200,57%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.02	Penyedia an Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.132.100	1	Paket	15.703.400	1	Paket	9.132.100	0	Paket	2.538.500,00										0	Paket	2.538.500	27,80%	27,80%		18.241.900		199,76%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.03	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	9.377.300	1	Paket	12.000.000	1	Paket	9.377.300	0	Paket	1.281.200,00										0	Paket	1.281.200	13,66%	13,66%		13.281.200		141,63%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	66.540.000	1	Paket	76.555.000	1	Paket	66.540.000	0	Paket	14.160.000,00										0	Paket	14.160.000	21,28%	21,28%		90.715.000		136,33%	Lurah Bubulak	
	7.01.01.2.06.05	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.881.900	1	Paket	2.400.000	1	Paket	1.881.900	0	Paket	357.300,00										0	Paket	357.300	18,99%	18,99%		2.757.300		146,52%	Lurah Bubulak	

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.366.600	1	Paket	3.798.000	1	Paket	3.366.600	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		3.798.000		112,81%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.769.400	1	Paket	14.580.500	1	Paket	12.769.400	0	Paket	8.794.900,00										0	Paket	8.794.900	68,87%	68,87%		23.375.400		183,06%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.734.900	1	Paket	4.920.800	1	Paket	4.734.900	0	Paket	3.547.500,00										0	Paket	3.547.500	74,92%	74,92%		8.468.300		178,85%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	59.395.000	1	Paket	78.175.000	1	Paket	59.395.000	0	Paket	12.000.000,00										0	Paket	12.000.000	20,20%	20,20%		90.175.000		151,82%	Lurah Cilendek Barat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.511.600	1	Paket	1.539.000	1	Paket	1.511.600	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		1.539.000		101,81%	Lurah Cilendek Barat	

| | | |

	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.066.600	1	Paket	14.691.000	1	Paket	18.066.600	0	Paket	4.580.700,00										0	Paket	4.580.700	25,35%	25,35%		19.271.700		106,67%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	7.016.300	1	Paket	6.141.000	1	Paket	7.016.300	0	Paket	1.828.000,00										0	Paket	1.828.000	26,05%	26,05%		7.969.000		113,58%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.100.000	1	Paket	75.750.000	1	Paket	62.100.000	0	Paket	13.350.000,00										0	Paket	13.350.000	21,50%	21,50%		89.100.000		143,48%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.802.800	1	Paket	2.316.600	1	Paket	1.802.800	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		2.316.600		128,50%	Lurah Cilendek Timur	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.104.500	1	Paket	992.000	1	Paket	1.104.500	0	Paket	441.800,00										0	Paket	441.800	40,00%	40,00%		1.433.800		129,81%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.613.600	1	Paket	11.254.300	1	Paket	8.613.600	0	Paket	2.367.300,00										0	Paket	2.367.300	27,48%	27,48%		13.621.600		158,14%	Lurah Curug	

	7.01.01.2.06.03	Penyedia an Peralata	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	2.563.800	1	Paket	3.534.000	1	Paket	2.563.800	0	Paket	901.100,00										0	Paket	901.100	35,15%	35,1		4.435.100		172,99%	Lurah	

		n Rumah Tangga	yang Disediakan																										5 %						Curug	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.130.000	1	Paket	64.265.000	1	Paket	50.130.000	0	Paket	13.080.000,00										0	Paket	13.080.000	26,09%	26,09%		77.345.000		154,29%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.039.200	1	Paket	4.184.700	1	Paket	3.039.200	0	Paket	759.600,00										0	Paket	759.600	24,99%	24,99%		4.944.300		162,68%	Lurah Curug	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.727.400	1	Paket	3.114.500	1	Paket	2.727.400	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		3.114.500		114,19%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.575.900	1	Paket	20.704.900	1	Paket	15.575.900	0	Paket	3.921.800,00										0	Paket	3.921.800	25,18%	25,18%		24.626.700		158,11%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.542.000	1	Paket	12.232.300	1	Paket	8.542.000	0	Paket	2.219.200,00										0	Paket	2.219.200	25,98%	25,98%		14.451.500		169,18%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	60.000.000	1	Paket	65.760.000	1	Paket	60.000.000	0	Paket	12.990.000,00										0	Paket	12.990.000	21,65%	21,65%		78.750.000		131,25%	Lurah Curug Mekar	

r

	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.858.800	1	Paket	2.272.500	1	Paket	1.858.800	0	Paket	463.800,00										0	Paket	463.800	24,95%	24,95%		2.736.300		147,21%	Lurah Curug Mekar	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.199.800	1	Paket	4.991.300	1	Paket	3.199.800	0	Paket	1.599.900,00										0	Paket	1.599.900	50,00%	50,00%		6.591.200		205,99%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.733.400	1	Paket	12.199.300	1	Paket	9.733.400	0	Paket	3.999.100,00										0	Paket	3.999.100	41,09%	41,09%		16.198.400		166,42%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.531.500	1	Paket	4.368.200	1	Paket	2.531.500	0	Paket	1.242.300,00										0	Paket	1.242.300	49,07%	49,07%		5.610.500		221,63%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	69.060.000	1	Paket	66.740.000	1	Paket	69.060.000	0	Paket	14.610.000,00										0	Paket	14.610.000	21,16%	21,16%		81.350.000		117,80%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.276.200	1	Paket	3.518.500	1	Paket	2.276.200	0	Paket	495.800,00										0	Paket	495.800	21,78%	21,78%		4.014.300		176,36%	Lurah Gunung Batu	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	Paket	2.976.000	1	Paket	2.976.000	1	Paket	2.976.000	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		2.976.000		100,00%	Lurah Loji	

			Listrik/Pener a																																

		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan																																	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.824.800	1	Paket	10.252.700	1	Paket	8.824.800	0	Paket	4.048.100,00										0	Paket	4.048.100	45,87%	45,87%		14.300.800		162,05%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.509.200	1	Paket	4.340.700	1	Paket	3.509.200	0	Paket	0,00										0	Paket	-	0,00%	0,00%		4.340.700		123,69%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	67.455.000	1	Paket	74.375.000	1	Paket	67.455.000	0	Paket	12.780.000,00										0	Paket	12.780.000	18,95%	18,95%		87.155.000		129,20%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.927.200	1	Paket	2.409.300	1	Paket	1.927.200	0	Paket	-										0	Paket	-	0,00%	0,00%		2.409.300		125,02%	Lurah Loji	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.633.400	1	Paket	4.649.500	1	Paket	2.633.400	0	Paket	1.146.400,00										0	Paket	1.146.400	43,53%	43,53%		5.795.900		220,09%	Lurah Margajaya	

	7.01.01.2.06.02	Penyedia an Peralata n dan Perlengk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.252.500	1	Paket	16.591.200	1	Paket	11.252.500	0	Paket	3.144.700,00										0	Paket	3.144.700	27,95%	27,95%		19.735.900		175,39%	Luah Marga Jaya	

		apan Kantor																																		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.257.800	1	Paket	5.322.000	1	Paket	4.257.800	0	Paket	1.500.000,00										0	Paket	1.500.000	35,23%	35,23%		6.822.000		160,22%	Luah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.345.000	1	Paket	60.085.800	1	Paket	72.345.000	0	Paket	15.375.000,00										0	Paket	15.375.000	21,25%	21,25%		75.460.800		104,31%	Luah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.586.400	1	Paket	3.236.700	1	Paket	2.586.400	0	Paket	651.000,00										0	Paket	651.000	25,17%	25,17%		3.887.700		150,31%	Luah Marga Jaya	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.726.000	1	Paket	2.338.800	1	Paket	2.726.000	0	Paket	681.500,00										0	Paket	681.500	25,00%	25,00%		3.020.300		110,80%	Luah Menteng	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.980.600	1	Paket	12.344.300	1	Paket	13.980.600	0	Paket	4.068.300,00										0	Paket	4.068.300	29,10%	29,10%		16.412.600		117,40%	Luah Menteng	

	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.667.000	1	Paket	979.400	1	Paket	1.667.000	0	Paket	380.100,00										0	Paket	380.100	22,80 %	22,80 %		1.359.500		81,55 %	Luah Mentteng	

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	70.560.000	1	Paket	82.950.000	1	Paket	70.560.000	0	Paket	15.750.000,00										0	Paket	15.750.000	22,32%	22,32%		98.700.000		139,88%	Luah Mentang	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.588.500	1	Paket	2.349.100	1	Paket	2.588.500	0	Paket	604.400,00										0	Paket	604.400	23,35%	23,35%		2.953.500		114,10%	Luah Mentang	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.765.600	1	Paket	4.700.400	1	Paket	4.765.600	0	Paket	1.257.100,00										0	Paket	1.257.100	26,38%	26,38%		5.957.500		125,01%	Luah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.244.600	1	Paket	18.545.300	1	Paket	14.244.600	0	Paket	3.830.000,00										0	Paket	3.830.000	26,89%	26,89%		22.375.300		157,08%	Luah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	7.252.600	1	Paket	8.491.200	1	Paket	7.252.600	0	Paket	1.746.300,00										0	Paket	1.746.300	24,08%	24,08%		10.237.500		141,16%	Luah Pasir Jaya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	57.310.000	1	Paket	70.890.000	1	Paket	57.310.000	0	Paket	13.800.000,00										0	Paket	13.800.000	24,08%	24,08%		84.690.000		147,78%	Luah Pasir Jaya	

	7.01.01.2.06.05	Penyedia an Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.870.200	1	Paket	1.919.900	1	Paket	1.870.200	0	Paket	200.000,00										0	Paket	200.000	10,69 %	10,69 %		2.119.900		113,35%	Luah Pasir Jaya	

		Penggandaan																																			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.267.600	1	Paket	998.200	1	Paket	1.267.600	0	Paket	1.267.600,00										0	Paket	1.267.600	100,00%	100,00%		2.265.800		178,75%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.650.100	1	Paket	12.715.000	1	Paket	7.650.100	0	Paket	4.561.300,00										0	Paket	4.561.300	59,62%	59,62%		17.276.300		225,83%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.661.300	1	Paket	4.775.600	1	Paket	3.661.300	0	Paket	675.500,00										0	Paket	675.500	18,45%	18,45%		5.451.100		148,88%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	71.250.000	1	Paket	82.155.000	1	Paket	71.250.000	0	Paket	16.320.000,00										0	Paket	16.320.000	22,91%	22,91%		98.475.000		138,21%	Lurah Pasir Kuda	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.600.000	1	Paket	2.233.800	1	Paket	1.600.000	0	Paket	800.000,00										0	Paket	800.000	50,00%	50,00%		3.033.800		189,61%	Lurah Pasir Kuda	

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.653.600	1	Paket	2.991.800	1	Paket	1.653.600	0	Paket	413.400,00										0	Paket	413.400	25,00%	25,00%		3.405.200		205,93%	Lurah Pasir Muly a	

		Bangun a n Kantor																																	
	7.01.01.2.06.02	Penyedia an Peralat a n dan Perleng k apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.262.100	1	Paket	13.980.500	1	Paket	11.262.100	0	Paket	3.238.300,00										0	Paket	3.238.300	28,75 %	28,75 %		17.218.800		152,89%	Lura h Pasir Mul y a	
	7.01.01.2.06.03	Penyedia an Peralat a n Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.176.200	1	Paket	5.371.400	1	Paket	4.176.200	0	Paket	1.318.300,00										0	Paket	1.318.300	31,57 %	31,57 %		6.689.700		160,19%	Lura h Pasir Mul y a	
	7.01.01.2.06.04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	61.590.000	1	Paket	68.710.000	1	Paket	61.590.000	0	Paket	11.540.000,00										0	Paket	11.540.000	18,74 %	18,74 %		80.250.000		130,30%	Lura h Pasir Mul y a	
	7.01.01.2.06.05	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.219.800	1	Paket	1.824.000	1	Paket	1.219.800	0	Paket	443.600,00										0	Paket	443.600	36,37 %	36,37 %		2.267.600		185,90%	Lura h Pasir Mul y a	
	7.01.01.2.06.01	Penyedia an Kompon en Instalasi Listrik/Penerang a n Bangun a n Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	873.000	1	Paket	992.000	1	Paket	873.000	0	Paket	116.400,00										0	Paket	116.400	13,33 %	13,33 %		1.108.400		126,96%	Lura h Sem p lak	
	7.01.01.2.06.02	Penyedia an Peralat a n dan Perleng k apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang	1	Paket	8.297.300	1	Paket	11.254.300	1	Paket	8.297.300	0	Paket	1.421.500,00										0	Paket	1.421.500	17,13 %	17,13 %		12.675.800		152,77%	Lura h Sem p lak	

			Disediakan																																

	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.746.200	1	Paket	3.534.000	1	Paket	2.746.200	0	Paket	303.800,00										0	Paket	303.800	11,06%	11,06%		3.837.800		139,75%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	65.460.000	1	Paket	77.425.000	1	Paket	65.460.000	0	Paket	11.640.000,00										0	Paket	11.640.000	17,78%	17,78%		89.065.000		136,06%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.336.900	1	Paket	4.184.700	1	Paket	3.336.900	0	Paket	790.500,00										0	Paket	790.500	23,69%	23,69%		4.975.200		149,10%	Lurah Semplak	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.904.000	1	Paket	7.758.000	1	Paket	7.904.000	0	Paket	2.254.900,00										0	Paket	2.254.900	28,53%	28,53%		10.012.900		126,68%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.928.800	1	Paket	11.166.000	1	Paket	9.928.800	0	Paket	2.738.100,00										0	Paket	2.738.100	27,58%	27,58%		13.904.100		140,04%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	4.740.200	1	Paket	5.851.000	1	Paket	4.740.200	0	Paket	1.341.000,00										0	Paket	1.341.000	28,29%	28,29%		7.192.000		151,72%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.060.000	1	Paket	82.440.000	1	Paket	78.060.000	0	Paket	15.690.000,00										0	Paket	15.690.000	20,10%	20,10%		98.130.000		125,71%	Lurah Sindang	

																																				Barang	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.560.000	1	Paket	4.350.000	1	Paket	3.560.000	0	Paket	888.000,00										0	Paket	888.000	24,94%	24,94%		5.238.000		147,13%	Lurah Sindang Barang	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.650.800	1	Paket	2.462.400	1	Paket	2.650.800	0	Paket	662.700,00										0	Paket	662.700	25,00%	25,00%		3.125.100		117,89%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.659.900	1	Paket	18.612.700	1	Paket	14.659.900	0	Paket	4.699.800,00										0	Paket	4.699.800	32,06%	32,06%		23.312.500		159,02%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.141.000	1	Paket	2.739.400	1	Paket	2.141.000	0	Paket	1.622.300,00										0	Paket	1.622.300	75,77%	75,77%		4.361.700		203,72%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.975.000	1	Paket	77.425.000	1	Paket	72.975.000	0	Paket	17.130.000,00										0	Paket	17.130.000	23,47%	23,47%		94.555.000		129,57%	Lurah Situ Gede	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.343.200	1	Paket	2.929.500	1	Paket	2.343.200	0	Paket	585.600,00										0	Paket	585.600	24,99%	24,99%		3.515.100		150,01%	Lurah Situ Gede	

Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**29,97%**						
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**						
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	%	**6.514.692.700**	**85**	%	**84.000.000**	**100**	%	**6.514.692.700**			**84.000.000**			-												**168.000.000**		**2,58%**		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6.514.692.700	1	Unit	84.000.000	1	Unit	6.514.692.700	0	Unit	84.000.000,00										0	Unit	84.000.000	1,29%	1,29%		168.000.000		2,58%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
												-																						
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**1,29%**						
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**						

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**2.843.968.938**	**100**	**%**	**2.668.868.530**	**100**	**%**	**2.843.968.938**			**875.859.821**			**-**													**3.544.728.351**		**124,64%**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	298.099.266	1	Laporan	298.938.606	1	Laporan	298.099.266	0	Laporan	83.019.033,00										0	Laporan	83.019.033	27,85 %	27,85 %		381.957.639		128,13%	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.545.869.672	1	Laporan	2.369.929.924	1	Laporan	2.545.869.672	0	Laporan	792.840.788,00										0	Laporan	792.840.788	31,14 %	31,14 %		3.162.770.712		124,23%	Kasubag Umum dan Kepegawai an	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**29,50 %**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**1.512.013.921**	**85**	**%**	**610.772.760**	**100**	**%**	**1.512.013.921**																			**686.841.760**		**45,43 %**		

	7.01.01.2.09.02	Penyedia an Jasa Pemelih a raan, Biaya Pemelih a raan, Pajak, dan Perizina n Kendar a an Dinas Operasi o nal atau Lapang a n	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	177.504.521	45	Unit	153.867.250	23	Unit	177.504.521	6	Unit	34.095.000,00										6	Unit	34.095.000	19,21%	19,21%		187.962.250		105,89%	Kasu bag Umum dan Kepegawai an	
	7.01.01.2.09.06	Pemelih a raan Peralat a n dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	112.720.000	214	Unit	59.620.000	120	Unit	112.720.000	10	Unit	35.300.000,00										10	Unit	35.300.000	31,32%	31,32%		94.920.000		84,21%	Kasu bag Umum dan Kepegawai an	
	7.01.01.2.09.0	Pemelih a raan/Re habilitas i Gedung Kantor dan Bangun a n Lainny a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4	Unit	1.221.789.400	5	Unit	397.285.510	4	Unit	1.221.789.400	1	Unit	6.674.000,00										1	Unit	6.674.000	0,55%	0,55%		403.959.510		33,06%	Kasu bag Umum dan Kepegawai an	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**17,02%**							

Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**17,02 %**							

																														Predikat kinerja			**Sangat Rendah**									
5	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**168.873.067**	**3,46**	**Point**	**38.540.000**	**100**	**%**	**168.873.067**																					**38.540.000**		**22,82%**		
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**100**	**%**	**31.543.600**			**38.540.000**	**100**	**%**	**31.543.600**						**-**													**38.540.000**		**81,85%**		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	31.543.600	1	Laporan	38.540.000	1	Laporan	31.543.600	1	Laporan	**-**										1	Laporan	-	0,00%	0,00%		38.540.000		122,18%	Kasi Pemerintahan	

		Vertikal Terkait																																	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**100**	**%**	**2.300.000.000**			**-**																						**-**		**#DIV/0!**		
	7.01.02.2.02.01	Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang terkait dengan Kewenan gan Lain yang Dilimpah kan								1	Kegiatan	-	**0**	**Kegiatan**	**-**		**Kegiatan**			**Kegiatan**					0	Kegiatan	-	0,00%							Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																												**0,00%**							
Predikat kinerja																												**Sangat Rendah**							
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**	**Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar**	100	**Point**	**137.329.467**			**-**	100	**Point**	**137.329.467**			**71.722.167**			**-**			**-**										**181.727.867**		**75,57%**		

		tidak Dilaksan akan oleh Unit Kerja Perang k at Daerah yang ada di Kecama tan	**operasional prosedur**																																
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	71.722.167	1	Dokumen	69.801.500	1	Dokumen	71.722.167	0	Dokumen	71.722.167,00										0	Dokumen	71.722.167	100,00%	100,00%		141.523.667		197,32%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	59.097.300			0,00	1	Laporan	59.097.300	0	Laporan	40.204.200,00											Dokumen	40.204.200	68,03%	68,03%		40.204.200		68,03%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	6.510.000			0,00	1	Laporan	6.510.000	0	Laporan	-											Dokumen	-	0,00%	0,00%		-		0,00%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	

		kat di Wilayah Kecamat an																																	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																															**100,00%**				
Predikat kinerja																															**Sangat Tinggi**				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																															**50,00%**				
Predikat kinerja																															**Sangat Rendah**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																															**22,74%**				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																															**Sangat Rendah**				
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN						**51.639.193.827**			**43.854.672.884**			**51.639.193.827**			**10.364.643.141**			**-**			**-**			**-**			**10.364.643.141**		**20,07%**		**52.773.970.858**		**97,85%**		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR BARAT TAHUN 2025

3.1 Unsur W a j i b Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp. 796.467.179 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 264.250.000;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 106.582.562;

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 425.634.617.

4. Adapun subkegiatan yang berkurang yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 209.568.000;

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Barat Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Barat.

Lampiran gg. Kecamatan Bogor Utara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. adaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dengan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 Disusun BerdasarkanHasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengantriwulan I (satu) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sampai dengan triwulan satu tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

   2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

    Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

    9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2025sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja KECAMATAN BOGOR UTARA Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN SEMESTER I

Renja perubahan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 29.607.194.754,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada Semester I sebesar Rp. 15.227.193.433 atau 51.43%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Juni 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Semester I Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100%		14 = 6+12			15 = 14/5*100%		16	17
	2.13	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																													
1	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**3**	**Bulan**	**1.100.000**	**6**	**Bulan**	**1.650.000**	**6**	**Bulan**	**2.750.000**	**16,67 %**	**2.750.000**			**6.600.000**				
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**100**	**%**	**6.600.000**	**3**	**Bulan**	**1.100.000**	**6**	**Bulan**	**1.650.000**	**6**	**Bulan**	**2.750.000**	**16,67 %**	**2.750.000**			**6.600.000**		**100,00%**	Kasi Pemerintahan	
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	6.600.000	1	Lembaga	6.600.000	1	Lembaga	6.600.000	1	Lembaga	1.100.000	1	Lembaga	1.650.000	1	Lembaga	2.750.000	16,67%	2.750.000			6.600.000		**100,00%**		
			Honorarium (BOP) FK LPM Kecamatan	12	Bulan	6.600.000			6.600.000	12	Bulan	6.600.000	3	Bulan	1.100.000	3	Bulan	1.650.000	3	Bulan	2.750.000	41,67%	2.750.000							
	2.13	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG**																													

		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																													
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Keluraha yang Aktif**	100	%					100	%		100	%					100	%											
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan yang aktif**	100	%	**3.055.800.000**			NA	100	%	**3.055.800.000**	100	%	**760.800.000**			**760.800.000**	100	%	**760.800.000**									
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Bantarjati	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	395.400.000	NA	NA	-	1	Lembaga	395.400.000	1	Lembaga	98.850.000			98.850.000	1	Lembaga	197.700.000	25,00%	197.700.000							
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	395.400.000	NA	NA		12	Bulan	395.400.000	3	Bulan	98.850.000				6	Bulan	98.850.000	25,00%	98.850.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Cibuluh	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	262.200.000				1	Lembaga	262.200.000	1	Lembaga	65.550.000			65.550.000	1	Lembaga	131.100.000	25,00%	131.100.000							
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	262.200.000				12	Bulan	262.200.000	3	Bulan	65.550.000				3	Bulan	65.550.000	25,00%	65.550.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Ciluar	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Lembaga	274.800.000				1	Lembaga	274.800.000	1	Lembaga	68.700.000			68.700.000	1	Lembaga	68.700.000	25,00%	68.700.000							

			yang Ditingkatkan Kapasitasnya																											
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	274.800.000				12	Bulan	274.800.000	3	Bulan	68.700.000				3	Bulan	68.700.000	25,00%	68.700.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Cimahpar	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	392.400.000				1	Lembaga	392.400.000	1	Lembaga	98.100.000			98.100.000	1	Lembaga	98.100.000	25,00%	98.100.000							
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	392.400.000				12	Bulan	392.400.000	3	Bulan	98.100.000				3	Bulan	98.100.000	25,00%	98.100.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Ciparigi	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	379.200.000				1	Lembaga	379.200.000	1	Lembaga	94.800.000			94.800.000	1	Lembaga	94.800.000	25,00%	94.800.000							
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	379.200.000				12	Bulan	379.200.000	3	Bulan	94.800.000				3	Bulan	94.800.000	25,00%	94.800.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Kedung Halang	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	411.000.000				1	Lembaga	411.000.000	1	Lembaga	102.750.000			102.750.000	1	Lembaga	102.750.000	25,00%	102.750.000							
			Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	411.000.000				12	Bulan	411.000.000	3	Bulan	102.750.000				3	Bulan	102.750.000	25,00%	102.750.000							

	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	421.200.000				1	Lembaga	421.200.000	1	Lembaga	102.150.000			102.150.000	1	Lembaga	102.150.000	25,00%	102.150.000							
		Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	421.200.000				12	Bulan	421.200.000	3	Bulan	102.150.000				3	Bulan	102.150.000	25,00%	102.150.000							
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Tegal Gundil	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	519.600.000				1	Lembaga	519.600.000	1	Lembaga	129.900.000			129.900.000	1	Lembaga	129.900.000	25,00%	129.900.000							
		Honorarium (BOP) LPM Kelurahan, RT, RW	12	Bulan	519.600.000				12	Bulan	519.600.000	3	Bulan	129.900.000				3	Bulan	129.900.000	25,00%	129.900.000							
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					**25,00%**								
Predikat kinerja																					**Sangat Rendah**								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**25,00%**								
Predikat kinerja																					**Sangat Rendah**								
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan**	**23**	**%**	**3.688.345.832**			**5.840.842.800**			**3.688.345.832**			**1.212.383.501**			**451.877.242**			**1.659.413.943**					**6.933.106.743**		**187,97%**		

	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**100**	**%**	**3.227.947.050**			**5.466.543.700**			**3.227.947.050**			**1.095.143.101**			**362.805.842**			**1.457.948.943**					**6.357.342.643**		**196,95%**		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Bantarjati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.250.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.250.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.250.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00 %	0,00 %			7.250.400		100,0%	Lurah Bantarjati	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	-	0,00 %	0,00 %			-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit	373.949.100	3	Unit	224.294.700	3	Unit	373.949.100	1	Unit	30.613.800	0	Unit	17.893.200	1	Unit	48.507.000	12,97%	48.507.000			272.801.700			Lurah Bantarjati	
			Pembangunan Spitank Komunal RW 01							45	M1		0	M1		0	M1		45	M1	0					-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	14.130.000	3	Pokmas/Ormas	415.605.000	3	Pokmas/Ormas	14.130.000	3	Pokmas/Ormas	2.250.000	0	Pokmas/Ormas	3.375.000	3	Pokmas/Ormas	5.625.000	39,81%	5.625.000			421.230.000		2981,1%	Lurah Bantarjati	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan		3			3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		1	Bulan						-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cibuluh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.750.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.038.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.750.400	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan		0,00 %	0,00 %			11.038.200		142,4%	Lurah Cibuluh	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan						-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	437.936.300	1	Unit	324.043.400	1	Unit	437.936.300	0	Unit	27.848.200	1	Unit	36.461.800	1	Unit	64.310.000	14,68%	64.310.000			388.353.400			Lurah Cibuluh	

			Pembangunan Spitank Komunal							0	M1		0	M1		83	M1		0	M1	-					-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	25.830.000	3	Pokmas/Ormas	307.576.500	3	Pokmas/Ormas	25.830.000	3	Pokmas/Ormas	7.380.000	0	Pokmas/Ormas	6.570.000	3	Pokmas/Ormas	13.950.000	54,01%	13.950.000			321.526.500		1244,8%	Lurah Cibuluh	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-					-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cimahpar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	13.218.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%			13.218.000		209,8%	Lurah Cimahpar	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	-					-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	441.698.800	1	Unit	244.689.900	2	Unit	441.698.800	0	Unit	145.053.070	1	Unit	32.879.000	2	Unit	177.932.070	40,28%	177.932.070			422.621.970		95,7%	Lurah Cimahpar	
			Pembangunan Spitank Komunal							91	M2		0	M2		0	M2		91	M2	-					-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	27.450.000	3	Pokmas/Ormas	438.510.000	3	Pokmas/Ormas	27.450.000	3	Pokmas/Ormas	9.000.000	0	Pokmas/Ormas	9.000.000	3	Pokmas/Ormas	18.000.000	65,57%	18.000.000			456.510.000		1663,1%	Lurah Cimahpar	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-					-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ciparigi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.862.100	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%			8.862.100		131,3%	Lurah Ciparigi	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegia					1	Kegia		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan						-				

					tan						tan																			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	375.481.950	1	Unit	225.000.000	1	Unit	375.481.950	3	Unit	168.709.600	1	Unit	36.351.279	3	Unit	205.060.879	54,61%	205.060.879			430.060.879		114,5%	Lurah Ciparigi	
			Pembangunan Spitank Komunal								M2		0	M2		227	M2			M2						-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	18.000.000	3	Pokmas/Ormas	405.900.000	3	Pokmas/Ormas	18.000.000	3	Pokmas/Ormas	3.600.000	0	Pokmas/Ormas	6.300.000	1	Pokmas/Ormas	9.900.000	55,00%	9.900.000			415.800.000		2310,0%	Lurah Ciparigi	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-					-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ciluar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%			10.800.000		160,0%	Lurah Ciluar	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	-					-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	278.543.500	1	Unit	139.450.000	1	Unit	278.543.500	0	Unit	130.716.286	0	Unit	7.176.150	1	Unit	137.892.436	49,50%	137.892.436			277.342.436		99,6%	Lurah Ciluar	
			Pembangunan Spitank Komunal							120	M1		0	M1		0	M1		120	M1	-					-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	61.672.000	3	Pokmas/Ormas	349.050.000	3	Pokmas/Ormas	61.672.000	3	Pokmas/Ormas	5.302.000	0	Pokmas/Ormas	15.906.000	3	Pokmas/Ormas	21.208.000	34,39%	21.208.000			370.258.000		600,4%	Lurah Ciluar	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-					-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kedung Halang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyaraka	7.295.600	1	Lembaga Kemasyaraka	10.357.500	1	Lembaga Kemasyara	7.295.600	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	-			10.357.500		142,0%	Lurah Kedung Halang	

					tan			tan			katan																			
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan	-					-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	483.811.300			424.973.000	1	Unit	483.811.300	0	Unit	395.342.509	0	Unit	137.755.523	1	Unit	533.098.032	110,19%	533.098.032			958.071.032		198,0%	Lurah Kedung Halang	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	13.860.000			430.800.000	3	Pokmas/Ormas	13.860.000	3	Pokmas/Ormas	3.375.000	0	Pokmas/Ormas	3.375.000	1	Pokmas/Ormas	6.750.000	48,70%	6.750.000			437.550.000		3156,9%	Lurah Kedung Halang	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan						-				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.425.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.425.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan		0,00%	0,00%			6.750.000		90,9%	Lurah Tanah Baru	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan						-				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	260.535.400			225.000.000	1	Unit	260.535.400	1	Unit	123.642.976	1	Unit	18.792.300	1	Unit	142.435.276	54,67%	142.435.276			367.435.276		141,0%	Lurah Tanah Baru	
			Pembangunan Spitank Komunal																											
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	25.830.000	3	Pokmas/Ormas	438.850.000	3	Pokmas/Ormas	25.830.000	3	Pokmas/Ormas	2.565.000	0	Pokmas/Ormas	7.695.000	1	Pokmas/Ormas	10.260.000	39,72%	10.260.000			449.110.000		1738,7%	Lurah Tanah Baru	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan						-				

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tegal Gundil	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.875.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	12.375.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.875.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%			12.375.000		157,1%	Lurah Tegal Gundil	
			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1	Kegiatan					1	Kegiatan		0	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan						-			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	309.322.300			225.000.000	1	Unit	309.322.300	1	Unit	39.744.660	1	Unit	23.275.590	1	Unit	63.020.250	20,37%	63.020.250			288.020.250		93,1%	Lurah Tegal Gundil	
			Pembangunan Spitank Komunal													80	M1			M1						-				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas/Ormas	22.500.000	3	Pokmas/Ormas	567.150.000	3	Pokmas/Ormas	22.500.000	3	Pokmas/Ormas	-			-			-								Lurah Tegal Gundil	
			Belanja Sosialisasi, Pertemuan dan Pembinaan	12	Bulan																									
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**23**	**%**	**460.398.782**			**374.299.100**			**460.398.782**			**117.240.400**			**89.071.400**			**201.465.000**		**201.465.000**			**575.764.100**		**125,06%**		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	344.528.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	274.299.700	1	Lembaga Kemasyarakatan	344.528.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	105.750.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	62.756.800	2	Lembaga Kemasyarakatan	168.506.800	30,69%	168.506.800			442.806.500		128,5%	Kasi Kemasyarakatan	
			Belanja Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan	12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan						-				
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasya	40.000.000	1	Lembaga Kemasya	49.999.800	1	Lembaga Kemas	40.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.782.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	11.940.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	16.722.000	11,96%	16.722.000			66.721.800		166,8%	Kasi Kemasyarakatan	

					rakatan			rakatan			yarakatan																			
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	66.469.982	1	Laporan	39.999.900	1	Laporan	66.469.982	1	Laporan	6.708.400	0	Laporan	9.527.800	1	Laporan	16.236.200	10,09%	16.236.200			56.236.100		84,6%	Kasi Perekonomian	
			Pendataan Pelaku UMKM							1	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						-				
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	9.400.800	1	Laporan	9.999.700	1	Laporan	9.400.800	1	Laporan	0	0	Laporan	4.846.800	1	Laporan	-					9.999.700		106,4%	Kasi Perekonomian	
			Honor Posyantek							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan										
			Sosialisasi TTG							1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan										
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**32,93 %**								
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																						**22,44 %**								
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**								
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	**95**	**%**	**113.907.600**			**78.018.400**			**113.907.600**	**3**		**12.380.000**			**8.621.600**			**21.001.600**	**18,44 %**	**21.001.600**			**99.020.000**				
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**95**	**%**	**113.907.600**			**78.018.400**			**113.907.600**			**12.380.000**			**8.621.600**			**21.001.600**	**18,44 %**	**21.001.600**			**99.020.000**		**86,93%**		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	1	Laporan	113.907.600			78.018.400	1	Laporan	113.907.600	1	Laporan	12.380.000	0	Laporan	8.621.600	1	Laporan	21.001.600	18,44%	21.001.600			99.020.000		86,93%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	

			Wilayah Kecamatan																											
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**55,31 %**								
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																						**55,31 %**								
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**								
4	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	87,57	Nilai																									
			TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN	95	%																									
			Nilai Hasil SURVEY KEPUASAN	**99,26**	**Nilai**	**22.539.067.050**	**100**	**%**	**22.988.127.115**	**-**	**-**	**22.539.067.050**			**4.615.757.706**			**5.469.412.099**			**11.114.555.710**					**16.963.000**		**97,88%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
			Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	**1**	**Inovasi**																									
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu**	**100**	**%**	**16.603.100**			**10.312.200**			**16.603.100**			**2.150.800**			**4.500.000**			**6.650.800**					**16.963.000**				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.604.000			7.235.900	2	Dokumen	8.604.000	0	Dokumen	2.150.800	0	Dokumen	2.000.000	2	Dokumen	4.150.800	48,24%				11.386.700		132,34%		
			Renstra 2025-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024							2	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		2	Dokumen						-				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			7.999.100			3.076.300	1	Laporan	7.999.100	1	Laporan	-	0	Laporan	2.500.000	1	Dokumen	2.500.000					5.576.300		69,71%		

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																											
			Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKIP, SKM, Analisis Risiko dan Laporan Tahunan)							5	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		5	Dokumen										
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**48,24%**								
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**								
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	**95**	**%**	**16.298.460.326**			**16.836.360.399**			**16.298.460.326**			**3.806.438.783**			**4.581.250.768**			**8.387.689.551**					**25.135.814.850**		**154,22%**	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	**100**	**%**																									
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang	16.219.513.526	75	Orang	16.782.985.299	72	Orang	16.219.513.526	3	Bulan	3.789.008.783	25	%	4.563.820.768	3	Bulan	8.352.829.551	51,50%	8.352.829.551			25.135.814.850		154,97%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	69.632.000	1	Laporan	48.817.800	1	Laporan	69.632.000	1	Laporan	17.430.000			17.430.000	1	Laporan	34.860.000	50,06%	34.860.000							
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	9.314.800	1	Laporan	4.557.300	1	Laporan	9.314.800	1	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	-					4.557.300		48,93%		
			Dokumen Laporan Keuangan							2	Dokumen		2	Dokumen		0	Dokumen		2	Dokumen											

																						Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**50,78 %**							
																						Predikat kinerja	**Sangat Rendah**							
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.599.294.356**	**100**	**%**	**2.381.229.400**			**2.599.294.356**			**121.740.850**			**354.787.300**			**1.406.499.680**					**3.787.729.080**		**145,72%**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10.335.600			10.346.000	1	Paket	10.335.600	1	Paket	2.452.500	0	Paket	2.452.500	1	Paket	4.905.000	47,46%	4.905.000			15.251.000		147,56%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Alat Listrik							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan						-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1.219.201.900			961.300.600	1	Paket	1.219.201.900	0	Paket	841.532.980	0	Paket	65.139.900	1	Paket	906.672.880	74,37%	906.672.880			1.867.973.480		153,21%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja ATK							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		9	Bulan	-					-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			20.561.100			12.007.800	1	Paket	20.561.100	0	Paket	5.028.000	0	Paket	5.070.000	1	Paket	10.098.000	49,11%	10.098.000			22.105.800		107,51%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-					-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			381.360.000			359.235.000	1	Paket	381.360.000	0	Paket	47.525.000	0	Paket	37.725.000	1	Paket	85.250.000	22,35%	85.250.000			444.485.000		116,55%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pergesera n
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			20.371.600			22.733.000	1	Paket	20.371.600	0	Paket	3.682.000	0	Paket	3.450.000	1	Paket	7.132.000	35,01%	7.132.000			29.865.000		146,60%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5.811.000			4.700.000	1	Dokumen	5.811.000	0	Dokumen	1.185.000	0	Dokumen	1.200.000	1	Dokumen	2.385.000	41,04%	2.385.000			7.085.000		121,92%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Surat Kabar Kecamatan dan Kelurahan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			186.583.356			170.568.000	1	Laporan	186.583.356	0	Laporan	0	0	Laporan	25.114.000	1	Laporan	-	0,00%	-			170.568.000		91,42%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pergesera n

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Bantarjati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0			0	1	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	1	Paket	0	0,00%	0			9.488.000		92,91%	Lurah Bantarjati	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10.212.200			3.608.000	1	Paket	10.212.200	0	Paket	3.542.000	0	Paket	2.338.000	1	Paket	5.880.000	57,58%	5.880.000			-		#REF!		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-	100,00%				-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			6.257.200			7.763.500	1	Paket	6.257.200	0	Paket	1.971.000	0	Paket	1.985.000	1	Paket	3.956.000	63,22%	3.956.000			11.719.500		187,30%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-					-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			73.662.600			84.785.400	1	Paket	73.662.600	0	Paket	19.060.000	0	Paket	17.115.000	1	Paket	36.175.000	49,11%	36.175.000			120.960.400		164,21%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3.837.600			3.644.400	1	Paket	3.837.600	0	Paket	878.200	0	Paket	1.203.000	1	Paket	2.081.200	54,23%	2.081.200			5.725.600		149,20%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Cibuluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3.086.000			3.089.400	1	Paket	3.086.000	0	Paket	429.000	0	Paket	858.000	1	Paket	1.287.000	41,70%	1.287.000			4.376.400		141,81%	Lurah Cibuluh	
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							3	Bulan	0	12	Buah		0	Buah		3	Buah	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6.051.600			7.567.200	1	Paket	6.051.600	0	Paket	1.646.500	0	Paket	2.005.500	1	Paket	3.652.000	60,35%	3.652.000			11.219.200		185,39%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2.850.900			3.566.400	1	Paket	2.850.900	0	Paket	686.000	0	Paket	1.076.000	1	Paket	1.762.000	61,81%	1.762.000			5.328.400		186,90%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			79.770.000			77.550.000	1	Paket	79.770.000	0	Paket	17.040.000	0	Paket	20.910.000	1	Paket	37.950.000	47,57%	37.950.000			115.500.000		144,79%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4.807.200			5.156.700	1	Paket	4.807.200	0	Paket	1.202.400	0	Paket	1.202.400	1	Paket	2.404.800	50,02%	2.404.800			7.561.500		157,30%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Cimahpar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.059.500			977.600,00	1	Paket	1.059.500	0	Paket	560.000	0	Paket	-	1	Paket	560.000	52,86%	560.000			1.537.600		145,13%	Lurah Cimahpar	
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Buah		3	Buah	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11.080.400			19.972.900,00	1	Paket	11.080.400	0	Paket	3.400.600	0	Paket	1.730.000	1	Paket	5.130.600	46,30%	5.130.600			25.103.500		226,56%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4.964.900			6.429.700	1	Paket	4.964.900	0	Paket	827.000	0	Paket	1.609.000	1	Paket	2.436.000	49,06%	2.436.000			8.865.700		178,57%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			73.200.000			74.600.000	1	Paket	73.200.000	0	Paket	17.850.000	0	Paket	18.075.000	1	Paket	35.925.000	49,08%	35.925.000			110.525.000		150,99%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3.087.200			4.786.500	1	Paket	3.087.200	0	Paket	527.200	0	Paket	1.024.000	1	Paket	1.551.200	50,25%	1.551.200			6.337.700		205,29%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciparigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3.503.700			4.236.000	1	Paket	3.503.700	0	Paket	0	0	Paket	1.702.000	1	Paket	1.702.000	48,58%	1.702.000			5.938.000		169,48%	Lurah Ciparigi	

			Belanja Alat Listrik (Lampu)							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			18.255.200			23.519.500	1	Paket	18.255.200	0	Paket	4.260.000	0	Paket	5.690.000	1	Paket	9.950.000	54,51%	9.950.000			33.469.500		183,34%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5.496.500			10.599.800	1	Paket	5.496.500	0	Paket	0	0	Paket	1.932.300	1	Paket	1.932.300	35,16%	1.932.300			12.532.100		228,00%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			62.040.000			67.320.000	1	Paket	62.040.000	0	Paket	15.450.000	0	Paket	18.615.000	1	Paket	34.065.000	54,91%	34.065.000			101.385.000		163,42%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5.061.200			5.462.600	1	Paket	5.061.200	0	Paket	784.500	0	Paket	800.000	1	Paket	1.584.500	31,31%	1.584.500			7.047.100		139,24%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Ciluar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.119.000			1.689.000	1	Paket	1.119.000	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	-	0,00%	-			1.689.000		150,94%	Lurah Ciluar	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Neon)							25	Buah	0	0	Buah		12	Buah		3	Buah	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12.431.000			14.244.000	1	Paket	12.431.000	0	Paket	2.548.000	0	Paket	3.159.000	1	Paket	5.707.000	45,91%	5.707.000			19.951.000		160,49%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			836.500			1.281.000	1	Paket	836.500	0	Paket	0	0	Paket	-	1	Paket	-	0,00%	-			1.281.000		153,14%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							12	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			67.000.000			75.120.000	1	Paket	67.000.000	0	Paket	12.900.000	0	Paket	20.100.000	1	Paket	33.000.000	49,25%	33.000.000			108.120.000		161,37%		

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4.256.000			4.866.000	1	Paket	4.256.000	0	Paket	851.200	0	Paket	1.276.800	1	Paket	2.128.000	50,00%	2.128.000			6.994.000		164,33%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedung Halang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.363.000			1.187.000	1	Paket	1.363.000	0	Paket	250.000	0	Paket	250.000	1	Paket	500.000	36,68%	500.000			1.687.000		123,77%	Lurah Kedung Halang	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11.783.800			12.926.200	1	Paket	11.783.800	0	Paket	3.604.000	0	Paket	2.724.000	1	Paket	6.328.000	53,70%	6.328.000			19.254.200		163,40%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3.069.000			3.843.600	1	Paket	3.069.000	0	Paket	1.294.500	0	Paket	1.294.500	1	Paket	2.589.000	84,36%	2.589.000			6.432.600		209,60%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			76.635.000			88.620.000	1	Paket	76.635.000	0	Paket	17.865.000	0	Paket	21.465.000	1	Paket	39.330.000	51,32%	39.330.000			127.950.000		166,96%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3.833.200			3.073.200	1	Paket	3.833.200	0	Paket	547.600	0	Paket	1.642.800	1	Paket	2.190.400	57,14%	2.190.400			5.263.600		137,32%		
			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tanah Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.598.700			1.689.000	1	Paket	1.598.700	0	Paket	1.150.000	0	Paket	345.000	1	Paket	1.495.000	93,51%	1.495.000			3.184.000		199,16%	Lurah Tanah Baru	
			Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11.348.600			14.244.000	1	Paket	11.348.600	0	Paket	2.412.000	0	Paket	3.618.000	1	Paket	6.030.000	53,13%	6.030.000			20.274.000		178,65%		

			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			879.600			1.158.300	1	Paket	879.600	0	Paket	840.000	0	Paket	-	1	Paket	840.000	95,50%	840.000			1.998.300		227,18%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			70.960.000			86.820.000	1	Paket	70.960.000	0	Paket	14.340.000	0	Paket	21.180.000	1	Paket	35.520.000	50,06%	35.520.000			122.340.000		172,41%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7.494.400			7.348.500	1	Paket	7.494.400	0	Paket	749.200	0	Paket	2.247.600	1	Paket	2.996.800	39,99%	2.996.800			10.345.300		138,04%		
			Belanja Dekorasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Tegal Gundil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.579.800			0	1	Paket	1.579.800	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	-	0,00%	-			-		0,00%	Lurah Tegal Gundil	
			Belanja Alat Listrik (Lampu)							24	Buah	0	4	Buah		8	Buah		24	Buah	-		-			-				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16.312.500			13.035.900	1	Paket	16.312.500	0	Paket	2.458.000	0	Paket	6.969.000	1	Paket	9.427.000	57,79%	9.427.000			22.462.900		137,70%		
			Belanja Alat Tulis Kantor							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4.838.200			1.363.600	1	Paket	4.838.200	0	Paket	3.427.000	0	Paket	1.224.000	1	Paket	4.651.000	96,13%	4.651.000			6.014.600		124,31%		
			Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			72.980.000			86.010.000	1	Paket	72.980.000	0	Paket	18.570.000	0	Paket	25.770.000	1	Paket	44.340.000	60,76%	44.340.000			130.350.000		178,61%		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6.467.600			7.184.100	1	Paket	6.467.600	0	Paket	1.500.000	0	Paket	1.500.000	1	Paket	3.000.000	46,39%	3.000.000			10.184.100		157,46%		

			Belanja Dokumentasi, Penggandaan dan Penjilidan							3	Bulan	0	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-		-			-					
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**48,93 %**									
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**48,42 %**									
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**									
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**1.998.721.400**	**100**	**%**	**2.101.459.116**			**1.998.721.400**			**632.899.873**			**469.524.958**			**1.102.424.831**					**3.203.883.947**		**160,30%**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			316.815.21			276.960.300	1	Laporan	316.815.21	0	Laporan	59.301.759	0	Laporan	66.567.470	1	Laporan	125.869.229	18,72%	125.869.229			402.829.529		#VALUE!	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Listrik, Telepon dan Air Kecamatan dan Kelurahan							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	-					-					
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1.998.721.400			1.824.498.816	1	Laporan	1.998.721.400	0	Laporan	573.598.114	0	Laporan	402.957.488	1	Laporan	976.555.602	48,86%	976.555.602			2.801.054.418		140,14%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakan Kerja (52 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100,00%									
			Belanja Iuran Jaminan Kematian (52 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100,00%									
			Belanja Premi BPJS Kesehatan (10 Orang)							12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan		100,00%									
			Front Office Kecamatan (2 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%									
			Front Office Kelurahan (10 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%									
			Pengemudi (2 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%									
			Tenaga Keamanan Kecamatan (2 oang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%									

			Tenaga Keamanan Kelurahan (10 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%								
			Tenaga Kebersihan Kecamatan (2 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%								
			Tenaga Kebersihan Kelurahan (8 orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%								
			Tenaga Pendukung Administrasi Kecamatan (10 Orang)							13	Bulan		3	Bulan		4	Bulan		13	Bulan		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**89,81%**								
Predikat kinerja																						**Sangat Tinggi**								
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**1.625.987.868**	**85**	**%**	**1.658.766.000**			**1.625.987.868**			**52.527.400**			**59.349.073**			**211.290.848**	**58,18%**				**1.870.056.848**		**115,01%**		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			176.594.868			161.400.000	5	Unit	176.594.868	5	Unit	36.897.400	0	Unit	40.269.073	5	Unit	77.166.473	43,70%	77.166.473			238.566.473		135,09%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Belanja Jasa Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua							1	Tahun		0	Tahun		1	Tahun		1	Tahun	-	100,00%				-				
			Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat							5	unit		2	unit		1	unit		5	unit	-	100,00%				-				
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			70.840.000			60.820.000	1	Unit	70.840.000	0	Unit	15.630.000	0	Unit	19.080.000	1	Unit	34.710.000	49,00%	34.710.000			95.530.000		134,85%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan AC							45	unit		0	unit		16	unit		45	unit	-	100,00%				-				
			Pemeliharaan Komputer							40	unit		0	unit		0	unit		40	unit	-	100,00%				-				
			Pemeliharaan Printer dan Scanner							20	unit		5	unit		3	unit		20	unit	-	100,00%				-				
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang			1.378.553.000			1.436.546.000	9	Unit	1.378.553.000	0	Unit	99.414.375	0	Unit	-	9	Unit	99.414.375	7,21%	99.414.375			1.535.960.375		111,42%	Kasubag Umum dan	

			Dipelihara/Direhabilitasi																									Kepegawaian	
			Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan							9	unit		-	unit		0	unit		9	unit		0,00 %								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**66,66 %**								
Predikat kinerja																						**Sedang**								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																						**38,36 %**								
Predikat kinerja																						**Sangat Rendah**								
5	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan**	**23**	**%**	**196.004.356**	**3,46**	**Point**	**69.856.800**			**196.004.356**			**54.949.156**			**-**			**56.948.956**	**83,15 %**				**172.244.400**		**87,88%**		
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**1**	**laporan**	**137.061.800**			**20.000.000**			**137.061.800**			**-**						**-**	**0,00%**				**172.244.400**		**79,57%**		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			137.061.800			172.244.400	1	Laporan	137.061.800	1	Laporan	0	0	Laporan		1	Laporan	-	0,00 %	0,00 %			172.244.400		125,67%	Kasi Pemerintahan	
			Instansi Vertikal Terkait							1	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		0,00 %								
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan							1	Kegiatan		-	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		0,00 %								
			Sosialisasi Pertanahan							1	Kegiatan		-	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		0,00 %								
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																						**0,00%**								

																					Predikat kinerja	**Sangat Rendah**								
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**33,33 %**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Rendah**								
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**IKM terhadap penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan**	**3,3**	**Point**	**58.942.556**			**49.856.800**			**58.942.556**			**54.949.156**						**56.948.956**					**104.805.956**		**56,24%**		
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			56.971.156			47.857.000	1	Dokumen	56.971.156	0	Dokumen	54.949.156	0	Dokumen	-	1	Dokumen	54.949.156	96,45%	54.949.156			102.806.156		180,45%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
			Musrenbang Tingkat Kecamatan							1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan		1	Kegiatan		0,00 %				-				
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.971.400			1.999.800	1	Laporan	1.971.400	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	-	0,00 %	0,00 %			1.999.800		101,44%	Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan	
			Monev Pembangunan Sarpras							8	Kelurahan		-	Kelurahan		16	Kelurahan		8	Kelurahan		100,00%								
			Penyebarluasan Informasi Perizinan Pembangunan							8	Kelurahan		-	Kelurahan		0	Kelurahan		8	Kelurahan		100,00%								
																					Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)	**96,54 %**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								
																					Rata-rata capaian kinerja Program (%)	**96,54 %**								
																					Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**								

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		**53,64 %**								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		**Rendah**								
JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN			**29.916.540.054**			**28.983.445.115**			**29.916.540.054**			7.660.231.688			**7.566.961.745**			**15.227.193.433**		**51,43 %**			**7.227.934.143**			

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, sarana dan prasarana kerja yang tersedia memadai, pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas dalam pencapaian target kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurang meratanya kapasitas dan kualitas SDM, Kurang tersedianya data-data yang diperlukan yang tersusun secara sistematis dan akurat, kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): .....
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya): .....**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2025

3.1 UNSUR WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Bahwa Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp. 601.679.684,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 172.750.000,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 288.929.684,-

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah untuk DED Kelurahan Cibuluh dan Ciluar sebesar Rp. 140.000.000;

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Utara Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Utara.

Lampiran hh. Kecamatan Bogor Timur

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 Disusun BerdasarkanHasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Timur

Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sampai dengan triwulan dua tahun 2025.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);

19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
21. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2025sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bogor Timur

Renja perubahan Kecamatan Bogor Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 5 program dengan anggaran sebesar Rp. 24.710.862.446,- dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 11.540.190.921 atau 46.70%, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Maret 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																									
	7.01.01	**KECAMATAN**					**22,525,512,117**	**100**	**24,710,862,446**		**4,612,284,715**		**6,927,906,206**		**-**		**-**		**11,540,190,921**		**46.70**		**34,065,703,038**				
		BIDANG URUSAN																									
		PROGRAM																									
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang Aktif**				**6,600,000**	**100**	**1,889,400,000**		**313,800,000**		**487,250,000**		**-**		**-**		**801,050,000**		**42.40**		**807,650,000**				

		KEGIATAN																									
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan**				**6,600,000**	**100**	**1,889,400,000**		**313,800,000**		**487,250,000**		**-**		**-**		**801,050,000**		**42.40**		**807,650,000**				
		SUB KEGIATAN																									

	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya				6,600,000	100	6,600,000		-		1,650,000						1,650,000		25.00		8,250,000				
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Baranangsiang	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	430,800,000		71,800,000		107,700,000						179,500,000		41.67		179,500,000				

	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Sukasari	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	204,000,000		34,000,000		51,000,000						85,000,000		41.67		85,000,000				
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Katulampa	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	635,400,000		105,900,000		158,850,000						264,750,000		41.67		264,750,000				

	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Tajur	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	144,000,000		24,000,000		36,000,000						60,000,000		41.67		60,000,000				
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Sindangrasa	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	289,800,000		48,300,000		72,450,000						120,750,000		41.67		120,750,000				

	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kelurahan Sindangsari	Jumlah Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya					100	178,800,000		29,800,000		59,600,000						89,400,000		50.00		89,400,000				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**42.40**						
Predikat kinerja																											
		PROGRAM																									
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**18,272,231,331**	**100**	**20,216,751,251**		**3,954,144,690**		**5,147,644,131**		**-**		**-**		**9,101,788,821**		**45.02**		**27,374,020,152**				

			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah																								
		KEGIATAN																									
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah**				**46,622,200**		**143,629,300**		**7,135,600**		**131,705,200**		**-**		**-**		**138,840,800**		**96.67**		**185,463,000**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,850,000	100	12,233,400		7,135,600		4,989,200						12,124,800		99.11		14,974,800				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				43,772,200	100	131,395,900		-		126,716,000						126,716,000		96.44		170,488,200				

		KEGIATAN																									
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**13,079,046,844**	**100**	**13,180,602,334**		**2,928,938,968**		**3,420,750,870**		**-**		**-**		**6,349,689,838**		**48.17**		**19,428,736,682**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13,026,689,144	100	13,064,919,934		2,914,417,168		3,381,398,970						6,295,816,138		48.19		19,322,505,282				
	7.01.01.2.02.05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,801,000	100	14,323,000		-		8,845,900						8,845,900		61.76		11,646,900				
	7.01.01.2.02.06	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					49,556,700	100	101,359,400		14,521,800		30,506,000						45,027,800		44.42		94,584,500				
		KEGIATAN																									

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**2,663,328,650**	**100**	**2,294,592,905**		**550,895,700**		**742,238,100**		**-**		**-**		**1,293,133,800**		**56.36**		**3,956,462,450**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11,588,500	100	11,581,600		-		11,581,600						11,581,600		100.00		23,170,100				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Baranangsiang					4,766,800	100	4,743,000		-		2,139,000						2,139,000		45.10		6,905,800				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sukasari					1,008,800	100	1,008,800		-		562,800						562,800		55.79		1,571,600				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Katulampa					3,262,800	100	3,262,800		1,657,000		1,605,800						3,262,800		100.00		6,525,600				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tajur					1,357,000	100	1,356,300		1,356,300		-						1,356,300		100.00		2,713,300				

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sindangrasa					3,998,900	100	3,977,000		1,597,000		2,380,000						3,977,000		100.00		7,975,900				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sindangsari					836,000	100	832,900		832,900		-						832,900		100.00		1,668,900				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				928,121,300	100	887,328,839		163,603,000		490,300,000						653,903,000		73.69		1,582,024,300				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Baranangsiang					6,218,200	100	4,935,600		1,996,300		1,894,900						3,891,200		78.84		10,109,400				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukasari					6,471,300	100	10,700,400		1,641,100		2,836,000						4,477,100		41.84		10,948,400				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Katulampa					8,157,300	100	8,157,300		1,822,400		1,822,400						3,644,800		44.68		11,802,100				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tajur					1,268,700	100	1,014,700		1,014,700		-						1,014,700		100.00		2,283,400				

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sindangrasa					7,998,600	100	7,969,200		1,365,000		3,494,800						4,859,800		60.98		12,858,400				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sindangsari					4,594,000	100	5,091,500		5,091,500		-						5,091,500		100.00		9,685,500				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18,345,400	100	18,337,500		18,337,500		-						18,337,500		100.00		36,682,900				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Baranangsiang					2,754,500	100	2,099,100		1,830,900		268,200						2,099,100		100.00		4,853,600				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sukasari					1,288,900	100	5,262,000		1,180,200		1,535,300						2,715,500		51.61		4,004,400				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga katulampa					1,826,200	100	1,826,200		981,800		-						981,800		53.76		2,808,000				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tajur					2,348,100	100	1,868,800		-		1,868,800						1,868,800		100.00		4,216,900				

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sindangrasa					9,994,100	100	9,981,700		3,471,400		-						3,471,400		34.78		13,465,500				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sindangsari					1,491,000	100	1,486,700		1,486,700		-						1,486,700		100.00		2,977,700				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				455,114,100	100	413,667,700		51,128,600		65,763,300						116,891,900		28.26		572,006,000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Baranangsiang					95,420,000	100	95,420,000		3,915,000		22,050,000						25,965,000		27.21		121,385,000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sukasari					81,355,000	100	71,180,000		11,260,000		7,560,000						18,820,000		26.44		100,175,000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Katulampa					93,270,000	100	93,260,000		15,290,000		19,180,000						34,470,000		36.96		127,740,000				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Tajur					78,810,000	100	78,620,000		19,894,000		19,007,000						38,901,000		49.48		117,711,000				

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sindangrasa					72,205,000	100	72,204,800		13,270,000		24,149,800						37,419,800		51.82		109,624,800				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Sindangsari					78,000,000	100	78,000,000		13,450,000		19,365,000						32,815,000		42.07		110,815,000				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				40,843,900	100	40,769,700		-		19,438,500						19,438,500		47.68		60,282,400				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Baranangsiang					3,165,300	100	2,531,900		1,212,000		-						1,212,000		47.87		4,377,300				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sukasari					1,457,700	100	1,848,800		-		462,400						462,400		25.01		1,920,100				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Katulampa					1,688,700	100	1,688,800		-		-						-		0.00		1,688,700				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Tajur					2,216,200	100	1,772,800		-		443,600						443,600		25.02		2,659,800				

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sindangrasa					4,303,800	100	4,303,600		718,600		1,075,400						1,794,000		41.69		6,097,800				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sindangsari					1,079,000	100	1,079,800		661,800		-						661,800		61.29		1,740,800				
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7,200,000	100	11,622,000		600,000		2,310,000						2,910,000		25.04		10,110,000				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulltasi SKPD				619,503,550	100	333,801,066		210,230,000		19,143,500						229,373,500		68.72		848,877,050				
		KEGIATAN																									
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**1,661,390,669**	**100**	**1,824,668,470**		**450,296,422**		**340,396,671**		**-**		**-**		**790,693,093**		**43.33**		**2,452,083,762**				
		SUB KEGIATAN																									

	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik				217,771,289	100	231,476,470		32,712,025		49,658,444						82,370,469		35.58		300,141,758				
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Jasa Pelayanan Umum kantor				1,443,619,380	100	1,593,192,000		417,584,397		290,738,227						708,322,624		44.46		2,151,942,004				
		KEGIATAN																									
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah**				**821,842,968**	**100**	**2,773,258,242**		**16,878,000**		**512,553,290**		**-**		**-**		**529,431,290**		**19.09**		**1,351,274,258**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi nya pajak kendaraan dinas operasional				242,025,630	100	301,370,242		14,280,000		22,440,000						36,720,000		12.18		278,745,630				
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara nya AC				50,825,000	100	22,490,000		-		16,390,000						16,390,000		72.88		67,215,000				

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur				528,992,338	100	2,449,398,000		2,598,000		473,723,290						476,321,290		19.45		1,005,313,628				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**45.02**						
Predikat kinerja																											
		PROGRAM																									
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**				**165,623,600**	**100**	**62,197,800**		**19,642,600**		**9,973,800**		**-**		**-**		**29,616,400**		**47.62**		**195,240,000**				
		KEGIATAN																									
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**				**43,150,000**	**100**	**31,313,800**		**-**		**3,229,400**		**-**		**-**		**3,229,400**		**10.31**		**46,379,400**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.02.2.02.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pembinaan RT, RW dan LPM				43,150,000	100	31,313,800		-		3,229,400						3,229,400		10.31		46,379,400				
		KEGIATAN																									

	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan**				**122,473,600**	**100**	**30,884,000**		**19,642,600**		**6,744,400**		**-**		**-**		**26,387,000**		**85.44**		**148,860,600**				
		SUB KEGIATAN																										
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Musrenbang Tk Kecamatan				100,000,000	100	19,642,600		19,642,600		-						19,642,600		100.00		119,642,600				
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monev Sarpras, Pengendalian Pembangunan , dan Updating Data Sarpras				22,473,600	100	11,241,400		-		6,744,400						6,744,400		60.00		29,218,000				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**47.62**						
Predikat kinerja																											
		PROGRAM																									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**				**4,010,265,336**	**100**	**2,474,019,295**		**312,223,450**		**1,274,723,575**		**-**		**-**		**1,586,947,025**		**64.14**		**5,597,212,361**				
		KEGIATAN																									

	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kelurahan**				**3,772,402,636**	**100**	**2,188,108,100**		**297,823,450**		**1,166,438,175**		**-**		**-**		**1,464,261,625**		**66.92**		**5,236,664,261**				
		SUB KEGIATAN																									
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baranangsiang					7,675,000	100	7,675,000		-		-						-		0.00		7,675,000				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukasari					4,418,300	100	4,485,000		-		-						-		0.00		4,418,300				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Katulampa					11,795,000	100	11,744,800		-		-						-		0.00		11,795,000				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tajur					10,000,000	100	10,000,000		-		-						-		0.00		10,000,000				

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sindangrasa					9,500,000	100	9,500,000		-		-						-		0.00		9,500,000				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sindangsari					10,000,000	100	10,000,000		-		-						-		0.00		10,000,000				
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baranangsiang					303,082,736	1 Paket	447,080,000		47,553,500		177,720,670						225,274,170		50.39		528,356,906				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukasari					512,601,304	1 Paket	483,047,000		95,002,500		273,438,804						368,441,304		76.27		881,042,608				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katulampa					376,843,635	1 Paket	421,079,800		127,026,350		287,594,003						414,620,353		98.47		791,463,988				

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tajur					128,831,535	1 Paket	238,850,200		8,711,100		75,594,208						84,305,308		35.30		213,136,843				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindangrasa					203,270,611	1 Paket	280,105,200		2,750,000		253,713,975						256,463,975		91.56		459,734,586				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindangsari					316,134,515	1 Paket	178,476,100		4,840,000		65,814,515						70,654,515		39.59		386,789,030				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baranangsiang					430,450,000	100	13,950,000		4,500,000		4,725,000						9,225,000		66.13		439,675,000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukasari					204,000,000	100	10,515,000		1,890,000		2,010,000						3,900,000		37.09		207,900,000				

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa					631,200,000	100	16,600,000		-		16,600,000						16,600,000		100.00		647,800,000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur					144,000,000	100	15,000,000		2,700,000		5,400,000						8,100,000		54.00		152,100,000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa					289,800,000	100	15,000,000		-		182,000						182,000		1.21		289,982,000				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari					178,800,000	100	15,000,000		2,850,000		3,645,000						6,495,000		43.30		185,295,000				
		KEGIATAN																									
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**				**237,862,700**	**100**	**285,911,195**		**14,400,000**		**108,285,400**		**-**		**-**		**122,685,400**		**42.91**		**360,548,100**				

		SUB KEGIATAN																										
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Bina Wilayah PKK Kecamatan				77,914,800	100	76,368,000		12,400,000		18,600,000						31,000,000		40.59		108,914,800				
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				79,475,000	100	60,701,012		-		16,874,100						16,874,100		27.80		96,349,100				
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengadaan Festival Bazar Ramadhan				60,804,700	100	119,634,253		-		57,501,300						57,501,300		48.06		118,306,000				
	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Terlaksananya Pemanfaatan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna				19,668,200	100	29,207,930		2,000,000		15,310,000						17,310,000		59.26		36,978,200				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**64.14**							
Predikat kinerja																												
		PROGRAM																										
	7,01,04	**Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketretiban Umum yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan**				**70,791,850**		**68,494,100**		**12,473,975**		**8,314,700**		**-**		**-**		**20,788,675**		**30.35**		**91,580,525**				
		KEGIATAN																										

	7,01,04,2,01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketretiban Umum yang diselesaikan di Tingkat Kecamatan**				**70,791,850**		**68,494,100**		**12,473,975**		**8,314,700**		**-**		**-**		**20,788,675**		**30.35**		**91,580,525**				
		SUB KEGIATAN																										
	7,01,04,2,01,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				70,791,850	100	68,494,100		12,473,975		8,314,700						20,788,675		30.35		91,580,525				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					**30.35**							
Predikat kinerja																												
							22,525,512,117		**24,710,862,446**		**4,612,284,715**		**6,927,906,206**		**-**		**-**		**11,540,190,921**		**46.70**		**34,065,703,038**				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					**46.70**							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																												

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOGOR TIMUR TAHUN 2025

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp. 257.754.255 dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 85.400.000;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 54.000.000;

Adapun sub kegiatan yang berkurang anggarannya yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 193.154.074;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 271.290.320

Rencana Perubahan Kecamatan Bogor Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Bogor Timur

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						KECAMATAN BOGOR TIMUR							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
1	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan	-			-	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
	7	01				KECAMATAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

2	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 1		Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 Persent ase	100 Persentase	154.909.2 00,00	149.897.0 00,00	149.897.000 ,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 1	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokum en	7 Dokumen	22.850.00 0,00	18.280.00 0,00	12.233.400, 00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	132.059.200,00	131.617.000,00	131.395.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 Persentase	100 Persentase	12.974.480.301,00	13.196.127.934,00	13.196.127.934,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	12.830.149.801,00	13.064.919.934,00	13.421.696.883,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	25.090.500,00	20.072.200,00	14.323.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	119.240.000,00	111.135.800,00	101.359.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.581.600,00	11.581.600,00	11.581.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.100.976.395,00	1.273.421.995,00	683.328.839,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.337.500,00	18.337.500,00	18.337.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	474.507.700,00	465.057.700,00	413.667.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.877.000,00	40.769.700,00	40.769.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.622.000,00	11.622.000,00	11.622.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	14 Laporan	703.828.532,00	633.619.132,00	333.801.066,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	1.824.668.470,00	1.824.668.470,00	1.824.668.470,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	231.476.470,00	231.476.470,00	285.476.470,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.593.192.000,00	1.593.192.000,00	1.593.192.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 Persentase	100 Persentase	2.796.107.242,00	2.795.018.242,00	2.795.018.242,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	318.070.242,00	301.370.242,00	301.370.242,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

				9	06												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	44.250.000,00	44.250.000,00	22.490.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	2.433.787.000,00	2.449.398.000,00	2.449.398.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan kelompok				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	175.303.386,00	79.553.600,00	62.197.800,00		

							rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)										
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			1 Laporan	1 Laporan	52.830.000,00	41.932.200,00	41.932.200,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	52.830.000,00	41.932.200,00	31.313.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan (7 Pelayanan)	-			100 Persentase	100 Persentase	122.473.386,00	37.621.400,00	37.621.400,00		
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.786,00	19.642.600,00	19.642.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	22.473.600,00	17.978.800,00	11.241.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 Persentase	100 Persentase	372.267.215,00	326.488.195,00	326.488.195,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	77.914.800,00	77.211.600,00	76.368.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	80.684.918,00	66.526.712,00	60.701.012,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	187.999.497,00	143.521.553,00	119.634.253,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				12 Laporan	12 Laporan	25.668.000,00	39.228.330,00	29.207.930,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat				88.1 Persentase	88.1 Persentase	73.999.800,00	69.512.500,00	68.494.100,00		

							kecamatan										
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			88,1 Persentase	88,1 Persentase	73.999.800,00	69.512.500,00	69.512.500,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	73.999.800,00	69.512.500,00	68.494.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN BARANANGSIANG							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

6	2	1 3	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		

	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	430.800.000,00	430.800.000,00	455.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
	7	01				KECAMATAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

7	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.743.000,00	4.743.000,00	4.743.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.217.600,00	4.935.600,00	4.935.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.733.000,00	2.099.100,00	2.099.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)

	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.420.000,00	95.420.000,00	95.420.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.165.100,00	2.531.900,00	2.531.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)										
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.675.000,00	7.675.000,00	7.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	472.154.200,00	447.080.000,00	447.080.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan

																	Dukungan Pendanaan Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	19.980.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN SUKASARI							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
9	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	204.000.000,00	204.000.000,00	215.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
	7	01				KECAMATAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

1 0	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.008.800,00	1.008.800,00	1.008.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.700.400,00	10.700.400,00	10.700.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.262.000,00	5.262.000,00	5.262.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	71.180.000,00	71.180.000,00	71.180.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.848.800,00	1.848.800,00	1.848.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							kelurahan)										
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	483.047.000,00	483.047.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN KATULAMPA							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
12	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	635.400.000,00	635.400.000,00	671.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00	
	7	01				KECAMATAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00	

1 3	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.262.800,00	3.262.800,00	3.262.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.157.300,00	8.157.300,00	8.157.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.826.200,00	1.826.200,00	1.826.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.260.000,00	93.260.000,00	93.260.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.688.800,00	1.688.800,00	1.688.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							kelurahan)										
	7	0 1	0 3	2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.744.800,00	11.744.800,00	11.744.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	452.736.900,00	421.079.800,00	421.079.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
	7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											

		1	3	0 2	0 0 3												
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	25.000.000,00	16.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN TAJUR							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
1 5	2	1 3	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		

						Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota											
	2	13	05	2.01	002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	152.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

	7	0 1				KECAMATAN							23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
1 6	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Penanganan Pengaduan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.356.300,00	1.356.300,00	1.356.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.268.500,00	1.014.700,00	1.014.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.345.400,00	1.868.800,00	1.868.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.620.000,00	78.620.000,00	78.620.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.216.000,00	1.772.800,00	1.772.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							kelurahan)										
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	258.576.500,00	238.850.200,00	238.850.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN SINDANGRASA							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
18	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	289.800.000,00	289.800.000,00	306.050.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
	7	01				KECAMATAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

1 9	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Transparansi pengelolaan keuangan daerah Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.969.200,00	7.969.200,00	7.969.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.981.700,00	9.981.700,00	9.981.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.204.800,00	72.204.800,00	72.204.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.303.600,00	4.303.600,00	4.303.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							(kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan)										
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	306.564.800,00	280.105.200,00	280.105.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						KELURAHAN SINDANGSARI							25.553.347.141,00	25.559.068.168,00	25.024.389.395,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		
21	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif				100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.996.150.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00	1.889.400.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				12 Dokumen	12 Dokumen	178.800.000,00	178.800.000,00	188.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		
	7	01				KECAMATAN						23.663.947.141,00	23.669.668.168,00	23.028.239.395,00		

2 2	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah Persentase kepatuhan penganggaran Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan				100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	100 100 11,18 18,56 28,87 28,89 90,01 90,76 93,06 94,46 94 95 persen Persentase Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persentase Persentase	20.692.605.240,00	20.997.605.773,00	20.423.528.200,00		

							Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA											

	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	2.942.440.027,00	3.031.894.127,00	3.031.894.127,00		
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	832.900,00	832.900,00	832.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.592.200,00	5.091.500,00	5.091.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.488.900,00	1.486.700,00	1.486.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

					4												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.079.000,00	1.079.800,00	1.079.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kelurahan Persentase keterwakilan kelompok rentan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan) Persentase keterwakilan perempuan dalam musrenbang kecamatan (kumulatif kelurahan Persentase keterwakilan Anak dalam musrenbang				100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	100 1 20 2 Persentase Persentase Persentase Persentase	2.722.038.715,00	2.522.996.295,00	2.474.019.295,00		

							kecamatan (kumulatif kelurahan)										
	7	0 1	0 3	2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase	100 Persentase	2.349.771.500,00	2.196.508.100,00	2.196.508.100,00		
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7	0 1	0 3	2. 0 2	0 0 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	199.839.300,00	178.476.100,00	178.476.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Keluraha

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H												**25.553.347.141,00**	**25.559.068.168,00**	**25.024.389.395,00**		

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bogor Timur Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogor Timur.

Lampiran ii. Kecamatan Tanah Sareal

BAB I
PENDAHULUA
N

1.1 Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2025 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tanah SarealTahun 2025. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2025, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 Disusun Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian Pembangunan di Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengantriwulan I (satu) tahun 2025.

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanah

Sareal Kota Bogor Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sampai dengan

triwulan satu tahun 2025.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019

Nomor 11 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentag Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 184 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan
23. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor ..... Seri .....);

1.4 Sistematika Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD
1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan
1.3 Dasar Hukum Perubahan RKPD
1.4 Sistematika Perubahan RKPD

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Sareal Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja KECAMATAN TANAH SAREAL Tahun 2025

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANAH SAREAL TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Renja perubahan Kecamatan Tanah Sareal Bogor Kota Bogor Tahun 2025 dalam pelaksanaan Urusan urusan wajib non pelayanan dasar melaksanakan 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 39.339.710.036, dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan I sebesar Rp. 7.804.278.312,- atau 19,84 %, masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan I disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi anggarannya karena dianggarkan di triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) tetapi secara fisik telah mulai dilaksanakan.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan III sehingga realisasi program/kegiatan sampai kondisi Maret 2025 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan. Adapun Capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN III			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)	
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100%		14 = 6+12	15 = 14/5*100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT) Tingkat Kecamatan yang aktif**	**75**	**%**	**3.386.494.800**			**-**	**75**	**%**	**3.774.094.800**	**75**	**%**	**891.245.949**																	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	**3.386.494.800**			**-**	**100**	**%**	**3.774.094.800**	**100**	**%**	**891.245.949**			**-**			**-**			**-**						**4.648.915.949**		137,3%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tanah Sareal	**Persentase partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (LPM,RW, RT) Tingkat Kecamatan dan kelurahan**	**100**	**%**	16.424.800			18.880.900			16.424.800			1.650.000										Lembaga	1.650.000	10,05%	10,05%		18.074.800		110,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tanah Sareal	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	195.600.000	5	Lembaga	-	1	Dokumen	195.600.000	0	Dokumen	48.900.000,00										Lembaga	48.900.000	25,00%	25,00%		244.500.000		125,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kebon Pedes	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	387.600.00	-	-	-	1	Dokumen	387.600.000	0	Dokumen	96.900.000,00										Lembaga	96.900.000	25,00%	25,00%		484.500.000		#VALUE!
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kedung Badak	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	498.000.000	-	-	-	1	Dokumen	498.000.000	0	Dokumen	119.575.950,00										Lembaga	119.575.950	24,01%	24,01%		617.575.950		124,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kedung Jaya	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	227.400.000	-	-	-	1	Dokumen	227.400.000	0	Dokumen	52.350.000,00										Lembaga	52.350.000	23,02%	23,02%		279.750.000		123,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kedung Waringin	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	391.200.000	-	-	-	1	Dokumen	391.200.000	0	Dokumen	97.799.999,00										Lembaga	97.799.999	25,00%	25,00%		488.999.999		125,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sukadamai	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	309.000.000	-	-	-	1	Dokumen	309.000.000	0	Dokumen	77.250.000,00										Lembaga	77.250.000	25,00%	25,00%		386.250.000		125,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sukaresmi	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	216.470.000	-	-	-	1	Dokumen	216.470.000	0	Dokumen	54.370.000,00										Lembaga	54.370.000	25,12%	25,12%		270.840.000		125,1%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Cibadak	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	398.400.000	-	-	-	1	Dokumen	398.400.000	0	Dokumen	99.600.000,00										Lembaga	99.600.000	25,00%	25,00%		498.000.000		125,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kencana	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	447.000.000	-	-	-	1	Dokumen	447.000.000	0	Dokumen	72.750.000,00										Lembaga	72.750.000	16,28%	16,28%		519.750.000		116,3%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Mekarwangi	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	393.000.000	-	-	-	1	Dokumen	393.000.000	0	Dokumen	98.250.000,00										Lembaga	98.250.000	25,00%	25,00%		491.250.000		125,0%
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kayumanis	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Dokumen	294.000.000	-	-	-	1	Dokumen	294.000.000	0	Dokumen	73.500.000,00										Lembaga	73.500.000	25,00%	25,00%		367.500.000		125,0%
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**8,33%**				
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**				
	Rata-rata capaian kinerja Program (%)																										**8,33%**				
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**				

2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	100	%	**6.341.730.526**			**7.247.833.604**	100	%	**6.341.730.526**	100	%																	**8.558.957.073**		**134,96%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan**	**100**	**%**	**5.854.291.236**			**6.784.726.405**	**100**	**%**	**5.854.291.236**	**100**	**%**	**1.228.055.069**			-	-		-			-							**8.012.781.474**		**136,87%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tanah Sareal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.419.300	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.312.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.419.300	0	Lembaga Kemasyarakatan	-									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		1.312.000		13,9%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	299.046.025	2	Unit	152.250.000	2	Unit	299.046.025	0	Unit	**151.575.761**									0	Unit	151.575.761	50,69%	50,69%		303.825.761		101,6%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	299.046.025	3	Pokmas / Ormas	195.600.000	1	Pokmas / Ormas	299.046.025	0	Pokmas / Ormas	-									0	Pokmas / Ormas	-	0,00%	0,00%		195.600.000		65,4%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kebon Pedes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.475.600	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.475.600	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.675.000		67,1%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	676.573.800	2	Unit	363.391.200	2	Unit	676.573.800	0	Unit	186.047.100,00									0	Unit	186.047.100	27,50%	27,50%		549.438.300		81,2%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	kmas / Orm	9.165.000	5	Pokmas / Ormas	447.498.000	5	Pokmas / Ormas	9.165.000	0	Pokmas / Ormas	-									0	Pokmas / Ormas	-	0,00%	0,00%		447.498.000		4882,7%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kedung Badak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	6.529.300	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	6.529.300	0	Lembaga Kemasyarakatan	670.000,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	670.000	10,26%	10,26%		4.000.000		61,3%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	714.385.600	2	Unit	298.744.700	1	Unit	714.385.600	0	Unit	288.208.009,00									0	Unit	288.208.009	40,34%	40,34%		586.952.709		82,2%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	11.325.000	3	Pokmas / Ormas	498.000.000	1	Pokmas / Ormas	11.325.000	0	Pokmas / Ormas	1.875.200,00									0	Pokmas / Ormas	1.875.200	16,56%	16,56%		499.875.200		4413,9%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kedung Jaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	5.381.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	3	Lembaga Kemasyarakatan	5.381.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	0									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.330.000		61,9%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	332.599.800	2	Unit	166.349.945	2	Unit	332.599.800	0	Unit	51.624.340									0	Unit	51.624.340	15,52%	15,52%		217.974.285		65,5%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	12.270.000	3	Pokmas / Ormas	227.400.000	1	Pokmas / Ormas	12.270.000	0	Pokmas / Ormas	712.800									0	Pokmas / Ormas	712.800	5,81%	5,81%		228.112.800		1859,1%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kedung Waringin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	13.800.100	6	Lembaga Kemasyarakatan	5.930.400	1	Lembaga Kemasyarakatan	13.800.100	0	Lembaga Kemasyarakatan	-									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		5.930.400		43,0%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	427.393.000	2	Unit	243.389.000	1	Unit	427.393.000	0	Unit	50.203.540,00									0	Unit	50.203.540	11,75%	11,75%		293.592.540		68,7%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	15.000.000	3	Pokmas / Ormas	391.200.000	1	Pokmas / Ormas	15.000.000	1	Pokmas / Ormas	8.994.800,00									1	Pokmas / Ormas	8.994.800	59,97%	59,97%		400.194.800		2668,0%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukadamai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	8.503.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.521.300	3	Lembaga Kemasyarakatan	8.503.400	0	Lembaga Kemasyarakatan										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		4.521.300		53,2%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	515.857.066	2	Unit	388.907.070	1	Unit	515.857.066	0	Unit	326.763.351									0	Unit	326.763.351	63,34%	63,34%		715.670.421		138,7%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	12.285.000	3	Pokmas / Ormas	378.321.000	1	Pokmas / Ormas	12.285.000	0	Pokmas / Ormas	6.881.600									0	Pokmas / Ormas	6.881.600	56,02%	56,02%		385.202.600		3135,6%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukaresmi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.467.640	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.375.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.467.640	0	Lembaga Kemasyarakatan										0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.375.000		39,9%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	362.551.760	2	Unit	183.270.090	2	Unit	362.551.760	0	Unit	12.549.040,00									0	Unit	12.549.040	3,46%	3,46%		195.819.130		54,0%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	13.275.000	3	Pokmas / Ormas	201.000.000	1	Pokmas / Ormas	13.275.000	0	Pokmas / Ormas	5.828.400,00									0	Pokmas / Ormas	5.828.400	43,91%	43,91%		206.828.400		1558,0%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Cibadak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.240.800	3	Lembaga Kemasyarakatan	8.726.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.240.800	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		8.726.300		139,8%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	478.418.920	2	Unit	279.700.000	1	Unit	478.418.920	0	Unit	24.621.158,00									0	Unit	24.621.158	5,15%	5,15%		304.321.158		63,6%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	12.270.000	3	Pokmas / Ormas	398.400.000	1	Pokmas / Ormas	12.270.000	0	Pokmas / Ormas	0,00									0	Pokmas / Ormas	-	0,00%	0,00%		398.400.000		3246,9%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kencana	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.796.400	6	Lembaga Kemasyarakatan	16.700.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	8.796.400	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		16.700.000		189,9%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	Unit	732.781.100	1	Unit	250.565.400	1	Unit	732.781.100	0	Unit	56.315.920,00									0	Unit	56.315.920	7,69%	7,69%		306.881.320		41,9%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	15.141.400	3	Pokmas / Ormas	442.800.000	1	Pokmas / Ormas	15.141.400	0	Pokmas / Ormas	0,00									0	Pokmas / Ormas	-	0,00%	0,00%		442.800.000		2924,4%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mekarwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	8.188.200	6	Lembaga Kemasyarakatan	3.330.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	8.188.200	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		3.330.000		40,7%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	322.781.000	2	Unit	249.100.000	4	Unit	322.781.000	0	Unit	36.079.300,00									0	Unit	36.079.300	11,18%	11,18%		285.179.300		88,4%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	12.972.200	3	Pokmas / Ormas	393.000.000	1	Pokmas / Ormas	12.972.200	0	Pokmas / Ormas	6.553.000,00									0	Pokmas / Ormas	6.553.000	50,52%	50,52%		399.553.000		3080,1%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Kayumanis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.216.300	1	Lembaga Kemasyarakatan	63.660.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	6.216.300	0	Lembaga Kemasyarakatan	0,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0,00%	0,00%		63.660.000		1024,1%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	479.815.500	3	Unit	223.950.000	2	Unit	479.815.500	0	Unit	12.551.750,00									0	Unit	12.551.750	2,62%	2,62%		236.501.750		49,3%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	kmas / Orm	12.320.000	3	Pokmas / Ormas	294.000.000	1	Pokmas / Ormas	12.320.000	0	Pokmas / Ormas	0,00									0	Pokmas / Ormas	-	0,00%	0,00%		294.000.000		2386,4%
																										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)						
																										10,05%						
																										Predikat kinerja						
																										Sangat Rendah						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Pembangunan Wilayah**	**0,3**	**%**	**487.439.290**			**463.107.199**			**487.439.290**																			**546.175.599**		**112,05%**
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	**3,4**	**Point**										**83.068.400**			-															
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1	Lembaga Kemasyarakatan	280.920.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	244.720.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	280.920.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	61.350.000,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	61.350.000	21,84%	21,84%		306.070.000		109,0%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	199.459.290	1	Lembaga Kemasyarakatan	200.337.199	1	Lembaga Kemasyarakatan	199.459.290	0	Lembaga Kemasyarakatan	13.520.000,00									0	Lembaga Kemasyarakatan	13.520.000	6,78%	6,78%		213.857.199		107,2%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	1.060.000	1	Laporan	12.050.000	1	Laporan	1.060.000	0	Laporan	5.698.400,00									0	Laporan	5.698.400	537,58%	537,58%		17.748.400		1674,4%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	6.000.000	1	Laporan	6.000.000	1	Laporan	6.000.000	0	Laporan	2.500.000,00									0	Laporan	2.500.000	41,67%	41,67%		8.500.000		141,7%
																										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)						
																										151,97%						
																										Predikat kinerja						
																										Sangat Tinggi						
																										Rata-rata capaian kinerja Program (%)						
																										153,97%						
																										Predikat kinerja						
																										Sangat Tinggi						
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan**	90	**%**	**123.066.600**			**100.586.500**	90	**%**	**123.066.600**	90	**%**	**16.339.400**			-			-			-							**116.925.900**		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	88.1	**Point**	**123.066.600**			**100.586.500**	88.1	**Point**	**123.066.600**	88.1	**Point**																	**116.925.900**		**95,01%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	123.066.600	1	Laporan	100.586.500	1	Laporan	123.066.600	0	Laporan	16.339.400,00									0	Laporan	16.339.400	13,28%	13,28%		116.925.900		95,01%
																										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)						
																										13,28%						
																										Predikat kinerja						
																										Sangat Rendah						
																										Rata-rata capaian kinerja Program (%)						
																										13,28%						
																										Predikat kinerja						
																										Sangat Rendah						

4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	%	**33.396.474.949**	**100**	**%**	**36.713.217.068**			**33.396.474.949**																			**42.723.554.392**		**0,03%**	
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	13.00	Nilai																													
		Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	27.01	Nilai																													
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	25.5	Nilai																													
		Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan Prasarana	81,01	%																													
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Layanan	88,04	%																													
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,08	%																													
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	%																													
		Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	%										**2.582.300**			-			-			-										
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100	%	**13.705.000**			-			**13.705.000**																			**2.582.300**			
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	%																													
		Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	95	%																													
		Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	95	%																													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	6.500.000	1	Dokumen		3	Dokumen	6.500.000	0	Dokumen	1.269.500,00										-	Dokumen	1.269.500	19,53%	19,53%		1.269.500		19,53%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	7.205.000	1	Laporan		2	Laporan	7.205.000	0	Laporan	1.312.800										-	Dokumen	1.312.800	18,22%	18,22%		1.312.800		18,22%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																											**18,88%**						
Predikat kinerja																											**Sangat Rendah**						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu**	100	%	**20.772.685.769**	**100**	**%**	**28.468.889.822**	100	%	**20.772.685.769**			**4.680.047.020**			-			-										**33.130.241.642**		**159,49%**	
		Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	95	%					95	%																							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang/bulan	20.688.479.369	99	Orang/bulan	28.467.728.522	98	Orang/bulan	20.688.479.369	98	Orang/bulan	4.662.513.120,00										98	Orang/bulan	4.662.513.120	22,54%	22,54%		33.130.241.642		160,14%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.666.400	1	Laporan	1.161.300	1	Laporan	7.666.400	0	Laporan	-										-	Laporan	-	0,00%	0,00%		1.161.300		15,15%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	76.540.000	1		41.226.600	1	Laporan	76.540.000	0	Laporan	17.533.900,00										-	Laporan	17.533.900	22,91%	22,91%		58.760.500		76,77%	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																											**11,27%**						
Predikat kinerja																											**Sangat Rendah**						

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.484.679.827**	**100**	**%**	**2.273.639.941**	**100**	**%**	**2.484.679.827**			**498.618.900**			**-**			**-**			**-**						**2.772.258.841**		**111,57%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	28.917.879	1	Paket	11.962.400	1	Paket	28.917.879	1	Paket										1	Paket	-	0,00%	0,00%	11.962.400		41,37%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	353.677.648	12	Paket	151.626.888	12	Paket	353.677.648	3	Paket	90.550.100,00									3	Paket	90.550.100	25,60%	25,60%	242.176.988		68,47%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	139.329.600	1	Paket	97.895.892	1	Paket	139.329.600	0	Paket	28.676.000,00									0	Paket	28.676.000	20,58%	20,58%	126.571.892		90,84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	235.719.000	1	Paket	263.816.748	1	Paket	235.719.000	0	Paket	40.057.500,00									0	Paket	40.057.500	16,99%	16,99%	303.874.248		128,91%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	32.568.200	1	Paket	74.434.713	1	Paket	32.568.200	0	Paket	3.678.400,00									0	Paket	3.678.400	11,29%	11,29%	78.113.113		239,84%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	625.278.200	1	Laporan	538.029.000	1	Laporan	625.278.200	0	Laporan	57.380.000,00									-	Laporan	57.380.000	9,18%	9,18%	595.409.000		95,22%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tanah Sareal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.147.800	1	Paket	3.975.500	1	Paket	2.147.800	0	Paket	2.147.800,00									0	Paket	2.147.800	100,00%	100,00%	6.123.300		285,10%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.208.300	1	Paket	10.309.400	1	Paket	8.208.300	0	Paket	4.928.500,00									0	Paket	4.928.500	60,04%	60,04%	15.237.900		185,64%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	8.994.500	1	Paket	11.248.100	1	Paket	8.994.500	0	Paket	4.180.000,00									0	Paket	4.180.000	46,47%	46,47%	15.428.100		171,53%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	52.575.000	1	Paket	55.890.000	1	Paket	52.575.000	0	Paket	8.865.000,00									0	Paket	8.865.000	16,86%	16,86%	64.755.000		123,17%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.873.600	1	Paket	2.342.400	1	Paket	1.873.600	0	Paket	936.800,00									0	Paket	936.800	50,00%	50,00%	3.279.200		175,02%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keboa Pedes	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.224.800	1	Paket	2.311.600	1	Paket	2.224.800	0	Paket	1.481.000,00									0	Paket	1.481.000	66,57%	66,57%	3.792.600		170,47%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.958.600	1	Paket	12.931.800	1	Paket	11.958.600	0	Paket	3.902.100,00									0	Paket	3.902.100	32,63%	32,63%	16.833.900		140,77%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.422.200	1	Paket	3.038.200	1	Paket	2.422.200	0	Paket	1.234.000,00									0	Paket	1.234.000	50,95%	50,95%	4.272.200		176,38%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	94.590.000	1	Paket	76.555.000	1	Paket	94.590.000	0	Paket	20.040.000,00									0	Paket	20.040.000	21,19%	21,19%	96.595.000		102,12%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.094.400	1	Paket	6.033.000	1	Paket	3.094.400	0	Paket	1.442.500,00									0	Paket	1.442.500	46,62%	46,62%	7.475.500		241,58%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedung Badak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.653.400	1	Paket	3.798.000	1	Paket	2.653.400	0	Paket	1.396.000									0	Paket	1.396.000	52,61%	52,61%	5.194.000		195,75%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	26.240.400	1	Paket	30.408.000	1	Paket	26.240.400	0	Paket	12.568.400,00									0	Paket	12.568.400	47,90%	47,90%	42.976.400		163,78%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	807.000	1	Paket	1.010.400	1	Paket	807.000	0	Paket	807.000,00									0	Paket	807.000	100,00%	100,00%	1.817.400		225,20%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.395.000	1	Paket	78.175.000	1	Paket	62.395.000	0	Paket	13.940.000,00									0	Paket	13.940.000	22,34%	22,34%	92.115.000		147,63%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	737.200	1	Paket	921.600	1	Paket	737.200	0	Paket	368.000									0	Paket	368.000	49,92%	49,92%	1.289.600		174,93%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedung Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.240.200	1	Paket	4.475.000	1	Paket	5.240.200	0	Paket	1.257.100,00									0	Paket	1.257.100	23,99%	23,99%	5.732.100		109,39%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.988.200	1	Paket	12.071.400	1	Paket	10.988.200	0	Paket	3.363.000,00									0	Paket	3.363.000	30,61%	30,61%	15.434.400		140,46%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.671.700	1	Paket	3.524.000	1	Paket	2.671.700	0	Paket	656.200,00									0	Paket	656.200	24,56%	24,56%	4.180.200		156,46%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	81.090.000	1	Paket	63.390.000	1	Paket	81.090.000	0	Paket	14.690.000,00									0	Paket	14.690.000	18,12%	18,12%	78.080.000		96,29%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	10.403.600	1	Paket	2.713.800	1	Paket	10.403.600	0	Paket	3.223.200									0	Paket	3.223.200	30,98%	30,98%	5.937.000		57,07%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kedung Waringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.407.800	1	Paket	2.528.000	1	Paket	2.407.800	0	Paket	1.406.800,00									0	Paket	1.406.800	58,43%	58,43%	3.934.800		163,42%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.962.500	1	Paket	15.690.400	1	Paket	14.962.500	0	Paket	4.648.600,00									0	Paket	4.648.600	31,07%	31,07%	20.339.000		135,93%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.881.000	1	Paket	2.915.400	1	Paket	2.881.000	0	Paket	988.500,00									0	Paket	988.500	34,31%	34,31%	3.903.900		135,51%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	82.650.000	1	Paket	86.210.000	1	Paket	82.650.000	0	Paket	16.950.000,00									0	Paket	16.950.000	20,51%	20,51%	103.160.000		124,82%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	11.890.800	1	Paket	9.037.600	1	Paket	11.890.800	0	Paket	2.449.900,00									0	Paket	2.449.900	20,60%	20,60%	11.487.500		96,61%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sukadamai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.465.300	1	Paket	3.114.500	1	Paket	3.465.300	0	Paket	1.550.400									0	Paket	1.550.400	44,74%	44,74%	4.664.900		134,62%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.480.800	1	Paket	13.819.300	1	Paket	15.480.800	0	Paket	6.289.900,00									0	Paket	6.289.900	40,63%	40,63%	20.109.200		129,90%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.330.000	1	Paket	4.164.500	1	Paket	3.330.000	0	Paket	989.900,00									0	Paket	989.900	29,73%	29,73%	5.154.400		154,79%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	61.510.000	1	Paket	67.995.000	1	Paket	61.510.000	0	Paket	12.995.000,00									0	Paket	12.995.000	21,13%	21,13%	80.990.000		131,67%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.091.100	1	Paket	6.895.700	1	Paket	1.091.100	0	Paket	183.200,00									0	Paket	183.200	16,79%	16,79%	7.078.900		648,79%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sukaresmi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.245.100	1	Paket	4.991.300	1	Paket	4.245.100	0	Paket	1.110.200,00									0	Paket	1.110.200	26,15%	26,15%	6.101.500		143,73%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.716.000	1	Paket	12.199.300	1	Paket	7.716.000	0	Paket	6.450.200,00									0	Paket	6.450.200	83,60%	83,60%	18.649.500		241,70%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.584.400	1	Paket	1.967.000	1	Paket	1.584.400	0	Paket	1.584.400,00									0	Paket	1.584.400	100,00%	100,00%	3.551.400		224,15%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.775.000	1	Paket	76.860.000	1	Paket	55.775.000	0	Paket	10.880.000,00									0	Paket	10.880.000	19,51%	19,51%	87.740.000		157,31%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.389.200	1	Paket	4.287.200	1	Paket	3.389.200	0	Paket	974.800,00									0	Paket	974.800	28,76%	28,76%	5.262.000		155,26%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Cibadak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.446.800	1	Paket	2.623.200	1	Paket	2.446.800	0	Paket	2.446.800									0	Paket	2.446.800	100,00%	100,00%	5.070.000		207,21%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	11.733.700	1	Paket	14.781.300	1	Paket	11.733.700	0	Paket	4.003.600,00									0	Paket	4.003.600	34,12%	34,12%	18.784.900		160,09%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.491.200	1	Paket	4.402.000	1	Paket	3.491.200	0	Paket	3.491.200,00									0	Paket	3.491.200	100,00%	100,00%	7.893.200		226,09%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	76.695.000	1	Paket	81.510.000	1	Paket	76.695.000	0	Paket	14.760.000,00									0	Paket	14.760.000	19,25%	19,25%	96.270.000		125,52%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.719.400	1	Paket	7.857.200	1	Paket	3.719.400	0	Paket	-									0	Paket	-	0,00%	0,00%	7.857.200		211,25%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kencana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.071.100	1	Paket	4.985.600	1	Paket	6.071.100	0	Paket	3.702.900,00									0	Paket	3.702.900	60,99%	60,99%	8.688.500		143,11%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.618.400	1	Paket	19.532.600	1	Paket	15.618.400	0	Paket	6.271.600,00									0	Paket	6.271.600	40,16%	40,16%	25.804.200		165,22%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.528.300	1	Paket	5.322.000	1	Paket	3.528.300	0	Paket	3.528.300,00									0	Paket	3.528.300	100,00%	100,00%	8.850.300		250,84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	72.390.000	1	Paket	77.850.000	1	Paket	72.390.000	0	Paket	16.665.000,00									0	Paket	16.665.000	23,02%	23,02%	94.515.000		130,56%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	6.460.800	1	Paket	5.371.100	1	Paket	6.460.800	0	Paket	2.512.600,00									0	Paket	2.512.600	38,89%	38,89%	7.883.700		122,02%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mekarwangi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.754.500	1	Paket	-	1	Paket	3.754.500	0	Paket	1.885.500,00									0	Paket	1.885.500	50,22%	50,22%	1.885.500		50,22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13.548.500	1	Paket	10.560.400	1	Paket	13.548.500	0	Paket	5.196.800,00									0	Paket	5.196.800	38,36%	38,36%	15.757.200		116,30%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.865.700	1	Paket	4.833.400	1	Paket	3.865.700	0	Paket	1.900.000,00									0	Paket	1.900.000	49,15%	49,15%	6.733.400		174,18%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	78.015.000	1	Paket	82.465.000	1	Paket	78.015.000	0	Paket	15.310.000,00									0	Paket	15.310.000	19,62%	19,62%	97.775.000		125,33%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.096.000	1	Paket	2.349.100	1	Paket	1.096.000	0	Paket	0,00									0	Paket	-	0,00%	0,00%	2.349.100		214,33%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kayumanis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.236.000	1	Paket	3.236.500	1	Paket	3.236.000	0	Paket	1.313.500,00									0	Paket	1.313.500	40,59%	40,59%	4.550.000		140,61%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.086.240	1	Paket	16.007.900	1	Paket	18.086.240	0	Paket	6.960.700,00									0	Paket	6.960.700	38,49%	38,49%	22.968.600		126,99%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	3.040.400	1	Paket	3.807.600	1	Paket	3.040.400	0	Paket	1.700.000,00									0	Paket	1.700.000	55,91%	55,91%	5.507.600		181,15%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	77.850.000	1	Paket	85.325.000	1	Paket	77.850.000	0	Paket	15.750.000,00									0	Paket	15.750.000	20,23%	20,23%	101.075.000		129,83%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	847.360	1	Paket	5.257.000	1	Paket	847.360	0	Paket	0,00									0	Paket	-	0,00%	0,00%	5.257.000		620,40%
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																									**27,37%**					
	Predikat kinerja																									**Sangat Rendah**					

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD**	**100**	**%**	**6.993.675.598**	**85**	**%**	**4.458.846.479**	**100**	**%**	**6.993.675.598**			**300.320.000**			**-**												**4.759.166.479**		**68,05%**	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel disediakan	71	Unit	183.284.800			338.707.017			183.284.800													0	Unit	-	0,00%	0,00%		338.707.017		184,80%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	70	Unit	295.698.098			871.848.462			295.698.098			**294.590.000**										0	Unit	294.590.000	99,63%	99,63%		1.166.438.462		394,47%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6.514.692.700	1	Unit	3.248.291.000	1	Unit	6.514.692.700	0	Unit	5.730.000,00										0	Unit	5.730.000	0,09%	0,09%		3.254.021.000		49,95%	
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**0,09%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**1.847.570.076**	**100**	**%**	**388.387.268**	**100**	**%**	**1.847.570.076**			**468.203.584**			**-**												**856.590.852**		**46,36%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	297.603.100	1	Laporan	190.500.000	1	Laporan	297.603.100	0	Laporan	58.001.772,00										0	Laporan	58.001.772	19,49%	19,49%		248.501.772		83,50%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.549.966.976	1	Laporan	197.887.268	1	Laporan	1.549.966.976	0	Laporan	410.201.812,00										0	Laporan	410.201.812	26,47%	26,47%		608.089.080		39,23%	
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**22,98%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik**	**100**	**%**	**1.284.158.679**	**85**	**%**	**1.123.453.558**	**100**	**%**	**1.284.158.679**																		**1.202.714.278**		**93,66%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	185.260.693	45	Unit	190.500.000	23	Unit	185.260.693	6	Unit	48.160.720,00										6	Unit	48.160.720	26,00%	26,00%		238.660.720		128,82%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	205.589.986	214	Unit	197.887.268	120	Unit	205.589.986	10	Unit	31.100.000,00										10	Unit	31.100.000	15,13%	15,13%		228.987.268		111,38%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	893.308.000	5	Unit	735.066.290	4	Unit	893.308.000	1	Unit											1	Unit	-	0,00%	0,00%		735.066.290		82,29%	
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**13,71%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
	Rata-rata capaian kinerja Program (%)																										**13,71%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan**	**100**	**%**	**249.850.800**	**3,46**	**Point**	**206.507.100**	**100**	**%**	**249.850.800**																		**206.507.100**		**82,65%**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**100**	**%**	**153.068.800**			**206.507.100**	**100**	**%**	**153.068.800**						**-**												**206.507.100**		**74,12%**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	153.068.800	1	Laporan	206.507.100	1	Laporan	153.068.800	1	Laporan	-										1	Laporan	-	0,00%	0,00%		206.507.100		134,91%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**100**	**%**				-																					-			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								1	Kegiatan		**0**	**Kegiatan**	-		**Kegiatan**		**Kegiatan**						0	Kegiatan	-	0,00%					
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**0,00%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur**	100	**Point**	**96.782.000**			-	100	**Point**	**96.782.000**			**65.278.000**			**-**			-									**137.203.000**		**70,54%**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	82.272.000	1	Dokumen	71.925.000	1	Dokumen	82.272.000	0	Dokumen	65.278.000,00										0	Dokumen	65.278.000	79,34%	79,34%		137.203.000		166,77%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	14.510.000			0,00	1	Laporan	14.510.000	0	Laporan	-											Dokumen	-	0,00%	0,00%		-		0,00%	
	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																										**79,34%**					
	Predikat kinerja																										**Tinggi**					
	Rata-rata capaian kinerja Program (%)																										**39,67%**					
	Predikat kinerja																										**Sangat Rendah**					
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																										**45,39%**					
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																										**Sangat Rendah**					
	JUMLAH REALISASI BIDANG URUSAN				**43.018.634.777**			**43.170.740.393**			**43.406.234.777**			**8.018.429.342**			**-**			-			-			**8.314.669.342**		**19,16%**	**51.605.944.465**		**83,36%**	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TANAH SAREAL TAHUN 2025

3.1 Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar

Bahwa Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor menjalankan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Dengan tambahan Anggaran yang diajukan dalam renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp. 531.368.019,- dengan rincian sub kegiatannya adalah sebagai berikut;

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp. 212.000.000,-;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 319.368.019,-
3. Adapun Sub Kegiatan yang berkurang adalah Penyelenggaraan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 204.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Renstra Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025-2026 Dan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah SarealTahun 2025, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kota Bogor

Perubahan Renja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan progran kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2025 dalam menjalankan peran dan fungsinya .

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanah Sareal.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BOGOR

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.I

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM